



**PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 21 TAHUN 2019**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH
KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2020**

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN 2019**



WALIKOTA LHOKSEUMAWE
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE

NOMOR 2\ TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Pasal 23 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
 - b. bahwa untuk pelaksanaan pembangunan di daerah harus memiliki dokumen Rencana Kerja Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2020, yang merupakan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun 2020;
 - c. bahwa untuk mewujudkan perencanaan partisipatif maka perlu melibatkan masyarakat dalam perencanaan pembangunan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2020;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota Lhokseumawe tentang Rencana Kerja Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887);
13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Nomor 1 Tahun 2018 Tentang tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus.
16. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh (RPJPA) Tahun 2012-2032;
17. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Aceh Tahun 2012-2032;
18. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam;
19. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2017-2022 (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 111);
20. Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus;
21. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Lhokseumawe Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2014 Nomor 4);
22. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022 (Lembaran Kota Lhokseumawe Tahun 2018 Nomor 7).

Menetapkan : MEMUTUSKAN:
PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH KOTA LHOEKSEUMAWE TAHUN 2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Lhokseumawe.
2. Pemerintahan Kota adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kotayang terdiri atas Walikota Lhokseumawe dan Perangkat Daerah.
4. Walikota adalah Walikota Lhokseumawe.
5. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Lhokseumawe.
6. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe.
8. Organisasi Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disingkat OPD Kota Lhokseumawe adalah Organisasi Perangkat Kota Lhokseumawe yang meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota, Dinas, Badan dan Sekretariat Lembaga Keistimewaan.
9. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Lembaga yang mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan Pemerintahan di bidang Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan di Kota Lhokseumawe yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota Lhokseumawe melalui Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe.
10. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe.
11. Rencana Kerja Pemerintah Kota yang selanjutnya disingkat RKPK adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

13. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPK untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPK sebelum disepakati dengan DPRK.
14. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
15. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
16. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
17. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
18. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Kota yang selanjutnya disebut Renstra-SKPK adalah Dokumen Perencanaan SKPK untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Tata Ruang Wilayah, Musyawarah Rencana Pembangunan, Anggaran Pendapatan Belanja Kota.

Pasal 2

RKPK Lhokseumawe Tahun 2020 adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 3

RKPK Lhokseumawe Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun berdasarkan Prioritas Pembangunan Tahunan Nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020.

Pasal 4

RKPK Lhokseumawe Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Kota, DPRK dan masyarakat dalam melaksanakan program pembangunan yang telah diprioritaskan selama 1 (satu) tahun, dan dituangkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Tahun 2020.

Pasal 5

RKPK Lhokseumawe Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan
- Bab II Gambaran Umum Kondisi Kota
- Bab III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Kota
- Bab IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Kota
- Bab V Rencana Kerja dan Pendanaan Kota
- Bab VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Kota
- BabVII Penutup

Pasal 6

Sistematika RKPK Lhokseumawe Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 7

RKPK Lhokseumawe Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman:

- a. Sebagai Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode Tahun 2020;
- b. OPD dalam penyusunan Renja-OPD; dan
- c. Dokumen Pedoman Penyusunan KU-APBK dan PPAS-APBK Lhokseumawe Tahun 2020.

Pasal 8

- (1) Kepala Bappeda sesuai dengan kewenangannya melakukan pemantauan terhadap pencapaian sasaran pelaksanaan RKPK Lhokseumawe Tahun 2020 yang dituangkan dalam Renja-OPD.
- (2) Bappeda menyusun rancangan awal RKPK Lhokseumawe Tahun 2020.
- (3) Kepala Bappeda mengkoordinasikan penyusunan rancangan RKPK Lhokseumawe Tahun 2020 menggunakan Rancangan Renja-OPD.

Pasal 9

Dalam rangka menyusun RAPBK Tahun 2020:

- a. Pemerintah Kota menggunakan RKPK Lhokseumawe Tahun 2020 sebagai bahan Pembahasan KU-APBK dan PPAS-APBK dengan DPRK;
- b. OPD menggunakan RKPK Tahun 2020 dalam melakukan pembahasan RAPBK dengan DPRK.

Pasal 10

Indikasi program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam matrik Program Pembangunan Daerah dari RKPK ini yang telah disepakati dalam forum Musrenbang bersama DPRK, Stakeholder dan OPD dapat disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan keuangan daerah serta perkembangan aturan perundang-undangan.

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 16 Agustus 2019 M
15 Dzulhijjah 1440 H



Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 16 Agustus 2019 M
15 Dzulhijjah 1440 H



BERITA KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2019 NOMOR

PENJELASAN
PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2020

I. PENJELASAN UMUM

Penyusunan RKPK Kota Lhokseumawe Tahun 2020 merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang menegaskan bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah. Adapun pedoman penyusunan RKPK Lhokseumawe mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai pengganti dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010.

RKPK Lhokseumawe mempunyai kedudukan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini dikarenakan dokumen RKPK Lhokseumawe merupakan acuan bagi Walikota dan DPRK Lhokseumawe dalam menentukan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Kota (KU-APBK) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang selanjutnya digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (RAPBK) Lhokseumawe.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

TAMBAHAN BERITA KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2019 NOMOR

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan.....	I-2
1.3. Hubungan Antar Dokumen.....	I-4
1.4. Sistematika Dokumen RPKK.....	I-4
1.5. Maksud dan Tujuan	I-5
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI KOTA	II-1
2.1. Kondisi Umum.....	II-1
2.1.1. Aspek Geografi.....	II-1
2.1.1.1. Wilayah Kota.....	II-1
2.1.1.2. Kemiringan Lereng.....	II-3
2.1.1.3. Geologi.....	II-4
2.1.1.4. Hidrologi	II-5
2.1.1.5. Penggunaan Lahan	II-5
2.1.1.6. Daerah Rawan Bencana.....	II-7
2.1.1.7. Suhu dan Temperatur.....	II-8
2.1.1.8. Curah Hujan dan Penyinaran Matahari	II-9
2.1.1.9. Tekanan Udara dan Kelembaban Nisbi	II-10
2.1.1.10. Arah dan Kecepatan Angin.....	II-10
2.1.2. Aspek Demografi.....	II-11
2.1.2.1. Jumlah Penduduk	II-11
2.1.2.2. Kepadatan Penduduk	II-12
2.1.3. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-13
2.1.3.1. Fokus Kesejahteraan Ekonomi.....	II-13
2.1.3.1.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)....	II-13
2.1.3.1.2. Laju Inflasi.....	II-16
2.1.3.1.3. PDRB Per Kapita.....	II-17
2.1.3.1.4. Indeks Rasio Gini.....	II-19
2.1.3.1.5. Persentase Penduduk Diatas Garis Kemiskinan.....	II-20
2.1.3.2. Fokus Kesejahteraan Sosial	II-21
2.1.3.2.1. Pendidikan	II-21
2.1.3.2.2. Kesehatan	II-23
2.1.3.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga	II-25
2.1.3.3.1. Kebudayaan	II-26
2.1.3.3.2. Pemuda dan Olahraga.....	II-26
2.1.4. Aspek Pelayanan Umum	II-27
2.1.4.1. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	II-27
2.1.4.1.1. Pendidikan	II-27
2.1.4.1.2. Kesehatan	II-38

2.1.4.1.3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	II-72
2.1.4.1.4.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman.....	II-79
2.1.4.1.5.	Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat.....	II-82
2.1.4.1.6.	Sosial.....	II-85
2.1.4.2.	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	II-89
2.1.4.2.1.	Tenaga Kerja	II-90
2.1.4.2.2.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	II-91
2.1.4.2.3.	Pangan.....	II-96
2.1.4.2.4.	Pertanahan	II-97
2.1.4.2.5.	Lingkungan Hidup	II-98
2.1.4.2.6.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	II-99
2.1.4.2.7.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	II-103
2.1.4.2.8.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.....	II-109
2.1.4.2.9.	Perhubungan	II-112
2.1.4.2.10.	Komunikasi dan Informatika	II-117
2.1.4.2.11.	Koperasi dan Usaha Kecil & Menengah.....	II-118
2.1.4.2.12.	Penanaman Modal.....	II-119
2.1.4.2.13.	Kepemudaan dan Olahraga	II-121
2.1.4.2.14.	Statistik	II-123
2.1.4.2.15.	Kebudayaan	II-124
2.1.4.2.16.	Perpustakaan.....	II-127
2.1.4.2.17.	Kearsipan.....	II-130
2.1.4.3.	Urusan Pemerintahan Pilihan	II-131
2.1.4.3.1.	Pariwisata	II-131
2.1.4.3.2.	Pertanian	II-133
2.1.4.3.3.	Perdagangan	II-135
2.1.4.3.4.	Perindustrian	II-136
2.1.4.3.5.	Kelautan dan Perikanan.....	II-137
2.1.4.4.	Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan	II-139
2.1.4.4.1.	Perencanaan	II-140
2.1.4.4.2.	Keuangan.....	II-142
2.1.4.4.3.	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan....	II-143
2.1.4.4.4.	Pengawasan	II-145
2.1.4.5.	Urusan Keistimewaan dan Kekhususan	II-147
2.1.4.5.1.	Syariat Islam	II-147
2.1.4.5.2.	Majelis Ulama	II-150
2.1.5.	Aspek Daya Saing Daerah.....	II-152
2.1.5.1.	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah	II-152
2.1.5.2.	Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur	II-153
2.1.5.3.	Fokus Iklim Investasi	II-154
2.1.5.4.	Fokus Sumber Daya Manusia	II-157
2.2.	Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RPKP Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMK.....	II-160

2.2.1. Capaian Indikator Makro	II-160
2.2.2. Realisasi Terhadap Proyeksi Kebijakan Keuangan	II-161
2.2.2.1. Realisasi Pendanaan	II-161
2.2.2.2. Realisasi Pendapatan	II-162
2.2.2.3. Realisasi Belanja.....	II-163
2.2.2.4. Realisasi Pembiayaan.....	II-164
2.2.3. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan	II-165
2.2.3.1. Metode Evaluasi.....	II-165
2.2.3.2. Hasil Evaluasi.....	II-169
2.2.3.2.1. Capaian Anggaran.....	II-169
2.2.3.2.2. Capaian Kinerja	II-171
2.2.3.2.3. Capaian dan Predikat Capaian Kinerja	II-245
2.3. Permasalahan Pembangunan Kota Lhokseumawe.....	II-249
2.3.1. Dinul Islam, Keistimewaan dan Sosial Budaya	II-249
2.3.2. Ekonomi, Industri dan Pariwisata.....	II-250
2.3.3. Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	II-250
2.3.4. Pelayanan Kesehatan.....	II-250
2.3.5. Penataan Birokrasi Pemerintah.....	II-250
2.3.6. Infrastruktur dan Lingkungan Hidup.....	II-250
BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN KOTA.....	III-1
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Kota	III-1
3.1.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	III-1
3.1.2. Pertumbuhan Ekonomi.....	III-3
3.1.3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita.....	III-5
3.1.4. Laju Inflasi	III-7
3.1.5. Perkiraan Perekonomian Lhokseumawe 2019 dan 2020	III-8
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Kota	III-10
3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Kota Lhokseumawe	III-10
3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Kota Lhokseumawe	III-15
3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Kota Lhokseumawe.....	III-18
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA	IV-1
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan	IV-1
4.2. Misi	IV-1
4.3. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Tahun 2020	IV-13
4.4. Standar Pelayanan Minimal Kota Lhokseumawe	IV-66
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KOTA	V-1
BAB VI KINERJA PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN KOTA ...	VI-1
BAB VII PENUTUP	VII-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rata-rata Temperatur Maximum dan Minimum Kota Lhokseumawe Tahun 2017	II-8
Tabel 2.2	Banyaknya Curah Hujan, Hari Hujan dan Penyinaran Matahari di Kota Lhokseumawe Tahun 2017	II-9
Tabel 2.3	Rata-rata Tekanan Udara dan Kelembaban Nisbi Kota Lhokseumawe Tahun 2017	II-10
Tabel 2.4	Arah Angin, Kecepatan rata-rata, dan Kecepatan Angin Maksimum Kota Lhokseumawe Tahun 2017	II-11
Tabel 2.5	Jumlah Penduduk Kota Lhokseumawe Tahun 2017	II-11
Tabel 2.6	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah) Kota Lhokseumawe Tahun 2013-2017	II-14
Tabel 2.7	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah) Kota Lhokseumawe Tahun 2013-2017	II-15
Tabel 2.8	Perbandingan Laju Inflasi Nasional, Kota Banda Aceh dan Kota Lhokseumawe Tahun 2017	II-17
Tabel 2.9	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kota Lhokseumawe Tahun 2016	II-28
Tabel 2.10	Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Kota Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016	II-29
Tabel 2.11	Angka Partisipasi Murni (APM) Kota Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016	II-30
Tabel 2.12	Angka Partisipasi Murni (APM) Jenjang SD/MI Kota Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016	II-31
Tabel 2.13	Angka Partisipasi Murni (APM) Jenjang SMP/MTs Kota Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016	II-31
Tabel 2.14	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Jenjang SD/MI Kota Lhokseumawe Tahun 2013 s.d 2016	II-32
Tabel 2.15	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Jenjang SMP/MTs Kota Lhokseumawe Tahun 2013 s.d 2016	II-32
Tabel 2.16	Angka Putus Sekolah (APS) Kota Lhokseumawe Tahun 2012s.d 2016	II-33
Tabel 2.17	Angka Kelulusan Kota Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016	II-34
Tabel 2.18	Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs Kota Lhokseumawe Tahun 2016 s.d 2017	II-34

Tabel 2.19	Angka Melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/MA/SMK Kota Lhokseumawe Tahun 2016 s.d 2017	II-35
Tabel 2.20	Kondisi Ruang Kondisi Baik Kota Lhokseumawe Tahun 2014 s.d 2016.....	II-36
Tabel 2.21	Jumlah Sekolah dan Murid Kota Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016.....	II-36
Tabel 2.22	Rasio Guru/Murid Sekolah Kota Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016.....	II-37
Tabel 2.23	Rasio Guru/ Murid per Kelas Rata-rata Kota Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016.....	II-37
Tabel 2.24	Angka Melek Huruf Usia > 15 Tahun Kota Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016.....	II-38
Tabel 2.25	Angka Kematian Bayi (AKB) (%) Kota Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016.....	II-39
Tabel 2.26	AKHB dan AKB Kota Lhokseumawe Tahun 2014 s.d 2016	II-40
Tabel 2.27	Angka Kematian Balita Per 1000 Kelahiran Hidup Kota Lhokseumawe Tahun 2014 s.d 2016	II-41
Tabel 2.28	Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup Kota Lhokseumawe Tahun 2014 s.d 2016	II-42
Tabel 2.29	Rasio Posyandu Per Satuan Balita Kota Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016.....	II-43
Tabel 2.30	Rasio Posyandu Per Satuan Balita Per Kecamatan Kota Lhokseumawe Tahun 2016.....	II-43
Tabel 2.31	Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2016	II-45
Tabel 2.32	Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk Kota Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016.....	II-46
Tabel 2.33	Rasio Dokter Per Satuan Penduduk Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2016	II-47
Tabel 2.34	Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk Kota Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016.....	II-48
Tabel 2.35	Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani Kota Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016.....	II-49
Tabel 2.36	Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan Kota Lhokseumawe Tahun 2016	II-51
Tabel 2.37	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2016.....	II-52
Tabel 2.38	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan Kota Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016.....	II-52

Tabel 2.39	Cakupan Persentase Anak Usia 1 Tahun yang Mendapat Imunisasi Campak Kota Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016.....	II-53
Tabel 2.40	Cakupan Penemuan Pneumonia pada Balita Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2016	II-54
Tabel 2.41	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA Kota Lhokseumawe Tahun 2012-216.....	II-55
Tabel 2.42	Tingkat Prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 Penduduk) Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2016.....	II-55
Tabel 2.43	Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis (Per 100.000 Penduduk) Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2016	II-56
Tabel 2.44	Proporsi Jumlah Kasus Tuberculosis yang Terdeteksi Dalam Program DOTS Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2016	II-56
Tabel 2.45	Proporsi Kasus Tuberculosis yang Di Obati dan Sembuh Dalam Program DOTS Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2016	II-56
Tabel 2.46	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2016.....	II-57
Tabel 2.47	Cakupan Penderita Diare yang Ditangani Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2016	II-58
Tabel 2.48	Cakupan Angka Kejadian Penderita Malaria Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2016	II-58
Tabel 2.49	Prevalensi HIV/AIDS Dari Total Populasi Kota Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016.....	II-59
Tabel 2.50	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujuk Pasien Masyarakat Miskin Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2016	II-60
Tabel 2.51	Cakupan Kunjungan Bayi Menurut Kecamatan dan Puskesmas Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2016.....	II-60
Tabel 2.52	Cakupan Puskesmas dan Pembantu Puskesmas Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2016	II-61
Tabel 2.53	Cakupan Puskesmas Pembantu Kota Lhokseumawe Tahun 2016	II-61
Tabel 2.54	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2016	II-63
Tabel 2.55	Cakupan Pelayanan Nifas Kota Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016.....	II-64
Tabel 2.56	Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang Ditangani Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2016	II-66

Tabel 2.57	Cakupan Pelayanan Anak Balita Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2016	II-67
Tabel 2.58	Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat Kota Lhokseumawe Tahun 2014-2016.....	II-69
Tabel 2.59	Cakupan Pelayanan Kesehatan dasar Masyarakat Miskin Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2016	II-70
Tabel 2.60	Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2016	II-71
Tabel 2.61	Cakupan Desa/Kelurahan Mengalami KLB yang dilakukan Penyelidikan Epidemiologi \leq 24 Jam Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2016	II-72
Tabel 2.62	Proporsi Panjang Jaringan jalan Dalam Kondisi Baik Kota Lhokseumawe Tahun 2013-2016 (Km)	II-73
Tabel 2.63	Jenis, Kondisi, Kelas dan Panjang Jalan(Km) Kota Lhokseumawe Tahun 2014-2016	II-74
Tabel 2.64	Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Penduduk Kota Lhokseumawe Tahun 2013-2016	II-75
Tabel 2.65	Panjang Jalan Dilalui Roda 4 Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2016	II-75
Tabel 2.66	Panjang Jalan Kota yang memiliki Trotoar dan Drainase/ Saluran Pembuangan Air (Minimal 1,5 M) Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2016	II-76
Tabel 2.67	Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk Kota Lhokseumawe Tahun 2016	II-78
Tabel 2.68	Rasio Tempat Ibadah per Satuan Kota Lhokseumawe Tahun 2014-2016	II-79
Tabel 2.69	Rasio Rumah Layak Huni Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2016	II-80
Tabel 2.70	Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kota Lhokseumawe Tahun 2016.....	II-81
Tabel 2.71	Kegiatan Pembinaan LSM, Ormas dan OKP Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2016	II-82
Tabel 2.72	Kegiatan Pembinaan Politik Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2016	II-83
Tabel 2.73	Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja dan Linmas Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2016	II-83
Tabel 2.74	Rasio Pos Siskamling per Jumlah Gampong Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2016	II-84
Tabel 2.75	Jumlah Penegakan Peraturan Daerah/Qanun Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2016	II-84
Tabel 2.76	Jumlah Penegakan Peraturan Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2016	II-85

Tabel 2.77	PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2016	II-86
Tabel 2.78	Persentase Panti Sosial yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan Sosial Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2016	II-87
Tabel 2.79	Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2016	II-87
Tabel 2.80	Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental, serta Lanjut Usia Tidak Potensial yang Telah Menerima Jaminan Sosial Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2016	II-88
Tabel 2.81	Persentase Panti Asuhan/Jompo yang Menerima Bantuan Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2016.....	II-89
Tabel 2.82	Angka Sengketa Pengusaha Pekerja Pertahun Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2016	II-90
Tabel 2.83	Keselamatan dan Perlindungan Pekerja Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2016	II-91
Tabel 2.84	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2016.....	II-92
Tabel 2.85	Proporsi Kursi yang diduduki Perempuan di DPR Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2016	II-93
Tabel 2.86	Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2016	II-93
Tabel 2.87	Rasio Kekerasan dalam Rumah Tangga Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2016	II-95
Tabel 2.88	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih di Dalam Unit Pelayanan Terpadu Kota Lhokseumawe 2012-2016.....	II-96
Tabel 2.89	Ketersediaan Pangan Utama Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2016.....	II-97
Tabel 2.90	Luas lahan Bersertifikat Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2016.....	II-98
Tabel 2.91	Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani (Ton) Kota Lhokseumawe Tahun 2012- 2016	II-99
Tabel 2.92	Rasio Penduduk ber KTP Per Satuan Penduduk Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2016	II-100
Tabel 2.93	Rasio Bayi ber Akta Kelahiran Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2016	II-101
Tabel 2.94	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2016	II-102
Tabel 2.95	Kelompok Binaan LPM dan PKK Kota Lhokseumawe Tahun 2014-2016	II-104

Tabel 2.96	Posyandu Aktif Kota Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016	II-105
Tabel 2.97	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2016	II-108
Tabel 2.98	Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2016	II-109
Tabel 2.99	Rasio Akseptor KB Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2016	II-110
Tabel 2.100	Cakupan Peserta KB Aktif Kota Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016	II-111
Tabel 2.101	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I Kota Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2014	II-112
Tabel 2.102	Jumlah Kendaraan dan Arus Penumpang Angkutan Umum Kota Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016	II-113
Tabel 2.103	Rasio Ijin Trayek Kota Lhokseumawe Tahun 2014 s.d 2016	II-113
Tabel 2.104	Uji Kir Angkutan Umum Kota Lhokseumawe Tahun 2014 s.d 2016	II-114
Tabel 2.105	Jumlah Pelabuhan Udara, laut dan Terminal Bis Kota Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016	II-115
Tabel 2.106	Kepemilikan KIR Angkutan Umum Kota Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016	II-115
Tabel 2.107	Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (KIR) Kota Lhokseumawe Tahun 2014 s.d 2016	II-116
Tabel 2.108	Pemasangan Rambu-rambu Kota Lhokseumawe Tahun 2014 s.d 2016	II-116
Tabel 2.109	Rasio Warnet Terhadap Penduduk Kota Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016	II-117
Tabel 2.110	Persentase Koperasi Aktif Kota Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016	II-118
Tabel 2.111	Jumlah BPR/LKM Kota Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016	II-119
Tabel 2.112	Jumlah Investor PMDN/PMA Kota Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016	II-120
Tabel 2.113	Jumlah Investasi PMDN/PMA Kota Lhokseumawe Tahun 2013 s.d 2016	II-120
Tabel 2.114	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Kota Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016	II-121
Tabel 2.115	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif Kota Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016	II-121
Tabel 2.116	Cakupan Pembinaan Olahraga Kota Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016	II-122

Tabel 2.117	Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016.....	Kota II-123
Tabel 2.118	Penyelenggaraan Festival Seni Budaya Lhokseumawe	Kota II-126
Tabel 2.119	Situs/Bangunan Cagar Budaya Lhokseumawe	Kota II-127
Tabel 2.120	Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016.....	Kota II-128
Tabel 2.121	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016.....	Kota II-129
Tabel 2.122	Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2016.....	II-129
Tabel 2.123	Jumlah SKPD yang Mengelola Arsip Secara Baku Kota Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016.....	II-130
Tabel 2.124	Objek Wisata Kota Lhokseumawe	II-132
Tabel 2.125	Kontribusi Pariwisata Terhadap PDRB Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016.....	Kota II-133
Tabel 2.126	Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB Kota Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016.....	II-134
Tabel 2.127	Kontribusi Kelompok Tani Terhadap PDRB Lhokseumawe Tahun 2016	Kota II-135
Tabel 2.128	Produktivitas Komoditas Pangan Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016.....	Kota II-135
Tabel 2.129	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB Kota Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016.....	II-136
Tabel 2.130	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB Kota Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016.....	II-137
Tabel 2.131	Produksi Perikanan (Budidaya) Lhokseumawe Tahun 2014 s.d 2016.....	Kota II-137
Tabel 2.132	Cakupan Bina Kelompok Nelayan Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016.....	Kota II-139
Tabel 2.133	Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB Kota Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016.....	II-139
Tabel 2.134	Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal Kota Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016.....	II-144
Tabel 2.135	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural Kota Lhokseumawe Tahun 2012 s. 2016.....	II-144
Tabel 2.136	Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional tertentu pada instansi Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016.....	II-145
Tabel 2.137	Persentase Tindak Lanjut Temuan	II-146
Tabel 2.138	Jumlah Temuan BPK yang ditindaklanjuti	II-146

Tabel 2.139	Jumlah Pelanggaran Qanun Syariat Islam Kota Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016.....	II-148
Tabel 2.140	Tipe Dayah, Kepemilikan, dan Jumlah Guru Dayah Kota Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016.....	II-149
Tabel 2.141	Jumlah Peserta PKU Kota Lhokseumawe Tahun 2014 s.d 2015.....	II-150
Tabel 2.142	Kegiatan Musyawarah Ulama Kota Lhokseumawe Tahun 2014 s.d 2016.....	II-151
Tabel 2.143	Persentase Akses Jaringan Rumah Tangga (RT) yang Menggunakan Air Bersih Kota Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016.....	II-154
Tabel 2.144	Persentase Rumah Tangga (RT) yang Menggunakan Listrik Kota Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016.....	II-154
Tabel 2.145	Angka Kriminalitas Kota Lhokseumawe Tahun 2014 s.d 2016.....	II-154
Tabel 2.146	Angka Partisipasi Angkatan Kerja Kota Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016.....	II-156
Tabel 2.147	Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016.....	II-157
Tabel 2.148	Rasio Ketergantungan Kota Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016.....	II-158
Tabel 2.149	Pusat-pusat Pelayanan Kegiatan Kota Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016.....	II-160
Tabel 2.150	Capaian Indikator Pembangunan Makro Kota Lhokseumawe.....	II-161
Tabel 2.151	Realisasi Pendanaan Kota Lhokseumawe Tahun 2018.....	II-162
Tabel 2.152	Realisasi Pendapatan Kota Lhokseumawe Semester II Tahun 2018.....	II-163
Tabel 2.153	Perbandingan Realisasi Belanja Langsung dan Tidak Langsung RKPK Tahun 2018.....	II-164
Tabel 2.154	Rincian Realisasi Menurut Jenis Belanja RKPK Tahun 2018.....	II-164
Tabel 2.155	Realisasi Pembiayaan Kota Lhokseumawe Semester II Tahun 2018.....	II-165
Tabel 2.156	Skala Penilaian Kinerja Program dan Kegiatan.....	II-168
Tabel 2.157	Tingkat Capaian Realisasi RKPK Tahun 2018 menurut Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah.....	II-170
Tabel 2.158	Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Kota Lhokseumawe Tahun 2018.....	II-172
Tabel 2.159	Predikat Capaian Kinerja.....	II-246
Tabel 3.1	Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kota Lhokseumawe Tahun 2020.....	III-11

Tabel 3.2	Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Kota Lhokseumawe Tahun 2020	III-17
Tabel 3.3	Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Kota Lhokseumawe Tahun 2020	III-20
Tabel 4.1	Hubungan Visi/Misi dan Tujuan/Sasaran Pembangunan.....	IV-5
Tabel 4.2	Sinkronisasi Isu Strategis, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional, Provinsi dan Kota Lhokseumawe	IV-10
Tabel 4.3	Target Capaian Sasaran Pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2020	IV-14
Tabel 4.4	Program Prioritas Kota Lhokseumawe Tahun 2020	IV-20
Tabel 4.5	Program/Kegiatan yang Mendukung Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2020	IV-68
Tabel 5.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun dan Prakiraan Maju Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2020	V-25
Tabel 6.1	Indikator Kinerja Makro Pemerintahan Kota Lhokseumawe Tahun 2020	VI-1
Tabel 6.2	Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Lhokseumawe Tahun 2020	VI-3

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.	Peta Wilayah Kota Lhokseumawe.....	II-2
Gambar 2.2.	Peta Kemiringan Lereng Kota Lhokseumawe.....	II-3
Gambar2.3.	Peta Geologi Kota Lhokseumawe.....	II-4
Gambar 2.4.	Peta Hidrologi Kota Lhokseumawe	II-5
Gambar 2.5.	Penggunaan Lahan Kota Lhokseumawe (Ha).....	II-6
Gambar 2.6.	Peta Rawan Bencana Kota Lhokseumawe	II-7
Gambar 2.7.	Kepadatan Penduduk Kota Lhokseumawe Tahun 2016-2017	II-12
Gambar 2.8.	PDRB Per Kapita ADHK Tahun 2013-2017 (Juta)	II-17
Gambar 2.9.	Laju Pertumbuhan Implisit Lhokseumawe Tahun 2014-2017 (%)	II-18
Gambar 2.10.	Indeks Gini (Ketimpangan Pendapatan) Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2016.....	II-19
Gambar 2.11.	Jumlah Penduduk Miskin Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2016	II-20
Gambar 2.12.	Angka Melek Huruf (AMH) Penduduk Usia 15 Tahun keatas Kota Lhokseumawe Tahun 2013 s.d 2017.....	II-22
Gambar 2.13.	Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kota Lhokseumawe Tahun 2013 s.d 2017	II-22
Gambar 2.14.	Angka Harapan Lama Sekolah Kota Lhokseumawe Tahun 2013 s.d 2017	II-23
Gambar 2.15.	Angka Usia Harapan Hidup (UHH) Kota Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016	II-24
Gambar 2.16.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Lhokseumawe Tahun 2013 s.d 2017.	II-25
Gambar 2.17.	Group Kesenian dan Gedung Kesenian Kota Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016.	II-26
Gambar 2.18.	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Kota Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016	II-153
Gambar 3.1.	PDRB Lhokseumawe (ADHB) Tahun 2013- 2017 (Trilyunan Rupiah)	III-2
Gambar 3.2.	PDRB Lhokseumawe (ADHK) Tahun 2013- 2017 (Triliun Rupiah)	III-3
Gambar 3.3.	Laju Pertumbuhan Ekonomi Lhokseumawe Tahun 2014-2017 (Persen)	III-4
Gambar 3.4.	Laju Pertumbuhan Ekonomi Lhokseumawe Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014-2017 (Persen)	III-5

Gambar 3.5.	PDRB Per Kapita Lhokseumawe (ADHB) Tahun 2013-2017 (Juta Rupiah)	III-6
Gambar 3.6.	PDRB Per Kapita Lhokseumawe (ADHK) Tahun 2013-2017 (Juta Rupiah)	III-7
Gambar 3.7.	Perbandingan Laju Inflasi Kota Lhokseumawe, Kota Banda Aceh, Meulaboh, Aceh dan Nasional Tahun 2014-2018 (Persen)	III-8

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Daerah Kota Lhokseumawe atau yang disebut dengan Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Dokumen ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Lhokseumawe yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah dan rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju sehingga menjadi dasar bagi perumusan perencanaan pembangunan daerah.

Penyusunan RKPK Kota Lhokseumawe Tahun 2020 merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang menegaskan bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah. Adapun pedoman penyusunan RKPK Lhokseumawe mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai pengganti dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010.

RKPK Lhokseumawe mempunyai kedudukan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini dikarenakan dokumen RKPK Lhokseumawe merupakan acuan bagi Walikota dan DPRK Lhokseumawe dalam menentukan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Kota (KU-APBK) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang selanjutnya digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (RAPBK) Lhokseumawe.

Penyusunan dokumen RKPK Lhokseumawe Tahun 2020 dilaksanakan melalui 3 (tiga) alur yaitu alur proses teknokratis-strategis, alur proses partisipatif, dan alur proses legislasi dan politik. Ketiga alur proses tersebut dilakukan dengan pendekatan yang berbeda akan tetapi saling berinteraksi antara satu dan lainnya untuk menghasilkan RKPK yang terpadu. Adapun proses penyusunan RKPK dilakukan dengan menggunakan pendekatan

Teknokratis (Strategis dan Berbasis Kinerja), Pendekatan Demokratis Partisipatif, Pendekatan Politis serta pendekatan yang bersifat *Bottom-Up* dan *Top-Down*.

Tahapan-tahapan yang diperlukan dalam penyusunan RKPK Lhokseumawe antara lain pertama persiapan penyusunan RKPK, penyusunan rancangan awal RKPK, tahap penyusunan rancangan RKPK, pelaksanaan Musrenbang RKPK, perumusan rancangan akhir RKPK dan tahap penetapan RKPK dengan Peraturan Walikota dan dijadikan pedoman penyempurnaan Renja SKPK.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPK Lhokseumawe Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
8. Undang-Undang No 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh (RPJPA) Tahun 2012-2032;
17. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Tahun 2017-2022;
18. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Aceh Tahun 2012-2032;
19. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 79 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Aceh no 79 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bagu Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Otonomi Khusus;
20. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 39 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Aceh Tahun 2020;
21. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe;

22. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022.

1.3 Hubungan Antar Dokumen

RKPK Lhokseumawe Tahun 2020 adalah dokumen perencanaan tahun ketiga dari RPJMK Lhokseumawe Tahun 2017-2022. RKPK Kota Lhokseumawe Tahun 2020 disusun sebagai upaya sinkronisasi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Dokumen RKPK berfungsi sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan APBD Tahun 2020.

Penyusunan RKPK bertujuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi serta kota. Oleh karena itu substansi RKPK harus selaras dengan dokumen perencanaan tingkat pusat, dokumen perencanaan tingkat provinsi dan dokumen perencanaan tingkat kota sehingga terjadi sinergitas perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kota.

Hubungan antara RKPK, Renstra SKPK dan Renja SKPK yaitu RKPK memuat program dan kegiatan SKPK, dan penjabaran Renstra SKPK. Dokumen RKPK merupakan acuan bagi SKPK dalam menyempurnakan Renja SKPK untuk tahun yang bersangkutan. Proses penyusunan RKPK dilakukan bersamaan dan sifatnya saling member masukan dengan proses penyusunan Rencana Kerja SKPK (Renja SKPK).

1.4 Sistematika Dokumen RKPK

Sistematika dokumen RKPK Lhokseumawe Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Hubungan Antar Dokumen
- 1.4 Maksud dan Tujuan
- 1.5 Sistematika Dokumen RKPK

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI KOTA

- 2.1 Kondisi Umum Kondisi Kota
 - 2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi
 - 2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat
 - 2.1.3 Aspek Pelayanan Umum
 - 2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah
- 2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPK sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMK
- 2.3 Permasalahan Pembangunan Kota

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN KOTA

- 3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Kota
- 3.2 Arah Kebijakan Keuangan Kota

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan
- 4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KOTA

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH KOTA

BAB VII PENUTUP

1.5 Maksud Dan Tujuan

a. Maksud

Penyusunan RKPK Lhokseumawe Tahun 2020 dimaksudkan sebagai pedoman Pemerintah Kota dan DPRK Lhokseumawe dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dituangkan kedalam KUA dan PPAS Tahun 2020 yang selanjutnya akan menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan APBK Tahun 2020.

b. Tujuan

Penyusunan RKPK Kota Lhokseumawe Tahun 2020 bertujuan untuk mewujudkan sinergitas dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan, dan antar tingkat pemerintahan.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI KOTA

2.1. Kondisi Umum

Kondisi Umum Kota Lhokseumawe dapat dijelaskan dari beberapa aspek antara lain aspek geografi, aspek demografi, aspek kesejahteraan masyarakat dan aspek pelayanan umum serta aspek daya saing daerah.

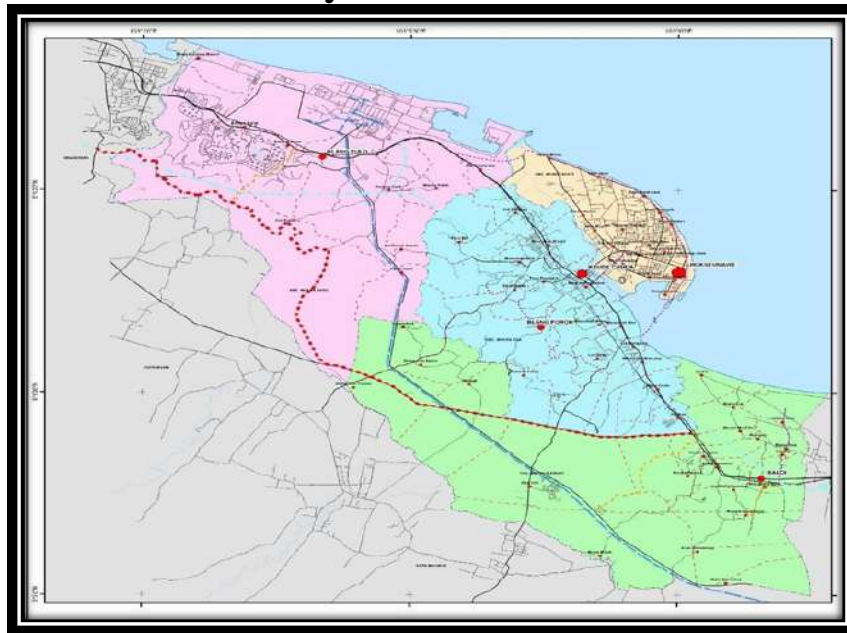
2.1.1. Aspek Geografi

Aspek Geografi Kota Lhokseumawe dapat dijelaskan dengan melihat beberapa hal terkait aspek tersebut antara lain letak wilayah kota, kemiringan lereng, kondisi geologi, kondisi hidrologi, penggunaan lahan, pemetaan daerah rawan bencana, kondisi suhu dan temperatur, curah hujan dan penyinaran matahari, tekanan udara dan kelembaban nisbi serta arah dan kecepatan angin.

2.1.1.1. Wilayah Kota

Kota Lhokseumawe adalah Daerah Otonom yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 Tanggal 21 Juni 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe. Letak geografis Kota Lhokseumawe yaitu 04°54'-05°18' Lintang Utara dan 96°20' -97°21' Bujur Timur.

Gambar 2.1
Peta Wilayah Kota Lhokseumawe



Sumber : RTRW Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2032.

Kota Lhokseumawe berada pada ketinggian ± 24 meter di atas permukaan laut, disebelah utara dan daerah di sebelah timur berada pada ketinggian antara ± 105 meter di atas permukaan laut, sedangkan pada daerah di sebelah selatan memiliki kondisi yang relatif berbukit-bukit dengan ketinggian antara $\pm 5-100$ meter di atas permukaan laut. Kota Lhokseumawe dengan luas wilayah $181,06 \text{ Km}^2$ (Persegi) atau 18.106 Ha (Hektar) yang dibagi menjadi 4 (empat) kecamatan, yaitu Kecamatan Blang Mangat dengan luas wilayah $56,12 \text{ Km}^2$ (Persegi), Kecamatan Muara Dua dengan luas wilayah $57,80 \text{ Km}^2$ (Persegi), Kecamatan Muara Satu dengan luas wilayah $55,90 \text{ Km}^2$ (Persegi) dan Kecamatan Banda Sakti dengan luas wilayah $11,24 \text{ Km}^2$ (Persegi). Kota Lhokseumawe memiliki 9 kemukiman dengan 68 gampong.

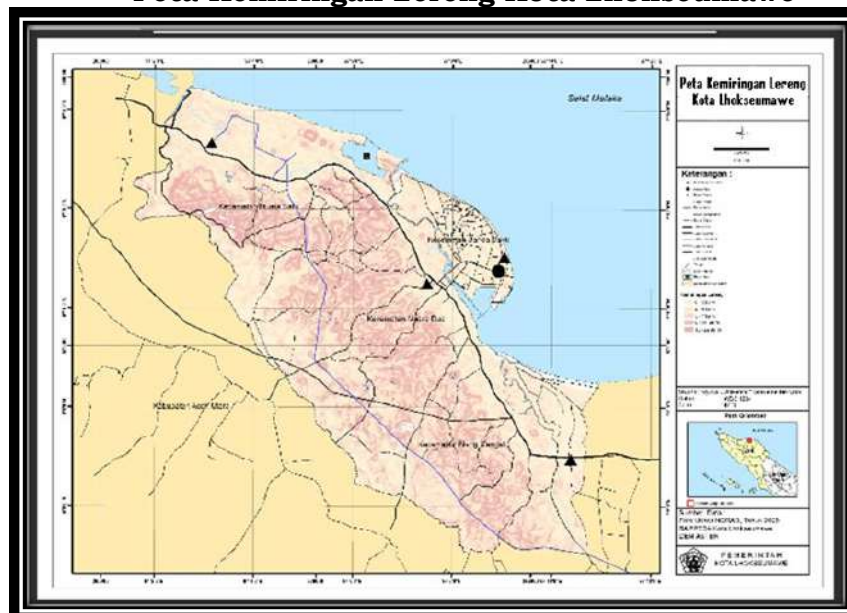
Berdasarkan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kota Lhokseumawe Periode 2012-2032, Kota Lhokseumawe berbatasan dengan wilayah berikut:

- Sebelah Utara dengan Selat Malaka;
- Sebelah Selatan dengan Kecamatan Kuta Makmur (Kabupaten Aceh Utara);
- Sebelah Barat dengan Kabupaten Kecamatan Dewantara (Kabupaten Aceh Utara); dan
- Sebelah Timur dengan Kecamatan Syamtalira Bayu (Kabupaten Aceh Utara).

2.1.1.2. Kemiringan Lereng

Kondisi Kemiringan Lereng Kota Lhokseumawe dapat beragam sesuai dengan wilayahnya, sebagaimana dapat dilihat pada gambar 2.2.

Gambar 2.2
Peta Kemiringan Lereng Kota Lhokseumawe



Sumber : RTRW Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2032.

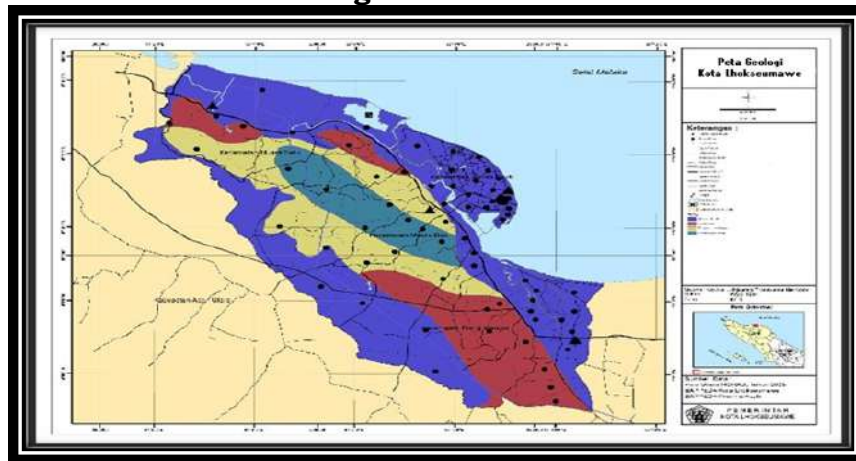
Kondisi Kemiringan Lereng Kota Lhokseumawe, Wilayah Utara Kota merupakan pesisir selat malaka dan daerah sebelah Timur merupakan daerah dataran dengan kemiringan antara 0-8%, Sedangkan pada daerah yang menjauhi pesisir seperti sebelah Selatan merupakan daerah yang berbukit-bukit dengan kemiringan antara 8-15%. Selanjutnya untuk Kondisi ketinggian lahan diatas permukaan laut (dpl) menunjukkan bahwa Kota Lhokseumawe berada di antara ketinggian kisaran 0-100 mdpl.

Daerah pesisir di sebelah sebelah utara dan sebagian wilayah sebelah timur berada pada ketinggian antara 0-5 mdpl. Sedangkan pada daerah sebelah selatan dan sebagian wilayah sebelah barat memiliki kondisi yang relatif berbukit-bukit dengan ketinggian antara 5-100 mdpl. Dengan kondisi kemiringan lahan antara 8-15% yang masih memungkinkan untuk dilakukan pengembangan kegiatan perkotaan dimasa yang akan datang.

2.1.1.3. Geologi

Kondisi Geologi Kota Lhokseumawe dapat beragam sesuai dengan wilayahnya, sebagaimana dapat dilihat pada gambar 2.3.

Gambar 2.3
Peta Geologi Kota Lhokseumawe



Sumber : RTRW Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2032.

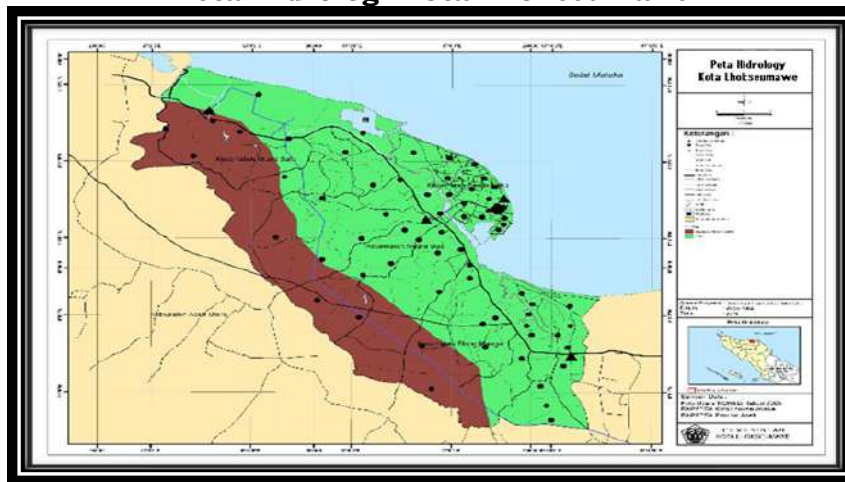
Kondisi geologi Kota Lhokseumawe terbentuk oleh bantuan Alluvium Muda, Formasi Idi, Formasi Julurayu dan Formasi Seureula. Sebaran batuan Aluvium Muda berupa endapan pesisir dan Fluviatill berada pada daerah di sebelah utara dan selatan Kota Lhokseumawe. Sebaran Formasi Idi berupa kerikil, pasir, gamping dan lempung berada pada daerah sebelah barat yaitu sebagian wilayah Kecamatan Muara Satu dan Muara Dua dan sebelah timur yaitu sebagian Kecamatan Muara Dua dan Blang Mangat. Sebaran Formasi Julurayu berupa endapan sungai batu pasir tufaan, lempung berlignit, dan batu lumpur berada pada daerah sebelah barat hingga tengah Kota Lhokseumawe yaitu sebagian wilayah Kecamatan Muara Satu dan Muara Dua. Sedangkan sebaran formasi seureula berupa batu pasir gunung

api, dan batu lumpur gampingan berada pada daerah tengah Kota Lhokseumawe yaitu sebagian wilayah Kecamatan Muara Satu dan Muara Dua.

2.1.1.4. Hidrologi

Kondisi Hidrologi Kota Lhokseumawe berbeda-beda antara wilayah pesisir dan perbukitan, keadaan airnya memiliki bermacam jenis air sesuai dengan kondisi tanahnya, sebagaimana dapat dilihat pada gambar 2.4.

Gambar 2.4
Peta Hidrologi Kota Lhokseumawe



Sumber : RTRW Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2032.

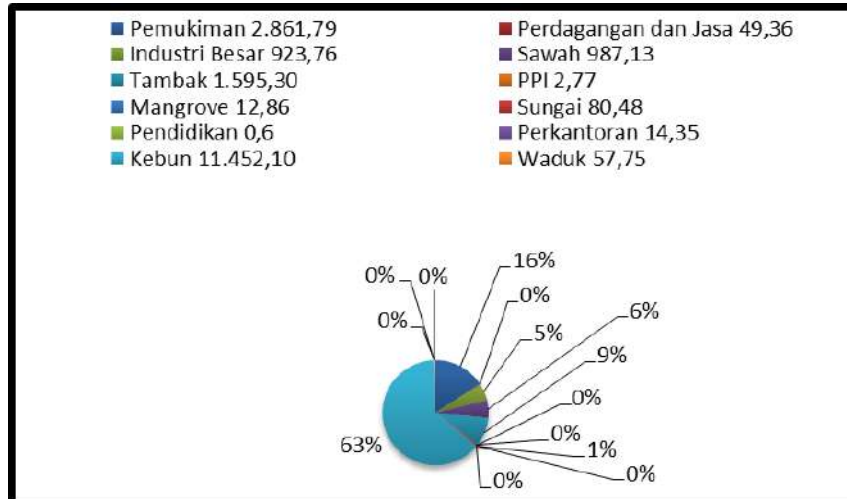
Kondisi air tanah dalam dicirikan dengan adanya akuifer cukup produktif meliputi sebagian besar wilayah Kota Lhokseumawe. Sedangkan akuifer tinggi berada pada daerah barat hingga selatan Kota Lhokseumawe. Kondisi air permukaan dicirikan dengan keberadaan *Krueng* (Sungai) Cunda yang terletak di bagian barat. Namun keadaan air sungai tersebut merupakan air payau sehingga tidak dapat dimanfaatkan oleh penduduk sebagai air bersih. Untuk keperluan air bersih, pada umumnya penduduk memanfaatkan air sumur dan air PDAM.

2.1.1.5. Penggunaan Lahan

Penggunaan Lahan dalam wilayah Kota Lhokseumawe dibagi kebeberapa sektor antara lain kawasan perkebunan, pemukiman, tambak, sawah, industri, sungai, waduk, perdagangan dan jasa,

perkantoran, mangrove, kawasan PPI dan pendidikan. sebagaimana dapat dilihat pada gambar 2.5.

Gambar 2.5
Penggunaan Lahan Kota Lhokseumawe (Ha)



Sumber: Data diolah dari Lhokseumawe Dalam Angka Tahun 2018.

Kota Lhokseumawe memiliki luas 181,06 Km² (persegi) dengan penggunaan lahan yang beragam. Angka paling tinggi digunakan sebagai kawasan perkebunan sebesar 11.452 Ha, diikuti oleh kawasan pemukiman sebesar 2.861 Ha, kawasan tambak 1.595 Ha, kawasan sawah sebesar 987 Ha, kawasan industri besar sebesar 923 Ha, kawasan sungai sebesar 80 Ha, kawasan waduk sebesar 57 Ha, kawasan perdagangan dan jasa sebesar 49 Ha, kawasan perkantoran sebesar 14 Ha, kawasan mangrove sebesar 12 Ha dan kawasan PPI sebesar 2,7 Ha serta kawasan pendidikan sebesar 0,6 Ha

Berdasarkan Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2032, arah pengembangan kawasan Kota Lhokseumawe yang berguna mempercepat laju pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan. Dalam dokumen RTRW dijelaskan bahwa terdapat 3 (tiga) zona pengembangan wilayah, yaitu:

1. Zona pesisir, merupakan daerah pinggir pantai dan memiliki kondisi wilayah relatif datar, zona pesisir mencakup:

- Zona Pesisir di Kecamatan Muara Satu dengan kegiatan utamanya diperuntukkan bagi sektor industri besar, industri menengah dan pariwisata;
 - Zona Pesisir di Kecamatan Banda sakti dengan kegiatan utamanya untuk pelayanan kota seperti: pendidikan, pemerintahan, kesehatan, permukiman dan pariwisata, perdagangan dan jasa;
 - Zona pesisir di Kecamatan Blang Mangat dengan kegiatan utamanya diperuntukkan bagi sektor perikanan laut, dan sektor perikanan darat.
2. Zona Tengah merupakan daerah sekitar Jalan Banda Aceh – Medan, memiliki kondisi wilayah relatif datar dan berbukit, wilayah ini mencakup Kecamatan Muara Satu, Kecamatan Muara Dua dan Kecamatan Blang Mangat dengan kegiatan utamanya diperuntukkan bagi perdagangan dan permukiman.
 3. Zona Dalam merupakan daerah dataran tinggi disekitar jalan elak memiliki kondisi wilayah berbukit, dengan kegiatan utama pada kawasan ini diperuntukkan bagi kegiatan pertanian (lahan basah dan lahan kering), peternakan, pariwisata dan sebagian permukiman.

2.1.1.6. Daerah Rawan Bencana

Kota Lhokseumawe juga merupakan daerah yang rawan akan bencana sebagaimana dapat dilihat pada gambar 2.6.

Gambar 2.6
Peta Rawan Bencana Kota Lhokseumawe



Sumber : RTRW Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2032.

Kota Lhokseumawe juga merupakan kawasan yang berpotensi terjadinya bencana seperti gempa bumi, tsunami,

banjir, abrasi dan gelombang pasang. Wilayah rawan bencana Kota Lhokseumawe didominasi pada kawasan lindung dan sebagian kawasan budidaya, sehingga diperlukan pengelolaan intensif terutama yang berada pada kawasan budidaya. Dengan adanya resiko kerawanan terhadap bencana pada kawasan budidaya ini tidak berarti bahwa pada kawasan tersebut tidak dapat dibangun, akan tetapi pemanfaatannya harus disertai dengan upaya untuk mengantisipasi/mengurangi (mitigasi) dari terjadinya dampak bencana alam.

Selain itu, Kota Lhokseumawe juga merupakan kawasan yang rawan bencana abrasi, gelombang pasang seperti Pantai Ujong Blang, Rancung, dan Meuraksa. Sedangkan kawasan yang rawan akan bencana banjir terdapat di Kecamatan Banda Sakti, meliputi Gampong Jawa, Gampong Jawa Lama, Lancang Garam, dan Tumpok Teungoh.

2.1.1.7. Suhu dan Temperatur

Badan Pusat Statistik Kota Lhokseumawe Tahun 2018 telah merilis data berkenaan dengan rata rata suhu udara minimum Kota Lhokseumawe sebagaimana dapat dilihat dalam tabel 2.1 dibawah ini:

Tabel 2.1
Rata-rata Temperatur Maximum dan Minimum
Kota Lhokseumawe Tahun 2017

Bulan	Temperatur (°C)				
	07.00 WIB	13.00 WIB	18.00 WIB	Max	Min
Januari	23,0	29,7	27,9	32	21
Februari	22,4	27,9	27,9	32	20
Maret	22,9	29,4	29,4	33	21
April	23,8	28,7	28,7	34	21
Mei	24,7	29,7	29,7	35	23
Juni	24,2	29,8	29,8	34	23
Juli	24,4	27,4	27,4	34	22
Agustus	24,1	29,2	29,2	33	23
September	23,8	28,5	28,5	34	21
Oktober	24,1	28,4	28,4	32	22
November	23,8	27,7	27,7	32	22
Desember	24,1	28,4	28,4	32	20

Sumber : Lhokseumawe Dalam Angka (LDA), BPS 2018.

Dari tabel 2.1 tersebut dapat dijelaskan bahwa suhu udara minimum terjadi pada 20°C dan suhu udara maksimum terjadi pada 35°C dengan rata rata suhu udara minimum Kota

Lhokseumawe berkisar antara 21⁰C dan suhu udara maksimum 33⁰C. Untuk kondisi suhu pada waktu pagi hari pukul 07.00 Wib rata rata suhu relatif lebih rendah yakni 22⁰C dan kondisi suhu pada waktu siang hari pukul 13.00 Wib dan sore hari pukul 18.00 Wib rata-rata suhunya relatif sama dan sedikit tinggi berkisar 29⁰C.

2.1.1.8. Curah Hujan dan Penyinaran Matahari

Badan Pusat Statistik Kota Lhokseumawe Tahun 2018 telah merilis data berkenaan dengan banyaknya curah hujan, hari hujan dan penyinaran matahari di Kota Lhokseumawe sebagaimana dapat dilihat dalam tabel 2.2 dibawah ini:

Tabel 2.2
Banyaknya Curah Hujan, Hari Hujan dan
Penyinaran Matahari di Kota Lhokseumawe Tahun 2017

Bulan	Curah Hujan (mm)	Hari Hujan	Penyinaran Matahari (%)
Januari	183	17	74
Februari	66	12	77
Maret	2	5	78
April	51	15	57
Mei	45	8	71
Juni	95	13	72
Juli	72	14	56
Agustus	119	17	65
September	207	21	56
Oktober	97	21	50
November	327	23	51
Desember	138	21	71

Sumber : Lhokseumawe Dalam Angka (LDA), BPS 2018.

Dari tabel 2.2 tersebut dapat dijelaskan bahwa curah hujan rata-rata terjadi sebanyak 166 mm dengan curah hujan minimum terjadi pada bulan Maret sebanyak 2 mm dan curah hujan tertinggi terjadi pada bulan November sebanyak 327 mm. Untuk jumlah hari hujan rata-rata terjadi selamaa 15 hari dengan terendah sebanyak 5 hari dibulan Maret dan terlama sebanyak 23 hari dibulan November. Sedangkan penyinaran matahari maksimum terjadi pada bulan Maret sebesar 78% dan minimum terjadi pada bulan Oktober sebesar 50%.

2.1.1.9. Tekanan Udara dan Kelembaban Nisbi

Badan Pusat Statistik Kota Lhokseumawe Tahun 2018 telah merilis data berkenaan dengan tekanan udara dan kelembaban nisbi Kota Lhokseumawe sebagaimana dapat dilihat dalam tabel 2.3 dibawah ini:

Tabel 2.3
Rata-rata Tekanan Udara dan Kelembaban Nisbi
Kota Lhokseumawe Tahun 2017

Bulan	Rata-rata	Tekanan Udara (mb)
Januari	85	1011
Februari	81	1011
Maret	82	1011
April	80	1009
Mei	83	1009
Juni	82	1009
Juli	82	1009
Agustus	83	1009
September	85	1010
Oktober	85	1011
November	88	1009
Desember	85	1011

Sumber : Lhokseumawe Dalam Angka (LDA), BPS 2018.

Dari tabel 2.3 tersebut dapat dijelaskan bahwa rata-rata kelembaban udara berkisar antara 81% sampai dengan 86% dengan rata-rata tekanan udara terjadi berkisar antara 1009 mb hingga 1011 mb.

2.1.1.10. Arah dan Kecepatan Angin

Badan Pusat Statistik Kota Lhokseumawe Tahun 2018 telah merilis data berkenaan dengan arah angin, kecepatan rata-rata dan kecepatan angin maksimum di Kota Lhokseumawe sebagaimana dapat dilihat dalam tabel 2.4 dibawah ini:

Tabel 2.4
Arah Angin, Kecepatan rata-rata, dan Kecepatan Angin
Maksimum Kota Lhokseumawe Tahun 2017

Bulan	Arah Angin	Kecepatan Rata-rata	Kecepatan Maksimum	Arah Maksimum
Januari	BD	4	12	100
Februari	BD	4	18	250
Maret	TL	4	15	080
April	BD	4	15	050
Mei	BD	4	15	230
Juni	BD	4	18	130
Juli	TG	4	12	200
Agustus	TG	4	19	140
September	BD	4	16	300
Oktober	BD	4	14	140
November	BD	4	13	100
Desember	BD	4	19	120

Sumber : Lhokseumawe Dalam Angka (LDA), BPS 2018.

Dari tabel 2.4 diatas dapat dijelaskan bahwa rata-rata arah angin menuju barat daya dengan kecepatan rata-rata 4 km/jam dan kecepatan maksimum berkisar antara 12 km/jam sampai dengan 19 km/jam.

2.1.2. Aspek Demografi Kota Lhokseumawe

2.1.2.1. Jumlah Penduduk

Berdasarkan data dari Lhokseumawe Dalam Angka Tahun 2018, Jumlah Penduduk di Kota Lhokseumawe dapat dilihat dalam tabel 2.5 dibawah ini:

Tabel 2.5
Jumlah Penduduk
Kota Lhokseumawe Tahun 2017

Kecamatan	Luas (Km2)	Jumlah Penduduk (Jiwa)		
		Pria	Wanita	Total
Blang Mangat	56,12	13,865	13,893	27,758
Muara Dua	57,80	27,461	27,914	55,375
Muara Satu	55,90	16,723	16,828	33,551
Banda Sakti	11,24	41,233	41,063	82,296
Jumlah	181,06	99,282	99,698	198,980
2017		99,282	99,698	198,980
2016		97,299	97,887	195,186
2015		95,271	96,136	191,407
2014		93,403	94,052	187,455

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Lhokseumawe. 2018

Dari tabel 2.5 diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah penduduk Kota Lhokseumawe Tahun 2017 adalah 198.980 jiwa

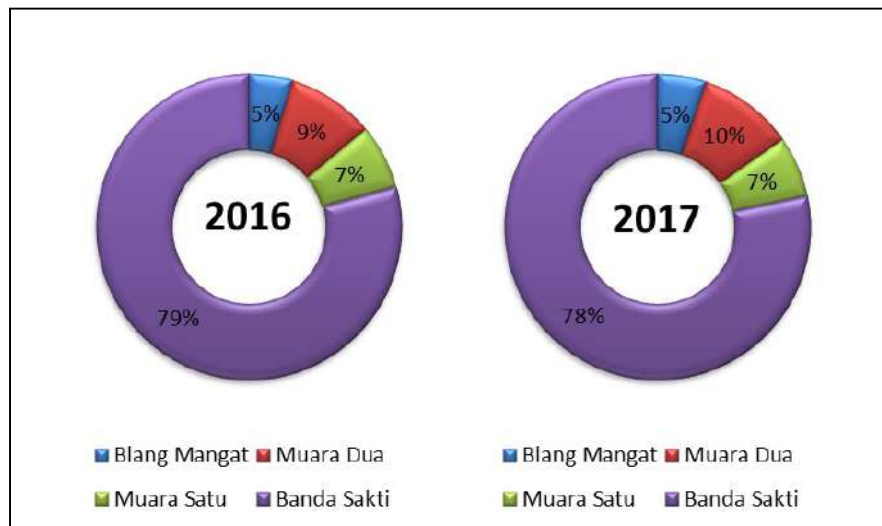
yang terdiri dari 99.282 jiwa penduduk laki-laki dan 99.698 jiwa penduduk perempuan. Dari jumlah ini terjadi peningkatan sebesar 1,94 persen dari tahun sebelumnya yang berjumlah 195.186 jiwa.

Kota Lhokseumawe memiliki piramida penduduk berbentuk expansive. Hal ini menunjukkan

2.1.2.2. Kepadatan Penduduk

Tingkat kepadatan penduduk dalam wilayah Kota Lhokseumawe dibagi dalam 4 (empat) kecamatan dengan persentase kepadatan yang relatif berbeda beda sebagaimana dapat dilihat pada gambar 2.7.

Gambar 2.7
Kepadatan Penduduk
Kota Lhokseumawe Tahun 2016 dan 2017



Sumber: Data diolah, 2019.

Dari gambar 2.7 diatas dapat dijelaskan bahwa Tingkat Kepadatan Penduduk Tahun 2017 di Kota Lhokseumawe terbesar ada di Kecamatan Banda Sakti sebesar 78%, diikuti oleh Kecamatan Muara Dua sebesar 10%, Kecamatan Muara Satu sebesar 7% dan terkecil di Kecamatan Blang Mangat sebesar 5%. Konsentrasi jumlah penduduk di Kecamatan Banda Sakti dikarenakan kecamatan ini merupakan pusat Kota Lhokseumawe dengan berbagai kegiatan utama yaitu pemerintahan, perdagangan, pendidikan dan kesehatan.

2.1.3. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek Kesejahteraan Masyarakat terdiri dari Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi, Fokus Kesejahteraan Sosial dan Fokus Seni Budaya dan Olahraga.

2.1.3.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Kondisi Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi dapat dilihat dari beberapa indikator antara lain, Produk Domestik Regional Brutto (PDRB), Tingkat Laju Inflasi, PDRB Per Kapita, Indeks Rasio Gini dan Persentase Penduduk diatas Garis Kemiskinan.

2.1.3.1.1. Produk Domestik Regional Brutto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat regional menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan output (nilai tambah) pada suatu waktu tertentu. Untuk menyusun PDRB digunakan 2 pendekatan, yaitu produksi dan penggunaan, kedua pendekatan ini menyajikan komposisi data nilai tambah yang dirinci menurut sumber kegiatan ekonomi (lapangan usaha) dan menurut komponen penggunaannya. PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh lapangan usaha atas berbagai aktivitas produksinya. Sedangkan dari sisi penggunaan menjelaskan tentang penggunaan dari nilai tambah tersebut.

PDRB menurut lapangan usaha dirinci menurut total nilai tambah dari seluruh lapangan usaha yang mencakup kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, pengadaan listrik dan gas, pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, konstruksi, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum, informasi dan komunikasi, jasa keuangan dan asuransi, real estat, jasa perusahaan, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, jasa pendidikan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial, dan jasa lainnya.

Berdasarkan data PDRB Kota Tahun 2018, Jumlah Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku di Kota Lhokseumawe dapat dilihat dalam tabel 2.6 dibawah ini:

Tabel 2.6
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah) Kota Lhokseumawe Tahun 2013-2017

Kategori	Lapangan Usaha	2013	2014	2015*	2016**	2017***
A.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	556,263.40	585,236.90	627,308.70	663,601.10	716,657.90
B.	Pertambangan dan Penggalian	29,784.90	31,916.10	32,890.70	33,766.00	31,421.90
C.	Industri Pengolahan	4,380,548.90	3,672,013.00	1,513,054.40	1,414,675.50	1,531,142.40
	1. Industri Migas	4,255,347.60	3,534,889.10	1,364,781.10	1,255,763.60	1,352,109.00
	2. Industri Non migas	125,201.30	137,123.90	148,273.30	158,911.80	179,033.40
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	7,371.40	8,035.50	8,804.20	11,658.00	13,228.70
E.	Limbah dan Daur Ulang	455.2	591	761.6	904.6	1,074.10
F.	Konstruksi	900,260.20	1,055,271.00	1,273,495.90	1,229,442.50	1,164,292.90
G.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,548,649.60	1,662,981.10	1,726,605.50	1,791,550.10	1,838,542.20
H.	Transportasi dan Pergudangan	894,891.00	927,598.30	942,195.10	916,351.20	935,595.30
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	62,064.60	70,462.20	80,582.00	96,713.60	124,330.10
J.	Informasi dan Komunikasi	233,889.80	247,459.10	255,998.10	264,954.80	273,712.60
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	144,181.50	160,021.50	178,477.70	202,674.40	228,855.50
L.	Real Estat	229,929.60	253,958.30	279,709.30	317,347.20	349,956.90
M,N.	Jasa Perusahaan	52,992.90	59,073.30	65,885.60	71,312.50	76,904.20
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	229,846.40	252,867.20	279,188.60	305,594.60	334,118.20
P.	Jasa Pendidikan	68,192.90	74,785.60	85,824.30	95,294.20	105,822.60
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	171,508.30	185,836.50	205,683.50	224,546.90	246,355.70
R,S,T,U.	Jasa lainnya	67,838.60	72,931.30	79,267.20	88,510.00	98,938.90
PDRB dengan Migas		9,578,669.30	9,321,037.70	7,635,732.30	7,728,897.10	8,070,950.20
PDRB tanpa Migas		5,323,321.70	5,786,148.60	6,270,951.30	6,473,133.40	6,718,841.20

* Angka revisi/Revised Figures

** Angka sementara/Preliminary Figures

*** Angka sangat sementara/Very Preliminary Figure

Sumber : PDRB Kota Lhokseumawe Tahun 2018.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Lhokseumawe Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dengan memperhitungkan Migas selama lima tahun terakhir mengalami penurunan. PDRB ADHB Migas dari Tahun 2013 sebesar 9,5 trilyun mengalami penurunan sebesar 1,5 triliun rupiah menjadi 8,07 triliun rupiah pada Tahun 2017. Berbeda dengan PDRB tanpa Migas, PDRB ADHB tanpa migas selalu mengalami peningkatan dengan rata-rata peningkatan sebesar 0,35 triliun rupiah per tahun. PDRB

ADHB Tahun 2017 mencapai 6,72 triliun rupiah. Nilai ini meningkat sebesar 0,25 triliun rupiah dari Tahun 2016. Tahun sebelumnya, PDRB ADHB 2013-2016 mengalami peningkatan dari 5,32 menjadi 6,47 triliun rupiah.

Selanjutnya dalam perubahan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) masih terdapat pengaruh perubahan harga, sehingga untuk melihat perkembangan riil PDRB maka digunakan PDRB Atas Dasar Harga Konstan yang dapat dilihat dalam tabel 2.7 dibawah ini:

Tabel 2.7
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah) Kota Lhokseumawe Tahun 2013-2017

Kategori	Lapangan Usaha	2013	2014	2015*	2016**	2017***
A.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	502,308.10	506,299.00	516,413.70	529,818.90	542,672.70
B.	Pertambangan dan Penggalian	27,930.90	28,967.10	29,305.90	29,857.20	27,727.50
C.	Industri Pengolahan	4,096,402.80	3,240,474.80	1,301,452.30	1,154,623.10	1,201,613.00
	1. Industri Migas	3,985,208.70	3,126,057.50	1,182,468.50	1,031,187.20	1,071,411.50
	2. Industri Non migas	111,194.00	114,417.20	118,983.80	123,435.90	130,201.50
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	8,127.60	8,639.20	9,223.70	11,926.10	12,564.70
E.	Limbah dan Daur Ulang	399	475.1	577.3	634.3	688.8
F.	Konstruksi	817,661.00	906,263.30	1,042,918.80	994,918.80	933,175.20
G.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,438,586.70	1,473,637.30	1,508,861.40	1,515,851.60	1,523,096.20
H.	Transportasi dan Pergudangan	819,782.30	827,306.60	840,006.40	830,707.60	851,160.80
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	54,845.10	58,896.90	63,638.10	71,993.80	86,988.00
J.	Informasi dan Komunikasi	224,636.40	236,182.70	242,641.00	249,796.20	257,346.60
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	119,204.30	125,536.10	132,617.10	144,292.90	158,068.40
L.	Real Estat	214,310.20	227,468.80	242,647.00	262,646.50	284,661.60
M,N.	Jasa Perusahaan	49,937.10	53,138.10	57,146.90	60,521.40	64,184.50
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	212,894.50	221,857.40	233,876.90	248,964.70	266,250.30
P.	Jasa Pendidikan	65,040.20	68,329.00	72,951.90	77,781.10	83,029.90
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	164,206.10	173,410.90	187,051.70	201,196.60	218,896.80
R,S,T,U.	Jasa lainnya	61,952.10	65,446.20	68,819.60	74,877.30	81,367.20
PDRB dengan Migas		8,878,224.40	8,222,328.40	6,550,150.00	6,460,408.20	6,593,492.20
PDRB tanpa Migas		4,893,015.70	5,096,270.80	5,367,681.40	5,429,221.00	5,522,080.60

* Angka revisi/Revised Figures

** Angka sementara/Preliminary Figures

*** Angka sangat sementara/Very Preliminary Figure

Sumber : PDRB Kota Lhokseumawe Tahun 2018.

Dari tabel 2.7 diatas dapat dijelaskan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Lhokseumawe Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dengan memperhitungkan Migas selama lima tahun terakhir mengalami penurunan. PDRB ADHB Migas dari Tahun 2013 sebesar 8,8 trilyun mengalami penurunan sebesar 2,3 triliun rupiah menjadi 6,5 triliun rupiah pada Tahun 2017. Berbeda dengan PDRB ADHK tanpa Migas yang selalu mengalami peningkatan dari 4,8 trilyun diTahun 2013 meningkat menjadi 5,5 trilyun pada Tahun 2017, terjadi peningkatan selama lima tahun terakhir sebesar 0,7 trilyun rupiah.

Selama 5 tahun terakhir (2013-2017) terlihat bahwa perubahan PDRB ADHB cenderung lebih besar dari pada perubahan kenaikan PDRB ADHK. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan karena faktor harga lebih dominan dari pada kenaikan karena faktor produktivitas.

2.1.3.1.2. Laju Inflasi

Inflasi merupakan peningkatan nilai harga (barang/jasa) umum yang terjadi secara terus menerus. Peningkatan inflasi akan berdampak pada penurunan perkembangan ekonomi, dan secara umum akan menurunkan daya saing ekonomi. Dampak lain dari peningkatan inflasi ialah bertambahnya jumlah pengangguran, menurunnya pendapatan riil masyarakat, mengurangi nilai kekayaan yang berbentuk uang.

Perkembangan Laju inflasi berdasarkan data BPS Kota Lhokseumawe Tahun 2018 menunjukkan bahwa inflasi di Kota Lhokseumawe lebih rendah dari Kota Banda Aceh dan Nasional. Berbeda pada tahun sebelumnya, laju inflasi Kota Lhokseumawe sangat tinggi. Untuk lebih rinci dapat dilihat pada tabel 2.8 berikut ini:

Tabel 2.8
Perbandingan Laju Inflasi Nasional, Kota Banda Aceh dan Kota Lhokseumawe Tahun 2017 (%)

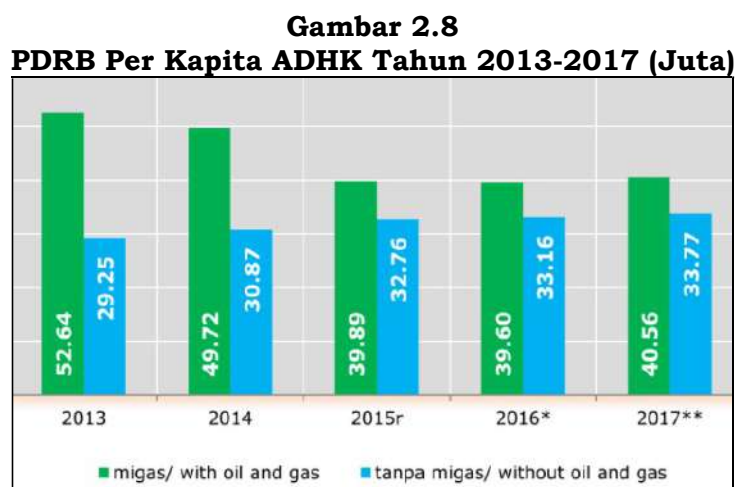
Bulan	Lhokseumawe	Banda Aceh	Nasional
Januari	0.26	0.28	0.97
Februari	-0.79	0.19	0.23
Maret	-1.4	-0.15	-0.02
April	-0.68	-0.1	0.09
Mei	0.9	0.86	0.39
Juni	0.9	0.81	0.69
Juli	0.34	0.32	0.22
Agustus	1.09	0.42	0.07
September	0.16	0.62	0.13
Oktober	0.1	0.17	0.01
November	0.31	0.3	0.2
Desember	1.69	1.06	0.71
JUMLAH	2.87	4.86	3.61
2016	5.6	3.13	3.02
2015	2.44	1.27	3.35
2014	8.53	7.83	8.36
2013	8.27	6.39	8.38

Sumber : BPS, Lhokseumawe Dalam Angka Tahun 2018.

Dari tabel 2.8 diatas dapat dijelaskan bahwa rata-rata Inflasi di Kota Lhokseumawe pada Tahun 2017 sebesar 2,87% dengan inflasi tertinggi terjadi pada bulan Desember sebesar 1,69%. Hal tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan Kota Banda Aceh sebesar 4,86% dan Laju Inflasi tingkat Nasional sebesar 3,61%.

2.1.3.1.3. PDRB Per Kapita

Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik Aceh Tahun 2018, PDRB per kapita Lhokseumawe Tahun 2017 dapat dilihat dalam gambar 2.8 dibawah ini:

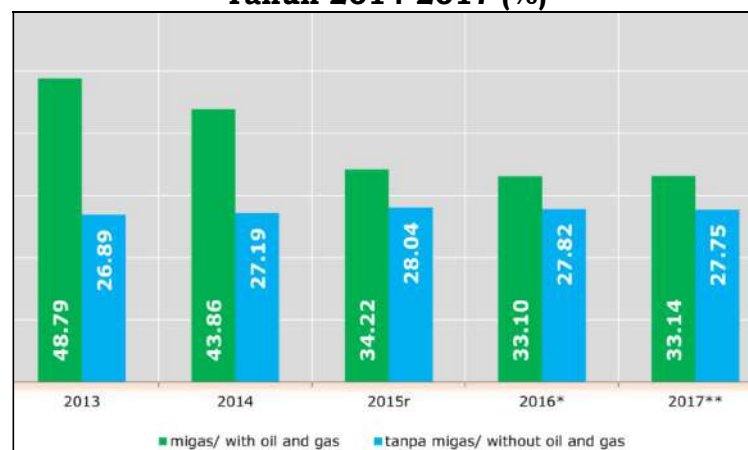


Sumber : BPS Aceh, 2018.

Dari gambar 2.8 diatas dapat dijelaskan bahwa PDRB per kapita Lhokseumawe Tahun 2017 adalah sebesar 40,56 juta rupiah setahun, meningkat sebesar 0,96 juta rupiah dari Tahun 2016 yang sebesar 39,60 juta rupiah setahun. Dengan mengeluarkan migas, selama lima tahun terakhir terlihat bahwa PDRB perkapita Lhokseumawe terus mengalami peningkatan. PDRB per kapita Lhokseumawe tanpa migas pada Tahun 2017 adalah sebesar 33,77 juta rupiah setahun, atau naik dari Tahun 2016 yang sebesar 33,16 juta rupiah setahun.

Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik Aceh Tahun 2018, Laju Pertumbuhan Implisit Lhokseumawe dapat dilihat dalam gambar 2.9 dibawah ini:

Gambar 2.9
Laju Pertumbuhan Implisit Lhokseumawe
Tahun 2014-2017 (%)



Sumber : BPS Aceh, 2018.

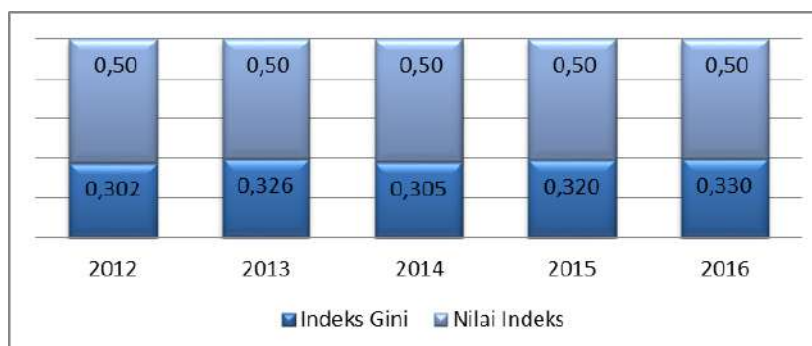
Dari gambar 2.9 diatas dapat dijelaskan bahwa untuk laju pertumbuhan implisit dapat dilihat dari pergerakan nilai PDRB per kapita harga konstan dengan migas yang mengalami penurunan setiap tahunnya, kecuali Tahun 2017. Sedangkan untuk PDRB per kapita harga konstan tanpa migas nilai pertumbuhannya positif namun sangat kecil. Tahun 2013 PDRB per kapita ADHK dengan migas sebesar 48,79 juta rupiah setahun dan terus menurun mencapai angka 33,10 juta rupiah ditahun 2016, lalu sedikit meningkat ditahun 2017 sebesar 33,14 juta rupiah setahun. Kemudian jika PDRB per kapita ADHK ditinjau tanpa migas, nilai PDRB per kapita Tahun 2013 sebesar 26,89 juta rupiah dan berturut-turut Tahun 2014-2016 bernilai 27,19 juta rupiah

setahun, 28.04 juta rupiah setahun, dan 27,82 juta rupiah setahun. Pada Tahun 2017 PDRB per kapita ADHK mencapai sebesar 27,75 juta rupiah setahun.

2.1.3.1.4. Indeks Rasio Gini

Indeks Gini merupakan salah satu indikator pembangunan ekonomi untuk menunjukkan tingkat pemerataan pendapatan yang dihitung berdasarkan kelas pendapatan individu. Rasio Gini mempunyai nilai antara 0 dan 1 dimana nilai 0 menunjukkan pemerataan yang sempurna sedangkan nilai 1 menunjukkan ketimpangan sempurna. Nilai Rasio Gini diupayakan agar mendekati nilai 0 untuk menunjukkan semakin meratanya tingkat pendapatan masyarakat di suatu daerah.

Gambar 2.10
Indeks Gini (Ketimpangan Pendapatan)
Kota Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016



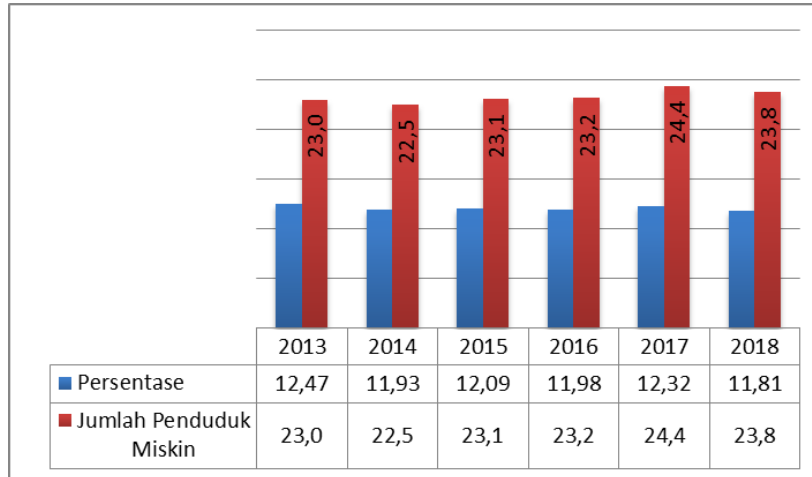
Sumber: PDRB Kota Lhokseumawe, 2017.

Dalam gambar 2.10 diatas dapat dijelaskan bahwa nilai Rasio Gini untuk zona utara berfluktuatif, sempat meningkat signifikan di Tahun 2012 (0.30) dibandingkan tahun sebelumnya. Tahun 2013 justru mengalami penurunan ke angka 0.27, namun hingga Tahun 2015 nilainya terus meningkat walaupun masih dalam kategori ketimpangan rendah karena di bawah batas ketimpangan (<0,35). Nilai rasio gini zona utara masih lebih rendah jika dibandingkan dengan Aceh dan zona lainnya, terutama ditahun 2015, dimana Aceh memiliki rasio 0,33 dan zona lainnya di angka 0.30.

2.1.3.1.5. Persentase Penduduk diatas Garis Kemiskinan

Berdasarkan data Lhokseumawe Dalam Angka Tahun 2018, jumlah penduduk miskin Kota Lhokseumawe mengalami pergerakan yang dinamis sebagaimana dapat dilihat dalam gambar 2.11 dibawah ini:

Gambar 2.11
Jumlah Penduduk Miskin
Kota Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016



Sumber : Lhokseumawe Dalam Angka 2018.

Berdasarkan gambar 2.11 diatas dapat dijelaskan bahwa Tingkat kemiskinan Kota Lhokseumawe selama periode 2013 hingga 2018 bergerak secara dinamis, terlihat bahwa pada Tahun 2013 persentase kemiskinan Kota Lhokseumawe sebesar 12,47 % dan Tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 11,93 %. Namun persentase penduduk miskin Kota Lhokseumawe mengalami kenaikan kembali pada Tahun 2017 sebesar 12,32 %. Kemudian Tahun 2018 mengalami penurunan yakni 11,81 % atau 23.8 jiwa, turun sekitar 0,51 % dari Tahun 2017.

Gambaran di atas merupakan hasil kerja dan jerih payah semua pihak serta bentuk partisipasi yang tinggi dari masyarakat guna mengatasi kemiskinan Kota Lhokseumawe. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe diantaranya dengan memberikan bantuan modal usaha baik di sektor jasa, perdagangan, dan perindustrian. Disamping itu terdapat program-program unggulan yang ikut memberi pengaruh besar dalam hal peningkatan perekonomian masyarakat Kota Lhokseumawe sehingga persentase penduduk di atas garis kemiskinan menurun.

2.1.3.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

Kondisi kesejahteraan sosial di Kota Lhokseumawe dapat dijelaskan melalui perkembangan kesejahteraan dalam bidang pendidikan dan kesehatan yang memerlukan campur tangan pemerintah dalam peningkatan kualitasnya.

2.1.3.2.1. Pendidikan

Kondisi kesejahteraan sosial bidang pendidikan antara lain angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah

A. Angka Melek Huruf

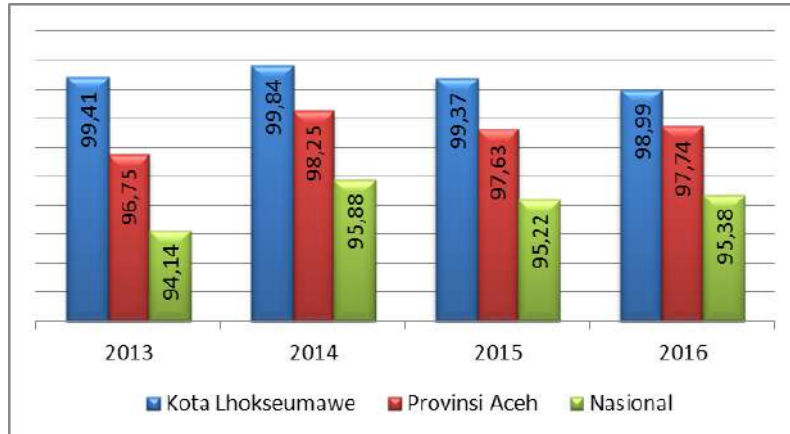
Pengukuran tingkat kualitas pendidikan dapat dilihat dari Angka Melek Huruf (AMH). Pencapaian AMH merupakan angka pendidikan dasar dan program pemberian keahlian melek huruf terhadap penduduk. Selain itu AMH dapat digunakan untuk:

1. mengukur keberhasilan program-program pemberantasan buta huruf, terutama di daerah pedesaan di Indonesia dimana masih tinggi jumlah penduduk yang tidak pernah bersekolah atau tidak tamat SD.
2. menunjukkan kemampuan penduduk di suatu wilayah dalam menyerap informasi dari berbagai media.
3. menunjukkan kemampuan untuk berkomunikasi secara lisan dan tertulis.

Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik Aceh Tahun 2018, Angka Melek Huruf (AMH) Kota Lhokseumawe Tahun 2017 adalah sebesar 98,99% dan sudah berada di atas rata-rata AMH Nasional dan AMH Aceh, dimana pada Tahun 2017 rata-rata AMH Nasional adalah 95,38% sedangkan rata-rata AMH Aceh 97,74%.

Berikut gambar 2.12 menjelaskan Angka Melek Huruf (AMH) Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Kota Lhokseumawe Tahun 2012 samapi dengan Tahun 2017:

Gambar 2.12
Angka Melek Huruf (AMH) Penduduk Usia 15 Tahun keatas
Kota Lhokseumawe Tahun 2013 s.d 2017

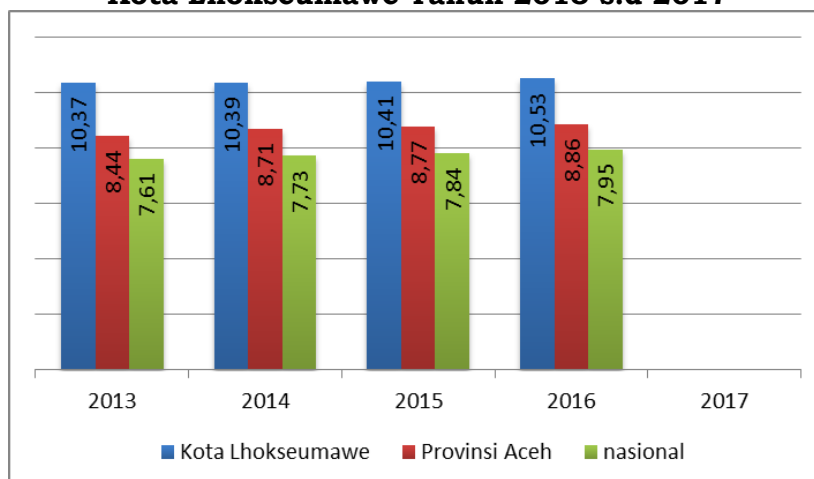


Sumber : BPS Aceh, 2018.

B. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah mengindikasikan tingginya pendidikan yang dicapai oleh masyarakat pada suatu daerah. Makin tinggi rata-rata lama sekolah berarti semakin tinggi jenjang pendidikan yang dijalani. Rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah penduduk 15 tahun ke atas yang telah menyelesaikan pendidikan di seluruh jenjang pendidikan formal yang pernah diikuti. Rata-rata lama sekolah Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada gambar 2.13 berikut ini:

Gambar 2.13
Angka Rata-Rata Lama Sekolah
Kota Lhokseumawe Tahun 2013 s.d 2017



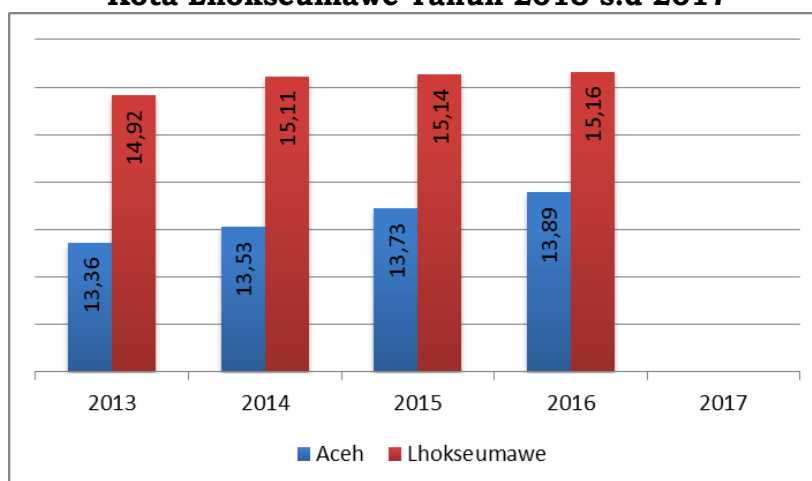
Sumber : BPS Aceh, 2018.

Dari Gambar 2.13 dapat dilihat bahwa sampai dengan tahun 2016 Angka Rata-rata Lama Sekolah di Kota Lhokseumawe masih berada di atas Rata-Rata Lama Sekolah tingkat provinsi dan nasional, dimana di Kota Lhokseumawe tercatat 10.53% sedangkan provinsi sebesar 8,86% dan nasional tercatat hanya sebesar 7,95%.

C. Angka Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah Kota Lhokseumawe meningkat dari tahun ke tahun. Rata-rata angka harapan lama sekolah sudah berada di atas rata-rata nasional (12,29). Berikut angka harapan lama sekolah Kota Lhokseumawe dalam gambar 2.14 berikut ini:

Gambar 2.14
Angka Harapan Lama Sekolah
Kota Lhokseumawe Tahun 2013 s.d 2017



Sumber : BPS Aceh, 2018.

Gambar 2.14 di atas menggambarkan bahwa Angka Harapan Lama Sekolah Kota Lhokseumawe pada tahun 2013 sebesar 14,92% meningkat menjadi 15,16% pada akhir tahun 2016. Angka ini juga menunjukkan bahwa bahwa Angka Harapan Lama Sekolah Kota Lhokseumawe masih di atas angka provinsi yang hanya mencapai 13,36% pada tahun 2013 dan 13,89% pada tahun 2016.

2.1.3.2.2. Kesehatan

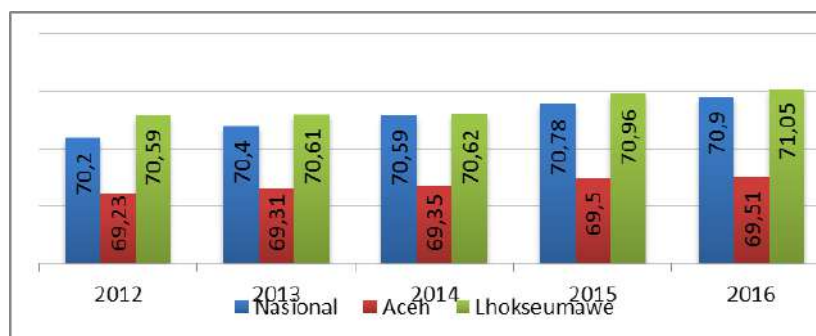
Kondisi kesejahteraan sosial bidang kesehatan antara lain Angka Usia Harapan Hidup dan Indeks Pembangunan Manusia.

A. Angka Usia Harapan Hidup

Angka Usia Harapan Hidup (UHH) merupakan salah satu indikator dalam mengukur indeks pembangunan manusia (IPM). Selain AKB dan AKI, UHH juga digunakan untuk menilai derajat kualitas hidup masyarakat baik kabupaten/kota, propinsi maupun negara. Keberhasilan program kesehatan dan program pembangunan sosial ekonomi pada umumnya juga dapat dilihat dari peningkatan UHH penduduk dari satu negara.

Upaya untuk meningkatkan UHH menjadi 71 tahun merupakan hal penting yang perlu dicermati melalui upaya-upaya peningkatan kegiatan yang berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat seperti penurunan resiko kesakitan pada keluarga rentan, trend penyakit degeneratif dan tidak menular, serta peningkatan kesehatan kelompok usia lanjut yang dapat hidup produktif dan mandiri. Berikut gambar 2.15 berkenaan dengan angka usia harapan hidup Kota Lhokseumawe tahun 2012 sampai dengan 2016:

Gambar 2.15
Angka Usia Harapan Hidup (UHH)
Kota Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016.



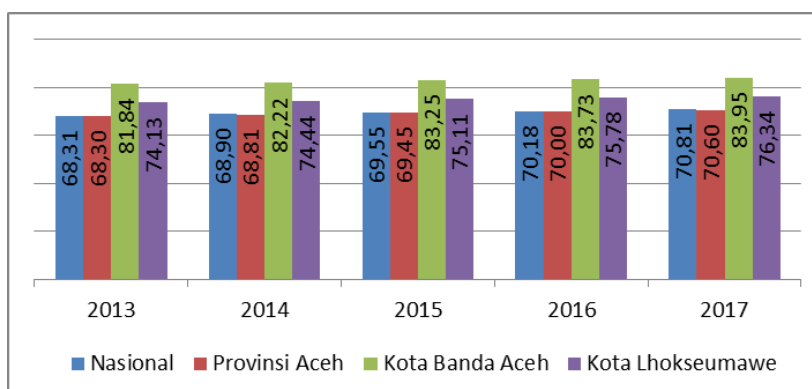
Sumber : Lhokseumawe Dalam Angka, 2017.

Dari Gambar 2.15 dapat dilihat bahwa angka UHH di Kota Lhokseumawe setiap tahunnya mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat pada tahun 2012 UHH di Kota Lhokseumawe mencapai 70,59 tahun dan pada tahun 2016 meningkat menjadi 71,05 tahun. Angka ini masih berada di atas rata-rata nasional dan provinsi. Pada tahun 2012 Angka UHH Nasional tercatat 70,20 tahun dan 70,90 tahun pada tahun 2016. Sedangkan provinsi tercatat 69,23 tahun pada tahun 2012 dan 69,51 tahun pada tahun 2016.

B. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Index*) (IPM/HDI) adalah satuan untuk mengukur kesuksesan pembangunan suatu wilayah. IPM/HDI adalah angka yang diolah berdasarkan tiga dimensi: yaitu panjang usia (*longevity*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup (*standard of living*) suatu wilayah. IPM yang tinggi menunjukkan keberhasilan pembangunan kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Sebaliknya, IPM yang rendah menunjukkan ketidakberhasilan pembangunan kesehatan, pendidikan, dan ekonomi suatu negara. Berikut gambar 2.16 perihal perkembangan IPM Kota Lhokseumawe antara Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2017:

Gambar 2.16
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kota Lhokseumawe Tahun 2013 s.d Tahun 2017



Sumber : BPS Aceh, 2018.

Jika dilihat dari peringkatnya, Aceh menempati peringkat ke-11 dari 34 Provinsi di Indonesia pada Tahun 2017. Bila diperhatikan IPM per kabupaten/kota, IPM Kota Banda Aceh mempunyai nilai yang sangat tinggi sebesar 83,95 disusul dengan Kota Lhokseumawe sebesar 76,34.

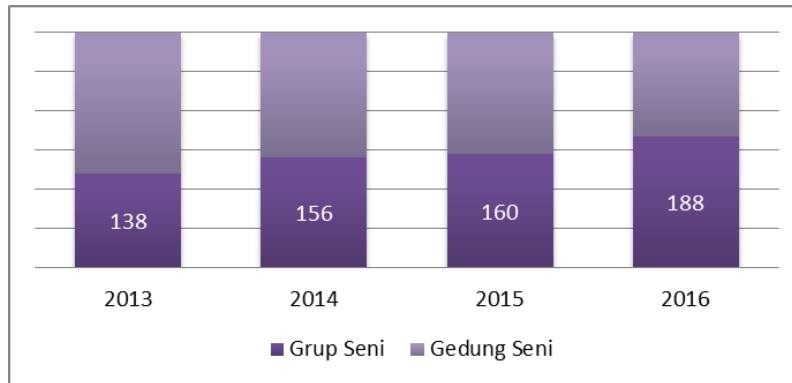
2.1.3.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Kondisi seni budaya dan olahraga di Kota Lhokseumawe dapat dijelaskan melalui perkembangan seni budaya dan pemuda dan olahraga yang selalu mengalami perkembangan dinamis dan memerlukan peran pemerintah dalam peningkatan kualitasnya.

2.1.3.3.1. Kebudayaan

Di Kota Lhokseumawe Gedung Kesenian hingga Tahun 2016 belum memiliki aset gedung kesenian sendiri. Namun sejak tahun 2016 Pemerintah Kota Lhokseumawe telah mulai membangun Gedung Kesenian dengan dana yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) walaupun sampai dengan akhir 2018 gedung tersebut belum tuntas pembangunannya. Direncanakan gedung tersebut akan tuntas dibangun pada tahun 2019 dengan sumber dana DOKA. Selama ini pagelaran kesenian yang diselenggarakan Kota Lhokseumawe menggunakan Gedung KNPI dan Stadion Tunas Bangsa. Sementara itu jumlah grup kesenian terus tumbuh setiap tahunnya. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada gambar 2.17 berikut ini:

Gambar 2.17
Group Kesenian dan Gedung Kesenian
Kota Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016



Sumber: Disporapar Kota Lhokseumawe, 2017.

Dari gambar 2.17 dapat dilihat bahwa jumlah group kesenian pada tahun 2013 sebanyak 138 group, terus meningkat setiap tahunnya hingga tahun 2016 mencapai 188 group.

2.1.3.3.2. Pemuda dan Olahraga

Sementara itu, Jumlah Klub Olahraga dan Gedung Olahraga Berdasarkan data Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Lhokseumawe, jumlah klub olahraga sampai dengan Tahun 2018 yang ada di Kota Lhokseumawe berjumlah 125 Klub. Jumlah tersebut terdiri dari klub sepak bola sebanyak 75 klub, futsal sebanyak 15 klub, klub voli berjumlah 12 klub, klub sepeda sebanyak 8 klub, klub panahan 1 klub, klub menembak sebanyak 8 klub dan klub tenis lapangan sebanyak 6 klub. Kota

Lhokseumawe saat ini memiliki gedung olahraga sebanyak 1 unit yaitu Gedung Olahraga ARUN yang terletak di Komplek Perumahan PT. Perta Arun Gas (PAG).

2.1.4. Aspek Pelayanan Umum

Kondisi pelayanan umum di Kota Lhokseumawe mengacu pada beberapa urusan antara lain urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pemerintahan pilihan dan urusan penunjang urusan pemerintahan serta urusan keistimewaan dan kekhususan.

2.1.4.1. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Pelayanan umum Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar dibagi kepada beberapa bidang antara lain Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat dan bidang Sosial

2.1.4.1.1. Pendidikan

Kondisi pelayanan umum bidang pendidikan dapat dijelaskan melalui beberapa indikator antara lain perkembangan pendidikan anak usia dini, angka partisipasi kasar, angka partisipasi murni, angka partisipasi murni jenjang SD/MI/Paket A, angka partisipasi murni jenjang SMP/MTs/Paket B, angka partisipasi sekolah jenjang SD/MI/Paket A, angka partisipasi sekolah jenjang SMP/MTs/Paket B, angka putus sekolah, angka kelulusan, angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs, angka melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/MA, ruang sekolah pendidikan kondisi bangunan baik, rasio ketersediaan sekolah/penduduk, rasio guru/murid sekolah, rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dan penduduk yang berusia > 15 tahun melek huruf.

A. Pendidikan Anak Usia Dini

Secara umum layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kota Lhokseumawe bagi penduduk usia 4-6 tahun masih belum merata sampai ke pedesaan. Jumlah lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kota Lhokseumawe Tahun 2016 adalah sebanyak 138 Sekolah Negeri & Swasta dengan jumlah murid 5020 orang.

Tabel 2.9
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Kota Lhokseumawe Tahun 2016

Kecamatan	Sekolah			Jumlah Siswa		
	Negeri	Swasta	N+S	L	P	L+P
Muara Dua	1	39	40	562	914	1476
Banda Sakti	1	47	48	1056	1013	2069
Blang Mangat	1	24	25	345	343	688
Muara Satu	2	23	25	404	383	787
Jumlah	5	133	138	2367	2653	5020

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2017.

Dari tabel 2.9 dapat dijelaskan bahwa jumlah PAUD di Kota Lhokseumawe tersebar di empat kecamatan. PAUD terbanyak berada di Kecamatan Banda Sakti dengan jumlah 48 PAUD dengan jumlah murid mencapai 2069 orang. Sedangkan PAUD yang paling sedikit berada di Kecamatan Blang Mangat dan Kecamatan Muara Satu dengan masing-masing 25 PAUD dan jumlah murid masing-masing 688 orang di Kecamatan Blang Mangat dan 787 orang di Kecamatan Muara Satu.

B. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Partisipasi sekolah dapat dilihat dari Angka Partisipasi Kasar (APK), APK menunjukkan proporsi anak sekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok usia yang sesuai jenjang pendidikan tersebut, APK yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya. Jika nilai APK mendekati atau lebih dari 100 persen menunjukkan bahwa ada penduduk yang sekolah belum mencukupi umur dan atau melebihi umur yang seharusnya.

Tabel 2.10
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK)
Kota Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016

No	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	SD/MI					
1.1	Jlh siswa usia 7-12 thn	17.894	20.092	20.737	21.062	19.727
1.2	Jlh penduduk kelompok usia 7-12 thn	18.119	20.967	21.399	21.791	21.062
1.3	APK SD/MI	122.73	105.14	103.41	102.09	105.63
2	SMP/MTs					
2.1	Jlh siswa 13-15 thn	9.488	10.315	11.012	11.040	9.659
2.2	Jlh penduduk kelompok usia 13-15 thn	11.556	12.066	12.542	12.538	12.219
2.3	APK SMP/MTs	104,39	104.57	103.6	100.61	101
3	SMA/MA/SMK					
3.1	Jlh siswa 16-18 thn	9.226	7.238	9.171	9.300	8.715
3.2	Jlh penduduk kelompok usia 16-18 thn	10.435	10.103	11.744	12.415	12.361
3.3	APK SMA/MA/SMK	108,13	106.18	97,56	91.87	91.8

Sumber : <http://apkapm.data.kemdikbud.go.id/>

Dari tabel 2.10 diatas dapat kita lihat bahwa angka partisipasi kasar pada tingkat SD/ MI/ Paket A tertinggi pada tahun 2012 sebesar 122.73. Sedangkan terendah pada tahun 2015 sebesar 102.09 artinya dari tabel diatas seluruh penduduk kelompok usia sekolah dasar telah memperoleh pendidikan sekolah dasar. Begitu juga terjadi pada tingkat SMP/ MTs seluruh penduduk Kota Lhokseumawe usia Sekolah menengah pertama telah memperoleh pendidikan, itu terlihat pada tahun 2013 Angka partisipasi kasar sebesar 104.57 dan terendah pada tahun 2015 sebesar 100.61. Untuk Tingkat Sekolah Menengah Atas, Angka Partisipasi Kasar SMA/ SMK/ MA/ Paket C tertinggi terjadi pada tahun 2012 sebesar 108,1 dan terendah sebesar 91.8 yang terjadi pada tahun 2016.

C. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) menunjukkan proporsi anak sekolah pada suatu kelompok usia tertentu yang bersekolah pada tingkat yang sesuai dengan kelompok umurnya. Bila APM kurang dari APK berarti terdapat murid SD diluar usia 7-12 tahun (*underage*) atau di atas umur (*overage*). Dari tabel diatas menunjukkan bahwa APK selalu lebih besar dari APM, berarti masih ada penduduk yang sekolah di luar usia sekolah yang bersesuaian, untuk lebih jelas dapat dilihat tabel berikut ini,

Tabel 2.11
Angka Partisipasi Murni (APM)
Kota Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016

No	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	SD/MI					
1,1	Jlh siswa usia 7-12 thn	17.894	20.092	20.737	21.062	19.727
1,2	Jlh penduduk kelompok usia 7-12 thn	18.119	20.967	21.399	21.791	21.062
1,3	APM SD/MI	98,76	95,83	96,91	96,65	93,66
2	SMP/MTs					
2,1	Jlh siswa 13-15 thn	9.488	10.315	11.012	11.040	9.659
2,2	Jlh penduduk kelompok usia 13-15 thn	11.556	12.066	12.542	12.538	12.219
2,3	APM SMP/MTs	82,1	85,49	87,8	88,05	79,05
3	SMA/MA/SMK					
3,1	Jlh siswa 16-18 thn	9.226	7.238	9.171	9.300	8.715
3,2	Jlh penduduk kelompok usia 16-18 thn	10.435	10.103	11.744	12.415	12.361
3,3	APM SMA/MA/SMK	88,41	71,64	78,09	74,91	70,5

Sumber : <http://apkapm.data.kemdikbud.go.id/>

Dalam tabel 2.11 diatas, menunjukkan Angka partisipasi murni pada tingkat SD/MI tertinggi terjadi pada Tahun 2012 sebesar 98,76. Sedangkan angka terendah terjadi pada Tahun 2016 yaitu sebesar 93,66. Pada tingkat SMP/MTs angka partisipasi murni tertinggi terjadi pada tahun 2015 yaitu 88,05. Sedangkan angka terendah terjadi pada Tahun 2016 sebesar 79,05. Pada tingkatan SMA/MA/SMK angka partisipasi murni tertinggi pada tahun 2012 sebesar 88,41. Sedangkan angka terendah terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 70,5.

D. Angka Partisipasi Murni (APM) Jenjang SD/MI/Paket A

APM menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya. Jika APM = 100, berarti seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu.

Tabel 2.12
Angka Partisipasi Murni (APM) Jenjang SD/MI
Kota Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016

No	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	APM SD/MI	98,76	95,83	96,91	96,65	93,66

Sumber : <http://apkapm.data.kemdikbud.go.id/>

Tabel 2.12 di atas menunjukkan bahwa Kota Lhokseumawe mempunyai angka APM yang fluktuatif, di mana angka APM pada tahun 2012 mencapai 98,76 namun pada tahun 2016 hanya mencapai 93,66. Ini terjadi penurunan sebesar 5,1 point.

E. Angka Partisipasi Murni (APM) Jenjang SMP/MTs/Paket B

Menurut BPS, Angka Partisipasi Murni didefinisikan sebagai Proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut.

Tabel 2.13
Angka Partisipasi Murni (APM) Jenjang SMP/MTs
Kota Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016

No	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	APM SMP/MTs	82,1	85,49	87,8	88,05	79,05

Sumber : <http://apkapm.data.kemdikbud.go.id/>

Tabel 2.13 di atas menunjukkan bahwa APM di Kota Lhokseumawe selalu berubah. Tahun 2012 angka APM mencapai 82,1 dan pada tahun 2016 hanya 79,05.

F. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Jenjang SD/MI/Paket A

Badan Pusat Statistik mendefinisikan Angka Partisipasi Sekolah sebagai proporsi dari semua anak yang masih sekolah

pada suatu kelompok umur tertentu terhadap penduduk dengan kelompok umur yang sesuai.

Tabel 2.14
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Jenjang SD/MI
Kota Lhokseumawe Tahun 2013 s.d 2016

Jenjang Pendidikan	Tahun			
	2013	2014	2015	2016
APS SD/MI	84,6	83,1	85,0	91,5
Jlh siswa usia 7-12 thn	19,696	18,929	19,895	19,072
Jlh penduduk kelompok usia 7-12 Thn	23,291	22,779	23,417	23,928

Sumber :Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2017

Dari data tabel 2.14 diatas, dapat kita ketahui bahwa Angka Partisipasi Sekolah Di Kota Lhokseumawe cenderung meningkat. Penurunan terjadi pada Tahun 2013 ke Tahun 2014. Hingga tahun 2016 APS SDM/MI mencapai 91,5 meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 85,0.

G. Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B

Angka Partisipasi Sekolah pada jenjang SMP/MTs di Kota Lhokseumawe sangat fluktuatif. Angka Partisipasi Sekolah tertinggi terdapat pada Tahun 2015 dengan nilai mencapai 90,9 sedangkan terendah terjadi pada Tahun 2013 dengan nilai 77,6 sebagaimana dalam tabel 2.15 berikut ini:

Tabel 2.15
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Jenjang SMP/MTs
Kota Lhokseumawe Tahun 2013 s.d 2016

Jenjang Pendidikan	Tahun			
	2013	2014	2015	2016
APS SMP/MTs	77,6	82,5	90,9	83,5
Jlh siswa 13-15 thn	8,907	8,961	9,977	8,692
Jlh penduduk kelompok usia 13-15 Thn	11,484	10,865	10,972	11.125

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2017.

H. Angka Putus Sekolah

Angka Putus Sekolah mencerminkan anak-anak usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Angka Putus Sekolah digunakan untuk mengukur kemajuan pembangunan di

bidang pendidikan dan untuk melihat keterjangkauan pendidikan maupun pemerataan pendidikan pada masing-masing kelompok umur (7-12, 13-15 dan 16-18 tahun). Penyebab utama putus sekolah antara lain karena kurangnya kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan anak sebagai investasi masa depannya, kondisi ekonomi orang tua yang miskin, dan keadaan geografis yang kurang menguntungkan, untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 2.16 berikut ini,

Tabel 2.16
Angka Putus Sekolah (APS)
Kota Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016

No	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	SD/ MI	0.15	0.12	0.49	0.05	0.03
2	SMP/ MTs	0.06	0	0	0.008	0

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2016.

Angka putus sekolah jenjang SD/MI di Kota Lhokseumawe, secara umum hanya berada kisaran angka di bawah 1. Dan kecenderungan menurun setiap tahunnya. Angka tertinggi terjadi pada Tahun 2014 dengan nilai mencapai 0,49 dan angka terendah terjadi pada Tahun 2016 dengan nilai 0,03. Sedangkan Angka putus sekolah jenjang SMP/ MTs di Kota Lhokseumawe, secara umum hanya berada pada angka 0. Dan ini terjadi pada Tahun 2013, 2014 dan Tahun 2016. Angka putus sekolah tertinggi hanya mencapai angka 0,06 saja.

I. Angka Kelulusan

Angka Kelulusan di Kota Lhokseumawe di setiap tahunnya mengalami perubahan baik di tingkat SD, SMP maupun SMA. Perubahan Angka Kelulusan apabila dilihat pada tabel dibawah ini yang menunjukkan data 6 (enam) tahun terakhir sering terjadi penurunan dan kenaikan, hal ini disebabkan ada murid yang pindah sekolah sebelum berakhir masa pendidikannya disekolah tersebut baik yang masuk ke Kota Lhokseumawe ataupun keluar dari Kota Lhokseumawe menuju Kab/Kota lain sehingga jumlah dan lulusan murid di Kota Lhokseumawe berubah-ubah. Angka

Kelulusan Sekolah untuk Tahun 2016 sesuai dengan data di bawah ini pada tingkat SD sebanyak 100 persen, SMP sebanyak 99 persen dan untuk SMA sendiri sebanyak 99 persen, untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 2.17 berikut ini,

Tabel 2.17
Angka Kelulusan
Kota Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016

No	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	SD/ MI	100%	100%	100%	100%	100%
1	SMP/ MTs	98.77%	99.97%	99.07%	99.64%	99 %

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2016.

Tabel di atas menggambarkan Angka Kelulusan siswa sesuai kelompok jenjang pendidikan SD/MI diwilayah Kota Lhokseumawe dari Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2016. Kelulusan tertinggi di tingkat SD/ MI sebesar 100% pada Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2016. Sedangkan pada jenjang SMP/MTs, angka kelulusan belum mencapai 100%. Angka kelulusan tertinggi terjadi pada Tahun 2013 dengan nilai mencapai 99,97 % sedangkan terendah terjadi pada Tahun 2016 dengan nilai hanya 99% saja.

J. Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs

Dari tabel 2.18 dibawah ini dapat kita ketahui bahwa angka melanjutkan tingkat SD/MI ke jenjang SMP/MTs pada tahun 2016 mencapai nilai 117,4 dan meningkatkan pada tahun 2017 menjadi 121,0

Tabel 2.18
Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs
Kota Lhokseumawe Tahun 2016 s.d 2017

AM SD/MI Ke SMP/MTs 2016	Siswa Baru 2016/2017		Lulusan 2015/2016		AM
	SMP	MTS	SD	MI	
	2.723	1.360	2.861	618	
AM SD/MI Ke SMP/MTs 2017	Siswa Baru 2017/2018		Lulusan 2016/2017		AM
	SMP	MTS	SD	MI	
	1.526	2.569	2.738	647	

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Diolah dari Laporan Individual Sekolah) 2017

K. Angka Melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/MA

Angka melanjutkan dari jenjang SMP/MTs ke jenjang SMA/MA/SMK dari Tahun 2016 ke Tahun 2017 meningkatkan. Tahun 2016 hanya mencapai 96,0 dan pada Tahun 2017 mencapai angka 101,8 sebagaimana dalam tabel 2.19 berikut:

Tabel 2.19
Angka Melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/MA/SMK
Kota Lhokseumawe Tahun 2016 s.d 2017

AM SMP/MTs Ke SMA/MA/SMK 2016	Siswa Baru 2016/2017			Lulusan 2015/2016		AM
	SMA	SMK	MA	SMP	MTs	
	1.483	1.715	773	2.716	1421	96,0
AM SMP/MTs Ke SMA/MA/SMK 2017	Siswa Baru 2017/2018			Lulusan 2016/2017		AM
	SMA	SMK	MA	SMP	MTs	
	1.390	1.827	865	2.595	1413	101,8

Sumber :Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2017.

L. Ruang Sekolah Pendidikan Kondisi Bangunan Baik

Kondisi Sekolah SD/MI Kota Lhokseumawe masih terdapat ruang kelas dengan kondisi rusak berat dan rusak ringan. Pada Tahun 2014 kondisi sekolah pada jenjang pendidikan SD/MI terdapat 517 ruang kelas bekondisi baik, 115 ruang kelas yang kondisinya rusak ringan, sedangkan pada Tahun 2015 kondisi sekolah pendidikan SD/ MI yang berkondisi baik sebanyak 562 ruang kelas, untuk kondisi rusak ringan sebanyak 112 ruang kelas. Selanjutnya pada Tahun 2016 kondisi sekolah pendidikan SD/ MI yang berkondisi baik 587 ruang kelas, 107 ruang kelas yang kondisinya rusak ringan.

Sedangkan jumlah ruang kelas baik pada tingkat SMP dan SMA semakin baik untuk tiap tahun. Pada Tahun 2016, untuk tingkat SMP/MTs 365 ruang kelas dengan kondisi baik dan rusak ringan 55 ruang. Untuk tingkat Sekolah Menengah terdapat 426 ruang kelas dengan kondisi baik, dan 15 ruang kelas dengan kondisi rusak ringan. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.20
Kondisi Ruang Kondisi Baik
Kota Lhokseumawe Tahun 2014 s.d 2016

Jenjang Pendidikan	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016		
	Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
SD/ MI	517	115	0	562	112	0	587	107	0
SMP/ MTs	373	60	-	345	58	-	365	55	-
SMA/MA/SMK	363	32	-	401	27	-	426	15	-

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2016.

M. Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk

Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah adalah indikator untuk mengukur kemampuan jumlah sekolah dalam menampung penduduk usia pendidikan. Rasio ini bisa diartikan jumlah sekolah berdasarkan tingkat pendidikan per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan. Berikut tabel 2.21 tentang Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Kota Lhokseumawe:

Tabel 2.21
Jumlah Sekolah dan Murid
Kota Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016

No	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	SD/MI					
1.1	Jumlah Sekolah	74	74	74	75	75
1.2	Jumlah Penduduk kelompok usia 7 - 12 Tahun	21,927	23,921	22,779	23,417	23,417
2	SMP/ MTs					
2.1	Jumlah Sekolah	41	41	41	40	40
2.2	Jumlah Penduduk kelompok usia 13 - 15 Tahun	11,030	11,484	10,865	10,972	10,972
a	Jumlah Sekolah	115	115	115	115	115
b	Jumlah Penduduk kelompok usia	32,957	35,405	33,644	34,389	34,389
	RASIO (b/a)	287	308	293	299	299

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2017.

Dari tabel tersebut dapat digambarkan bahwa Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk setiap tahunnya mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2012 rasio sebesar 284 dan pada tahun 2016 meningkat menjadi 299.

N. Rasio Guru/Murid Sekolah

Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru berdasarkan tingkat pendidikan per 10.000 jumlah murid berdasarkan tingkat pendidikan. Pada Tahun 2012 Rasio ketersediaan guru untuk SD/MI sebesar 1 : 14.4 sedangkan pada Tahun 2016 menjadi 1 : 13.4 yang artinya 1 orang guru mengajar 13 murid SD/MI. Hal ini juga terjadi dari tingkat SMP/MTs, Pada Tahun 2012 rasio ketersediaan guru hanya 1 : 9.5 dan mengalami kenaikan hingga pada Tahun 2016 menjadi 1 : 10.5 untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 2.22 berikut ini:

Tabel 2.22
Rasio Guru/Murid Sekolah
Kota Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016

No	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	SD/MI					
1.1	Jumlah Guru	1.539	1.578	1.598	1.648	1.648
1.2	Jumlah Murid	22.308	22.189	22.246	22.168	22.168
1.3	Rasio	14.4	14.0	13.9	13.4	13.4
2	SMP/ Mts					
2.1	Jumlah Guru	1.278	1.249	1.242	1.250	1.250
2.2	Jumlah Murid	12.178	12.747	12.931	13.222	13.222
2.3	Rasio	9.5	10.2	10.4	10.5	10.5

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2016.

O. Rasio Guru/Murid Per Kelas Rata-Rata Sekolah

Rasio guru/ murid per kelas rata-rata tertinggi untuk jenjang SD/MI di Kota Lhokseumawe terjadi pada Tahun 2012 sebesar 1.9 persen dan yang terendah yaitu pada Tahun 2015 sebesar 1.9 persen. Sedangkan untuk jenjang SMP/ MTs rasio tertinggi sebesar 3.2 persen pada Tahun 2012 dan terendah pada Tahun 2014 yaitu 2.7 persen. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 2.23 berikut ini:

Tabel 2.23
Rasio Guru/ Murid per Kelas Rata-rata
Kota Lhokseumawe Tahun 2012s.d 2016

No	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	SD/MI	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9
2	SMP/ MTs	3.2	2.9	2.7	2.9	2.9

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2017.

P. Penduduk Yang Berusia > 15 Tahun Melek Huruf

Salah satu indikator terlaksananya pendidikan masyarakat dengan baik yaitu dapat dilihat dari meningkatnya Angka Melek Huruf atau kemampuan baca tulis dalam masyarakat tersebut. Angka Melek Huruf (AMH) adalah persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang bisa membaca dan menulis serta mengerti sebuah kalimat sederhana dalam hidupnya sehari-hari. Angka Melek Huruf untuk penduduk di wilayah Kota Lhokseumawe mengalami peningkatan, yaitu Tahun 2012 sebesar 98 persen, terus mengalami peningkatan hingga mencapai 99 persen di Tahun 2016. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada table 2.24 berikut ini:

Tabel 2.24
Angka Melek Huruf Usia > 15 Tahun
Kota Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016

Jenjang Pendidikan	Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016
Persentase Angka Melek Huruf	98,17	99,41	99,84	99,37	99,37

Sumber : Dinas Pendidikan dan kebudayaan Tahun 2017.

2.1.4.1.2. Kesehatan

Kondisi pelayanan umum bidang kesehatan dapat dijelaskan melalui beberapa indikator antara lain angka kematian bayi, angka kelangsungan hidup bayi, angka kematian balita, angka kematian neonatal, angka kematian ibu, rasio posyandu, rasio puskesmas, poliklinik, dan pustu, rasio rumah sakit, rasio dokter, rasio tenaga medis, cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani, cakupan pertolongan persalinan, cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization, balita gizi buruk, persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak, cakupan penemuan dan penanganan penderita Non Polio, cakupan balita Pneumonia yang ditangani, cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA, tingkat prevelensi TBC, tingkat kematian karena TBC, proporsi jumlah kasus TBC yang terdeteksi, diobati dan sembuh dalam program DOTS,

Selanjutnya cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD, penderita diare yang ditemukan dan ditangani,

angka kesakita malaria, tingkat kematian akibat malaria, jumlah kasus HIV/Aids, cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin, cakupan kunjungan bayi, cakupan puskesmas dan pembantu puskesmas, cakupan kunjungan ibu hamil K4, cakupan pelayanan nifas, cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani, cakupan pelayanan anak balita, cakupan penjangingan kesehatan siswa SD dan setingkat, cakupa pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin, cakupan pelayanan gawat darurat, dan cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi.

A. Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 Kelahiran Hidup

Angka kematian bayi(*Infant Mortality Rate/IMR*) adalah jumlah bayi yang meninggal sebelum mencapai usia 1 tahun yang dinyatakan dalam 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. AKB merupakan indikator yang biasa digunakan untuk menentukan derajat kesehatan masyarakat. Oleh karena itu banyak upaya kesehatan yang di lakukan dalam rangka menurunkan AKB.

Berbagai faktor dapat menyebabkan adanya penurunan AKB,diantaranya pemerataan pelayanan kesehatan berikut fasilitasnya. Hal ini disebabkan AKB sangat sensitif terhadap perbaikan pelayanan kesehatan. Selain perbaikan kondisi ekonomi yang tercermin dengan pendapatan masyarakat yang meningkat juga dapat berkontribusi melalui gizi yang berdampak pada daya tahan terhadap infeksi penyakit.

Tabel 2.25
Angka Kematian Bayi (AKB) (%)
Kota Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016

No	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Kota Lhokseumawe	12,3	12,3	12,3	11,7	11,1

Sumber : Dinas Kesehatan Tahun 2017.

Pada tabel 2.25 di atas dapat dilihat dalam kurun waktu tiga (3) tahun terdapat AKB yang tinggi 12.3% pada tahun 2014 dan terjadi penurunan 11.1% di tahun 2016 berarti ada dampak yang positif dengan turunnya AKB.

B. Angka Kelangsungan Hidup Bayi

Angka Kelangsungan Hidup Bayi dapat dilihat dari Jumlah Angka Kematian Bayi (AKB) (berumur kurang 1 tahun) pada satu tahun tertentu. Dan membandingkan jumlah Angka Kelahiran Hidup Bayi (AKHB) pada satu tahun tertentu. Angka kematian bayi (AKB) merupakan salah satu indikator yang menentukan derajat kesehatan suatu daerah.

Tabel 2.26
AKHB dan AKB
Kota Lhokseumawe Tahun 2014 s.d 2016

Tahun	Kecamatan	Jumlah kematian bayi usia dibawah 1 tahun	Jumlah kelahiran hidup per tahun	AKB	AKHB
2014	Banda Sakti	17	1733	46	3902
	Muara Dua	11	1015		
	Muara Satu	12	694		
	Blang Mangat	6	460		
2015	Banda Sakti	6	1847	26	4116
	Muara Dua	4	1047		
	Muara Satu	7	752		
	Blang Mangat	9	470		
2016	Banda Sakti	5	1919	21	4285
	Muara Dua	8	1086		
	Muara Satu	2	788		
	Blang Mangat	6	492		

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe, 2017.

Tabel 2.26 di atas menunjukkan laporan jumlah kematian bayi menurut kecamatannya di Kota Lhokseumawe. AKB yang didapat dalam Tahun 2014:46/3902 x 1000 Tahun 2015:26 /4116 x 1000, Tahun 2016: 21/4285/1000. Adapun AKB tertinggi ada pada Tahun 2014 dan AKB terendah ada pada Tahun 2016. Pada tabel dibawah ini dapat dilihat AKB terendah adalah pada tahun 2016 sebesar 21 per 1000 kelahiran hidup, diikuti Tahun 2015 sebesar 26 per 1000 kelahiran hidup. Sedangkan AKB tertinggi adalah pada Tahun 2014 sebesar 46 per 1000 kelahiran hidup.

C. Angka Kematian Balita (AKABA)

Angka Kematian Balita (AKABA) adalah jumlah anak yang meninggal sebelum mencapai usia 5 tahun yang dinyatakan sebagai angka per 1.000 kelahiran hidup. AKABA

mempresentasikan peluang terjadinya kematian pada fase antara kelahiran dan sebelum umur 5 tahun. Menurunkan jumlah kematian anak dengan menghitung AKB dan AKABA di suatu negara. Upaya percepatan penurunan AKB dan AKABA menjadi prioritas KEMENKES RI dan secara konsisten menjadi Rencana Aksi Daerah (RAD). Upaya ini dilakukan dengan kegiatan program yang fokus, terintegrasi secara sektoral dan berkesinambungan sehingga berdampak ungukit besar terhadap penurunan AKB dan AKABA di Lhokseumawe.

Tabel 2.27
Angka Kematian Balita Per 1000 Kelahiran Hidup
Kota Lhokseumawe Tahun 2014 s.d 2016

Tahun	Kecamatan	Jumlah kematian BALITA usia 5 tahun	Jumlah kelahiran hidup per tahun	AKBA	AKHB
2014	Banda Sakti	18	1733	51	3902
	Muara Dua	14	1015		
	Muara Satu	12	694		
	Blang Mangat	7	460		
2015	Banda Sakti	6	1847	26	4116
	Muara Dua	4	1047		
	Muara Satu	7	752		
	Blang Mangat	9	470		
2016	Banda Sakti	6	1919	23	4285
	Muara Dua	9	1086		
	Muara Satu	2	788		
	Blang Mangat	6	492		

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe, 2017.

Dari tabel 2.27 di atas dapat dijelaskan bahwa Angka Kematian Balita (AKABA) yang terendah dilaporkan Kota Lhokseumawe Tahun 2016 adalah sebesar 23 per 1.000 kelahiran hidup, diikuti Tahun 2015 adalah sebesar 26 per 1.000 kelahiran hidup, sedangkan dengan AKABA tertinggi adalah pada Tahun 2014 adalah sebesar 51 per 1.000 kelahiran hidup. Ini berarti ada angka penurunan AKABA pada Tahun 2016.

D. Angka Kematian Neonatal (AKN)

Angka Kematian Neonatal (AKN) adalah jumlah bayi (umur 0–28 hari) yang meninggal disuatu wilayah pada kurun waktu tertentu yang dinyatakan dalam 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama.

Masalah utama penyebab kematian pada bayi dan balita adalah pada masa neonatus. Komplikasi yang menjadi penyebab kematian terbanyak adalah asfiksia, bayi berat lahir rendah dan

infeksi. Dari seluruh kematian balita Tahun 2014 sebesar 39 jiwa, Tahun 2015 sebesar 21 jiwa dan Tahun 2016 sebesar 15 jiwa. Sebagian besar kematian neonatus (AKN) di Kota Lhokseumawe tertinggi pada Tahun 2014 dan terendah pada Tahun 2016. Perhatian terhadap upaya penurunan angka kematian neonatal menjadi penting. Untuk mencapai target penurunan kematian bayi, maka peningkatan akses dan kualitas pelayanan bagi bayi baru lahir menjadi prioritas utama.

E. Angka Kematian Ibu (AKI)

AKI menggambarkan jumlah ibu yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan atau kasus insidental) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 Kelahiran hidup. AKI juga dapat digunakan dalam pemantauan kematian terkait dengan kehamilan.

Tabel 2.28
Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup
Kota Lhokseumawe Tahun 2014 s.d 2016

Tahun	Kecamatan	Jumlah kematian ibu hamil	Jumlah kelahiran hidup per tahun	AKI	AKHB	%
2014	Banda Sakti	1	1733	4	3902	100%
	Muara Dua	1	1015			
	Muara Satu	2	694			
	Blang Mangat	0	460			
2015	Banda Sakti	1	1847	4	4116	97.1%
	Muara Dua	3	1047			
	Muara Satu	0	752			
	Blang Mangat	0	470			
2016	Banda Sakti	6	1919	8	4285	100%
	Muara Dua	1	1086			
	Muara Satu	0	788			
	Blang Mangat	1	492			

Sumber : Lhokseumawe Dalam Angka, 2017.

Dari tabel 2.28 di atas dapat dilihat bahwa Perhitungan AKI disetiap tahunnya menurun dari Tahun 2014 dan Tahun 2015 sebesar 4 jiwa sedangkan Tahun 2016 naik sebesar 8 jiwa. Upaya efektif untuk menurunkan Angka Kematian Ibu adalah meningkatkan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan professional difasilitas kesehatan, serta meningkatkan penggunaan kontrasepsi paska persalinan dan penanganan komplikasi maternal.

F. Rasio Posyandu Per Satuan Balita

Posyandu adalah wadah pemeliharaan kesehatan yang dilakukan dari, oleh dan untuk masyarakat yang dibimbing petugas terkait (Departemen Kesehatan RI.2006). Dalam Tabel 2.29 digambarkan bahwa Rasio posyandu per 100 balita di Kota Lhokseumawe tinggi pada tahun 2012 yaitu dengan rasio 165 dan 3 tahun berikutnya Tahun 2013, 2014, 2015 terjadi penurunan, dan ditahun 2016 meningkat kembali dengan rasio dengan 155.

Tabel 2.29
Rasio Posyandu Per Satuan Balita
Kota Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016

No	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah Posyandu	100	100	100	100	100
2	Jumlah Balita	16499	15912	15321	15105	15542
	Rasio	165	159	153	151	155

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe,2017.

Rasio posyandu per 100 balita perkecamatan Tahun 2016 tertinggi di Kecamatan Muara Dua dengan rasio 191 dan terendah di Kecamatan Blang Mangat dengan rasio 73, hal ini dapat dipengaruhi oleh jumlah penduduk perkecamatan dan anggota KB aktif di kecamatan tersebut sebagaimana tabel 2.30 dibawah ini.

Tabel 2.30
Rasio Posyandu Per Satuan Balita Per Kecamatan
Kota Lhokseumawe Tahun 2016

No	Kecamatan	Jumlah Posyandu	Jumlah Balita	Rasio
1	Muara Dua	24	3535	147
2	Banda Sakti	33	7034	213
3	Blang Mangat	29	2103	73
4	Muara Satu	15	2870	191

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe,2017.

G. Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk

Puskesmas dan jaringannya, sesuai Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 128 Tahun 2004 tentang kebijakan dasar

Puskesmas mendefinisikan Puskesmas adalah unit pelaksana teknis (UPT) Dinas Kesehatan kab/kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya. Pembangunan kesehatan adalah penyelenggaraan upaya kesehatan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Dalam menjalankan fungsinya sebagai pusat pembangunan berwawasan kesehatan, pusat pemberdayaan masyarakat, pusat pelayanan kesehatan masyarakat primer, dan pusat pelayanan kesehatan perorangan primer. Puskesmas berkewajiban memberikan upaya kesehatan wajib yang terdiri :

1. upaya promosi kesehatan
2. upaya kesehatan lingkungan
3. upaya kesehatan ibu dan anak serta keluarga berencana
4. upaya perbaikan gizi
5. upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit menular
6. upaya pengobatan

Dalam menjalankan fungsinya sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan dasar, Puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat. Pelayanan kesehatan perorangan yang diberikan terdiri dari pelayanan rawat jalan dan rawat inap untuk Puskesmas tertentu jika dianggap diperlukan. Meskipun pelayanan kesehatan masyarakat merupakan inti dari Puskesmas. Pelayanan kesehatan perorangan juga menjadi perhatian dari pemerintah.

Selain enam upaya kesehatan wajib yang harus diberikan Puskesmas juga menyelenggarakan upaya kesehatan pengembangan. Upaya kesehatan pengembangan Puskesmas dapat berupa pelayanan obstetrik dan neonatal emergensi dasar (PONET). Pelayanan kesehatan peduli remaja (PKPR), upaya kesehatan kerja, upaya kesehatan olah raga, dan tata laksana kasus kekerasan terhadap anak (KIA). Upaya kesehatan pengembangan diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan yang ada di wilayah kerja.

Tabel 2.31
Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk
Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2016

No	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah Puskesmas	6	6	6	6	6
2	Jumlah Poliklinik	-	10	8	8	8
3	Jumlah Pustu	21	22	22	22	22
4	Jumlah Penduduk	175.082	179.807	181.976	187.455	195.186
5	Rasio Puskesmas persatuan penduduk	29.180	29.968	30.329	31.243	32.531
6	Rasio Poliklinik persatuan penduduk	-	17.981	22.747	23.432	24.398
7	Rasio Pustu persatuan penduduk	8.337	8.173	8.272	8.521	8.872

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe, 2017.

Dalam tabel 2.31 diatas dapat dijelaskan bahwa Jumlah Puskesmas di Kota Lhokseumawe sebanyak 6 Puskesmas. Adapun Rasio Puskesmas dari Tahun 2012–2016 semakin tinggi tapi jumlah Puskesmas tidak bertambah. Berdasarkan rasio kecukupan Puskesmas secara Nasional sebesar 28.000 penduduk/Puskesmas. Berarti ketersediaan Puskesmas di Kota Lhokseumawe belum memadai, jumlah penduduk terus meningkat dari tahun ke tahun. Begitu juga dengan sarana kesehatan lainnya hal ini perlu mendapat perhatian untuk pembangunan sarana kesehatan yang mencukupi dan memelihara kondisi fisik bangunan dan sanitasinya.

H. Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit mengelompokkan Rumah Sakit berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan menjadi Rumah Sakit Umum dan Rumah Sakit Khusus. Rumah Sakit Umum adalah Rumah Sakit yang

memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit. Adapun Rumah Sakit Khusus adalah Rumah Sakit yang memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit, atau kekhususan lainnya. Dalam wilayah Kota Lhokseumawe terdapat 9 (Sembilan) Rumah Sakit (RS), terdiri dari 1 (satu) Rumah sakit TNI AD/AU/AL/Polri dan 8 Rumah Sakit Swasta berikut data dimaksud. Rincian dapat dilihat dalam Tabel 2.32 dibawah ini:

Tabel 2.32
Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk
Kota Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016

No	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Rumah Sakit Umum (Pemerintah)	-	-	-	-	-
2	Rumah Sakit Jiwa/ Paru dan Penyakit Khusus Lainnya Milik Pemerintah	-	-	-	-	-
3	Rumah Sakit AD/AU/ AL / Polri	1	1	1	1	1
4	Rumah Sakit Daerah	-	-	-	-	-
5	Rumah Sakit Swasta	8	8	8	8	7
6	Jumlah Seluruh Rumah Sakit	9	9	9	9	8
7	Jumlah Penduduk	175.082	179.807	181.976	187.455	195.186
Rasio		0.051	0.050	0.049	0.048	0.040

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe 2017.

I. Rasio Dokter Per Satuan Penduduk

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan pada pasal 21 menyebutkan bahwa pemerintah mengatur perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, pembinaan dan pengawasan mutu tenaga kesehatan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Dalam peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang sistem kesehatan Nasional dijelaskan bahwa untuk melaksanakan upaya kesehatan dalam rangka pembangunan kesehatan diperlukan sumber daya manusia kesehatan yang mencukupi dalam jumlah, jenis dan kualitasnya serta terdistribusi secara adil dan merata. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 1996 tentang tenaga kesehatan

memutuskan bahwa tenaga kesehatan terdiri dari tenaga medis, tenaga keperawatan, tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga gizi, tenaga keterampilan fisik dan tenaga keteknisan medis. Gambaran mengenai jumlah, jenis dan kualitas serta penyebaran tenaga kesehatan di Kota Lhokseumawe dilakukan dengan cara pengumpulan data pada sarana pelayanan kesehatan. pengumpulan tenaga kesehatan meliputi tenaga kesehatan yang berstatus PNS, Pegawai Tidak Tetap, TNI/POLRI dan swasta.

Tabel 2.33
Rasio Dokter per Satuan Penduduk
Kota Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016

No	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah Dokter Umum	22	20	17	43	60
2	Jumlah Penduduk	175.082	179.807	181.976	187.455	195.186
	Rasio	7.958	8.99	10.70	4.35	3.25

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe, 2017

Data tabel 2.33 di atas dapat digambarkan bahwa rasio dokter persatuan penduduk di Kota Lhokseumawe berdasarkan pelayanan yang diberikan 1 (satu) orang dokter harus melayani pada Tahun 2012 seorang dokter harus melayani 7.958 penduduk, Tahun 2013 adalah seorang dokter harus melayani 8990 penduduk, Tahun 2014 adalah seorang dokter harus melayani 10.704 penduduk, Tahun 2015 adalah seorang dokter harus melayani 4359 penduduk, dan di Tahun 2016 adalah seorang dokter harus melayani 3.253 penduduk, sedangkan menurut KEPNAKES/SK/I/2004 tentang Indikator Indonesia Sehat 2010 seorang dokter harus melayani 2500 setiap penduduk dilihat dari PERMENKES tersebut Kota Lhokseumawe masih kekurangan dokter.

J. Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk

Salah satu unsur yang berperan dalam percepatan pembangunan kesehatan adalah tenaga kesehatan yang bertugas di fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan salah satunya adalah menggunakan indikator rasio.

Tabel 2.34
Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk
Kota Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016

No	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah Tenaga Medis	678	700	524	476	611
2	Jumlah Penduduk	175.082	179.807	181.976	187.455	195.186
	Rasio	3,87	3,89	2,87	2,53	3,13

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe,2017.

Dari tabel 2.34 di atas dapat dilihat Rasio tenaga medis Kota Lhokseumawe cenderung mengalami penurunan. Perubahan terjadi pada Tahun 2014 jika dibandingkan dengan Tahun 2013. Penurunan terjadi karena tidak adanya penambahan penerimaan tenaga medis di Kota Lhokseumawe.

K. Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani

Komplikasi kebidanan adalah kesakitan pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan atau janin dalam kandungan baik langsung maupun tidak langsung, termasuk penyakit menular dan tidak menular yang dapat mengancam jiwa ibu atau janin yang tidak disebabkan oleh trauma kecelakaan. Komplikasi kebidanan antara lain pecah ketuban dini, pendarahan, pervaginasi, hipertensi dalam kehamilan (systole > 140 mmHg, diastole > 90 mmHg) dengan atau tanpa edema pre tibial, ancaman persalinan prematur, infeksi berat dalam kehamilan, distosia (persalinan macet, persalinan tidak maju dan infeksi masa nifas).

Pencegahan dan penanganan komplikasi kebidanan adalah pelayanan kepada ibu dengan komplikasi kebidanan untuk mendapatkan perlindungan/pencegahan dan penanganan definitif sesuai standar oleh tenaga kesehatan kompeten pada tingkat pelayanan dasar dan rujukan. Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pencegahan dan penanganan komplikasi kebidanan adalah cakupan penanganan komplikasi kebidanan (cakupan PK). Indikator ini mengukur kemampuan dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara profesional kepada ibu hamil, bersalin nifas dengan komplikasi.

Tabel 2.35
Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani
Kota Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016

No	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan definitif di satu wilayah kerja	60	262	536	618	762
2	Jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan disatu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama	60	262	536	618	762
Persentase		100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe 2017

Data tabel 2.35 di atas dapat dijelaskan bahwa cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani untuk Tahun 2012-2016 keseluruhan mencapai 100%, artinya jumlah komplikasi dan penanganan berimbang.

L. Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan

Upaya kesehatan ibu bersalin dilaksanakan dalam rangka mendorong agar setiap persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih yaitu Dokter Spesialis Kebidanan dan Kandungan (SpOG), Dokter Umum dan Bidan serta diupayakan dilakukan difasilitas pelayanan kesehatan. Pertolongan persalinan adalah proses pelayanan persalinan yang dimulai pada kala I sampai dengan

kala IV persalinan. Persalinan yang dilakukan disarana pelayanan kesehatan dapat menurunkan resiko kematian ibu saat persalinan karena ditempat tersebut persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan dan tersedia sarana kesehatan yang memadai sehingga dapat menangani komplikasi yang mungkin terjadi pada saat persalinan yang membahayakan nyawa ibu dan bayi.

Pencapaian upaya kesehatan ibu bersalin diukur melalui indikator persentasi persalinan ditolong tenaga kesehatan terlatih (cakupan Pn). Indikator ini memperlihatkan diantaranya tingkat kemampuan Pemerintah dalam menyediakan pelayanan persalinan berkualitas yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih. Peningkatan cakupan persalinan perlu dilakukan melalui upaya pelaksanaan program unggulan kesehatan Ibu diantaranya adalah kemitraan Bidan dan Dukun, peningkatan persalinan difasilitas pelayanan kesehatan melalui jaminan program persalinan, model rumah tunggu dengan Puskesmas didaerah terpencil untuk pencegahan terhadap komplikasi yang terjadi selama persalinan.

Revitalisasi Bidan koordinator melalui pelaksanaan supervise fasilitatif untuk peningkatan mutu dan kualitas tenaga penolong persalinan serta peningkatan kualitas surveilans kesehatan ibu melalui pelaksanaan pemantauan wilayah setempat kesehatan ibu dan anak (PWS KIA). Bila ditelusuri dari tabel dibawah ini maka Kota Lhokseumawe menunjukkan peningkatan yang sangat baik untuk cakupan pertolongan persalinan. Peningkatan ini dihubungkan dengan semakin dekatnya akses kefasilitas kesehatan dan ketersediaan tenaga profesional yang memadai diikuti dengan sistem informasi yang lebih baik.

Tabel 2.36
Cakupan Pertolongan Persalinan oleh
Tenaga Kesehatan yang memiliki Kompetensi Kebidanan
Kota Lhokseumawe Tahun 2016

No	Kecamatan	Jumlah Ibu Bersalin Yang ditolong Oleh Nakes	Jumlah seluruh sasaran Ibu bersalin di wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama	Rasio
1	Muara Dua	1085	1135	95.5
2	Banda Sakti	1927	2066	93.2
3	Blang Mangat	489	465	100
4	Muara Satu	784	886	88.4
	Jumlah	4285	4552	

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe2017.

Dari tabel 2.36 di atas dapat dilihat bahwa cakupan jumlah pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan/Nakes berjumlah 4285, yang ditolong oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan sebanyak 351 orang dan perlu adanya tenaga penambahan tenaga Nakes jika dilihat dari rasio.

M. Cakupan Desa/Kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI)

Indikator lain untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan imunisasi adalah *Universal Child Immunization* atau yang biasa disingkat UCI. Imunisasi dasar pada bayi seharusnya diberikan pada anak sesuai umurnya. Pada kondisi ini diharapkan sistem kekebalan tubuh dapat berkerja secara optimal. Namun demikian pada kondisi tertentu beberapa bayi tidak mendapatkan imunisasi dasar secara lengkap. Kelompok inilah yang disebut *drop out* (DO) imunisasi. Bayi yang mendapat imunisasi DPT/HB 1 awal pemberian imunisasi, namun tidak mendapatkan imunisasi campak disebut *drop out Rate* DPT/HB1 Campak.

Tabel 2.37
Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2016

No	Uraian	Jumlah Desa	Desa/Kelurahan UCI%			
			Tahun		Tahun	
			2015	2016	2015	2016
1	Cakupan Desa/ Kelurahan UCI	68	41	39	60,3	57,4

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe, 2017

Dari tabel 2.37 di atas dapat dilihat bahwa UCI pada Tahun 2015 desa UCI sebanyak 41 desa dari 68 desa di Kota Lhokseumawe mencapai 60,3 % dan pada Tahun 2016 desa UCI sebanyak 39 desa dari 68 desa di Kota Lhokseumawe mencapai 57%.

N. Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan

Balita dengan gizi buruk berdampak pada pertumbuhan dan perkembangannya. Gejala awal sering tidak jelas hanya terlihat bahwa berat badan anak tersebut lebih rendah dari anak usianya. Rata-rata berat badannya hanya sekitar 60-80% dari berat badan ideal. Ciri-ciri klinis yang biasanya menyertainya antara lain: kenaikan berat badan berkurang bahkan terus menurun, ukuran lingkaran lengan atas menurun, maturasi tulang terlambat, rasio berat terhadap tinggi normal atau cenderung menurun, tebal liput kulit normal atau semakin berkurang. Seluruh balita gizi buruk di Kota Lhokseumawe pada Tahun 2012-2016 seluruhnya mendapat perawatan mencapai 100%.

Tabel 2.38
Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan
Kota Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016

No	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah balita gizi buruk yang mendapat perawatan	43	28	16	10	10
2	Jumlah seluruh balita gizi buruk yang ditemukan	43	28	16	10	10
Cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan		100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe, 2017.

O. **Persentase Anak Usia 1 Tahun yang Diimunisasi Campak**

Kementerian Kesehatan menetapkan bahwa ada beberapa penyakit yang dapat di cegah dengan imunisasi diantaranya penyakit campak. Penyakit campak disebabkan oleh virus campak, golongan paramyxovirus penularan dapat terjadi melalui udara yang telah terkontaminasi oleh droplet (ludah) orang yang telah terinfeksi. Sebagian besar kasus campak menyerang anak – anak usia pra sekolah dan usia SD. Jika seseorang pernah menderita campak, maka dia akan mendapat kekebalan terhadap penyakit tersebut seumur hidupnya.

Tabel 2.39
Cakupan Persentase Anak Usia 1 Tahun Yang Mendapat Imunisasi Campak Kota Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016

No	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah bayi imunisasi campak usia 1 tahun	3146	3434	3266	3621	3844
2	Jumlah anak usia I tahun pada wilayah dan tahun yang sama	3852	3956	3397	3977	4325
Persentase		81.7	86.8	96.1	91.0	88.9

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe 2017.

Dari tabel 2.39 diatas, Pada Tahun 2016 jumlah bayi imunisasi campak usia 1 tahun sebanyak 3844 jiwa, data ini lebih tinggi dibanding Tahun 2012 yang sebesar 3146 jiwa. Jika dilihat menurut persentase pada Tahun 2014 sebesar 96.1 per 100.000 jumlah anak usia 1 tahun pada wilayah dan tahun yang sama. Meningkat jika di bandingkan Tahun 2012 sebesar 81.1 per 100.000 jumlah anak usia 1 tahun pada wilayah dan tahun yang sama.

P. **Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Non Polio AFP Rate Per 100.000 Penduduk**

Polio disebabkan oleh infeksi virus yang menyerang sistem syaraf sehingga penderita mengalami kelumpuhan. Pada umumnya menyerang anak berusia 0-3 tahun, ini ditandai dengan munculnya demam, lelah, sakit kepala, mual, kaku di leher, serta sakit di tungkai dan lengan. AFP merupakan kelumpuhan yang sifatnya flaccid yang bersifat lunglai, lemas atau layuh (bukan

kaku), atau terjadi penurunan kekuatan otot secara mendadak. Sedangkan non polio AFP adalah kasus lumpuh layu akut yang di duga kasus polio sampai dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium bukan kasus polio. Pada Tahun 2012-2016 dengan gambaran (0) atau tidak terjadi kasus Polio dan non Polio.

Q. Cakupan Balita Pneumonia yang Ditangani

Pneumonia adalah penyakit pada paru-paru di mana pulmonary alveolus (alveoli) yang bertanggung jawab menyerap oksigen dari atmosfer meradang dan terisi oleh cairan. Radang ini disebabkan oleh kuman Pneumococcus, Staphylococcus, Streptococcus dan virus. Gejala penyakit pneumonia yaitu menggigil, demam, sakit kepala, batuk, mengeluarkan dahak dan sesak nafas. Populasi yang rentan terserang pneumonia adalah anak-anak usia kurang dari 2 tahun, usia lanjut lebih dari 65 tahun dan orang yang memiliki masalah kesehatan (malnutrisi, gangguan imonulogi).

**Tabel 2.40
Cakupan Penemuan Pneumonia Pada Balita
Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2016**

No	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah penderita balita pneumonia yang ditangani	30	265	356	79	124
2	Jumlah perkiraan penderita pneumonia balita di suatu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama	1.650	1.591	1.820	2.062	2.146
Persentase		1.82	16.66	19.56	3.83	5.78

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe, 2017.

Dari tabel 2.40 diatas, Cakupan balita pneumonia yang tertinggi dapat dilihat pada tabel di atas menunjukkan pada Tahun 2016 sebesar 0.57 persen dengan jumlah kasus yang di temukan sebanyak 124 kasus, adapun perkiraan pneumonia capaian yang terendah terdapat pada Tahun 2013 sebesar 0.16 persen dengan jumlah kasus yang di temukan sebanyak 265 kasus dengan perkiraan pneumonia pada balita 1.591 kasus.

R. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA

Tuberkulosis merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi bakteri *mycobacterium tuberculosis*, penyakit ini menyebar melalui droplet orang yang telah terinfeksi basil tuberkulosis. Beban penyakit Tuberkulosis dapat diukur dengan case notification rate (CNR) dan prevalensi dan mortalitas. Pada Tahun 2015 ditemukan jumlah kasus baru BTA positif (BTA+) yang tinggi sebanyak 418 kasus, hal ini meningkat dibanding bila dibandingkan kasus baru BTA positif (BTA+) yang ditemukan pada Tahun 2013 sebesar 125 kasus.

Tabel 2.41
Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2016

No	Jenis Penyakit	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	TB Paru	241	125	133	418	198

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe 2017

S. Tingkat Prevalensi Tuberkulosis Per 100.000 Penduduk

Sementara prevalensi Tahun 2015 sebesar 2.22 per 100.00 penduduk dan menurun kembali Tahun 2016 sebanyak 1.01 per 100.000 penduduk.

Tabel 2.42
Tingkat Prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) Kota Lhokseumawe Tahun 2012- 2016

No	Jenis Penyakit	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	TB Paru	1.34	6.9	7.3	2.22	1.01

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe, 2017.

T. Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis Per 100.000 Penduduk

Angka kematian karena Tuberkulosis terjadi pada Tahun 2012 sebanyak 2 kasus dan pada Tahun 2014 sebesar 1 kasus.

Tabel 2.43
Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis
(per 100.000 penduduk)
Kota Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016

No	Jenis Penyakit	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	TB Paru	2	0	1	0	0

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe, 2017.

U. Proporsi Jumlah Kasus Tuberkulosis yang Terdeteksi Dalam Program DOTS

Tabel 2.44 menggambarkan tentang proporsi jumlah kasus Tuberculosis yang terdeteksi dalam program DOTS Kota Lhokseumawe selama tahun 2012-2016.

Tabel 2.44
Proporsi Jumlah Kasus Tuberculosis Yang Terdeteksi Dalam Program DOTS Kota Lhokseumawe Tahun 2012- 2016

No	Jenis Penyakit	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	TB Paru	0.35	0.21	0.58	1.22	0.66

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe,2017.

V. Proporsi Jumlah Kasus Tuberkulosis yang Diobati dan Sembuh Dalam Program DOTS

Angka Keberhasilan Pengobatan Penderita TB Paru BTA(+) adalah salah satu upaya mengendalikan TB Paru yaitu dengan pengobatan. Indikator yang digunakan sebagai evaluasi pengobatan, yaitu angka keberhasilan pengobatan ini di bentuk dari angka kesembuhan dan angka pengobatan lengkap ada Pada Tahun 2015 persentasi sembuh sebesar 97 persen.

Tabel 2.45
Proporsi Kasus Tuberculosis Yang Di Obati Dan Sembuh Dalam Program DOTS Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2016

No	Jenis Penyakit	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	TB Paru	96	92	92	97	90

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe, 2017.

W. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita DBD

Penyakit Demam Berdarah *Dengeu* (DBD) adalah penyakit yang disebabkan oleh virus *dengue* yang masuk keperedaran darah manusia melalui gigitan nyamuk dari *genus Aedes*, misalnya *Aedes Aegypty* atau *Aedes Albopictus*. Penyakit DBD dapat muncul sepanjang tahun dan dapat menyerang seluruh kelompok umur. Penyakit ini berkaitan dengan kondisi lingkungan dan perilaku masyarakat.

Tabel 2.46
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD
Kota Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016

No	Jenis Penyakit	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	DBD	100	68	120	115	280

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe, 2017.

Dari tabel 2.46 di atas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2016 jumlah penderita DBD yang dilaporkan sebanyak 280 kasus terjadi peningkatan dibanding jumlah kasus pada Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2015. Kesimpulan dari jumlah kasus tersebut masih perlu upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan peningkatan kualitas dan kuantitas SDM kesehatan di rumah sakit dan puskesmas (dokter, perawat dan lain-lain) termasuk peningkatan sarana-sarana penunjang diagnostik bagi penderita di fasilitas pelayanan kesehatan.

X. Penderita Diare Ditemukan dan Ditangani

Diare merupakan penyakit endemis dan juga merupakan penyakit potensial KLB yang sering di sertai kematian. Seseorang di katakan menderita diare bila feses lebih berair dari biasanya atau air besar lebih dari tiga kali dan berair tapi tidak berdarah dalam waktu 24 jam. Salah satu penyebab diare pada masyarakat adalah perilaku hidup sehat yang belum baik masih banyak sampah yang buang bukan pada tempatnya, buang air besar tidak dijambar serta kebiasaan minum air mentah dan makan yang tidak didahului dengan cuci tangan terlebih dahulu. Penderita diare yang ditangani adalah jumlah penderita yang datang dan dilayani di sarana kesehatan pada suatu wilayah.

Tabel 2.47
Cakupan Penderita Diare Yang Ditangani
Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2016

No	Jenis Penyakit	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Diare	14	83	6011	4200	4014

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe, 2017.

Dalam tabel 2.47 di atas menunjukkan cakupan penanganan kasus diare Tahun 2014 sebesar 6011 kasus lebih tinggi dibanding dari tahun sebelumnya yaitu Tahun 2012, 2013, 2015 dan tahun 2016, dan semua pasien ditangani di obati.

Y. Angka Kesakitan Malaria Per 100.000 Penduduk

Malaria adalah penyakit infeksi yang di sebabkan oleh *plasmodium* yang hidup dan berkembang baik dalam sel darah merah manusia, ditularkan oleh nyamuk malaria (*Anopheles*) betina, dapat menyerang semua orang baik laki-laki ataupun perempuan pada semua golongan umur dari bayi, anak-anak dan orang dewasa. Pengobatan malaria harus tepat waktu yang sesuai dengan acuan program pengendalian malaria. Pengobatan yang efektif adalah pemberian ACT (*artemisin-based combination therapy*) pada 24 jam pertama pasien panas dan obat harus di minum habis dalam 3 hari.

Tabel 2.48
Cakupan Angka Kejadian Penderita Malaria
Kota Lhokseumawe Tahun 2012s.d2016

No	Jenis Penyakit	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Malaria	6	6	5	0	0

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe,2017.

Dari tabel 2.48 diatas, Pada Tahun 2012 ada penemuan kasus sebesar 6 kasus, Tahun 2013 penemuan kasus sebesar 6 kasus, Tahun 2014 penemuan kasus sebesar 5 kasus, sedangkan di dua tahun berikutnya Tahun 2015 dan Tahun 2016 kasus malaria menurun tidak menemukan kasus (0).

Z. Tingkat Kematian Akibat Malaria

Dari Tahun 2012 hingga Tahun 2016 belum ditemukan angka kematian akibat malaria di Kota Lhokseumawe.

AA. Jumlah Kasus HIV/AIDS

HIV/AIDS merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi *Human Immunodeficiency Virus* yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Infeksi tersebut menyebabkan penderita mengalami penurunan ketahanan tubuh sehingga sangat mudah untuk terinfeksi berbagai macam penyakit lain. Sebelum memasuki fase AIDS, penderita terlebih dahulu dinyatakan sebagai HIV positif. Jumlah HIV positif yang ada di masyarakat dapat diketahui melalui 3 metode yaitu pada layanan *Voluntary, Counseling, and Testing (VCT)*, *Sero Survey* dan Survei Terpadu Biologis dan Prilaku (STBP).

Tabel 2.49
Prevalensi HIV/AIDS Dari Total Populasi
Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2016

No	Jenis Penyakit	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	AIDS	0	1	2	1	2

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe, 2017.

Dari tabel 2.49 diatas, Gambaran kasus AIDS ada pada Tahun 2013 sebesar 1 kasus, Tahun 2014 sebesar 2 kasus, Tahun 2015 sebesar 1 kasus dan pada Tahun 2016 sebanyak 2 kasus.

BB. Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin

Pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin adalah jumlah kunjungan pasien rawat jalan masyarakat miskin dan hampir miskin di sarana kesehatan strata dua dan strata tiga di satu wilayah kerja tertentu pada kurun waktu tertentu.

Tabel 2.50
Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat
Miskin Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2016

No	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Kunjungan Pasien miskin disarana kesehatan strata 1	259	3.688	109.041	130.078	33.737
2	Jumlah seluruh penduduk miskin	57.576	57.576	57.576	57.576	62.281
Persentase		0,4	6,4	189,4	225,9	54,2

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe, 2017.

Dari tabel 2.50 di atas dapat dijelaskan cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin Kota Lhokseumawe Tahun 2014 adalah 189.4 dan Tahun 2015 adalah 225,9 dikarenakan jumlah kunjungan yang berulang-ulang dalam kisaran setahun melebihi dari kunjungan rata-rata pada tahun sebelumnya.

CC. Cakupan Kunjungan Bayi

Cakupan pelayanan kesehatan bayi adalah jumlah kunjungan bayi umur 29 hari – 11 bulan di sarana pelayanan kesehatan (polindes, pustu, puskesmas, rumah bersalin dan rumah sakit) maupun kunjungan rumah, posyandu, tempat penitipan anak, panti asuhan dan mendapat pelayanan dari petugas kesehatan. Cakupan pelayanan kesehatan bayi di Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.51
Cakupan Kunjungan Bayi Menurut Kecamatan Dan Puskesmas
Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2016

No	Kecamatan	Puskesmas	Kunjungan Bayi					
			Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Banda Sakti	Banda Sakti	949	78,2	1081	82,4	1156	88,5
		Mongeudong	440	86,4	410	74,4	501	90,6
2	Muara Dua	Muara Dua	889	85,5	1016	90,4	1038	92,2
3	Muara Satu	Muara Satu	582	79,4	645	81,7	720	90,5
4	Blang Mangat	Blang Mangat	276	80,5	264	71,1	288	78,6
		Blang Cut	130	78,8	115	64,9	132	73,3
Jumlah			3266	81,4	3531	81,1	3835	88,6

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe, 2017.

Dari tabel 2.51 diatas, Pada Tahun 2014 rujukan bayi di Kota Lhokseumawe mencapai 81.4 % dan pada Tahun 2016

mengalami peningkatan mencapai 88,6 %. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

DD. Cakupan Puskesmas dan Pembantu Puskesmas

Cakupan puskesmas adalah jumlah puskesmas yang ada dibandingkan dengan jumlah seluruh kecamatan yang ada dikali seratus persen.

Tabel 2.52
Cakupan Puskesmas dan Pembantu Puskesmas
Kota Lhokseumawe Tahun 2016

No	Kecamatan	Jumlah Puskesmas	Jumlah Pustu
1	Muara Dua	1	4
2	Banda Sakti	2	8
3	Blang Mangat	2	7
4	Muara Satu	1	3

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe, 2017.

Dari tabel 2.52 di atas dapat dilihat pada Tahun 2016 jumlah Puskesmas di Kota Lhokseumawe 6 unit yang tersebar di empat kecamatan dan pustu sebanyak 22 unit yang tersebar di 68 desa.

Tabel 2.53
Cakupan Puskesmas Pembantu
Kota Lhokseumawe Tahun 2016

No	Kecamatan	Jumlah Puskesmas Pembantu	Jumlah seluruh desa
1	Muara Dua	4	17
2	Banda Sakti	8	18
3	Blang Mangat	7	22
4	Muara Satu	3	11

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe, 2017.

EE. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4

Pelayanan kesehatan ibu hamil diwujudkan melalui pemberian pelayanan *antenatal* sekurang-kurangnya 4 kali selama masa kehamilan, dengan distribusi waktu minimal 1 kali pada trisemester pertama (usia 0 - 12 minggu), minimal 1 kali pada trisemester kedua (usia kehamilan 12-24 minggu) dan minimal 2 kali pada trisemester ke tiga (usia kehamilan 24 minggu-lahir).

Standart waktu pelayanan tersebut dianjurkan untuk menjamin perlindungan terhadap ibu hamil dan atau janin, berupa deteksi dini faktor risiko, pencegahan dan penanganan dini komplikasi kehamilan. Pelayanan *antenatal* diupayakan agar memenuhi standar kualitas yaitu:

- a. penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan
- b. pengukuran tekanan darah
- c. pengukuran lingkaran lengan atas (LILA)
- d. pengukuran tinggi puncak rahim (fundus uteri)
- e. penentuan status imunisasi tetanus dan pemberian imunisasi tetanus toksoid sesuai status imunisasi
- f. pemberian tablet tambah darah minimal 90 tablet selama kehamilan
- g. penentuan presentasi janin dan denyut jantung (DJJ)
- h. pelaksanaan temu wicara (pemberian komunikasi interpersonal dan konseling termasuk keluarga berencana)
- i. pelayanan tes laboratorium sederhana, minimaltes hemoglobin darah (HB), pemeriksaan protein urin dan pemeriksaan golongan darah (bila belum pernah dilakukan sebelumnya) dan tatalaksana kasus.

Capaian pelayanan kesehatan ibu hamil dapat dinilai dengan menggunakan indikator cakupan K1 dan K4. Cakupan K1 adalah jumlah ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal pertama kali oleh tenaga kesehatan, dibandingkan jumlah sasaran ibu hamil di satu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun. Sedangkan cakupan K4 adalah jumlah ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal sesuai dengan standar paling sedikit 4 kali sesuai jadwal yang dianjurkan, dibandingkan jumlah sasaran ibu hamil di satu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun. Indikator tersebut memperlihatkan akses pelayanan kesehatan terhadap ibu hamil dan tingkat kepatuhan ibu hamil dalam memeriksakan kehamilan ke tenaga kesehatan.

Tabel 2.54
Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4
Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2016

No	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah Ibu Hamil yang memperoleh pelayanan antenatal K4	3874	3918	4103	4460	4552
2	Jumlah sasaran Ibu Hamil	4,025	4,130	4,540	4,754	4,857
Persentase		96,24%	94,86%	90,37%	93,81%	93,72%

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe,2017.

Dari tabel 2.54 di atas terlihat pada Tahun 2012 K4 meningkat sebesar 96,24% menunjukkan semakin baiknya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan ibu hamil yang diberikan oleh tenaga kesehatan. Pada tabel tersebut juga dapat dilihat bahwa cakupan K4 dari tahun ke tahun relatif tidak terlalu stabil. Tahun 2013 sebesar 94,86%, Tahun 2014 terjadi penurunan sebesar 90,37%, sementara pada Tahun 2015 sebesar 93,81% dan Tahun 2016 sebesar 93,72% dari tahun sebelumnya.

FF. Cakupan Pelayanan Nifas

Nifas adalah periode mulai dari 6 jam sampai 42 hari pasca persalinan. Pelayanan kesehatan ibu nifas sesuai standar yang di lakukan sekurang – kurangnya 3 (tiga) kali sesuai jadwal yang dianjurkan yaitu pada 6 jam sampai dengan 3 hari pasca persalinan pada hari ke – 4 sampai dengan hari ke – 28 pasca persalinan pada hari ke -29 sampai dengan hari ke – 42 pasca persalinan. Jenis pelayanan kesehatan ibu nifas yang diberikan meliputi :

- a. Pemeriksaan tanda vital (tekanan darah,nadi,nafas dan suhu)
- b. pemeriksaan tinggi puncak rahim (fundus uteri)
- c. pemeriksaan lokhia dan cairan pervaginam lain
- d. pemeriksaan payudara dan pemberian anjuran ASI eksklusif
- e. pemberian komunikasi informasi dan edukasi (KIE) kesehatan ibu nifas dan bayi baru lahir, termasuk keluarga berencana

- f. pelayanan keluarga berencana pasca persalinan
- g. keberhasilan upaya kesehatan ibu nifas diukur melalui indikator cakupan pelayanan kesehatan ibu nifas (KF3). Indikator ini menilai kemampuan dalam menyediakan pelayanan kesehatan ibu nifas yang berkualitas sesuai standar.

Tabel 2.55
Cakupan Pelayanan Nifas
Kota Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016

No	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah Peserta Ibu Nifas yang telah memperoleh 3 kali pelayanan nifas sesuai standar disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	3658	3717	3844	4104	4201
2	Jumlah seluruh ibu nifas disatu wilayah kerja dalam kurun waktu tertentu	3681	3744	4333	4537	4637
Persentase		99,37%	99,27%	88,71%	90,45%	90,59%

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe, 2017.

Pada tabel 2.55 di atas dapat dilihat bahwa cakupan kunjungan nifas (KF3) dalam kurun waktu 5 tahun terakhir cenderung turun naik, kecuali dibanding pada Tahun 2012 – 2013 meningkat sebesar 99,37%, dan turun kembali pada Tahun 2014 sebesar 88,71%, selebihnya pada Tahun 2015 sebesar 90,45% dan Tahun 2016 sebesar 90,59%. Capaian indikator KF merupakan hasil yang baik dari upaya yang di lakukan oleh petugas dan juga termasuk peran masyarakat.

GG. Cakupan Neonatus Dengan Komplikasi yang Ditangani

Neonatus adalah bayi baru lahir yang berusia sampai dengan 28 hari, dimana terjadi perubahan yang sangat besar dari kehidupan di dalam rahim menjadi di luar rahim. Pada masa ini terjadi pematangan organ hampir pada semua sistem. Bayi hingga usia kurang satu bulan merupakan golongan umur yang memiliki risiko gangguan kesehatan paling tinggi. Pada usia yang rentan ini, berbagai masalah kesehatan bisa muncul. Tanpa penanganan

yang tepat bisa berakibat fatal. Beberapa upaya kesehatan dilakukan untuk mengendalikan resiko pada pada kelompok ini diantaranya dengan mengupayakan agar persalinan dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan serta menjamin tersedianya pelayanan kesehatan sesuai standar pada kunjungan bayi baru lahir.

Dengan melihat adanya resiko kematian yang tinggi dan berbagai serangan komplikasi pada minggu pertama, maka setiap bayi baru lahir harus mendapatkan pemeriksaan sesuai standar lebih sering (minimal 2 kali) dalam minggu pertama langkah ini dilakukan untuk menemukan secara dini jika terdapat penyakit-penyakit atau tanda bahaya pada neonatus sehingga pertolongan dapat segera diberikan untuk mencegah penyakit bertambah berat yang dapat menyebabkan kematian bayi. Kunjungan neonatus merupakan salah satu intervensi untuk menurunkan kematian bayi baru lahir.

Kunjungan neonatal pertama adalah (KN 1) adalah cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (umur 6 jam – 48 jam) di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu yang ditangani sesuai standar oleh tenaga kesehatan terlatih di seluruh sarana pelayanan kesehatan. Pelayanan yang diberikan saat kunjungan neonatal adalah pemeriksaan sesuai standar Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM) serta konseling perawatan bayi baru lahir termasuk ASI eksklusif dan perawatan tali pusat. Pada kunjungan neonatal pertama (KN1), bayi baru lahir mendapatkan vitamin K1 injeksi dan imunisasi hepatitis BO bila belum diberikan pada saat lahir.

Selain KN1, indikator yang menggambarkan pelayanan kesehatan bagi neonatal adalah KN lengkap yang mengharuskan agar setiap bayi baru lahir memperoleh pelayanan kunjungan minimal 3 kali, yaitu 1 kali pada 6 – 48 jam, 1 kali pada 3 – 7 hari, 1 kali pada 8 – 28 hari sesuai standar di satu wilayah kerja satu tahun.

Tabel 2.56
Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang Ditangani
Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2016

No	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah neonatus dengan komplikasi yang ditangani	53	67	101	425	540
2	Jumlah seluruh neonatus dengan komplikasi yang ada	53	67	101	425	540
Persentase		100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe,2017.

Tabel 2.56 di atas mengindikasikan bahwa capaian KN lengkap telah memenuhi target program dari Tahun 2012 sampai dengan 2016 sebesar 100 persen.

HH. Cakupan Pelayanan Anak Balita

Kehidupan anak, usia di bawah lima tahun memperoleh bagian yang sangat penting, usia tersebut merupakan landasan yang membentuk masa depan kesehatan, kebahagiaan, pertumbuhan perkembangan dan hasil pembelajaran anak di sekolah, keluarga masyarakat dan kehidupan secara umum.

Kesehatan bayi dan balita harus dipantau untuk memastikan kesehatan mereka selalu dalam kondisi optimal. Penilaian perkembangan gerak kasar, gerak halus bicara dan bahasa, sosialisasi dan kemandirian, pemeriksaan daya lihat. Bila ditemukan penyimpangan atau gangguan perkembangan harus dilakukan rujukan kepada tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi. Untuk itu di pakai indikator-indikator yang bisa menjadi ukuran keberhasilan upaya peningkatan kesehatan bayi dan balita, salah satu di antaranya adalah pelayanan kesehatan anak balita. Adapun batasan anak balita adalah setiap anak yang berada pada kisaran umur 12 sampai dengan 59 bulan. Pelayanan kesehatan pada anak balita di lakukan oleh tenaga kesehatan dan memperoleh:

1. pelayanan pemantauan pertumbuhan minimal 8 kali setahun (penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan 8 kali dalam setahun)

2. pemberian vitamin A, dua kali dalam setahun yakni setiap bulan Februari dan Agustus
3. stimulasi deteksi dan intervensi dini tumbuh kembang balita minimal 2x kali dalam setahun.
4. pelayanan anak balita sakit sesuai standar menggunakan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS)

Tabel 2.57
Cakupan Pelayanan Anak Balita
Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2016

No	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah anak balita yang memperoleh pelayanan pemantauan minimal 8 kali disatu wilayah kerja pada waktu tertentu	11,579	13,570	13,840	15,095	15,147
2	Jumlah seluruh anak balita disatu wilayah kerja dalam waktu yang sama	13,306	15,896	16,088	16,571	17,138
Persentase		87,02%	85,36%	86,02%	91,09%	88,38%

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe, 2017.

Dari tabel 2.57 di atas dapat dilihat capaian indikator pelayanan kesehatan anak balita yang mendapat pelayanan kesehatan 8 kali yaitu pada Tahun 2015 sebesar 91.5 persen capaian ini meningkat di bandingkan tahun 2012 sebesar 87.02 persen, Tahun 2013 sebesar 85.36 persen, Tahun 2014 sebesar 86.02 persen dan Tahun 2016 sebesar 88.38 persen.

II. Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat

Usia masuk sekolah merupakan hal yang penting bagi tahap perkembangan anak. Banyak masalah kesehatan terjadi pada anak usia sekolah. Prilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) seperti menggosok gigi dengan baik dan benar, mencuci tangan menggunakan sabun, karies gigi, kecacingan, kelainan refraksi ketajaman penglihatan dan masalah gizi. Pelayanan kesehatan pada anak termasuk pula intervensi pada anak usia sekolah.

Selain itu, usia anak sekolah merupakan sasaran yang strategis untuk pelaksanaan program kesehatan, karena selain jumlahnya yang besar, mereka juga merupakan sasaran yang mudah dijangkau karena terorganisir dengan baik. Sasaran dari pelaksanaan kegiatan ini diutamakan untuk siswa SD/ sederajat kelas 1. Pemeriksaan kesehatan dilaksanakan oleh tenaga kesehatan bersama tenaga lainnya yang terlatih (guru UKS/UKSG dan dokter kecil).

Tenaga kesehatan disini adalah tenaga medis, tenaga keperawatan atau petugas puskesmas lainnya yang telah dilatih sebagai tenaga pelaksana UKS/UKSG. Guru UKS/UKSG adalah guru kelas atau guru yang ditunjuk sebagai pembina UKS/UKSG di sekolah dan telah dilatih tentang UKS/UKSG. Dokter kecil adalah kader kesehatan sekolah yang biasanya berasal dari murid kelas 4 dan 5 SD dan setingkat yang telah mendapatkan pelatihan dokter kecil. Hal ini dimaksud agar pembelajaran tentang kebersihan dan kesehatan gigi bisa dilaksanakan sedini mungkin. Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan siswa tentang pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut pada khususnya dan kesehatan tubuh serta lingkungan umumnya.

Kegiatan penjangkaran kesehatan selain untuk mengetahui secara dini masalah-masalah kesehatan anak sekolah sehingga dapat dilakukan tindakan secepatnya untuk mencegah keadaan yang lebih buruk, juga untuk memperoleh data atau informasi dalam menilai perkembangan kesehatan anak sekolah maupun untuk dijadikan pertimbangan dalam menyusun perencanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS). Kegiatan penjangkaran kesehatan ini terdiri dari :

1. pemeriksaan kebersihan perorangan (rambut, kulit dan kuku)
2. pemeriksaan status gizi melalui pengukuran antropometri
3. pemeriksaan ketajaman indera (penglihatan dan pendengaran)
4. Pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut
5. pemeriksaan laboratorium untuk anemia dan kecacingan
6. Pengukuran kebugaran jasmani
7. deteksi dini masalah mental emosional

Tabel 2.58
Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD Dan Setingkat
Kota Lhokseumawe Tahun 2014-2016

No	Kecamatan	Jumlah murid SD dan setingkat yang diperiksa kes oleh tenaga terlatih	Jumlah murid SD dan setingkat	Jumlah
2014	Banda Sakti	30	3,821	1.93
	Muara Dua	20		
	Muara Satu	10		
	Blang Mangat	14		
2015	Banda Sakti	30	2,482	1.85
	Muara Dua	11		
	Muara Satu	0		
	Blang Mangat	5		
2016	Banda Sakti	30	4,165	1.99
	Muara Dua	20		
	Muara Satu	10		
	Blang Mangat	23		

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe, 2017.

Tabel 2.58 di atas menjelaskan bahwa Rasio Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat khususnya mulut dan gigi adalah pada tahun 2015 ($46/2,482 \times 100$) sebesar 1.85 persen mengalami penurunan dibandingkan cakupan Tahun 2014 yang sebesar 1.93 persen dan Tahun 2016 yang sebesar 1.99 persen. Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat khususnya mulut dan gigi berarti pengetahuan dan tingkat kepedulian masyarakat untuk mempertahankan gigi cukup baik melalui upaya pencegahan.

JJ. Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin

Penduduk atau masyarakat sasaran program yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan kab/kota setempat. Seluruh penduduk umumnya di Provinsi Aceh dan khususnya Kota Lhokseumawe terlindung oleh Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan mendapat subsidi pemerintah dan pemda di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.

Kunjungan pasien baru adalah seseorang yang baru berkunjung ke sarana kesehatan dengan kasus penyakit baru. Sarana kesehatan strata pertama adalah tempat pelayanan kesehatan meliputi antara lain : puskesmas, balai pengobatan pemerintah dan swasta, praktek bersama dan perorangan.

Pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin adalah jumlah kunjungan pasien rawat jalan masyarakat miskin dan hampir miskin di sarana kesehatan strata pertama di satu wilayah kerja tertentu pada kurun waktu tertentu.

Tabel 2.59
Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin
Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2016

No	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Kunjungan Pasien miskin disarana kesehatan strata 1	259	3.688	109.041	130.078	33.737
2	Jumlah seluruh penduduk miskin	57.576	57.576	57.576	57.576	62.281
Cakupan pelayanan		0,4%	6,4%	189,4%	225,9%	54,2%

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe,2017.

Dari tabel 2.59 diatas, Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin Kota Lhokseumawe Tahun 2014 adalah 189.4 dan Tahun 2015 adalah 225,9 dikarenakan jumlah kunjungan yang berulang-ulang dalam kisaran setahun melebihi dari kunjungan rata-rata pada tahun sebelumnya.

KK. Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang Harus Diberikan Sarana Kesehatan (RS)

Sesuai dengan Keputusan Menteri Nomor 741/VII/2008 SPM Bidang Kesehatan yang terdiri dari 4 jenis pelayanan dengan 18 Indikator. Salah satu Standart Pelayanan Minimal (SPM-K) adalah pelayanan kesehatan rujukan. Ada 2 indikator untuk menilai pelayanan kesehatan rujukan yaitu :

1. cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan rumah sakit (RS), Puskesmas (PKM) dan sarana kesehatan lainnya.
2. cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin.

Sarana kesehatan dengan kemampuan pelayanan gawat darurat level 1 adalah tempat pelayanan gawat darurat yang memiliki Dokter Umum *on site* (berada di tempat) selama 24 jam dengan kualitas GELS (*General Emergency life support*) dan/atau ATLS (*Advance Trauma life support*) serta ACLS (*Advance Cardiac*

life support) yang dilengkapi dengan alat transportasi dan komunikasi.

Tabel 2.60
Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level
Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2016

No	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang Harus Diberikan Sarana Kesehatan (RS)	8	8	8	8	7
2	Jumlah Rumah Sakit	8	8	8	8	7
Persentase		100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe, 2017

Dari tabel 2.60 diatas dapat dilihat bahwa cakupan pelayanan gawat darurat level 1 Kota Lhokseumawe pada Tahun 2012 s/d 2016 adalah mencapai 100%.

LL. Cakupan Desa/Kelurahan Mengalami KLB yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi ≤ 24 Jam

Kejadian Luar Biasa (KLB) adalah kejadian atau peristiwa dalam masyarakat atau wilayah dari suatu kasus penyakit tertentu yang secara nyata melebihi dari jumlah yang di perkirakan. Wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka. Menteri menetapkan dan mencabut daerah tertentu dalam wilayah Indonesia yang berjangkit wabah sebagai daerah wabah (PMK Nomor 949, Tahun 2004).

Kriteria KLB adalah kriteria tentang kejadian luar biasa mengacu pada Keputusan Direktorat jenderal Nomor 451/91, tentang pedoman penyelidikan dan penanggulangan kejadian luar biasa. Menurut aturan itu suatu kejadian dinyatakan luar biasa jika unsur :

1. Timbulnya suatu penyakit menular yang sebelumnya tidak ada atau tidak dikenal
2. peningkatan kejadian penyakit/kematian terus menerus selama 3 kurun waktu berturut-turut menurut jenis penyakitnya (jam, hari, minggu)
3. peningkatan kejadian penyakit/kematian 2 kali lipat atau lebih dibandingkan dengan periode sebelumnya (jam, hari, minggu, bulan, tahun)
4. jumlah penderita baru dalam satu bulan menunjukkan kenaikan 2 kali lipat atau lebih bila dibandingkan dengan angka rata-rata perbulan dalam tahun sebelumnya.

Tabel 2.61
Cakupan Desa/Kelurahan Mengalami KLB yang dilakukan
Penyelidikan Epidemiologi \leq 24 jam
Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2016

No	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah KLB didesa/kelurahan yang ditangani \geq 24 jam dalam periode tertentu	22	6	8	5	14
2	Jumlah KLB di desa/kelurahan yang terjadi pada periode yang sama	22	6	8	5	14
Jumlah		100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe, 2017.

Dari tabel 2.61 diatas, Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi \leq 24 jam pada tabel di atas menggambarkan ada terjadi KLB tertinggi pada Tahun 2012 sebesar 22 kasus dengan penanganan 100 persen, Tahun 2016 sebesar 14 kasus dengan penanganan 100 persen, Tahun 2014 sebesar 8 dengan penanganan 100, Tahun 2013 sebesar 6 dengan penanganan 100 persen, dan Tahun 2015 sebesar 5 kasus dengan penanganan 100 persen.

2.1.4.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kondisi pelayanan umum bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dapat dijelaskan melalui beberapa indikator antara lain proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik,

rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk, panjang jalan kota dalam kondisi baik, persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase, jalan penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk, persentase rumah tinggal bersanitasi, rasio tempat pemakaman umum dan rasio tempat ibadah.

A. Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik

Perkembangan aktifitas pembangunan ekonomi dan sosial di Kota Lhokseumawe cenderung menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun dan terus diimbangi dengan pembangunan infrastruktur yang berkesinambungan dan berkelanjutan. Salah satu hal yang harus diberi perhatian dan menjadi prioritas adalah menyangkut penanganan ketersediaan sarana dan prasarana dasar seperti jalan dan jembatan. Dari data yang terbaru Kota Lhokseumawe memiliki panjang jalan 412.468 Meter dengan jumlah ruas jalan mencapai 699 ruas yang tersebar pada 4 (empat) kecamatan dengan rincian sebagaimana dideskripsikan pada tabel 2.62 berikut ini.

Tabel 2.62
Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik
Kota Lhokseumawe Tahun 2013-2016 (Km)

Tahun	Jalan Kota		Jalan Propinsi	
	Kondisi Baik	Total	Kondisi Baik	Total
2013	N/A	340,573	1009,52	1847,91
2014	98,248	340,573	444,24	1701,82
2015	102,652	340,573	624	1781,72
2016	108,157	412,468	741,78	1781,72

Sumber : Dinas PUPR Kota Lhokseumawe, 2017.

Meskipun proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik di Kota Lhokseumawe cenderung mengalami peningkatan tiap tahunnya, akan tetapi kondisi ini masih belum mampu mendukung kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat. Sementara itu, kondisi jalan negara yang berada pada wilayah Kota Lhokseumawe dengan total panjang 23,20 Km secara umum dalam kondisi baik, begitu pula dengan ruas jalan propinsi dengan panjang 4,60 Km secara umum juga dalam kondisi baik. Sedangkan untuk jalan kota dengan panjang 412,468 Km yang

terbagi pada 4 (empat) kecamatan ini masih memerlukan penanganan yang serius. Kerusakan jalan biasanya timbul akibat genangan yang tercipta karena kondisi *drain hole* yang tidak memadai. Kerusakan lainnya juga ditimbulkan oleh kelebihan muatan *tonase* dari truck yang melintasi jalan tersebut. Berikut tabel Jenis, Kondisi, Kelas dan Panjang Jalan Kota Lhokseumawe:

Tabel 2.63
Jenis, Kondisi, Kelas dan Panjang Jalan (Km)
Kota Lhokseumawe Tahun 2014-2016

Jenis, Kondisi, Kelas	Status								
	Jalan Negara			Jalan Provinsi			Jalan Kabupaten/ Kota		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Jenis Permukaan									
Aspal	23.20	23.20	23.20	4.60	4.60	4.60	229.544	231.606	286.389
Paklah (kerikil)	-	-	-	-	-	-	75.494	74.253	71.988
Tanah	-	-	-	-	-	-	33.412	34.714	51.851
Tidak Terperinci	-	-	-	-	-	-	0.691	0.000	2.240
Jumlah	23.20	23.20	23.20	4.60	4.60	4.60	339.141	340.573	412.468
Kondisi Jalan									
Baik	23.20	23.20	23.20	4.60	4.60	4.60	95.240	95.411	108.157
Sedang	-	-	-	-	-	-	119.585	117.967	131.595
Rusak	-	-	-	-	-	-	99.511	101.403	107.554
Rusak Berat	-	-	-	-	-	-	24.805	25.792	65.122
Jumlah	23.20	23.20	23.20	4.60	4.60	4.60	339.141	340.573	412.428
Kelas Jalan									
Kelas I	23.20	23.20	23.20	4.60	4.60	4.60	229.544	231.606	286.389
Kelas II	-	-	-	-	-	-	75.494	74.253	71.988
Kelas III	-	-	-	-	-	-	33.412	34.714	51.851
Tidak Terperinci	-	-	-	-	-	-	0.691	0.000	2.240
Jumlah	23.20	23.20	23.20	4.60	4.60	4.60	339.141	340.573	412.468

Sumber : Dinas PUPR Kota Lhokseumawe, 2017.

B. Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Penduduk

Berdasarkan pengelompokan jalan, terdapat lima kewenangan administrasi menurut statusnya. Dimana pengelompokan tersebut dikelompokkan ke dalam jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa. Dari Tahun 2014 hingga Tahun 2016 jumlah panjang jalan di wilayah Kota Lhokseumawe terus mengalami peningkatan. Berikut tabel panjang jalan dilalui roda empat:

Tabel 2.64
Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Penduduk
Kota Lhokseumawe Tahun 2013-2016

NO	URAIAN	TAHUN		
		2014	2015	2016
1	Jumlah Panjang Jalan (KM)	299.882	301.082	373.439
2	Jumlah Penduduk (Jiwa)	187,455	191,407	195,186
	Rasio	1.599	1.572	1.913

Sumber : Dinas PUPR Kota Lhokseumawe, 2017

Dari tabel 2.64 di atas dapat dilihat bahwa Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk pada tahun 2016 sebesar 1.913 meningkat dibandingkan dua tahun sebelumnya yaitu tahun 2014 sebesar 1.599 dan tahun 2015 sebesar 1.572.

C. Panjang Jalan Kota Dalam Kondisi Baik (> 40 Km/Jam)

Pengelompokan jalan kota dalam kondisi baik yang dapat dilalui dengan kecepatan > 40 Km/Jam termasuk dalam pengelompokan jalan kolektor. Pengertian jalan kolektor ialah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, jumlah jalan masuk dibatas serta melayani daerah-daerah di sekitarnya. Dengan cirinya kendaraan yang melaluinya yaitu kendaraan ringan < 10 ton, kemudian dapat dilalui kendaraan dengan kecepatan sedang (40-80 km/jam). Berikut data tentang panjang jalan kota dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)

Tabel 2.65
Panjang Jalan Dilalui Roda 4
Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2016

Uraian	Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016
Jalan kota dalam kondisi baik dan sedang (>40 KM/Jam)	n/a	n/a	63,5	64,46	58,14

Sumber : Dinas PUPR Kota Lhokseumawe, 2017.

Dari tabel 2.65 di atas dapat dilihat bahwa sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 panjang jalan kota dalam kondisi baik dan sedang terjadi fluktuatif, dimana pada tahun 2014 sepanjang 63,5 km, tahun 2015 meningkat menjadi 64,46 km dan tahun 2016 kondisinya menurun menjadi 58,14 km.

D. Persentase Jalan Yang Memiliki Trotoar dan Drainase / Saluran Pembuangan Air (Minimal 1,5 M)

Konsep pedestrian atau trotoar jalan dan saluran drainase yang dalam sebuah jalan meliputi jalan Panglath, Jl. T. Hamzah Bendahara, sebagian Jl. Merdeka, Jl. Samudera dan Samudera Baru, sebagian Jl. Darussalam, Jl. Pase, Jl. Malahayati, Jl. T. Nyak Adam Kamil, Jl. Chik Di Tiro yang mencapai 3.940 meter yang semuanya berada pada Kecamatan Banda Sakti.

Tabel 2.66
Panjang Jalan Kota Yang Memiliki Trotoar Dan Drainase/Saluran Pembuangan Air (Minimal 1,5 M) Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2016

Uraian	Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016
Persentase jalan yang memiliki trotoar (minimal 1,5 m)	n/a	n/a	n/a	n/a	8,89
Persentase jalan yang memiliki drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5)	n/a	n/a	n/a	n/a	6,98
Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor	n/a	n/a	n/a	n/a	12,21

Sumber : Dinas PUPR Kota Lhokseumawe, 2017.

Dari tabel 2.66 di atas dapat dilihat bahwa persentase jalan yang memiliki trotoar (minimal 1.5 m) sebesar 8,89%, persentase jalan yang memiliki drainase/saluran pembuangan air (minimal 1.5 m) sebesar 6,98%, dan persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsong sebesar 12,21%.

E. Jalan Penghubung dari Ibukota Kecamatan ke Kawasan Pemukiman Penduduk (Minimal Dilalui Roda 4)

Semua jalan yang menghubungkan antara pusat ibukota kecamatan ke kawasan permukiman telah dapat dilalui kendaraan roda 4 (empat) terutama lagi Kecamatan Banda Sakti yang juga merupakan pusat Pemerintahan Kota Lhokseumawe dimana seluruh jalan yang ada pada kecamatan ini telah dapat dilalui oleh kendaraan roda empat.

F. Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi

Bertambahnya populasi penduduk akan berdampak pada peningkatan debit limbah cair yang dihasilkan. Adanya resiko pencemaran lingkungan dari limbah tersebut harus dapat diantisipasi oleh Pemerintah dengan pelaksanaan program-program yang mendukung pengelolaan limbah secara tepat. Penanganan masalah limbah saat ini telah diupayakan pada pembangunan fisik dan sistematis.

Pemerintah Kota Lhokseumawe melalui Program Pembangunan Infrastruktur Permukiman telah membangun 12 titik IPAL Komunal hingga tahun 2016 pada daerah-daerah yang dianggap masih kekurangan tempat penampungan limbah cair. Sementara itu, Pemerintah Kota juga menyediakan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) sebanyak 1 unit dan 2 unit mobil penyedot dan pengangkut tinja.

Berdasarkan hasil Survey Kesehatan Lingkungan Kota Lhokseumawe diketahui bahwa, terdapat dua sistem pembuangan limbah cair masyarakat yaitu sistem terpisah dan sistem gabungan. Sistem terpisah yaitu terjadinya pemisahan antara penyaluran air limbah dan air hujan. Air limbah dialirkan ke dalam SPAL yang berbentuk *septic tank*. Air hujan umumnya disalurkan melalui saluran drainase kota. Sistem gabungan yaitu semua air limbah tersebut masuk ke dalam satu wadah (*septic tank*). Sesuai dengan hasil survei kesehatan lingkungan maka di wilayah Kota Lhokseumawe dapat kita ketahui bahwa terdapat 31.415 jamban 26.377 unit SPAL yang secara umum semua fasilitas jamban dan SPAL dibangun secara swadaya oleh masyarakat sendiri.

G. Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk

Terdapat tiga jenis pemakaman dalam wilayah Kota Lhokseumawe, Tempat Pemakaman Umum (TPU), Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU), Tempat Pemakaman Khusus (TPK). Berikut data dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.67
Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk
Kota Lhokseumawe Tahun 2016

NO	URAIAN	2016		
		JUMLAH	LUAS	DAYA TAMPUNG
1	Tempat Pemakaman Umum (TPU)	68	5,000	2,000
2	Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU)	204	10,200	2,040
3	Tempat Pemakaman Khusus (TPK)	2	2,500	1,000
4	Lain - Lain	-	-	-
	Jumlah Tempat Pemakaman	274	17.700	5,040
6	Jumlah Penduduk (Jiwa)			195,186
	Rasio TPU Per Satuan Penduduk (1/6)			25.82

Sumber : Dinas PUPR Kota Lhokseumawe, 2017.

Dari tabel 2.67 di atas dapat dijelaskan bahwa sampai dengan Tahun 2016 jumlah Tempat Pemakaman yang ada di Kota Lhoskeumawe sebanyak 274 tempat, dengan rincian 68 Tempat Pemakaman Umum, 204 Tempat Pemakaman Bukan Umum, dan 2 Tempat Pemakaman Khusus dengan total rasio sebesar 25.82.

H. Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk

Kebutuhan akan tempat ibadah bagi penduduk Kota Lhokseumawe dirasakan telah mencukupi. Jumlah kepadatan penduduk di Kecamatan Banda Sakti sebesar 7.223 jiwa/Km², Blang Mangat 479 jiwa/Km², Muara Satu 930 jiwa/Km², Muara Dua 597 jiwa/Km². Jumlah ibadah pada Kecamatan Banda Sakti sebanyak 17 unit Masjid, 17 unit Mushalla, 18 Meunasah, 3 unit Gereja dan 1 unit Vihara. Pada kecamatan Muara Satu terdapat 8 unit Mesjid, 45 unit Mushalla dan 11 unit Meunasah. Sedangkan pada kecamatan Blang Mangat terdapat 13 unit Mesjid, 10 unit Mushalla dan 22 unit Meunasah, untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.68
Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk
Kota Lhokseumawe Tahun 2014-2016

NO	URAIAN	TAHUN		
		2014	2015	2016
1	Mesjid	50	50	50
2	Mushalla	93	93	93
3	Meunasah	68	68	68
4	Gereja	3	3	3
5	Vihara	1	1	1
a	Jumlah Rumah Ibadah	215	215	215
b	Jumlah Penduduk (Jiwa)	187,455	191,407	195,186
b/a	Rasio	1.146	1.123	1.101

Sumber : Kota Lhokseumawe Dalam Angka 2017

Dari tabel 2.68 di atas dapat dijelaskan bahwa dari Tahun 2014 sampai Tahun 2016 terdapat sebanyak 2015 Unit Rumah Ibadah yang tersebar di empat kecamatan dalam wilayah Kota Lhokseumawe. Jumlah mesjid sebanyak 50 unit, Mushalla sebanyak 93 unit, Meunasah sebanyak 68 unit, Gereja 3 unit, dan Vihara sebanyak 1 Unit.

2.1.4.1.4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Kondisi pelayanan umum bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman dapat dijelaskan melalui beberapa indikator antara lain rasio rumah layak huni, rasio permukiman layak huni, persentase lingkungan pemukiman Kumuh

A. Rasio Rumah Layak Huni

Data Rumah Layak Huni di Kota Lhokseumawe belum tersedia secara akurat, namun rumah layak huni tersebut sangat dibutuhkan pembangunannya di Kota Lhokseumawe mengingat banyaknya kaum dhuafa yang belum memiliki rumah. Pada Provinsi Aceh umumnya dan Kota Lhokseumawe khususnya, usulan program kegiatan melalui dana TDBH Migas dan Dana Otonomi Khusus Aceh mewajibkan Kabupaten/Kota untuk menyisihkan sebesar 10 persen dari total Dana Otonomi Khusus Aceh untuk pembangunan rumah layak huni.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Pemukiman. Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana lingkungan. Sementara itu, Rumah Tidak Layak Huni adalah suatu hunian atau yang tidak memenuhi persyaratan untuk dihuni baik secara teknis maupun non teknis. Berikut rasio Rumah Layak Huni Kota Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016:

Tabel 2.69
Rasio Rumah Layak Huni
Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2016

NO	URAIAN	TAHUN				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah Rumah Layak Huni	Na	Na	Na	Na	42,459
2	Jumlah Penduduk	179,807	183,232	187,455	191,407	195,186
	Rasio	-	-	-	-	0.22

Sumber : Dinas PUPR Kota Lhokseumawe, 2017

Dari tabel 2.69 di atas dapat dilihat bahwa Rasio Rumah Layak Huni sampai dengan tahun 2016 di Kota Lhokseumawe hanya sebesar 0.22. Rasio yang sangat minim sekali, sehingga sangat diperlukan perhatian dari pemerintah untuk penanganan Rumah Tidak Layak Huni di Kota Lhokseumawe.

B. Rasio Permukiman Layak Huni

Dari beberapa kawasan perumahan yang telah ada di Kota ini, hanya beberapa kawasan saja yang memiliki prasarana dasar penting yang telah tersedia seperti, kompleks perumahan PT. Arun, perumahan Komplek Tsunami Blang Crum yang dibangun oleh *Save the Children*, Komplek Mutiara, dan Komplek Asrama TNI/Polri dan instansi vertikal yang layak. Tapi hanya kompleks PT. Arun saja yang memiliki fasilitas pusat pelayanan kesehatan dan pendidikan dan pusat kuliner serta sarana olah raga seperti, stadion bola kaki, kolam renang, tenis *out door*, *volyball*, basket, badminton, *joging track* dan golf.

C. Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Nomor 442 Tahun 2016 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Dalam Wilayah Kota Lhokseumawe, Kecamatan Banda Sakti merupakan daerah yang paling luas kawasan kumuhnya. Pemerintah Kota Lhokseumawe melalui Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) berharap kawasan kumuh dalam wilayah Kota Lhokseumawe dapat ditanggulangi secara komprehensif. Berikut tabel untuk lebih jelasnya:

Tabel 2.70
Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kota Lhokseumawe Tahun 2016

No	Nama Kawasan	Luas (Ha)	Kecamatan	Tingkat Kekumuhan
1	Pusong	28.60	Banda Sakti	Tinggi
2	Kampung Jawa, dan Hagu (Jagu)	21.07	Banda Sakti	Tinggi
3	Keude Aceh	6.52	Banda Sakti	Sedang
4	Mon Geudong	6.04	Banda Sakti	Sedang
5	Blangtuphat	19.07	Muara Satu	Sedang
	Jumlah	81.30		

Sumber : SK Walikota Lhokseumawe Nomor 442 Tahun 2016.

Dari tabel 2.70 di atas dapat dilihat bahwa sebaran lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh tersebar di 5 titik. Kawasan Pusong merupakan kawasan yang memiliki luasan terbesar yaitu mencapai 28.60 Ha dengan tingkat kekumuhan “Tinggi”, kawasan Kampung Jawa dan Hagu memiliki luasan sebesar 21.07 Ha dengan tingkat kekumuhan juga “Tinggi”, selanjutnya kawasan Blangtuphat memiliki luasan kumuh sebesar 19.07 Ha dengan tingkat kekumuhan “Sedang”. Sedangkan Kawasan Keude Aceh dan Kawasan Mon Geudong memiliki luasan kawasan kumuh masing-masing 6.52 Ha dan 6.04 Ha dengan tingkat kekumuhan “Sedang”.

2.1.4.1.5. Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Kondisi pelayanan umum bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dapat dijelaskan melalui beberapa indikator antara lain kegiatan pembinaan LSM, Ormas dan OKP, kegiatan pembinaan politik daerah, rasio jumlah satpol PP, rasio pos siskamling, penegakan PERDA/Qanun dan cakupan patroli petugas satpol PP.

A. Kegiatan Pembinaan LSM, Ormas dan OKP

Dari Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2016, Pemerintah Kota Lhokseumawe melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah menyelenggarakan kegiatan pembinaan baik itu pada Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Masyarakat dan juga Organisasi Kepemudaan. Kemudian pada Tahun 2016 Pemerintah Kota Lhokseumawe melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik juga menyalurkan bantuan keuangan baik kepada Organisasi Masyarakat dan juga Organisasi Kepemudaan. Berikut tabel Kegiatan Pembinaan LSM, Ormas dan OKP Pemerintah Kota Lhokseumawe dari Tahun 2012 sampai dengan 2016:

Tabel 2.71
Kegiatan Pembinaan LSM, Ormas dan OKP
Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2016

No	Kegiatan	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Monitoring, Evaluasi dan Pelapor ORMAS, ORSOS dan LSM	ada	ada	ada	ada	ada

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, 2017.

B. Kegiatan Pembinaan Politik Daerah

Selain melaksanakan kegiatan pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Masyarakat dan juga Organisasi Kepemudaan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Lhokseumawe juga menyelenggarakan kegiatan Pembinaan Politik Daerah dari Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2016, Pemerintah Kota Lhokseumawe melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik juga menyalurkan bantuan keuangan Kepada Partai Politik dari Tahun 2012 sampai dengan 2016. Berikut tabel Kegiatan

Pembinaan Politik Daerah Kota Lhokseumawe dari Tahun 2012 sampai dengan 2016:

Tabel 2.72
Kegiatan Pembinaan Politik Daerah
Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2016

No	Kegiatan	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Verifikasi dan Monitoring Parpol	ada	ada	ada	ada	ada
2	Bantuan Keuangan Partai Politik	ada	ada	ada	ada	ada

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, 2017.

C. Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Per 10.000 Penduduk

Dari Tahun 2012 sampai dengan 2016, Jumlah Polisi Pamong Praja di Kota Lhokseumawe memiliki rasio sebesar 11,25 persatuan penduduk. Keberadaan jumlah Polisi Pamong Praja terus meningkat setiap tahunnya guna menunjang kelancaran tugas penegakan Perda di Kota Lhokseumawe. Sedangkan jumlah Linmas di Kota Lhokseumawe Tahun 2015 sebanyak 88 orang dan pada Tahun 2016 terjadi peningkatan sebanyak 528. Penambahan Linmas ini ditujukan guna menambah tugas pengamanan Pilkada Kota Lhokseumawe pada Tahun 2017. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.73
Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja dan Linmas
Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2016

No	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah Polisi Pamong Praja	101	124	147	206	213
2	Jumlah Linmas	606	606	88	88	528
3	Jumlah Penduduk	179.807	181.976	187.455	188.221	189.384
Rasio Polisi Pamong Praja		5.62	6.81	7.84	10.94	11.25
Rasio Jumlah Linmas		33.70	33.30	4.69	4.67	27.88

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayah Hisbah, 2017.

D. Rasio Pos Siskamling Per Jumlah Desa/Kelurahan

Rasio Pos Siskamling per jumlah Desa/Kelurahan Kota Lhokseumawe Tahun 2015 sebesar 2,85. Rasio ini sama dengan Tahun 2016, indikasi ini disebabkan tidak adanya penambahan pos siskamling di Tahun 2016. Rasio pos siskamling per jumlah Desa/Kelurahan ini menggambarkan bahwa keamanan di Kota

Lhokseumawe semakin kondusif sehingga jumlah pos siskamling di Kota Lhokseumawe tidak perlu dilakukan penambahan. Untuk lebih jelas dapat dilihat tabel berikut ini,

Tabel 2.74
Rasio Pos Siskamling per jumlah Gampong
Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2016

No	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah Pos Siskamling	194	194	194	194	194
2	Jumlah Gampong	68	68	68	68	68
Rasio Pos Siskamling		2.85	2.85	2.85	2.85	2.85

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayul Hisbah, 2017.

E. Penegakan PERDA/QANUN

Satpol PP Kota Lhokseumawe memiliki kewenangan untuk menertibkan dan menindak warga yang mengganggu ketertiban umum, melakukan pemeriksaan dan tindakan represif non-yustisial terhadap warga atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Tabel 2.75
Jumlah Penegakan Peraturan Daerah/Qanun
Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2016

No	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah Penegakan PERDA	27	32	45	20	15
2	Jumlah Pelanggaran	191	170	160	96	61
Persen		14	19	28	21	25

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayul Hisbah, 2017.

Jumlah Penegakan PERDA dan pelanggaran PERDA di Tahun 2015 sebesar 21 persen atau sebanyak 20 penegakan PERDA dari jumlah pelanggaran sebanyak 96 pelanggaran dan meningkat pada Tahun 2016 sebesar 25 persen dari jumlah pelanggaran sebanyak 61 pelanggaran. Kegiatan penyelenggaraan ketertiban umum Satuan Polisi Pamong Praja belum dapat mewujudkan keamanan dan ketertiban umum di wilayah Kota Lhokseumawe.

F. Cakupan Patroli Petugas Satuan Polisi Pamong Praja

Cakupan Patroli Petugas Satpol PP Kota Lhokseumawe tetap dilakukan dalam proporsi yang sama. Patroli ini merupakan kegiatan rutin guna melakukan penertiban terhadap Pedagang

Kaki Lima (PKL) yang berjualan di badan jalan atau di trotoar, penertiban juga dilakukan di pasar tumpah, penertiban gelandangan dan pengemis (Gepeng), penertiban pemasangan baliho, maupun penertiban yang terkait dengan masalah perizinan. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel berikut ini;

Tabel 2.76
Jumlah Penegakan Peraturan Daerah
Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2016

No	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah waktu patroli	2 jam	2 jam	2 jam	2 jam	2 jam
2	Jumlah Kegiatan patroli	3x sehari	3x sehari	3x sehari	3x sehari	3x sehari
Rasio		0.67	0.67	0.67	0.67	0.67

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayul Hisbah, 2017.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa patroli penegakan Peraturan Daerah yang dilakukan rutin oleh Satpol PP Kota Lhokseumawe berdurasi 2 jam dengan jumlah kegiatan patroli dilakukan sebanyak 3 kali sehari. Patroli ini sangat penting sekali dilakukan untuk keberlangsungan penegakan Peraturan Daerah maupun Peraturan Kepala Daerah dalam rangka menciptakan kenyamanan ketertiban umum.

2.1.4.1.6. Sosial

Kondisi pelayanan umum bidang sosial dapat dijelaskan melalui beberapa indikator antara lain PMKS yang memperoleh bantuan sosial, persentase panti sosial yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sosial, persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat, persentase penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia dan persentase panti asuhan/jompo yang menerima bantuan pemerintah daerah.

A. PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial

Berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 pada pasal 28 huruf H menetapkan "setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat". Dalam rangka mewujudkan amanat

Undang-undang tersebut, Pemerintah Kota Lhokseumawe telah melakukan upaya melalui pemberian bantuan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Jumlah PMKS yang mendapatkan bantuan dari tahun 2012 hingga tahun 2016 terus meningkat, namun jumlah ini belumlah sepadan dengan total PMKS yang seharusnya menerima bantuan. Lebih lanjut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.77
PMKS yang memperoleh Bantuan Sosial
Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2016

No	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah PMKS yang diberikan bantuan	4,441	4,380	4,220	3,879	5,038
2	Jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan	13,300	13,800	14,200	14,700	16,000
	Persentase	33.39	31.74	29.72	26.39	31.49

Sumber : Dinas Sosial Kota Lhokseumawe, 2017.

Dari tabel 2.77 di atas dapat dijelaskan bahwa pada Jumlah PMKS yang diberikan bantuan pada Tahun 2016 sebanyak 5,038 PMKS atau sebesar 31.49 persen dari total PMKS yang seharusnya menerima bantuan. Persentase ini menunjukkan peningkatan dari dua tahun sebelumnya yang hanya sebesar 26.39 persen pada Tahun 2015 dan 29.72 persen pada Tahun 2014.

B. Persentase Panti Sosial yang Menyediakan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Sosial

Selama kurun waktu tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 jumlah panti sosial cenderung tidak terjadi perubahan. Sementara itu kapasitas dan jumlah anak asuh terus mengalami kenaikan. Seluruh panti sosial di Kota Lhokseumawe telah menyediakan sarana prasarana pelayanan kessos seperti a) Pelayanan Teknis mencakup peralatan asesmen, bimbingan sosial, ketrampilan fisik dan mental. b) Perkantoran, seperti memiliki ruang kantor, ruang rapat, ruang tamu, kamar mandi, WC, peralatan kantor seperti. c) Umum, seperti memiliki ruang makan, ruang tidur, mandi dan cuci, kerapihan diri, belajar, kesehatan dan peralatannya (serta ruang perlengkapan). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.78
Persentase Panti Sosial yang menyediakan Sarana Prasarana
Pelayanan Kesehatan Sosial Kota Lhokseumawe
Tahun 2012-2016

No	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah panti sosial dalam 1 (satu) tahun yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kessos	15	15	15	15	15
2	Jumlah panti sosial dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya menyediakan sarana prasarana pelayanan kessos	15	15	15	15	15
	Persentase	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Sosial Kota Lhokseumawe, 2017.

C. Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat

Penanganan korban bencana yang terjadi dalam wilayah Kota Lhokseumawe melalui Dinas Sosial lebih difokuskan pada penyediaan logistik dan stok makanan selama proses tanggap darurat. Sebagian besar penerima adalah korban bencana kebakaran dan banjir, mengacu pada kondisi Kota Lhokseumawe yang rawan terhadap ancaman bencana kebakaran dan banjir. Berikut data penanganan korban bencana yang menerima bantuan sosial dari tahun 2012 s.d 2016:

Tabel 2.79
Persentase Korban Bencana yang menerima
Bantuan Sosial selama masa Tanggap Darurat
Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2016

No	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	102	92	58	82	44
2	Jumlah korban bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dalam 1 (satu) tahun	102	92	58	82	44
	Persentase	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Sosial Kota Lhokseumawe, 2017

D. Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental Serta Lanjut Usia Tidak Potensial yang Telah Menerima Jaminan Sosial

Jumlah penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia yang terdata pada Kota Lhokseumawe Tahun 2012 sejumlah 1.560 jiwa, jumlah ini terus naik hingga pada Tahun 2016 berjumlah 2.346 jiwa. Dari jumlah tersebut, Kota Lhokseumawe telah memberikan jaminan sosial sehingga pencapaiannya mencapai 100%. Lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel 2.80 dibawah ini:

Tabel 2.80
Persentase Penyandang Cacat Fisik Dan Mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2016

No	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial dalam 1 tahun	1,560	1,575	1,724	1,870	2,346
2	Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensial yang seharusnya menerima jaminan sosial dalam 1 (satu) tahun	1,560	1,575	1,724	1,870	2,346
	Persentase	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Sosial Kota Lhokseumawe, 2017.

E. Persentase Panti Asuhan/Jompo yang Menerima Bantuan Pemerintah Daerah

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dimana Setiap Anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari berbagai kegiatan yang dapat mengganggu pertumbuhannya, baik secara fisik, mental maupun sosial. Saat ini terdapat 13 (Tiga Belas) Panti Asuhan yang mampu menampung 858 (delapan ratus lima puluh delapan) Orang.

Selain keberadaan panti asuhan, Kota Lhokseumawe juga memiliki 2 (dua) panti jompo yaitu Panti Jompo Darussa'dah dan Panti Jompo An-Nur sebagai sarana sosial untuk orang lanjut usia

yang mana jumlahnya semakin meningkat pada setiap tahunnya. Kedua panti jompo ini mampu menampung 45 (empat puluh lima) lansia.

Tabel 2.81
Persentase Panti Asuhan/Jompo yang menerima bantuan Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2016

No	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Panti Asuhan	13	13	13	13	13
2	Panti Jompo	2	2	2	2	2
a	Jumlah Seluruh Panti Asuhan/Jompo	15	15	15	15	15
b	Jumlah Penghuni Panti asuhan/Jompo yang menerima bantuan	908	908	908	908	908
c	Jumlah Penghuni Panti Asuhan/Jompo	1,030	1,099	1,128	1,224	1,320
	Persentase (b/c*100)	88	83	80	74	69

Sumber : Dinas Sosial Kota Lhokseumawe, 2017.

Dari tabel 2.81 di atas dapat dijelaskan bahwa belum seluruhnya penghuni panti asuhan/jompo yang menerima bantuan di Kota Lhokseumawe. Pada Tahun 2016 jumlah persentase penghuni panti asuhan/jompo yang menerima bantuan sebesar 69 persen, turun dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena jumlah penghuni panti yang mengalami peningkatan setiap tahunnya sedangkan bantuan yang disalurkan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe hanya untuk 908 orang penghuni panti asuhan/jompo.

2.1.4.2. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Pelayanan umum Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar dibagi kepada beberapa bidang antara lain tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi

dan usaha kecil & menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olahraga, statistik, kebudayaan, perpustakaan dan kearsipan

2.1.4.2.1. Tenaga Kerja

Kondisi Pelayanan umum Urusan Bidang Tenaga Kerja dapat dilihat dari beberapa indikator antara lain angka sengketa pengusaha dan pekerja dan keselamatan dan perlindungan pekerja.

A. Angka Sengketa Pengusaha – Pekerja Per Tahun

Angka sengketa merupakan perbandingan antara jumlah perusahaan dengan jumlah sengketa pengusaha pekerja per tahun dalam suatu wilayah. Jumlah perusahaan yang terdaftar dalam wilayah Kota Lhokseumawe dari Tahun 2012 sebanyak 21 perusahaan. Jumlah ini terus mengalami peningkatan dari tahun ketahun, hingga pada Tahun 2016 jumlah perusahaan yang terdaftar pada wilayah Kota Lhokseumawe mencapai 25 perusahaan. Sementara itu, jumlah sengketa pekerja dengan perusahaan pada Tahun 2012 sebanyak 66 dan ini merupakan angka tertinggi. Jumlah sengketa pekerja mengalami penurunan hingga pada tahun 2016 hanya terdapat 29 kasus. Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun diperoleh dengan melakukan pembagian antara kedua data tersebut dan dikalikan 1000. Berikut tabel data angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun dalam wilayah Kota Lhokseumawe:

Tabel 2.82
Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Per tahun
Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2016

No	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah Sengketa Pekerja	66	25	22	38	29
2	Jumlah Perusahaan	21	21	16	30	25
Rasio		3,14	1,19	1,38	1,27	1,16

Sumber : DPMTSPNAKER, 2017.

B. Keselamatan dan Perlindungan Pekerja

Tujuan dari keselamatan kerja adalah melindungi tenaga kerja atas hak keselamatan ditempat kerja agar mendapatkan perlindungan dalam bekerja yang layak. Setiap tahunnya dari

Tahun 2012-2016 penerapan keselamatan kerja terus mengalami peningkatan. Berikut data pada tabel 2.83 berikut:

Tabel 2.83
Keselamatan dan Perlindungan Pekerja
Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2016

No	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah Perusahaan yang menerapkan keselamatan kerja	5	8	10	15	20
2	Jumlah perusahaan	21	21	16	30	25
Persen		23.81	38.10	62.50	50.00	80.00

Sumber : DPMTSP Naker, 2017.

Dari tabel 2.83 diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah perusahaan yang menerapkan keselamatan kerja pada Tahun 2016 mencapai 80 persen, terjadi peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya, dimana pada Tahun 2015 sebesar 50 persen dan Tahun 2014 sebesar 62.50 persen.

2.1.4.2.2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kondisi Pelayanan umum Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dapat dilihat dari beberapa indikator antara lain persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah, proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRK, partisipasi perempuan di lembaga swasta dan rasio kekerasan dalam rumah tangga serta cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengadilan.

A. Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah

Partisipasi perempuan dalam lembaga Pemerintah sangat penting. baik Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif. Hal ini karena keberadaan perempuan dapat mewakili serta meningkatkan kesejahteraan kelompok perempuan yang diwakili, mengawal dan mempengaruhi agenda dan proses pembuatan kebijakan. Partisipasi perempuan yang rendah di bidang politik dan pemerintah akan mempengaruhi kuantitas dan kualitas kebijakan publik yang responsif terhadap gender yang menyangkut baik laki-laki maupun perempuan. Persentase partisipasi perempuan di

lembaga pemerintah adalah proporsi perempuan yang bekerja pada lembaga pemerintah terhadap jumlah seluruh pekerja perempuan. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.84
Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2016

No	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah Pekerja Perempuan di Instansi Pemerintah	2.677	2.779	2.865	3.765	4.164
2.	Jumlah Pekerja Perempuan	3.581	3.741	3.885	5.050	5.530
Persentase		74,76	74,28	73,74	74,55	75,30

Sumber : DP3ADALDUK & KB Kota Lhokseumawe, 2017.

Dari tabel 2.84 diatas dapat dilihat partisipasi perempuan di Lembaga Pemerintah pada Tahun 2013 sebanyak 2.779 pekerja perempuan atau 74,28%, pada Tahun 2014 meningkat menjadi 2.865 pekerja perempuan atau 73,74 % dan Tahun 2015 tetap sebanyak 2.865 pekerja perempuan atau 72,53 %. Penurunan persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Kota Lhokseumawe dipengaruhi meningkatnya jumlah pekerja perempuan pada setiap tahunnya.

B. Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di DPRK

Partisipasi politik perempuan saat ini semakin dibutuhkan dalam upaya pengintegrasian kebutuhan gender dalam berbagai kebijakan publik dan menghasilkan instrument hukum yang sensitif gender, yang selama ini terabaikan dan banyak menghambat kemajuan perempuan di berbagai sektor kehidupan.

Namun terkadang pada kenyataannya, dalam memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan dalam politik ini menjadi sangat sulit untuk dipenuhi oleh partai politik dalam mendapatkan kader yang berkualitas. Sehingga partai politik menempatkan perempuan dalam pemenuhan kuota secara formalitas saja bukan sebagai peningkatan aktualisasi perempuan dalam ranah politik. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.85
Proporsi Kursi yang diduduki Perempuan di DPR
Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2016

No.	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Laki-laki	22	22	23	23	23
2.	Perempuan	3	3	2	2	2
Jumlah		25	25	25	25	25
Persentase		12%	12%	8%	8%	8%

Sumber : Lhokseumawe Dalam Angka, Tahun 2017.

Dari tabel 2.85 diatas proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR pada periode 2010-2013 sebanyak 3 orang atau 12% dan pada periode 2013-2018 menurun proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR hanya 2 orang atau 8 %. Keterwakilan Perempuan di Parlemen di Kota Lhokseumawe masih rendahselain belum tercapainya kuota 30 persen anggota DPR perempuan, lemahnya keterwakilan kaum hawa di lembaga pembuat undang-undang ini terlihat dari tidak ada satu pun perempuan yang menjadi pimpinan DPR atau Ketua Komisi.

C. Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta

Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta adalah proporsi perempuan yang bekerja pada lembaga swasta terhadap jumlah seluruh pekerja perempuan. Berikut data dapat dilihat pada tabel 2.86 berikut ini:

Tabel 2.86
Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta
Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2016

No	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah Pekerja Perempuan di instansi Swasta	904	962	1.020	1.085	1.366
2	Jumlah Pekerja Perempuan	3.581	3.741	3.885	3.950	5.530
Persentase		25,24	25,72	26,25	27,46	24,70

Sumber : DP3ADALDUK & KB Kota Lhokseumawe Tahun 2017.

Dari tabel diatas dapat dilihat partisipasi perempuan di lembaga swasta pada Tahun 2013 sebanyak 962 dari 3.741 pekerja perempuan atau sebesar 25,72%, pada Tahun 2014 meningkat menjadi 1.020 dari 3.885 pekerja perempuan atau 26,25% dan Tahun 2015 partisipasi perempuan di lembaga swasta menjadi 1.085 dari 3.950 pekerja perempuan atau 27,46%.

D. Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Jenis kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, meliputi:

- kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.
- kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
- kekerasan seksual meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut, dan atau pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
- penelantaran rumah tangga dimana setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara

membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Rasio KDRT adalah jumlah KDRT yang dilaporkan dalam periode 1 (satu) tahun per 1.000 rumah tangga. Data rasio KDRT tercantum dalam tabel 2.87 berikut:

Tabel 2.87
Rasio Kekerasan dalam Rumah Tangga
Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2016

No	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah KDRT	12	8	24	19	22
2	Jumlah RT	40.626	40.726	42.354	43.309	44.165
	Rasio KDRT	0.030	0.020	0.057	0.044	0.050

Sumber : P2TP2A Tahun 2017.

Kasus kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia menunjukkan jumlah yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Namun demikian secara umum rasio KDRT di Kota Lhokseumawe bisa dikatakan masih sangat rendah. Hal ini bisa dilihat dari rasio KDRT yang tidak mencapai angka 1 digit. Pada Tahun 2012 dan Tahun 2013 angka KDRT di Kota Lhokseumawe bahkan hanya angka nol. Angka KDRT tertinggi terjadi pada Tahun 2014 yaitu pada angka 0,056.

E. Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih Didalam Unit Pelayanan Terpadu

Kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak setiap tahun jumlahnya terus meningkat, yang dilaporkan jauh lebih sedikit dengan kasus yang sebenarnya karena pada umumnya perempuan dan anak korban kekerasan sering merasa ragu maupun takut dalam melaporkan kekerasan yang dialaminya, atau ada kendala lain seperti sulitnya akses dalam mencapai layanan pengaduan dan kurangnya informasi yang dimiliki perempuan dan anak. Adapun Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan dapat dilihat pada table 2.88 berikut:

Tabel 2.88
Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh
Petugas Terlatih di Dalam Unit Pelayanan Terpadu
Kota Lhokseumawe 2012-2016

No	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah Pengaduan yang diselesaikan	12	8	24	19	22
2	Jumlah Pengaduan	12	8	24	19	22
Rasio		100	100	100	100	100

Sumber : DP3ADALDUK & KB Kota Lhokseumawe Tahun 2017.

Rasio penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan di Kota Lhokseumawe sangat baik, hal ini dapat dilihat dari seluruh pengaduan tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi pada Tahun 2014-2016 semuanya dapat diselesaikan.

2.1.4.2.3. Pangan

Kondisi Pelayanan umum Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang pangan dapat dilihat dari beberapa indikator antara lain regulasi ketahanan pangan dan ketersediaan pangan utama

A. Regulasi Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan menurut Undang-Undang Pangan Nomor 7 Tahun 1996 adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan secara cukup, baik dari jumlah maupun mutunya, merata dan terjangkau.

Peningkatan ketahanan pangan merupakan salah satu program utama nasional sejak satu dasawarsa yang lalu. Untuk mewujudkan komitmen tersebut Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan. Kerawanan pangan merupakan masalah multidimensional, yang dapat didefinisikan sebagai suatu kondisi ketidakmampuan untuk memperoleh pangan yang cukup dan sesuai untuk hidup sehat dan beraktifitas dengan baik, baik dalam jangka waktu pendek/ sementara maupun jangka panjang. Ketahanan pangan

sangat erat kaitannya dengan ketahanan sosial, stabilitas ekonomi, stabilitas politik dan keamanan atau ketahanan nasional. Program pemantapan ketahanan pangan merupakan prioritas utama pembangunan, karena pangan merupakan kebutuhan yang paling dasar bagi manusia.

B. Ketersediaan Pangan Utama

Ketersediaan pangan utama dapat dilihat dengan menghitung rasio antara rata-rata ketersediaan pangan utama per tahun (Kg) dengan jumlah penduduk. Berdasarkan data, penduduk Kota Lhokseumawe bergantung pada makanan pokok berupa beras (padi). Selain itu terdapat sejumlah kecil produksi jagung, ubi kayu dan ubi jalar yang diketahui sebagai sumber karbohidrat yang dapat menggantikan peran beras (padi). Sampai saat ini Kota Lhokseumawe tidak memiliki permasalahan ketahanan pangan.

Tabel 2.89
Ketersediaan Pangan Utama
Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2016

Tahun	Rata-rata Jumlah Ketersediaan Pangan Utama per Tahun (Kg)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Ketersediaan Pangan Utama (%)
2012	1.094.644	179.807	608,79%
2013	1.007.025	183.232	549,59%
2014	468.031	187.455	249,68%
2015	843.438	191.407	440,65%
2016	1.008.300	195.186	516,58%

Sumber : Lhokseumawe Dalam Angka 2016.

2.1.4.2.4. Pertanahan

Beberapa indikator dalam mengukur pelaksanaan urusan bidang pertanahan yaitu persentase luas lahan bersertifikat. Adapun persentase luas lahan bersertifikat merupakan proporsi jumlah luas lahan bersertifikat yang terdiri dari HGB, HGU, HM, HPL terhadap luas wilayah daratan. Indikator pertanahan ini bertujuan untuk mengetahui tertib administrasi sebagai kepastian dalam kepemilikan atas tanah dan bangunan.

Hak Guna Usaha (HGU) adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dalam jangka waktu

paling lama 25 tahun. Hak Guna Usaha merupakan hak khusus untuk mengusahakan tanah yang bukan miliknya sendiri guna perusahaan, pertanian, perikanan dan peternakan. Hak Guna Bangunan (HGB) adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan- bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun. Tidak mengenai tanah pertanian, oleh karena itu dapat diberikan atas tanah yang dikuasai langsung oleh negara maupun tanah milik seseorang. Hak Pengelolaan Lahan (HPL) adalah hak untuk mengelola lahan yang hanya diberikan atas tanah negara yang dikuasai oleh Badan Pemerintah, BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Tabel 2.90
Luas Lahan Bersertifikat (KM²)
Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2016

No	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Luas lahan bersertifikat	0.25	0.90	0.65	1.31	1.47
2	Luas Wilayah	181,06	181,06	181,06	181,06	181,06
	Persentase	0.14	0.50	0.36	0.72	0.81

Sumber : Badan Pertanahan Negara Kota Lhokseumawe 2017.

Dari tabel 2.90 di atas dapat dilihat bahwa persentase luas lahan bersertifikat selama lima tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Hal ini terlihat dimana pada 2012 hanya sebesar 0.14 persen, hingga akhir 2016 meningkat menjadi 0.81 persen.

2.1.4.2.5. Lingkungan Hidup

Untuk urusan bidang Lingkungan Hidup, pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenisnya dilakukan melalui beberapa tahapan meliputi pengurangan sampah dengan cara pembatasan timbulan sampah, kemudian penanganan sampah dapat dilakukan dengan cara pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir.

Pemerintah Kota Lhokseumawe melalui Dinas Lingkungan Hidup telah menyediakan sarana dan prasarana guna menangani sampah yang ada di Kota Lhokseumawe. Sarana dan prasarana

pengelolaan persampahan yang dimiliki meliputi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), Tempat Pemrosesan Sementara (TPS), bak sampah menurut jenis sampah (sampah organik, non organik dan sampah basah), Alat pengangkut sampah seperti *dumptruck*, motor gerobak, dan alat angkut petugas pelaksana. Berikut tabel jumlah sampah yang terangkut dan jumlah timbulan sampah dalam wilayah Kota Lhokseumawe tahun 2012 s.d 2016:

Tabel 2.91
Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani (Ton)
Kota Lhokseumawe Tahun 2012- 2016

No	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah Sampah yang Terangkut	200	220	245	305	350
2	Jumlah Timbulan Sampah	449	454	468	478	490
Persentase		44,5	48,5	52,4	63,80	71,40

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Lhokseumawe Tahun 2017.

Dari tabel 2.91 diatas dapat dilihat bahwa sampah yang tertangani di Kota Lhokseumawe sudah mencapai 71.40 persen pada Tahun 2016. Persentase ini jauh meningkat dari tahun-tahun sebelumnya, dimana pada Tahun 2015 sebesar 63.80 persen dan Tahun 2014 hanya sebesar 52.4 persen.

2.1.4.2.6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kondisi Pelayanan umum urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dapat dilihat dari beberapa indikator antara lain rasio penduduk ber KTP, rasio bayi ber akte, penerapan KTP Nasional berbasis NIK dan cakupan penerbitan KTP.

A. Rasio Penduduk Ber KTP Per Satuan Penduduk

Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setiap warga negara yang sudah

berumur 17 tahun atau sudah pernah kawin atau telah kawin wajib memilikinya.

Pada tahun 2019, Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri meluncurkan Program KTP-elektronik atau e-KTP dengan empat kota sebagai proyek percontohan nasional. Adapun keempat kota tersebut adalah Padang, Makasar, Yogyakarta dan Denpasar. Sedangkan kabupaten/kota lainnya secara resmi diluncurkan pada bulan Februari 2011 yang pelaksanaannya dibagi dalam dua tahap. Dengan adanya kewajiban perekaman KTP berbasis Elektronik, Pemerintah Kota Lhokseumawe dapat mengetahui jumlah penduduk usia 17 tahun keatas yang telah melakukan perekaman dan pembuatan KTP. Namun jumlah warga yang membuat KTP di usia 17 tidak terlalu naik begitu pesat dari tahun 2012 sampai dengan 2016, di samping itu jumlah penduduk juga tidak begitu banyak terjadi penambahannya. Berikut Rasio penduduk ber KTP di Kota Lhokseumawe :

Tabel 2.92
Rasio Penduduk ber-KTP per satuan Penduduk
Kota Lhokseumawe Tahun 2012- 2016

No	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah penduduk usia > 17 yang ber KTP	77,819	109,393	112,891	134,855	109,220
2	Jumlah penduduk wajib KTP > 17 atau pernah/sudah menikah	197,780	201,267	204,883	207,906	190,031
	Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk	0.39	0.54	0.55	0.65	0.57

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2017.

Dari tabel 2.92 di atas dapat dijelaskan bahwa selama lima tahun terakhir 2012-2016, rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk tertinggi terjadi pada Tahun 2015 yaitu sebesar 0.65. Sedangkan pada Tahun 2016 rasio ini mengalami penurunan menjadi 0.57.

B. Rasio Bayi Ber Akta Kelahiran

Akte kelahiran adalah bentuk identitas setiap anak yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari hak sipil dan politik warga negara. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 D ayat (1) menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Selain itu Undang-Undang Dasar 1945 juga memberikan jaminan atas status kewarganegaraan sebagaimana diatur dalam 28 D ayat (4) yang menyatakan, “setiap orang berhak atas status kewarganegaraan”.

Setiap anak yg baru lahir perlu memiliki akte kelahiran untuk melindungi haknya sebagai anak. Namun saat ini terlihat bahwa pembuatan akte kelahiran masih minim dikarenakan kurangnya kepedulian dari orangtua anak dalam menguruske dinas terkait. Berikut tabel rasio bayi berkata kelahiran Kota Lhokseumawe dari tahun 2012 sampai dengan 2016:

Tabel 2.93
Rasio Bayi ber Akta Kelahiran
Kota Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016

No	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah Bayi ber Akta Kelahiran	4.178	6.878	5.293	7.014	5.805
2	Jumlah Bayi	-	-	3,902	4,116	4,285
Rasio		-	-	1.36	1.70	1.35

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2017.

Tabel 2.93 diatas menggambar bahwa selama tiga tahun terakhir 2014-2016 rasio bayi ber akta kelahiran sangat fluktuatif. Pada Tahun 2015 rasio bayi ber akta kelahiran sebesar 1.70, sedangkan pada 2014 dan 2016 masing-masing rasionya hanya sebesar 1.36 dan 1.35.

C. Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK

Bahwa dalam rangka mewujudkan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk untuk satu penduduk diperlukan kode keamanan dan rekaman eletronik data kependudukan yang berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK). Pemerintah memberikan Nomor Induk

Kependudukan paling lambat akhir Tahun 2011, hal ini sesuai dengan bunyi pasal 101 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006. Nomor Induk Kependudukan (NIK) adalah Nomor Identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia. Penerapan KTP Nasional berbasis NIK di kota Lhokseumawe telah mulai berlaku setelah pergantian KTP merah putih yaitu pada Tahun 2006. Pada tahun 2012 terjadi pergantian KTP Nasional menjadi KTP elektronik atau e-KTP. Hampir 90 persen penduduk Kota Lhokseumawe telah memiliki dan/ atau telah mengaktifkan e-KTP. Dengan demikian penerapan KTP Nasional berbasis NIK di Kota Lhokseumawe telah berhasil dengan baik.

D. Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Bahwa dalam rangka mewujudkan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk diperlukan kode keamanan dan rekaman elektronik data kependudukan yang berbasis Nomor Induk Kependudukan. Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 101 Undang-undang nomor 23 Tahun 2006. KTP merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh NKRI. KTP wajib dimiliki oleh penduduk yang telah berumur 17 tahun keatas atau telah kawin atau pernah menikah. Masa berlakunya KTP adalah 5 Tahun kecuali penduduk yang berusia 60 tahun ke atas diberi KTP yang berlaku seumur hidup.

Tabel 2.94
Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
Kota Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016

No	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah KTP ber-NIK yang diterbitkan	77,819	109,396	112,891	134,855	109,220
2	Jumlah penduduk wajib KTP	132,541	138,381	140,851	143,112	131,685
	Persentase	58.71	79.05	80.15	94.23	82.94

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2017.

Dari tabel 2.94 diatas dapat dijelaskan bahwa cakupan penerbitan KTP di Kota Lhokseumawe pada Tahun 2016 sebesar

82.94 persen. Persentase ini sedikit menurun dibanding Tahun 2015 yang mencapai 94.23 persen.

2.1.4.2.7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kondisi Pelayanan Umum Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat dilihat dari beberapa indikator antara lain Kelompok Binaan PKK, Posyandu Aktif dan Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa/Gampong yang Baik.

A. Kelompok Binaan PKK

Gerakan PKK bertujuan memberdayakan keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan. Tim Penggerak PKK berperan sebagai motivator, fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak. Pembinaan teknis kepada keluarga dan masyarakat dilaksanakan dalam kerjasama dengan unsur dinas instansi pemerintah terkait.

Organisasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang dalam program kerjanya banyak berkiprah pada peningkatan pemberdayaan kemasyarakatan, kekeluargaan serta peningkatan kualitas perempuan, harus dapat banyak dilibatkan oleh pemerintah sebagai mitra kerja, khususnya dalam peningkatan pembangunan kemasyarakatan dengan pola kerjasama lintas sektoral.

Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kota Lhokseumawe dirasa selama ini telah banyak memainkan perannya di tengah-tengah masyarakat dan aktif dalam berbagai kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah baik bidang pembangunan maupun dalam pembinaan masyarakat. Kelompok Binaan PKK Kota Lhokseumawe Tahun 2014 s.d 2016 untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.95
Kelompok Binaan LPM dan PKK
Kota Lhokseumawe Tahun 2014 s.d 2016

No	Kecamatan	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016		
		Jml PKK	Jml Klmpk Binaan	%	Jml PKK	Jml Klmpk Binaan	%	Jml PKK	Jml Klmpk Binaan	%
1	Banda Sakti	18	2	11,1%	18	2	11,1%	18	3	16,6%
2	Muara Dua	17	2	11,76%	17	2	11,76%	17	12	11,76%
3	Blang Mangat	22	1	4,5%	22	1	4,5%	22	14	4,5%
4	Muara Satu	11	1	9%	11	1	9%	11	2	18%
	Jumlah	68	6	9%	68	6	9%	68	31	46%

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong 2017.

Dari tabel 2.95 di atas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2016 jumlah kelompok binaan PKK sebanyak 31 kelompok atau 46% dari 68 jumlah PKK di Kota Lhokseumawe. Jumlah ini jauh meningkat dibandingkan dua tahun sebelumnya yang hanya membina 6 kelompok yang tersebar di empat kecamatan dalam Wilayah Kota Lhokseumawe.

B. Posyandu Aktif

Posyandu adalah wujud peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan, oleh karena itu keberadaan posyandu dirasa penting di tengah masyarakat. Saat ini kita mengenal lima program prioritas yang dilaksanakan di Posyandu, yaitu program gizi, kesehatan ibu dan anak (KIA), keluarga berencana (KB), imunisasi dan penanggulangan diare. Selain 5 program tersebut kegiatan posyandu dapat dijadikan sarana bagi masyarakat untuk menunjukkan kontribusi yang nyata dalam upaya penurunan angka kematian ibu dan bayi.

Fungsi posyandu sebagai pusat kegiatan masyarakat dalam upaya pelayanan kesehatan dan keluarga berencana yang dikelola dan diselenggarakan untuk dan oleh masyarakat dengan dukungan teknis dari petugas kesehatan sangat dirasakan pengaruhnya di tengah-tengah masyarakat. Sasaran utama kegiatan posyandu ini adalah balita dan orangtuanya, ibu hamil, ibu menyusui dan bayinya, serta wanita usia subur.

Tabel 2.96
Posyandu Aktif
Kota Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016

No	Posyandu	Alamat	Tahun				
			2012	2013	2014	2015	2016
1	Tulip	Teumpok Teungoh	√	√	√	√	√
2	Sedap Malam		√	√	√	√	√
3	Bounghenfil		√	√	√	√	√
4	Matahari	Lancang Garam	√	√	√	√	√
5	Seulanga	Uteun Bayi	√	√	√	√	√
6	Jeumpa		√	√	√	√	√
7	Kembang Melati	Kel Kp. Jawa Lama	√	√	√	√	√
8	Seroja		√	√	√	√	√
9	Kartika		√	√	√	√	√
10	Kamboja 1	Ujong Blang	√	√	√	√	√
11	Ulee Jalan	Ulee Jalan	√	√	√	√	√
12	Kembang Sepatu 1	Hagu Selatan	√	√	√	√	√
13	Humairah		√	√	√	√	√
14	Amal Bakti	Hagu Teungoh	√	√	√	√	√
15	Kamboja 1	Ujong Blang	√	√	√	√	√
16	Mawar	Kp. Jawa Baru	√	√	√	√	√
17	Anggrek	Banda Masen	√	√	√	√	√
18	Permata Bunda	Kuta Blang	√	√	√	√	√
19	Buah Hati Ibu		√	√	√	√	√
20	Bungong Kupula	Hagu Barat Laut	√	√	√	√	√
21	Melati 1	Mon Geudong	√	√	√	√	√
22	Melati 2		√	√	√	√	√
23	Anggrek 1	Simpang IV	√	√	√	√	√
24	Anggrek 2		√	√	√	√	√
25	Jeumpa 1	Keude Aceh	√	√	√	√	√
26	Jeumpa 2		√	√	√	√	√
27	Seulanga 1	Kelurahan Kota	√	√	√	√	√
28	Seulanga 2		√	√	√	√	√
29	Cempaka 1	Pusong Lama	√	√	√	√	√
30	Cempaka 2		√	√	√	√	√
31	Mawar 1	Pusong Baru	√	√	√	√	√
32	Mawar 2		√	√	√	√	√
33	Semangka 1	Alue Awe	√	√	√	√	√
34	Semangka 2		√	√	√	√	√
35	Kiwi	Meunasah Mee	√	√	√	√	√

No	Posyandu	Alamat	Tahun				
			2012	2013	2014	2015	2016
36	Salak I	Uteunkot	√	√	√	√	√
37	Salak II		√	√	√	√	√
38	Anggur	Paloh Batee	√	√	√	√	√
39	Pisang	Cut Mamplam	√	√	√	√	√
40	Manggis I	Mns.	√	√	√	√	√
41	Manggis II	Mesjid	√	√	√	√	√
42	Jeruk	Paya Punteut	√	√	√	√	√
43	Rambutan	Blang Poroh	√	√	√	√	√
44	Sirsak I	Panggoi	√	√	√	√	√
45	Sirsak II		√	√	√	√	√
46	Bengkoang	Lhok Mon Puteh	√	√	√	√	√
47	Melon I	Cot Girek	√	√	√	√	√
48	Melon II		√	√	√	√	√
49	Nangka	Paya Bili	√	√	√	√	√
50	Strowbery I	Mns.	√	√	√	√	√
51	Strowbery II	Manyang	√	√	√	√	√
52	Mangga	Mns. Blang	√	√	√	√	√
53	Jambu	Keude Cunda	√	√	√	√	√
54	Pier I	Blang	√	√	√	√	√
55	Pier II	Crum	√	√	√	√	√
56		Mns. Alue					
57	Sawo	Blang Panyang	√	√	√	√	√
58	Manggis I	Blang Pulo	√	√	√	√	√
59	Manggis II		√	√	√	√	√
60	Langsat I	Blang	√	√	√	√	√
61	Langsat II	Naleung Mameh	√	√	√	√	√
62	Nenas	Dayah Paloh	√	√	√	√	√
63	Delima	Meuria Paloh	√	√	√	√	√
64	Timun	Paloh Puntti	√	√	√	√	√
65	Apel	Cot Trieng	√	√	√	√	√
66	Cempedak	Padang Sakti	√	√	√	√	√
67	Durian I	Batuphat	√	√	√	√	√
68	Durian II	Timur	√	√	√	√	√
69	Cermai 1	Batuphat	√	√	√	√	√
70	Cermai 2	Barat	√	√	√	√	√

No	Posyandu	Alamat	Tahun				
			2012	2013	2014	2015	2016
71	Duku	Ujong Pacu	√	√	√	√	√
72	Meunasah	Mesjid Punteut	√	√	√	√	√
73	Bukit Rata		√	√	√	√	√
74	Politeknik		√	√	√	√	√
75	Mon Tujoh		√	√	√	√	√
76	Mekarsari	Asan Kareung	√	√	√	√	√
77	Merak	Blang Punteut	√	√	√	√	√
78	Beo	Keude Punteut	√	√	√	√	√
79	Nuri	Kumbang Punteut	√	√	√	√	√
80	Merpati	Rayeuk Kareung	√	√	√	√	√
81	Melati	Mane Kareung	√	√	√	√	√
82	Pos Ujung Bale	Jeulikat	√	√	√	√	√
83	Ujung Mesjid		√	√	√	√	√
84	Keumala		√	√	√	√	√
85	Alue Liem A	Alue Liem	√	√	√	√	√
86	Alue Liem B		√	√	√	√	√
87	Anggrek 1	Blang Buloh	√	√	√	√	√
88	Anggrek 2		√	√	√	√	√
89	Ababil	Blang Weu Panjoe	√	√	√	√	√
90	Cendrawasih	Blang Weu Baroh	√	√	√	√	√
91	Elang	Seuneubok	√	√	√	√	√
92	Cut Nyak Dien	Tunong	√	√	√	√	√
93	Cut Nyak Meutia	Jambo Mesjid	√	√	√	√	√
94	Po Cut Baren	Jambo Timu	√	√	√	√	√
95	Putroe Nahrisyah	Blang Cut	√	√	√	√	√
96	Ratu Safiatuddin	Kuala	√	√	√	√	√
97	Malahayati	Baloy	√	√	√	√	√
98	Putroe Phang	Teungoh	√	√	√	√	√
99	Putroe Keumala Sari	Blang Teu	√	√	√	√	√
100	Putroe Neng	Ulee Blang Mane	√	√	√	√	√

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong 2017.

Dari tabel 2.96 di atas dapat dilihat bahwa jumlah posyandu di Kota Lhokseumawe saat ini telah berjumlah 100 unit. Seluruh posyandu tersebut tersebar di empat kecamatan. Kecamatan Banda Sakti merupakan kecamatan yang memiliki jumlah posyandu aktif dan paling tinggi karena diikuti dengan jumlah penduduk Kecamatan Banda Sakti yang paling banyak.

C. Cakupan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa/Gampong yang Baik

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Antara sarana dan prasarana tidak terlalu jauh berbeda, karena keduanya saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan.

Tabel 2.97
Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa Kota Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016

No	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah kantor dalam kondisi baik	3	3	3	3	3
3	Jumlah kantor dalam kondisi rusak	53	53	53	53	53
2	Jumlah desa yang belum memiliki kantor	12	12	12	12	12
Jumlah		68	68	68	68	68

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong, 2017.

Saat ini, terdapat 56 desa/gampong di Kota Lhokseumawe telah memiliki sarana perkantoran, sementara itu 12 desa/gampong belum memiliki kantor. Dalam kurun waktu tahun 2012 sampai dengan 2016 tidak ada pembiayaan pembangunan gedung kantor desa yang baru. Namun untuk perbaikan serta pemeliharaan gedung kantor Keuchik menggunakan dana ADG.

2.1.4.2.8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kondisi Pelayanan umum Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dapat dilihat dari beberapa indikator antara lain rata-rata jumlah anak, rasio akseptor KB, cakupan peserta KB aktif, keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I

A. Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga

Gerakan KB Nasional selama ini telah berhasil mendorong peningkatan peran serta masyarakat dalam membangun keluarga kecil yang makin mandiri. Keberhasilan ini mutlak harus diperhatikan bahkan terus ditingkatkan karena pencapaian tersebut belum merata. Makin tinggi pertumbuhan penduduk semakin mempersulit usaha peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Semakin tinggi pertumbuhan penduduk semakin besar usaha yang dilakukan untuk mempertahankan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu Pemerintah terus berupaya untuk menekan laju pertumbuhan penduduk dengan Program Keluarga Berencana. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.98
Rata-Rata Jumlah anak Per Keluarga
Kota Lhokseumawe Tahun 2015 s.d 2016

No	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah anak	63.014	63.390	67.595	67,654	72.255
2	Jumlah Keluarga	37.857	38.236	39.819	41.414	44.165
	Rata-Rata jumlah anak per Keluarga	1,66	1,65	1,55	1,63	1,64

Sumber: DP3ADALDUK & KB Kota Lhokseumawe Tahun 2017.

Berdasarkan data tabel 2.98 diatas terlihat bahwa jumlah anak per keluarga di Kota Lhokseumawe hanya 2 orang per keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa program KB Nasional di kota Lhokseumawe telah berhasil mendorong peningkatan peran serta masyarakat dalam membangun keluarga kecil yang mandiri.

B. Rasio Akseptor KB

Akseptor KB adalah anggota masyarakat yang mengikuti gerakan KB dengan melaksanakan penggunaan alat kontrasepsi. Akseptor KB lebih disarankan untuk Pasangan Usia Subur (PUS) dengan menggunakan alat kontrasepsi. Karena pada pasangan usia subur inilah yang lebih berpeluang besar untuk menghasilkan keturunan dan dapat meningkatkan angka kelahiran.

Rasio akseptor KB adalah jumlah akseptor KB dalam periode 1 (satu) tahun per 1000 pasangan usia subur pada tahun yang sama. Besarnya angka partisipasi KB (*akseptor*) menunjukkan adanya pengendalian jumlah penduduk. Rasio akseptor KB sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 2.99
Rasio Akseptor KB
Kota Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016

No	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah Akseptor KB	22.126	20.305	19.925	21.715	24.125
2	Jumlah Pasangan Usia Subur	27.487	25.954	26.709	29.615	29.676
Rasio Aseptor KB		80,49	78,23	74,60	73,32	81,29

Sumber : Dinas PP, PA, PP dan KB Kota Lhokseumawe Tahun 2017

Berdasarkan tabel 2.99 diatas dapat dilihat bahwa rasio akseptor KB di Kota Lhokseumawe cukup baik walaupun mengalami penurunan pada tahun 2013, tahun 2014 dan tahun 2015, yaitu dari 80,49% pada tahun 2012 menjadi 78,23% pada tahun 2013 dan menjadi 74,60% pada tahun 2014 serta menjadi 73,32% pada tahun 2015. Selanjutnya mengalami peningkatan yang besar pada tahun 2016 dengan rasio aseptor KB sebesar 81,29%. Hal ini menunjukkan bahwa program KB Nasional di kota Lhokseumawe sudah berhasil di terapkan namun pencapaiannya belum merata.

C. Cakupan Peserta KB Aktif

Peserta KB aktif adalah Pasangan Usia Subur yang pada saat ini masih menggunakan salah satu cara/alat kontrasepsi.

Cakupan peserta KB aktif adalah perbandingan antara jumlah peserta KB aktif dengan Pasangan Usia Subur. Cakupan peserta KB aktif menunjukkan tingkat pemanfaatan kontrasepsi di antara Pasangan Usia Subur. Sedangkan persentase peserta KB aktif terhadap PUS di Kota Lhokseumawe, sebagaimana dapat dilihat dalam tabel 2.100 berikut ini:

Tabel 2.100
Cakupan Peserta KB aktif
Kota Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016

No	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah peserta KB aktif	22.126	24.508	19.925	21.715	24.125
2	Jumlah Pasangan Usia Subur	27.487	27.527	26.709	29.615	29.676
	Cakupan peserta KB Aktif	80,49	78,23	74,60	73,32	81,29

Sumber: Dinas PP, PA, PP dan KB Kota Lhokseumawe, 2017.

Persentase peserta KB aktif terhadap PUS tertinggi pada tahun 2016 sebanyak 81,29 %, pada tahun 2012 cakupan peserta KB aktif sebesar 80, 49% namun cakupan peserta aktif kota Lhokseumawe mengalami penurunan pada tahun 2013, tahun 2014 dan tahun 2015 masing-masing sebesar 78,23% menjadi 74,60% dan 73,32% di tahun 2015.

D. Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I

Keluarga Pra Sejahtera adalah keluarga-keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, seperti kebutuhan akan pengajaran agama, pangan, sandang, papan dan kesehatan. Selanjutnya, Keluarga Sejahtera I adalah keluarga tersebut sudah dapat memenuhi kebutuhan yang sangat mendasar, tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi. Jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada tabel 2.101 berikut ini:

Tabel 2.101
Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I
Kota Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2014

No	Uraian	Tahun		
		2012	2013	2014
1	Jumlah Keluarga Pra Sejahtera	5.922	6.509	6.454
2	Jumlah Keluarga Keluarga Sejahtera I	8.785	9.776	10.203
3	Jumlah Keluarga	37.857	38.236	39.819
Rasio		38,84	42,59	41,83

Sumber: DP3ADALDUK & KB Kota Lhokseumawe Tahun 2017.

Rasio Keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I terhadap jumlah keluarga di Kota Lhokseumawe di tahun 2012 sebesar 38,84% dan mengalami kenaikan pada tahun 2013 menjadi 42,59% serta mengalami penurunan di tahun 2014 menjadi 41,83%. Sementara itu, tahun 2015 dan 2016 belum dilakukan pendataan keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I.

2.1.4.2.9. Perhubungan

Kondisi Pelayanan umum Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang perhubungan dapat dilihat dari beberapa indikator antara lain jumlah arus penumpang angkuta umum, rasio izin trayek, jumlah uji KIR, jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bis, kepemilikan KIR, lama pengujian KIR dan pemasangan rambu-rambu.

A. Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum

Arus transportasi Kota Lhokseumawe didominasi oleh armada Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) dan Angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP). Adapun jumlah penumpang yang naik atau turun di terminal Kota Lhokseumawe tidak mengalami kenaikan dan penurunan yang signifikan. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 2.102 berikut ini,

Tabel 2.102
Jumlah Kendaraan dan Arus Penumpang Angkutan Umum
Kota Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016

Tahun	Unit Kendaraan	Jumlah Penumpang	
		Naik	Turun
2012	36,435	144,573	162,941
2013	37,614	148,733	163,541
2014	34,174	147,683	152,538
2015	33,188	146,936	150,395
2016	33,200	146,946	152,221

Sumber: Dinas Perhubungan, 2017.

B. Rasio Izin Trayek

Izin Trayek adalah izin untuk mengangkut orang dengan mobil bus dan/atau mobil penumpang umum pada sebuah jalur transportasi. Sedangkan jaringan trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang. Di Kota Lhokseumawe rasio ijin trayek terus mengalami peningkatan dari 0.005 pada tahun 2015 menjadi 0.009 pada Tahun 2016, hal ini terindikasi bahwa pengusaha transportasi terus bertambah di Kota Lhokseumawe. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 2.103 berikut ini,

Tabel 2.103
Rasio Ijin Trayek
Kota Lhokseumawe Tahun 2014 s.d 2016

No	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah Izin Trayek	832	846	853	895	1.745
2	Jumlah penduduk	179,807	183,232	187,455	191,407	195.186
	Rasio Izin Trayek	0.005	0.005	0.005	0.005	0.009

Sumber: Dinas Perhubungan, 2017.

C. Jumlah Uji KIR Angkutan Umum

Uji kir angkutan umum merupakan pengujian setiap angkutan umum yang diimpor, baik yang dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di jalan agar memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan. Pengujian dimaksud meliputi:

- a. Uji tipe yaitu pengujian fisik untuk pemenuhan persyaratan teknis dan layak jalan yang dilakukan terhadap landasan kendaraan bermotor dan kendaraan bermotor dalam keadaan

lengkap dan penelitian rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor yang dilakukan terhadap rumah-rumah, bak muatan, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan bermotor yang dimodifikasi tipenya.

- b. Uji berkala yaitu diwajibkan untuk mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan, meliputi pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan bermotor dan pengesahan hasil uji.

Uji Kir Angkutan Umum Kota Lhokseumawe terlihat bahwa jumlah angkutan yang di uji kir sangat stabil. Untuk lebih jelas dapat dilihat tabel 2.104 berikut;

Tabel 2.104
Uji Kir Angkutan Umum
Kota Lhokseumawe Tahun 2014 s.d 2016

No	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah Kendaraan	1175	2002	2242	2490	2639
2	Kendaraan Yg Diuji	2804	2783	2577	2795	2107
Rasio		2.39	1.39	1.15	1.12	0.80

Sumber: Dinas Perhubungan, 2017.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa rasio uji kendaraan di Kota Lhokseumawe sebesar 0.8 dengan jumlah kendaraan yang diuji pada Tahun 2016 berjumlah 2107 unit. Rasio ini lebih kecil dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, dimana rasio pengujian kendaraan bermotor pada Tahun 2015 sebesar 1.12; bahkan Tahun 2012 rasionya mencapai 2.39 dan merupakan rasio tertinggi selama periode 2012-2016.

D. Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis

Kota Lhokseumawe hanya memiliki Terminal Bis Prasarana Transportasi bagi penduduk Kota Lhokseumawe dikarenakan belum adanya Pelabuhan Udara dan Laut sebagai prasarana transportasi masyarakat Kota Lhokseumawe. Hingga saat ini masyarakat Kota Lhokseumawe menggunakan pelabuhan laut dan udara milik Kabupaten Aceh Utara yang lokasinya berada di sekitar wilayah Kota Lhokseumawe. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 2.105 berikut ini:

Tabel 2.105
Jumlah Pelabuhan Udara, Laut dan Terminal Bis Kota
Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	Pelabuhan Udara	-	-	-	-	-
2	Pelabuhan Laut	-	-	-	-	-
3	Terminal Bis/Barang	3	3	3	3	3

Sumber: Dinas Perhubungan, 2017.

E. Kepemilikan KIR Angkutan Umum

Persentase kepemilikan KIR bagi setiap kendaraan yang ada di Kota Lhokseumawe belum cukup baik dimana hampir setengah dari kendaraan yang ada di Kota Lokseumawe belum memiliki Kir atau tidak melakukan uji kir. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 2.106 berikut ini:

Tabel 2.106
Kepemilikan KIR Angkutan Umum
Kota Lhokseumawe Tahun 2014 s.d 2016

No	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Angkutan Umum yang memiliki KIR	2804	2783	2577	2795	2107
2	Jumlah Angkutan Umum	1175	2002	2242	2490	2639
	Persentase	239	139	115	112	80

Sumber: Dinas Perhubungan, 2017.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa persentase kepemilikan KIR angkutan umum di Kota Lhokseumawe sebesar 80 persen. Dibandingkan dengan Tahun 2015 persentase ini turun dimana pada Tahun 2015 persentase kepemilikan KIR angkutan umum mencapai 112 persen.

F. Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (KIR)

Pengujian kelayakan angkutan umum di Kota Lhokseumawe dilakukan oleh Tim dari Dinas Perhubungan. Pengujian KIR tersebut dilakukan oleh petugas yang berwenang dalam melakukan pengujian kelayakan angkutan umum meliputi pengecekan administrasi dan kelayakan kendaraan, oleh karena itu proses berlangsungnya pengujian tersebut hanya membutuhkan waktu kurang lebih 20 menit saja. Adapun

Pengujian kelayakan Angkutan umum di Kota Lhokseumawe dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali.

Tabel 2.107
Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (KIR)
Kota Lhokseumawe Tahun 2014 s.d 2016

No	Uraian	Tahun		
		2014	2015	2016
1	Periode Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (KIR)	6 Bulan	6 Bulan	6 Bulan
2	Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (KIR)	20 menit	20 menit	20 menit

Sumber: Dinas Perhubungan, 2017.

G. Pemasangan Rambu-Rambu

Rambu-rambu merupakan hal yang penting bagi kelancaran lalu lintas ataupun untuk mengetahui tempat/lokasi yang ingin dicari oleh para pendatang/wisatawan ketika berkunjung disuatu Kota/Kabupaten. Oleh karena itu rambu-rambu merupakan sebuah petunjuk maupun peringatan bagi setiap orang. Di Kota Lhokseumawe jumlah rambu-rambu belum tersedia dengan maksimal dimana dari jumlah rambu-rambu yang harusnya tersedia di seluruh elemen Kota Lhokseumawe. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 2.108 berikut ini;

Tabel 2.108
Pemasangan Rambu-rambu
Kota Lhokseumawe Tahun 2014 s.d 2016

No	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah Pemasangan rambu-rambu	44	47	119	83	78
2	Jumlah rambu-rambu yang seharusnya tersedia	250	200	250	300	212
Persentase		17.6	23.5	47.6	27.7	36.8

Sumber: Dinas Perhubungan, 2017.

Dari keseluruhan jumlah rambu-rambu yang seharusnya tersedia di Kota Lhokseumawe hanya 36.8 persen saja yang sudah tersedia pada Tahun 2016 yaitu sebanyak 78 rambu dari 212 rambu yang dibutuhkan. Tentunya ini harus menjadi perhatian

pada instansi terkait dalam rangka pemenuhan rambu-rambu yang dibutuhkan.

2.1.4.2.10. Komunikasi dan Informatika

Kondisi Pelayanan umum Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang Komunikasi dan Informatika dapat dilihat dari beberapa indikator antara lain rasio warnet, website milik pemerintah daerah dan pameran/expo.

A. Rasio Warnet Terhadap Penduduk

Teknologi informasi saat ini mulai berkembang dengan pesat sehingga mempermudah setiap orang untuk memperoleh informasi atau memperluas relasi tanpa harus terbatas oleh waktu dan tempat. Salah satu cara untuk memperoleh informasi atau memperluas relasi saat ini adalah jasa dibidang internet.

Tabel 2.109
Rasio Warnet Terhadap Penduduk
Kota Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016

No	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah Warnet	-	-	70	76	74
2	Jumlah Penduduk	179.807	183.232	187.455	191.407	195.186
Rasio				37,34	39,7	37,91

Sumber: Lhokseumawe dalam angka, 2017.

Tabel 2.109 diatas dapat dilihat bahwa rasio warnet terhadap penduduk Kota Lhokseumawe pada tahun 2014 rasionya 37,34 sedangkan tahun 2015 rasionya sebesar 39,7 dan tahun 2016 sebesar 37,91 dengan perhitungan rasio perseribu jumlah penduduk.

B. Website Milik Pemerintah Daerah

Website milik Pemerintah Daerah sangat bermanfaat bagi publik agar publik dapat dengan mudah mengakses data maupun informasi mengenai pemerintahan. Begitu juga sebaliknya, bagi pemerintah sendiri website dapat menjadi sebuah instrumen dalam mewujudkan transparansi publik. Saat ini seluruh SKPD Kota Lhokseumawe telah memiliki website.

C. Pameran / Expo

Pameran/Expo bagi masyarakat sangat berguna karena merupakan event dimana publik dapat melihat informasi maupun perencanaan-perencanaan kedepan yang akan dilakukan bahkan dapat melihat berbagai produk-produk terbaru. Substansi pameran itu sendiri tergantung pada tema di saat melakukan pameran. Tema pameran dapat berbagai macam sehingga masyarakat sangat mendapatkan keuntungan dari dilakukannya sebuah pameran. Kota Lhokseumawe sendiri untuk tahun 2012 telah melakukan sebanyak 2 (dua) macam pameran meliputi pameran pembangunan dan pameran pendidikan.

2.1.4.2.11. Koperasi dan Usaha Kecil & Menengah

Kondisi Pelayanan umum Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang koperasi dan usaha kecil menengah dapat dilihat dari beberapa indikator antara lain persentase koperasi aktif dan jumlah BPR/LKM

A. Persentase Koperasi Aktif

Jumlah Koperasi di Kota Lhokseumawe dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan. Hal ini mengindikasikan bahwa koperasi Kota Lhokseumawe masih belum beraktifitas seperti yang diharapkan. Untuk lebih jelas dapat dilihat tabel 2.110 berikut ini:

Tabel 2.110
Persentase Koperasi Aktif
Kota Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016

No	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah Koperasi Aktif	187	133	108	120	100
2	Jumlah Koperasi	289	291	294	299	257
	Persentase	64,71	45,70	36,73	40,13	38,91

Sumber: Disperindagkop, 2017.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2016 persentase koperasi aktif di Kota Lhokseumawe hanya sebesar 38.91 persen atau hanya 100 koperasi yang aktif dari total keseluruhan 257 koperasi. Penurunan ini juga diikuti dengan penurunan jumlah koperasi dari tahun-tahun sebelumnya.

B. Jumlah BPR / LKM

Jumlah Usaha Kecil Menengah non BPR/LKM di Kota Lhokseumawe yang tersebar di 4 Kecamatan terus terjadi penambahan. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah UKM Non BPR/LKM di Kota Lhokseumawe terus meningkat. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 2.111 berikut ini;

Tabel 2.111
Jumlah BPR/LKM
Kota Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016

No	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah Seluruh UKM	1020	1100	1200	1318	2314
2	Jumlah BPR/LKM	4	4	4	4	4

Sumber: Disperindagkop, 2017.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2016 jumlah Usaha Kecil Menengah mencapai 2314 UKM, terjadi peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan jumlah Bank Perkreditan Rakyat (BPR)/Lembaga Keuangan Mikro (LKM) pada Tahun 2012 sebanyak 4 BPR dan tidak terjadi penambahan sampai dengan Tahun 2016.

2.1.4.2.12. Penanaman Modal

Kondisi Pelayanan umum Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang penanaman modal dapat dilihat dari beberapa indikator antara lain jumlah investor berskala nasional, jumlah investasi berskala nasional dan rasio daya serap tenaga kerja.

A. Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)

PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Sedangkan PMA (Penanaman Modal Asing) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

Tabel 2.112
Jumlah Investor PMDN/PMA
Kota Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016

No	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah Investor	NA	16	26	154	305

Sumber: DPMTSPNAKER, 2017.

Pada tahun 2012 jumlah investor untuk PMDN tidak ada sedangkan pada tahun 2013 s/d 2016 jumlah investor penanam modal dalam negeri di Lhokseumawe semakin meningkat dalam kurun waktu 4 tahun. Jumlah seluruh investor pada PMDN tahun 2016 mencapai 305 investor dan khususnya untuk PMA (penanaman modal asing) tidak ada sama sekali investor.

B. Jumlah Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Jumlah investasi pada Kota Lhokseumawe terus mengalami peningkatan selama kurun waktu 4 tahun di Kota Lhokseumawe. Angka tertinggi mencapai Rp.3.386.437.000.000 pada tahun 2016. Berikut tabel Jumlah Investasi Bersekala Nasional (PMDN/PMA)

Tabel 2.113
Jumlah Investasi PMDN/PMA
Kota Lhokseumawe Tahun 2013 s.d 2016

Tahun	URAIAN	PMDN (Rp)	PMA (Rp)	Total (Rp)
2013	Jumlah Investasi	167.799.000.000	-	
2014	Jumlah Investasi	862.948.000.000	-	
2015	Jumlah Investasi	2.237.000.000.000	-	
2016	Jumlah Investasi	3.386.437.213.079	-	

Sumber: DPMTSPNAKER, 2017.

C. Rasio Daya Serap Tenaga Kerja

Jumlah tenaga kerja yang bekerja pada PMDN/PMA setiap tahunnya semakin meningkat dengan jumlah PMDN/PMA yang juga meningkat setiap tahunnya.

Tabel 2.114
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja
Kota Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016

No	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah Tenaga Kerja yang Bekerja pada PMA/PMDN	60	75	98	125	140
2	Jumlah seluruh PMA/PMDN	10	15	18	19	27
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja		6,00	5,44	5	6,57	5,18

Sumber: DPMTSPNAKER, 2017.

2.1.4.2.13. Kepemudaan dan Olahraga

Kondisi Pelayanan umum Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang kepemudaan dan olahraga dapat dilihat dari beberapa indikator antara lain persentase organisasi pemuda yang aktif, cakupan pembinaan olahraga dan cakupan pelatih yang bersertifikat.

A. Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif

Pemuda merupakan aset potensial yang dapat meneruskan cita-cita bangsa. Pemuda merupakan kader pemimpin bangsa. Pada era globalisasi, kegagalan dalam menyiapkan pemuda yang berkualitas dapat menyebabkan suatu negara mengalami kemunduran dan tidak mampu bersaing dengan negara lain. Organisasi pemuda di Kota Lhokseumawe hingga tahun 2016 berjumlah 60 namun yang aktif berjumlah 50 yang tergabung dalam wadah Karang Taruna Gampong. Berikut data Organisasi Pemuda Yang Aktif Kota Lhokseumawe:

Tabel 2.115
Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif
Kota Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016

No	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah organisasi pemuda yang aktif	32	36	38	42	50
2	Jumlah seluruh organisasi pemuda	44	48	50	53	60
Persentase		72	75	76	79	83

Sumber: Disporapar, 2017.

B. Cakupan Pembinaan Olahraga

Kegiatan olahraga memiliki tujuan yang bermacam-macam, seperti meningkatkan kesehatan atau membina prestasi untuk meraih suatu kejuaraan. Kegiatan organisasi olahraga dapat terdiri atas organisasi olahraga di masyarakat dan organisasi olahraga di sekolah.

Pembinaan dan pengembangan olahraga beturjuan tersebut diarahkan untuk memotivasi dan memfasilitasi masyarakat gemar berolahraga serta menyediakan sarana dan prasarana olahraga yang representatif guna mendukung pembinaan dan pengembangan olahraga yang meliputi pembinaan olahraga tradisional, olahraga pendidikan/pelajar/santri, olahraga rekreasi, olahraga pengandang cacat dan olahraga prestasi. Kegiatan olahraga memiliki tujuan yang bermacam-macam, seperti meningkatkan kesehatan atau membina prestasi untuk meraih suatu kejuaraan. Kegiatan organisasi olahraga dapat terdiri atas organisasi olahraga di masyarakat dan organisasi olahraga di sekolah. Berikut data Cakupan Pembinaan Olahraga Kota Lhokseumawe:

Tabel 2.116
Cakupan Pembinaan Olahraga
Kota Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016

No	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah cabang olahraga yang dibina	2	2	4	4	5
2	Jumlah seluruh cabang olahraga yang terdaftar	34	38	38	38	39
Persentase		5,88	5,26	10,53	10,53	12,82

Sumber: Disporapar, 2017.

Dari tabel 2.116 di atas dapat dilihat bahwa cakupan pembinaan cabang olahraga di Kota Lhokseumawe pada Tahun 2016 sebesar 12.82 persen dari total cabang olahraga yang ada di Kota Lhokseumawe. Secara kuantitas jumlah cabang olahraga yang dibina di Kota Lhokseumawe mengalami peningkatan sejak Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2016.

C. Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi

Penguatan kapasitas pelatih yang berkompeten atau bersertifikat menjadi indikator penting dalam hal pembinaan olahraga. Kota Lhokseumawe memiliki 32 pelatih yang bersertifikat, sedangkan jumlah seluruh pelatih yang ada hingga tahun 2016 adalah 146. Berikut tabel 2.117 cakupan pelatih yang bersertifikasi:

Tabel 2.117
Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi
Kota Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016

No	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah pelatih bersertifikat	28	28	32	32	32
2	Jumlah seluruh pelatih	124	124	132	132	146
Persentase		22,58	22,58	24,24	24,24	21,92

Sumber: Disporapar, 2017.

2.1.4.2.14. Statistik

Kondisi Pelayanan umum Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang statistik dapat dilihat dari beberapa indikator antara lain buku “Kabupaten/Kota dalam angka” dan buku “PDRB Kabupaten/Kota”.

A. Buku “Kabupaten/Kota Dalam Angka”

Buku Lhokseumawe Dalam Angka yang diterbitkan pada setiap tahun merupakan hasil kerjasama antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Lhokseumawe dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Lhokseumawe. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan Kepres RI Nomor 86 Tahun 1998 tentang BPS Bab V Pasal 26 Ayat (2), bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan data statistik regional bagi Pemerintah Daerah, penyediaan dana dan fasilitasnya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setempat.

Publikasi Lhokseumawe Dalam Angka setiap tahunnya disusun untuk memenuhi kebutuhan data dan media informasi tentang perkembangan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah bersama masyarakat. Tersedianya data yang akurat

menjadi instrument penting dalam mendukung suksesnya pelaksanaan pembangunan dan mengevaluasi hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan.

B. Buku “PDRB Kabupaten/Kota”

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik Atas Dasar Harga Berlaku maupun Atas Dasar Harga Konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

Buku Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Lhokseumawe yang juga merupakan kerjasama antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Lhokseumawe dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Lhokseumawe sudah tersedia setiap tahun guna memberikan gambaran mengenai struktur ekonomi Kota Lhokseumawe baik ekonomi secara keseluruhan maupun masing-masing sektor.

2.1.4.2.15. Kebudayaan

Kondisi Pelayanan umum Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang kebudayaan dapat dilihat dari beberapa indikator antara lain penyelenggaraan festival seni dan budaya serta benda situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan.

A. Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya

Festival seni dan budaya ini merupakan salah satu upaya untuk melestarikan dan mengembangkan sekaligus untuk memperkenalkan atau mensosialisasikan kesenian tradisional. Disamping itu penyelenggaraan festival seni dan budaya, selain menjadi media hiburan diharapkan juga menjadi ajang peningkatan kualitas karya seni melalui kreatifitas dan aktifitas seniman yang ada di Kota Lhokseumawe. Festival ini juga bisa memberikan nilai positif bagi perkembangan dunia kepariwisataan di Kota Lhokseumawe, oleh karena itu diharapkan penyelenggara dapat mengembangkan kreatifitasnya.

Penyelenggaraan festival seni dan budaya dari waktu ke waktu akan semakin atraktif dan bisa menarik wisatawan untuk menikmatinya. Saat ini Kota Lhokseumawe memiliki 200 jumlah group kesenian yang menjadi wadah berlangsungnya kegiatan kesenian. Hal ini menggambarkan bahwa Aceh memiliki khasanah budaya yang tinggi dengan berbagai jenis kesenian seperti tarian yang dapat memikat wisata baik dari lokal maupun dari mancanegara seperti tarian; (Rapai, Rapai Debus, Rapai Geleng, Seureune Kalee, Seudati, Saman, Ranup Lampuan, Pemulia Jamee, Marhaban, Didong, Rebana dan Qasidah Gambus), sastra (pantun, syair, hikayat, seumapa) dan seni lukis (kaligrafi) serta Dalail Khairat dan Meurukon. Adapun jenis alat musik Budaya Aceh diantara; Arab, Bangsi Alas, Serune Kale, Rapai Geundrang, Tambo, Takatok Trieng, Beareguh, Canang dan Celempong.

Berbagai jenis kesenian tersebut mengandung nilai-nilai islami, bersifat demokratis yang mencerminkan kehidupan masyarakat sehari-hari, misalnya jenis tarian dilakukan secara berkelompok sebagai simbol dari keanekaragaman masyarakat Aceh, dinamis iringannya yang disertai lagu dan pantun yang mengandung nasehat yang baik bagi kehidupan masyarakat. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 2.118 berikut ini,

Tabel 2.118
Penyelenggara Festival Seni Budaya Kota Lhokseumawe

No	Kegiatan
1	Pekan Kebudayaan Aceh (PKA)
2	Pengirim Tim Kesenian Ke LN
3	Anugerah Budaya
4	Audisi Paduan Suara GBN
5	Festival dan Lomba Karya Seni
6	Festival Permainan Rakyat
7	Hari Kesenian Daerah
8	Festival Rapai Uroeh
9	Festival Seudati
10	Festival Cut Bang Cut Kak
11	Festival Lomba Seni Lukis
12	Festival Lomba Lagu Qasidah
13	Festival Seni Budaya Islami
14	Festival Lomba Syiar Budaya Islam
15	Festival Seni Budaya Antar Sekolah
16	Audisi Penyanyi Cilik
17	Pelatihan Pengembangan Kesenian
Total	

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2017.

Dari tabel diatas dapat tergambarkan bahwa dalam wilayah Kota Lhokseumawe terdapat 17 jenis kegiatan seni budaya tarian Aceh dalam penyelenggaraan festival seni budaya yang dilaksanakan untuk tiap tahunnya.

B. Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan

Cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Untuk melestarikan cagar budaya, negara bertanggung jawab dalam pengaturan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya, bahwa cagar budaya berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan perlu dikelola oleh pemerintah dan pemerintah daerah dengan meningkatkan peran serta masyarakat untuk melindungi, mengembangkan, dan

memanfaatkan cagar budaya. Dengan adanya perubahan paradigma pelestarian cagar budaya, diperlukan keseimbangan aspek ideologis, akademis, ekologis, dan ekonomis guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 2.119 berikut ini:

Tabel 2.119
Situs/ Bangunan Cagar Budaya Kota Lhokseumawe

No	Lokasi	Makam	Tugu	Monumen/ Museum	Benteng	Tempat Bersejarah	Jlh
1	Kec. Banda Sakti	1 Tgk. Lsm 2 Tgk. Chik Ditunong			1 Kurok-Kurok	1 Meriam Belanda 2 Tiang Gantung Tgk. Chik Ditunong	5
2	Kec. Muara Dua	1 Tgk. Chik Buket Krueng	1 Pahlawan TKR	1 P. Ramli		1 Mon Tujuh	4
3	Kec. Blang Mangat	1 Tgk. Abdul Jalil	1 Tgk. Abdul Jalil				2
4	Kec. Muara Satu	1 Taufik saleh 2 Putroe Neng 3 Tgl. Siah Hudam 4 Tgk. Chik Dipaloh 5 Tgk. Jeurat Meuindram				1 Gua Jepang	6
Jumlah		9	2	1	1	4	17

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2017.

Dari tabel di atas menggambarkan bahwa Kota Lhokseumawe memiliki situs/bangunan cagar budaya untuk makam terdapat sebanyak 9 (sembilan), tugu sebanyak 2 (dua), benteng sebanyak 1 (satu) unit dan tempat bersejarah sebanyak 4 (empat), jadi jumlah situs/ bangunan cagar budaya Kota Lhokseumawe seluruhnya berjumlah 17 (tujuh belas) unit.

2.1.4.2.16. Perpustakaan

Kondisi Pelayanan umum Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang perpustakaan dapat dilihat dari beberapa indikator antara lain jumlah perpustakaan, jumlah pengunjung perpustakaan dan koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah.

A. Jumlah Perpustakaan

Perpustakaan dapat dirumuskan sebagai suatu unit kerja dari sebuah lembaga pendidikan yang berupa tempat penyimpanan koleksi buku-buku pustaka untuk menunjang proses pendidikan. Hingga saat ini, terdapat 5 jenis perpustakaan

di Kota Lhokseumawe. Rincian data jumlah gedung perpustakaan di Kota Lhokseumawe dapat dilihat dalam tabel 2.120 berikut Ini:

Tabel 2.120
Rasio Perpustakaan Per Satuan Penduduk
Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2016

No	Nama Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Perpustakaan Umum	1	1	1	1	1
2	Perpustakaan Perguruan Tinggi	2	2	2	2	2
3	Perpustakaan Sekolah	26	26	26	26	26
4	Perpustakaan Rumah Ibadah	9	9	9	9	9
5	Perpustakaan Pesantren	2	2	2	2	2
	Jumlah Perpustakaan	40	40	40	40	40
	Jumlah Penduduk	179,807	183,232	187,455	191,407	195,186
	Rasio	0.22	0.22	0.21	0.21	0.20

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2017.

Tabel di atas menjelaskan bahwa sejak Tahun 2012-2016 jumlah perpustakaan di Kota Lhokseumawe terdapat 40 perpustakaan. Seiring dengan penambahan jumlah penduduk, rasio perpustakaan terhadap satuan penduduk mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Pada Tahun 2016 rasio sebesar 0.20 lebih kecil dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 0.21.

B. Jumlah Pengunjung Perpustakaan

Berdasarkan data dari periode 2012 hingga 2016 jumlah pengunjung perpustakaan setiap tahunnya mengalami peningkatan jumlah pengunjung. Jumlah kunjungan ke perpustakaan yang paling tinggi ialah perpustakaan perguruan tinggi sebanyak 100.283 pengunjung. Rincian data jumlah pengunjung gedung perpustakaan di Kota Lhokseumawe dapat dilihat dalam tabel 2.121 berikut Ini:

Tabel 2.121
Jumlah Pengunjung Perpustakaan
Kota Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016

No	Nama Perpustakaan	Jumlah Pengunjung				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Perpustakaan Umum	-	108	420	1.295	3.159
2	Perpustakaan Perguruan Tinggi	99.283	99.383	99.583	99.883	100.283
3	Perpustakaan Sekolah	89.856	89.876	89.901	89.931	89.971
4	Perpustakaan Rumah Ibadah	15.120	15.135	15.155	15.180	15.210
5	Perpustakaan Pesantren	14.400	14.415	14.440	14.470	14.505
	Jumlah	218.659	218.917	219.499	220.759	223.128

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2017.

C. Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah

Buku merupakan acuan wajib untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan, budi pekerti dan kepribadian, kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dari daftar tabel dibawah ini dapat dilihat jumlah buku yang tersedia di perpustakaan Kota Lhokseumawe yang paling banyak terdapat di perpustakaan perguruan tinggi sebanyak 95.368 unit buku dan yang paling minim di perpustakaan pesantren sebanyak 3.287 unit buku. Rincian data jumlah koleksi buku di perpustakaan Kota Lhokseumawe dapat dilihat dalam tabel 2.122 berikut Ini:

Berikut data jumlah koleksi buku di Kota Lhokseumawe;

Tabel 2.122
Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah
Kota Lhokseumawe Tahun 2016

No	Nama Perpustakaan	Jumlah	
		Judul buku	Unit Buku
1	Perpustakaan Umum	5.452	19.664
2	Perpustakaan Perguruan Tinggi	32.449	95.368
3	Perpustakaan Sekolah	7.910	16.325
4	Perpustakaan Rumah Ibadah	3.670	4.760
5	Perpustakaan Pesantren	1.715	3.287
	Jumlah	51.196	139.404

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2017.

2.1.4.2.17. Kearsipan

Kondisi Pelayanan umum Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang kearsipan dapat dilihat dari beberapa indikator antara lain pengelolaan arsip secara baku dan peningkatan SDM pengelola arsip.

A. Pengelolaan Arsip Secara Baku

Kearsipan memegang peran penting bagi kelancarannya organisasi, dimana pengelolaan arsip secara baku dapat menjadi sumber informasi dan sebagai pusat ingatan bagi organisasi. Kearsipan merupakan suatu proses penciptaan, penerimaan, pengumpulan, pengaturan, pemeliharaan dan perawatan serta penyimpanan dokumen menurut sistem tertentu.

Menurut data dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Lhokseumawe, bahwa dari periode 2012-2016 jumlah persentase pengelolaan arsip secara baku hanya 15.6% dari Jumlah 32 SKPD. Berikut tabel 2.123 data jumlah pengelolaan arsip secara baku di Kota Lhokseumawe;

Tabel 2.123
Jumlah SKPD Yang Mengelola Arsip Secara Baku
Kota Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016

No	Uraian	Jumlah Pengunjung				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah SKPD yang mengelola arsip secara baku	5	5	5	5	5
2	Jumlah SKPD	32	32	32	32	32
Persentase		15,6	15,6	15,6	15,6	15,6

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2017.

B. Peningkatan SDM Pengelola Arsip

Dari Tahun 2012 sampai dengan tahun 2016, Kota Lhokseumawe belum pernah melaksanakan pelatihan/diklat SDM Pengelola Arsip. Maka dari itu, guna menunjang pengelolaan arsip secara baku maka perlu dilakukan pelatihan/diklat kepada aparatur pemerintah Kota Lhokseumawe.

2.1.4.3. Urusan Pemerintahan Pilihan

Pelayanan umum Urusan pemerintahan pilihan dibagi kepada beberapa urusan antara lain pariwisata, pertanian, perdagangan, perindustrian dan kelautan dan perikanan.

2.1.4.3.1. Pariwisata

Kondisi Pelayanan umum Urusan pemerintahan pilihan bidang pariwisata dapat dilihat dari beberapa indikator antara lain objek wisata dan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB

A. Objek Wisata

Kunjungan wisata di Kota Lhokseumawe terdiri dari wisatawan domestik dan wisatawan manca negara. Pada umumnya wisatawan lebih banyak mengunjungi destinasi wisata alam, baik pada akhir pekan maupun saat liburan. Berikut ini adalah objek wisata Kota Lhokseumawe meliputi; 1. Objek wisata alam, 2. Objek Wisata budaya/spiritual, dan 3. Objek wisata buatan. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 2.124 berikut ini:

Tabel 2.124
Objek Wisata Kota Lhokseumawe

No	Uraian	Lokasi	Ket
1.	Wisata Alam a. Pantai Ujon Blang b. Pulau semadu c. Pantai pulo daruet	Kecamatan Banda Sakti Kecamatan Muara Satu Kecamatan Muara Dua	
2.	Wisata Budaya/Spiritual a. Benteng (kurok-kurok) tentara Jepang b. Gua Jepang cot Panggoi c. Meriam Belanda d. Tugu Pahlawan TKR e. Tugu lokasi syahid Tgk. Abdul Jalil Cot Plieng f. Tiang gantungan Tgk. Chik Ditungong g. Mon tujuh h. Makam Tgk. Dilhokseumawe i. Makam Tgk. Chik Ditunong j. Makam prajurit Tgk. Abdul Jalil Cot Plieng k. Makam Muallim Taufik Shaleh l. Makam Putroe Neng m. Makam Tgk. Syiah Hudam n. Makam Tgk. Chik Dipaloh o. Makam Tgk. Jrad Meuindram p. Makam Tgk. Chik Buket Krueng q. Museum P. Ramli	Gp. Ujong Blang (Banda Sakti) Gp. Blang Panyang (Muara Satu) Gp. Kuta Blang (Banda Sakti) Gp. Peukan Cunda (Muara Dua) Gp. Blang Buloh (Kec. Blang Mangat) Gp. Jawa Lama (Banda Sakti) Gp. Mesjid (Blang Mangat) Gp. Banda Masen (Banda Sakti) Gp. Mon Geudong (Banda Sakti) Gp. Blang Buloh (Blang Mangat) Gp. Blang Weu Panjo (Blang Mangat) Gp. Blang Pulo (Muara Satu) Gp. Blang Pulo (Muara Satu) Gp. Cot Trieng (Muara Satu) Gp. Cot Trieng (Muara Satu) Gp. Cot Trieng (Muara Satu) Gp. Paloh (Muara Dua)	
3.	Wisata Buatan a. Reservoir (Waduk) b. Taman Riyadah c. Taman Mangat Cerita d. Waduk Jeulikat	Gp. Pusong (Banda Sakti) Kecamatan Banda Sakti Kecamatan Blang Mangat Kecamatan Blang Mangat	

Sumber: Lhokseumawe Dalam Angka, 2017.

B. Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB

Dalam usaha untuk meningkatkan pendapatan daerah, pemerintah Kota Lhokseumawe secara terus-menerus berusaha mengaktifkan dan mendorong semua sektor agar masing-masing sektor dapat memberi masukan yang optimal. Salah satu sektor yang perlu didorong secara terus-menerus adalah sektor

pariwisata. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB di Kota Lhokseumawe lebih jelas dapat dilihat pada tabel 2.125 berikut ini:

Tabel 2.125
Kontribusi Pariwisata Terhadap PDRB
Kota Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016

No	Uraian	Tahun (Juta Rupiah)				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Sektor Pariwisata (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum)	52.483,8	54.845,1	58.896,9	63.638,1	70.828,6
2	Jumlah PDRB dengan Migas	9,321,240.70	9,578,669.30	9,321,037.70	7,634,983.30	7,729,193.60
	Jumlah PDRB tanpa Migas	5,018,961.10	5,323,321.70	5,786,148.60	6,270,202.30	6,473,429.90
	Kontribusi terhadap PDRB dengan Migas (%)	0.56	0.57	0.63	0.83	0.92
	Kontribusi terhadap PDRB tanpa Migas (%)	1.05	1.03	1.02	1.01	1.09

Sumber: PDRB Lhokseumawe, BPS 2017.

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB tanpa Migas sejak Tahun 2012-2016 cenderung berfluktuasi. Pada Tahun 2012 kontribusi pariwisata terhadap PDRB Tanpa Migas sebesar 1.05 persen turun hingga menjadi 1.01 persen pada Tahun 2015, dan pada Tahun 2016 kembali mengalami kenaikan hingga mencapai 1.09 persen. Sedangkan kontribusinya terhadap PDRB Migas cenderung mengalami kenaikan setiap tahunnya sejak 2012 hingga Tahun 2016.

2.1.4.3.2. Pertanian

Kondisi Pelayanan umum Urusan pemerintahan pilihan bidang pertanian dapat dilihat dari beberapa indikator antara lain kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB, kontribusi produksi kelompok petani terhadap PDRB dan produktifitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar.

A. Kontibusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB

Secara konseptual, sektor andalan pembangunan ekonomi Kota Lhokseumawe ialah sektoryang diharapkan mampu menjadi mesin penggerak utama pembangunan ekonomi (*engine of development*) dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, pertumbuhan yang cukup tinggi dan stabil merupakan syarat keharusan agar suatu sektor layak dijadikan sebagai andalan pembangunan ekonomi.

Struktur perekonomian Kota Lhokseumawe, jika memasukkan komponen migas pada tahun 2014 dan 2015 masih didominasi oleh kelompok sekunder yang terdiri dari sektor industri pengolahan, sedangkan untuk sektor pertanian masih belum begitu mengembirakan. Sektor ini mencakup sub sektor tanaman bahan makanan, tanaman perkebunan, peternakan dan hasil-hasilnya, kehutanan serta perikanan dengan rincian seperti terdiskripsikan pada tabel 2.126 di bawah ini.

Tabel 2.126
Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB
Kota Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016

No	Uraian	Tahun (Juta Rupiah)				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	102,903.6	103,445.2	103,060.5	104,335.9	106,541.2
2	Kehutanan dan Penebangan Kayu	4,015.1	3,910.6	3,862.7	3,803.5	3,763.5
3	Perikanan	380,108.1	394,952.3	399,375.7	408,274.3	419,541.2
	Jumlah	487,026.8	502,308.1	506,298.9	516,413.7	529,845.9
	Kontribusi terhadap PDRB dengan Migas (%)	5.2	5.2	5.4	6.8	6.9
	Kontribusi terhadap PDRB tanpa Migas (%)	9.7	9.4	8.8	8.2	8.2

Sumber: PDRB Lhokseumawe, BPS 2017.

B. Kontibusi Produksi Kelompok Petani Terhadap PDRB

Kelompok petani yang memberikan kontribusi terbesar untuk PDRB dengan migas dan PDRB non migas pada tahun 2016 adalah Kecamatan Blang Mangat, yaitu sebesar 33,98% dan Kecamatan Muara Dua sebesar 30,10%. Ini menunjukkan bahwa Kecamatan Blang Mangat di dominasi sektor pertanian. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 2.127 berikut ini:

Tabel 2.127
Kontribusi Kelompok Tani terhadap PDRB
Kota Lhokseumawe Tahun 2016

Sektor	PDRB Migas		PDRB Non Migas	
	2016		2016	
	Kel	%	Kel	%
Kecamatan Banda Sakti	12	11,65%	12	11,65%
Kecamatan Muara Satu	25	24,27%	25	24,27%
Kecamatan Muara Dua	31	30,10%	31	30,10%
Kecamatan Blang Mangat	35	33,98%	35	33,98%
Jumlah	103	100%	103	100%
Kontribusi terhadap PDRB dengan Migas	0,001		0,002	

Sumber : Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian Kota Lhokseumawe 2017.

C. Produktifitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar

Produktivitas padi dan bahan pangan lainnya di Kota Lhokseumawe dalam lima tahun terakhir secara keseluruhan menunjukkan fluktuasi sejak 2011 hingga 2015. Puncak produksi padi di Kota Lhokseumawe terjadi pada tahun 2012 dan 2013, sementara itu, pada tahun 2014 komoditi padi menurun secara signifikan hingga mencapai sepertiga dari kondisi sebelumnya. Kemudian pada tahun 2015, produksi padi kembali menunjukkan peningkatan. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 2.128 berikut ini;

Tabel 2.128
Produktivitas Komoditas Pangan
Kota Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016

No.	KOMODITI	PRODUKSI (Kg)				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Padi	15.222.500	15.333.000	5.245.000	10.578.000	15.333.000
2	Jagung	168.000	198.000	4.000	-	198.000
3	Ubi Kayu	1.250.000	317.000	1.677.000	2.550.000	317.000
4	Ubi Jalar	118.000	-	193.000	24.000	-
5	Kedelai	88.000	22.000	3.000	-	20.000

Sumber : Lhokseumawe Dalam Angka 2012-2016.

2.1.4.3.3. Perdagangan

Kondisi Pelayanan umum Urusan pemerintahan pilihan bidang perdagangan dapat dilihat dari kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB. Perdagangan merupakan salah satu pilar utama pembangunan yang diharapkan mampu memberikan

kontribusi yang besar bagi pembangunan ekonomi Kota Lhokseumawe. Pada tahun 2012 sektor ini mampu memberikan kontribusi sebesar 15,76% dengan migas, sedangkan tanpa migas memberikan kontribusi sebesar 29,29%. Angka ini terus mengalami peningkatan yang berarti khususnya pada sektor migas, sementara itu kontribusi pada tanpa migas mengalami penurunan. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 2.129 berikut ini:

Tabel 2.129
Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB
Kota Lhokseumawe 2012 s.d 2016

Tahun	Sektor Perdagangan (Juta Rp)	PDRB Migas		PDRB Non Migas	
		Juta Rp	%	Juta Rp	%
2012	1,469,479.20	9,321,240.70	15.76	5,018,961.10	29.28
2013	1,548,649.60	9,578,669.30	16.17	5,323,321.70	29.09
2014	1,662,981.10	9,321,037.70	17.84	5,786,148.60	28.74
2015	1,726,605.50	7,634,983.30	22.61	6,270,202.30	27.54
2016	1,791,550.10	7,729,193.60	23.18	6,473,429.90	27.68

Sumber : Lhokseumawe Dalam Angka, 2017.

2.1.4.3.4. Perindustrian

Kondisi Pelayanan umum Urusan pemerintahan pilihan bidang perindustrian dapat dilihat dari kontribusi sektor industri terhadap PDRB. Kontribusi kegiatan usaha di sektor industri dalam pembentukan *Product Domestic Regional Bruto* (PDRB) Kota Lhokseumawe tanpa migas dinilai masih rendah yaitu sebesar 3,66%. Ini berbeda dengan migas dalam sektor pengolahan industri yang memberikan kontribusi sebesar 43,98%, dengan memasukkan migas hampir setengahnya kontribusi sektor industri terhadap PDRB Kota Lhokseumawe didominasi oleh sektor industri pengolahan dengan migas setelah sektor perdagangan. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 2.130 berikut:

Tabel 2.130
Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB
Kota Lhokseumawe 2012 s.d 2016

No	Uraian	Tahun (Juta Rupiah)				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Industri Pengolahan	4,360,337.4	4,096,402.7	3,240,474.7	1,301,452.3	1,154,726.1
	- Migas	4,252,768.2	3,985,208.7	3,126,057.5	1,182,468.5	1,031,187.2
	- Non Migas	107,569.2	111,194.0	114,417.2	118,983.8	123,538.9
	PDRB dengan Migas	9,321,240.70	9,578,669.30	9,321,037.70	7,634,983.30	7,729,193.60
	Kontribusi (%)	46.78	42.77	34.77	17.05	14.94
	PDRB tanpa Migas	5,018,961.10	5,323,321.70	5,786,148.60	6,270,202.30	6,473,429.90
	Kontribusi (%)	86.88	76.95	56.00	20.76	17.84

Sumber : Lhokseumawe Dalam Angka, 2017.

2.1.4.3.5. Kelautan dan Perikanan

Kondisi Pelayanan umum Urusan pemerintahan pilihan bidang kelautan dan perikanan dapat dilihat dari beberapa indikator antara lain produksi perikanan, konsumsi ikan, cakupan binaan kelompok nelayan dan kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB.

A. Produksi Perikanan (Budidaya)

Produksi perikanan tangkap umumnya didominasi oleh kelompok ikan pelagis seperti tuna, tongkol, kembung, cakalang, teri, selar dan tenggiri. Sedangkan produksi perikanan budidaya didominasi oleh kelompok bandeng, udang, kerapu dan mujair. Berikut tabel 2.131 produksi perikanan:

Tabel 2.131
Produksi Perikanan (Budidaya)
Kota Lhokseumawe Tahun 2014 s.d 2016

No.	Jenis Ikan	Produksi (dalam ton)		
		2014	2015	2016
1	Mujair	523	359	129
2	Bandeng	988	2.142	1.244
3	Kerapu	80	457	137
4	Udang Windu	73	208	148
5	Udang Lainnya	89	453	46
	Total	1.753	3.619	1.704

Sumber: DKPPP, 2017.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa produksi tertinggi perikanan budidaya sejak tahun 2012-2016 terjadi pada Tahun 2015 yang mencapai 3619 ton, sedangkan pada tahun 2016 mengalami penurunan dimana produksi perikanan budidaya hanya mencapai 1704 ton.

B. Konsumsi Ikan

Ikan sangat layak dikonsumsi karena mempunyai kandungan gizi yang memadai, khususnya kandungan protein, DHA, dan kalsium, vitamin A, dan zat besi. Kadar protein ikan segar atau olahan cukup tinggi, seperti cakalang 24,2 persen, tuna 23,7 persen, bandeng 21,7 persen, ikan mas 16 persen, pindang 27 persen, ikan asap 30 persen, ikan asin 42-50 persen, dan udang segar 21 persen. Meskipun ikan asin lebih murah, namun ikan asin mempunyai kandungan protein yang paling tinggi di antara beberapa jenis ikan lainnya. Kandungan lemak ikan rendah, umumnya di bawah 5 persen, dan ini masih lebih rendah dibandingkan kadar lemak daging ayam yang mencapai 25 persen.

Komponen gizi yang paling bagus dari ikan dan diduga berperan dalam meningkatkan kecerdasan adalah Docosa-hexaenoic-acid (DHA), yang merupakan asam lemak tak jenuh ganda berupa rantai panjang Omega-3. DHA banyak ditemukan di dalam ikan salmon, tuna, makarelmenjadikan ikan sebagai bagian ketahanan pangan yang baik, secara kualitas gizi individual maupun secara agregat di tingkat nasional, perlu modernisasi sektor perikanan yang memungkinkan pengemasan dan pengalengan berbagai produk ikan dan juga rantai distribusi yang menghubungkan daerah produksi ikan dengan daerah pengonsumsi ikan. Dengan adanya suplai yang memadai, pasar dapat menyerapnya menjadi berbagai makanan olahan yang dekat dengan selera pasar, seperti bakso ikan, sosis ikan. Konsumsi ikan masyarakat Kota Lhokseumawe per hari/ KK/hari sebanyak 1 Kg.

C. Cakupan Bina Kelompok Nelayan

Cakupan bina kelompok nelayan Kota Lhokseumawe pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 sebanyak 25 kelompok, sedangkan pada tahun 2011 cakupan bina kelompok nelayan

adalah sebanyak 30 kelompok. Ini menunjukkan adanya peningkatan cakupan bina kelompok nelayan Kota Lhokseumawe. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 2.132 berikut ini,

Tabel 2.132
Cakupan Bina Kelompok Nelayan
Kota Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016

No	Uraian	Tahun		
		2014	2015	2016
1	Cakupan Bina Kelompok Nelayan	25	25	30

Sumber: DKPPP, 2017.

D. Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB

Kontribusi sub sektor perikanan terhadap PDRB Kota Lhokseumawe dengan migas pada Tahun 2016 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu mencapai 5.43 persen, sedangkan tanpa migas mengalami penurunan, walaupun kontribusi sub sektor perikanan kecil terhadap PDRB tetap terus meningkat. Untuk itu perlu dibutuhkan suatu upaya dalam meningkatkan peran yang lebih besar terhadap perekonomian Kota Lhokseumawe. Secara geografis wilayah Kota Lhokseumawe yang merupakan wilayah yang dikelilingi oleh pantai sangat berpotensi untuk pengembangan perekonomian perikanan. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 2.133 berikut ini,

Tabel 2.133
Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB
Kota Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016

No	Uraian	Tahun (Juta Rupiah)				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Perikanan	380,108.10	394,952.30	399,375.70	408,274.30	419,541.20
	PDRB dengan Migas	9,321,240.70	9,578,669.30	9,321,037.70	7,634,983.30	7,729,193.60
	Kontribusi (%)	4.08	4.12	4.28	5.35	5.43
	PDRB tanpa Migas	5,018,961.10	5,323,321.70	5,786,148.60	6,270,202.30	6,473,429.90
	Kontribusi (%)	7.57	7.42	6.90	6.51	6.48

Sumber: DKPPP, 2017.

2.1.4.4. Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan

Pelayanan umum urusan penunjang urusan pemerintahan dibagi kepada beberapa urusan antara lain perencanaan,

keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan serta pengawasan.

2.1.4.4.1. Perencanaan

Kondisi Pelayanan umum Urusan penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dapat dilihat dari beberapa indikator antara lain tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA, tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/Perkada, tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA dan tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA.

A. Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang Telah Ditetapkan Dengan PERDA

Dalam pembangunan daerah, peran serta dan partisipasi masyarakat memiliki arti yang sangat penting dalam keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah. Melalui penyediaan ruang bagi publik ini diharapkan pembangunan daerah dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 tahun terhitung sejak Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025. RPJPD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat visi, misi, dan program Kepala Daerah. Kota Lhokseumawe telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005-2025 dan ditetapkan dengan Qanun Nomor 4 Tahun 2014.

B. Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang Telah Ditetapkan Dengan PERDA/PERKADA

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun. RPJMD merupakan penjabaran visi, misi, dan program Walikota yang memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi

pembangunan daerah, kebijakan umum, program SKPD, program lintas SKPD, program kewilayahan, rencana kerja dalam kerangka regulasi yang bersifat indikatif, dan rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Untuk Tahun 2017-2022 Kota Lhokseumawe telah menetapkan Qanun RPJM dengan Nomor 7 Tahun 2018.

C. Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang Telah Ditetapkan Dengan PERKADA

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dimaksud guna mengidentifikasi permasalahan pembangunan secara rutin dan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhinya baik yang berasal dari dinamika internal maupun eksternal. Atas dasar hal tersebut penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) menjadi suatu keharusan bagi daerah.

RKPD Kota Lhokseumawe yang akan dipergunakan oleh SKPD sebagai acuan untuk melaksanakan Rencana Kerja pada setiap tahun disusun dengan harapan dapat terjadi keseimbangan serta mempersempit egoisme sektoral dalam pelaksanaannya. Penyusunan RKPD mendasarkan pada fungsi-fungsi pelayanan dasar Pemerintah Daerah yang merupakan analisis usulan dari SKPD.

Selama periode 2012 sampai dengan 2017 dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Lhokseumawe setiap tahunnya telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota (Perwal), dimana RKPD tersebut merupakan penjabaran dari program RPJMD Lhokseumawe Tahun 2012-2017. Penjabaran RPJMD kedalam RKPD merupakan bahan penyusunan RAPBD. Penjabaran RPJMD diawali dengan penyusunan dokumen Rancangan Awal RKPD oleh Kepala Bappeda, yang diikuti secara bersamaan penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD yang merupakan penjabaran dari Renstra SKPD. RKPD berisi tujuan, sasaran, prioritas, program dan kegiatan adalah hasil dari suatu proses berjenjang yang dimulai dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Gampong, Kecamatan hingga Kota. Dengan

demikian materi dalam RKPD adalah refleksi dari kebutuhan masyarakat secara *bottom up* yang dipadukan dengan program dan kegiatan yang direncanakan SKPD yang bersifat *top down* yang diselaraskan dengan program dan kegiatan dalam RPJMD.

D. Tersedianya Dokumen RTRW yang Telah Ditetapkan Dengan PERDA

Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah Kota Lhokseumawe kedalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah. Dokumen RTRW digunakan juga sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Penyusunan dokumen RTRW dimaksudkan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah serta menjadi acuan lokasi investasi kota baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, maupun pihak swasta. Disamping itu, RTRW dimaksudkan sebagai acuan dalam pengendalian dan pemanfaatan ruang serta arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi; dan acuan dalam administrasi pertanahan. Dokumen RTRW Kota Lhokseumawe telah ditetapkan dengan Qanun Nomor 1 Tahun 2014.

2.1.4.4.2. Keuangan

Kondisi Pelayanan umum Urusan penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan dapat dilihat dari Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Terhadap Laporan Keuangan. Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Pemeriksaan keuangan tidak dimaksudkan untuk mengungkapkan adanya penyimpangan (*fraud*) dalam pengelolaan keuangan. Meski demikian, jika pemeriksa menemukan adanya penyimpangan, kecurangan atau pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan, khususnya yang berdampak adanya potensi dan

indikasi kerugian negara, maka hal ini harus diungkap dalam LHP. Dalam batas tertentu terkait materialitasnya, hal ini mungkin mempengaruhi opini atas kewajaran LK secara keseluruhan, sehingga BPK harus mempertimbangkan secara cermat pengaruh *fraud* tersebut terhadap penyajian laporan keuangan.

Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Kota Lhokseumawe pada tahun 2016 adalah wajar dengan pengecualian (WDP), berbeda dari tahun sebelumnya, dimana pada LKPD TA 2015 Pemerintah Kota Lhokseumawe mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Penurunan opini dikarenakan terdapat permasalahan pada tahun 2016 dalam pengendalian atas utang belanja dimana terdapat perbedaan saldo utang belanja antara Neraca *unaudited* dengan data SKPD yang tidak dapat dijelaskan dan perbedaan dengan hasil reviu Inspektorat.

2.1.4.4.3. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Kondisi Pelayanan umum Urusan penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan dapat dilihat dari beberapa indikator antara lain persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal, persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural dan jumlah jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah.

A. Persentase ASN yang Mengikuti DIKLAT Formal

Tabel 2.134

Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal Kota Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016

No	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	50	221	52	6	177
2	Jumlah Total ASN	3955	4161	4161	4311	4351
Persentase		1.26	5.31	1.25	0.14	4.07

Sumber : BKPSDM Kota Lhokseumawe, 2017.

Dari tabel 2.134 diatas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2016 dari 4351 orang ASN di Kota Lhokseumawe baru 4.07 persen saja yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan formal atau hanya 177 orang ASN. Walaupun persentase ini lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya, akan tetapi masih belum memadai untuk peningkatan kapasitas SDM aparatur. Oleh karena itu Pemerintah Kota Lhokseumawe terus berupaya dalam meningkatkan kapasitas SDM aparatur.

B. Persentase Pejabat ASN Mengikuti DIKLAT Struktural

Sejak periode 2012-2016 jumlah pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural masih sangat kecil sekali. Hal ini terlihat dari total jabatan struktural sebanyak 506 yang ada di lingkup Pemerintah Kota Lhokseumawe, hanya 2.86 persen atau 13 orang yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural PIM III dan PIM IV.

Tabel 2.135

Persentase Pejabat ASN mengikuti DIKLAT Struktural Kota Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016

No	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah Pejabat ASN yang mengikuti					
	- PIM II	-	-	-	-	-
	- PIM III	1	-	1	6	-
	- PIM IV	-	-	-	7	-
2	Jumlah Total Jabatan	422	422	418	454	506
Persentase		0.24	0.00	0.24	2.86	0.00

Sumber : BKPSDM Kota Lhokseumawe, 2017.

C. Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Fungsional Tertentu Pada Instansi Pemerintah

Jumlah jabatan struktural dan struktural di lingkup Pemerintah Kota Lhokseumawe sejak Tahun 2012-2016 menunjukkan penambahan setiap tahunnya. Hal ini dapat dilihat pada tabel dimana pada Tahun 2012 jumlah jabatan struktural di lingkup Pemerintah Kota Lhokseumawe sebanyak 422 posisi dan pada Tahun 2016 bertambah menjadi 506 posisi.

Jumlah jabatan Fungsional Tertentu juga menunjukkan penambahan setiap tahunnya, dimana pada Tahun 2012 berjumlah 582 hingga tahun 2016 menjadi 736. Penambahan posisi dan jumlah jabatan ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

Tabel 2.136
Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional Tertentu pada Instansi Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016

No	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Jabatan Pimpinan Tinggi	28	28	28	29	31
2	Jabatan Administrasi	112	112	108	115	127
3	Jabatan Pengawas	282	282	282	310	348
4	Jabatan Fungsional Tertentu	582	624	645	736	736
	Jumlah Jabatan	1,004	1,046	1,063	1,190	1,242

Sumber : BKPSDM Kota Lhokseumawe, 2017.

2.1.4.4.4. Pengawasan

Kondisi Pelayanan umum Urusan penunjang urusan pemerintahan bidang pengawasan dapat dilihat dari beberapa indikator antara lain persentase tindak lanjut temuan dan jumlah temuan BPK yang ditindaklanjuti.

A. Persentase Tindak Lanjut Temuan

Pelaksanaan kinerja dan keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe setiap tahunnya dilakukan pemeriksaan oleh Aparatur Pemeriksa Internal Pemerintah (APIP) baik APIP Kota Lhokseumawe maupun APIP Aceh.

Tabel 2.137
Persentase Tindak Lanjut Temuan

No	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah temuan yang ditindaklanjuti	244	290	290	329	329
2	Jumlah total temuan	312	360	360	415	415
	Persentase (%)	78	80,5	80,5	79	79

Sumber : Inspektorat Kota Lhokseumawe, 2017.

Dari tabel 2.137 diatas dapat dilihat pada Tahun 2016 terdapat 415 temuan. Dari total temuan tersebut sebesar 79 persen telah ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe. Tindaklanjut hasil temuan ini merupakan usaha nyata Pemerintah Kota Lhokseumawe dalam memperbaiki kinerja dan keuangan ke arah yang lebih baik.

B. Jumlah Temuan BPK yang Ditindaklanjuti

Setiap tahunnya Pemerintah Kota Lhokseumawe selalu dilakukan pemeriksaan oleh BPK baik dari segi kinerja maupun keuangan. Sebagian hasil pemeriksaan BPK merupakan temuan yang harus ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe.

Tabel 2.138
Jumlah Temuan BPK yang Ditindaklanjuti

No	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah temuan BPK yang ditindaklanjuti	19	31	23	19	23
2	Jumlah total rekomendasi temuan BPK	30	43	27	36	33
	Persentase (%)	63,33	72,09	85,19	52,78	69,70

Sumber : Inspektorat Kota Lhokseumawe, 2017.

Dari tabel 2.138 diatas dapat dijelaskan bahwa pada Tahun 2016 terdapat 33 rekomendasi temuan BPK. Sebagian besar rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti. Hal ini terlihat bahwa dari jumlah rekomendasi tersebut sebanyak 23 temuan BPK yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe atau sebesar 69.70 persen.

2.1.4.5. Urusan Keistimewaan dan Kekhususan

Pelayanan umum urusan Keistimewaan dan Kekhususan dibagi kepada dua urusan yakni Syariat Islam dan Majelis Ulama.

2.1.4.5.1. Syariat Islam

Kondisi pelayanan umum urusan Keistimewaan dan Kekhususan bidang Syariat Islam dapat dilihat dari beberapa indikator antara lain jumlah pelanggaran Qanun Syariat Islam dan Tipe Dayah, Kepemilikan dan Jumlah Guru Dayah.

A. Jumlah Pelanggaran Qanun Syariat Islam

Syariat Islam merupakan salah satu urusan yang memiliki kedudukan penting di Provinsi Aceh. Setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Aceh, pelaksanaan Syariat Islam di Aceh telah memiliki payung hukum yang kuat. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 merupakan pengakuan Negara terhadap keistimewaan dan kekhususan Aceh. Pelaksanaan Syariat Islam meliputi ibadah, *ahwal alsyakhshiyah* (hukum keluarga), *muamalah* (hukum perdata), *jinayah* (hukum pidana), *qadha'* (peradilan), *tarbiyah* (pendidikan), dakwah, syiar, dan pembelaan Islam yang ketentuannya diatur dalam Qanun (Peraturan Daerah) yaitu Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok Syariat Islam.

Perkembangan kota dan arus informasi yang pesat membuat pola kehidupan warga kota menjadi berubah, seperti cara pergaulan, berpakaian, dan sebagainya. Hal tersebut berimbas pada terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap Qanun Syari'at Islam. Dalam rentang waktu 2012-2016 terjadi beberapa kasus pelanggaran Qanun Syari'at Islam. Berikut tabel 2.139 yang merinci jumlah pelanggaran Qanun Syariat Islam di Kota Lhokseumawe:

Tabel 2.139
Jumlah Pelanggaran Qanun Syariat Islam
Kota Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016

No	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Qanun No 12 Tahun 2003 (Khamar)	0	1	0	3	1
2	Qanun No 13 Tahun 2003 (Maisir)	18	8	6	15	5
3	Qanun No 14 Tahun 2003 (Khalwat)	135	149	109	55	75
	Jumlah	153	158	115	73	81

Sumber: Satpol PP dan WH, 2017.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sejak Tahun 2012-2016 jumlah pelanggaran Qanun Syariat Islam di Kota Lhokseumawe cenderung menunjukkan penurunan. Pada Tahun 2012 jumlah pelanggaran sebanyak 153 kasus, hingga akhir Tahun 2016 terjadi penurunan yang sangat signifikan menjadi 81 kasus. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat dalam pelaksanaan Qanun Syariat Islam sudah semakin baik, disamping seringnya dilakukan patroli penegakan hukum oleh Satpol WH Kota Lhokseumawe.

B. Tipe Dayah, Kepemilikan dan Jumlah Guru Dayah

Tujuan pendidikan dayah adalah untuk menjaga kebutuhan masyarakat dalam bidang studi keagamaan dan dalam upaya untuk mengendalikan gejala-gejala negatif yang tidak diinginkan yang mungkin terjadi dalam masyarakat. Lembaga pendidikan dayah dalam masyarakat merupakan sebuah cita-cita, karena dayah berperan sebagai media kontrol dalam lingkungan masyarakat dan juga tuntutan serta penjelmaan dari tingkah laku, serta sikap masyarakat sebagai salah satu sub sistem dari kelompok masyarakat guna menjaga kemandirian, kebiasaan yang berfungsi untuk menjadikan agama Islam sebagai pegangan kehidupannya.

Perkembangan dayah di Kota Lhokseumawe dari tahun ke tahun terus meningkat dan berkembang sesuai dengan tuntutan masyarakat yang membutuhkan pendidikan Agama Islam. Kondisi ini sudah mencapai rata-rata jumlah dayah seluruh Aceh. Jika merujuk pada RPJMA 2017-2022 jumlah dayah seluruh Aceh pada tahun 2014 adalah 1.065 dayah, sehingga untuk jumlah dayah di Kota Lhokseumawe sudah cukup baik. Berikut tabel 2.140 yang merinci jumlah dayah, kepemilikan, dan guru dayah di Kota Lhokseumawe:

Tabel 2.140
Tipe Dayah, Kepemilikan, dan Jumlah Guru Dayah
Kota Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016

Tipe	Kepemilikan	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
A	Yayasan	5	5	5	10	14
	Pribadi	0	0	0	0	0
B	Yayasan	27	30	30	13	9
	Pribadi	0	0	0	0	0
C	Yayasan	0	0	0	22	24
	Pribadi	0	0	0	0	0
D	Yayasan	0	0	0	0	0
	Pribadi	0	0	0	0	0
Jumlah Dayah		32	35	35	45	47
Jumlah Guru Dayah		298	341	341	432	450

Sumber: Dinas Syariat Islam, 2017.

Tabel di atas menggambarkan kondisi jumlah dayah dan guru dayah di Kota Lhokseumawe sejak Tahun 2012-2016. Dayah di Kota Lhokseumawe pada Tahun 2012 berjumlah 32 dayah yang terdiri dari 5 dayah tipe A, dan 27 dayah tipe B dengan jumlah guru berjumlah 298 orang. Jumlah tersebut menunjukkan peningkatan hingga Tahun 2016 jumlah dayah di Kota Lhokseumawe berjumlah 47 dayah, dengan tipe A sebanyak 14 dayah, Tipe B 9 dayah, dan Tipe C sebanyak 24 dayah, dengan jumlah guru sebanyak 450 orang. Keseluruhan dayah tersebut semuanya berada di bawah kepemilikan yayasan.

2.1.4.5.2. Majelis Ulama

Kondisi Pelayanan umum urusan Keistimewaan dan Kekhususan bidang Majelis Ulama dapat dilihat dari beberapa indikator antara lain Pendidikan Kader Ulama, Musyawarah Ulama dan Sosialisasi Fatwa.

A. Pendidikan Kader Ulama (PKU)

Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Lhokseumawe telah menyelenggarakan Pendidikan Kader Ulama (PKU) sebanyak dua kali, yaitu pada Tahun 2014 dan 2015, dimana pada Tahun 2014 peserta yang mengikuti Pendidikan Kader Ulama (PKU) sebanyak 12 orang, peserta yang ikut berpartisipasi dalam PKU semuanya laki-laki. Pada Tahun 2015 Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Lhokseumawe juga menyelenggarakan Pendidikan Kader Ulama (PKU), jumlah peserta yang ikut dalam pelaksanaan kegiatan tersebut sebanyak 20 orang, semua peserta umumnya laki-laki. Berikut tabel 2.141 data pelaksanaan Pendidikan Kader Ulama (PKU).

Tabel 2.141
Jumlah Peserta PKU
Kota Lhokseumawe Tahun 2014 s.d 2015

No	Tahun	Jumlah Angkatan	Jumlah Peserta		Keterangan
			Lk	Pr	
1	2014	I	12 (Orang)	-	
2	2015	II	20 (Orang)	-	

Sumber : MPU 2017

B. Musyawarah Ulama

Islam memandang musyawarah sebagai salah satu hal yang amat penting bagi kehidupan insani, bukan saja dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melainkan dalam kehidupan berumah tangga dan lain-lainnya. Ini terbukti dari perhatian Al-Qur'an dan Hadist yang memerintahkan atau menganjurkan umat pemeluknya supaya bermusyawarah dalam memecah berbagai persoalan yang mereka hadapi.

Musyawarah dapat dilakukan dalam soal-soal keagamaan sejauh yang tidak jelaskan oleh wahyu (Al-Qur'an dan Hadist). Terlepas dari perbedaan pendapat di atas, yang jelas antara

persoalan-persoalan duniawi dan agamawi tak dapat dipisahkan meskipun antara yang satu dengan yang lain memang dapat di bedakan. Dan suatu hal yang telah di sepakati bersama oleh para ulama ialah bahwa musyawarah tidak di benarkan untuk membahas masalah-masalah yang ketentuannya secara tegas dan jelas telah ditentukan oleh Al-Qur'an dan Hadist.

Oleh kerana itu Majelis Peremusyawaratan Ulama Kota Lhokseumawe secara rutin melaksanakan kegiatan tersebut, untuk dapat mencari akar persoalan dan solusi untuk kemasalahatan umat Islam pada khususnya, agar terciptanya rasa toleransi dan saling menghormati antar umat beragama. Pelaksanaan kegiatan musyawarah ulama telah diadakan mulai Tahun 2014 sampai dengan sekarang, dengan berbagai persoalan dan masalah yang diangkat dalam forum tersebut untuk mencapai kemufakatan, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.142 dibawah ini :

Tabel 2.142
Kegiatan Musyawarah Ulama
Kota Lhokseumawe Tahun 2014 s.d 2016

No	Kegiatan	Tahun			Total
		2014	2015	2016	
1	Sidang Paripurna Ulama	48	36	42	126
2	Rapat koordinasi MPU	-	0	3	3
3	Lokakarya Ulama-Umara	-	0	-	0
4	Nadwah/Muhasah Ilmiah	1	1	1	3
5	Muzakarah masalah Keagamaan	1	1	1	3
6	Pengkajian Aliran Sempalan	-	-	-	-
7	Rapat Pimpinan MPU	6	8	7	21
	Jumlah	56	46	54	156

Sumber : Sekretariat MPU, 2017.

Tabel di atas menunjukkan bahwa sejak Tahun 2014-2016 kegiatan musyawarah ulama di Kota Lhokseumawe telah dilakukan sebanyak 156 kali, dimana pada Tahun 2014 sebanyak 56 kali, Tahun 2015 sebanyak 46 kali, dan Tahun 2016 sebanyak 54 kali. Kegiatan musyawarah tersebut meliputi Sidang Paripurna Ulama dilakukan sebanyak 126 kali, Rapat Koordinasi MPU sebanyak 3 kali, Nadwah/Muhasah Ilmiah sebanyak 3 kali,

Muzakarah Masalah Keagamaan sebanyak 3 kali, dan Rapat Pimpinan MPU sebanyak 21 kali.

C. Sosialisasi Fatwa

Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Lhokseumawe hingga saat ini belum pernah melakukan kegiatan sosialisasi fatwa hasil dari kesepakatan para ulama terkait masalah-masalah yang berkembang dalam masyarakat, dikarenakan MPU Kota Lhokseumawe belum pernah mengeluarkan fatwa. Karena fatwa – fatwa tentang fenomena sekarang yang berkembang dalam masyarakat sudah dikeluarkan oleh MUI (Majelis Ulama Indonesia) dan MPU Aceh, serta disosialisasikan oleh MUI Pusat dan MPU Aceh, melalui media televisi, surat kabar ataupun media sosial.

2.1.5. Aspek Daya Saing Daerah

Kondisi daya saing daerah di Kota Lhokseumawe dapat digambarkan dengan melihat kondisi beberapa hal antara lain kemampuan ekonomi daerah, fasilitasi wilayah/infrastruktur, iklim investasi dan sumber daya manusia.

2.1.5.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

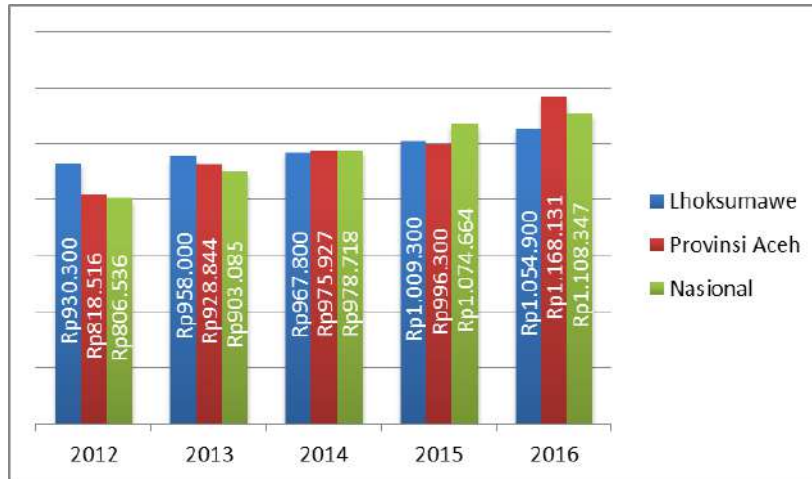
Kemampuan ekonomi daerah dapat dilihat melalui Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita. PDRB penggunaan atau pengeluaran merupakan nilai pengeluaran atas penggunaan barang dan jasa yang digunakan sebagai konsumsi akhir oleh berbagai golongan dalam masyarakat baik untuk memenuhi modal, stok, maupun ekspor dan impor.

Pengeluaran rata-rata per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut.

Rata-rata pengeluaran perkapita atau belanja rumah tangga selama sebulan di Kota Lhokseumawe terus mengalami peningkatan, Tahun 2012 Rp.930.300, dan Tahun 2016 Rp.1.054.900-. Hal ini menunjukkan daya beli masyarakat Kota Lhokseumawe semakin meningkat, namun nilai ini masih dibawah

rata- rata Provinsi Aceh (Tahun 2016; Rp 1.108.347,-) Pengeluaran perkapita per bulan Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2016 dapat dilihat dalam grafik pada gambar 2.18 berikut:

Gambar 2.18
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita
Kota Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016



Sumber : Statistik Daerah Kota Lhokseumawe, BPS 2017.

2.1.5.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Kondisi Kemampuan ekonomi daerah di Kota Lhokseumawe dapat juga dilihat melalui fasilitas wilayah/infrastruktur melalui beberapa pendekatan antara lain persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih dan persentase rumah tangga yang menggunakan listrik.

A. Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Air Bersih

Jumlah rumah tangga Kota Lhokseumawe pada Tahun 2016 yang mendapat akses air bersih melalui jaringan PDAM adalah sebanyak 1.719 rumah tangga atau sebesar 3.89 persen. Minimnya persentase akses jaringan rumah tangga (RT) yang menggunakan air bersih karena PDAM baru membuat jaringan pipa air untuk wilayah kecamatan Banda Sakti dan Muara Satu. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.143 berikut ini:

Tabel 2.143
Persentase Akses Jaringan Rumah Tangga (RT)
Yang Menggunakan Air Bersih
Kota Lhokseumawe Tahun 2012- 2016

No	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah Pelanggan PDAM Ie Beusare Rata	-	-	-	-	1,719
2	Jumlah Rumah Tangga	39,558	40,626	40,726	43,309	44,165
	Persentase	4.35	4.23	4.22	3.97	3.89

Sumber : Lhokseumawe Dalam Angka, 2017.

B. Persentase Rumah Tangga yang menggunakan Listrik

Proporsi rumah tangga dengan akses listrik di Kota Lhokseumawe selama periode 20012-2016 terjadi peningkatan yang sangat berarti yaitu sebesar 12,32 persen, pada tahun 2013 persentase rumah tangga yang berlistrik sebesar 99,14 persen, sedangkan pada tahun tahun 2009 yaitu 86,82 persen, dengan demikian jumlah rumah tangga yang belum menggunakan listrik di Aceh sebanyak 9.830 unit atau sebesar 0,86 persen. Secara rinci persentase rumah tangga berlistrik di Kota Lhokseumawe disajikan pada tabel 2.144 berikut.

Tabel 2.144
Persentase Rumah Tangga yang menggunakan Listrik
Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2016

No	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah Rumah Tangga Pengguna Listrik (Rayon Lhokseumawe)	34,978	36,081	37,632	39,267	40,828
2	Jumlah Rumah Tangga	39,558	40,626	40,726	43,309	44,165
	Persentase	88.42	88.81	92.40	90.67	92.44

Sumber : Publikasi PLN (analog & upb) 2017.

2.1.5.3. Fokus Iklim Investasi

Kondisi iklim investasi di Kota Lhokseumawe dapat diamati dengan melihat beberapa faktor antara lain angka kriminalitas yang tertangani, angka partisipasi angkatan kerja dan tingkat pengangguran terbuka

A. Angka Kriminalitas yang Tertangani

Tindak kejahatan yang terjadi di Kota Lhokseumawe secara umum mengalami peningkatan, tindak kejahatan yang terjadi

dikelompokkan dalam dua katagori besar yaitu kelompok tindakan kriminal biasa yang merupakan kasus pencurian, penipuan, perompakan, pembunuhan, tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan lain-lain, sedangkan yang dikelompokkan dalam kelompok Kriminal Narkoba yang berupa kasus Ganja dan Sabu-sabu dan zat adiktif lainnya.

Tabel 2.145
Angka Kriminalitas
Kota Lhoksumawe Tahun 2014-2016

Uraian Jenis Kriminalitas	Tahun		
	2014	2015	2016
Pembunuhan	2	6	3
Penganiayaan Berat (Anirat)	37	38	75
Penganiayaan Ringan (Anira)	126	144	119
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	33	31	29
Perkosaan	1	3	4
Pencabulan	32	-	36
Penculikan	4	-	3
Pencurian Dengan Kekerasan (Curas)	4	24	24
Pencurian Biasa (Termasuk Ringan)	45	41	22
Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor)	220	336	276
Pembakaran Dengan Sengaja	20	-	6
Narkotika Dan Psikotropika	73	-	108
Penipuan/Perbuatan Curang	66	118	122
Penggelapan	51	87	70
Korupsi	-	-	-
Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum	-	-	-
Pencurian Dengan Pemberatan (Curat)	132	219	227
Pengrusakan/Penghancuran Barang	32	23	23
Jumlah/Total	878	1070	1147
Jumlah Penduduk	187,455	191,407	195,186
Angka Kriminalitas (Per 10.000)	46.84	55.90	58.76

Sumber : Lhokseumawe Dalam Angka, 2017.

Tabel 2.145 diatas menunjukkan bahwa angka kriminalitas di Kota Lhokseumawe sejak Tahun 2014-2016 cenderung meningkat. Kondisi ini bukanlah sesuatu yang menggembirakan, karena secara tidak langsung akan mempengaruhi iklim investasi di Kota Lhokseumawe. Pada tahun 2014 angka kriminalitas per satuan penduduk sebesar 46.84, hingga akhir Tahun 2016 meningkat menjadi 58.76. Dibutuhkan usaha-usaha yang konkrit

dari semua elemen pemangku kepentingan dan masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keamanan yang kondusif dalam rangka mendorong iklim investasi.

B. Angka Partisipasi Angkatan Kerja

Partisipasi Angkatan Kerja adalah suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari merujuk pada suatu waktu dalam periode survei. Melihat angka partisipasi angkatan kerja ditentukan melalui perbandingan antara yang bekerja dengan jumlah penduduk usia 15 tahun keatas pada suatu daerah. Dari Tahun 2012 s/d 2016 Angka partisipasi angkatan kerja Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada tabel 2.146 berikut:

Tabel 2.146
Angka Partisipasi Angkatan Kerja
Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2016

No	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun	190.750	197.915	199.120	200.276	201.156
2	Jumlah Angkatan Kerja Usia 15 Tahun Ke Atas	58.804	65.454	67.388	67.857	77.021
Angka Partisipasi Angkatan Kerja		30.83	33.07	33.84	33.88	38.29

Sumber : Lhokseumawe dalam Angka, 2017.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Angka Partisipasi Angkatan Kerja di Kota Lhokseumawe setiap tahunnya menunjukkan peningkatan. Angka Partisipasi Angkatan Kerja pada Tahun 2016 sebesar 38.29 meningkat dari tahun sebelumnya yang mencapai 33.38.

C. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kota Lhokseumawe berkurang drastis pada tahun 2013. Sementara itu Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Lhokseumawe terus meningkat dari tahun ke tahun. Berikut tabel 2.147 data tingkat pengangguran Kota Lhokseumawe.

Tabel 2.147
Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2016

No	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	TPT	10,88	7,46	11,20	13,06	10,51
2	TPAK	55,34	56,77	59,10	59,38	60,22

Sumber : Statistik daerah, BPS Lhokseumawe 2017.

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sejak Tahun 2015-2016 menunjukkan angka penurunan, dimana pada Tahun 2015 TPT sebesar 13.06 turun menjadi 10.51 pada Tahun 2016. Sedangkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kota Lhokseumawe menunjukkan peningkatan setiap tahunnya sejak Tahun 2012-2016. TPAK Kota Lhokseumawe Tahun 2016 adalah 60.22. Indikator yang menunjukkan pasokan tenaga kerja (*labour supply*) dari penduduk usia kerja ini meningkat dari tahun sebelumnya yang mencapai 59.38.

2.1.5.4. Fokus Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang menentukan dalam aspek daya saing suatu daerah. Beberapa hal yang menjadi indikator dalam mengamati kondisi sumber daya manusia di Kota Lhokseumawe antara lain Rasio Ketergantungan dan Telaahan RTRW Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2032.

A. Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan dapat dihitung berdasarkan jumlah penduduk usia di bawah 15 tahun ditambah jumlah penduduk usia di atas 64 tahun dibagi dengan jumlah penduduk usia 15–64 tahun. Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang.

Dependency ratio merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase *dependency ratio* menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang

belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase *dependency ratio* yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Berdasarkan data BPS Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada tabel 2.148 berikut ini :

Tabel 2.148
Rasio Ketergantungan
Kota Lhokseumawe Tahun 2012- 2016

No	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Rasio Ketergantungan	50,91	53,10	52,33	52,13	51,90

Sumber : Lhokseumawe Dalam Angka 2017.

Tabel di atas menjelaskan bahwa Rasio Ketergantungan Kota Lhokseumawe menunjukkan penurunan. Tahun 2016 Rasio Ketergantungan di Kota Lhokseumawe mencapai 51.90 persen, turun dari tahun sebelumnya yang mencapai 52.13 persen.

B. Telaahan RTRW Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2032

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2032 yang disusun untuk kurun waktu 20 tahun mendatang, pengembangan ruang Kota Lhokseumawe mengacu pada hierarki fungsional sesuai dengan RTRWN dan selaras dengan RTRW Provinsi antara lain: Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Sehingga dalam penataan ruang Kota Lhokseumawe tidak terlepas dari penataan ruang di wilayah sekitarnya, yaitu :

- a. Dalam Konteks Nasioanal Kota Lhokseumawe adalah Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang membutuhkan keterkaitan aksesibilitas antar wilayah secara optimal.
- b. Fungsi sebagai Pusat Kegiatan Nasional dituntut adanya keterkaitan Kota Lhokseumawe dengan kota-kota *hinterland* disekitarnya yang berhimpitan untuk membagi beban dan fungsi-fungsi kegiatan perkotaan secara hirarkis dan terintegrasi.

Tujuan utama penataan struktur tata ruang Kota Lhokseumawe adalah penguatan fungsi Pusat Kegiatan Nasional

(PKN) Lhokseumawe dan sekitarnya sebagai salah satu pusat pengembangan kawasan pesisir timur Provinsi Aceh dengan peningkatan sektor perdagangan, jasa, industri dan pariwisata melalui pembangunan yang berkelanjutan.

Struktur ruang di Kota Lhokseumawe terbentuk oleh sistem pusat-pusat pelayanan yang saling terintegrasi. Sistem pusat pusat pelayanan ini dilengkapi dengan sistem jaringan prasarana wilayah dan terhubung oleh sistem jaringan transportasi untuk meningkatkan aksesibilitas transportasi antar pusat-pusat pelayanan. Dengan demikian sistem pusat pusat pelayanan yang ditetapkan di Kota Lhokseumawe dapat dilihat dalam tabel 2.149 sebagai berikut:

Tabel 2.149
Pusat-Pusat Pelayanan Kegiatan Kota Lhokseumawe
Tahun 2012 - 2016

No	Fungsi Pelayanan	Pusat Kegiatan	Keterangan
1	Pusat Kegiatan Nasional	Kota Lhokseumawe dan sekitarnya	Kota Lhokseumawe dan sekitarnya (wilayah Kab. Aceh Utara, yaitu Kecamatan Dewantara dan Muara Batu)
2	Pusat Pelayanan Kota	Keude Cunda	Kecamatan Muara Dua
3	Sub Pusat Pelayanan Kota	Lhoksemawe	Pusat Kecamatan Banda Sakti
		Kandang	Pusat Kecamatan Muara Dua
		Batuphat Timur	Pusat Kecamatan Muara Satu
		Keude Peunteuet	Pusat Kecamatan Blang Mangat
4	Pusat Lingkungan	Lhokseumawe Selatan	Pusat Mukim Lhokseumawe Selatan
		Lhokseumawe Utara	Pusat Mukim Lhokseumawe Utara
		Kandang	Pusat Mukim Kandang
		Cunda	Pusat Mukim Cunda
		Paloh Timur	Pusat Mukim Paloh Timur
		Paloh Barat	Pusat Mukim Paloh Barat
		Meuraksa	Pusat Mukim Meuraksa
		Peunteuet	Pusat Mukim Peunteuet
		Mangat Makmu	Pusat Mukim Mangat Makmu

Sumber : RTRW Kota Lhokseumawe Tahun 2011-2032

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPK Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMK

Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPK sampai tahun berjalan dan realisasi RPJMK dapat dilihat melalui capaian indikator makro, realisasi terhadap proyeksi kebijakan keuangan dan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan.

2.2.1. Capaian Indikator Makro

Secara makro keberhasilan pembangunan Kota Lhokseumawe ditunjukkan oleh tingkat capaian indikator

pembangunan terhadap target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Berdasarkan target yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Kota Lhokseumawe (RKPK) 2018, menunjukkan bahwa sebagian dari target/proyeksi Tahun 2018 telah mencapai target. Untuk mengetahui secara lebih terperinci mengenai kondisi tersebut dapat dilihat tabel 2.150 berikut.

Tabel 2.150
Capaian Indikator Pembangunan Makro Kota Lhokseumawe

No	Indikator Makro	Satuan	Capaian		Proyeksi	Capaian
			2014	2015	2016	2016
1	2	3	4	5	6	7
1	PDRB (ADHK)					
	Migas	Juta Rp	8.222.328,4	6.550.236,0	6.462.392,0	6.462.392,0
	Tanpa Migas	Juta Rp	5.096.270,8	5.367.767,4	5.431.204,8	5.431.204,8
2	Tingkat Pertumbuhan Ekonomi / PDRB (ADHK)					
	Migas	Persen	-7.39	-20.34	-1.34	-1.34
	Tanpa Migas	Persen	4.15	5.33	1.18	1.18
3	Tingkat Inflasi	Persen	1.95	1.31	2.25	2.25
4	Jumlah Penduduk Miskin	Persen	11.93	12.09	-	11.98
5	Tingkat Pengangguran	persen	11.20	13.06	-	10.51

Sumber : BPS dan RPJMK Lhokseumawe 2017-2022

2.2.2. Realisasi Terhadap Proyeksi Kebijakan Keuangan

Realisasi terhadap proyeksi kebijakan keuangan ditinjau melalui realisasi pendanaan, realisasi pendapatan, realisasi belanja dan realisasi pembiayaan.

2.2.2.1. Realisasi Pendanaan

Realisasi Tahun 2018, pendapatan daerah telah mencapai Rp.749.384.908.379,24,- atau mencapai 92,76% dari proyeksi sebesar Rp.807.968.037.381,26,- Di sisi belanja, realisasi pada tahun 2018 mencapai Rp.775.480.033.294,00,- atau 90,08% dari proyeksi sebesar Rp.861.001.449.164,81,-. Kondisi Capaian realisasi pendapatan dan belanja daerah pada Tahun 2018 tersebut menyebabkan terjadinya defisit terhadap anggaran sebesar Rp.26.095.124.914,76,-.

Untuk mengetahui lebih terperinci mengenai kondisi tersebut, dapat dilihat pada tabel 2.151 berikut.

Tabel 2.151
Realisasi Pendanaan Kota Lhokseumawe Tahun 2018

No	Uraian	Proyeksi 2018	Realisasi 2018 (Smt. II)	
		(Rp)	(Rp.)	(%)
1	2	3	4	5
1	Pendapatan	807.968.037.381,26	749.384.908.379,24	92,76
2	Belanja (Termasuk transferan ke Kab/Kota/Desa)	861.001.449.164,81	775.480.033.294,00	90,08
3	Surplus/Defisit	(53.033.411.783,55)	(26.095.124.914,76)	49,21

Sumber: Qanun PAPBK 2018 dan Realisasi APBK 2018

2.2.2.2. Realisasi Pendapatan

Secara persentase, tingkat realisasi pendapatan pada Tahun 2018 mencapai 92,76%. Realisasi Pendapatan Kota Lhokseumawe tertinggi diperoleh dari Pendapatan Asli Kota Lhokseumawe sebesar 102%, diikuti oleh Dana Perimbangan 92,2% dan Lain Pendapatan Daerah yang Sah 86,4%.

Dibandingkan dari jumlah masih seperti pola tahun-tahun sebelumnya nilai pendapatan tertinggi diperoleh dari Transfer Dana Perimbangan Rp.630.806.778.932,-, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp.112.873.640.606,-, diikuti Pendapatan Asli Daerah Rp.64.287.617.843,-. Untuk mengetahui perkembangan secara lebih terperinci mengenai realisasi pendapatan dapat dilihat pada tabel 2.152 berikut ini:

Tabel 2.152
Realisasi Pendapatan Kota Lhokseumawe Semester II
Tahun 2018

Kode	URAIAN	ANGGARAN TAHUN 2018	REALISASI SEMESTER II	
			(RP)	(%)
4	PENDAPATAN	807,968,037,381.26	749,384,908,279.24	92.7%
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	64,287,617,843	65,598,207,650.60	102.0%
4.1.1	Pendapatan Pajak daerah	29,182,500,000.00	33,855,813,011	116.0%
4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	4,428,500,000.00	3,088,925,300	69.8%
4.1.3	Pendapatan Hasil Pengelola Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5,200,000,000.00	5,100,912,333	98.1%
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	25,476,617,843.00	23,552,557,006.60	92.4%
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	64,287,617,843	65,598,207,651	102.0%
4.2	DANA PERIMBANGAN	630,806,778,932	586,255,868,918	92.9%
4.2.1	Transfer Umum	528,014,499,932.00	492,307,017,018	93.2%
4.2.2	Transfer Khusus	102,792,279,000.00	93,948,851,900	91.4%
	Jumlah Dana Perimbangan	630,806,778,932	586,255,868,918	92.9%
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	112,873,640,606	97,530,831,711	86.4%
4.3.1	Pendapatan Hibah	22,176,800,000.00	20,114,160,000	90.7%
4.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	35,594,341,606.26	23,302,809,246	65.5%
4.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	54,102,499,000.00	53,113,862,465	98.2%
4.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	1,000,000,000.00	1,000,000,000	100.0%
	Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	112,873,640,606.26	97,530,831,710.64	86.4%
	JUMLAH PENDAPATAN	807,968,037,381.26	749,384,908,279.24	92.7%

Sumber: Qanun PAPBK dan LRA Kota Lhokseumawe Tahun 2018

2.2.2.3. Realisasi Belanja

Realisasi Belanja Kota Lhokseumawe pada Tahun 2018 mencapai 90%. Realisasi Belanja Langsung lebih tinggi mencapai 91% dibandingkan Belanja Tidak Langsung 89%. Untuk mengetahui secara lebih terperinci mengenai perkembangan realisasi belanja dimaksud, dapat dilihat dalam tabel 2.153 dan tabel 2.154 dibawah ini:

Tabel 2.153
Perbandingan Realisasi Belanja Langsung dan Tidak Langsung
RKPK Lhokseumawe Tahun 2018

No	Uraiaan	Proyeksi		Realisasi	
		2018		2018 (semester II)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	449,005,414,969.09	399,988,550,303.00		89%
2.2	BELANJA LANGSUNG	411,996,034,195.72	375,491,482,991.00		91%
	JUMLAH BELANJA	861,001,449,164.81	775,480,033,294.00		90%

Sumber : APBK dan Realisasi Anggaran 2018

Tabel 2.154
Rincian Realisasi Menurut Jenis Belanja RKPK Lhokseumawe
Tahun 2018

No	Uraiaan	Proyeksi		Realisasi	
		2018		2018 (semester II)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	449,005,414,969.09	399,988,550,303.00		89%
	Belanja Pegawai	311,968,531,999.09	281,603,206,480.00		
	Belanja Hibah	9,230,400,000.00	7,607,600,000.00		
	Belanja Bantuan Sosial	17,057,025,528.00	8,159,430,000.00		
	Belanja Bagi Hasil Kepada provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	2,833,621,226.00	973,164,381.00		
	Belanja Bantuan Keuangan Kepada provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	107,415,836,216.00	101,336,724,357.00		
	Belanja Tidak Terduga	500,000,000.00	308,425,085.00		
2.2	BELANJA LANGSUNG	411,996,034,195.72	375,491,482,991.00		91%
	Belanja Pegawai	53,988,785,553.20	49,974,636,110.00		
	Belanja Barang dan Jasa	209,780,345,901.20	182,434,448,725.00		
	Belanja Modal	148,226,902,741.32	143,082,398,156.00		
	JUMLAH BELANJA	861,001,449,164.81	775,480,033,294.00		90%

Sumber: APBK 2018 dan Laporan Realisasi APBK 2018

2.2.2.4. Realisasi Pembiayaan

Pada Tahun 2018 Pemerintah Kota Lhokseumawe belum menganggap perlu atau terpaksa melakukan pencairan dana cadangan, penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta melakukan pinjaman daerah untuk menutup defisit rencana belanja. Oleh karena itu penerimaan pembiayaan Kota Lhokseumawe yang paling mungkin dapat terlaksana pada Tahun 2018 adalah hanya dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (2017). Dari jumlah yang diproyeksikan sebesar Rp.55.333.411.783,55,- yang terealisasi pada Tahun 2018 adalah Rp.55.333.411.783,55,- atau 100%. Jumlah Pengeluaran

Pembiayaan Pemerintah Kota Lhokseumawe adalah sebesar Rp.2.300.000.000,-. Dan tersealisasi sebesar Rp.2.300.000.000,- atau 100% yang dialokasikan untuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah. Untuk mengetahui secara terperinci mengenai realisasi pembiayaan dimaksud, dapat dilihat Tabel 2.155 berikut:

Tabel 2.155
Realisasi Pembiayaan Kota Lhokseumawe Semester II
Tahun 2018

NO	URAIAN	ANGGARAN TAHUN 2018	REALISASI SEMESTER II
1	PEMBIAYAAN		
1.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	55.333.411.783,55	55.333.411.782,55
1.1.1	Penggunaan SILPA	55.333.411.783,55	55.333.411.782,55
	Jumlah Penerimaan	55.333.411.783,55	55.333.411.782,55
1.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	2.300.000.000	2.300.000.000
1.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-
1.2.2	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	2.300.000.000	2.300.000.000
	Jumlah Pengeluaran	2.300.000.000	2.300.000.000
	PEMBIAYAAN NETTO	53.033.411.783,55	53.033.411.782,55
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0	26.938.286.867,79

Sumber: Qanun PAPBK dan LRA Kota Lhokseumawe Tahun 2018

2.2.3. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Setiap pelaksanaan program dan kegiatan akan dilakukan evaluasi untuk memperoleh informasi terkait kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan.

2.2.3.1. Metode Evaluasi

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Tujuan evaluasi hasil RKPK adalah untuk memastikan dan menilai bahwa target program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPK dapat dicapai dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan jangka menengah daerah dan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan tahunan nasional.

Evaluasi hasil RKPK dilaksanakan setiap triwulan oleh Kepala Bappeda dengan menggunakan hasil evaluasi Renja SKPK. Sehubungan dengan hal tersebut, Kepala SKPK wajib melaksanakan evaluasi hasil Renja SKPK setiap triwulan berdasarkan realisasi DPA SKPK.

1. Evaluasi Hasil Renja SKPK

- a. Tujuan evaluasi hasil Renja SKPK adalah untuk menilai tingkat capaian target kinerja dan daya serap anggaran program/ kegiatan berdasarkan realisasi DPA-SKPK.
- b. Formulir evaluasi hasil renja SKPK provinsi / kabupaten / kota dapat dilihat pada lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 berikut dengan petunjuk pengisiannya.

Catatan yang perlu digaris bawahi dalam Evaluasi Hasil Renja SKPK adalah:

- a. Dalam hal hasil evaluasi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan atas pelaksanaan Renja SKPK pada triwulan I dan triwulan II, Bappeda provinsi/kabupaten/kota menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan Renja SKPK untuk ditindaklanjuti oleh Kepala SKPK dengan melakukan perubahan Renja SKPK.
- b. Dalam hal dilakukan perubahan Renja SKPK, data dan informasi pada Target Kinerja dan Anggaran SKPK Tahun Berjalan Yang dievaluasi (Kolom (7) disesuaikan dengan data dan informasi yang tercantum perubahan Renja SKPK.

Kepala SKPK menyampaikan evaluasi hasil Renja SKPK kepada Kepala Daerah melalui Kepala Bappeda setiap triwulan. Laporan Evaluasi hasil Renja SKPK sekurang-kurangnya memuat uraian singkat tentang :

- a. Pendahuluan, terdiri dari tujuan, sasaran, program, Indikator kinerja dan kelompok sasaran dan kegiatan yang tercantum dalam Renja SKPK;
 - b. Perbandingan antara program/kegiatan dalam Renja SKPK dan Renstra SKPK;
 - c. Target maupun capaian kinerja dan realisasi anggaran program/kegiatan yang tercantum dalam Renja SKPK;
 - d. Kendala yang dihadapi dan saran tindak lanjut; dan
 - e. Lampiran: Formulir Evaluasi Hasil Renja SKPK Provinsi/Kabupaten/Kota.
2. Evaluasi Hasil RKPK
- a. Bappeda melakukan Evaluasi Hasil RKPK setiap triwulan berdasarkan Hasil Evaluasi Renja SKPK yang dilaporkan/disampaikan Kepala SKPK.
 - b. Evaluasi Hasil RKPK selanjutnya digunakan untuk penyusunan Perubahan RKPK Tahun Berjalan atau RKPK Tahun berikutnya.
 - c. Formulir Evaluasi Hasil RKPK Provinsi/Kabupaten/Kota adalah seperti dapat dilihat pada tabel II.1 yang menyerupai Formulir Evaluasi Hasil Renja. Untuk lebih jelas mengenai mekanisme pengisian Evaluasi Hasil RKPK Provinsi/Kabupaten/Kota, dapat dilihat sebagai berikut:

Baris rata-rata capaian kinerja (%) diisi dengan rata-rata capaian kinerja (K) dan penyerapan anggaran (Rp) setiap program, dengan menjumlahkan persentase realisasi kinerja dan anggaran yang dicapai seluruh kegiatan dibagi dengan jumlah kegiatan dalam program dimaksud.

Baris predikat kinerja diisi dengan gradasi nilai (skala intensitas) berdasarkan kinerja yang dicapai pada baris rata-rata capaian kinerja dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana dijelaskan dalam tabel 2.156 dibawah ini:

Tabel 2.156
Skala Penilaian Kinerja Program dan Kegiatan

No.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1.	91% ≤ 100%	Sangat tinggi
2.	76% ≤ 90%	Tinggi
3.	66% ≤ 75%	Sedang
4.	51% ≤ 65%	Rendah
5.	≤ 50%	Sangat Rendah

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

(1) hasil sangat tinggi dan tinggi

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

(2) hasil sedang

Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.

(3) hasil rendah dan sangat rendah

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

Khusus untuk evaluasi hingga Triwulan ke II, nilai capaian kinerja K dan Rp. Harus dikalikan 2 terlebih dahulu sebelum melihat skala penilaian kinerja, Catatan :

1. Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan atas pelaksanaan RKPK pada triwulan I dan triwulan II, Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan RKPK untuk ditindaklanjuti oleh Kepala Bappeda provinsi/kabupaten/kota dengan melakukan perubahan RKPK.
2. Dalam hal dilakukan perubahan RKPK, data dan informasi pada Kolom (7) disesuaikan dengan data dan informasi yang tercantum dalam perubahan RKPK.

Setelah Formulir Evaluasi Hasil RKPK diisi, maka diketahuilah tingkat capaian kinerja untuk masing-masing program, masing-masing urusan maupun masing-masing SKPK.

2.2.3.2. Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi dapat diperoleh dengan melihat capaian anggaran dan capaian kinerja program dan kegiatan

2.2.3.2.1. Capaian Anggaran

Target anggaran RPJM Tahun 2017-2022 berdasarkan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Lhokseumawe adalah sebesar Rp. 4.039.510.417.003,- dengan tingkat realisasi sampai dengan tahun 2018 sebesar 19,2% dengan kriteria nilai SR (sangat rendah). Kriteria sangat rendah dikarenakan pelaksanaan anggaran masih dalam tahap pertama RPJMK Tahun 2017-2022.

Ditinjau dari kinerja yang dicapai dari hasil pelaksanaan RKPK Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Rata-rata tingkat capaian realisasi anggaran program/ kegiatan mencapai 89,6% dengan predikat capaian T (Tinggi).
2. Urusan yang memiliki rata-rata capaian predikat kinerja kategori ST (sangat tinggi) pada **Urusan Pemerintahan Pilihan** yang terdiri dari bidang urusan kelautan dan perikanan; bidang urusan pariwisata; bidang urusan pertanian; bidang urusan kehutanan; bidang urusan perdagangan; bidang urusan perindustrian serta pada **Urusan Penunjang Urusan Pemerintah** yang terdiri dari bidang urusan administrasi pemerintahan; bidang urusan pengawasan; bidang urusan perencanaan; bidang urusan keuangan; bidang urusan kepegawaian dan bidang urusan keistimewaan dan kekhususan.
3. Sedangkan urusan yang memiliki nilai rendah yaitu dengan rata-rata capaian predikat kinerja kategori S (sedang) pada **Urusan Pemerintah Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar** yang terdiri dari bidang urusan pendidikan; bidang urusan kesehatan; bidang urusan pekerjaan umum dan penataan ruang; bidang perumahan rakyat dan kawasan

permukiman; bidang urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat; dan bidang urusan sosial untuk lebih jelas dapat dilihat Tabel 2.157 berikut ini:

Tabel.2.157
Tingkat Capaian Realisasi RKPK Tahun 2018
Menurut Urusan/Bidang Urusan Pemerintah

No	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2022 (RPJMK)	Target Kinerja dan Anggaran RKPK Tahun 2018 yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPK yang Dievaluasi (2018)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 2018 (%)		Predikat Capaian Kinerja RKPK 2018 (ST/T/S /SR)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMK S/D Tahun 2018 (%)	
		Rp	Rp	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6		7		8	
I URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
I.1	Pendidikan	173.098.209.365	45.565.000.041	23.825.497.160	9,9%	74,1%	SR	S	3,3%	34,7%
I.2	Kesehatan	102.843.555.248	53.640.459.120	32.853.824.722	54,4%	48,6%	R	SR	4993%	9046%
I.3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	381.477.708.645	80.923.806.895	76.681.502.156	70,4%	82,6%	S	T	372670 %	2609%
I.4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	184.908.783.514	47.052.124.221	41.713.595.619	11,1%	12,1%	SR	SR	231345 %	1283%
I.5	Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	28.790.695.485	7.354.842.901	7.018.283.084	99,9%	100,4 %	ST	ST	22%	19%
I.6	Sosial	28.769.840.971	6.345.960.244	5.576.988.710	66,8%	76,2%	S	T	2362%	1220%
II URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
II.1	Tenaga Kerja	7.090.803.490	1.732.405.960	1.660.481.547	99,3%	96,7%	ST	ST	39%	18%
II.2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5.084.978.894	1.011.016.725	982.077.481	100,0 %	111,9 %	ST	ST	49%	34%
II.3	Pangan	7.668.028.068	1.098.188.400	983.643.202	45,0%	88,2%	SR	T	16%	9%
II.5	Lingkungan Hidup	170.126.946.170	27.926.522.208	27.669.975.018	97,4%	94,7%	ST	ST	42%	12%
II.6	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	6.862.746.618	1.784.549.500	1.701.051.024	98,3%	93,0%	ST	ST	25%	23%
II.7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	6.845.086.788	1.678.603.147	1.655.270.619	100,0 %	97,4%	ST	ST	1856%	1897%
II.8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	13.117.236.201	2.363.202.800	1.894.890.340	46,9%	89,3%	SR	T	29%	17%
II.9	Perhubungan	16.013.542.075	2.753.710.400	2.499.915.905	68,1%	73,3%	S	S	31%	17%
II.10	Komunikasi dan Informatika	10.794.071.481	2.410.156.180	2.318.126.390	94,9%	98,1%	ST	ST	16095%	2087%
II.11	Koperasi dan UKM	4.376.232.808	1.849.679.608	1.471.891.900	90,0%	68,6%	T	S	19%	97%
II.12	Penanaman Modal	1.422.024.092	571.814.092	551.816.497	100,0 %	98,7%	ST	ST	8%	111%
II.13	Keperguruan dan Olahraga	7.552.035.196	1.595.255.820	3.657.523.756	54,5%	90,1%	R	T	2142%	1591%
II.14	Statistik	516.850.000	96.850.000	42.000.000	66,7%	66,7%	S	S	1133%	1652%
II.16	Kebudayaan	2.930.748.357	1.328.477.800	1.215.478.700	30,0%	47,0%	SR	SR	2833%	3257%
II.17	Perpustakaan	2.690.721.998	511.122.630	470.458.796	97,5%	99,3%	ST	ST	2265%	2462%
III URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN										

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2022 (RPJMK)	Target Kinerja dan Anggaran RKPK Tahun 2018 yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPK yang Dievaluasi (2018)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 2018 (%)		Predikat Capaian Kinerja RKPK 2018 (ST/T/S/SR)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMK S/D Tahun 2018 (%)	
		Rp	Rp	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6		7		8	
III.1	Kelautan dan Perikanan	26.505.053.428	6.938.344.981	4.033.357.810	40,5%	111,1 %	SR	ST	2890%	24270 6%
III.2	Pariwisata	1.670.106.768	219.991.000	374.622.000	100,0 %	342,5 %	ST	ST	2188%	26873 %
III.3	Pertanian	41.728.787.637	3.317.413.046	1.994.219.900	59,5%	48,5%	R	SR	8804%	1571%
III.4	Kehutanan	-	-	-	0,0%	0,0%	SR	SR	0%	0%
III.6	Perdagangan	33.796.129.556	1.576.000.000	642.880.125	100,0 %	84,0%	ST	T	2533%	5018%
III.7	Perindustrian	4.317.044.052	428.616.600	416.354.599	100,0 %	98,8%	ST	ST	5000%	99%
IV URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH										
IV.1	Administrasi Pemerintah	243.099.055.182	59.697.908.162	56.694.457.546	76,1%	82,7%	T	T	1291%	1155%
IV.2	Pengawasan	9.823.235.506	1.802.792.820	2.398.382.186	90,4%	106,7 %	ST	ST	547293 %	1993%
IV.3	Perencanaan	18.623.234.377	4.820.410.688	4.072.561.037	97,7%	81,3%	ST	T	4815%	3494%
IV.4	Keuangan	43.808.470.516	10.161.481.787	9.014.118.835	97,3%	92,8%	ST	ST	2970%	2650%
IV.5	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	7.729.167.805	2.177.396.415	1.775.287.776	81,5%	85,0%	ST	ST	3726%	6704%
IV.6	Keistimewaan dan Kekhususan	100.834.349.217	19.188.572.699	22.101.139.776	86,3%	96,9%	T	ST	1698%	1272%
	Jumlah	1.694.915.479.508	399.922.676.89							
	Rata-Rata				71,5%	89,6%				
	Predikat						S	T		

Ket :

ST = (Sangat Tinggi / 91% ≤ 100%)

T = (Tinggi / 76% ≤ 90%)

S = (Sedang / 66% ≤ 75%)

R = (Rendah / 51% ≤ 65%)

SR = (Sangat Rendah / ≤ 50%)

2.2.3.2.2. Capaian Kinerja

Berdasarkan hasil penilaian kinerja di atas, yang diperoleh dari hasil evaluasi yang dilakukan terhadap seluruh SKPK sesuai dengan bidang urusan berdasarkan realisasi program kegiatan yang dilakukan dalam kurun waktu Januari sampai dengan Desember Tahun 2018 Semester II, untuk lebih jelas hasil evaluasi yang telah dilakukan dapat dilihat pada tabel 2.158 berikut ini:

Tabel 2.158
Evaluasi Terhadap Hasil RKP
Kota Lhokseumawe
Tahun 2018

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) dan satuannya	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2022 (PRJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d 4 RKP Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKP Tahun 2018 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja Pada Semester		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang Dievaluasi (2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKP)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket													
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	Semester I		Semester II		11=9+10		12= 11/8		13 = 7+11				14=13/6*100%												
					6		7		8		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	15	16									
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																																			
I.1		01		Bidang Urusan : Pendidikan																		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan													
I.1.1		01	01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		173,098,209,365			45,565,000,041		8,676,396,875		15,149,100,585		23,825,497,160							Dinas Pendidikan dan Kebudayaan													
Meningkatnya pendidikan dasar yang berkualitas	1	01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	100	34,491,090,941		100	8,504,713,897	50	4,592,679,519		2,989,823,073	50	7,582,202,592	50.0%	89.2%	50	7,582,202,592	50.0%	22.0%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan												
	1	01	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Periode penyediaan benda pos dan paket pengiriman	Bln	60	14,100,000	12	2,220,000	6	-	2,220,000	6	2,220,000	50.0%	100.0%	6	2,220,000	10.0%	15.7%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan												
	1	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Periode penyediaan penerangan dan alat-alat komunikasi	bln	60	1,860,441,480	12	360,888,296	6	37,700,724	73,815,300	6	111,516,024	50.0%	31.0%	6	111,516,024	10.0%	6.0%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan												
	1	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola keuangan SKPD	OB	10446	1,744,047,375	2088	348,843,875	1044	122,763,875	163,960,000	1,044	286,723,875	50.0%	82.2%	1,044	286,723,875	10.0%	16.4%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan												
	1	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Periode tersedianya Alat Tulis Kantor	Bln	60	238,791,030	12	47,883,806	-	-	47,880,000	-	47,880,000	0.0%	100.0%	-	47,880,000	0.0%	20.1%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan												
	1	01	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Periode Penyediaan Bahan Cetak dan Foto copy	Bln	60	220,750,000	12	44,150,000	6	-	36,848,273	6	36,848,273	50.0%	83.5%	6	36,848,273	10.0%	16.7%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan												
	1	01	01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Periode peralatan dan perlengkapan kantor	Bln	60	90,000,000	12	18,000,000	-	-	17,993,000	-	17,993,000	0.0%	100.0%	-	17,993,000	0.0%	20.0%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan												
	1	01	01	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan ke luar Daerah	Periode Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan ke luar Daerah	Bln	60	689,885,136	12	180,000,000	6	54,937,000	124,196,500	6	179,133,500	50.0%	99.5%	6	179,133,500	10.0%	26.0%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan												
	1	01	01	20	Penyediaan jasa Pegawai tidak Tetap	Jumlah tenaga kerja tidak Tetap	org	110208	29,633,075,920	2181	7,503,527,920	4,377,277,920	2,522,610,000	-	6,899,887,920	0.0%	92.0%	-	6,899,887,920	0.0%	23.3%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan													
Rata-rata capaian kinerja (%)															31.3%	86.0%																			
Predikat Kinerja															SR	T																			
Meningkatnya pendidikan dasar yang berkualitas	1	01	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	100	1,670,278,500		100	636,979,000	50	300,049,800		330,953,700	50	631,003,500	50.0%	98.6%	50	629,624,500	50.0%	31.7%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan												
	1	01	02	10	Pengadaan meubelur	Jumlah pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis			100,000,000				99,529,000	-	99,529,000	0.0%	99.5%	-	99,529,000	0.0%	0.0%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan												
	1	01	02	11	Pengadaan Peralatan dan perlengkapan kantor (Mobilier, Komputer, dll)	Jumlah pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis	36	489,099,000	105	86,400,000	84,000,000	1,850,000	-	85,850,000	0.0%	99.4%	-	85,850,000	0.0%	17.6%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan													
	1	01	02	23	Pemeliharaan Rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah Mobil Jabatan yang Terpelihara	UB	60	175,000,000	1	35,000,000	1	7,893,000	25,303,200	1	33,196,200	100.0%	94.8%	1	33,196,200	1.7%	19.0%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan												
	1	01	02	24	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Terpeliharanya kendaraan dinas	Unit	60	90,920,500	3	18,200,000	3	4,227,800	12,763,500	3	16,991,300	100.0%	93.4%	3	16,991,300	5.0%	18.7%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan												
	1	01	02	30	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Mobilier, komputer dll)	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Terpelihara	Unit	60	121,050,000	52	24,050,000	52	11,800,000	12,000,000	52	23,800,000	100.0%	99.0%	52	23,800,000	86.7%	19.7%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan												
	1	01	02	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman, Tempat parkir dan halaman kantor	Jumlah Pengadaan Tanah Timbun dan Paving Blok di Lingkungan Dinas Pendidikan	Unit	20	280,359,000	4	121,959,000				-	121,959,000	0.0%	100.0%	-	121,959,000	0.0%	43.5%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan												
	1	01	02	42	Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor Yang direhabilitasi sedang/berat	Unit	5	155,000,000	1	180,000,000	-	-	179,508,000	-	179,508,000	0.0%	99.7%	-	179,508,000	0.0%	115.8%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan												
	1	01	02	45	Pembangunan Fasilitas Gedung Kantor	Tersedianya Fasilitas Kantor	Keg	5	358,850,000	1	71,370,000				-	70,170,000	0.0%	98.3%	-	70,170,000	0.0%	19.6%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan												
Rata-rata capaian kinerja (%)															37.5%	98.0%																			
Predikat Kinerja															SR	ST																			
Meningkatnya pendidikan dasar yang berkualitas	1	01	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur	100	215,000,000		100	87,125,000	0	-		45,000,000	-	45,000,000	0.0%	78.8%	-	45,000,000	0.0%	20.9%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan												
	1	01	03	06	Penyediaan Sewa Gedung/ Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang di sewa	Gedung	7	215,000,000	1	57,125,000	-	-	45,000,000	-	45,000,000	0.0%	78.8%	-	45,000,000	0.0%	20.9%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan												
Rata-rata capaian kinerja (%)															0.0%	78.8%																			
Predikat Kinerja															SR	T																			
Meningkatnya pendidikan dasar yang berkualitas	1	01	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan Kualitas SDM Aparatur	100	134,350,000		100	29,350,000	-	-		24,950,000	-	24,950,000	0.0%	0.0%	0	-	0.0%	0.0%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan												
	1	01	05	25	Penetapan Angka Kredit	Tercapainya Angka Kredit	Peg	2020	134,350,000	700	29,350,000	-	-	24,950,000	-	24,950,000	0.0%	0.0%	0	-	0.0%	0.0%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan												
Rata-rata capaian kinerja (%)															0.0%	0.0%																			
Predikat Kinerja															SR	T																			

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) dan satuannya	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2022 (PRPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja Pada Semester				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		Pemangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	Semester I		Semester II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
											K	Rp	K	Rp												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11-9-10	12-11/8	13-7+11	14-13/6/100%	15	16											
		1 01 16 86	Pengadaan Alat praktik dan peraga siswa (DAK)	Jumlah sekolah yang diadakan Alat Praktis dan Peraga Siswa	Sekolah		0	53,340,000,00	0	-	50,236,800	-	50,236,800	0.0%	94.2%	-	50,236,800	0.0%	0.0%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan						
		1 01 16 93	Penyenggaraan UN dan UAS	Jumlah Sekolah yang menyelenggarakan UN dan UAS Tingkat SD/MI dan SMP/MTs	hari	10	533,075,000	2	60,000,000	0	-	60,000,000	-	60,000,000	0.0%	100.0%	-	60,000,000	0.0%	11.3%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan					
		1 01 16 94	Rehabilitasi sedang/berat ruang sekolah (DAK)	Jumlah ruang sekolah yang di Rehab Sdang/berat	Ruang	17	6,046,475,000	8	1,405,050,000	4	297,545,000	1,106,204,000	4	1,403,749,000	50.0%	99.9%	4	1,403,749,000	23.5%	23.2%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan					
		1 01 16 96	Pengadaan Buku Perpustakaan Sekolah (DAK)	Jumlah sekolah yang mendapatkan buku perpustakaan sekolah	sekolah		8	700,000,000	-	-	689,934,000	-	689,934,000	0.0%	98.6%	-	689,934,000	0.0%	0.0%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan						
		1 01 16 97	Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)	Jumlah Hari Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)	Hari	15	22,500,000	3	4,500,000	0	-	4,500,000	-	4,500,000	0.0%	100.0%	-	4,500,000	0.0%	20.0%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan					
		1 01 16 109	Pembangunan Pagar dan Sarana Pendukung	Jumlah Sekolah yang dibangun Pagar dan Sarana Pendukung	sekolah	6	4,039,934,800	1	678,134,800	1	488,134,800	189,516,000	1	677,650,800	100.0%	99.9%	1	677,650,800	16.7%	16.8%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan					
		1 01 16 117	Pemeliharaan Rutin/Berkala Pagar dan Pembatas Lingkungan Sekolah	Jumlah sekolah yang pagarnya dipelihara	Paket	12	1,502,137,400	1	20,687,400	1	20,687,400	-	1	20,687,400	100.0%	100.0%	1	20,687,400	8.3%	1.4%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan					
		1 01 16 118	Pembangunan RKB (DAK)	Jumlah RKB yang dibangun	ruang	18	6,604,500,000	6	2,236,395,000	3	595,434,000	1,639,471,000	3	2,234,905,000	50.0%	99.9%	3	2,234,905,000	16.7%	33.8%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan					
		1 01 16 119	Pelaksanaan Belajar Mengajar Ekstra Kurikuler				63,760,000		0	23,760,000	-	23,760,000	-	23,760,000	0.0%	100.0%	-	23,760,000	0.0%	37.3%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan					
		1 01 16 122	Rehabilitasi ruang Perpustakaan SD/SMP (DAK)	Jumlah ruang yang direhab	Ruang				415,387,500	-	91,832,500		323,237,500	-	415,070,000	0.0%	99.9%	-	415,070,000	0.0%	0.0%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				
		1 01 16 123	Rehabilitasi ruang Guru SD/SMP (DAK)	Jumlah ruang yang direhab	ruang				377,502,500	-	195,666,556		181,834,668	-	377,501,224	0.0%	100.0%	-	377,501,224	0.0%	0.0%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				
		1 01 16 124	Rehabilitasi Sdang/berat ruang UKS Sekolah (DAK)	Jumlah ruang yang direhab	ruang				39,900,000	-		39,900,000	-	39,900,000	0.0%	100.0%	-	39,900,000	0.0%	0.0%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan					
		1 01 16 125	Rehabilitasi Sdang/berat ruang Kepala Sekolah SD/SMP (DAK)	Jumlah ruang yang direhab	ruang				79,800,000	-		79,800,000	-	79,800,000	0.0%	100.0%	-	79,800,000	0.0%	0.0%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan					
		1 01 16 126	Rehabilitasi Sdang/berat Laboratorium IPA SD/SMP (DAK)	Jumlah ruang yang direhab	ruang				149,625,000	-		149,625,000	-	149,625,000	0.0%	100.0%	-	149,625,000	0.0%	0.0%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan					
		1 01 16 127	Pengadaan Sarana PJOJK dan / Atau Seni Budaya (DAK)	Jumlah pengadaan Sarana PJOJK	Paket	8	200,000,000		120,000,000	-	-	119,622,000	-	119,622,000	0.0%	99.7%	-	119,622,000	0.0%	59.8%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan					
		1 01 16 129	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS SD)	Jumlah sekolah SD yang menerima dana BOS	sekolah	290	66,316,000,000		13,263,200,000	-	-		-		0.0%	0.0%	-		0.0%	0.0%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan					
		1 01 16 130	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS SMP)	Jumlah sekolah SMP yang menerima dana BOS	sekolah	18*5	36,995,000,000		7,399,000,000	-	-		-		0.0%	0.0%	-		0.0%	0.0%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan					
		1 01 16 131	Pengadaan Media Pendidikan TIK (DAK)	Jumlah sekolah yang menerima media pendidikan	Sekolah	5	150,000,000		150,000,000	-	-	150,000,000	-	150,000,000	0.0%	100.0%	-	150,000,000	0.0%	100.0%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan					
		1 01 16 132	Pengadaan Alat Laboratorium Komputer (DAK)	Jumlah sekolah yang menerima Alat Laboratorium Komputer	Sekolah	3	822,405,000		270,000,000	-	-	269,633,900	-	269,633,900	0.0%	99.9%	-	269,633,900	0.0%	32.8%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan					
Rata-rata capaian kinerja (%)																29.8%	91.5%			12.1%	36.9%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				
Predikat Kinerja																SR	ST			SR	SR	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				
Meningkatnya pendidikan dasar yang berkualitas	1 01 17		Program Pendidikan Menengah	Terlaksananya Program Pendidikan Menengah		100	995,911,400		100	802,036,400	50	565,911,400	50	235,679,000	80	801,590,400	80.0%	99.9%	50	801,590,400	50.0%	80.5%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			
	1 01 17 09		Pembangunan Taman Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir	Jumlah Sekolah yang dibangun taman, lapangan upacara dan tempat parkir	sekolah	1	605,434,600		1	460,309,600		455,434,600		4,875,000	-	460,309,600	0.0%	100.0%	-	460,309,600	0.0%	76.0%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			
	1 01 17 14		Pembangunan Sarana Air bersih dan Sanitary	Jumlah Sekolah yang dibangun Sarana air bersih	sekolah	1	50,000,000			1,250,000		-		1,250,000	-	1,250,000	0.0%	100.0%	-	1,250,000	0.0%	2.5%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			
	1 01 17 15		Pengadaan Buku-buku dan Alat Tulis Siswa	Tersedianya Buku Pelajaran	Paket	2	43,380,000		1	43,380,000		43,380,000		-	-	43,380,000	0.0%	100.0%	-	43,380,000	0.0%	100.0%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			
	1 01 17 20		Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Sekolah	unit		17,805,000		-	17,805,000		17,805,000		-	-	17,805,000	0.0%	100.0%	-	17,805,000	0.0%	100.0%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			
	1 01 17 30		Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir	Jumlah sekolah yang melaksanakan pemeliharaan rutin	Sekolah		200,000,000		-	200,000,000		-		199,554,000	-	199,554,000	0.0%	99.8%	-	199,554,000	0.0%	99.8%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			
	1 01 17 72		Pembangunan Pagar dan sarana pendukung	Adanya Pagar dan sarana pendukung	Keg	2	49,291,800		1	49,291,800		49,291,800		-	-	49,291,800	0.0%	100.0%	-	49,291,800	0.0%	100.0%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			
	1 01 17 137		Pembangunan Pos Keamanan Sekolah	Jumlah sekolah yang dibangun Pos Keamanan Sekolah	sekolah		30,000,000			30,000,000		-		30,000,000	-	30,000,000	0.0%	100.0%	-	30,000,000	0.0%	100.0%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			
Rata-rata capaian kinerja (%)																0.0%	100.0%			0.0%	82.6%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				
Predikat Kinerja																SR	ST			SR	T	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				
Meningkatnya pendidikan dasar yang berkualitas	1 01 22		Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Terlaksananya Program Manajemen Pelayanan Pendidikan		100	25,000,000		100	75,000,000		-		75,000,000	-	75,000,000	0.0%	0.0%	-	-	0.0%	0.0%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			
	1 01 22 17		Pelatihan Penyusunan Rencana Kerja Sekolah (RKS)	Jumlah Peserta Pelatihan	Peserta	50	25,000,000			25,000,000		-		25,000,000	-	25,000,000	0.0%	100.0%	-	25,000,000	0.0%	100.0%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) dan satuannya	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2022 (PRPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja Pada Semester				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/4 Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD S/D Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah/ Penanggung Jawab	Ket		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	Semester I		Semester II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
											K	Rp	K	Rp												
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11-9/10	12-11/8	13-11/8	14-13/6/100%	15	16						
Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	02	01	15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Cakupan pelayanan obat dan perbekalan kesehatan	4	11.355.293,993	1	5.754.529,343	4	2.179.970,988		9.786,150		1.634.912,770	-	1.644.698,920	0.0%	75.4%	1	7.399.228,263	25%	64.0%	Dinas Kesehatan		
					Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan (DAK)	Bulan	60	10.953.293,503	48	5.754.529,343	12	1.727.698,488	6	9.786,150		1.297.596,570	6	1.307.382,720	50.0%	75.7%	54	7.061.912,063	90%	64.5%	Dinas Kesehatan	
					Pelatihan petugas pengelola obat Puskesmas dan jaringannya (DBH-PR)	Org	2	65.000,000	-	-	1	32.500,000	0	-	-	-	-	-	0.0%	0.0%	-	-	0%	0.0%	Dinas Kesehatan	
					Penanggulangan obat rusak dan expired date (DBH-PR)	Kali	60	156.000,000	-	-	30	78.000,000	-	-	-	-	-	-	0.0%	0.0%	-	-	0%	0.0%	Dinas Kesehatan	
					Pemeliharaan, Kalibrasi dan Uji Fungsi Kelayakan Operasional Alkes	Kali	60	381.000,000	-	-	30	190.500,000	-	30	186.657,000	30	186.657,000	100.0%	98.0%	30	186.657,000	50%	49.0%	Dinas Kesehatan		
					Pengadaan Pendukung Instalasi Farmasi Kesehatan (DAK)	Jenis					2	151.312,000		2	151.312,000	2	151.312,000	100.0%	99.6%	2	150.659,200	0%	0.0%	Dinas Kesehatan		
					Rata-rata capaian kinerja (%)														50.0%	54.6%					28.0%	22.7%
Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	02	01	16	Program upaya kesehatan masyarakat	Jumlah Puskesmas yang terakreditasi	4	17.573.353,028	1	56.159.532,658	4	29.883.889,325	5	2.545.314,524		15.026.930,138	5	17.572.244,662	125.0%	59.4%	6	73.731.777,320	150%	419.6%	Dinas Kesehatan		
					Pelayanan kesehatan penduduk miskin di Puskesmas dan jaringannya	Bulan	60	2.233.931,994	48	28.079.766,329	12	18.345.355,930	6	2.231.623,274	6	12.740.236,943	12	14.971.860,217	100.0%	81.6%	60	43.051.626,546	100%	1927.2%	Dinas Kesehatan	
					Pelatihan Penanggulangan Krisis Kesehatan Akibat Bencana (DBH-PR)	Peserta	2	45.995,040	-	-	1	22.997,520	-	-	-	-	-	-	0.0%	0.0%	-	-	0%	0.0%	Dinas Kesehatan	
					Peringatan dan perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas dan jaringannya	bulan	2	242.076,000	-	-	1	121.038,000	1	121.038,000	1	121.038,000	100.0%	100.0%	1	121.038,000	50%	50.0%	Dinas Kesehatan			
					Pemeliharaan dan pemuliharaan kesehatan (Jampersa) (DAK NON FISIK)	bulan	2	3.051.214,000	-	-	1	1.525.607,000	-	1	9.093,700	1	9.093,700	100.0%	0.6%	1	9.093,700	50%	0.3%	Dinas Kesehatan		
					Akreditasi Puskesmas (DAK NON FISIK)	Puskesmas					2	699.000,000	1	113.771,375	1	360.522,900	2	504.274,275	100.0%	72.1%	2	504.274,275	0%	0.0%	Dinas Kesehatan	
					Akreditasi Rumah Sakit (DAK NON FISIK)	Rumah sakit	60	1.160.540,000	-	-	30	580.270,000	-	-	-	-	-	-	0.0%	0.0%	-	-	0%	0.0%	Dinas Kesehatan	
					Peringatan pengetahuan masyarakat tentang penyakit tidak menular kepada masyarakat (DBH-PR)	Peserta	2	422.500,000	-	-	1	211.250,000	1	211.250,000	1	-	-	-	100.0%	0.0%	1	-	50%	0.0%	Dinas Kesehatan	
					Peringatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan (DBH-PR)	Peserta					2	96.447,000	0	-	1	46.095,595	1	46.095,595	50.0%	47.8%	1	46.095,595	0%	0.0%	Dinas Kesehatan	
					Perforansi Tenaga Kesehatan Tabolan (DBH-PR)	Org					1600	43.606,875	1600	42.891,875	1600	42.891,875	100.0%	98.4%	1.600	42.891,875	0%	0.0%	Dinas Kesehatan			
					Peringatan Kapasitas Pelugas Tentang Penyakit Tidak Menular (DBH-PR)	Org	60	2.233.931,994	48	28.079.766,329	12	178.750,000	0	-	12	110.011,000	12	110.011,000	100.0%	61.5%	60	28.189.777,329	100%	1261.9%	Dinas Kesehatan	
					Pelatihan Basic Trauma Cardiac Live Support (BTCCLS) (DBH-PR)	Org	2	1.600.000,000	-	-	1	800.000,000	-	1	375.000,000	1	375.000,000	100.0%	46.9%	1	375.000,000	50%	23.4%	Dinas Kesehatan		
					Pelatihan Manajemen Puskesmas (DBH-PR)	Org	8	218.400,000	-	-	4	109.200,000	-	4	104.999,900	4	104.999,900	100.0%	96.2%	4	104.999,900	50%	48.1%	Dinas Kesehatan		
					Pembentukan Posbindu PTM (DBH-PR)	Posbindu	24				12	194.500,000	0	-	-	-	-	-	0.0%	0.0%	-	-	0%	0.0%	Dinas Kesehatan	
					Program Indonesia Sehat Melalui Pendidikan Keluarga (PIS-PiK) BOK Puskesmas (DAK NON FISIK)	bulan	60	2.013.460,000	-	-	30	1.006.730,000	-	30	358.800,000	30	356.800,000	100.0%	35.4%	30	356.800,000	50%	17.7%	Dinas Kesehatan		
					Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial BOK Puskesmas (DANA NON FISIK)	bulan	60	624.100,000	-	-	30	312.050,000	15	8.100,000	15	181.320,000	30	189.420,000	100.0%	60.7%	30	189.420,000	50%	30.4%	Dinas Kesehatan	
					Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan dan Upaya Kesehatan Lainnya BOK Puskesmas (DANA NON FISIK)	bulan	2	3.077.204,000	-	-	1	1.538.602,000	1	19.660,000	1	695.972,100	1	715.922,100	100.0%	46.5%	1	715.922,100	50%	23.3%	Dinas Kesehatan	
Peringatan Kapasitas Kader dalam Program Upaya Penanganan Gizi Masyarakat (DBH-PR)	Peserta	2				2	36.400,000	0	-	-	-	-	-	0.0%	0.0%	-	-	0%	0.0%	Dinas Kesehatan						
Penyebarluasan Informasi Gizi Masyarakat (DBH-PR)	Peserta	2	650.000,000	-	-	1	325.000,000	0	-	-	-	-	-	0.0%	0.0%	-	-	0%	0.0%	Dinas Kesehatan						
Peringatan Kapasitas Pelugas dalam Program Upaya Penanganan Gizi Masyarakat (DBH-PR)	Org					1600	325.000,000	800	7.940,000	800	16.868,000	1.600	24.838,000	100.0%	7.6%	1.600	24.838,000	0%	0%	Dinas Kesehatan						
Pelatihan Advance Trauma Life Support (ATLS) (DBH-PR)	Org						600.000,000							0.0%	0.0%	-	-	0%	0%	Dinas Kesehatan						
Pelatihan Kesiagaan Bencana (DBH-PR)	Org						1.000.000,000							0.0%	0.0%	-	-	0%	0%	Dinas Kesehatan						

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) dan satuannya	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2022 (PRPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja Pada Semester				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD S/D Tahun 2018 (%)		Peningkat Daya Penanggung Jawab	Ket			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	Semester I		Semester II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	
											K	Rp	K	Rp													K
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11-9-10	12-11/8	13-7-11	14-13/6/100%	15	16												
		02 01 16 132	Pelatihan Penanggulangan Kegawatdaruratan pada UGD (DBH-PR)	Jumlah Peserta Pelatihan Penanggulangan Kegawatdaruratan pada UGD	Org		900,000,000									0.0%	0.0%			0%	0%			Dinas Kesehatan			
		02 01 16 133	Pelatihan Jabatan Fungsional (DBH-PR)	Jumlah Peserta Pelatihan Jabatan Fungsional	Org		612,085,000									0.0%	0.0%			0%	0%			Dinas Kesehatan			
											Rata-rata capaian kinerja (%)		58.7%	32.8%			26.1%	147.1%	Dinas Kesehatan								
											Predikat Kinerja		R	SR			SR	ST	Dinas Kesehatan								
		02 01 17	Program pengawasan obat dan makanan	Persentase Kecamatan/ desa sehat		7	17,480,000	5	7,200,000	7	243,750,000	0				0.0%	0.0%	5	7,200,000	71%	41.2%			Dinas Kesehatan			
		02 01 17 21	Gerakan Masyarakat Seder (DBH-PR)	Periode pelaksanaan gerakan masyarakat seder obat	kali	15	17,480,000	9	7,200,000	6	243,750,000	0				0.0%	0.0%	9	7,200,000	60%	41.2%			Dinas Kesehatan			
											Rata-rata capaian kinerja (%)		0.0%	0.0%			60.0%	41.2%	Dinas Kesehatan								
											Predikat Kinerja		SR	SR			R	SR	Dinas Kesehatan								
		02 01 19	Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	Jumlah Kecamatan yang melaksanakan minimal 5 tema kampanye Gerakan Masyarakat (GERMAS) Hidup Sehat		1	1,231,251,500	0		1	616,625,750		64,650,000		458,228,700		520,879,700	0.0%	84.5%		520,879,700	0%	42.3%		Dinas Kesehatan		
		02 01 19 44	Pelatihan konselor sebaya dalam peningkatan kesehatan reproduksi (DBH-PR)	Jumlah peserta pelatihan konselor sebaya dalam peningkatan kesehatan reproduksi	Orang	180	84,526,000			90	42,263,000					0.0%	0.0%			0%	0.0%			Dinas Kesehatan			
		02 01 19 52	Peningkatan Pengetahuan tentang bahaya penyalahgunaan narkoba di institusi menengah atas (DBH-PR)	Jumlah peserta peningkatan pengetahuan tentang bahaya penyalahgunaan narkoba di institusi menengah atas	Orang	180	198,653,000			90	99,326,500		90	50,337,000	90	92,337,000	100.0%	93.0%	90	92,337,000	50%	46.5%			Dinas Kesehatan		
		02 01 19 53	Pengadain Media Promosi Kesehatan (DBH-PR)	Jumlah pengadain media promosi kesehatan	Jenis	100	390,000,000			50	195,000,000	15	64,650,000	15	126,160,000	30	193,810,000	60.0%	99.4%	30	193,810,000	30%	49.7%			Dinas Kesehatan	
		02 01 19 54	Hari Kesehatan Nasional (HKN) (DBH-PR)	Jumlah peserta peringatan hari kesehatan nasional	Org	100	196,072,500			50	98,036,250		50	56,017,700	50	95,017,700	100.0%	96.9%	50	95,017,700	50%	48.5%			Dinas Kesehatan		
		02 01 19 60	Advokasi Lintas Sektor untuk mendukung gerakan masyarakat hidup sehat (GEMAS) (DBH-PR)	Periode Advokasi Lintas Sektor untuk mendukung gerakan masyarakat hidup sehat	kali	200	364,000,000			100	182,000,000		100	139,715,000	100	139,715,000	100.0%	76.8%	100	139,715,000	50%	38.4%			Dinas Kesehatan		
											Rata-rata capaian kinerja (%)		72.0%	73.2%			38.0%	38.6%	Dinas Kesehatan								
											Predikat Kinerja		S	S			SR	SR	Dinas Kesehatan								
		02 01 20	Program perbaikan gizi masyarakat	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan		4	2,343,458,000	3	2,520,425,000	4	1,451,104,000		153,361,000		894,646,500		940,007,500	0.0%	64.8%	3	3,460,432,500	75%	154.2%		Dinas Kesehatan		
		02 01 20 02	Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin	Jumlah Puskesmas yang Memberikan Tambahan Makanan dan Vitamin	Puskesmas	500	1,754,000,000	400	1,754,000,000	100	72,123,800	100	72,123,800	100	72,123,800	100	72,123,800	100.0%	100.0%	500	1,826,123,800	100%	104.1%			Dinas Kesehatan	
		02 01 20 03	Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP) / Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya	Jumlah kasus status gizi balita	Kasus	30	118,900,000	55	233,356,000	25	36,222,500	25	36,222,500	25	36,222,500	25	36,222,500	100.0%	100.0%	80	269,577,500	267%	226.7%			Dinas Kesehatan	
		02 01 20 15	Pemberian Tambahan Makanan (BMT) Posyandu (DBH-PR)	Jumlah bertanggung jawab KEM dan Anemia pada ibu hamil	Posyandu	30	43,975,000	31	266,536,000	20	198,000,000	10	27,014,700	10	170,977,500	20	197,992,200	100.0%	100.0%	51	464,527,200	170%	1056.3%			Dinas Kesehatan	
		02 01 20 16	Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin (DBH-PR)	Jumlah Puskesmas yang Memberikan Tambahan Makanan dan Vitamin	Puskesmas	30	43,975,000	31	266,536,000	20	1,021,060,138		20	633,668,000	20	633,669,000	100.0%	62.1%	51	900,204,000	170%	2047.1%			Dinas Kesehatan		
		02 01 20 17	Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP) / Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya	Jumlah kasus status gizi balita	Kasus	314	262,600,000			157	123,698,250	0					0.0%	0.0%			0%	0.0%			Dinas Kesehatan		
											Rata-rata capaian kinerja (%)		80.0%	72.4%			141.3%	696.9%	Dinas Kesehatan								
											Predikat Kinerja		T	S			ST	ST	Dinas Kesehatan								
		02 01 21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase desa STBM		4	724,805,000			4	607,732,580		4	101,812,000	4	101,812,000	100.0%	16.8%	4	101,812,000	100%	14.0%			Dinas Kesehatan		
		02 01 21 43	Sosialisasi keamanan pangan (DBH-PR)	Jumlah peserta sosialisasi keamanan pangan	Peserta	130	104,700,000			12	16,232,080						0.0%	0.0%			0%	0.0%			Dinas Kesehatan		
		02 01 21 44	Pelatihan peningkatan mutu pangan untuk industri rumah tangga (DBH-PR)	Jumlah peserta pelatihan peningkatan mutu pangan untuk industri rumah tangga	Peserta	50	366,656,000			10	39,000,000		10	21,773,000	10	21,773,000	100.0%	55.8%	10	21,773,000	20%	5.9%			Dinas Kesehatan		
		02 01 21 45	Pengawasan dan pembinaan makanan/minuman (DBH-PR)	Periode Pengawasan dan pembinaan makanan/minuman		32	21,450,000			4	195,000,000		4	80,039,000	4	80,039,000	100.0%	41.0%	4	80,039,000	13%	373.1%			Dinas Kesehatan		
		02 01 21 46	Advokasi dan Sosialisasi Kita Sehat (DBH-PR)	Jumlah peserta advokasi dan sosialisasi kita sehat	Peserta	2	252,000,000			1	195,000,000						0.0%	0.0%			0%	0.0%			Dinas Kesehatan		
		02 01 21 47	Peraturan Lintas Program Pengembangan Kota Sehat (DBH-PR)	Jumlah peserta pertemuan Lintas Program Pengembangan Kota Sehat	Peserta	1	162,500,000			1	162,500,000						0.0%	0.0%			0%	0.0%			Dinas Kesehatan		
											Rata-rata capaian kinerja (%)		40.0%	19.4%			6.5%	75.8%	Dinas Kesehatan								
											Predikat Kinerja		SR	SR			SR	T	Dinas Kesehatan								

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) dan satuannya	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2022 (PRPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPDP Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPDP Tahun 2018 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja Pada Semester				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPDP yang Dievaluasi (2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPDP Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPDP)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		Peringkat Daerah Penanggung Jawab	Ket		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	Semester I		Semester II		11-9-10		12-11/8		13-7+11		14-13/6/100%					
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
	Peningkatan Pengendalian Penyakit Menular dan Tular Menular	02 01 22	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	Terlaksananya pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	16	2.066.388.500	-	16	1.146.965.300	100,00%	358.000,000	358.000,000	100,00%	456.907,150	0,0%	39,8%	-	456.907,150	0%	22,8%	Dinas Kesehatan	15	16			
		02 01 22 01	Penyempitan/Fogging sarang nyamuk	Jumlah desa yang dilakukan penyempitan/fogging sarang nyamuk	Desa	140	182.031.500		28	36.406.300	12	36.406.300	-	12	36.406.300	42,9%	100,0%	12	36.406.300	9%	20,0%	Dinas Kesehatan				
		02 01 22 59	Peningkatan Pengetahuan Masyarakat tentang penyakit menular (DBH-PR)	Jumlah masyarakat yang mengikuti peningkatan pengetahuan masyarakat tentang penanggulangan TBC	Org			400	198.380.000	400	4.290.000	-	400	4.290.000	100,0%	2,2%	400	4.290.000	0%	0,0%	Dinas Kesehatan					
		02 01 22 61	Penguatan Kapasitas Bides tentang Imunisasi (DBH-PR)	Jumlah peserta penguatan kapasitas bides tentang imunisasi	Org	2	130.000.000		1	65.000.000	0	-	-	-	0,0%	0,0%	-	-	0%	0,0%	Dinas Kesehatan					
		02 01 22 62	Penyempitan/Fogging sarang nyamuk (DBH-PR)	Jumlah desa yang dilakukan penyempitan/fogging sarang nyamuk	Desa	8	463.658.000		4	231.829.000	0	-	4	14.249.250	100,0%	6,1%	4	14.249.250	50%	3,1%	Dinas Kesehatan					
		02 01 22 84	Peningkatan Kapasitas Guru UKS dan Murid Program BIAS (DBH-PR)	Jumlah peserta peningkatan kapasitas guru UKS dan murid program BIAS	sekolah	2	227.500.000		1	113.750.000	0	-	1	105.350.000	100,0%	92,6%	1	105.350.000	50%	46,3%	Dinas Kesehatan					
		02 01 22 95	Pembentukan tim pelaksana kesehatan jiwa masyarakat (DBH-PR)	Jumlah peserta Pembentukan tim pelaksana kesehatan jiwa masyarakat	Peserta	332	83.200.000		166	41.600.000	-	-	-	-	0,0%	0,0%	-	-	0%	0,0%	Dinas Kesehatan					
		02 01 22 96	Pembentukan desa siaga sehat jiwa (DBH-PR)	Jumlah desa siaga sehat jiwa yang dibentuk	desa	12	208.000.000		6	104.000.000	-	-	-	-	0,0%	0,0%	-	-	0%	0,0%	Dinas Kesehatan					
		02 01 22 97	Pemantauan Pasien UDGI Berat (DBH-PR)	Jumlah pasien UDGI berat yang terpantau	Org	476	86.400.000		238	44.200.000	-	-	-	-	0,0%	0,0%	-	-	0%	0,0%	Dinas Kesehatan					
		02 01 22 105	Pemilihan Duta Anti Narkoba	Jumlah peserta pemilihan duta anti narkoba	Peserta	2	230.000.000		1	115.000.000	1	60.110.000	52.900.000	1	113.030.000	100,0%	98,3%	1	113.030.000	50%	49,1%	Dinas Kesehatan				
		02 01 22 106	Pelaksanaan Car Free Day (DBH-PR)	Periode Pelaksanaan Car Free Day	Kali	176	393.600.000		88	196.800.000	-	-	88	183.481.600	100,0%	93,2%	88	183.481.600	50%	46,6%	Dinas Kesehatan					
Rata-rata capaian kinerja (%)																54,3%	39,2%			29,9%	16,5%	Dinas Kesehatan				
Predikat Kinerja																R	SR			SR	SR	Dinas Kesehatan				
	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	02 01 23	Program standarisasi pelayanan masyarakat	Jumlah SOM kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya		3	244.954.900	-	2	188.907.450	27.029.300	39.946.650	-	66.976.150	0,0%	38,5%	-	66.976.150	0%	27,3%	Dinas Kesehatan					
		02 01 23 09	Penyusunan Tim Penetapan Angka Kredit Tenaga Kesehatan	Periode penyusunan tim penetapan angka kredit tenaga kesehatan	Periode	10	185.000.000	-	2	37.000.000	-	36.998.700	2	36.998.700	100,0%	100,0%	2	36.998.700	20%	20,0%	Dinas Kesehatan					
		02 01 23 12	Pelatihan Tim Penilai Penetapan Angka Kredit Tenaga Kesehatan	Jumlah peserta Pelatihan Tim Penilai Penetapan Angka Kredit Tenaga Kesehatan	Orang	40	59.954.900		20	29.977.450	10	27.029.300	20	29.977.450	100,0%	100,0%	20	29.977.450	50%	50,0%	Dinas Kesehatan					
		02 01 23 13	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Kesehatan (DBH-PR)	Jumlah peserta Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Kesehatan	Orang				121.930.000	-	-	-	-	-	0,0%	0,0%	-	-	0%	0,0%	Dinas Kesehatan					
Rata-rata capaian kinerja (%)																66,7%	66,7%			23,3%	23,3%	Dinas Kesehatan				
Predikat Kinerja																S	S			SR	SR	Dinas Kesehatan				
	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	02 01 25	Program pengadaan peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	Terpenuhi sarana dan prasarana pelayanan masyarakat dalam memenuhi kesehatan		9	41.194.328.542	1	26.947.782.300	14	5.607.497.340	6	1.258.411.740	8	3.937.184.040	14	5.195.895.788	100,0%	92,7%	15	32.143.378.088	167%	74,4%	Dinas Kesehatan		
		02 01 25 21	Rehabilitasi/edang/berat Puskesmas pembantu	Jumlah pusku yang direhab	Pustu	2	56.160.000		1	28.080.000	1	28.080.000	-	1	28.080.000	100,0%	100,0%	1	28.080.000	50%	50,0%	Dinas Kesehatan				
		02 01 25 23	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Periode Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Hari				117.000.000	0	-	12	117.000.000	12	117.000.000	100,0%	100,0%	12	117.000.000	0%	0,0%	Dinas Kesehatan				
		02 01 25 27	Pengadaan, Peningkatan, Perbaikan Sarana Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan jaringannya	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana PKM/Pustu dan jaringannya	Jenis	5	17.526.029.691	25	13.473.891.150	1	195.642.000	1	185.682.000	9.960.000	1	195.642.000	100,0%	100,0%	26	13.669.533.150	520%	79,8%	Dinas Kesehatan			
		02 01 25 29	Pembangunan Poskesdes	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana	Jenis	4	140.000.000		2	70.000.000	-	68.836.538	2	68.836.538	100,0%	98,3%	2	68.836.538	50%	49,2%	Dinas Kesehatan					
		02 01 25 32	Pembangunan dan Pengadaan Sarana & Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya (Bans DAQ)	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana PKM/Pustu dan jaringannya	Jenis	2	8.673.225.660		1	4.336.612.830	688.644.548	3.320.590.665	1	3.989.235.233	100,0%	92,0%	1	3.989.235.233	50%	46,0%	Dinas Kesehatan					
		02 01 25 35	Pengadaan Sarana Prasarana Puskesmas Pembantu (OTSUS)	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana Puskesmas dan Puskesmas pembantu	Jenis	5	17.526.029.691	25	13.473.891.150	1	2.730.725	0	-	-	-	0,0%	0,0%	25	13.473.891.150	500%	78,7%	Dinas Kesehatan				
		02 01 25 36	Pembangunan Puskesmas pembantu (OTSUS)	Jumlah pembangunan pembantu	Unit	8	1.465.500		4	732.750	0	-	-	-	0,0%	0,0%	-	-	0%	0,0%	Dinas Kesehatan					
		02 01 25 38	Pembangunan poskesdes/posyandu (OTSUS)	Jumlah pembangunan poskesdes/posyandu	Unit	12	34.788.000		6	17.384.000	6	17.384.000	-	6	17.384.000	100,0%	100,0%	6	17.384.000	50%	50,0%	Dinas Kesehatan				
		02 01 25 40	Pengadaan bahan-bahan logistik Puskesmas	Periode pengadaan bahan-bahan logistik Puskesmas	Bulan	24	35.450.000		12	17.725.000	-	-	-	-	0,0%	0,0%	-	-	0%	0,0%	Dinas Kesehatan					
		02 01 25 41	Pengadaan Ambulance Puskesmas	Jumlah pengadaan ambulance Puskesmas	unit	2			358.621.200	1	358.621.200	-	1	358.621.200	100,0%	100,0%	1	358.621.200	50%	0,0%	Dinas Kesehatan					
		02 01 25 42	Pengadaan Peningkatan, Perbaikan Sarana Prasarana Puskesmas dan jaringannya (DBH-CHT)	Jumlah Peningkatan Peningkatan, Perbaikan Sarana Prasarana Puskesmas dan jaringannya	Jenis				462.969.435	0	-	1	420.796.817	1	420.796.817	0,0%	90,9%	1	420.796.817	0%	0,0%	Dinas Kesehatan				
Rata-rata capaian kinerja (%)																63,6%	71,0%			115,5%	32,2%	Dinas Kesehatan				
Predikat Kinerja																R	S			ST	SR	Dinas Kesehatan				

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) dan satuannya	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2022 (PRPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d 4 RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja Pada Semester				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d 4 Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD S/D Tahun 2018 (%)		Peningkat Dacinra Penanggung Jawab	Ket	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	Semester I		Semester II		11-9-10		12-11/8		13-7+11		14-13/6/100%				
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
1	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	02.01.26	Program pengaduan peningkatan akses dan pelayanan Rumah Sakit/Rumah sakit JawaParu-paru	-	-	2	5.830.600	-	-	2	2.915.300	-	-	-	-	-	-	0,0%	0,0%	-	-	0,0%	0,0%	Dinas Kesehatan	
						2	1.330.600	1	665.300	0	-	-	-	0,0%	0,0%	-	-	0%	0,0%	Dinas Kesehatan					
						2	4.500.000	1	2.250.000	0	-	-	-	0,0%	0,0%	-	-	0%	0,0%	Dinas Kesehatan					
						Rata-rata capaian kinerja (%)																		0,0%	0,0%
																		Predikat Kinerja		SR	SR	SR	SR	Dinas Kesehatan	
2	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	02.01.28	Program kemiripan peningkatan kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan anak berkebutuhan khusus	persen	3	630.688.800	-	-	3	315.344.400	-	-	3	265.023.000	3	265.023.000	100,0%	84,0%	3	265.023.000	100%	42,0%	Dinas Kesehatan	
						96	330.688.800	48	165.344.400	-	-	48	117.590.000	48	117.590.000	100,0%	71,1%	48	117.590.000	50%	35,6%	Dinas Kesehatan			
						60	300.000.000	30	150.000.000	-	-	30	147.433.000	30	147.433.000	100,0%	98,3%	30	147.433.000	50%	49,1%	Dinas Kesehatan			
						Rata-rata capaian kinerja (%)																		100,0%	84,7%
																		Predikat Kinerja		ST	T	SR	SR	Dinas Kesehatan	
3	Menurunnya angka Kesakitan dan Kematian karena penyakit PDJ	02.01.29	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Cakupan pelayanan anak balita	persen	3	-	-	-	5	602.787.000	-	-	5	340.807.124	5	340.807.124	100,0%	56,7%	5	340.807.124	167%	0,0%	Dinas Kesehatan	
						12	36.360.000	12	36.360.000	12	36.360.000	100,0%	77,9%	12	36.360.000	0%	0%	Dinas Kesehatan							
						12	304.447.124	12	304.447.124	12	304.447.124	100,0%	54,9%	12	304.447.124	0%	0%	Dinas Kesehatan							
						Rata-rata capaian kinerja (%)																		100,0%	66,4%
																		Predikat Kinerja		ST	S	SR	SR	Dinas Kesehatan	
4	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	02.01.30	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Cakupan Desa dengan penyandu lansia	persen	1	742.820.000	-	-	1	185.705.000	-	-	1	85.507.000	-	85.507.000	0,0%	46,0%	-	85.507.000	0%	11,5%	Dinas Kesehatan	
						120	352.820.000	30	88.205.000	-	-	30	85.507.000	30	85.507.000	100,0%	96,9%	30	85.507.000	25%	24,2%	Dinas Kesehatan			
						120	390.000.000	30	97.500.000	-	-	-	-	0,0%	0,0%	-	-	0%	0,0%	Dinas Kesehatan					
						Rata-rata capaian kinerja (%)																		50,0%	48,5%
																		Predikat Kinerja		SR	SR	SR	SR	Dinas Kesehatan	
5	Menurunnya angka Kesakitan dan Kematian karena penyakit PDJ	02.01.32	Program peningkatan keselamatan Ibu melahirkan dan anak	Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	persen	3	1.984.981.142	-	-	4	1.984.981.142	-	-	4	21.553.000	-	23.553.000	0,0%	0,6%	-	23.553.000	0%	1,5%	Dinas Kesehatan	
						1	65.000.000	1	65.000.000	-	-	-	-	0,0%	0,0%	-	-	0%	0,0%	Dinas Kesehatan					
						180	780.540.000	90	390.270.000	-	-	-	-	0,0%	0,0%	-	-	0%	0,0%	Dinas Kesehatan					
						24	71.500.000	12	35.750.000	-	-	12	23.553.000	12	23.553.000	100,0%	65,9%	12	23.553.000	50%	32,9%	Dinas Kesehatan			
						80	277.711.142	80	277.711.142	-	-	-	-	0,0%	0,0%	-	-	0%	0,0%	Dinas Kesehatan					
						300	260.000.000	150	130.000.000	-	-	-	-	0,0%	0,0%	-	-	0%	0,0%	Dinas Kesehatan					

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output)/Kegiatan (output) dan satuannya	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2022 (PRPJMMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 yang Diavaluasi		Realisasi Capaian Kinerja pada Semester				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Diavaluasi (2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		Peningkat Daerah Penanggung Jawab	Ket		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	Semester I		Semester II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
											K	Rp	K	Rp												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11-9-10	12-11/8	13-7-11	14-13/6/100%	15	16											
03	01	01	10	Penyiapan Alat Tulis Kantor	Periode tersedianya alat tulis kantor	Bulan	60	331,929,250	-	-	12	53,782,025	12	41,271,225	-	12,490,075	12	53,761,300	100.0%	100.0%	12	53,761,300	20%	16.2%	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
03	01	01	11	Penyiapan Barang Cetak dan Pengadaan	Periode Penyiapan Bahan cetak dan fotocopy	Bulan	60	240,563,834	-	-	12	39,403,750	12	29,387,750	-	9,480,000	12	38,867,750	100.0%	98.6%	12	38,867,750	20%	16.2%	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
03	01	01	13	Penyiapan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Periode Penyiapan peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	60	50,061,820	-	-	12	8,200,000	12	6,599,500	-	1,597,250	12	8,196,750	100.0%	100.0%	12	8,196,750	20%	16.4%	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
03	01	01	15	Penyiapan Bahan Bacaan dan Referensi Pendukung Perencanaan	Jumlah Persediaan surat kabar dan referensi pendukung perencanaan	Bulan	60	13,919,628	-	-	12	2,280,000	12	1,140,000	-	1,140,000	12	2,280,000	100.0%	100.0%	12	2,280,000	20%	16.4%	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
03	01	01	17	Penyiapan Makanan Dan Minuman	Periode penyiapan makanan dan minuman	Bulan	60	21,978,360	-	-	12	3,600,000	0	-	12	3,600,000	12	3,600,000	100.0%	100.0%	12	3,600,000	20%	16.4%	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
03	01	01	18	Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam dan Ke Luar Daerah	Periode rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan ke luar daerah	Bulan	60	366,306,000	-	-	12	59,000,000	12	58,988,100	-	149,935,600	12	208,923,700	100.0%	354.1%	12	208,923,700	20%	57.0%	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
03	01	01	20	Penyiapan Jasa pegawai Tidak Tetap	Jumlah Pegawai tidak tetap	OB	2865	1,939,285,015	-	-	570	317,650,000	540	186,450,000	30	144,300,000	570	330,750,000	100.0%	104.1%	570	330,750,000	20%	17.1%	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
Rata-rata capaian kinerja (%)														100.0%	116.9%			20.1%	19.0%	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat						
Predikat Kinerja														ST	ST			SIR	SIR	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat						
Rata-rata capaian kinerja (%)														83.3%	110.4%			269.4%	17.9%	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat						
Predikat Kinerja														T	ST			ST	SIR	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat						
Rata-rata capaian kinerja (%)														0.0%	0.0%			0.0%	0.0%	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat						
Predikat Kinerja														SR	SR			SR	SR	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat						
Rata-rata capaian kinerja (%)														28.1%	52.1%			1600%	19.8%	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat						
Predikat Kinerja														SR	R			ST	SR	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat						
Rata-rata capaian kinerja (%)														0.0%	0.0%			0.0%	0.0%	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat						
Predikat Kinerja														SR	SR			SR	SR	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat						
Rata-rata capaian kinerja (%)														0.0%	0.0%			0.0%	0.0%	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat						
Predikat Kinerja														SR	SR			SR	SR	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat						
Rata-rata capaian kinerja (%)														0.0%	0.0%			0.0%	0.0%	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat						
Predikat Kinerja														SR	SR			SR	SR	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat						
Rata-rata capaian kinerja (%)														0.0%	0.0%			0.0%	0.0%	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat						
Predikat Kinerja														SR	SR			SR	SR	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat						
Rata-rata capaian kinerja (%)														0.0%	0.0%			0.0%	0.0%	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat						
Predikat Kinerja														SR	SR			SR	SR	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat						
Rata-rata capaian kinerja (%)														0.0%	0.0%			0.0%	0.0%	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat						
Predikat Kinerja														SR	SR			SR	SR	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat						
Rata-rata capaian kinerja (%)														0.0%	0.0%			0.0%	0.0%	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat						
Predikat Kinerja														SR	SR			SR	SR	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat						
Rata-rata capaian kinerja (%)														0.0%	0.0%			0.0%	0.0%	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat						
Predikat Kinerja														SR	SR			SR	SR	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat						
Rata-rata capaian kinerja (%)														0.0%	0.0%			0.0%	0.0%	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat						
Predikat Kinerja														SR	SR			SR	SR	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat						

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) dan satuannya	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2022 (PRPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2018 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja Pada Semester				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPd)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		Pangkat Daerah/ Penanggung Jawab	Ket			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	Semester I		Semester II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	
											K	Rp	K	Rp													K
1	Meningkatnya Pemenuhan Infrastruktur Dasar Masyarakat	1 04 15	Program Pengembangan Perumahan	Rasio rumah layak huni		100	45,278,093,685	-	-	100	10,180,812,500	-	-	-	-	11-9-10	0.0%	0.0%	-	-	0%	0.0%	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	16			
		1 04 15 14	Pembangunan Rumah Untuk Masyarakat kurang Mampu	Jumlah rumah yang terbangun	unit	439	45,278,093,685	-	-		10,180,812,500	-	-	-	-	-	0.0%	0.0%	-	-	0%	0.0%	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat				
Rata-rata capaian kinerja (%)																0.0%	0.0%			0.0%	0.0%						
Predikat Kinerja																SR	SR			SR	SR						
Meningkatnya Pemenuhan Infrastruktur Dasar Masyarakat	1 04 16	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Persentase kawasan pemukiman yang belum dapat dilalui kendaraan roda empat		100	53,602,155,129	-	-	100	12,407,822,497	50	5,923,495,800	9,170,436,819	50	15,093,932,619	0.0%	0.0%	50	15,093,932,619	80%	28.2%	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat					
	1 04 16 07	Pembangunan Jalan Lingkungan	Jumlah jalan lingkungan yang terbangun	Jalan	160	53,602,155,129	-	-	11072	12,407,822,496.52	8304	5,923,495,800	2,768	9,170,436,819	11,072	15,093,932,619	0.0%	0.0%	11,072	15,093,932,619	6920%	28.2%	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat				
Rata-rata capaian kinerja (%)																0.0%	0.0%			6920%	28.2%						
Predikat Kinerja																SR	SR			ST	SR						
Meningkatnya Pemenuhan Infrastruktur Dasar Masyarakat	1 04 21	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Umum			100	86,028,834,700	-	-	100	24,463,489,225	0	12,612,283,400	14,007,379,600	0	26,619,663,000	0.0%	108.8%	-	26,619,663,000	0%	30.9%	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat					
	1 04 21 01	Pembangunan Sarana dan Prasarana Umum	Jumlah sarana dan prasarana umum yang terbangun	unit	361	85,929,322,200	-	-	220	24,364,276,724.85	171	12,612,283,400	50	14,007,379,600	220	26,619,663,000	100.0%	109.3%	220	26,619,663,000	61%	31.0%	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat				
	1 04 21 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Gedung (Otus)	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung yang terbangun melalui OTSUS			43,750,000	-	-		43,750,000,000	-	-	-	-	-	-	0.0%	0.0%	-	-	0%	0.0%	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat				
	1 04 21 03	Pembangunan Rumah Sehat Sederhana (Otus)	Jumlah rumah sehat sederhana yang terbangun melalui OTSUS			55,462,500	-	-		55,462,500	-	-	-	-	-	-	0.0%	0.0%	-	-	0%	0.0%	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat				
Rata-rata capaian kinerja (%)																33.3%	36.4%			20.3%	10.3%						
Predikat Kinerja																SR	SR			SR	SR						
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PER BIDANG URUSAN)																11.1%	12.1%			2313.5%	12.8%						
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PER BIDANG URUSAN)																SR	SR			ST	SR						
L5		05	Bidang Urusan : Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Peridungan Masyarakat			28,790,695,485	-	-	7,354,842,901	2,922,595,813	4,095,687,271	-	7,018,283,084										Badan Kesatuan Bangsa dan Politik				
L5.1		05 01	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			5,822,160,102	-	-	968,721,641	431,605,874	486,374,084	-	917,979,958										Badan Kesatuan Bangsa dan Politik				
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	05 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100	2,805,817,727	-	-	100	568,883,467	50	267,901,699	50	251,228,224	100	519,129,923	100.0%	91.3%	100	519,129,923	100.0%	18.6%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik				
	05 01 01 001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Periode Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bulan	60	6,950,000	-	-	12	1,050,000	6	750,000	6	300,000	12	1,050,000	100.0%	100.0%	12	1,050,000	20.0%	15.1%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik				
	05 01 01 002	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Periode Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	60	402,683,542	-	-	12	93,695,802	6	42,395,800	6	32,053,624	12	74,449,424	100.0%	79.5%	12	74,449,424	20.0%	18.5%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik				
	05 01 01 007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah pejabat pengelola keuangan SKPD	OB	1,080	500,597,888	-	-	216	98,732,200	108	39,640,000	108	56,372,200	216	96,012,200	100.0%	97.2%	216	96,012,200	20.0%	19.2%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik				
	05 01 01 010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Periode Penyediaan Alat Tulis Kantor	Bulan	60	195,201,944	-	-	12	39,448,465	6	11,595,099	6	27,425,600	12	39,020,699	100.0%	98.9%	12	39,020,699	20.0%	20.0%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik				
	05 01 01 011	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Periode Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan	Bulan	60	62,450,000	-	-	12	8,250,000	6	533,000	6	7,717,000	12	8,250,000	100.0%	100.0%	12	8,250,000	20.0%	13.2%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik				
	05 01 01 013	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Periode Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	60	52,857,800	-	-	12	4,807,800	6	991,500	6	3,812,500	12	4,804,000	100.0%	99.9%	12	4,804,000	20.0%	9.1%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik				
	05 01 01 015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	eks	3,285	10,260,000	-	-	365	1,140,000	-	365	1,140,000	365	1,140,000	100.0%	100.0%	365	1,140,000	11.1%	11.1%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik					
	05 01 01 017	Penyediaan makanan dan minuman	Periode Penyediaan Makanan dan Minuman	Bulan	60	117,000,000	-	-	12	19,000,000	6	16,400,000	6	2,587,000	12	18,987,000	100.0%	99.9%	12	18,987,000	20.0%	16.2%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik				
	05 01 01 018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Periode Rapat-rapat koordinasi & konsultasi dalam & luar daerah	Bulan	60	517,643,230	-	-	12	120,000,000	6	59,970,000	6	59,299,000	12	119,269,000	100.0%	99.4%	12	119,269,000	20.0%	23.0%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik				
	05 01 01 020	Penyediaan jasa pegawai tidak tetap	Jumlah Jasa pegawai Tidak Tetap	OB	3,048	940,173,323	-	-	600	182,459,200	500	95,626,300	100	60,521,300	600	156,147,600	100.0%	85.6%	600	156,147,600	19.7%	16.6%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik				
Rata-rata capaian kinerja (%)																100%	96%			19%	16%						
Predikat Kinerja																ST	ST			SR	SR						
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	05 01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen	100	601,962,860	-	-	100	69,741,436	50	34,944,375	50	34,471,000	100	69,415,375	100.0%	99.5%	100	69,415,375	100.0%	11.5%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik				
	05 01 02 011	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis	37	292,170,147	-	-	1	8,990,000	1	5,000,000	1	3,990,000	1	8,990,000	100.0%	100.0%	1	8,990,000	2.7%	3.1%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik				

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) dan satuannya	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2022 (PRPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d 4 RPKD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun 2018 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja Pada Semester		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang Dievaluasi (2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPKD Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d 4 Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPKD s/d Tahun 2018 (%)		Peringkat Daerah Penanggung Jawab	Ket			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	Semester I		Semester II		11-9-10		12-11/8		13-7-11				14-13/6/100%		
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K
1																									
		05 01 02 022	Pemeliharaan Rutin / berkala gedung kantor	Periode Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Bulan	60	37,496,000			12	3,000,000	6	2,300,000	6	700,000	12	3,000,000	100.0%	100.0%	12	3,000,000	20.0%	8.0%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
		05 01 02 023	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	UB	60	132,853,000			12	29,300,000	6	13,384,375	6	15,765,000	12	29,149,375	100.0%	99.5%	12	29,149,375	20.0%	21.9%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
		05 01 02 024	Pemeliharaan Rutin / Berkala kendaraan dinas / operasional	Jumlah Pemeliharaan / Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	UB	60	107,239,000			12	23,501,436	6	11,460,000	6	12,041,000	12	23,501,000	100.0%	100.0%	12	23,501,000	20.0%	21.9%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
		05 01 02 030	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perengkapan Kantor	Periode Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Bulan	60	32,204,713			12	4,950,000	6	2,800,000	6	1,975,000	12	4,775,000	100.0%	96.5%	12	4,775,000	20.0%	14.8%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
Rata-rata capaian kinerja (%)																100%	99%			17%	14%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			
Predikat Kinerja																ST	ST			SR	SR	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	05 01 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Tingkat Disiplin Aparatur	Persen	100	400,000,000			100	80,000,000	100	80,000,000		-	100	80,000,000	100.0%	100.0%	100	80,000,000	100.0%	20.0%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
		05 01 03 006	Penyediaan Sewa Gedung Kantor	Jumlah gedung yang disewa	Tahun	5	400,000,000			1	80,000,000	1	80,000,000	-	-	1	80,000,000	100.0%	100.0%	1	80,000,000	20.0%	20.0%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
Rata-rata capaian kinerja (%)																100%	100%			20%	20%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			
Predikat Kinerja																ST	ST			SR	SR	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	05 01 07	Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja	Cakupan Penyediaan Dokumen perencanaan SKPK	Dokumen	6	7,326,120			1	1,198,350	-	-	1	1,196,000	1	1,196,000	100.0%	99.8%	1	1,196,000	16.7%	16.3%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
		05 01 07 002	Penyusunan Rencana Kerja (Rencana Satuan Kerja Perangkat Daerah)	Jumlah Buku Renja SKPK	Buku	150	7,326,120			30	1,198,350	-	-	30	1,196,000	30	1,196,000	100.0%	99.8%	30	1,196,000	20.0%	16.3%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
Rata-rata capaian kinerja (%)																100%	100%			20%	16%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			
Predikat Kinerja																ST	ST			SR	SR	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			
	Meningkatnya Kesadaran dan Pemahaman terhadap Wawasan Kebangsaan	05 01 15	Program peningkatan Kesamaan dan Kesayamban Lingkungan	Cakupan Pengendalian keamanan dan kesayamban	Persen	100	61,051,000			100	10,000,000	-	-	100	9,892,000	100	9,892,000	100.0%	98.9%	100	9,892,000	100.0%	16.2%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
		05 01 15 011	Peringatan Hari Bela Negara	Periode pelaksanaan Peringatan Hari Bela Negara	Hari	5	61,051,000			1	10,000,000	-	-	1	9,892,000	1	9,892,000	100.0%	98.9%	1	9,892,000	20.0%	16.2%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
Rata-rata capaian kinerja (%)																100%	99%			20%	16%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			
Predikat Kinerja																ST	ST			SR	SR	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			
	Meningkatnya Kesadaran dan Pemahaman terhadap Wawasan Kebangsaan	05 01 18	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Cakupan Pelaksanaan Koordinasi wawasan kebangsaan	Persen	100	1,234,022,395			100	151,198,388	50	27,649,800	50	107,736,860	100	135,386,660	100.0%	89.5%	100	135,386,660	100.0%	11.0%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
		05 01 18 007	Peningkatan Kapasitas Kominda Kota Lhokseumawe	Periode Pelaksanaan KOMINDA Kota Lhokseumawe	Triwulan	20	546,034,545			4	74,200,000	2	27,649,800	2	32,338,150	4	59,987,950	100.0%	80.8%	4	59,987,950	20.0%	11.0%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
		05 01 18 010	Penguatan Kelembagaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	Periode Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	Hari	3	483,965,993			1	44,999,668			1	44,689,490	1	44,689,490	100.0%	99.3%	1	44,689,490	33.3%	9.2%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
		05 01 18 013	Peningkatan Kapasitas Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	Jumlah peserta penguatan kelembagaan forum kewaspadaan dini masyarakat (FKDM)	Hari	5	204,021,857			1	31,998,720			1	30,709,220	1	30,709,220	100.0%	96.0%	1	30,709,220	20.0%	15.1%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
Rata-rata capaian kinerja (%)																100%	92%			24%	12%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			
Predikat Kinerja																ST	ST			SR	SR	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			
	Meningkatnya Kesadaran dan Pemahaman terhadap Wawasan Kebangsaan	05 01 23	Program Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu; Cakupan dukungan kelancaran Pemilu	Persen; Bulan	100	411,980,000			100	88,000,000	25	21,110,000	75	81,850,000	100	102,960,000	100.0%	117.0%	100	102,960,000	100.0%	28.0%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
		05 01 23 009	Dukungan terhadap Operasional KIP Kota Lhokseumawe	Periode Operasional KIP Kota Lhokseumawe	Bulan	60	208,278,000			12	38,000,000	6	21,110,000	6	32,090,000	12	53,200,000	100.0%	140.0%	12	53,200,000	20.0%	25.5%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
		05 01 23 023	Sosialisasi Pemilihan Umum	Periode Sosialisasi Pemilihan Umum	Hari	3	203,702,000			1	50,000,000			1	49,760,000	1	49,760,000	100.0%	99.5%	1	49,760,000	33.3%	24.4%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
Rata-rata capaian kinerja (%)																100%	120%			27%	25%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			
Predikat Kinerja																ST	ST			SR	SR	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																100.0%	100.8%			21.0%	17.1%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																ST	ST			SR	SR	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			
1.5.2		05 02 01	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayah Hubah				23,268,535,383			6,386,121,260		2,490,989,939	3,609,313,187		6,100,303,126									Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayah Hubah	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output)/Kegiatan (output) dan satuannya	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2022 (PRPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja Pada Semester				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		Peningkat Daya Penanggung Jawab	Ket		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	Semester I		Semester II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
											11-9-10	12-11/8	11-9-10	12-11/8												
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	05 02 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100	15,575,032,380	-	-	100	3,810,858,980	50	1,524,236,089	50	2,140,054,113	100	3,664,290,202	100.0%	96.2%	100	3,664,290,202	100.0%	23.5%	Satuan Pelaksanaan Praja dan Wilayah Hubab	15	16
		05 02 01 001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Periode Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bulan	60	15,472,000		12	1,500,000	6	1,365,000	6	126,000	12	1,491,000	100.0%	99.4%	12	1,491,000	20.0%	9.6%	Satuan Pelaksanaan Praja dan Wilayah Hubab			
		05 02 01 002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Periode Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	60	590,962,305		12	117,000,000	6	34,837,289	6	40,771,563	12	75,608,852	100.0%	64.6%	12	75,608,852	20.0%	12.8%	Satuan Pelaksanaan Praja dan Wilayah Hubab			
		05 02 01 007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Penyediaan jasa administrasi keuangan	OB	720	556,580,000		180	95,140,000	90	40,600,000	90	54,540,000	180	95,140,000	100.0%	100.0%	180	95,140,000	25.0%	17.1%	Satuan Pelaksanaan Praja dan Wilayah Hubab			
		05 02 01 010	Penyediaan alat tulis kantor	Periode Penyediaan Alat Tulis Kantor	Bulan	60	146,000,000		12	26,521,500	6	11,405,500	6	15,116,000	12	26,521,500	100.0%	100.0%	12	26,521,500	20.0%	18.2%	Satuan Pelaksanaan Praja dan Wilayah Hubab			
		05 02 01 011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Periode Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bulan	60	100,000,000		12	20,000,000	6	7,308,600	6	12,691,200	12	19,999,800	100.0%	100.0%	12	19,999,800	20.0%	20.0%	Satuan Pelaksanaan Praja dan Wilayah Hubab			
		05 02 01 013	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Periode Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	60	16,165,796		12	7,198,440	6	2,052,700	6	5,120,530	12	7,173,230	100.0%	99.6%	12	7,173,230	20.0%	44.4%	Satuan Pelaksanaan Praja dan Wilayah Hubab			
		05 02 01 015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	eks	3285	11,340,000		12	1,140,000	0	-	12	1,140,000	12	1,140,000	100.0%	100.0%	12	1,140,000	0.4%	10.1%	Satuan Pelaksanaan Praja dan Wilayah Hubab			
		05 02 01 017	Penyediaan makanan dan minuman	Periode Penyediaan Makanan dan Minuman	Bulan	60	90,000,000		11	15,000,000	6	9,500,000	5	5,500,000	11	15,000,000	100.0%	100.0%	11	15,000,000	18.3%	16.7%	Satuan Pelaksanaan Praja dan Wilayah Hubab			
		05 02 01 018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Periode Rapat-rapat koordinasi & konsultasi dalam & luar daerah	Bulan	60	455,000,000		12	144,000,000	6	58,972,500	6	85,021,800	12	143,994,300	100.0%	100.0%	12	143,994,300	20.0%	31.6%	Satuan Pelaksanaan Praja dan Wilayah Hubab			
		05 02 01 020	Penyediaan jasa pegawai tidak tetap	Jumlah Penyediaan jasa pegawai tidak tetap	OB	13176	12,237,019,319		2628	3,296,220,000	1314	1,358,194,500	657	1,835,487,500	1,971	3,193,682,000	75.0%	96.8%	1,971	3,193,682,000	15.0%	26.1%	Satuan Pelaksanaan Praja dan Wilayah Hubab			
		05 02 01 021	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Non PNS	Jumlah Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Non PNS	OB	13176	1,356,492,960		2628	84,839,040	0	-	2,628	84,539,520	2,628	84,539,520	100.0%	99.6%	2,628	84,539,520	19.9%	6.2%	Satuan Pelaksanaan Praja dan Wilayah Hubab			
Rata-rata capaian kinerja (%)																97.7%	96.4%			18.1%	19.3%	Satuan Pelaksanaan Praja dan Wilayah Hubab				
Predikat Kinerja																ST	ST			SR	SR	Satuan Pelaksanaan Praja dan Wilayah Hubab				
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	05 02 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen	100	1,377,224,040	-	-	100	327,900,000	50	196,503,850	50	125,042,574	100	321,546,424	100.0%	98.1%	100	321,546,424	100.0%	23.3%	Satuan Pelaksanaan Praja dan Wilayah Hubab		
		05 02 02 003	Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah Pembangunan Gedung	Unit	5	388,500,000		1	153,800,000	1	132,350,000		17,577,124	1	149,927,124	100.0%	97.5%	1	149,927,124	20.0%	38.6%	Satuan Pelaksanaan Praja dan Wilayah Hubab			
		05 02 02 011	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (mobiler, komputer)	Jumlah Pengadaan peralatan dan perlengkapan Kantor	Jenis	11	163,352,400		1	14,000,000		14,000,000	1	14,000,000	1	14,000,000	100.0%	100.0%	1	14,000,000	9.1%	8.6%	Satuan Pelaksanaan Praja dan Wilayah Hubab			
		05 02 02 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Periode Pemeliharaan Gedung Kantor	Bulan	60	15,031,640		12	7,000,000		7,000,000	12	7,000,000	12	7,000,000	100.0%	100.0%	12	7,000,000	20.0%	46.6%	Satuan Pelaksanaan Praja dan Wilayah Hubab			
		05 02 02 023	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	UB	60	159,840,000		12	29,300,000	6	12,307,200	6	16,972,800	12	29,280,000	100.0%	99.9%	12	29,280,000	20.0%	18.3%	Satuan Pelaksanaan Praja dan Wilayah Hubab			
		05 02 02 024	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	UB	96	614,000,000		60	117,800,000	30	49,496,650	30	65,842,650	60	115,339,300	100.0%	97.9%	60	115,339,300	62.5%	18.8%	Satuan Pelaksanaan Praja dan Wilayah Hubab			
		05 02 02 030	Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	60	36,500,000		25	6,000,000	12	2,350,000	13	3,650,000	25	6,000,000	100.0%	100.0%	25	6,000,000	41.7%	16.4%	Satuan Pelaksanaan Praja dan Wilayah Hubab			
Rata-rata capaian kinerja (%)																100.0%	99.2%			28.9%	24.5%	Satuan Pelaksanaan Praja dan Wilayah Hubab				
Predikat Kinerja																ST	ST			SR	SR	Satuan Pelaksanaan Praja dan Wilayah Hubab				
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	05 02 03	Program Peningkatan Aparatur	Persentase Tingkat Disiplin Aparatur	Persen	100	717,190,517	-	-	100	117,474,000	100	117,474,000	-	-	100	117,474,000	100.0%	100.0%	100	117,474,000	100.0%	16.4%	Satuan Pelaksanaan Praja dan Wilayah Hubab		
		05 02 03 002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya, Terbayarnya Kewajiban 2016	Pasang	1120	717,190,517		224	117,474,000	224	117,474,000	-	-	224	117,474,000	100.0%	100.0%	224	117,474,000	20.0%	16.4%	Satuan Pelaksanaan Praja dan Wilayah Hubab			
Rata-rata capaian kinerja (%)																100.0%	100.0%			20.0%	16.4%	Satuan Pelaksanaan Praja dan Wilayah Hubab				
Predikat Kinerja (%)																ST	ST			SR	SR	Satuan Pelaksanaan Praja dan Wilayah Hubab				
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	05 02 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal yang diikuti	Kegiatan	2	375,667,000	-	-	2	121,467,000	-	-	2	120,388,900	2	120,388,900	100.0%	99.1%	2	120,388,900	100.0%	32.0%	Satuan Pelaksanaan Praja dan Wilayah Hubab		
		05 02 05 002	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Pegawai yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Orang	150	103,267,000		50	21,267,000	-	-	50	21,248,900	50	21,248,900	100.0%	99.9%	50	21,248,900	33.3%	20.6%	Satuan Pelaksanaan Praja dan Wilayah Hubab			
		05 02 05 005	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	Jumlah Pegawai yang mengikuti Kapasitas SDM Aparatur	Orang	175	272,400,000		50	82,400,000	-	-	50	82,248,000	50	82,248,000	100.0%	99.8%	50	82,248,000	28.6%	30.2%	Satuan Pelaksanaan Praja dan Wilayah Hubab			

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) dan satuannya	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2022 (PRPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja Pada Semester				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD S/D Tahun 2018 (%)		Peringkat Daerah Penanggung Jawab	Ket																						
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	Semester I		Semester II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp																				
											K	Rp	K	Rp													K	Rp	K	Rp	K	Rp														
1	2	05 02 05 025	Penetapan Angka Kredit	Periode Penetapan Angka Kredit					1	17,800,000		1	16,892,000	1	16,892,000	100.0%	94.9%	1	16,892,000	0.0%	0.0%																									
Rata-rata capaian kinerja (%)																							100.0%	99.9%		31.0%	25.4%																			
Predikat Kinerja																							ST	ST		SR	SR																			
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	05 02 07	07	Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah	Cakupan Penyediaan Dokumen perencanaan SKPK	Dokumen	6	3,384,600	-	1	600,000	-	1	599,800	1	599,800	100.0%	100.0%	1	599,800	16.7%	17.7%	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayah Hibah																								
																									05 02 07 02	Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD	Jumlah Buku yang dicetak	Buku	50	3,384,600	10	600,000	10	599,800	100.0%	100.0%	10	599,800	20.0%	17.7%	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayah Hibah					
Rata-rata capaian kinerja (%)																							100.0%	100.0%		20.0%	17.7%																			
Predikat Kinerja																							ST	ST		SR	SR																			
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	05 02 10	10	Program Peningkatan Pengembangan sistem pelayanan pencapaian kinerja dan keuangan	Cakupan Penyediaan Dokumen Standard Pelayanan Minimum (SPM) SKPD	Dokumen	1	26,000,000	-	1	5,200,000	-	1	5,196,800	1	5,196,800	100.0%	99.9%	1	5,196,800	100.0%	20.0%	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayah Hibah																								
																									19 02 10 11	Penyusunan Standar Pelayanan Minimum (SPM)	Jumlah Buku SPM yang di cetak	Buku	50	26,000,000	10	5,200,000	10	5,196,800	100.0%	99.9%	10	5,196,800	20.0%	20.0%	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayah Hibah					
Rata-rata capaian kinerja (%)																							100.0%	99.9%		20.0%	20.0%																			
Predikat Kinerja																							ST	ST		SR	SR																			
Meningkatnya Pemahaman terhadap Syariat Islam	05 02 15	15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Tingkat penyelesaian pelanggaran KamTyanTibMas	Persen	95	3,764,746,546	-	50	1,749,921,280	25	536,048,000	25	1,084,892,000	50	1,620,940,000	100.0%	92.6%	50	1,620,940,000	52.6%	43.1%	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayah Hibah																							
																										05 02 15 003	Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Jumlah Peserta Satinmas Dalam Wilayah Kota Lhokseumawe, Terbayarnya Kewajiban 2016	Orang	2704	1,005,109,816	1	1,087,496,000	1	287,496,000	704,880,000	1	992,376,000	100.0%	91.3%	1	992,376,000	0.0%	98.7%	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayah Hibah	
																										05 02 15 007	Peningkatan Penerbitan Syariat Islam Kota Lhokseumawe, Terbayarnya Kewajiban 2016	Periode Penerbitan Syariat Islam Kota Lhokseumawe, Terbayarnya Kewajiban 2016	Kali	30	1,751,585,000	6	343,692,000	3	144,372,000	3	198,879,000	6	343,251,000	100.0%	99.9%	6	343,251,000	20.0%	19.6%	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayah Hibah
																										05 02 15 008	Pelaksanaan Hukum Pelanggar Syariat Islam	Periode Tenaga Pelaksanaan Hukum Pelanggar Syariat Islam	Kali	18	595,800,000	3	265,500,000	3	99,300,000	3	133,575,000	3	232,875,000	100.0%	87.7%	3	232,875,000	16.7%	39.1%	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayah Hibah
																										05 02 15 016	Pembinaan dan Penanganan Pelanggaran Qanun	Jumlah Kasus Pembinaan dan Penanganan Pelanggaran Qanun	Kasus	332	312,251,730	12	33,233,280	12	33,193,000	12	33,193,000	12	33,193,000	100.0%	99.9%	12	33,193,000	3.6%	10.6%	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayah Hibah
																										05 02 15 018	Pengamanan Pejabat/Tamu-Tamu Negara (VIP)	Periode Pengamanan Pejabat/Tamu-Tamu Negara (VIP)	Kali	20	100,000,000	4	20,000,000	1	4,880,000	3	14,365,000	4	19,245,000	100.0%	96.2%	4	19,245,000	20.0%	19.2%	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayah Hibah
Rata-rata capaian kinerja (%)																							100.0%	95.0%		12.1%	37.5%																			
Predikat Kinerja																							ST	ST		SR	SR																			
Meningkatnya Pemahaman terhadap Syariat Islam	05 02 16	16	Program Pemeliharaan Kuantitas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Pencapaian penegakan Perda/Qanun	Persen	50	1,429,290,300	-	50	253,000,000	25	116,728,000	25	133,139,000	50	249,867,000	100.0%	98.8%	50	249,867,000	100.0%	17.5%	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayah Hibah																							
																										05 02 16 006	Penerbitan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Periode Penerbitan Peraturan Daerah dan Kepala Daerah	Kali	30	1,199,290,300	6	208,000,000	2	91,750,000	4	113,149,000	6	204,899,000	100.0%	98.5%	6	204,899,000	20.0%	17.1%	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayah Hibah
05 02 16 010	010	010	Pengawasan dan Pengendalian Ketertiban Pelaksanaan ibadah Bulan Ramadhan dan Hari Besar Islam	Periode Penerbitan Peraturan Daerah dan Kepala Daerah	Kali	12	130,000,000	-	6	25,000,000	6	24,978,000	6	24,978,000	100.0%	99.9%	6	24,978,000	50.0%	19.2%	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayah Hibah																									
																								05 02 16 013	Pelaksanaan Hari-Hari Besar Nasional	Periode Pelaksanaan Hari-Hari Besar Nasional	Kali	15	100,000,000	3	20,000,000	3	19,990,000	3	19,990,000	100.0%	100.0%	3	19,990,000	20.0%	20.0%	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayah Hibah				
Rata-rata capaian kinerja (%)																							100.0%	99.5%		30.0%	18.8%																			
Predikat Kinerja																							ST	ST		SR	SR																			
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%) SELURUH PROGRAM																99.7%	100.0%		22.5%	20.0%																										
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																ST	ST		SR	SR																										
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PER BIDANG URUSAN)																99.9%	100.4%		21.7%	18.5%																										
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PER BIDANG URUSAN)																ST	ST		SR	SR																										
I.6	06		Bidang Urusan : Sosial				28,769,840,971	-		6,345,960,244		3,687,414,215		1,889,574,495	-	5,576,988,710																														
I.6.1	06 01		Dinas Sosial				28,769,840,971	-		6,345,960,244		3,687,414,215		1,889,574,495		5,576,988,710																														
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	06 01 01	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan Pelayanan Administrasi Perawatan	Keg	10	4,117,462,624	-	10	389,521,624	10	159,817,690	20,572,620	10	420,390,310	100.0%	107.8%	10	420,390,310	100.0%	10.2%	Dinas Sosial																								

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) dan satuannya	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2022 (PRPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja Pada Semester				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		Pemangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	Semester I		Semester II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
											K	Rp	K	Rp												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11-9-10	12-11/8	13-7+11	14-13/6/100%	15	16											
		06 01 01 01	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Periode Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bulan	60	7.965.000	0	-	12	1.500.000	0	-	12	990.000	12	990.000	100.0%	66.0%	12	990.000	20.0%	12.4%	Dinas Sosial		
		06 01 01 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	Periode Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air & Listrik	Bulan	60	632.610.462	0	-	12	94.851.674	12	20.325.750		45.292.695	12	65.618.445	100.0%	69.2%	12	65.618.445	20.0%	10.4%	Dinas Sosial		
		06 01 01 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Pejabat Pembelo Keuangan SKPD	OB	803	1.066.212.549	0	-	204	83.152.800	204	26.880.000		56.272.800	204	83.152.800	100.0%	100.0%	204	83.152.800	25.4%	7.8%	Dinas Sosial		
		06 01 01 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Periode Penyediaan Alat Tulis Kantor	Bulan	60	152.600.636	0	-	12	22.132.625	12	22.096.790		3.000.925	12	25.096.715	100.0%	113.4%	12	25.096.715	20.0%	16.4%	Dinas Sosial		
		06 01 01 11	Penyediaan Barang Cetak dan Pengabdian	Periode Penyediaan Barang Cetak dan Pengabdian	Bulan	60	121.440.000	0	-	12	17.700.000	12	8.750.150		13.671.900	12	22.422.050	100.0%	126.7%	12	22.422.050	20.0%	18.5%	Dinas Sosial		
		06 01 01 13	Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor	Periode Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor	Bulan	60	188.397.080	0	-	12	2.800.000	0	-	12	5.745.000	12	5.745.000	100.0%	205.2%	12	5.745.000	20.0%	3.0%	Dinas Sosial		
		06 01 01 15	Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundangan	Periode Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundangan	Eks	1825	7.655.795	0	-	365	1.140.000	0	-	365	1.140.000	365	1.140.000	100.0%	100.0%	365	1.140.000	20.0%	14.9%	Dinas Sosial		
		06 01 01 17	Penyediaan Makanan & Minuman	Periode Penyediaan Makanan & Minuman	Bulan	60	139.348.907	0	-	12	20.550.000	12	5.696.000		19.552.800	12	25.248.800	100.0%	122.9%	12	25.248.800	20.0%	18.1%	Dinas Sosial		
		06 01 01 18	Rapat Koordinasi & Konsultasi ke Luar Daerah	Periode Rapat/rapat Koordinasi & Konsultasi Ke Luar Daerah	Bulan	60	402.936.600	0	-	12	59.000.000	12	23.320.000		6.5271.400	12	87.591.400	100.0%	148.5%	12	87.591.400	20.0%	21.7%	Dinas Sosial		
		06 01 01 20	Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap	Jumlah Jasa Pegawai Tidak Tetap	OB	851	1.398.295.595	0	-	408	67.094.525	408	53.750.000		49.635.100	408	103.385.100	100.0%	118.7%	408	103.385.100	47.9%	7.4%	Dinas Sosial		
													Rata-rata capaian kinerja (%)		100.0%	117.0%			23.3%	13.1%	Dinas Sosial					
													Predikat Kinerja		ST	ST				SR	SR	Dinas Sosial				
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	06 01 02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA & PRASARANA APARATUR	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	Keg	5	947.384.531	-	-	5	90.000.000	5	23.833.800		25.667.200	5	49.501.000	100.0%	55.0%	5	49.501.000	100.0%	5.2%	Dinas Sosial		
	06 01 02 11		Pengadaan Peralatan & Perlengkapan Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Unit	380	100.411.800	-	-	1	12.380.000	1	7.380.000		-	1	7.380.000	100.0%	59.6%	1	7.380.000	0.3%	7.3%	Dinas Sosial		
	06 01 02 22		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Periode Pemeliharaan Gedung Kantor	Bulan	60	20.146.830	-	-	1	3.000.000	0	-		-	-	-	0.0%	0.0%	-	-	0.0%	0.0%	Dinas Sosial		
	06 01 02 23		Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	UB	60	178.903.848	-	-	12	26.640.000	12	9.729.500		15.036.000	12	24.765.900	100.0%	93.0%	12	24.765.900	20.0%	13.8%	Dinas Sosial		
	06 01 02 24		Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Operasional	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Operasional	UB	180	614.344.002	-	-	60	43.480.000	60	2.222.500		10.631.200	60	12.855.100	100.0%	29.6%	60	12.855.100	33.3%	2.1%	Dinas Sosial		
	06 01 02 30		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan & Perlengkapan Kantor (Mobiler/Komputer dll)	Periode Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan & Perlengkapan Kantor	Bulan	12	33.578.050	-	-	30	4.500.000	30	4.500.000		-	30	4.500.000	100.0%	100.0%	30	4.500.000	250.0%	13.4%	Dinas Sosial		
													Rata-rata capaian kinerja (%)		80.0%	56.4%			60.7%	7.3%	Dinas Sosial					
													Predikat Kinerja		T	R				R	SR	Dinas Sosial				
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	06 01 03		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Tingkat Disiplin Aparatur	Keg	1	805.673.200	-	-	1	120.000.000	1	120.000.000		-	1	120.000.000	100.0%	100.0%	1	120.000.000	100.0%	14.9%	Dinas Sosial		
	06 01 03 06		Penyewaan Sewa Gedung Kantor	Periode Penyewaan Gedung Kantor	Tahun	1	805.673.200	0	-	1	120.000.000	1	120.000.000		-	1	120.000.000	100.0%	100.0%	1	120.000.000	100.0%	14.9%	Dinas Sosial		
													Rata-rata capaian kinerja (%)		100.0%	100.0%			100.0%	14.9%	Dinas Sosial					
													Predikat Kinerja		ST	ST				ST	SR	Dinas Sosial				
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	06 01 05		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Cakupan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal Yang Dilaksanakan	Keg	1	122.102.000	-	-	3	19.000.000	0	-		-	-	-	0.0%	0.0%	-	-	0.0%	0.0%	Dinas Sosial		
	06 01 05 01		Pendidikan dan Pelatihan Formal Aparatur	Periode Pendidikan dan Pelatihan Formal Aparatur	Bulan	60	122.102.000	-	-	12	19.000.000	0	-		-	-	-	0.0%	0.0%	-	-	0%	0.0%	Dinas Sosial		
													Rata-rata capaian kinerja (%)		0.0%	0.0%			0.0%	0.0%	Dinas Sosial					
													Predikat Kinerja		SR	SR				SR	SR	Dinas Sosial				
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	06 01 07		PROGRAM PENYULUHAN PERENCANAAN SATUAN KERJA PERANGKAT KERJA	Cakupan Penyediaan Dokumen perencanaan SKPK	Keg	1	14.750.000	-	-	1	600.000	-	-		600.000	-	600.000	0.0%	100.0%	-	600.000	0.0%	4.1%	Dinas Sosial		
	06 01 07 02		Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)	Jumlah Dokumen Renja	Buku	75	14.750.000	0	-	10	600.000	-	-		600.000	10	600.000	100.0%	100.0%	10	600.000	13.3%	4.1%	Dinas Sosial		
													Rata-rata capaian kinerja (%)		100.0%	100.0%				13.3%	4.1%	Dinas Sosial				

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output) dan satuannya	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2022 (PRPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2018 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja Pada Semester				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPd)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD S/D Tahun 2018 (%)		Pangkat Dera) Penanggung Jawab	Ket																										
						K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp				K		Rp																							
						11-9-10	10	11-9-10	10	11-9-10	10	11-9-10	10	11-9-10	10	11-9-10	10	11-9-10	10	11-9-10	10			11-9-10	10	11-9-10	10																						
Menurunkan Angka Kemiskinan	06	01	15	PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL DAN PENYANGGAI MASALAH KESEJAHTERAAN	Persentase PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial	Keg	4	18.747.422.815	-	6	1.165.628.018	3	3.127.828.363	-	1.361.216.370	3	4.491.045.735	50.0%	86.9%	3	4.491.045.735	75.0%	24.0%	Dinas Sosial																									
																									06	01	15	04	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha Bagi Kelurga Miskin	Jumlah Sarana dan Prasarana Bagi Kelurga Miskin/Kewajiban Tahun 2016	Unit	1000	3.331.959.669	0	-	1	769.500.000	1	542.353.000	70.637.000	1	612.990.600	0.1%	18.4%	Dinas Sosial				
																									06	01	15	15	Pembangunan dan Rehabilitasi SebangBant Rumah Kaum Duafas	Jumlah Unit Rumah Yang Di Bangun atau Di Rehab/Kewajiban Tahun 2016	Unit	148	7.665.844.500	0	-	1	3.020.047.500	1	2.559.768.000	-	1	2.559.768.000	100.0%	84.8%	1	2.559.768.000	0.7%	33.4%	Dinas Sosial
																									06	01	15	32	Pengadaan Sarana dan Prasarana yang Dibutuhkan Masyarakat/Gampong	Jumlah Sarana dan Prasarana Bagi Kelurga Kurang Mampu	Jenis	150	4.783.142.848	0	-	1	1.151.080.510	-	1	1.141.682.950	100.0%	99.2%	1	1.141.682.950	0.7%	23.9%	Dinas Sosial		
																									06	01	15	34	Pelaksanaan Pendukung Program Keasraan Harapan (PKH)	Jumlah Peserta sosialisasi	Orang	150	290.825.918	0	-	1	75.000.000	1	25.707.765	32.216.153	1	57.925.918	100.0%	77.2%	1	57.925.918	0.7%	19.9%	Dinas Sosial
																									06	01	15	35	Pelaksanaan Bantuan Sosial Beras Kesejahteraan (RASTRABPNT)	Periode Pelaksanaan Bantuan Sosial Beras Kesejahteraan (RASTRABPNT)	Bln		2.675.650.000			1	100.000.000		1	70.141.042	0.0%	70.1%	1	70.141.042	0.0%	2.6%	Dinas Sosial		
06	01	15	36	Verifikasi Penerima Bantuan Hibah dan Baras	Jumlah Dokumen Verifikasi Penerima Bantuan Hibah dan Baras	Dokumen				1	50.000.000		1	48.537.225	0.0%	97.1%	1	48.537.225	0.0%	0.0%	Dinas Sosial																												
Rata-rata capaian kinerja (%)																	66.7%	84.7%			0.4%	16.4%	Dinas Sosial																										
Menurunkan Angka Kemiskinan	06	01	16	PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL		Keg	3	1.380.480.000	-	6	59.797.659	6	-	48.407.558	6	48.407.550	100.0%	81.0%	6	48.407.550	200.0%	3.5%	Dinas Sosial																										
																								06	01	16	30	Verifikasi Data Lansia	Jumlah Dokumen Data Verifikasi	Buku	100	73.500.000	0	-	20	19.988.250	0	20	13.913.750	20	13.913.750	100.0%	69.6%	20	13.913.750	20.0%	18.9%	Dinas Sosial	
																								06	01	16	36	Observasi Bantuan Pembangunan/Rehab dan Bedah Rumah Duafa	Jumlah Buku Hasil Observasi Bantuan Pembangunan/Rehab dan Bedah Rumah Duafa	Buku	5	180.730.000	0	-	5	0	-	-	0.0%	0.0%	-	-	0.0%	0.0%	Dinas Sosial				
																								06	01	16	37	Launching Pemberian Bantuan Sosial		Kal	1	466.150.000	0	-	1	0	-	-	0.0%	0.0%	-	-	0.0%	0.0%	Dinas Sosial				
																								06	01	16	38	Respon Kasus (Tanggapan Denurat Anak PMKS)	Jumlah Kasus yang didampiri	Kasus	0	660.100.000	0	-	1	39.798.800	-	1	34.493.800	0.0%	86.7%	1	34.493.800	0.0%	5.2%	Dinas Sosial			
																								Rata-rata capaian kinerja (%)																	25.0%	38.1%			5.0%	6.0%	Dinas Sosial		
Menurunkan Angka Kemiskinan	06	01	18	PROGRAM PEMBINAAN PADA PENYANGGAI cacat dan TRAUMA		Keg	1	785.000.000	-	1	184.000.000	-	1	135.710.755	1	135.710.755	100.0%	73.8%	1	135.710.755	100.0%	17.3%	Dinas Sosial																										
																								06	01	18	01	Pengadaan Alat Baru dan Penyandang Cacat	terbayanya kewajiban 2016				1	184.000.000	-	1	135.710.755	1	135.710.755	0.0%	73.8%	1	135.710.755	0%	17.3%	Dinas Sosial			
																								Rata-rata capaian kinerja (%)																	0.0%	73.8%			0.0%	17.3%	Dinas Sosial		
Menurunnya Angka Kemiskinan	06	01	19	PROGRAM PEMBINAAN PANTI ASUHAN/ PANTI JOMPO		Keg	1	688.105.621	-	1	112.710.000	1	112.710.000	-	1	112.710.000	100.0%	100.0%	1	112.710.000	100.0%	16.4%	Dinas Sosial																										
																								06	01	19	01	Pembangunan Sarana dan Prasarana Panti Asuhan/Jompo	terbayanya kewajiban 2016				1	112.710.000	-	1	112.710.000	0.0%	100.0%	-	112.710.000	0.0%	16.4%	Dinas Sosial					
																								Rata-rata capaian kinerja (%)																	0.0%	100.0%			0.0%	16.4%	Dinas Sosial		
Menurunnya Angka Kemiskinan	06	01	20	PROGRAM PEMBINAAN EKS PENYANGGAI PENYAKIT SOSIAL (EKS NARAPIDANA PSK NARKOBA DAN PENYAKIT SOSIAL)		Keg	1	91.576.500	-	1	29.000.000	1	-	25.800.000	1	25.800.000	100.0%	89.0%	1	25.800.000	100.0%	28.2%	Dinas Sosial																										
																								06	01	20	10	Pendataan & Pembinaan Penyandang Penyakit Sosial (Rusta Geperg)	Jumlah Geperg Yang Di Bina Di data	Keg	0	91.576.500	0	-	1	29.000.000	0	1	25.800.000	100.0%	89.0%	1	25.800.000	0.0%	28.2%	Dinas Sosial			
																								Rata-rata capaian kinerja (%)																	100.0%	89.0%			0.0%	28.2%	Dinas Sosial		
Menurunnya Angka Kemiskinan	06	01	21	PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL		Keg	5	1.069.683.360	-	5	175.363.360	5	143.223.360	29.600.000	5	172.823.360	100.0%	98.6%	5	172.823.360	100.0%	16.2%	Dinas Sosial																										
																								06	01	21	05	Penyediaan Fasilitas Alat alat Pendukung Bagi Pemberdayaan Organisasi - Lembaga Sosial Masyarakat	terbayanya kewajiban 2016	Paket	0	710.703.360	-	1	125.303.360	1	124.623.360	1	124.623.360	100.0%	99.5%	1	124.623.360	0.0%	17.5%	Dinas Sosial			
																								06	01	21	10	Tin Terpadu Penanggulangan Bencana	Periode Penanggulangan Bencana	Bulan	60	358.980.000	-	-	12	50.000.000	12	18.600.000	29.600.000	24	48.200.000	200.0%	96.4%	24	48.200.000	40.0%	13.4%	Dinas Sosial	
Rata-rata capaian kinerja (%)																	150.0%	97.9%			20.0%	15.5%	Dinas Sosial																										
Rata-rata capaian kinerja (%)																	66.8%	76.2%			23.6%	12.2%	Dinas Sosial																										

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) dan satuannya	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2022 (PRPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPJ Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPJ Tahun 2018 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja Pada Semester				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPJ yang Dievaluasi (2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPJ Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPJ)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		Peningkat Daerah Penanggung Jawab	Ket				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	Semester I		Semester II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp		
											K	Rp	K	Rp													K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			
		02	01	01	17	Penyediaan Makan dan Minuman	Periode penyediaan makanan dan minuman	Bln	55	38,710,000	-	-	11	6,000,000	-	-	11	6,000,000	100.0%	100.0%	11	6,000,000	20.0%	15.5%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
		02	01	01	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keuar Daerah	Periode Rapat-rapat koordinasi & konsultasi dalam & keluar daerah	Bln	60	759,764,315	-	-	12	135,430,000	-	-	12	135,374,784	100.0%	100.0%	12	135,374,784	20.0%	17.8%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
		02	01	01	20	Penyediaan Jasa Pegawai Tetap	Jumlah jasa Pegawai tidak tetap (31 org x 12 bulan)	OB	1860	695,664,625	-	-	372	171,304,625	-	-	372	164,545,500	100.0%	96.1%	372	164,545,500	20.0%	23.7%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
Rata-rata capaian kinerja (%)											100.0%	98.1%					59.7%	15.5%										
Predikat Kinerja											ST	ST					R	SR										
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	02	01	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur		100	506,235,046	-	-	100	97,858,000	50	1,872,000		93,795,800	50	95,667,800	50.0%	97.8%	50	95,667,800	50.0%	18.9%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
		02	01	02	11	Pengadaan Peralatan dan Perengkapan Kantor	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	Unit	13	59,997,046	-	-	1	5,000,000		1	4,600,000	1	4,600,000	100.0%	92.0%	1	4,600,000	7.7%	7.7%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
		02	01	02	22	Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dan gedung	Gedung	14	24,180,000	-	-	1	3,000,000	1	970,000		2,000,000	1	2,970,000	100.0%	99.0%	1	2,970,000	7.1%	12.3%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		02	01	02	23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan (1 unit x 12 bulan)	UB	60	127,318,000	-	-	1	25,618,000		1	25,548,400	1	25,548,400	100.0%	99.7%	1	25,548,400	1.7%	20.1%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
		02	01	02	24	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas	UB	336	257,240,000	-	-	4	54,240,000	4	902,000		51,807,400	4	52,709,400	100.0%	97.2%	4	52,709,400	1.2%	20.5%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		02	01	02	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perengkapan Kantor	Periode pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	bln	12	37,500,000	-	-	12	10,000,000		12	9,840,000	12	9,840,000	100.0%	98.4%	12	9,840,000	100.0%	26.2%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
Rata-rata capaian kinerja (%)											100.0%	97.3%					23.5%	17.3%										
Predikat Kinerja											ST	ST					SR	SR										
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	02	01	03		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Terpenuhinya Kebutuhan Aparatur Dalam Menjalankan Tugas		100	300,255,000	-	-	100	50,000,000				50,000,000		50,000,000	0.0%	100.0%		50,000,000	0.0%	16.7%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
		2	01	03	06	Penyediaan Sewa Gedung Kantor	periode sewa Gedung kantor	thn	5	300,255,000	-	-	1	50,000,000			50,000,000		50,000,000	0.0%	100.0%		50,000,000	0.0%	16.7%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
Rata-rata capaian kinerja (%)											0.0%	100.0%					0.0%	16.7%										
Predikat Kinerja											SR	ST					SR	SR										
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	02	01	07		Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah		100	13,374,120	-	-	50	8,148,000		50	8,128,000		8,128,000	50	8,128,000	100.0%	99.8%	50	8,128,000	50.0%	60.8%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		02	01	07	02	Penyusunan Rencana Kerja RENJA Satuan Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Buku RENJA	Buku	75	5,826,120			15	700,000		15	700,000	15	700,000	100.0%	100.0%	15	700,000	20.0%	12.0%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
		02	01	07	04	Penyusunan Standart Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah	Jumlah Buku standart operasional prosedur(SOP) Administrasi Pemerintah	Buku	10	7,548,000			20	7,448,000		20	7,428,000	20	7,428,000	100.0%	99.7%	20	7,428,000	200.0%	98.4%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
Rata-rata capaian kinerja (%)											200.0%	199.7%					220.0%	110.4%										
Predikat Kinerja											ST	ST					ST	ST										
Menurunkan Angka Kemiskinan	02	01	17		Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Presentase Pemberdayaan Kelompok Perempuan		100	285,800,000	-	-	100	76,610,000	0			72,819,300		72,819,300	0.0%	96.1%		72,819,300	0.0%	28.5%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
		02	01	17	15	Perombaan Dalam Rangka Peringatan Hari Ibu	jumlah perombaan	keg	5	185,800,000	-	-	1	56,810,000		1	55,209,300	1	55,209,300	100.0%	97.2%	1	55,209,300	20.0%	29.7%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
		02	01	17	17	Perombaan Dalam Rangka Hari Ulang Tahun DWP	jumlah peserta perombaan	org	250	100,000,000	-	-	1	19,800,000		1	17,610,000	1	17,610,000	100.0%	88.9%	1	17,610,000	0.4%	17.6%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
Rata-rata capaian kinerja (%)											100.0%	93.1%					10.2%	23.7%										
Predikat Kinerja											ST	ST					SR	SR										
Menurunkan Angka Kemiskinan	02	01	16		Program Penguatan Kemampuan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Cakupan Perempaan dan Anak Korban Kekerasan		100	469,000,000	-	-	100	99,702,600	40	8,220,000		88,872,500	40	97,092,500	40.0%	97.4%	40	97,092,500	40.0%	20.7%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) dan satuannya	Target RPJMD pada Tahun s/d 2022 (PRPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPJ Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPJ Tahun 2018 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja Pada Semester				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPJ yang Dievaluasi (2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPJ Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPJ)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD S/D Tahun 2018 (%)		Peningkat Daya Penanggung Jawab	Ket		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	Semester I		Semester II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
											9	10	11-9-10	12-11/8												
1																										
		07 01 02 24	Peneliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Yang Terpelihara	UB	60	96,879,761	-	-	1	22,000,000	1	9,499,430		10,841,380	1	20,340,810	100.0%	92.5%	1	20,340,810	1.7%	21.0%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong		
		07 01 02 30	Peneliharaan Rutin/berkala Peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	60	78,470,000	-	-	4	15,000,000	2	6,270,000	2	8,730,000	4	15,000,000	100.0%	100.0%	4	15,000,000	6.7%	19.1%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong		
		07 01 02 42	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah Gedung kantor Yang dirhab	Bulan	48	445,200,000	-	-	1	70,200,000	1	70,200,000		-	1	70,200,000	100.0%	100.0%	1	70,200,000	2.1%	15.8%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong		
Rata-rata capaian kinerja (%)																	100.0%	96.8%			2.8%	17.6%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong			
Predikat Kinerja																	ST	ST			SR	SR	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong			
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	07 01 02		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Cakupan kegiatan pendidikan dan pelatihan formal yang diikuti		1	61,051,000	-	-	1	10,000,000	1	10,000,000		-	1	10,000,000	100.0%	100.0%	1	10,000,000	100.0%	16.4%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong		
		07 01 02 01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Periode Pendidikan dan Pelatihan Formal	Bulan	60	61,051,000	0	-	4	10,000,000	4	10,000,000		-	4	10,000,000	100.0%	100.0%	4	10,000,000	6.7%	16.4%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong		
Rata-rata capaian kinerja (%)																	100.0%	100.0%			6.7%	16.4%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong			
Predikat Kinerja																	ST	ST			SR	SR	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong			
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	07 01 07		PROGRAM PENYUSUNAN PERENCANAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Cakupan penyediaan dokumen perencanaan SKPK		25	4,884,080	-	-	2	800,000	1	800,000		-	1	800,000	50.0%	100.0%	1	800,000	4.0%	16.4%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong		
		07 01 07 02	Penyusunan Rencana Kerja (RKUN) Satuan Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Buku Rencana Kerja SRPD	Buku	25	4,884,080	0	-	5	800,000	5	800,000		-	5	800,000	100.0%	100.0%	5	800,000	20.0%	16.4%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong		
Rata-rata capaian kinerja (%)																	100.0%	100.0%			20.0%	16.4%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong			
Predikat Kinerja																	ST	ST			SR	SR	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong			
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	07 01 15		PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PERDESAAN	Cakupan pengembangan masyarakat pedesaan		68	485,392,292	-	-	10	471,659,625	10	107,775,800		363,466,199	10	471,241,999	100.0%	99.9%	10	471,241,999	14.7%	97.1%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong		
		07 01 15 25	Pembiayaan dan Pengendalian Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG)	Jumlah Gampong Yang Dibina	Gampong	68	484,612,292	-	-	68	14,400,000	68	14,400,000		-	68	14,400,000	100.0%	100.0%	68	14,400,000	100.0%	3.0%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong		
		07 01 15 60	Tata cara pengadaan barang dan jasa digampong	Jumlah Gampong yang terima	buku	100	780,000	-	-	100	780,000	100	780,000		-	100	780,000	100.0%	100.0%	100	780,000	100.0%	100.0%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong		
		07 01 15 65	Satuan Kerja Pembiayaan Administrasi Keuangan Gampong	Jumlah Gampong yang terima	Gampong yang terima dan 12 Bulan	68	-	-	-	1	456,479,625	1	92,595,800		363,466,199	1	456,061,999	100.0%	99.9%	1	456,061,999	1.5%	0.0%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong		
Rata-rata capaian kinerja (%)																	100.0%	100.0%			67.2%	34.3%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong			
Predikat Kinerja																	ST	ST			S	SR	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong			
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	07 01 17		PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA	Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat		100%	2,289,960,000	-	-	2	433,510,000	0	113,105,700		314,789,850	-	427,895,550	0.0%	98.7%	-	427,895,550	0.0%	18.7%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong		
		07 01 17 10	Koordinasi Kelompok Kerja (Pikjama)	Periode Pembiayaan Pengembangan PKK	Bulan	0	-	-	-	1	5,000,000	-	-	1	3,986,000	1	3,986,000	100.0%	79.7%	1	3,986,000	0.0%	0.0%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong		
		07 01 17 11	Pembiayaan Pengembangan PKK	Periode Pembiayaan Pengembangan PKK	Pertemuan	125	2,289,960,000	-	-	1	428,510,000	1	113,105,700		310,803,850	1	423,909,550	100.0%	98.9%	1	423,909,550	0.8%	18.5%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong		
Rata-rata capaian kinerja (%)																	100.0%	89.3%			0.4%	9.3%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong			
Predikat Kinerja																	ST	T			SR	SR	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong			
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PER BIDANG URUSAN)																	100.0%	97.4%			18.6%	19.0%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong			
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PER URUSAN)																	ST	ST			SR	SR	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong			
II.8		08		Bidang Urusan : Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			13,117,236,201				2,363,202,800		74,387,800		1,820,502,540	-	1,894,890,340								Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
II.8.1		08 01		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			13,117,236,201				2,363,202,800		74,387,800		1,820,502,540		1,894,890,340								Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	08 01 15		PROGRAM KELUARGA BERENCANA	Rata-rata jumlah anak per keluarga		100	11,603,477,429	-	-	100	2,103,512,800	50	11,027,800		1,625,089,740	50	1,636,117,540	50.0%	77.8%	50	1,636,117,540	50.0%	14.1%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
		08 01 15 09	Hari Keluarga Nasional (HARGANAS) TK Kota Lhokseumawe	jumlah pemenang yang mengikuti hari keluarga nasional	kelompok	10	494,830,000	-	-	1	49,000,000		-		47,754,400	-	47,754,400	0.0%	97.5%	-	47,754,400	0.0%	9.7%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
		08 01 15 11	Peningkatan sarana dan prasarana dalam rangka meningkatkan program keluarga Berencana (DAK)	jumlah sarana dan prasarana dalam rangka meningkatkan program keluarga berencana	jenis	32	4,792,000,000	-	-	12	974,182,800				914,924,750		914,924,750	0.0%	93.9%	-	914,924,750	0.0%	19.1%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
		08 01 15 17	Penyediaan Kebutuhan Bantuan Operasional KB (DAK Non Fisik)	Pelayanan KB	bln	60	6,098,847,429	-	-	12	1,042,330,000	6	11,027,800		632,655,390	6	643,683,190	50.0%	61.8%	6	643,683,190	10.0%	10.6%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
		08 01 15 18	Penyediaan Alat dan obat kontrasepsi (DAK Non Fisik)	Jumlah Fasilitas kesehatan (faskes) yang disalurkan alat dan obat	bln	60	217,800,000	-	-	24	38,000,000				29,755,200	-	29,755,200	0.0%	78.3%	-	29,755,200	0.0%	13.7%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) dan satuannya	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2022 (PRPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPJ Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPJ Tahun 2018 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja Pada Semester				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPJ yang Dievaluasi (2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPJ Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPJ)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD S/D Tahun 2018 (%)		Peningkat Daya Penanggung Jawab	Ket								
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	Semester I		Semester II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp				
											K	Rp	K	Rp															K	Rp	K	Rp
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11-9-10	12-11/8	13-7+11	14-13/6+10/0%	15	16												
											Rata-rata capaian kinerja (%)				12.5%	82.9%			2.5%	13.2%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana											
											Predikat Kinerja				SR	T			SR	SR	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana											
Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	08	01	16	PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA	Laju Pertumbuhan Penduduk Cakupan Pelayanan Reproduksi Remaja	100	500,000,000	-	-	100	100,000,000	50	58,160,000	50	41,606,000	50	99,766,000	50.0%	99.8%	50	99,766,000	50.0%	20.0%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana								
						08	01	16	03	Sunat Rasul Anak Pra Sejahtera	jumlah sunat rasul anak pra sejahtera	Orang	980	500,000,000	-	-	200	100,000,000	100	58,160,000	100	41,606,000	200	99,766,000	100.0%	99.8%	200	99,766,000	20.4%	20.0%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
											Rata-rata capaian kinerja (%)				100.0%	99.8%			20.4%	20.0%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana											
											Predikat Kinerja				ST	ST			SR	SR	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana											
Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	08	01	17	PROGRAM PELAYANAN KONTRASEPSI	Rasio Aseptor KB	100	305,255,000	-	-	100	50,000,000	-	-	-	50,000,000	-	50,000,000	0.0%	100.0%	-	50,000,000	0.0%	16.4%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana								
						08	01	17	06	Bhakti Sosial KB - TNI (Merangssi KB Ke)	jumlah kecamatan	kecamatan	4	305,255,000	-	-	1	50,000,000	-	50,000,000	0.0%	100.0%	-	50,000,000	0.0%	16.4%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					
											Rata-rata capaian kinerja (%)				0.0%	100.0%			0.0%	16.4%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana											
											Predikat Kinerja				SR	ST			SR	SR	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana											
Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	08	01	23	PROGRAM PENYIAPAN TENAGA PENDAMPING KELOMPOK BINA KELUARGA	Cakupan peserta KB aktif	100	708,803,772	-	-	100	109,690,000,00	50	5,200,000	50	103,806,800	100	109,006,800	100.0%	99.4%	100	109,006,800	100.0%	15.4%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana								
						08	01	23	04	Pembinaan dan penilaian desa binaan terbaik bina keluarga banata BKB	jumlah kelompok bina keluarga banata (BKB) yang dinilai dan dibina	kelompok	16	225,120,000	-	-	4	120,000,000	-	-	0.0%	0.0%	-	-	0.0%	0.0%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					
						08	01	23	05	Kegiatan Pembinaan dan Penilaian KB Lestari	jumlah pasangan keuarga lestari	pasangan	20	200,000,000	-	-	68	40,000,000	68	39,721,400	100.0%	99.3%	68	39,721,400	340.0%	19.9%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					
						08	01	23	06	Kegiatan Pembinaan dan Penilaian Keluarga Harmonis	jumlah pasangan keluarga harmonis	pasangan	20	151,383,772	-	-	4	12,940,000	4	12,940,000	100.0%	100.0%	4	12,940,000	20.0%	8.5%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					
						08	01	23	10	Kegiatan Pembinaan dan Penilaian Desa Binaan Terbaik Bina Keluarga Bina Holistik Integratif (BKB HI)	jumlah kelompok BKB	kelompok	73	132,000,000	-	-	4	56,630,000	2	5,200,000	2	51,145,400	4	56,345,400	100.0%	99.5%	4	56,345,400	5.5%	42.7%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
											Rata-rata capaian kinerja (%)				75.0%	74.7%			91.4%	17.8%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana											
											Predikat Kinerja				S	S			ST	SR	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana											
											TOTAL RATA RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PER BIDANG URUSAN)				46.9%	89.3%			28.6%	16.8%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana											
											PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PER BIDANG URUSAN)				SR	T			SR	SR	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana											
IL.9		09		Bidang Urusan : Perhubungan				16,013,542,075					2,753,710,400		1,081,002,752		1,418,913,153		2,499,915,905						Dinas Perhubungan							
IL.9.1		09	01	Dinas Perhubungan				16,013,542,075					2,753,710,400		1,081,002,752		1,418,913,153		2,499,915,905							Dinas Perhubungan						
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	09	01	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PENGANTORAN	cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100	6,330,263,702	-	-	100	1,481,042,900	50	583,000,752	50	836,262,553	50	1,419,263,305	50.0%	96.8%	50	1,419,263,305	50.0%	22.4%	Dinas Perhubungan								
						09	01	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Periode penyediaan Benda Pos dan Paket Pengiriman	Bulan	60	22,152,000	-	-	12	2,700,000	6	750,000	6	1,644,000	12	2,394,000	100.0%	88.7%	12	2,394,000	20.0%	10.8%	Dinas Perhubungan	
						09	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Periode penyediaan penerangan dan alat-alat komunikasi	Bulan	60	1,461,159,509	-	-	12	106,360,000	6	47,737,092	6	42,419,561	12	90,156,653	100.0%	84.8%	12	90,156,653	20.0%	6.2%	Dinas Perhubungan	
						09	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola keuangan SKPD	OB	1200	600,000,000	240	110,880,000	12	45,567,500	12	63,072,500	12	108,640,000	5.0%	98.0%	12	108,640,000	1.0%	18.1%	Dinas Perhubungan			
						09	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Periode tersedianya alat tulis	Bulan	60	173,932,000	-	-	12	27,824,000	6	14,000,000	6	13,577,100	50.0%	99.1%	6	27,577,100	10.0%	15.9%	Dinas Perhubungan			
						09	01	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Periode penyediaan bahan cetak dan fotocopy	Bulan	60	288,730,193	-	-	12	59,357,000	6	8,113,000	6	50,468,000	50.0%	98.7%	6	58,581,000	10.0%	20.3%	Dinas Perhubungan			
						09	01	01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Periode peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	60	60,000,000	-	-	12	14,373,900	6	2,373,900	6	11,551,500	6	13,925,400	50.0%	96.9%	6	13,925,400	10.0%	23.2%	Dinas Perhubungan	
						09	01	01	15	Penyediaan Bahan Baraan dan Perundang-undangan	Periode penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	eks	1825	9,940,000	-	-	12	1,368,000	6	684,000	6	684,000	6	1,368,000	50.0%	100.0%	6	1,368,000	0.3%	13.8%	Dinas Perhubungan	
						09	01	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Periode penyediaan makanan dan minuman	Bulan	55	36,050,000	-	-	12	4,050,000	6	1,150,000	6	2,437,500	6	3,587,500	50.0%	88.6%	6	3,587,500	10.9%	10.0%	Dinas Perhubungan	
						09	01	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keuar Daerah	Periode rapat-rapat koordinasi & konsultasi dalam & luar daerah	Bulan	60	564,600,000	-	-	12	139,000,000	6	39,615,260	99,383,392	6	138,998,652	50.0%	100.0%	6	138,998,652	10.0%	24.6%	Dinas Perhubungan		
09	01	01	20	Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap	Jumlah tenaga kerja tidak tetap	OB	6156	3,113,700,000	-	-	1464	1,015,130,000	6	423,010,000	6	551,025,000	6	974,035,000	0.4%	96.0%	6	974,035,000	0.1%	31.3%	Dinas Perhubungan							
											Rata-rata capaian kinerja (%)				50.5%	95.1%			9.2%	17.4%	Dinas Perhubungan											
											Predikat Kinerja				R	ST			SR	SR	Dinas Perhubungan											

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) dan satuannya	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2022 (PRPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2018 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja Pada Semester				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPd)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD S/D Tahun 2018 (%)		Peningkat Deraf Penanggung Jawab	Ket				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	Semester I		Semester II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp
											9	10	11-9-10	12- 11/8														
									6	7	8	9	10	11-9-10	12- 11/8	13- 7+11	14-13/6/100%	15	16									
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	09	01	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	2,348,967,348	-	-	100	530,690,000	30	198,501,000	10	279,704,200	30	478,205,200	30.0%	90.1%	30	478,205,200	30.0%	20.4%	Dinas Perhubungan	16			
				09 01 02 11	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pengadaan peralatan dan Perlengkapan Kantor	Unit	7	155,000,000	-	-	-	17,500,000	0	-	1	15,250,000	1	15,250,000	0.0%	87.1%	1	15,250,000	14.3%		9.8%	Dinas Perhubungan	
				09 01 02 22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	bin	60	85,792,000	-	-	1	3,000,000	0	-	1	3,000,000	1	3,000,000	100.0%	100.0%	1	3,000,000	1.7%		3.5%	Dinas Perhubungan	
				09 01 02 23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan (1 unit x 12 bulan)	ub	60	154,714,160	-	-	1	26,640,000	1	9,264,500	-	15,763,700	1	25,028,200	100.0%	93.9%	1	25,028,200	1.7%		16.2%	Dinas Perhubungan	
				09 01 02 24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pemeliharaan / berkala kendaraan	ub	960	1,893,461,188	-	-	12	473,350,000	6	186,786,500	6	238,440,500	12	425,227,000	100.0%	89.8%	12	425,227,000	1.3%		22.5%	Dinas Perhubungan	
				09 01 02 30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Mobiler , Komputer dll)	periode pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	bin	60	60,000,000	-	-	61	10,200,000	30	2,450,000	31	7,250,000	61	9,700,000	100.0%	95.1%	61	9,700,000	101.7%		16.2%	Dinas Perhubungan	
Rata-rata capaian kinerja (%)																	80.0%	93.2%	-	-	24.1%	13.6%	Dinas Perhubungan					
Predikat Kinerja																	T	ST	-	-	SR	SR	Dinas Perhubungan					
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	09	01	07	Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja	Cakupan penyediaan dokumen perencanaan SKPK	100	7,576,120	-	-	100	1,450,000	0	-	-	1,450,000	-	1,450,000	0.0%	100.0%	-	1,450,000	0.0%	19.1%	Dinas Perhubungan				
				09 01 07 02	Penyusunan Rencana Kerja (RKJ) Satuan Kerja Perangkat Daerah	Jumlah buku renja SKPD	Buku	45	7,576,120	-	-	30	1,450,000	-	-	30	1,450,000	30	1,450,000	100.0%	100.0%	30	1,450,000	66.7%	19.1%	Dinas Perhubungan		
Rata-rata capaian kinerja (%)																	100.0%	100.0%	-	-	66.7%	19.1%	Dinas Perhubungan					
Predikat Kinerja																	ST	ST	-	-	S	SR	Dinas Perhubungan					
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	09	01	10	Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan Penyediaan Dokumen Standart Pelayanan	100	11,650,000	-	-	100	5,825,000	0	-	-	-	-	-	0.0%	0.0%	-	-	0.0%	0.0%	Dinas Perhubungan				
				09 01 10 11	Penyusunan Standar Pelayanan Minimum (SPM)	Jumlah Dokumen Pelayanan SKPD	Dokumen	2	11,650,000	-	-	7	5,825,000	0	-	-	-	-	-	0.0%	0.0%	-	-	0.0%	0.0%	Dinas Perhubungan		
Rata-rata capaian kinerja (%)																	0.0%	0.0%	-	-	0.0%	0.0%	Dinas Perhubungan					
Predikat Kinerja																	SR	SR	-	-	SR	SR	Dinas Perhubungan					
Terwujudnya Sistem Transportasi Yang Aman dan Handal	09	01	15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Cakupan Prasarana dan fasilitas perhubungan	100	77,822,930	-	-	100	35,730,000	0	-	-	35,730,000	-	35,730,000	0.0%	100.0%	-	35,730,000	0.0%	45.9%	Dinas Perhubungan				
				09 01 15 04	Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan	Jumlah kebijakan dibidang perhubungan	unit	3	77,822,930	0	-	2	35,730,000	0	-	2	35,730,000	2	35,730,000	100.0%	100.0%	2	35,730,000	66.7%	45.9%	Dinas Perhubungan		
Rata-rata capaian kinerja (%)																	100.0%	100.0%	-	-	66.7%	45.9%	Dinas Perhubungan					
Predikat Kinerja																	ST	ST	-	-	S	SR	Dinas Perhubungan					
Terwujudnya Sistem Transportasi Yang Aman dan Handal	09	01	16	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Cakupan Pemeliharaan Fasilitas LLAJ	100	479,819,360	-	-	100	85,880,000	-	-	-	37,900,000	-	37,900,000	0.0%	44.1%	-	37,900,000	0.0%	7.9%	Dinas Perhubungan				
				09 01 16 06	Pembangunan Halte, traffic dan rambu-rambu LLAJ	Jumlah tempat pemberhentian kendaraan umum	unit	5	274,552,000	-	-	1	47,880,000	-	-	-	-	-	-	0.0%	0.0%	-	-	0.0%	0.0%	Dinas Perhubungan		
				09 01 16 05	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Halte, Traffic dan Rambu-Rambu LLAJ	periode pemeliharaan fasilitas lalu lintas jalan	bin	60	205,267,360	-	-	40	38,000,000	-	-	40	37,900,000	40	37,900,000	100.0%	99.7%	40	37,900,000	66.7%	18.5%	Dinas Perhubungan		
Rata-rata capaian kinerja (%)																	50.0%	49.9%	-	-	33.3%	9.2%	Dinas Perhubungan					
Predikat Kinerja																	SR	SR	-	-	SR	SR	Dinas Perhubungan					
Terwujudnya Sistem Transportasi Yang Aman dan Handal	09	01	17	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Jumlah Uji Kir Angkutan Umum	100	1,401,233,615	-	-	100	315,858,500	40	196,787,000	-	109,675,000	40	306,462,000	40.0%	97.0%	40	306,462,000	40.0%	21.9%	Dinas Perhubungan				
				09 01 17 05	Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya	periode pengawasan lalu lintas	bin	60	969,494,350	-	-	80	82,000,000	0	-	80	72,775,000	80	72,775,000	100.0%	88.8%	80	72,775,000	133.3%	7.5%	Dinas Perhubungan		
				09 01 17 18	Penciptaan Manajemen Rekrayasa Lalu Lintas guna Meningkatkan keselamatan lalu lintas	Jumlah rekrayasa lalu lintas	unit	130	143,790,765	-	-	12	92,410,000	12	92,400,000	-	-	12	92,400,000	100.0%	100.0%	12	92,400,000	9.2%	64.3%	Dinas Perhubungan		
				09 01 17 09	Penciptaan disiplin dan pemeliharaan kebersihan lingkungan terminal	periode penciptaan disiplin dan pemeliharaan terminal	bin	60	287,948,500	-	-	12	141,448,500	6	104,387,000	6	36,900,000	12	141,287,000	100.0%	99.9%	12	141,287,000	20.0%	49.1%	Dinas Perhubungan		
Rata-rata capaian kinerja (%)																	100.0%	96.2%	-	-	54.2%	40.3%	Dinas Perhubungan					
Predikat Kinerja																	ST	ST	-	-	R	SR	Dinas Perhubungan					
Terwujudnya Sistem Transportasi Yang Aman dan Handal	09	01	18	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Cakupan Sarana dan Prasarana Perhubungan Publik	100	533,180,000	-	-	100	120,894,000	50	102,714,000	-	18,180,000	-	120,894,000	50.0%	100.0%	50	120,894,000	50.0%	22.7%	Dinas Perhubungan				
				09 01 18 12	Penyusunan DED	Jumlah DED	Dokumen	10	365,000,000	-	-	1	102,714,000	1	102,714,000	-	-	1	102,714,000	100.0%	100.0%	1	102,714,000	10.0%	28.1%	Dinas Perhubungan		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) dan satuannya	Target RPJMD pada Tahun s/d 2022 (PRPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun 2018 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja Pada Semester				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang Dievaluasi (2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPKD Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPKD s/d Tahun 2018 (%)		Pemangkas Dana/ Penanggung Jawab	Ket			
						Rp		Rp		Rp		Rp		Rp		Rp		Rp		Rp						
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11-9-10		12-11/8		13-7-11		14-13/6/100%		15		16						
										Predikat Kinerja		ST	ST			SR	SR	Dinas Komunikasi, Informatika dan persandian								
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	2	10	05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Cakupan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal yang diikuti	100	244,204,000			100	40,000,000	50	29,040,000	10,800,000	50	39,840,000	50.0%	99.6%	50	39,840,000	50.0%	16.3%	Dinas Komunikasi, Informatika dan persandian			
	2	10	03	06	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Periode Pegawai yang mengikuti pelatihan	Bulan	60	244,204,000	-	-	12	40,000,000	6	29,040,000	6	10,800,000	12	39,840,000	100.0%	99.6%	12	39,840,000	20.0%	16.3%	Dinas Komunikasi, Informatika dan persandian
										Rata-rata capaian kinerja (%)		100.0%	99.6%			20.0%	16.3%	Dinas Komunikasi, Informatika dan persandian								
										Predikat Kinerja		ST	ST			SR	SR	Dinas Komunikasi, Informatika dan persandian								
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	2	10	07	Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja	Cakupan Penyediaan Dokumen Perencanaan SKPK	100	18,208,500			100	12,488,500	-	-	12,204,200	-	12,204,200	0.0%	97.7%	-	12,204,200	0.0%	67.0%	Dinas Komunikasi, Informatika dan persandian			
	2	10	07	02	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Satuan Kerja Perangkat Daerah	Jumlah buku renja SKPD	Buku	50	9,958,500	-	-	25	4,238,500	-	25	4,236,000	25	4,236,000	100.0%	99.9%	25	4,236,000	50.0%	42.5%	Dinas Komunikasi, Informatika dan persandian	
	2	10	07	04	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah	Jumlah buku SOP SKPD	Buku	50	8,250,000	-	-	10	8,250,000	-	10	7,968,200	10	7,968,200	100.0%	96.6%	10	7,968,200	20.0%	96.6%	Dinas Komunikasi, Informatika dan persandian	
										Rata-rata capaian kinerja (%)		100.0%	98.3%			35.0%	69.6%	Dinas Komunikasi, Informatika dan persandian								
										Predikat Kinerja		ST	ST			SR	S	Dinas Komunikasi, Informatika dan persandian								
Meningkatnya Pengembangan dan Pemanfaatan TIK terhadap Informasi Publik	2	10	15	Program Pengembangan Penerbitan, Informasi dan Media Massa	Cakupan Penyelenggaraan Penerbitan Daerah / Cakupan Penyediaan Dokumen DED	100	110,525,000	-	-	100	110,525,000	50	85,860,000	24,800,000	50	110,360,000	50.0%	99.9%	50	110,360,000	50.0%	99.9%	Dinas Komunikasi, Informatika dan persandian			
	2	10	15	26	Penyiapan dan Pengelolaan Sistem Jaringan Komunikasi dan Informatika	Periode Pengelolaan Sistem Jaringan Komunikasi dan Terbayarnya Kewajiban 2016	Bulan	12	51,525,000	-	-	1	51,525,000	1	51,360,000	1	51,360,000	100.0%	99.7%	1	51,360,000	8.3%	99.7%	Dinas Komunikasi, Informatika dan persandian		
	2	10	15	27	Pengadaan Blue Print Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Kota Lhokseumawe	Periode Penyusunan Blue Print Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Kota Lhokseumawe	Bulan	12	59,000,000	-	-	1	59,000,000	1	34,500,000	1	59,000,000	100.0%	100.0%	1	59,000,000	8.3%	100.0%	Dinas Komunikasi, Informatika dan persandian		
										Rata-rata capaian kinerja (%)		100.0%	99.8%			8.3%	99.8%	Dinas Komunikasi, Informatika dan persandian								
										Predikat Kinerja		ST	ST			SR	ST	Dinas Komunikasi, Informatika dan persandian								
Meningkatnya Pengembangan dan Pemanfaatan TIK terhadap Informasi Publik	2	10	20	Program Pengelolaan Data dan Informasi	Cakupan Pengelolaan Data dan Informasi	100	317,540,000			100	164,040,000	50	64,396,376	50	97,481,000	100	161,877,376	100.0%	98.7%	100	161,877,376	100.0%	51.0%	Dinas Komunikasi, Informatika dan persandian		
	2	10	20	01	Pengelolaan data dan Informasi Publik	Periode Pengelolaan Data dan Informasi Publik	bulan	12	166,540,000	-	-	42	114,040,000	6	33,354,000	6	78,787,000	12	112,141,000	28.6%	98.3%	12	112,141,000	100.0%	67.3%	Dinas Komunikasi, Informatika dan persandian
	2	10	20	02	Pengelolaan Email Pemerintah Kota Lhokseumawe	Periode Pengelolaan Email Pemerintah Kota Lhokseumawe	bulan	12	151,000,000	-	-	42	50,000,000	6	31,042,376	6	18,694,000	12	49,736,376	28.6%	99.5%	12	49,736,376	100.0%	32.9%	Dinas Komunikasi, Informatika dan persandian
										Rata-rata capaian kinerja (%)		28.6%	98.9%			100.0%	50.1%	Dinas Komunikasi, Informatika dan persandian								
										Predikat Kinerja		SR	ST			ST	R	Dinas Komunikasi, Informatika dan persandian								
										TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM		89.8%	96.9%			32.5%	41.2%	Dinas Komunikasi, Informatika dan persandian								
										PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM		T	ST			ST	SR	Dinas Komunikasi, Informatika dan persandian								
H.10.3	10	03		Sekretariat Daerah			6,649,183,150				1,383,255,800		-		1,371,063,633									Sekretariat Daerah		
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10	03	15	PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA	Terlaksananya pengembangan komunikasi, informasi dan media massa	100	2,568,436,250	-	-	100	741,670,000	-	-	100	736,077,833	100	736,077,833	100.0%	99.2%	100	736,077,833	100%	28.7%	Sekretariat Daerah		
	10	03	15	03	Pembinaan dan pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi	Periode pembinaan dan pengembangan SDM Aparatur	bln	60	1,328,924,250	-	-	12	266,030,000	-	12	264,860,433	12	264,860,433	100.0%	99.6%	12	264,860,433	20%	19.9%	Sekretariat Daerah	
	10	03	15	05	Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi	Jumlah alat studio dan komunikasi yang dibeli	Jenis	60	235,640,000	-	-	5	337,640,000	-	5	336,440,000	5	336,440,000	100.0%	99.6%	5	336,440,000	8%	142.8%	Sekretariat Daerah	
	10	03	15	20	Pelaksanaan Kegiatan protokoluler Pemko Lhokseumawe	Periode Pelaksanaan Kegiatan protokoluler Pemko Lhokseumawe	bln	60	235,640,000	-	-	12	18,000,000	-	12	17,917,200	12	17,917,200	100.0%	99.5%	12	17,917,200	20%	7.6%	Sekretariat Daerah	
	10	03	15	21	Pelaksanaan Peliputan untuk Publikasi dan doktasi	Periode pelaksanaan peliputan	bln	60	768,232,000	-	-	12	120,000,000	-	12	116,860,200	12	116,860,200	100.0%	97.4%	12	116,860,200	20%	15.2%	Sekretariat Daerah	
										Rata-rata capaian kinerja (%)		100.0%	99.0%			17.1%	46.4%	Sekretariat Daerah								
										Predikat Kinerja		ST	ST			SR	SR	Sekretariat Daerah								
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10	03	18	PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN MASS MEDIA	Terlaksananya kerjasama informasi dengan media massa	100	4,080,746,900	-	-	100	641,585,800	0	-	100	634,985,800	100	634,985,800	100.0%	99.0%	100	634,985,800	100%	15.6%	Sekretariat Daerah		
	10	03	18	02	Penyebarnya Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Periode publikasi penyelenggaraan Pemerintahan	bln	60	4,053,961,100	-	-	12	614,800,000	0	-	12	608,200,000	12	608,200,000	100.0%	98.9%	12	608,200,000	20%	15.0%	Sekretariat Daerah

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) dan satuannya	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2022 (PRPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d 4 RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja Pada Semester				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		Peningkat Daerah/ Penanggung Jawab	Ket	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	Semester I		Semester II		11-9-10		12-11/8		13-7+11		14-13/6/100%				
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
1		10 03 18 09	Pelatihan jurnalistik televisi dan media cetak	Jumlah pelatihan jurnalistik kegiatan	1	26,785,800	-	-	1	26,785,800	-	-	1	26,785,800	100.0%	100.0%	1	26,785,800	100%	100.0%	Sekretariat Daerah	16			
Rata-rata capaian kinerja (%)											100.0%	99.5%			60.0%	57.5%	Sekretariat Daerah								
Predikat Kinerja											ST	ST			R	R	Sekretariat Daerah								
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM											100.0%	99.2%			38.5%	51.9%									
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM											ST	ST			SR	R									
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PER BIDANG URUSAN)											94.9%	98.1%			180.0%	46.6%									
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PER BIDANG URUSAN)											ST	ST			ST	SR									
II.11		11	Bidang Urusan : Kopernasi dan UKM			4,376,232,808				1,849,679,608		331,261,793		1,140,630,107		1,471,891,900							Disperindagkop		
II.11.1		11 01	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM			4,376,232,808				1,849,679,608		331,261,793		1,140,630,107		1,471,891,900							Disperindagkop		
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	11 01 01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100	3,408,747,108	-	100	713,033,108	50	261,527,293		303,846,407	50.0%	79.3%	50	565,373,700	50%	16.6%			Disperindagkop		
	11 01 01 01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Periode Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bulan	60	12,500,000	-	12	1,500,000	6	-	6	1,500,000	100.0%	100.0%	12	1,500,000	20%	12.0%			Disperindagkop		
	11 01 01 02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Periode Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	60	1,129,039,608	-	12	199,039,608	6	32,382,207	6	67,106,607	100.0%	50.0%	12	99,488,814	20%	8.8%			Disperindagkop		
	11 01 01 07		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola keuangan SKPD	OB	1080	625,335,000	-	216	101,355,000	108	48,170,000	108	50,555,000	100.0%	97.4%	216	98,725,000	20%	15.8%			Disperindagkop		
	11 01 01 10		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Periode Penyediaan Alat Tulis Kantor	Bulan	60	119,567,500	-	12	22,113,500	6	6,473,300	6	15,628,300	100.0%	99.9%	12	22,101,600	20%	18.5%			Disperindagkop		
	11 01 01 11		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Periode penyediaan bahan cetak dan fotocopy	Bulan	60	47,400,000	-	12	9,000,000	6	1,419,250	6	7,475,500	100.0%	98.8%	12	8,894,750	20%	18.8%			Disperindagkop		
	11 01 01 13		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Periode penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	60	323,000,000	-	12	62,600,000	-	-	12	38,570,000	100.0%	61.6%	12	38,570,000	20%	11.9%			Disperindagkop		
	11 01 01 15		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan	Eks	1825	6,880,000	-	365	1,140,000	-	-	365	1,140,000	100.0%	100.0%	365	1,140,000	20%	16.6%			Disperindagkop		
	11 01 01 17		Penyediaan Makanan dan Minuman	Periode penyediaan makanan dan minuman	Bulan	55	29,600,000	-	11	5,800,000	-	-	-	-	0.0%	0.0%	-	-	0%	0.0%			Disperindagkop		
	11 01 01 18		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Sekitar Daerah	Periode perjalanan dinas luar daerah	Bulan	60	315,000,000	-	12	87,500,000	6	51,132,536	6	36,260,000	100.0%	99.9%	12	87,392,536	20%	27.7%			Disperindagkop		
	11 01 01 20		Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap	Jumlah jasa tenaga kerja tidak tetap	OB	3480	800,425,000	-	696	222,985,000	348	121,950,000	348	85,611,000	100.0%	93.1%	696	207,561,000	20%	25.9%			Disperindagkop		
Rata-rata capaian kinerja (%)											90.0%	80.1%			18.0%	15.6%									
Predikat Kinerja											T	T			SR	SR									
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	11 01 02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	Persentase	100	523,787,500	-	100	747,037,500	50	18,965,500		688,435,700	50.0%	94.7%	50	707,401,200	50%	135.1%			Disperindagkop		
	11 01 02 11		Pengadaan Peralatan dan Kelengkapan Kantor (Mobiler, Komputer, dll)	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	Unit	5	27,200,000	-	1	300,000,000	-	-	1	298,172,000	100.0%	99.4%	1	298,172,000	20.0%	1096.2%			Disperindagkop		
	11 01 02 22		Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	Gedung	15	49,000,000	-	3	359,500,000	-	-	3	352,313,000	100.0%	98.0%	3	352,313,000	20.0%	719.0%			Disperindagkop		
	11 01 02 23		Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dipelihara	UB	60	133,900,000	-	12	26,600,000	6	6,246,400		-	12	6,246,400	100.0%	23.5%	12	6,246,400	20.0%	4.7%			Disperindagkop
	11 01 02 24		Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah mobil operasional yang dipelihara	UB	180	289,187,500	-	36	56,037,500	18	12,719,100	18	33,050,700	100.0%	81.7%	36	45,769,800	20.0%	15.8%			Disperindagkop		
	11 01 02 30		Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Mobiler, Komputer, dll)	Periode pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	60	24,500,000	-	12	4,900,000	-	-	12	4,900,000	100.0%	100.0%	12	4,900,000	20.0%	20.0%			Disperindagkop		
Rata-rata capaian kinerja (%)											100.0%	80.5%			20.0%	371.1%									
Predikat Kinerja											ST	T			SR	ST									
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	11 01 03		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase tingkat disiplin aparatur	Persen	100	88,400,000	-	100	40,000,000	-	-		40,000,000	0.0%	100.0%	-	40,000,000	0%	45.2%			Disperindagkop		
	11 01 03 06		Penyediaan Sewa Gedung/ Gudang Kantor	Periode sewa gedung kantor	Tahun	4	88,400,000	-	1	40,000,000	-	-	1	40,000,000	100.0%	100.0%	1	40,000,000	25%	45.2%			Disperindagkop		
Rata-rata capaian kinerja (%)											100.0%	100.0%			25.0%	45.2%									
Predikat Kinerja											ST	ST			SR	SR									
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	11 01 07		PROGRAM PENYUSUNAN PERENCANAAN SATUAN KERJA PERANGKAT KERJA	Cakupan Penyediaan Dokumen perencanaan SKPK	Persen	100	7,029,200	-	2	1,340,000	-	-		493,500	0.0%	36.8%	-	493,500	0%	7.0%			Disperindagkop		
	11 01 07 02		Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Satuan Kerja Perangkat Daerah	Jumlah buku renja	Buku	50	7,029,200	-	10	1,340,000	-	-	10	493,500	100.0%	36.8%	10	493,500	20%	7.0%			Disperindagkop		
Rata-rata capaian kinerja (%)											100.0%	36.8%			20.0%	7.0%									

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) dan satuannya	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2022 (PRPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2018 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja Pada Semester				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPd)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD S/D Tahun 2018 (%)		Peningkat Deraf/ Penanggung Jawab	Ket		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	Semester I		Semester II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
											9	10	11-9-10	12-11/8												
1		2 13 01 18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan keluar Daerah	Periode Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan keluar Daerah	Hin	60	609,000,000			12	79,000,000	12	73,811,000		195,121,000	12	268,932,000	100.0%	340.4%	12	268,932,000	20.0%	44.2%	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata		
		2 13 01	Penyediaan Jasa Pegawai Tetap												585,500,000		585,500,000	0.0%	0.0%		585,500,000	0.0%	0.0%			
											Rata-rata capaian kinerja (%)		50.0%	148.6%			66.2%	24.4%	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata							
											Predikat Kinerja		SR	ST			S	SR	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata							
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	2 13 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur		100	1,174,838,164	-	100	172,464,650	50	147,241,300	50	17,081,400	100	164,322,700	100.0%	96.3%	100	164,322,700	100.0%	14.0%	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata			
		2 13 02	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Meubel, Komputer, dll)	Jumlah Pengadaan dan Perengkapan Kantor	Unit	152	880,418,164	0	6	144,324,650	3	134,020,000	3	134,020,000	3	134,020,000	50.0%	92.9%	3	134,020,000	2.0%	15.2%	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata			
		2 13 02	Pemeliharaan Rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah Mobil Jabatan yang Terpelihara	UB	60	294,420,000	0	24	28,140,000	12	13,221,300	12	13,581,400	24	26,802,700	100.0%	95.2%	24	26,802,700	40.0%	9.1%	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata			
		2 13 02	Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor									1	3,500,000	1	3,500,000	0.0%	0.0%	1	3,500,000	0.0%	0.0%					
											Rata-rata capaian kinerja (%)		50.0%	62.7%			14.0%	8.1%	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata							
											Predikat Kinerja		SR	R			SR	SR	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata							
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	2 13 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur		100	488,408,000	-	100	80,000,000	-	-	-	-	-	-	0.0%	0.0%	-	-	0%	0.0%	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata			
		2 13 03	Penyediaan Sewa Gedung/ Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang disewa	Tahun	5	488,408,000	-	1	80,000,000	-	-	-	-	-	-	0.0%	0.0%	-	-	0%	0.0%	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata			
											Rata-rata capaian kinerja (%)		0.0%	0.0%			0.0%	0.0%	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata							
											Predikat Kinerja		SR	SR			SR	SR	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata							
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	2 13 07	Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja	Terlaksananya Perencanaan bagi SKPD di Kota Lhokseumawe		100	15,000,000	-	100	3,000,000	50	3,000,000	-	-	50	3,000,000	50.0%	100.0%	50	3,000,000	50.0%	20.0%	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata			
		2 13 07	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SKPD	Jumlah Buku Renja	buku	65	15,000,000	-	10	3,000,000	10	3,000,000	-	-	10	3,000,000	100.0%	100.0%	10	3,000,000	15.4%	20.0%	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata			
											Rata-rata capaian kinerja (%)		100.0%	100.0%			15.4%	20.0%	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata							
											Predikat Kinerja		ST	ST			SR	SR	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata							
	Meningkatnya Generasi yang Berdaya Saing	1 01	Peningkatan Upaya Pemumbuhan Kelembagaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	Tersedianya Anggota Paskibra Kota Lhokseumawe		100	-	-	-	-	-	50	74,600,000	50	74,600,000	0.0%	0.0%	50	74,600,000	50%	0.0%	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata				
		1 01 16	Pelatihan Ekonomi Maritim Pemuda Kota Lhokseumawe										74,600,000		74,600,000	0.0%	0.0%		74,600,000	0%	0.0%	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata				
											Rata-rata capaian kinerja (%)		0.0%	0.0%			0.0%	0.0%	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata							
											Predikat Kinerja		SR	SR			SR	SR	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata							
	Meningkatnya Generasi yang Berdaya Saing	1 01 16	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Tersedianya Anggota Paskibra Kota Lhokseumawe		100	204,520,850	-	100	33,500,000	50	33,494,250	-	-	50	33,494,250	50.0%	100.0%	50	33,494,250	50.0%	16.4%	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata			
		1 01 16	Pembinaan dan Seleksi Paskibra Kota Lhokseumawe	Jumlah Paskibra yang dibina dan diseleksi	Orang	300	204,520,850	-	60	33,500,000	60	33,494,250	-	-	60	33,494,250	100.0%	100.0%	60	33,494,250	20.0%	16.4%	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata			
											Rata-rata capaian kinerja (%)		100.0%	100.0%			20.0%	16.4%	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata							
											Predikat Kinerja		ST	ST			SR	SR	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata							
	Meningkatnya Generasi yang Berdaya Saing	1 18 20	Program Pembinaan dan Pemasarakan Olahraga	Terlaksananya Program Pembinaan dan Pemasarakan Olahraga		100	3,314,395,520	-	100	898,325,570	50	217,830,000	-	-	50	1,644,400,068	50.0%	207.3%	50	1,662,230,068	50.0%	56.2%	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata			
		1 18 20	Permasalahan Olah Raga bagi Pelajar, Mahasiswa, dan Masyarakat	Jumlah Permasalahan Olah Raga bagi Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat		14	49,945,570	-	3	49,945,570	-	-	3	49,945,570	3	49,945,570	100.0%	100.0%	3	49,945,570	21.4%	100.0%	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata			
		1 18 20	Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah Sarana dan Prasarana Olah Raga dan Terbayarnya		9	1,459,926,430	-	1	600,760,000	1	158,730,000	-	-	1	158,730,000	100.0%	26.4%	1	158,730,000	11.1%	10.9%	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata			
		1 18 20	Pelaksanaan Turnamen Walikota Cup Lhokseumawe	Jumlah Turnamen Walikota Cup Lhokseumawe		11	1,395,163,520	-	1	147,820,000	1	59,100,000	-	-	1	179,400,000	100.0%	121.4%	1	179,400,000	9.1%	12.9%	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata			
		1 18 20	Pelaksanaan Turnamen Sepakbola dan Bola Voly Muara Satu Cup	Jumlah Cabang Sepakbola dan Bola Voly Muara Satu Cup Lhokseumawe yang diperkembangkan	Cabang	9	409,360,000	-	2	99,800,000	-	-	2	100,000,000	2	100,000,000	100.0%	100.2%	2	100,000,000	22.2%	24.4%	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata			
		1 18 20	Pelaksanaan Lomba Dayung dan Perahu Hias MUSPIDA Cup Lhokseumawe									1	175,000,000	1	175,000,000	0.0%	0.0%	1	175,000,000	0.0%	0.0%					
		1 18 20	Wisata Rely dan Bersih-bersih Pantai									1	150,000,000	1	150,000,000	0.0%	0.0%	1	150,000,000	0.0%	0.0%					

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) dan satuannya	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2022 (PRPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 yang Diavalasi		Realisasi Capaian Kinerja Pada Semester				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Diavalasi (2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD S/D Tahun 2018 (%)		Pemangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	Semester I		Semester II		11-9-10		12-11/8		13-7-11		K	Rp			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		1 18 20	Pembinaan Olahraga Volly ke Tingkat Nasional											1	43,560,000	0.0%	0.0%	1	43,560,000	0.0%	0.0%				
		1 18 20	Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga									1	43,560,000	1	758,324,498	0.0%	0.0%	1	758,324,498	0.0%	0.0%				
		1 18 20	Pelaksanaan Turnamen Walikota Cup Lhokseumawe									1	758,324,498	1	147,820,000	0.0%	0.0%	1	147,820,000	0.0%	0.0%				
		1 18 20	Pelaksanaan Turnamen Sepakbola dan Bola Volly Muara Satu Cup									1	147,820,000	1	99,450,000	0.0%	0.0%	1	99,450,000	0.0%	0.0%				
		1 18 20	Pelaksanaan Turnamen Futsal										99,450,000	-	-	0.0%	0.0%	-	-	0.0%	0.0%				
													Rata-rata capaian kinerja (%)		36.4%	31.6%			5.8%	13.5%	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata				
													Predikat Kinerja		SR	SR			SR	SR	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata				
Meningkatnya Generasi Yang Berdaya Saing		1 18 21	Program Pengkitanan Sarana dan Prasnna Olah Raga	Lapangan Olah Raga yang layak untuk Masyarakat	0	100	549,459,000	-	-	100	89,000,000	-	-	247,073,000	-	247,073,000	0.0%	277.6%	-	247,073,000	0.0%	45.0%	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata		
		1 18 21	Pembangunan Lapangan Olah Raga	Terbangunnya Lapangan Olah Raga	4		549,459,000	-	-	2	89,000,000	-	-	247,073,000	2	247,073,000	100.0%	277.6%	2	247,073,000	50.0%	45.0%	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata		
													Rata-rata capaian kinerja (%)		100.0%	277.6%			50.0%	45.0%	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata				
													Predikat Kinerja		ST	ST			SR	SR	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata				
																TOTAL RATA RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PER BIDANG URUSAN)		54.3%	90.1%			21.4%	15.9%	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	
																PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PER BIDANG URUSAN)		R	T			SR	SR	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	
II.14		14	Bidang Urusan : Statistik				516,850,000				96,850,000			42,000,000	42,000,000								Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
II.14.1		14 01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				516,850,000				96,850,000			42,000,000	42,000,000								Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
Meningkatnya Pengembangan dan Pemantauan TIK terhadap Informasi Publik		14 01 15	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI	Keterbukaan Informasi Publik Melalui Website	100		516,850,000	-	100	96,850,000	-	-	100	42,000,000	100	42,000,000	100.0%	43.4%	100	42,000,000	100.0%	8.1%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
		14 01 15 03	Penyusunan dan Pengumpulan Data PDDB	Jumlah Buku PDDB	Buku	50	72,500,000			12	10,000,000	-	-	12	10,000,000	12	10,000,000	100.0%	100.0%	12	10,000,000	24.0%	13.8%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
		14 01 15 05	Penyusunan Buku IPM	Jumlah Buku IPM	Buku	50	354,850,000			12	54,850,000	-	-	-	-	-	-	0.0%	0.0%	-	-	0.0%	0.0%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
		14 01 15 06	Penyusunan Buku Lhokseumawe dalam Angka	Jumlah Buku Lhokseumawe dalam Angka	Buku	80	89,500,000			8	32,000,000	-	-	8	32,000,000	8	32,000,000	100.0%	100.0%	8	32,000,000	10.0%	35.8%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
													Rata-rata capaian kinerja (%)		66.7%	66.7%			11.3%	16.5%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				
													Predikat Kinerja		S	S			SR	SR	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				
																TOTAL RATA RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PER BIDANG URUSAN)		66.7%	66.7%			11.3%	16.5%	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan UKM	
																PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PER BIDANG URUSAN)		S	S			SR	SR	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan UKM	
II.16		16	Bidang Urusan : Kebudayaan				2,930,748,357				1,328,477,800			186,962,500	1,028,516,200	-	1,215,478,700						Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
II.16.1		16 01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				2,930,748,357				1,328,477,800			186,962,500	1,028,516,200	-	1,215,478,700						Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
Menguatnya Pengakuan Masyarakat dalam Bermasyarakat		2 01 18	Program Pengembangan Kejasama Pengelolaan Kearifan Budaya		2		2,725,730,566	-	2	544,402,800	0	117,650,500		337,442,200	-	455,092,700	0.0%	83.6%	-	455,092,700	0.0%	16.7%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
		2 01 18 06	Sanggar Pecut Meurah Insren Kota Lhokseumawe	Periode Operasional Sanggar Pecut Meurah Insren Kota Lhokseumawe	Kegiatan	9	840,148,186			12	213,000,000	0	-	12	197,950,300	12	197,950,300	100.0%	92.9%	12	197,950,300	133.3%	23.6%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		2 01 18 07	Dewan Kesenian Aceh	Periode Dewan Kesenian Aceh	Kegiatan	4	1,885,582,380			3	331,402,800	3	117,650,500	3	139,491,900	6	257,142,400	200.0%	77.6%	6	257,142,400	150.0%	13.6%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
													Rata-rata capaian kinerja (%)		150.0%	85.3%			141.7%	18.6%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				
													Predikat Kinerja		ST	T			ST	SR	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				
Menguatnya Pengakuan Masyarakat dalam Bermasyarakat		2 01 17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya		2			-	2	500,000,000	0			499,010,000	-	499,010,000	0.0%	99.8%	-	499,010,000	0%	0.0%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
		2 01 17 25	Pekan Kebudayaan Aceh	Jumlah Hari Pelaksanaan PKA	hari				0	500,000,000	0			499,010,000	-	499,010,000	0.0%	0.0%	-	499,010,000	0.0%	0.0%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
													Rata-rata capaian kinerja (%)		0.0%	0.0%			0.0%	0.0%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				
													Predikat Kinerja		SR	SR			SR	SR	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) dan satuannya	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2022 (PRPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d 4 RKPd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2018 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja Pada Semester				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d 4 Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPd)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		Peringkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	Semester I		Semester II		11-9-10		12- 11/8		13 = 7+11		14-13/6/100%			
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	Menguatnya Penegakan Syariat dalam Bermasyarakat	2 01 19	Program Pengembangan sarana dan prasarana kebudayaan		2	106,705,791	-	2	192,763,000	0	-	192,064,000	-	192,064,000	0.0%	99.6%	-	192,064,000	0.0%	180.0%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	15	16	
		2 01 19 01	Penyediaan alat-alat kesenian tradisional	Bulan		106,705,791		1	94,763,000	0	-	1	94,462,000	0.0%	99.7%	1	94,462,000	0.0%	88.5%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				
		2 01 19 09	Rehabilitasi Sedang/Berat Anjungan PKA Kota Lhokseumawe					1	98,000,000	-	-	1	97,602,000	0.0%	0.0%	1	97,602,000	0.0%	0.0%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				
Rata-rata capaian kinerja (%)																0.0%	49.8%			0.0%	44.3%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
Predikat Kinerja																SR	SR			SR	SR	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
Menguatnya Penegakan Syariat dalam Bermasyarakat	2 01 16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Terlaksananya Pengelolaan Kebudayaan dan Pariwisata		0	29,000,000	-	1	22,000,000	-	-	-	-	-	0.0%	0.0%	-	-	0.0%	0.0%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			
	2 01 16 5	Pengelolaan dan Pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air	Kegiatan		8	29,000,000		1	22,000,000	-	-	-	-	0.0%	0.0%	-	-	0.0%	0.0%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				
Rata-rata capaian kinerja (%)																0.0%	0.0%			0.0%	0.0%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
Predikat Kinerja																SR	SR			SR	SR	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
Meningkatnya Pendidikan Dasar Yang Berkualitas	2 01 21	Program Pengembangan Budaya Baca dan pembinaan perpustakaan			2	69,312,000	-	2	69,312,000	0	69,312,000	-	69,312,000	0.0%	100.0%	-	69,312,000	0.0%	100.0%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				
	2 01 21 13	Peningkatan sarana dan prasarana olah raga	Bulan			69,312,000		1	69,312,000	1	69,312,000	-	69,312,000	0.0%	100.0%	1	69,312,000	0.0%	100.0%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				
Rata-rata capaian kinerja (%)																0.0%	100.0%			0.0%	100.0%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
Predikat Kinerja																SR	ST			SR	ST	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PER BIDANG URUSAN)																30.0%	47.0%			28.3%	32.0%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PER BIDANG URUSAN)																SR	SR			SR	SR	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
II.17		17	Bidang Urusan : Perpustakaan			2,690,721,998			511,122,630		218,111,274		252,347,522		470,458,796						Dinas Perpustakaan dan Kearsipan			
II.17.1		17 01	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan			2,690,721,998			511,122,630		218,111,274		252,347,522		470,458,796						Dinas Perpustakaan dan Kearsipan			
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	17 01 01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100	2,140,650,414	-	100	385,882,630	50	181,952,024	50	166,582,622	100	348,534,646	100.0%	90.3%	100	348,534,646	0.0%	16.3%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
	17 01 01 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Periode Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bulan	60	11,500,000		12	2,700,000	6	1,500,000	6	1,200,000	12	2,700,000	100.0%	100.0%	12	2,700,000	0.0%	23.5%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
	17 01 01 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Periode Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	60	407,067,180		12	74,600,000	6	33,392,499	6	25,823,822	12	59,216,321	100.0%	79.4%	12	59,216,321	0.0%	14.5%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
	17 01 01 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan SKPD (13 orang x12 bln)	Jumlah Pejabat Pengelola Keuangan SKPD (13 orang x12 bln)	OB	600	319,644,645		156	70,311,025	78	36,000,000	78	34,305,775	156	70,305,775	100.0%	100.0%	156	70,305,775	0.0%	22.0%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
	17 01 01 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Periode Penyediaan Alat Tulis Kantor	Bulan	60	135,031,645		12	24,000,000	6	11,253,750	6	1,703,350	12	12,957,100	100.0%	54.0%	12	12,957,100	0.0%	9.6%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
	17 01 01 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Periode Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bulan	60	86,207,256		12	13,000,000	6	6,703,800	6	6,253,300	12	12,957,100	100.0%	99.7%	12	12,957,100	0.0%	15.0%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
	17 01 01 13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Periode Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	60	25,500,000		12	4,500,000	6	2,499,475	6	1,997,450	12	4,496,925	100.0%	99.9%	12	4,496,925	0.0%	17.6%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
	17 01 01 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan (365 Eks)	Eks	1825	10,260,000		12	1,140,000	-	-	12	1,140,000	12	1,140,000	100.0%	100.0%	12	1,140,000	0.0%	11.1%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
	17 01 01 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Periode Penyediaan Makanan dan Minuman	Bulan	50	55,667,563		11	9,187,180	6	3,532,500	5	5,462,500	11	8,995,000	100.0%	97.9%	11	8,995,000	0.0%	16.2%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
	17 01 01 18	Rapat-rapat koordinasi Dan Konsultasi dalam dan keahat daerah	Periode Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Bulan	60	370,000,000		12	69,000,000	6	29,470,000	6	39,137,000	12	68,607,000	100.0%	99.4%	12	68,607,000	0.0%	18.5%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
	17 01 01 20	Penyediaan jasa pegawai tidak tetap	Jumlah Pegawai tidak Tetap (34 Orang x12 bulan)	OB	2292	719,772,125		792	117,444,425	396	57,600,000	396	49,559,425	792	107,159,425	100.0%	91.2%	792	107,159,425	0.0%	14.9%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
Rata-rata capaian kinerja (%)																100.0%	92.2%			0.0%	16.3%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
Predikat Kinerja																ST	ST			SR	SR	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	17 01 02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	Persen	100	399,176,725	0	100	69,240,000	50	30,859,250	50	35,467,300	100	66,326,550	100.0%	98.8%	100	66,326,550	100.0%	16.6%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
	17 01 02 11	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Mobiler, Komputer dll)	Periode Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Mobiler, Komputer dll)	Unit	225	48,000,000		1	5,000,000	1	4,850,000	-	1	4,850,000	100.0%	97.0%	1	4,850,000	0.4%	10.1%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan			
	17 01 02 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Periode Pemeliharaan Rutin / berkala gedung kantor	UB	60	33,374,285		12	3,000,000	6	3,000,000	-	6	3,000,000	50.0%	100.0%	6	3,000,000	10.0%	9.0%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan			
	17 01 02 23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala Mobil Jabatan	UB	60	131,484,000		12	26,640,000	6	10,926,000	6	14,819,700	12	25,745,700	100.0%	96.6%	12	25,745,700	20.0%	19.6%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) dan satuannya	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2022 (PRPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun 2018 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja Pada Semester				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang Dievaluasi (2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPKD Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		Peningkat Daya Penanggung Jawab	Ket		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	Semester I		Semester II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
											9	10	11-9-10	12-11/8												
1			17 01 02 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Pemeliharaan Rutin / Berkala kendaraan dinas / operasional	Ub	70	154,000,000	24	29,600,000	12	9,133,250	12	16,097,600	24	25,230,850	100.0%	85.2%	24	25,230,850	34.3%	16.3%	Dinas Perhubungan dan Kearsipan			
			17 01 02 30	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor (Modul, Komputer dll)	Periode Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	60	31,918,440	12	5,000,000	6	2,950,000	6	4,550,000	12	7,500,000	100.0%	150.0%	12	7,500,000	20.0%	23.5%	Dinas Perhubungan dan Kearsipan			
Rata-rata capaian kinerja (%)																	90.0%	105.8%			16.9%	15.7%	Dinas Perhubungan dan Kearsipan			
Predikat Kinerja																	T	ST			SR	SR	Dinas Perhubungan dan Kearsipan			
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan		17 01 07	PROGRAM PENYUSUNAN PERENCANAAN SATUAN KERJA PERANGKAT KERJA	Cakupan Penyediaan Dokumen perencanaan SKPK	Dokumen	2	3,320,500	0	1,000,000	50	1,000,000	0	0	50	1,000,000	50.0%	100.0%	50	1,000,000	2500.0%	30.1%	Dinas Perhubungan dan Kearsipan			
			17 01 07 02	Penyusunan Rencana Kerja (REKJA) SKPD	Jumlah Buku Renja	Buku	50	3,320,500	25	1,000,000	25	1,000,000	0	0	25	1,000,000	100.0%	100.0%	25	1,000,000	50.0%	30.1%	Dinas Perhubungan dan Kearsipan			
Rata-rata capaian kinerja (%)																	100.0%	100.0%			50.0%	30.1%	Dinas Perhubungan dan Kearsipan			
Predikat Kinerja																	ST	ST			SR	SR	Dinas Perhubungan dan Kearsipan			
	Meningkatnya Pendidikan Dasar Yang Berkualitas		17 01 15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Jumlah Penguji Perpustakaan Daerah	Jumlah	3261	147,574,359	-	55,000,000	50	4,300,000	50	50,297,600	100	54,597,600	100.0%	99.3%	100	54,597,600	3.1%	37.0%	Dinas Perhubungan dan Kearsipan			
			17 01 15 01	Penyediaan Bahan Pustaka di Perpustakaan Umum Daerah	Jumlah Penyediaan Bahan Pustaka	Eks	6789	81,717,882	1	35,000,000	-	1	34,597,600	1	34,597,600	100.0%	98.9%	1	34,597,600	0.0%	42.3%	Dinas Perhubungan dan Kearsipan				
			17 01 15 08	Pelayanan Perpustakaan Keliling Kota Lhokseumawe	Periode Pelayanan Perpustakaan Keliling Kota Lhokseumawe	Bulan	60	65,856,477	4	20,000,000	1	4,300,000	3	15,700,000	4	20,000,000	100.0%	100.0%	4	20,000,000	6.7%	30.4%	Dinas Perhubungan dan Kearsipan			
Rata-rata capaian kinerja (%)																	100.0%	99.4%			3.3%	36.4%	Dinas Perhubungan dan Kearsipan			
Predikat Kinerja																	ST	ST			SR	SR	Dinas Perhubungan dan Kearsipan			
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PER BIDANG URUSAN)																	97.5%	99.3%			17.6%	24.6%	Dinas Perhubungan dan Kearsipan			
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PER BIDANG URUSAN)																	ST	ST			SR	SR	Dinas Perhubungan dan Kearsipan			
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PER URUSAN)																	79.2%	87.5%			35.7%	32.8%	Dinas Perhubungan dan Kearsipan			
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PER URUSAN)																	T	T			SR	SR	Dinas Perhubungan dan Kearsipan			
III				URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																						
III.1			01	Bidang Urusan : Kelautan dan Perikanan				26,505,053,428		6,938,344,981		2,595,399,217		1,437,958,593		4,033,357,810										
III.1.1			01 01	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan				26,505,053,428		6,938,344,981		2,595,399,217		1,437,958,593		4,033,357,810										
	Menurunnya Angka Kemiskinan		01 01 16	Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengabdian Sumberdaya Kelautan	Cakupan pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan		100	595,000	-	195,000,000	-	50	125,000,000	50	125,000,000	50.0%	64.1%	50	125,000,000	50.0%	21008.4%			Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan		
			01 01 16 02	Pengawasan dan Penerbitan legal Fisang	Jumlah Pengawasan dan Penerbitan legal Fisang	kal	25	595,000	-	195,000,000	0	-	125,000,000	-	125,000,000	0.0%	64.1%	-	125,000,000	0.0%	21008.4%			Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan		
Rata-rata capaian kinerja (%)																	0.0%	64.1%			0.0%	21008.4%	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan			
Predikat Kinerja																	SR	R			SR	ST	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan			
	Menurunnya Angka Kemiskinan		01 01 17	Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan Sumberdaya laut	Cakupan pembinaan dan penegakan hukum kelautan			99,500,000	-	99,500,000	-		133,499,500	-	133,499,500	0.0%	134.2%	-	133,499,500	0%	134.2%			Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan		
			01 01 17 01	Penyuluhan Hukum dalam Pendayagunaan sumberdaya Laut				49,500,000	-	49,500,000	-	1	49,500,000	-	133,499,500	0.0%	269.7%	-	133,499,500	0.0%	269.7%			Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan		
			01 01 17 03	Pengukuran Gelombang laut				50,000,000	-	50,000,000	-	1	50,000,000	-	-	0.0%	0.0%	-	-	0.0%	0.0%			Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan		
Rata-rata capaian kinerja (%)																	0.0%	134.8%			0.0%	134.8%	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan			
Predikat Kinerja																	SR	ST			SR	ST	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan			
	Menurunnya Angka Kemiskinan		01 01 19	Program Peningkatan Kegiatan Budaya Kelautan dan Wawasan Maritim Kepada Masyarakat	Cakupan pembinaan pelaku usaha perikanan		100	399,838,624	-	160,830,100	50	112,800,000	50	37,900,000	100	150,700,000	100.0%	93.9%	100	150,700,000	100.0%	37.7%			Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan	
			01 01 19 04	Pengembangan Sarana dan Prasarana Kelautan				113,050,000	-	113,050,000	1	112,800,000	-	112,800,000	100.0%	99.8%	1	112,800,000	0.0%	99.8%			Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan			
			01 01 19 05	Lomba Masak Serba Ikan		hari	10	286,788,624	-	47,480,100	0	-	1	37,900,000	1	37,900,000	100.0%	79.8%	1	37,900,000	10.0%	13.2%			Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan	
Rata-rata capaian kinerja (%)																	100.0%	89.8%			5.0%	56.5%	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan			
Predikat Kinerja																	ST	T			SR	R	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan			
	Menurunnya Angka Kemiskinan		01 01 20	Program Pengembangan Budaya Perikanan	Jumlah Produksi Perikanan (Budidaya)		100	11,070,707,085	-	1,792,362,161	50	788,052,887		167,562,600	50	955,615,487	50.0%	53.3%	50	955,615,487	50.0%	8.6%			Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan	
			01 01 20 01	Pengembangan Bibt ikan Unggul	Jumlah Produksi Perikanan (Budidaya)	ekor	4066104	1,940,291,200	-	79000	533,140,000	39500	13,140,000	-	39,500	50.0%	2.5%	39,500	13,140,000	1.0%	0.7%			Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan		
			01 01 20 04	Pengembangan Sarana dan Prasarana Budidaya Perikanan	Jumlah Produksi Perikanan (Budidaya)	Unit	228	6,960,567,924	-	700,954,200	1	698,290,200	-	1	698,290,200	100.0%	99.6%	1	698,290,200	0.4%	10.0%			Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) dan satuannya	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2022 (PRPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja Pada Semester				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		Peningkat Daya Penanggung Jawab	Ket				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	Semester I		Semester II		K		Rp		K		Rp				K		Rp	
					9	10	11-9-10	12-11/8	13-7-11	14-13/6/100%	15	16																
		01 01 20 14	Pengukuran Kualitas Air Tambak	Periode Produksi Perikanan (Budidaya)	bulan	55	260,000,000	-	1	50,000,000	0	-	-	-	-	0.0%	0.0%	-	-	0.0%	0.0%	Dinas Kelautan, Perikanan, Perikanan dan Pangan						
		01 01 20 15	Pengembangan Budidaya Ikan Tawar (DAK)	Jumlah Pengembangan Budidaya Ikan Tawar	paket	41	1,421,347,961	-	1	249,767,961	1	76,622,687	-	167,562,600	1	344,185,287	100.0%	97.8%	1	244,185,287	2.4%	17.2%	Dinas Kelautan, Perikanan, Perikanan dan Pangan					
		01 01 20 17	Penyusunan Updating Data Pembudidayaan Ikan	Jumlah dokumen produksi perikanan (budidaya)	Dokumen	5	388,500,000	-	-	158,500,000	-	-	-	-	-	0.0%	0.0%	-	-	0.0%	0.0%	Dinas Kelautan, Perikanan, Perikanan dan Pangan						
		01 01 20 18	Pengembangan Budidaya Udang		bulan	12	100,000,000	-	1	100,000,000	0	-	-	-	-	0.0%	0.0%	-	-	0.0%	0.0%	Dinas Kelautan, Perikanan, Perikanan dan Pangan						
Rata-rata capaian kinerja (%)																41.7%	33.3%			0.6%	4.6%	Dinas Kelautan, Perikanan, Perikanan dan Pangan						
Predikat Kinerja																SR	SR			SR	SR	Dinas Kelautan, Perikanan, Perikanan dan Pangan						
	Menurunnya Angka Kemiskinan	01 01 21	Program pengembangan perikanan tangkap				4,934,063,889	-	100	3,453,103,890	50	1,305,686,450		829,232,493	50	2,134,918,943	50.0%	61.8%	50	2,134,918,943	0.0%	43.3%	Dinas Kelautan, Perikanan, Perikanan dan Pangan					
		01 01 21 07	Pengadaan Sarana dan Prasarana Penangkapan	Jumlah Pembangunan Balai Nelayan	unit	3	3,190,326,850	-	1	1,708,566,850	1	864,076,200		69,182,400	1	933,258,600	100.0%	54.6%	1	933,258,600	33.3%	29.3%	Dinas Kelautan, Perikanan, Perikanan dan Pangan					
		01 01 21 08	Pengadaan Sarana dan Prasarana Penangkapan (DAK)	Jumlah Alat-Alat Penangkapan	keg	4	969,127,039	-	13	969,127,039	6	202,255,250	7	757,800,093	13	960,055,343	100.0%	99.1%	13	960,055,343	325.0%	99.1%	Dinas Kelautan, Perikanan, Perikanan dan Pangan					
		01 01 21 09	Motorisasi Armada Perikanan Dalam upaya Peningkatan Daya Jelajah dan Produktifitas Nelayan		buah	1	69,000,000	-	4	69,000,000	0	-		-	-	0.0%	0.0%	-	-	0.0%	0.0%	Dinas Kelautan, Perikanan, Perikanan dan Pangan						
		01 01 21 13	Pengadaan alat bantu Penangkapan		keg	1	703,360,000	-	2	703,360,000	2	239,355,000		-	2	239,355,000	100.0%	34.0%	2	239,355,000	200.0%	34.0%	Dinas Kelautan, Perikanan, Perikanan dan Pangan					
		01 01 21 14	Pengadaan alat bantu Penangkapan (OTSUS)		keg	1	2,250,000	-	2	2,250,000	-	-	2	2,250,000	2	2,250,000	100.0%	100.0%	2	2,250,000	200.0%	100.0%	Dinas Kelautan, Perikanan, Perikanan dan Pangan					
Rata-rata capaian kinerja (%)																80.0%	57.5%			151.7%	52.5%	Dinas Kelautan, Perikanan, Perikanan dan Pangan						
Predikat Kinerja																T	R			ST	R	Dinas Kelautan, Perikanan, Perikanan dan Pangan						
	Menurunnya Angka Kemiskinan	01 01 23	Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan			100	30,080,000	-	100	30,080,000	50	29,880,000		144,764,000	50	174,644,000	50.0%	580.6%	50	174,644,000	50.0%	580.6%	Dinas Kelautan, Perikanan, Perikanan dan Pangan					
		01 01 23 04	Pencapaian Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan		keg	1	30,080,000	-	1	30,080,000	1	29,880,000		144,764,000	1	174,644,000	100.0%	580.6%	1	174,644,000	100.0%	580.6%	Dinas Kelautan, Perikanan, Perikanan dan Pangan					
Rata-rata capaian kinerja (%)																100.0%	580.6%			100.0%	580.6%	Dinas Kelautan, Perikanan, Perikanan dan Pangan						
Predikat Kinerja																ST	ST			ST	ST	Dinas Kelautan, Perikanan, Perikanan dan Pangan						
	Menurunnya Angka Kemiskinan	03 01 24	Program Peningkatan Produksi Peternakan	Kontribusi Sub Sektor Peternakan Terhadap PDRB		100	12,000,000	-	100	12,000,000	-	-		-	-	0.0%	0.0%	-	-	0.0%	0.0%	Dinas Kelautan, Perikanan, Perikanan dan Pangan						
		03 01 24 04	Pengembangan Usaha Peternakan Ayam		keg	1	12,000,000	-	1	12,000,000	-	-		-	-	0.0%	0.0%	-	-	0.0%	0.0%	Dinas Kelautan, Perikanan, Perikanan dan Pangan						
Rata-rata capaian kinerja (%)																0.0%	0.0%			0.0%	0.0%	Dinas Kelautan, Perikanan, Perikanan dan Pangan						
Predikat Kinerja																SR	SR			SR	SR	Dinas Kelautan, Perikanan, Perikanan dan Pangan						
	Menurunnya Angka Kemiskinan	01 01 25	Program Peningkatan Sumber daya Perikanan	Cakupan Sarana dan Prasarana Perikanan yang dikembangkan		100	5,895,768,830	-	100	895,768,830	50	358,979,880		50	358,979,880	50.0%	40.1%	50	358,979,880	50.0%	6.1%	Dinas Kelautan, Perikanan, Perikanan dan Pangan						
		01 01 25 01	Pengembangan dan rehabilitasi sarana dan prasarana perikanan	Jumlah pengembangan dan rehabilitasi sarana dan prasarana perikanan	unit	109	5,895,768,830	-	7	895,768,830	3	358,979,880		3	358,979,880	42.9%	40.1%	3	358,979,880	2.8%	6.1%	Dinas Kelautan, Perikanan, Perikanan dan Pangan						
Rata-rata capaian kinerja (%)																42.9%	40.1%			2.8%	6.1%	Dinas Kelautan, Perikanan, Perikanan dan Pangan						
Predikat Kinerja																SR	SR			SR	SR	Dinas Kelautan, Perikanan, Perikanan dan Pangan						
	Menurunnya Angka Kemiskinan	01 01 26	Program peningkatan kesejahteraan nelayan	Cakupan Bina Kelompok Nelayan		100	4,062,500,000	-	100	300,000,000	-	-		-	-	0.0%	0.0%	-	-	0.0%	0.0%	Dinas Kelautan, Perikanan, Perikanan dan Pangan						
		01 01 26 02	Pengadaan Sarana dan Prasarana Untuk Masyarakat Nelayan	Jumlah alat tangkap untuk masyarakat nelayan	unit	10	4,062,500,000	-	1	300,000,000	-	-		-	-	0.0%	0.0%	-	-	0.0%	0.0%	Dinas Kelautan, Perikanan, Perikanan dan Pangan						
Rata-rata capaian kinerja (%)																0.0%	0.0%			0.0%	0.0%	Dinas Kelautan, Perikanan, Perikanan dan Pangan						
Predikat Kinerja																SR	SR			SR	SR	Dinas Kelautan, Perikanan, Perikanan dan Pangan						
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PER BIDANG URUSAN)																40.5%	111.1%			28.9%	2427.1%	Dinas Perpustakaan dan Kearsifan						
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PER BIDANG URUSAN)																SR	ST			SR	ST	Dinas Perpustakaan dan Kearsifan						
III.2		02		Bidang Urusan : Pariwisata			1,670,106,768			219,991,000		209,616,000		165,006,000		374,622,000							Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata					
III.2.1		02 01		Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata			1,670,106,768			219,991,000		209,616,000		165,006,000		374,622,000							Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata					
	Meningkatnya Pertumbuhan Pariwisata	2 04 15		Program Pengembangan, Pemasaran Pariwisata		100	750,106,768	-	100	162,994,000	50	182,994,000	50	165,006,000	100	318,000,000	100.0%	195.1%	100	318,000,000	100%	42.4%	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata					
		2 04 15 14	Pengadaan Papan Informasi/ Himbauan Pariwisata	Jumlah Peserta Pemilihan Duta Wisata Tingkat Daerah		240	638,112,768	-	40	129,000,000	40	129,000,000	-	-	40	129,000,000	100.0%	100.0%	40	129,000,000	17%	20.2%	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata					
		2 04 15 21	Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri	Jumlah buku profil pariwisata Kota Lhokseumawe	Buku	3	101,994,000	-	1	23,994,000	1	23,994,000	-	16,006,000	1	40,000,000	100.0%	166.7%	1	40,000,000	33%	39.2%	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata					

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) dan satuannya	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2022 (PRPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun 2018 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja Pada Semester				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang Dievaluasi (2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPKD Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		Pemangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	Semester I		Semester II		11-9-10		12-11/8		K	Rp	K	Rp			K	Rp
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
1	2	2 04 15 27	Pemilihan Duta Wisata Kota Lhokseumawe	Jumlah Papan Informasi / Himbauan Pariwisata	Unit	16	10,000,000	-	-	4	10,000,000	0	9	4	10	149,000,000	4	149,000,000	100.0%	1490.0%	4	149,000,000	25%	1490.0%	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	16
Rata-rata capaian kinerja (%)																100.0%	585.6%			25.0%	516.5%	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata				
Predikat Kinerja																ST	ST			SR	ST	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata				
		2 04 16	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata			100	920,000,000	-	-	100	56,997,000	50	56,622,000	-	50	56,622,000	50.0%	99.3%	50	56,622,000	50%	6.2%	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata			
		2 04 16 07	Pengembangan Sosialisasi dan Penerapan Serta Pengawasan Standarisasi	Jumlah Pengembangan Sosialisasi dan Penerapan Serta Pengawasan Standarisasi		8	850,000,000	-	-	1	30,075,000	1	29,700,000	-	1	29,700,000	100.0%	98.8%	1	29,700,000	13%	3.5%	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata			
		2 04 16 10	Promosi potensi dan obyek pariwisata	Jumlah Promosi potensi dan obyek pariwisata		4	70,000,000	-	-	1	26,922,000	1	26,922,000	-	1	26,922,000	100.0%	100.0%	1	26,922,000	25%	38.5%	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata			
Rata-rata capaian kinerja (%)																100.0%	99.4%			18.8%	21.0%	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata				
Predikat Kinerja																ST	ST			SR	SR	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata				
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PER URUSAN)																100.0%	342.5%			21.9%	268.7%	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata				
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PER URUSAN)																ST	ST			SR	ST	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata				
III.3		03		Bidang Urusan : Pertanian			41,728,787,637				3,317,413,046		1,935,689,900		58,530,000	-	1,994,219,900							Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan		
III.3.1		03 01		Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan			41,728,787,637				3,317,413,046		1,935,689,900		58,530,000		1,994,219,900							Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan		
		03 01 15		PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI	Cakupan pembinaan Kelompok Tani	100	11,981,180,138	-	-	100	1,079,043,600	50	822,428,100	-	50	822,428,100	50.0%	76.2%	50	822,428,100	50%	6.9%	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan			
			06	Pengembangan Tanaman Perkebunan Rakyat	Cakupan pembinaan Kelompok Tani	bulan	12	673,589,200	-	-	75000	673,589,200	75000	602,653,200	-	75,000	602,653,200	100.0%	89.5%	75,000	602,653,200	625000%	89.5%	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan		
			08	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Lahan pertanian/perkebunan	Cakupan pembinaan Kelompok Tani	unit	200	11,307,590,938	-	-	5	405,454,400	5	219,774,900	-	5	219,774,900	100.0%	54.2%	5	219,774,900	3%	1.9%	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan		
Rata-rata capaian kinerja (%)																100.0%	71.8%			312501.3%	45.7%	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan				
Predikat Kinerja																ST	S			SR	SR	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan				
		03 01 19		PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN	Cakupan Penyediaan sarana dan prasarana pertanian/perkebunan	100	24,398,287,349	-	-	100	1,578,619,296		881,806,800		58,530,000	-	940,336,800	0.0%	59.6%		940,336,800	0%	3.9%	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan		
		03 01 19 01		Pembangunan Jalan Usaha Tani	Jumlah Pembangunan Jalan Usaha Tani	Paket	15	16,147,807,602	-	-	3	1,232,639,549	3	872,206,800	30,030,000	3	902,236,800	100.0%	73.2%	3	902,236,800	20%	5.6%	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan		
		03 01 19 02		Pembangunan Jalan Usaha Tani (DAK)	Jumlah Pembangunan Jalan Usaha Tani	unit	52	8,250,479,747	-	-	1	345,979,747	1	9,600,000	-	1	9,600,000	100.0%	2.8%	1	9,600,000	2%	0.1%	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan		
		03 01 19 05		Verifikasi dan Evaluasi Penerima Hibah dan Bantuan Sosial									28,500,000		28,500,000	100.0%	38.0%					0%	0.0%	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan		
Rata-rata capaian kinerja (%)																100.0%	38.0%			7.3%	1.9%	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan				
Predikat Kinerja																ST	SR			SR	SR	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan				
		03 01 19		PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN	capaian peningkatan produksi pertanian/perkebunan	100	4,610,585,150	-	-	100	482,865,150	50	77,620,000	-	50	77,620,000	50.0%	16.1%	50	77,620,000	50%	1.7%	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan			
		03 01 19 12		Penyediaan Sarana Produk Pertanian/Perkebunan (DAK)	Jumlah Pembangunan Irigasi Air Tanah dangkal	unit	28	4,086,925,150	-	-	1	268,745,150	1	7,600,000	-	1	7,600,000	100.0%	2.8%	1	7,600,000	4%	0.2%	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan		
		03 01 19 13		Pengembangan Komoditi Perkebunan dalam rangka pemberdayaan komunitas daerah terpencil		0	200,120,000	-	-	5	200,120,000	5	70,020,000	-	5	70,020,000	100.0%	35.0%	5	70,020,000	0%	35.0%	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan			
		03 01 19 27		Pengembangan Budidaya cabe		keg	4	323,540,000	-	-	35	14,000,000	-	-	-	-	0.0%	0.0%	-	-	0%	0.0%	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan			
Rata-rata capaian kinerja (%)																66.7%	12.6%			1.2%	11.7%	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan				
Predikat Kinerja																S	SR			SR	SR	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan				
		03 01 20		Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	Produktivitas Komoditas pangan	100	571,135,000	-	-	100	9,285,000	50	8,985,000	-	50	8,985,000	50.0%	96.8%	50	8,985,000	50%	1.6%	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan			
		03 01 20 04		Peningkatan Sarana dan Prasarana Penyuluh (DAK Pertanian)	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluh (DAK Pertanian)	unit	15	571,135,000	-	-	13	9,285,000	6	8,985,000	-	6	8,985,000	46.2%	96.8%	6	8,985,000	40%	1.6%	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan		
Rata-rata capaian kinerja (%)																46.2%	96.8%			40.0%	1.6%	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan				
Predikat Kinerja																SR	ST			SR	SR	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan				
		03 01 22		Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Kontribusi Sub Sektor Peternakan Terhadap PDRB	100	167,600,000	-	-	100	167,600,000	50	144,850,000	-	50	144,850,000	50.0%	86.4%	50	144,850,000	50%	86.4%	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan			
		03 01 22 01		Pembangunan Sarana dan Prasarana Pembibitan Ternak		keg	1	155,115,000	-	-	12	155,115,000	6	144,850,000	-	6	144,850,000	50.0%	93.4%	6	144,850,000	600%	93.4%	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) dan satuannya	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2022 (PRPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja Pada Semester				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Pelaksanaan RKPD		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		Peringkat Daerah Penanggung Jawab	Ket				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	Semester I		Semester II		11-9-10		12-11/8		13-7+11		14-13/6/100%							
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp		
1		03 01 22 03	Pendistribusian Biskit Ternak kepada Masyarakat		keg	1	12,485,000			1	12,485,000							0.0%	0.0%			0%	0.0%	Dinas Kelautan, Perikanan, Perikanan dan Pangan				
																	Rata-rata capaian kinerja (%)		25.0%	46.7%			300.0%	46.7%	Dinas Kelautan, Perikanan, Perikanan dan Pangan			
																	Predikat Kinerja		SR	SR			ST	SR	Dinas Kelautan, Perikanan, Perikanan dan Pangan			
																	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PER BIDANG URUSAN)				59.5%	48.5%			87.1%	15.5%	Dinas Kelautan, Perikanan, Perikanan dan Pangan	
																	PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PER BIDANG URUSAN)				R	SR			T	SR	Dinas Kelautan, Perikanan, Perikanan dan Pangan	
III.4		04	Bidang Urusan : Kehutanan																						Dinas Kelautan, Perikanan, Perikanan dan Pangan			
III.4.1		04 01	Dinas Kelautan, Perikanan, Perikanan dan Pangan																						Dinas Kelautan, Perikanan, Perikanan dan Pangan			
		04 01 16	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Meningkatnya Rehabilitasi Hutan dan lahan															0.0%	0.0%			0%	0.0%	Dinas Kelautan, Perikanan, Perikanan dan Pangan			
		04 01 16 15	Pengembangan Hutan Kota dan Sarana Prasarana (DAK Kehutanan)	Jumlah sarana prasarana kehutanan															0.0%	0.0%			0%	0.0%	Dinas Kelautan, Perikanan, Perikanan dan Pangan			
																	Rata-rata capaian kinerja (%)		0.0%	0.0%			0.0%	0.0%	Dinas Kelautan, Perikanan, Perikanan dan Pangan			
																	Predikat Kinerja		SR	SR			SR	SR	Dinas Kelautan, Perikanan, Perikanan dan Pangan			
																	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PER BIDANG URUSAN)				0.0%	0.0%			0.0%	0.0%	Dinas Kelautan, Perikanan, Perikanan dan Pangan	
																	PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PER BIDANG URUSAN)				SR	SR			SR	SR	Dinas Kelautan, Perikanan, Perikanan dan Pangan	
III.6		06	Bidang Urusan : Perdagangan				33,796,129,856				1,576,000,000			55,360,000		587,520,125		642,880,125								Dinas Kelautan, Perikanan, Perikanan dan Pangan		
III.6.1		11 01	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM				33,796,129,856				1,576,000,000			55,360,000		587,520,125		642,880,125								Disperindagkop		
	Meningkatnya Pertumbuhan UMKM	06 01 15	PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN	Cakupan perlindungan dan pengamanan konsumen dan Tera Ulang	percen	100	9,621,637,600		100	1,576,000,000	50	55,360,000	50	587,520,125	100	642,880,125	100.0%	40.8%	100	642,880,125	100%	6.7%			Disperindagkop			
		06 01 15 05	Tera dan Tera Ulang UTPP Metrologi	Jumlah lokasi tera dan tera ulang UTPP Metrologi	Lokasi	25	1,155,171,600		5	60,000,000	5	55,360,000		5	55,360,000	100.0%	92.3%	5	55,360,000	20%	4.8%			Disperindagkop				
		06 01 15 06	Peningkatan Sarana Metrologi Legal (DAK)	Jumlah belanja modal untuk peningkatan sarana metrologi legal (DAK)	Jenis	35	7,485,250,000		7	1,456,000,000		7	549,690,625	7	549,690,625	100.0%	37.8%	7	549,690,625	20%	7.3%			Disperindagkop				
		06 01 15 09	Pembinaan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa	Jumlah lokasi pembinaan pengawasan peredaran barang & jasa	Lokasi	20	981,216,000		4	60,000,000		4	37,829,500	4	37,829,500	100.0%	63.0%	4	37,829,500	20%	3.9%			Disperindagkop				
																	Rata-rata capaian kinerja (%)		100.0%	64.4%			20.0%	5.3%	Disperindagkop			
																	Predikat Kinerja		ST	R			SR	SR	Disperindagkop			
	Meningkatnya Pertumbuhan UMKM	06 01 18	PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGARA	Cakupan pengembangan pasar rakyat	percen	100	23,732,818,856		100	3,798,891,000	50	436,668,000		3,211,689,000	50	3,648,357,000	50.0%	96.0%	50	3,648,357,000	50%	15.4%			Disperindagkop			
		06 01 18 03	Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/ Produk	Jumlah belanja modal untuk pengembangan pasar dan distribusi barang / produk	Jenis	10	1,012,450,000		2	252,490,000	1	111,730,000	1	130,610,000	2	242,340,000	100.0%	96.0%	2	242,340,000	20%	23.9%			Disperindagkop			
		06 01 18 08	Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/ Produk (DAK)	Jumlah pasar dalam wilayah Kota Lhokseumawe	Pasar	10	20,006,950,000		2	2,958,000,000		2	2,818,285,000	2	2,818,285,000	100.0%	95.3%	2	2,818,285,000	20%	14.1%			Disperindagkop				
		06 01 18 09	Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/ Produk (OTSUS)	Jumlah gedung pasar induk Kota Lhokseumawe yang dibangun	Gedung	1	237,761,000		1	238,401,000	1	237,761,000		400,000	1	238,161,000	100.0%	99.9%	1	238,161,000	100%	100.2%			Disperindagkop			
		06 01 18 10	Pelaksanaan Pasar Murah dan Monitoring Harga pasar	Jumlah lokasi pelaksanaan pasar murah untuk kebutuhan pokok	Kecamatan	15	2,203,151,905		3	300,000,000	1	87,177,000	2	212,394,000	3	299,571,000	100.0%	99.9%	3	299,571,000	20%	13.6%			Disperindagkop			
		06 01 18 11	Penerbitan Pasar Dalam Wilayah Kota Lhokseumawe	Jumlah pasar yang diterbitkan	Pasar	25	272,505,951		5	50,000,000		5	50,000,000	5	50,000,000	100.0%	100.0%	5	50,000,000	20%	18.3%			Disperindagkop				
																	Rata-rata capaian kinerja (%)		100.0%	98.2%			36.0%	34.0%	Disperindagkop			
																	Predikat Kinerja		ST	ST			SR	SR	Disperindagkop			
	Meningkatnya Pertumbuhan UMKM	06 01 20	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN KOPERASI DAN UKM	Cakupan pengembangan UMKM	Percen	100	441,673,100		100	549,927,500	50	98,782,000	50	392,274,070	100	491,056,070	100.0%	89.3%	100	491,056,070	100%	111.2%			Disperindagkop			
		06 01 20 01	Pameran Dagang, Pameran Industri dan Pameran Produk Industri Kecil dan UKM	Periode pameran dagang	Hari	35	441,673,100		7	549,927,500	7	98,782,000		392,274,070	7	491,056,070	100.0%	89.3%	7	491,056,070	20%	111.2%			Disperindagkop			
																	Rata-rata capaian kinerja (%)		100.0%	89.3%			20.0%	111.2%	Disperindagkop			
																	Predikat Kinerja		ST	T			SR	ST	Disperindagkop			
																	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PER BIDANG URUSAN)				100.0%	84.0%			25.3%	50.2%	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	
																	PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PER BIDANG URUSAN)				ST	T			SR	R	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	
III.7		7	Bidang Urusan : Perindustrian				4,317,044,052				428,616,600			241,740,000		174,614,899		416,354,599								Disperindagkop		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) dan satuannya	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2022 (PRPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d 4 RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja Pada Semester				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		Peningkat Daerah Penanggung Jawab	Ket			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	Semester I		Semester II		K		Rp		K	Rp	K	Rp					
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
1																											
		01	03	02	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perawatan dan Perengkapan Kantor	bin	60	1,742,128,750	-	-	12	348,425,750	6	174,212,875	6	171,510,875	12	345,723,750	100.0%	99.2%	12	345,723,750	20%	19.8%	Sekretariat Daerah	
		01	03	02	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Listrik	bin	60	233,458,000	-	-	12	46,691,600	6	23,345,800	6	23,301,800	12	46,647,600	100.0%	99.9%	12	46,647,600	20%	20.0%	Sekretariat Daerah	
		01	03	02	33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Telepon	bin	60	443,642,800	-	-	12	88,728,560	6	44,364,280	6	43,367,120	12	87,731,400	100.0%	98.9%	12	87,731,400	20%	19.8%	Sekretariat Daerah	
		01	03	02	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman, Tempat Parkir dan Halaman Kantor	bin	60	125,000,000	-	-	12	25,000,000	12	24,900,000	-	-	12	24,900,000	100.0%	99.6%	12	24,900,000	20%	19.9%	Sekretariat Daerah	
		01	03	02	35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Air Minum	bin	60	125,000,000	-	-	12	25,000,000	6	12,500,000	6	12,395,000	12	24,895,000	100.0%	99.6%	12	24,895,000	20%	19.9%	Sekretariat Daerah	
		01	03	02	42	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	bin	60	656,695,750	-	-	12	131,339,150	6	65,669,575	6	62,632,945	12	128,302,520	100.0%	97.7%	12	128,302,520	20%	19.5%	Sekretariat Daerah	
Rata-rata capaian kinerja (%)																100.0%	98.3%			20.0%	19.7%	Sekretariat Daerah					
Predikat Kinerja																ST	ST			SR	SR	Sekretariat Daerah					
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	01	03	03	03	03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR		100	1,708,750,000	-	-	100	341,750,000	50	20,250,000	50	321,500,000	100	341,750,000	100.0%	100.0%	100	341,750,000	100%	20.0%	Sekretariat Daerah	
	01	03	03	02	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Jenis	5	101,250,000	-	-	1	20,250,000	1	20,250,000	-	-	1	20,250,000	100.0%	100.0%	1	20,250,000	20%	20.0%	Sekretariat Daerah	
	01	03	03	07	07	Penyediaan Bantuan Perumahan Jabatan	bin	60	1,607,500,000	-	-	12	321,500,000	-	-	12	321,500,000	12	321,500,000	100.0%	100.0%	12	321,500,000	20%	20.0%	Sekretariat Daerah	
Rata-rata capaian kinerja (%)																100.0%	100.0%			20.0%	20.0%	Sekretariat Daerah					
Predikat Kinerja																ST	ST			SR	SR	Sekretariat Daerah					
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	01	03	05	05	05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR		100	1,440,495,000	-	-	100	288,099,000	50	17,999,500	50	218,432,713	100	236,432,213	100.0%	82.1%	100	236,432,213	100%	16.4%	Sekretariat Daerah	
	01	03	05	46	46	Penyusunan Dokumen Analisis Jabatan (ANJAB) Pemko Lhokseumawe	Bulan	60	139,995,000	-	-	12	27,999,000	6	13,999,500	6	12,954,500	12	26,954,000	100.0%	96.3%	12	26,954,000	20%	19.3%	Sekretariat Daerah	
	01	03	05	47	47	Pedoman Evaluasi Jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN)	Buku	100	40,000,000	-	-	20	8,000,000	6	4,000,000	14	4,000,000	20	8,000,000	100.0%	100.0%	20	8,000,000	20%	20.0%	Sekretariat Daerah	
	01	03	05	49	49	Seleksi MTQ KORPRI Tingkat Kota Lhokseumawe	Orang	500	148,000,000	-	-	100	29,600,000	-	-	100	29,223,500	100	29,223,500	100.0%	98.7%	100	29,223,500	20%	19.7%	Sekretariat Daerah	
	01	03	05	51	51	Kekhusnahan MTQ KORPRI Tingkat Nasional	Orang	75	757,500,000	-	-	15	151,500,000	-	-	15	118,894,713	15	118,894,713	100.0%	78.5%	15	118,894,713	20%	15.7%	Sekretariat Daerah	
	01	03	05	52	52	Seleksi dan Pembinaan BAPOR KORPRI Kota Lhokseumawe	Orang	100	355,000,000	-	-	20	71,000,000	-	-	20	53,360,000	20	53,360,000	100.0%	75.2%	20	53,360,000	20%	15.0%	Sekretariat Daerah	
Rata-rata capaian kinerja (%)																100.0%	89.7%			20.0%	17.9%	Sekretariat Daerah					
Predikat Kinerja																ST	T			SR	SR	Sekretariat Daerah					
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	01	03	07	07	07	PROGRAM PENYUSUNAN RENCANA KERJA SAKTIAN KERJA PERANGKAT DAERAH		100	274,525,000	-	-	100	54,905,000	50	660,000	50	46,611,000	100	47,271,000	100.0%	86.1%	100	47,271,000	100%	17308.3%	Sekretariat Daerah	
	01	03	07	02	02	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SKPD	buku	75	39,525,000	-	-	15	7,905,000	15	660,000	-	-	15	660,000	100.0%	8.3%	15	660,000	20%	1.7%	Sekretariat Daerah	
	01	03	07	05	05	Penyusunan RKT dan TAPKIN Pemko dan Setdako Lhokseumawe	buku	75	235,000,000	-	-	15	47,000,000	-	-	15	46,611,000	15	46,611,000	100.0%	99.2%	15	46,611,000	20%	19.8%	Sekretariat Daerah	
Rata-rata capaian kinerja (%)																100.0%	53.8%			20.0%	10.8%	Sekretariat Daerah					
Predikat Kinerja																ST	R			SR	SR	Sekretariat Daerah					
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	01	03	10	10	10	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN		100	950,747,000	-	-	100	190,149,400	50	-	50	185,810,921	100	185,810,921	100.0%	97.7%	100	185,810,921	100%	19.8%	Sekretariat Daerah	
	01	03	10	07	07	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP)	buku	75	220,747,000	-	-	15	44,149,400	0	-	15	43,802,900	15	43,802,900	100.0%	99.2%	15	43,802,900	20%	19.8%	Sekretariat Daerah	
	01	03	10	08	08	Penyusunan dan pembahasan Laporan Keterangan dan Pertanggungjawaban (LKPJ)	buku	150	185,000,000	-	-	30	37,000,000	0	-	30	34,628,828	30	34,628,828	100.0%	93.6%	30	34,628,828	20%	18.7%	Sekretariat Daerah	
	01	03	10	13	13	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK)	buku	50	420,000,000	-	-	10	84,000,000	0	-	10	83,325,091	10	83,325,091	100.0%	99.2%	10	83,325,091	20%	19.8%	Sekretariat Daerah	
	01	03	10	16	16	Penyusunan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Otonomi Daerah (EKPOD)	Buku	200	125,000,000	-	-	40	25,000,000	0	-	40	24,054,102	40	24,054,102	100.0%	96.2%	40	24,054,102	20%	19.2%	Sekretariat Daerah	
Rata-rata capaian kinerja (%)																100.0%	97.1%			20.0%	19.4%	Sekretariat Daerah					
Predikat Kinerja																ST	ST			SR	SR	Sekretariat Daerah					

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) dan satuannya	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2022 (PRPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2018 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja Pada Semester				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPd)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		Pemangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	Semester I		Semester II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
											9	10	11-9-10	12-11/8												
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	01 03 16	16	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KDH DAN WRKH	Kelancaran dalam pelayanan kedinasan KDH/WKDH	100	5,995,715,000	-	-	100	1,199,143,000	-	-	100	860,274,000	100	860,274,000	100.0%	71.7%	100	860,274,000	100%	14.3%	Sekretariat Daerah	16		
					60	706,950,000	-	-	12	141,390,000	-	-	12	124,287,000	12	124,287,000	100.0%	87.9%	12	124,287,000	20%	17.6%	Sekretariat Daerah			
					60	1,489,000,000	-	-	12	297,800,000	-	-	12	34,990,000	12	34,990,000	100.0%	11.7%	12	34,990,000	20%	2.3%	Sekretariat Daerah			
					60	3,799,765,000	-	-	12	759,953,000	-	-	12	700,997,000	12	700,997,000	100.0%	92.2%	12	700,997,000	20%	18.4%	Sekretariat Daerah			
Rata-rata capaian kinerja (%)																100.0%	64.0%			20.0%	12.8%	Sekretariat Daerah				
Predikat Kinerja																ST	R			SR	SR	Sekretariat Daerah				
Meningkatnya Pengembangan dan Pemanfaatan TIK terhadap Informat Publik	01 03 23	23	PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI	Terlaksananya pemanfaatan teknologi informat	100	1,859,902,500	-	-	100	371,980,500	50	185,990,250	50	165,959,723	100	351,949,973	100.0%	94.6%	100	351,949,973	100%	18.9%	Sekretariat Daerah			
					60	1,039,902,500	-	-	12	207,980,500	6	103,990,250	6	97,913,250	12	201,903,500	100.0%	97.1%	12	201,903,500	20%	19.4%	Sekretariat Daerah			
					60	320,000,000	-	-	12	64,000,000	6	32,000,000	6	30,073,250	12	62,073,250	100.0%	97.0%	12	62,073,250	20%	19.4%	Sekretariat Daerah			
					60	500,000,000	-	-	12	100,000,000	6	50,000,000	6	37,973,223	12	87,973,223	100.0%	88.0%	12	87,973,223	20%	17.6%	Sekretariat Daerah			
Rata-rata capaian kinerja (%)																100.0%	94.0%			20.0%	18.8%	Sekretariat Daerah				
Predikat Kinerja																ST	ST			SR	SR	Sekretariat Daerah				
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	01 03 26	26	PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Penataan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota	100	8,166,082,000	-	-	100	1,633,216,400	50	701,650,000	50	928,046,668	100	1,629,896,668	100.0%	99.8%	100	1,629,896,668	100%	20.0%	Sekretariat Daerah			
					60	120,000,000	-	-	12	24,000,000	6	12,000,000	6	11,900,000	12	23,900,000	100.0%	99.6%	12	23,900,000	20%	19.9%	Sekretariat Daerah			
					5	790,000,000	-	-	1	158,000,000	-	-	1	157,945,000	1	157,945,000	100.0%	100.0%	1	157,945,000	20%	20.0%	Sekretariat Daerah			
					50	2,683,500,000	-	-	10	536,700,000	5	268,350,000	5	268,272,000	10	536,622,000	100.0%	100.0%	10	536,622,000	20%	20.0%	Sekretariat Daerah			
01 03 26 22	22	Peningkatan Kapasitas Staf Ahli	Jumlah Staf Ahli Walikota Lhokseumawe	OB	3600	620,000,000	-	-	60	124,000,000	30	62,000,000	30	59,449,668	60	121,449,668	100.0%	97.9%	60	121,449,668	2%	19.6%	Sekretariat Daerah			
01 03 26 25	25	Penyusunan dan penyempurnaan Draf rancangan Qanun Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota	Jumlah Rancangan Qanun yang disusun	Raqaan	5	217,582,000	-	-	1	43,516,400	-	-	1	43,185,000	1	43,185,000	100.0%	99.2%	1	43,185,000	20%	19.8%	Sekretariat Daerah			
01 03 26 30	30	Penanganan perkara litigasi dan Non litigasi Pemerintah Kota Lhokseumawe	Periode Penanganan Perkara	Bln	60	3,595,000,000	-	-	12	719,000,000	6	359,500,000	6	359,400,000	12	718,900,000	100.0%	100.0%	12	718,900,000	20%	20.0%	Sekretariat Daerah			
01 03 26 31	31	Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	Periode Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	bln	60	140,000,000	-	-	12	28,000,000	0	-	12	27,895,000	12	27,895,000	100.0%	99.6%	12	27,895,000	20%	19.9%	Sekretariat Daerah			
Rata-rata capaian kinerja (%)																100.0%	99.5%			17.4%	19.9%	Sekretariat Daerah				
Predikat Kinerja																ST	ST			SR	SR	Sekretariat Daerah				
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	01 03 27	27	PROGRAM PENATAAN DAERAH OTONOMI BARU	Terlaksananya Penataan Daerah Otonomi Baru	100	44,703,146,000	-	-	100	8,992,388,000	50	19,998,000	50	8,770,236,089	100	8,790,234,089	100.0%	97.8%	100	8,790,234,089	100%	19.7%	Sekretariat Daerah			
					12	49,700,000	-	-	12	49,700,000	-	-	12	47,527,984	12	47,527,984	100.0%	95.6%	12	47,527,984	100%	95.6%	Sekretariat Daerah			
					60	42,145,000,000	-	-	12	8,429,000,000	-	-	12	8,276,381,059	12	8,276,381,059	100.0%	98.2%	12	8,276,381,059	20%	19.6%	Sekretariat Daerah			
					5	622,450,000	-	-	1	124,490,000	-	-	1	108,840,000	1	108,840,000	100.0%	87.4%	1	108,840,000	20%	17.5%	Sekretariat Daerah			
01 03 27 21	21	Penataan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan, Kemukiman dan Gampong	Periode penataan penyelenggaraan pemerintahan kee, mukim dan gampong	bln	12	1,149,500,000	-	-	12	229,900,000	-	-	12	206,768,946	12	206,768,946	100.0%	89.9%	12	206,768,946	100%	18.0%	Sekretariat Daerah			
01 03 27 26	26	Rapat Koordinasi Pimpinan Tingkat Kemukiman dan Gampong	Periode Rapat Koordinasi Pimpinan Tingkat Kemukiman dan Gampong	kali	20	250,000,000	-	-	4	50,000,000	-	-	4	49,320,100	4	49,320,100	100.0%	98.6%	4	49,320,100	20%	19.7%	Sekretariat Daerah			
01 03 27 27	27	Penyelesaian konflik pertanahan dalam wilayah Kota Lhokseumawe	Periode penyelesaian konflik pertanahan dalam wilayah Kota Lhokseumawe	bln	60	446,500,000	-	-	12	89,300,000	-	-	12	81,398,000	12	81,398,000	100.0%	91.2%	12	81,398,000	20%	18.2%	Sekretariat Daerah			
01 03 27 30	30	Pemekaran Kecamatan dan Gampong Pemerintah Kota Lhokseumawe	Periode pemekaran kecamatan dan gampong	kali	2	39,996,000	-	-	1	19,998,000	1	19,998,000	-	-	1	19,998,000	100.0%	100.0%	1	19,998,000	50%	50.0%	Sekretariat Daerah			

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) dan Satuannya	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2022 (PRPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPMD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPMD Tahun 2018 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja pada Semester				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPMD yang Dievaluasi (2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPMD Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD S/D Tahun 2018 (%)		Pemangkat Daerah/ Penanggung Jawab	Ket															
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	Semester I		Semester II		K		Rp		K	Rp	K	Rp			K	Rp													
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11-9-10	12-11/8	13-7-11	14-13/6-100%	15	16																								
																				Rata-rata capaian kinerja (%)				100.0%	94.4%														
																				Predikat Kinerja				ST	ST														
																				Rata-rata capaian kinerja (%)				100.0%	99.6%														
																				Predikat Kinerja				ST	ST														
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	01	03	29	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEHIDUPAN BERAGAMA	Terwujudnya pelayanan kehidupan beragama	100	4,436,350,000	-	-	100	887,270,000	50	443,635,000	50	439,700,000	100	883,335,000	100.0%	99.6%	100	883,335,000	100%	19.9%	Sekretariat Daerah															
	01	03	29	04 Peningkatan Kualitas Ibadah Masyarakat	Periode peningkatan kualitas ibadah masyarakat	bln	12	4,436,350,000	-	-	12	887,270,000	6	443,635,000	6	439,700,000	12	883,335,000	100.0%	99.6%	12	883,335,000	100%	19.9%	Sekretariat Daerah														
																				Rata-rata capaian kinerja (%)				100.0%	99.6%														
																				Predikat Kinerja				ST	ST														
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	01	03	30	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi dan pembangunan	100	2,774,404,000	-	-	100	584,880,800	50	277,440,400	50	155,790,990	100	433,231,390	100.0%	78.1%	100	433,231,390	100%	15.6%	Sekretariat Daerah															
	01	03	30	01 Penyusunan Laporan pengendalian pembangunan program dan kegiatan fisik proyek	Periode pengendalian pembangunan program dan kegiatan fisik proyek	bln	60	180,000,000	-	-	12	36,000,000	6	18,000,000	6	11,478,740	12	29,478,740	100.0%	81.9%	12	29,478,740	20%	16.4%	Sekretariat Daerah														
	01	03	30	02 Pelaksanaan penyuluhan beras miskin	Periode penyuluhan beras miskin	triwulan	20	2,203,191,250	-	-	4	440,638,250	2	220,319,125	2	113,172,725	4	333,491,850	100.0%	75.7%	4	333,491,850	20%	15.1%	Sekretariat Daerah														
	01	03	30	03 Penyusunan mekanisme perencanaan, pelaksanaan, pembiayaan, pengawasan, pelaporan dan pembinaan kegiatan yang dibayai dengan APBD	Periode penyusunan mekanisme perencanaan, pelaksanaan, pembiayaan, pengawasan, pelaporan dan pembinaan kegiatan	bln	60	218,293,250	-	-	12	43,658,650	6	21,829,325	6	13,857,775	12	35,687,100	100.0%	81.7%	12	35,687,100	20%	16.3%	Sekretariat Daerah														
	01	03	30	15 Pengendalian Inflasi Kota Lhokseumawe	Periode pengendalian inflasi Kota Lhokseumawe	bln	60	172,919,500	-	-	12	34,583,900	6	17,291,950	6	17,281,750	12	34,573,700	100.0%	100.0%	12	34,573,700	20%	20.0%	Sekretariat Daerah														
																				Rata-rata capaian kinerja (%)				100.0%	84.8%														
																				Predikat Kinerja				ST	T														
Menguatnya Penegakan Syariat dalam Bermasyarakat	01	03	31	PROGRAM PENINGKATAN BIDANG KEISTIMEWAAN ACEH DAN KESRA	Meningkatkan penerapan keistimewaan Aceh dan Kesra	100	359,950,000	-	-	100	71,990,000	50	5,650,000	50	58,630,000	100	64,280,000	100.0%	89.3%	100	64,280,000	100%	17.9%	Sekretariat Daerah															
	01	03	31	06 Peningkatan sarana dan prasarana mushola Seudako Lhokseumawe	Periode pemeliharaan sarana dan prasarana mushola Seudako Lhokseumawe	bln	60	56,500,000	-	-	12	11,300,000	6	5,650,000	6	5,650,000	12	11,300,000	100.0%	100.0%	12	11,300,000	20%	20.0%	Sekretariat Daerah														
	01	03	31	10 Pembinaan Marching band Kota Lhokseumawe	Jumlah kegiatan/ event yang diikuti	keg	5	248,500,000	-	-	1	49,700,000	0	-	1	46,700,000	1	46,700,000	100.0%	94.0%	1	46,700,000	20%	18.8%	Sekretariat Daerah														
	01	03	31	14 Kegiatan Ceramah Rutin Jumat	Periode kegiatan ceramah rutin Jumat	bln	60	54,950,000	-	-	12	10,990,000	0	-	12	6,280,000	12	6,280,000	100.0%	57.1%	12	6,280,000	20%	11.4%	Sekretariat Daerah														
																				Rata-rata capaian kinerja (%)				100.0%	83.7%														
																				Predikat Kinerja				ST	T														
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	01	03	33	PROGRAM PENINGKATAN FASILITAS SARANA DAN PRASARANA UMUM	Meningkatnya fasilitas sarana dan prasarana umum	100	105,000,000	-	-	100	21,000,000	50	10,500,000	50	10,491,600	100	20,991,600	100.0%	100.0%	100	20,991,600	100%	20.0%	Sekretariat Daerah															
	01	03	33	06 Pelestarian TMP Blang Panyang	Jumlah temaga operasional TMP Blang Panyang	GB	1460	105,000,000	-	-	292	21,000,000	146	10,500,000	146	10,491,600	292	20,991,600	100.0%	100.0%	292	20,991,600	20%	20.0%	Sekretariat Daerah														
																				Rata-rata capaian kinerja (%)				100.0%	100.0%														
																				Predikat Kinerja				ST	ST														
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	01	03	34	PROGRAM PERINGATAN HARI-HARI BESAR	Terlaksananya Peringatan Hari-Hari Besar	100	7,266,138,000	-	-	100	1,453,227,600	50	53,744,000	50	1,347,609,600	100	1,401,353,600	100.0%	96.4%	100	1,401,353,600	100%	19.3%	Sekretariat Daerah															
	01	03	34	02 Peringatan Hari-hari Besar Nasional	Jumlah peringatan Hari Besar Nasional	kali	40	537,440,000	-	-	8	107,488,000	4	53,744,000	4	41,741,000	8	95,485,000	100.0%	88.8%	8	95,485,000	20%	17.8%	Sekretariat Daerah														
	01	03	34	04 Pelaksanaan Rekrutmen Paskibra	Jumlah anggota Paskibra	Orang	175	203,205,000	-	-	35	40,641,000	0	-	35	40,641,000	35	40,641,000	100.0%	100.0%	35	40,641,000	20%	20.0%	Sekretariat Daerah														
	01	03	34	05 Perengkapan dan Pembinaan Paskibra	Jumlah anggota Paskibra	Orang	175	1,549,000,000	-	-	35	309,800,000	0	-	35	309,800,000	35	309,800,000	100.0%	100.0%	35	309,800,000	20%	20.0%	Sekretariat Daerah														
	01	03	34	07 Peringatan HUT KORPRI Kota Lhokseumawe	Periode peringatan HUT KORPRI Kota Lhokseumawe	Keg	5	178,500,000	-	-	1	35,700,000	0	-	1	11,595,000	1	11,595,000	100.0%	32.5%	1	11,595,000	20%	6.5%	Sekretariat Daerah														
	01	03	34	09 Pelaksanaan Apel Gabungan Pemerintah Kota Lhokseumawe	Jumlah pelaksanaan apel gabungan Pemko Lhokseumawe	Keg	5	100,000,000	-	-	1	20,000,000	0	-	1	18,190,000	1	18,190,000	100.0%	91.0%	1	18,190,000	20%	18.2%	Sekretariat Daerah														
	01	03	34	10 Peningkatan pelayanan kunjungan tamu ke Kota Lhokseumawe	Periode peningkatan pelayanan kunjungan tamu	bln	60	2,009,993,000	-	-	12	401,998,600	0	-	12	399,843,600	12	399,843,600	100.0%	99.5%	12	399,843,600	20%	19.9%	Sekretariat Daerah														
	01	03	34	12 Pelaksanaan peringatan Hari-Hari Besar Nasional	Periode pelaksanaan perhatian hari-hari besar nasional	kali	5	2,688,000,000	-	-	1	537,600,000	0	-	1	525,799,000	1	525,799,000	100.0%	97.8%	1	525,799,000	20%	19.6%	Sekretariat Daerah														
																				Rata-rata capaian kinerja (%)				100.0%	87.1%														
																				Predikat Kinerja				ST	T														
																				TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM				100.0%	89.2%														
																				PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM				ST	T														
IV.1.4		01	04	Sekwan			68,039,292,937				16,215,506,096		987,814,117		14,205,440,863		15,193,254,980							Sekwan															
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	01	04	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100	27,403,886,962	-	-	100	7,089,699,336	50	519,650,917	50	6,211,736,492	100	6,731,387,409	100.0%	95.3%	100	6,731,387,409	100.0%	24.6%	Sekwan															

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) dan satuannya	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2022 (PRPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 yang Divaluasi		Realisasi Capaian Kinerja Pada Semester				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Divaluasi (2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah/ Penanggung Jawab	Ket		
					K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K				Rp	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11-9-10	12-11/8	13-7+11	14-13/6/100%	15	16						
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	20.04.07	PROGRAM PENYUSUNAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Cakupan penyediaan dokumen perencanaan SKPK	100	8,126,120	-	-	100	2,000,000	-	-	-	-	-	-	0.0%	0.0%	-	-	0.0%	0.0%	Sekwan			
		20.04.07.02	Penyusunan RENJA SKPD	Jumlah Buku RENJA	Buku	100	8,126,120	-	-	10	2,000,000	-	-	-	-	-	0.0%	0.0%	-	-	0.0%	0.0%	Sekwan			
Rata-rata capaian kinerja (%)																0.0%	0.0%			0.0%	0.0%					
Predikat Kinerja																SR	SR			SR	SR					
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	20.04.15	PROGRAM Peningkatan KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	Presentase anggota DPRK yang menjalankan Tugas	100	26,225,881,148	-	-	100	5,949,579,700	50	389,651,200	50	5,049,115,375	100	5,438,766,875	100.0%	91.4%	100	5,438,766,875	100.0%	20.7%	Sekwan			
		20.04.15.01	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah	Periode pembalasan rancangan Peraturan Daerah	Bulan	60	4,427,526,503	-	-	10	882,500,000	10	2,600,000	-	853,267,200	10	855,867,200	100.0%	97.0%	10	855,867,200	16.7%	19.3%	Sekwan		
		20.04.15.03	Rapat-rapat alat kelengkapan dewan	Periode pelaksanaan rapat-rapat alat kelengkapan dewan	Bulan	60	7,093,628,433	-	-	88	2,336,992,400	0	88	2,145,515,100	88	2,145,515,100	100.0%	91.8%	88	2,145,515,100	146.7%	27.9%	Sekwan			
		20.04.15.05	Kegiatan Reses	Jumlah laporan pertanggung jawaban	Keg	15	5,567,764,000	-	-	25	671,250,000	0	2	654,395,400	2	654,395,400	8.0%	97.5%	2	654,395,400	13.3%	11.8%	Sekwan			
		20.04.15.07	Peningkatan Kapasitas pimpinan dan Anggota DPRK	Jumlah pimpinan dan Anggota DPRK yang mengikuti diblat, bintek, dan legal drafting	Dewan	125	4,000,000,000	-	-	25	800,000,000	25	291,251,200	-	414,090,000	25	705,341,200	100.0%	88.2%	25	705,341,200	20.0%	17.6%	Sekwan		
		20.04.15.09	Kerjasama Informasi DPRK dengan Mass Media	Jumlah Media Publikasi	Media	22	1,169,708,061	-	-	2	338,150,000	2	1,000,000	-	299,898,000	2	300,898,000	100.0%	89.0%	2	300,898,000	9.1%	25.7%	Sekwan		
		20.04.15.19	Penyampaian Visi dan Misi Calon Walikota/Wakil Walikota Lhokseumawe	Jumlah kegiatan penyampaian visi dan misi calon walikota/wakil walikota Lhokseumawe	Keg	1	133,455,500	-	-	10	49,390,500	0	10	49,390,500	10	49,390,500	100.0%	100.0%	10	49,390,500	1000.0%	37.0%	Sekwan			
		20.04.15.10	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi DPRK Lhokseumawe	Periode informasi dan upgrade berita dan website DPRK	Bulan	60	312,115,100	-	-	1	55,915,100	1	7,200,000	-	45,182,975	1	52,382,975	100.0%	93.7%	1	52,382,975	1.7%	16.8%	Sekwan		
		20.04.15.11	Penyediaan Tenaga Ahli dan Advokasi	Jumlah tenaga Ahli dan Advokasi	OB	360	1,950,000,000	-	-	3	360,000,000	3	45,000,000	3	315,000,000	6	360,000,000	200.0%	100.0%	6	360,000,000	1.7%	18.5%	Sekwan		
		20.04.15.25	Penjaringan dan Penyaringan Anggota Ad Hoc Kota Lhokseumawe	Jumlah kegiatan Penjaringan dan Penyaringan Anggota Ad Hoc Kota Lhokseumawe	Keg	1	160,000,000	-	-	3	160,000,000	1	21,200,000	2	110,659,000	3	131,859,000	100.0%	82.4%	3	131,859,000	300.0%	82.4%	Sekwan		
		20.04.15.26	Penjaringan dan Penyaringan Anggota KIP Kota Lhokseumawe	Jumlah kegiatan Penjaringan dan Penyaringan Anggota KIP Kota Lhokseumawe	Keg	1	160,000,000	-	-	100	185,000,000	50	21,400,000	50	122,787,000	100	144,187,000	100.0%	77.9%	100	144,187,000	10000.0%	90.1%	Sekwan		
		20.04.15.21	Buletin Parlementaris	Jumlah terbitan informasi dan berita parlementaris	Edisi	50	453,492,200	-	-	6	14,292,200	-	6	14,292,200	6	14,292,200	100.0%	100.0%	6	14,292,200	12.0%	3.2%	Sekwan			
		20.04.15.27	Rapat-rapat Fraksi	Jumlah Laporan Rapat Fraksi	Laporan	540	198,191,351	-	-	-	26,889,500	-	-	-	-	-	0.0%	0.0%	-	-	0.0%	0.0%	Sekwan			
		20.04.15.29	Rapat Paripurna Istimewa DPRK	Terlaksananya Rapat-rapat paripurna Istimewa DPRK					6	69,200,000	-	6	24,638,000	6	24,638,000	100.0%	35.6%	6	24,638,000	0.0%	0.0%	Sekwan				
Rata-rata capaian kinerja (%)																92.9%	81.0%			88.6%	26.9%					
Predikat Kinerja																ST	T			SR	SR					
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																65.5%	75.7%			513.2%	28.9%					
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																S	T			ST	SR					
IV.1.5		01.05	Kecamatan Banda Sakti			4,283,868,300			545,633,800		263,362,761		393,823,404	-	656,886,165									Kecamatan Banda Sakti		
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	1.05.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	2,585,336,500	-	-	100	319,171,000	50	212,643,457	50	173,971,604	100	386,635,061	100.0%	121.1%	100	386,635,061	100.0%	15.0%	Kecamatan Banda Sakti			
		1.05.01.01	Penyediaan jasa Surat Menyurat	Periode Penyediaan benda pos dan paket pengiriman	Bulan	60	8,800,000	-	-	12	1,000,000	6	996,000	6	504,000	12	1,500,000	100.0%	150.0%	12	1,500,000	20.0%	17.0%	Kecamatan Banda Sakti		
		1.05.01.02	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Periode Tersedianya penerangan dan alat-alat komunikasi	Bulan	60	297,000,000	-	-	12	57,000,000	6	23,940,457	6	24,583,604	12	48,524,061	100.0%	85.1%	12	48,524,061	20.0%	16.3%	Kecamatan Banda Sakti		
		1.05.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola keuangan SKPD	OB	600	277,000,000	-	-	120	53,120,000	60	21,950,000	60	31,130,000	120	53,080,000	100.0%	99.9%	120	53,080,000	20.0%	19.2%	Kecamatan Banda Sakti		
		1.05.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Periode tersedianya Alat Tulis Kantor	Bulan	60	99,114,000	-	-	12	8,900,000	6	5,506,000	6	8,394,000	12	13,900,000	100.0%	156.2%	12	13,900,000	20.0%	14.0%	Kecamatan Banda Sakti		
		1.05.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Periode penyediaan bahan cetak dan Foto copy	Bulan	60	68,560,000	-	-	12	9,960,000	6	8,620,000	6	2,340,000	12	10,960,000	100.0%	110.0%	12	10,960,000	20.0%	16.0%	Kecamatan Banda Sakti		
		1.05.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Periode Tersedianya Alat Perorangan dan Alat Kebersihan	Bulan	60	27,245,500	-	-	12	2,000,000	6	1,036,000	6	964,000	12	2,000,000	100.0%	100.0%	12	2,000,000	20.0%	7.3%	Kecamatan Banda Sakti		
		1.05.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perantara Perundang-undangan	Periode penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bulan	60	9,540,000	-	-	12	1,140,000	6	475,000	6	665,000	12	1,140,000	100.0%	100.0%	12	1,140,000	20.0%	11.9%	Kecamatan Banda Sakti		
		1.05.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Periode Tersedianya konsumsi pendukung untuk kelancaran kegiatan	Bulan	55	31,000,000	-	-	11	4,000,000	6	3,590,000	5	400,000	11	3,990,000	100.0%	99.8%	11	3,990,000	20.0%	12.9%	Kecamatan Banda Sakti		
		1.05.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Periode Tersedianya Biaya Perjalanan Dinas Ke Luar dan Ke Dalam Daerah	Bulan	60	305,000,000	-	-	12	30,000,000	6	25,100,000	6	19,890,000	12	44,990,000	100.0%	150.0%	12	44,990,000	20.0%	14.8%	Kecamatan Banda Sakti		
		1.05.01.20	Penyediaan Jasa Pegawai Tetap	Jumlah Jasa Tenaga Kerja Tetap	OB	2610	1,462,077,000	-	-	636	152,051,000	318	121,450,000	318	85,101,000	636	206,551,000	100.0%	135.8%	636	206,551,000	24.4%	14.1%	Kecamatan Banda Sakti		
Rata-rata capaian kinerja (%)																100.0%	118.7%			20.4%	14.4%					
Predikat Kinerja																ST	ST			SR	SR					

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) dan satuannya	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2022 (PRPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja Pada Semester				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah/ Penanggung Jawab	Ket		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	Semester I		Semester II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
											9	10	11-9-10	12-11/8												
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	1 05 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	100	529,340,000	-	-	100	34,700,000	50	12,580,304	50	25,028,000	100	37,608,304	100.0%	108.4%	100	37,608,304	100.0%	7.1%	Kecamatan Banda Sakti	16		
		1 05 02 11	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan Kantor	Jenis	31	224,040,000	-	-	1	5,000,000	0	-	1	5,000,000	100.0%	100.0%	1	5,000,000	3.2%	2.2%	Kecamatan Banda Sakti				
		1 05 02 22	Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	Gedung	1	118,000,000	-	-	1	3,000,000	0	-	1	3,000,000	100.0%	100.0%	1	3,000,000	100.0%	2.5%	Kecamatan Banda Sakti				
		1 05 02 23	Pemeliharaan Rutin/berkala Mobil Jabatan	Periode Pemeliharaan Mobil Jabatan	Bulan	60	139,970,000	-	-	12	23,700,000	6	9,580,304	6	14,028,000	100.0%	99.6%	12	23,608,304	20.0%	16.9%	Kecamatan Banda Sakti				
		1 05 02 30	Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan dan perlengkapan Kantor (Mobiler, Komputer dll)	Periode Pemeliharaan Peralatan dan perlengkapan Kantor Camat Banda Sakti	Bulan	60	47,330,000	-	-	12	3,000,000	6	3,000,000	6	3,000,000	100.0%	200.0%	12	6,000,000	20.0%	12.7%	Kecamatan Banda Sakti				
Rata-rata capaian kinerja (%)																100.0%	124.9%			35.8%	8.6%	Kecamatan Banda Sakti				
Predikat Kinerja																ST	ST			SR	SR	Kecamatan Banda Sakti				
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	1 05 07	Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja	Terlaksananya perencanaan bagi SRPD di Kota Lhokseumawe	100	15,298,800	-	-	100	848,800	0	-	-	848,800	-	848,800	0.0%	100.0%	-	848,800	0.0%	5.5%	Kecamatan Banda Sakti			
		1 05 07 02	Penyusunan Rencana Kerja (RKWJ) Satuan Kerja Perangkat Daerah	Jumlah buku renja	Buku	50	15,298,800	-	-	10	848,800	-	-	10	848,800	100.0%	100.0%	10	848,800	20.0%	5.5%	Kecamatan Banda Sakti				
Rata-rata capaian kinerja (%)																100.0%	100.0%			20.0%	5.5%	Kecamatan Banda Sakti				
Predikat Kinerja																ST	ST			SR	SR	Kecamatan Banda Sakti				
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	1 05 09	Program Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa/Kelurahan/Kecamatan	Terlaksananya aparat pemerintah Desa/Kelurahan/Kecamatan	100	465,042,000	-	-	100	91,014,000	50	38,119,000	-	52,595,000	50	90,714,000	50.0%	99.7%	50	90,714,000	50.0%	19.5%	Kecamatan Banda Sakti			
		1 05 09 01	Penyediaan Jasa Aparatur Pemerintahan Mukim/Desa/Kelurahan	Jumlah Aparatur Pemerintahan Mukim	OB	720	465,042,000	-	-	24	91,014,000	12	38,119,000	12	52,595,000	24	90,714,000	100.0%	99.7%	24	90,714,000	3.3%	19.5%	Kecamatan Banda Sakti		
Rata-rata capaian kinerja (%)																100.0%	99.7%			3.3%	19.5%	Kecamatan Banda Sakti				
Predikat Kinerja																ST	ST			SR	SR	Kecamatan Banda Sakti				
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	1 05 28	Program Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan dan Pembinaan Masyarakat Pemerintahan Desa/Kel/Khusus Kec	Terlaksananya peningkatan penyelenggaraan kegiatan dan pembinaan masyarakat pemerintahan desa/kel	100	658,851,000	-	-	100	99,900,000	-	-	-	141,080,000	-	141,080,000	0.0%	141.2%	-	141,080,000	0.0%	21.4%	Kecamatan Banda Sakti			
		1 05 28 01	Penyelenggaraan Kegiatan Masyarakat Desa/Kelurahan Bidang Agama, Sosial dan Budaya (MTQ, HUT RI, dll)	Jumlah peserta MTQ	Hari	25	658,851,000	-	-	6	99,900,000	-	-	3	118,580,000	3	118,580,000	50.0%	118.7%	3	118,580,000	12.0%	18.0%	Kecamatan Banda Sakti		
		1 05 28 02	Kegiatan Sawe Gampong	Periode Kegiatan Sawe Gampong	Hari	0	-	-	-	-	-	-	-	30	22,500,000	30	22,500,000	0.0%	0.0%	30	22,500,000	0.0%	0.0%	Kecamatan Banda Sakti		
Rata-rata capaian kinerja (%)																25.0%	59.3%			6.0%	9.0%	Kecamatan Banda Sakti				
Predikat Kinerja																SR	R			SR	SR	Kecamatan Banda Sakti				
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																85.0%	100.5%			17.1%	11.4%	Kecamatan Banda Sakti				
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																T	ST			SR	SR	Kecamatan Banda Sakti				
IV.1.6		01 06	Kecamatan Hiang Mangat			2,254,000,638				531,488,505		218,646,871		396,801,704		615,448,573							Kecamatan Hiang Mangat			
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	01 06 01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	100	2,058,461,462	-	-	100	448,228,505	50	191,766,271	50	174,328,104	100	366,094,375	100.0%	81.7%	100	366,094,375	100.0%	17.8%	Kecamatan Hiang Mangat			
		01 06 01 01	Penyediaan jasa Surat Menyurat	periode penyediaan benda pos dan paket pengiriman	Bln	60	6,150,000	-	-	12	1,000,000	6	900,000	2	99,000	8	999,000	66.7%	99.9%	8	999,000	13.3%	16.2%	Kecamatan Hiang Mangat		
		01 06 01 02	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	periode penyediaan penerangan dan alat komunikasi	Bln	60	262,440,014	-	-	12	69,700,000	6	19,153,531	2	20,311,008	8	39,464,539	66.7%	56.6%	8	39,464,539	13.3%	15.0%	Kecamatan Hiang Mangat		
		01 06 01 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola keuangan Kecamatan Hiang Mangat	OB	588	236,548,400	-	-	117.6	47,309,680	54	20,990,950	27	26,318,650	81	47,309,600	68.9%	100.0%	81	47,309,600	13.8%	20.0%	Kecamatan Hiang Mangat		
		01 06 01 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Periode Persediaan alat tulis kantor	Bln	60	51,575,466	-	-	12	10,000,000	6	5,141,950	2	13,568,459	8	18,710,409	66.7%	187.1%	8	18,710,409	13.3%	36.3%	Kecamatan Hiang Mangat		
		01 06 01 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	periode penyediaan bahan cetak dan foto copy	Bln	60	32,287,950	-	-	12	10,000,000	6	2,895,500	2	6,068,750	8	8,964,250	66.7%	89.6%	8	8,964,250	13.3%	27.8%	Kecamatan Hiang Mangat		
		01 06 01 13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Persediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis	60	10,925,507	-	-	2	2,000,000	3	1,468,540	2	184,978	5	1,653,518	250.0%	82.7%	5	1,653,518	8.3%	15.1%	Kecamatan Hiang Mangat		
		01 06 01 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan	Eks	1825	6,840,000	-	-	365	1,140,000	-	-	365	1,140,000	365	1,140,000	100.0%	100.0%	365	1,140,000	20.0%	16.7%	Kecamatan Hiang Mangat		
		01 06 01 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Periode Penyediaan Makanan dan Minuman	Bln	55	26,000,000	-	-	11	7,500,000	3	2,052,000	8	4,888,000	11	6,940,000	100.0%	92.5%	11	6,940,000	20.0%	26.7%	Kecamatan Hiang Mangat		
		01 06 01 18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Periode Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan luar Daerah	Bln	60	200,000,000	-	-	12	30,000,000	6	22,343,800	6	26,040,700	12	48,384,500	100.0%	161.3%	12	48,384,500	20.0%	24.2%	Kecamatan Hiang Mangat		
		01 06 01 20	Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap	Jumlah Tenaga Kerja Tidak Tetap	OB	3156	1,225,094,125	-	-	612	269,578,825	276	116,820,000	336	75,708,559	612	192,528,559	100.0%	71.4%	612	192,528,559	19.4%	15.7%	Kecamatan Hiang Mangat		
Rata-rata capaian kinerja (%)																98.6%	104.1%			15.5%	21.4%	Kecamatan Hiang Mangat				

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) dan satuannya	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2022 (PRPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja Pada Semester				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD S/D Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	Semester I		Semester II		11-9-10		12-11/8		13-7-11		14-13/6/100%						
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11-9-10	12-11/8	13-7-11	14-13/6/100%	15	16												
															Predikat Kinerja		ST	ST			SR	SR	Kecamatan Hiang Mangat				
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	01	06	2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	100	184,913,676	-	-	100	79,760,000	50	21,830,600	50	14,520,600	100	36,351,200	100.0%	48.6%	100	36,351,200	100.0%	19.7%	Kecamatan Hiang Mangat			
	01	06	2	-11	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Mobil, Komputer, dll)	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Unit	103	36,113,676	-	3	53,000,000	3	6,600,000	-	3	6,600,000	100.0%	12.5%	3	6,600,000	2.9%	18.3%	Kecamatan Hiang Mangat			
	01	06	2	23	Penelbiharaan Rutin/berkala Mobil Jabatan	Jumlah Penelbiharaan Mobil Jabatan	UB	60	118,800,000	-	12	23,760,000	6	12,790,600	6	10,960,600	12	23,751,200	100.0%	100.0%	12	23,751,200	20.0%	20.0%	Kecamatan Hiang Mangat		
	01	06	2	30	Penelbiharaan Rutin/berkala Peralatan & Perlengkapan Kantor (Mobil, Komputer dll)	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Terpelihara	Bulan	60	30,000,000	-	12	3,000,000	3	2,440,000	6	3,560,000	9	6,000,000	75.0%	200.0%	9	6,000,000	15.0%	20.0%	Kecamatan Hiang Mangat		
															Rata-rata capaian kinerja (%)		91.7%	104.1%			12.6%	19.4%	Kecamatan Hiang Mangat				
															Predikat Kinerja		ST	ST			SR	SR	Kecamatan Hiang Mangat				
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	01	06	07	PROGRAM PENYUSUNAN PERENCANAAN SATUAN KERJA PERANGKAT KERJA	Terlaksananya Perencanaan bagi SKPD di Kota Lokseumawe	100	10,625,500	-	-	100	3,500,000	50	5,050,000	-	-	50	5,050,000	50.0%	144.3%	50	5,050,000	50.0%	47.5%	Kecamatan Hiang Mangat			
	01	06	07	02	Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Buku Renja	Buku	50	10,625,500	-	10	3,500,000	10	5,050,000	-	10	5,050,000	100.0%	144.3%	10	5,050,000	20.0%	47.5%	Kecamatan Hiang Mangat			
															Rata-rata capaian kinerja (%)		100.0%	144.3%			20.0%	47.5%	Kecamatan Hiang Mangat				
															Predikat Kinerja		ST	ST			SR	SR	Kecamatan Hiang Mangat				
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan				PROGRAM PEMBIANAA APARATUR DAN PEMERINTAHAN DESA/KELURAHAN/KECAMATAN				-	-	-	-					97,014,900	-	97,014,900	0.0%	0.0%	-	97,014,900	0%	0.0%	Kecamatan Hiang Mangat		
	01	06	07	01	Penyediaan Jasa Aparatur Pemerintahan Mukim/Desa/Kelurahan	Periode Pembayaran Jasa Aparatur Pemerintah Desa	Bulan	60								4	97,014,900	4	97,014,900	0.0%	0.0%	4	97,014,900	6.7%	0.0%	Kecamatan Hiang Mangat	
															Rata-rata capaian kinerja (%)		0.0%	0.0%			6.7%	0.0%	Kecamatan Hiang Mangat				
															Predikat Kinerja		SR	SR			SR	SR	Kecamatan Hiang Mangat				
				PENINGKATAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN DAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA				-	-	-	-					110,938,100	-	110,938,100	0.0%	0.0%	-	110,938,100	0%	0.0%	Kecamatan Hiang Mangat		
	01	06	07	01	Penyelenggaraan Kegiatan Masyarakat Desa/Kel. Bid. Agama, Sosial dan Budaya (MTQ, HUT RI Dll)	Jumlah peserta MTQ Tingkat Kecamatan	Hari	5			0						80,000,000	-	80,000,000	0.0%	0.0%	-	80,000,000	0%	0.0%	Kecamatan Hiang Mangat	
	01	06	07	02	Kegiatan Saweu Gampong	Periode Koordinasi Langsung antara Camat dan Masyarakat	Bulan	60									30,938,100	-	30,938,100	0.0%	0.0%	-	30,938,100	0%	0.0%	Kecamatan Hiang Mangat	
															Rata-rata capaian kinerja (%)		0.0%	0.0%			0.0%	0.0%	Kecamatan Hiang Mangat				
															Predikat Kinerja		SR	SR			SR	SR	Kecamatan Hiang Mangat				
															TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM		58.0%	70.5%			11.0%	17.7%	Kecamatan Hiang Mangat				
															PREDEKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM		R	S			SR	SR	Kecamatan Hiang Mangat				
IV.1.7	01	07		Kecamatan Muara Satu																				Kecamatan Muara Satu			
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	1	07	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Meningkatnya Pelayanan ADM Perkantoran	100	2,137,972,595	-	-	100	348,542,078	50	163,072,237		198,725,606	50	361,797,843	50.0%	103.8%	50	361,797,843	50.0%	16.9%	Kecamatan Muara Satu			
	1	07	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Periode penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bulan	60	10,952,447	-	12	1,000,000	6	498,000	6	502,000	12	1,000,000	100.0%	100.0%	12	1,000,000	20.0%	9.1%	Kecamatan Muara Satu		
	1	07	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Periode Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Bulan	60	448,117,685	-	12	88,117,685	6	23,396,802	6	22,275,541	12	45,672,343	100.0%	51.8%	12	45,672,343	20.0%	10.2%	Kecamatan Muara Satu		
	1	07	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Tenaga Jasa Administrasi Keuangan	OB	336	211,068,640	-	12	35,708,640	6	21,750,000	6	32,350,000	12	54,100,000	100.0%	151.5%	12	54,100,000	3.6%	25.6%	Kecamatan Muara Satu		
	1	07	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Periode Penyediaan alat tulis kantor	Bulan	60	73,399,573	-	12	8,681,503	6	5,591,835	6	3,409,565	12	9,001,400	100.0%	103.7%	12	9,001,400	20.0%	12.3%	Kecamatan Muara Satu		
	1	07	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaian	Periode Penyediaan barang cetakan dan foto copy	Bulan	60	80,048,250	-	12	9,428,250	0	-	6	9,532,500	6	9,532,500	50.0%	101.1%	6	9,532,500	10.0%	11.9%	Kecamatan Muara Satu		
	1	07	01	13	Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor	Periode Peralatan & Perlengkapan Kantor	Bulan	60	31,386,000	-	12	1,986,000	6	865,600	6	1,120,400	12	1,986,000	100.0%	100.0%	12	1,986,000	20.0%	6.3%	Kecamatan Muara Satu		
	1	07	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan	Periode Penyediaan bahan bacaan	Bulan	60	5,700,000	-	12	1,140,000	6	570,000	6	570,000	12	1,140,000	100.0%	100.0%	12	1,140,000	20.0%	20.0%	Kecamatan Muara Satu		
	1	07	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Periode Persediaan makanan dan minuman	Bulan	60	36,400,000	-	12	4,700,000	0	-	12	4,700,000	12	4,700,000	100.0%	100.0%	12	4,700,000	20.0%	12.9%	Kecamatan Muara Satu		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) dan satuannya	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2022 (PRPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun 2018 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja Pada Semester				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang Dievaluasi (2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPKD Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPKD s/d Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah/ Penanggung Jawab	Ket				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	Semester I		Semester II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp
											9	10	11-9-10	12-11/8														
1						60	289,000,000	-	-	12	30,000,000	0	-	12	44,455,600	12	44,455,600	100.0%	148.2%	12	44,455,600	20.0%	15.4%	Kecamatan Muara Satu	16			
		1 07 01	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan luar daerah	Bulan																							
		1 07 01	20	Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap	OB	2646	951,900,000	-	-	660	167,780,000	330	110,400,000	165	79,810,000	495	190,210,000	75.0%	113.4%	495	190,210,000	18.7%	20.0%	Kecamatan Muara Satu				
Rata-rata capaian kinerja (%)																		92.5%	107.0%			17.2%	14.4%	Kecamatan Muara Satu				
Predikat Kinerja																		ST	ST			SR	SR	Kecamatan Muara Satu				
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	1 07 02			PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Meningkatnya sarana dan Prasarana	100	355,816,863	-	-	100	64,961,400	50	41,348,300		23,919,800	50	65,268,100	50.0%	100.5%	50	65,268,100	50.0%	18.3%	Kecamatan Muara Satu				
		1 07 02	11	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	Unit	48	106,202,806	-	-	12	5,000,000	0	-	12	4,980,000	12	4,980,000	100.0%	99.6%	12	4,980,000	25.0%	4.7%	Kecamatan Muara Satu			
		1 07 02	22	Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung yang di Rehab	Bulan	60	32,000,000	-	-	12	3,000,000	0	-	12	3,000,000	12	3,000,000	100.0%	100.0%	12	3,000,000	20.0%	9.4%	Kecamatan Muara Satu			
		1 07 02	23	Pemeliharaan Rutin/berkala mobil jabatan	Periode Pemeliharaan Mobil Dinas/ Jabatan	Bulan	60	127,352,657	-	-	12	23,700,000	6	10,886,900	6	12,139,800	12	23,026,700	100.0%	97.2%	12	23,026,700	20.0%	18.1%	Kecamatan Muara Satu			
		1 07 02	30	Pemeliharaan Rutin berkala peralatan dan perlengkapan kantor (meubel, Komputer)	Periode Pemeliharaan Peralatan Kerja Kantor	Bulan	60	26,800,000	-	-	660	2,800,000	0	-	12	3,800,000	12	3,800,000	1.8%	135.7%	12	3,800,000	20.0%	14.2%	Kecamatan Muara Satu			
		1 07 02	31	Pemeliharaan rutin/berkala jaringan listrik	Periode pemeliharaan rutin/berkala jaringan listrik	Bln	48	13,361,400	-	-	12	13,361,400	12	13,361,400	-	-	12	13,361,400	100.0%	100.0%	12	13,361,400	25.0%	100.0%	Kecamatan Muara Satu			
		1 07 02	42	Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor	Jumlah Gedung Kantor yang di Rehab	Bln	60	50,100,000	-	-	12	17,100,000	12	17,100,000	-	-	12	17,100,000	100.0%	100.0%	12	17,100,000	20.0%	34.1%	Kecamatan Muara Satu			
Rata-rata capaian kinerja (%)																		83.6%	105.4%			21.7%	30.1%	Kecamatan Muara Satu				
Predikat Kinerja																		T	ST			SR	SR	Kecamatan Muara Satu				
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	1 07 07			PROGRAM PENYUSUNAN PERENCANAAN SATUAN KERJA PERANGKAT KERJA	Cakupan Penyediaan Dokumen Perencanaan SKPK	100	30,205,000	-	-	100	6,041,000	0	-	-	1,400,000	-	1,400,000	0.0%	23.2%	-	1,400,000	0.0%	4.6%	Kecamatan Muara Satu				
		1 07 07	2	Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Buku Renja SKPD	Buku	50	30,205,000	-	-	10	6,041,000	0	0	10	1,400,000	10	1,400,000	100.0%	23.2%	10	1,400,000	20.0%	4.6%	Kecamatan Muara Satu			
Rata-rata capaian kinerja (%)																		100.0%	23.2%			20.0%	4.6%	Kecamatan Muara Satu				
Predikat Kinerja																		ST	SR			SR	SR	Kecamatan Muara Satu				
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	1 07 09			PROGRAM PEMBINAAN APARATUR & PEMERINTAHAN DESA/KEL./KECAMATAN	Cakupan Koordinasi Pemerintah Kecamatan, Mukim, DAN Gampong	100	295,091,879	-	-	100	90,907,500	50	32,000,000	50	49,505,000	100	81,505,000	100.0%	89.7%	100	81,505,000	100.0%	27.6%	Kecamatan Muara Satu				
		1 07 09	01	Penyediaan Jasa aparatur Pemerintahan Mukim/Desa/Kecamatan	Periode Pembayaran Jasa Aparatur Pemerintah Desa	Bulan	60	295,091,879	-	-	8	90,907,500	4	32,000,000	4	49,505,000	8	81,505,000	100.0%	89.7%	8	81,505,000	13.3%	27.6%	Kecamatan Muara Satu			
Rata-rata capaian kinerja (%)																		100.0%	89.7%			13.3%	27.6%	Kecamatan Muara Satu				
Predikat Kinerja																		ST	T			SR	SR	Kecamatan Muara Satu				
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	1 07 28			PENINGKATAN PENYELenggaraAN KEGIATAN & PEMBINAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA, KECURAHAN (KHUSUS KECAMATAN)	Meningkatnya peran serta dalam kegiatan kemasyarakatan	100	569,154,500	-	-	100	123,122,100	0	-	-	123,067,100	-	123,067,100	0.0%	100.0%	-	123,067,100	0.0%	21.6%	Kecamatan Muara Satu				
		1 07 28	01	Penyelenggaraan Kegiatan Masyarakat Desa/Kecamatan bidang Agama, sosial & budaya (MTQ,HUT RI,DLI)	Jumlah peserta MTQ Tingkat Kecamatan	Hari	5	463,366,300	-	-	5	100,000,000	-	-	5	100,000,000	5	100,000,000	100.0%	100.0%	5	100,000,000	100.0%	21.6%	Kecamatan Muara Satu			
		1 07 28	02	Kegiatan Sawu Gampong	Periode Koordinasi Langsung antara Camat dan Masyarakat	Bulan	60	55,508,200	-	-	12	11,982,100	-	-	6	11,982,100	6	11,982,100	50.0%	100.0%	6	11,982,100	10.0%	21.6%	Kecamatan Muara Satu			
		1 07 28	04	Peningkatan Pelatihan Ketrampilan dan Pembinaan PKK Gampong	Periode Pembinaan Kegiatan PKK	Orang	186	50,280,000	-	-	-	11,140,000	-	-	93	11,085,000	93	11,085,000	0.0%	99.5%	93	11,085,000	50.0%	22.0%	Kecamatan Muara Satu			
Rata-rata capaian kinerja (%)																		50.0%	99.8%			53.3%	21.7%	Kecamatan Muara Satu				
Predikat Kinerja																		SR	ST			R	SR	Kecamatan Muara Satu				
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																		85.2%	85.0%			25.1%	19.7%	Kecamatan Muara Satu				
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																		T	T			SR	SR	Kecamatan Muara Satu				
IV.1.8		01 08		Kecamatan Muara Dua			3,611,067,076	-	-		676,600,194		398,796,012		342,793,457		741,589,469								Kecamatan Muara Dua			
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	01 08 01	01	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	100	2,026,438,638	-	-	100	331,925,644	50	189,440,747	353	198,885,847	403	388,326,594	403.0%	117.0%	403	388,326,594	403.0%	19.2%	Kecamatan Muara Dua				
		01 08 01	01	Penyediaan jasa Surat Menyurat	Periode penyediaan benda pos dan paket pengiriman	Bln	60	6,000,000	-	-	12	1,000,000	6	498,000	6	501,000	12	999,000	100.0%	99.9%	12	999,000	20.0%	16.7%	Kecamatan Muara Dua			
		01 08 01	02	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Periode penyediaan penerangan dan alat komunikasi	Bln	60	340,335,008	-	-	12	70,150,754	6	12,630,970	6	16,707,748	12	29,338,718	100.0%	41.8%	12	29,338,718	20.0%	8.6%	Kecamatan Muara Dua			

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output)/Kegiatan (output) dan satuannya	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2022 (PRPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPJ Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPJ Tahun 2018 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja Pada Semester				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPJ yang Dievaluasi (2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPJ Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Pelaksanaan RKPJ		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		Peningkat Daya Penanggung Jawab	Ket		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	Semester I		Semester II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
											9	10	11-9-10	12-11/8												
1						6	7	8	9	10	11-9-10	12-11/8	13-7-11	14-13/6/100%							15	16				
		01 08 01 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola keuangan SKPD	OB	540	283,395,200	-	-	108	56,879,040	54	23,956,082	54	32,922,359	108	56,878,441	100.0%	100.0%	108	56,878,441	20.0%	20.1%	Kecamatan Muara Dua		
		01 08 01 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Periode tersedianya alat tulis kantor	Bln	60	45,806,376	-	-	12	9,006,750	6	2,907,698	6	12,091,445	12	14,999,143	100.0%	166.5%	12	14,999,143	20.0%	32.7%	Kecamatan Muara Dua		
		01 08 01 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Periode penyediaan bahan cetak dan foto copy	Bln	60	43,869,000	-	-	12	9,000,000	6	3,312,250	6	5,681,500	12	8,993,750	100.0%	99.9%	12	8,993,750	20.0%	20.5%	Kecamatan Muara Dua		
		01 08 01 13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Periode Paralatan dan Perlengkapan Kantor	Bln	60	19,091,580	-	-	12	1,698,000	6	1,114,022	6	566,220	12	1,680,242	100.0%	99.0%	12	1,680,242	20.0%	8.8%	Kecamatan Muara Dua		
		01 08 01 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Periode Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan	Bulan	1825	6,696,474	-	-	365	1,140,000	6	870,000	359	870,000	365	1,140,000	100.0%	100.0%	365	1,140,000	20.0%	17.0%	Kecamatan Muara Dua		
		01 08 01 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Periode Penyediaan Makanan dan Minuman	Bln	55	41,541,800	-	-	12	6,580,000	6	5,120,000	6	1,460,000	12	6,580,000	100.0%	100.0%	12	6,580,000	21.8%	15.8%	Kecamatan Muara Dua		
		01 08 01 18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Periode Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Bln	60	206,300,000	-	-	12	30,000,000	6	29,852,800	6	44,999,500	12	74,852,300	100.0%	249.5%	12	74,852,300	20.0%	36.3%	Kecamatan Muara Dua		
		01 08 01 20	Penyediaan Jasa Pegawai Tetap	Jumlah Tenaga Kerja Tetap	OB	2580	1,033,403,200	-	-	156	146,471,000	258	109,478,925	(102)	83,386,075	156	192,865,000	100.0%	131.7%	156	192,865,000	6.0%	18.7%	Kecamatan Muara Dua		
														Rata-rata capaian kinerja (%)		100.0%	118.8%			18.8%	19.5%	Kecamatan Muara Dua				
														Predikat Kinerja		ST	ST			SR	SR	Kecamatan Muara Dua				
Meningkatnya Akutabilitas Kinerja dan Keuangan		01 08 02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur		100	457,978,401	-	-	100	82,059,000	50	60,393,000	50	36,257,200	100	96,650,200	100.0%	117.8%	100	96,650,200	100.0%	21.1%	Kecamatan Muara Dua		
		01 08 02 11	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Unit	23	169,632,000	-	-	2	19,632,000	1	9,582,000	1	24,930,000	2	34,512,000	100.0%	175.8%	2	34,512,000	8.7%	20.3%	Kecamatan Muara Dua		
		01 08 02 22	Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara	Unit	5	121,897,331	-	-	1	26,901,000	1	26,901,000	-	-	1	26,901,000	100.0%	100.0%	1	26,901,000	20.0%	22.1%	Kecamatan Muara Dua		
		01 08 02 23	Pemeliharaan Rutin/berkala Mobil Jabatan	Jumlah Mobil Jabatan yang terpelihara	Bulan	60	90,520,560	-	-	1	23,760,000	1	12,144,000	-	11,027,200	1	23,171,200	100.0%	97.5%	1	23,171,200	1.7%	25.6%	Kecamatan Muara Dua		
		01 08 02 30	Pemeliharaan Rutin/berkala Kantor (Mobiler, Komputer)	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Terpelihara	Bulan	60	23,106,882	-	-	12	3,000,000	6	3,000,000	6	300,000	12	3,300,000	100.0%	110.0%	12	3,300,000	20.0%	14.3%	Kecamatan Muara Dua		
		01 08 02 42	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang Terawat	Bulan	5	52,821,628	-	-	1	8,766,000	1	8,766,000	-	-	1	8,766,000	100.0%	100.0%	1	8,766,000	20.0%	16.6%	Kecamatan Muara Dua		
														Rata-rata capaian kinerja (%)		100.0%	116.7%			14.1%	19.8%	Kecamatan Muara Dua				
														Predikat Kinerja		ST	ST			SR	SR	Kecamatan Muara Dua				
Meningkatnya Akutabilitas Kinerja dan Keuangan		01 08 07	PROGRAM PENYUSUNAN PERENCANAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Terlaksananya Perencanaan bagi SKPD di Kota Lokseumawe		100	6,191,000	-	-	100	1,850,000	50	1,850,000	-	-	50	1,850,000	50.0%	100.0%	50	1,850,000	50.0%	25.0%	Kecamatan Muara Dua		
		01 08 07 02	Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD	Jumlah Buku Renja	Buku	50	6,191,000	-	-	30	1,550,000	10	1,550,000	-	-	10	1,550,000	33.3%	100.0%	10	1,550,000	20.0%	25.0%	Kecamatan Muara Dua		
														Rata-rata capaian kinerja (%)		33.3%	100.0%			20.0%	25.0%	Kecamatan Muara Dua				
														Predikat Kinerja		SR	ST			SR	SR	Kecamatan Muara Dua				
Meningkatnya Akutabilitas Kinerja dan Keuangan		01 08 09	PROGRAM PEMBINAAN APARATUR DAN PEMERINTAHAN DESA/KELURAHAN/KECAMATAN	Terbinaanya Aparatur Pemerintahan Desa/Kelurahan/Kecamatan		100	531,546,637	-	-	100	87,065,650	50	35,412,265	(30)	45,650,410	20	81,062,675	20.0%	93.1%	20	81,062,675	20.0%	15.3%	Kecamatan Muara Dua		
		01 08 09 28	Penyediaan Jasa Aparatur Pemerintah (Mukim/Desa/Kelurahan)	Jumlah Aparatur Pemerintahan Mukim/Muspika	OB	600	531,546,637	-	-	30	87,065,650	60	35,412,265	(30)	45,650,410	30	81,062,675	100.0%	93.1%	30	81,062,675	5.0%	15.3%	Kecamatan Muara Dua		
														Rata-rata capaian kinerja (%)		100.0%	93.1%			5.0%	15.3%	Kecamatan Muara Dua				
														Predikat Kinerja		ST	ST			SR	SR	Kecamatan Muara Dua				
Meningkatnya Akutabilitas Kinerja dan Keuangan		01 08 28	PROGRAM PENINGKATAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN DAN PEMBINAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA/KEL (KHUSUS KEC)	Terlaksananya Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan dan Pembinaan Masyarakat Pemerintahan Desa/Kel		100	588,912,400	-	-	100	174,000,000	50	112,000,000	56	62,000,000	106	174,000,000	106.0%	100.0%	106	174,000,000	106.0%	29.5%	Kecamatan Muara Dua		
		01 08 28 01	Penyelenggaraan Kegiatan Masyarakat Desa/Kelurahan Bhd. Agama, Sosial dan Budaya (MTQ, HUT RI, dll)	Jumlah Kegiatan MTQ	Hari	25	530,000,000	-	-	30	100,000,000	5	100,000,000	25	-	30	100,000,000	100.0%	100.0%	30	100,000,000	120.0%	18.9%	Kecamatan Muara Dua		
		01 08 28 02	Sawau Gampang	Periode kegiatan sawau gampang	Bln	85	58,912,400	-	-	30	24,000,000		12,000,000	30	12,000,000	30	24,000,000	100.0%	100.0%	30	24,000,000	35.3%	40.7%	Kecamatan Muara Dua		
		01 08 28 03	Penyelenggaraan Kegiatan Masyarakat desa/kel. Bidang Pemuda dan Olah Raga	Periode Penyelenggaraan Kegiatan Masyarakat	kegiatan					0	50,000,000			1	50,000,000	1	50,000,000	0.0%	100.0%	1	50,000,000	0.0%	0.0%	Kecamatan Muara Dua		
														Rata-rata capaian kinerja (%)		66.7%	100.0%			51.8%	19.9%	Kecamatan Muara Dua				

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) dan satuannya	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2022 (PRPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja Pada Semester				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		Peningkat Daya Penanggung Jawab	Ket			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	Semester I		Semester II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	
											K	Rp	K	Rp													K
											Predikat Kinerja		S	ST			R	SR	Kecamatan Muara Dua								
											TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM				80.0%	105.7%			21.9%	19.9%	Kecamatan Muara Dua						
											PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM				T	ST			SR	SR	Kecamatan Muara Dua						
IV.1.9				Badan Penanggulangan Bencana Daerah		13,046,411,124	-	-	11,342,111,835	8,922,246,837	1,762,903,133	10,685,149,970															
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	01	09	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100	9,787,387,194	-	-	100	2,461,447,163	50	734,182,352	50	1,404,066,535	100	2,138,248,887	100.0%	86.9%	100	2,138,248,887	100.0%	21.8%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
	01	09	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Periode Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bulan	60	12,900,000	-	-	12	2,550,000	6	-	6	990,000	12	990,000	100.0%	38.8%	12	990,000	20.0%	7.7%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	01	09	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Periode Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	60	906,620,911	-	-	12	156,023,397	6	37,215,480	6	36,641,360	12	73,856,840	100.0%	47.3%	12	73,856,840	20.0%	8.1%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	01	09	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Pejabat Pengelola Keuangan SKPD (19 orang x12 bln)	OB	1200	653,785,860	-	-	228	128,274,070	114	40,040,000	114	70,972,235	228	111,012,235	100.0%	86.5%	228	111,012,235	19.0%	17.0%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	01	09	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Periode Penyediaan Alat Tulis Kantor	Bulan	60	99,817,215	-	-	12	17,097,215	6	9,690,425	6	6,818,970	12	16,509,395	100.0%	96.6%	12	16,509,395	20.0%	16.5%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	01	09	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Periode Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bulan	60	55,000,000	-	-	12	9,000,000	6	4,480,000	6	4,342,375	12	8,822,375	100.0%	98.0%	12	8,822,375	20.0%	16.0%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	01	09	01	13	Penyediaan Perlatan dan Perengkapan Kantor	Periode Penyediaan Perlatan dan Perengkapan Kantor	Bulan	60	31,596,750	-	-	12	4,596,750	6	2,491,575	6	783,480	12	3,275,055	100.0%	71.2%	12	3,275,055	20.0%	10.4%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	01	09	01	15	Penyediaan Bahan Baku dan Perawatan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Baku dan Perawatan Perundang-undangan (365 Eks)	Eks	1825	6,487,500	-	-	12	1,140,000	-	-	12	1,140,000	12	1,140,000	100.0%	100.0%	12	1,140,000	0.7%	17.6%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	01	09	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Periode Penyediaan Makanan dan Minuman	Bulan	55	37,000,000	-	-	11	6,450,000	-	-	11	1,597,500	11	1,597,500	100.0%	24.8%	11	1,597,500	20.0%	4.3%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	01	09	01	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah (Luar Kota Lhokseumawe)	Periode Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Bulan	60	502,900,000	-	-	12	129,000,000	6	42,964,872	6	73,518,828	12	116,483,700	100.0%	90.3%	12	116,483,700	20.0%	23.2%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	01	09	01	20	Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap	Jumlah Pegawai tidak Tetap (109 Orang x12 bulan)	OB	6780	7,481,278,958	-	-	654	2,007,315,731	327	597,300,000	327	1,207,261,787	654	1,804,561,787	100.0%	89.9%	654	1,804,561,787	9.6%	24.1%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
											Rata-rata capaian kinerja (%)		100.0%	74.4%			16.9%	14.5%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah								
											Predikat Kinerja		ST	S			SR	SR	Badan Penanggulangan Bencana Daerah								
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	01	09	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	Persen	100	1,967,551,930	-	-	100	421,430,600	78	184,584,850	78	177,522,460	156	362,107,310	156.0%	85.9%	156	362,107,310	156.0%	18.4%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
	01	09	02	11	Pengadaan Perlatan dan Perengkapan Kantor (Mobil, Komputer, dll)	Jumlah Pengadaan Perlatan dan Perengkapan Gedung Kantor (Mobil, Komputer, dll)	Unit	29	199,042,000	-	-	1	20,000,000	-	-	-	-	-	-	0.0%	0.0%	-	-	0.0%	0.0%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	01	09	02	22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Periode Pemeliharaan Rutin / berkala gedung kantor	Bulan	60	126,910,000	-	-	24	32,910,000	12	30,871,500	12	-	24	30,871,500	100.0%	93.8%	24	30,871,500	40.0%	24.3%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	01	09	02	23	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan	Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala Mobil Jabatan	UB	60	175,810,000	-	-	12	33,600,000	6	12,754,500	6	20,247,000	12	33,001,500	100.0%	98.2%	12	33,001,500	20.0%	18.8%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	01	09	02	24	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Pemeliharaan Rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	UB	720	1,327,984,905	-	-	108	256,000,000	54	116,088,250	54	106,125,460	108	222,213,710	100.0%	86.8%	108	222,213,710	15.0%	16.7%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	01	09	02	30	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlatan dan Perengkapan Kantor	Periode Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlatan dan Perengkapan Kantor	Bulan	60	137,805,025	-	-	12	78,920,600	6	24,870,600	6	51,150,000	12	76,020,600	100.0%	96.3%	12	76,020,600	20.0%	55.2%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
											Rata-rata capaian kinerja (%)		80.0%	75.0%			19.0%	23.0%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah								
											Predikat Kinerja		T	S			SR	SR	Badan Penanggulangan Bencana Daerah								
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	01	09	03	Peningkatan Disiplin Aparatur	Pemertase Tingkat Disiplin Aparatur	Persen	100	329,895,184	-	-	100	54,036,000	50	54,036,000	-	-	50	54,036,000	50.0%	100.0%	50	54,036,000	50.0%	16.4%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
	01	09	03	02	Pengadaan Pakain Dinas Berserta Pelengkapannya	Jumlah Pakain Dinas Khusus Hari-Hari Tertentu	Org	324	329,895,184	-	-	1	54,036,000	1	54,036,000	-	-	1	54,036,000	100.0%	100.0%	1	54,036,000	0.3%	16.4%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
											Rata-rata capaian kinerja (%)		100.0%	100.0%			0.0%	0.0%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah								
											Predikat Kinerja		ST	ST			0.0%	0.0%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah								
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	01	09	05	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal yang diikuti		100	183,153,000	-	-	100	28,000,000	-	-	-	-	-	-	0.0%	0.0%	-	-	0.0%	0.0%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
	01	09	05	01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Periode Pendidikan dan Pelatihan Formal Aparatur	Bulan	60	183,153,000	-	-	12	28,000,000	-	-	-	-	-	-	0.0%	0.0%	-	-	0.0%	0.0%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
											Rata-rata capaian kinerja (%)		0.0%	0.0%			0.0%	0.0%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah								

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) dan satuannya	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2022 (PRPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja Pada Semester				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD S/D Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah/ Penanggung Jawab	Ket					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	Semester I		Semester II		11-9-10		12- 11/8		K	Rp	K	Rp			13- 7+11	14-13/6/100%			
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								K	Rp		
1		03 01 07 02	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Satuan Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Buku Renja SKPD	Buku	55	8.158,120	-	-	10	2.032,000	-	-	10	400,000	10	400,000	100,0%	19,7%	10	400,000	18,2%	4,9%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah					
																Rata-rata capaian kinerja (%)		100,0%	19,7%			18,2%	4,9%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah					
																Predikat Kinerja		ST	SR			SR	SR	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah					
Meningkatnya Pengebang dan Pemanfaatan TIK terhadap Informasi Publik	03 01 15	07 02	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI	Keterbukaan Informasi Publik Melalui Website	Persen	100	901.988,922	-	-	100	142.382,550	0	-	100	108.368,750	100	108.368,750	100,0%	76,1%	100	108.368,750	100,0%	12,0%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah					
						03 01 10 07	Pembinaan dan Pengembangan Website Bappeda	Periode tersedianya website Bappeda Kota Lhokseumawe	Bulan	60	255,368,247	-	-	12	24,068,550	-	-	12	23,009,350	12	23,009,350	100,0%	95,6%	12	23,009,350	20,0%	9,0%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
						03 01 10 23	Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe	Periode tersedianya Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang berbasis web	Bulan	48	331,791,400	-	-	12	60,791,400	-	-	12	58,916,800	12	58,916,800	100,0%	96,9%	12	58,916,800	25,0%	17,8%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
						03 01 10 24	Pelaksanaan Pelaporan Sistem Informasi Monitoring TEPRA (SISMONTEP)	Periode Pelaksanaan Pelaporan	Laporan	24	314,829,275	-	-	8	57,522,600	-	-	8	26,442,600	8	26,442,600	100,0%	46,0%	8	26,442,600	33,3%	8,4%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
																Rata-rata capaian kinerja (%)		100,0%	79,5%			26,1%	11,7%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah					
																Predikat Kinerja		ST	T			SR	SR	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah					
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	03 01 18	13	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Cakupan Penyediaan Dokumen Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis Cepat Tumbuh	Persen	100	111.501,915	-	-	100	53.096,150	50	38.586,150	50	12.157,400	100	50.743,550	100,0%	95,6%	100	50.743,550	100,0%	45,5%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah					
						03 01 18 13	Pendataan Kawasan Potensi Cepat Tumbuh	Jumlah Buku Pendataan Kawasan Potensi Cepat Tumbuh	15	15	111,501,915	-	-	15	53,096,150	15	38,586,150	-	-	15	50,743,550	100,0%	95,6%	15	50,743,550	100,0%	45,5%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
																Rata-rata capaian kinerja (%)		100,0%	95,6%			100,0%	45,5%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah					
																Predikat Kinerja		ST	ST			ST	SR	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah					
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	03 01 19	15	PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN KOTA-KOTA MENENGAH DAN BESAR	Cakupan Penyediaan Dokumen Perencanaan Pengembangan Kota Menengah dan Besar	Persen	100	2.041.938,215	-	-	100	488.897,766	50	127.313,302	50	337.367,944	100	464.681,246	100,0%	95,0%	100	464.681,246	100,0%	22,8%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah					
						03 01 19 15	Optimalisasi Operasional Instalasi Pengelolaan Air Limbah	Jumlah Kapasitas IPLT Yang Terbangun	20	236,523,300	-	-	20	31,294,500	20	26,894,500	-	-	20	27,404,500	100,0%	87,6%	20	27,404,500	100,0%	11,6%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
						03 01 19 20	Penguatan Peran Pelaku Pemerintah Daerah Terhadap Program Nasional	Jumlah Dokumen Penguatan Peran Pelaku Pemerintah Daerah terhadap Program nasional	Dokumen	5	1,805,414,915	-	-	5	457,603,266	5	100,418,802	-	-	5	437,276,746	100,0%	95,6%	5	437,276,746	100,0%	24,2%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
																Rata-rata capaian kinerja (%)		100,0%	91,6%			100,0%	17,9%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah					
																Predikat Kinerja		ST	ST			ST	SR	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah					
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	03 01 21	14	PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN DAERAH	Cakupan Penyediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Persen	100	7.531.572,877	-	-	100	1.794.131,230	50	288.693,204	50	1.141.051,336	100	1.429.744,540	100,0%	79,7%	100	1.429.744,540	100,0%	19,0%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah					
						03 01 21 14	Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)	Jumlah buku Rancangan KUA dan Nota Kesepakatan KUA Thn 2016	Buku	500	429,115,879	-	-	100	70,288,100	0	-	100	68,328,100	100	68,328,100	100,0%	97,2%	100	68,328,100	20,0%	15,9%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
						03 01 21 15	Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)	Jumlah buku Rancangan PPAS dan Nota Kesepakatan PPAS Thn 2016	Buku	550	995,402,062	-	-	100	163,044,350	0	-	100	144,987,350	100	144,987,350	100,0%	88,9%	100	144,987,350	18,2%	14,6%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
						03 01 21 18	Penyenggaraan MUSRENBANG RKPD	Periode pelaksanaan Musrenbang	Hari	20	1,306,603,102	-	-	4	203,796,975	4	189,022,100	-	-	4	189,622,100	100,0%	93,0%	4	189,622,100	20,0%	14,5%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
						03 01 21 19	Penyusunan Perubahan KUA	Jumlah Dokumen KUA Perubahan dan Nota Kesepakatan KUA Thn 2015	Buku	475	412,572,279	-	-	95	67,578,300	0	-	95	67,093,050	95	67,093,050	100,0%	99,3%	95	67,093,050	20,0%	16,3%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
						03 01 21 21	Penyusunan Perubahan PPAS	Jumlah buku PPAS dan Nota Kesepakatan PPAS Perubahan Thn	Buku	525	1,076,239,385	-	-	105	176,285,300	0	-	105	164,742,400	105	164,742,400	100,0%	93,5%	105	164,742,400	20,0%	15,3%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
						03 01 21 31	Penyusunan, Monitoring, Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Daerah	Jumlah buku laporan monitoring pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah tahun 2017	Buku	100	475,244,136	-	-	20	66,250,855	0	-	20	48,625,868	20	48,625,868	100,0%	73,4%	20	48,625,868	20,0%	10,2%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
						03 01 21 34	Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	Jumlah Buku RKPD Tahun 2017	Buku	250	520,794,313	-	-	20	66,900,800	0	-	20	63,247,567	20	63,247,567	100,0%	94,5%	20	63,247,567	8,0%	12,1%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
						03 01 21 49	Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan	Jumlah Buku Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan tahun 2016	Buku	80	178,794,000	-	-	35	84,953,600	0	-	35	57,996,100	35	57,996,100	100,0%	68,3%	35	57,996,100	43,8%	32,4%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
						03 01 21 66	Perencanaan dan Monitoring Kegiatan DAK	Periode Perencanaan dan Monitoring DAK	Kali	120	731,211,611	-	-	40	160,683,000	20	69,500,104	20	77,580,789	40	147,080,893	100,0%	91,5%	40	147,080,893	33,3%	20,1%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
						03 01 21 68	Pengembangan Sistem Perencanaan Daerah Secara Elektronik	Jumlah Aplikasi (RKPD, PPAS, RKPD-P, dan PPAS-P) secara online (e-planning)	Periode	12	249,169,150	-	-	12	356,419,150	6	30,171,000	6	230,107,879	12	260,278,879	100,0%	73,0%	12	260,278,879	100,0%	104,5%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
						03 01 21 70	Verifikasi Renstra SKPK Lhokseumawe	Jumlah Buku Renstra-SKPK Lhokseumawe	Buku	25	16,095,000	-	-	5	16,095,000	0	-	-	-	-	-	0,0%	0,0%	-	-	0,0%	0,0%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output)/Kegiatan (output) dan satuannya	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2022 (PRPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja Pada Semester				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		Peringkat Daerah Penanggung Jawab	Ket		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	Semester I		Semester II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
											K	Rp	K	Rp												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11-9-10	12-11/8	13-7-11	14-13/6/100%	15	16											
		03 01 21 71	Verifikasi Renja SKPK Lhokseumawe	Jumlah Buku Renja-SKPK Lhokseumawe	Buku	25	312,404,353	-	5	58,321,300	0	5	36,040,500	5	36,040,500	100.0%	61.8%	5	36,040,500	20.0%	11.5%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				
		03 01 21 72	Verifikasi Perubahan Renja SKPK Lhokseumawe	Jumlah Buku Perubahan Renja-SKPK Lhokseumawe	Buku	25	312,487,993	-	5	58,335,000	0	5	36,355,000	5	36,355,000	100.0%	62.3%	5	36,355,000	20.0%	11.6%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				
		03 01 21 76	Penyusunan Rasio Kemandirian Daerah Kota Lhokseumawe	Jumlah Dokumen Rasio Kemandirian Daerah Kota Lhokseumawe	Buku	25	3,032,100	-	5	30,032,100	0	5	28,737,333	5	28,737,333	100.0%	95.7%	5	28,737,333	20.0%	947.8%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				
		03 01 21 77	Penyusunan rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Lhokseumawe	Jumlah Buku Hasil Evaluasi RKPD Lhokseumawe	Buku	50	395,418,114	-	10	98,158,000	0	10	72,830,000	10	72,830,000	100.0%	74.2%	10	72,830,000	20.0%	18.4%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				
		03 01 21 89	Verifikasi usulan Program dan Kegiatan DAK Fisik	Jumlah Laporan verifikasi Program dan Kegiatan DAK Fisik	Laporan	10	116,989,400	-	10	116,989,400	0	10	43,779,400	10	43,779,400	100.0%	37.4%	10	43,779,400	100.0%	37.4%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				
Rata-rata capaian kinerja (%)																	93.8%	75.3%		30.2%	80.2%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				
Predikat Kinerja																	ST	T		SR	T	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	03 01 22	PROGRAM PERENCANAAN EKONOMI	Cakupan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi			100	198,479,900	-	100	198,479,900	50	50	6,990,000	50	168,347,036	100.0%	83.3%	100	165,337,036	100.0%	83.3%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				
		03 01 22 20	Penelitian dan Pengembangan Potensi Inovasi Unggulan Kota Lhokseumawe	Periode Penelitian dan Pengembangan Potensi Inovasi Unggulan Kota Lhokseumawe	Buku	10	54,339,400	-	10	54,339,400	0	10	41,222,600	10	41,222,600	100.0%	75.9%	10	41,222,600	100.0%	75.9%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				
		03 01 22 21	Penelitian dan Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Pariwisata Kota Lhokseumawe	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Pariwisata Kota Lhokseumawe	Buku	10	54,339,400	-	10	54,339,400	0	10	6,990,000	10	42,128,000	100.0%	90.4%	10	49,118,000	100.0%	90.4%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				
		03 01 22 22	Penguatan Kelembagaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Dokumen	10	89,801,100	-	10	89,801,100	0	10	74,996,436	10	74,996,436	100.0%	83.5%	10	74,996,436	100.0%	83.5%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				
Rata-rata capaian kinerja (%)																	100.0%	83.3%		100.0%	83.3%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				
Predikat Kinerja																	ST	T		ST	T	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	03 01 23	PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL BUDAYA	Cakupan Koordinasi Perencanaan sosial dan budaya			100	773,538,471	-	100	116,273,150	0	50	-	50	112,604,450	50.0%	96.8%	50	112,604,450	50.0%	14.6%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				
		03 01 23 14	Pengujian Kebijakan Pendidikan	Jumlah Buku Pengujian Kebijakan Pendidikan	Buku	120	202,962,821	-	25	35,697,500	-	25	34,594,900	25	34,594,900	100.0%	96.9%	25	34,594,900	20.8%	17.0%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				
		03 01 23 21	Penyusunan Buku Indikator Demografi Kota Lhokseumawe	Jumlah Buku Indikator Demografi Kota Lhokseumawe	Buku	60	26,535,000	-	25	26,535,000	-	25	26,394,200	25	26,394,200	100.0%	99.5%	25	26,394,200	41.7%	99.5%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				
		03 01 23 26	Penyusunan Indikator Pendidikan dan Kesehatan Kota Lhokseumawe	Jumlah Buku Indikator Pendidikan dan Kesehatan Kota Lhokseumawe	Buku	60	237,880,650	-	20	27,880,650	-	20	26,080,650	20	26,080,650	100.0%	93.5%	20	26,080,650	33.3%	11.0%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				
		03 01 23 27	Penyusunan Buku Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Lhokseumawe	Jumlah Buku Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Lhokseumawe	Buku	60	306,160,000	-	20	26,160,000	-	20	25,534,700	20	25,534,700	100.0%	97.6%	20	25,534,700	33.3%	8.3%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				
Rata-rata capaian kinerja (%)																	100.0%	96.9%		32.3%	34.0%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				
Predikat Kinerja																	ST	ST		SR	SR	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	03 01 24	Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	Cakupan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam			100	185,769,350	-	100	172,937,600	0	50	-	50	143,821,900	50.0%	83.0%	50	143,821,900	50.0%	77.3%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				
		03 01 24 25	Penyusunan dan Pengelolaan Data Base Perumahan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pengelolaan Data Base Perumahan Rumah Tidak Layak Huni	Buku	20	80,128,600	-	20	67,296,750	0	20	66,009,850	20	66,009,850	100.0%	98.1%	20	66,009,850	100.0%	82.4%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				
		03 01 24 27	Penanganan Lingkungan Perumahan Kumuh Pemukiman Kumuh Berbasis Kawasan (PLP2KBR)	Jumlah Penanganan Lingkungan Perumahan Kumuh Pemukiman Kumuh Berbasis Kawasan (PLP2KBR)	Buku	20	105,640,750	-	20	105,640,750	0	20	77,512,050	20	77,512,050	100.0%	73.4%	20	77,512,050	100.0%	73.4%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				
Rata-rata capaian kinerja (%)																	100.0%	85.7%		100.0%	77.9%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				
Predikat Kinerja																	ST	T		ST	T	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	03 01 26	PROGRAM KOORDINASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN	Cakupan Koordinasi Perencanaan Pembangunan			100	-	-	100	328,910,275	50	50	166,085,000	50	90,366,475	100.0%	78.0%	100	256,451,475	100.0%	0.0%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				
		03 01 26 03	Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian, TDBH Migas dan Otus Kota Lhokseumawe	Jumlah laporan koordinasi perencanaan dan pengendalian dana Otus	Laporan	-	-	-	50	246,626,275	50	50	152,615,000	20	43,348,275	30	195,863,275	60.0%	79.4%	30	195,863,275	0.0%	0.0%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
		03 01 23 09	Pengendalian Tata Ruang Kota Lhokseumawe	Jumlah Rekomendasi Tata Ruang	laporan	-	-	-	12	82,284,000	6	6	13,470,000	6	47,118,200	12	60,588,200	100.0%	73.6%	12	60,588,200	0.0%	0.0%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
Rata-rata capaian kinerja (%)																	80.0%	76.5%		0.0%	0.0%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) dan satuannya	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2022 (PRPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja Pada Semester				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		Peningkat Dera/ Penanggung Jawab	Ket				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	Semester I		Semester II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp
											K	Rp	K	Rp														
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11-9-10	12-11/8	13-11/8	14-13/6/100%	15-7/11	16-13/6/100%	17	18			19	20		
										Predikat Kinerja	ST	ST							SR	SR								

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output)/Kegiatan (output) dan satuannya	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2022 (PRPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja Pada Semester				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD S/D Tahun 2018 (%)		Peringkat Daerah Penanggung Jawab	Ket		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	Semester I		Semester II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
											9	10	11-9-10	12-11/8												
1						6	864,951,584	7	4	147,600,000	2	42,300,000	2	99,627,000	4	141,927,000	100.0%	96.2%	4	141,927,000	20.0%	16.4%	Badan Pengeloaan Keuangan Daerah	16		
		04 01 17 39	Pelayanan Validasi dan Verifikasi SSPD BPHTE	Periode Pelayanan Validasi dan Verifikasi SSPD BPHTE	Triwulan				4	147,600,000	2	42,300,000	2	99,627,000	4	141,927,000	100.0%	96.2%	4	141,927,000	20.0%	16.4%	Badan Pengeloaan Keuangan Daerah			
		04 01 17 40	Penerbitan dan Pendaftaran Dokumen Ketenangan Pajak	Jumlah Blangko SPPT PHLSSPD PHB dan DHPK	Jenis	15	1,491,975,720	-	3	482,500,000	1	52,550,000	2	380,049,698	3	432,599,698	100.0%	89.7%	3	432,599,698	20.0%	29.0%	Badan Pengeloaan Keuangan Daerah			
Rata-rata capaian kinerja (%)																	75.8%	85.0%			19.0%	24.3%	Badan Pengeloaan Keuangan Daerah			
Predikat Kinerja																	T	T			SR	SR	Badan Pengeloaan Keuangan Daerah			
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan		04 01 18	PROGRAM PEMBIHAAN AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH	Opini BPK Laporan Keuangan Daerah	WTP	1	885,239,500	-	100	145,000,000	50	38,376,500	50	106,574,000	100	144,950,500	100.0%	100.0%	100	144,950,500	10000.0%	16.4%	Badan Pengeloaan Keuangan Daerah			
		04 01 18 02	Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran	Jumlah Buku Laporan Realisasi Anggaran	Jenis	10	446,192,320	-	2	75,000,000	1	19,870,500	1	55,106,500	2	74,977,000	100.0%	100.0%	2	74,977,000	20.0%	16.8%	Badan Pengeloaan Keuangan Daerah			
		04 01 18 05	Rekonsiliasi Laporan Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD	Dokumen	5	439,047,180	-	1	70,000,000	1	18,506,000	-	51,467,500	1	69,973,500	100.0%	100.0%	1	69,973,500	20.0%	15.9%	Badan Pengeloaan Keuangan Daerah			
Rata-rata capaian kinerja (%)																	100.0%	100.0%			20.0%	16.4%	Badan Pengeloaan Keuangan Daerah			
Predikat Kinerja																	ST	ST			SR	SR	Badan Pengeloaan Keuangan Daerah			
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan		04 01 18	PROGRAM PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH	Cakupan laporan pengelolaan aset daerah	Persen	100	5,946,470,090	-	100	1,306,430,200	50	341,008,974	50	760,014,670	100	1,101,023,644	100.0%	84.3%	100	1,101,023,644	100.0%	18.5%	Badan Pengeloaan Keuangan Daerah			
		04 01 18 04	Penyusunan Buku Inventaris Aset Daerah	Jumlah Buku Inventarisasi Aset Daerah	Buku	15	159,424,932	-	3	31,400,000	-	3	26,025,000	3	26,025,000	100.0%	82.9%	3	26,025,000	20.0%	16.3%	Badan Pengeloaan Keuangan Daerah				
		04 01 18 08	Inventaris, Sertifikasi Barang / Aset Daerah	Periode Inventarisasi, Sertifikasi Barang/Aset Daerah	Bulan	60	231,552,500	-	12	82,850,000	-	12	10,630,000	12	10,630,000	100.0%	12.8%	12	10,630,000	20.0%	4.6%	Badan Pengeloaan Keuangan Daerah				
		04 01 18 09	Verifikasi Penyusunan Laporan Realisasi PPKD	Periode Verifikasi Penyusunan Laporan Realisasi PPKD	Triwulan	16	413,725,000	-	4	30,000,000	2	14,750,000	2	15,250,000	4	30,000,000	100.0%	100.0%	4	30,000,000	25.0%	7.3%	Badan Pengeloaan Keuangan Daerah			
		04 01 18 11	Pemeliharaan Aset Daerah Bergerak dan Tidak Bergerak	Periode Pemeliharaan Aset Daerah Bergerak dan Tidak Bergerak	Bulan	60	2,543,003,054	-	12	470,750,000	6	208,708,974	6	259,059,205	12	467,768,179	100.0%	99.4%	12	467,768,179	20.0%	18.4%	Badan Pengeloaan Keuangan Daerah			
		04 01 18 12	Penghapusan Aset Daerah Bergerak dan Tidak Bergerak	Periode penghapusan aset daerah bergerak dan tidak bergerak	Bulan	60	184,595,410	-	12	45,000,000	-	12	7,991,000	12	7,991,000	100.0%	17.8%	12	7,991,000	20.0%	4.3%	Badan Pengeloaan Keuangan Daerah				
		04 01 18 26	Rekonsiliasi Laporan Berang Milik Daerah dengan SKPD di Jajaran PEMKO Lhokseumawe	Jumlah SKPD yang melakukan rekonsiliasi Laporan: BMD	SKPD	175	254,065,200	-	35	124,940,200	-	35	85,390,200	35	85,390,200	100.0%	68.3%	35	85,390,200	20.0%	33.6%	Badan Pengeloaan Keuangan Daerah				
		04 01 18 28	Rekonsiliasi Aset Lancar dengan SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe	Jumlah SKPD yang melakukan Rekonsiliasi Aset Lancar	SKPD	175	282,384,000	-	35	67,870,000	15	9,460,000	20	53,860,000	35	63,320,000	100.0%	93.3%	35	63,320,000	20.0%	22.4%	Badan Pengeloaan Keuangan Daerah			
		04 01 18 30	Pengelolaan Aplikasi Persediaan	Periode Pengelolaan Aplikasi Persediaan	Triwulan	16	808,542,000	-	4	170,000,000	2	42,060,000	2	127,900,000	4	169,960,000	100.0%	100.0%	4	169,960,000	25.0%	21.0%	Badan Pengeloaan Keuangan Daerah			
		04 01 18 31	Pengelolaan Aplikasi SIMDA BMD	Periode Pengelolaan Aplikasi SIMDA BMD	Triwulan	16	817,875,000	-	4	239,000,000	2	66,030,000	2	132,949,265	4	198,979,265	100.0%	83.3%	4	198,979,265	25.0%	24.3%	Badan Pengeloaan Keuangan Daerah			
		04 01 18 33	Pencapaian Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Buku RKBM	Buah	250	251,302,994	-	50	44,620,000	-	50	40,960,000	50	40,960,000	100.0%	91.8%	50	40,960,000	20.0%	16.3%	Badan Pengeloaan Keuangan Daerah				
Rata-rata capaian kinerja (%)																	100.0%	75.0%			21.5%	16.9%	Badan Pengeloaan Keuangan Daerah			
Predikat Kinerja																	ST	S			SR	SR	Badan Pengeloaan Keuangan Daerah			
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan		04 01 20	PROGRAM PEMBIHAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN KAB/KOTA	Cakupan pengelolaan sistem informasi keuangan daerah	Bulan	12	592,194,700	-	12	97,000,000	6	68,610,000	6	37,025,000	12	105,635,000	100.0%	108.9%	12	105,635,000	100.0%	17.8%	Badan Pengeloaan Keuangan Daerah			
		04 01 18 08	Pemeliharaan Jaringan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Periode Pemeliharaan Jaringan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Bulan	60	592,194,700	-	12	97,000,000	6	68,610,000	6	37,025,000	12	105,635,000	100.0%	108.9%	12	105,635,000	20.0%	17.8%	Badan Pengeloaan Keuangan Daerah			
Rata-rata capaian kinerja (%)																	100.0%	108.9%			20.0%	17.8%	Badan Pengeloaan Keuangan Daerah			
Predikat Kinerja																	ST	ST			SR	SR	Badan Pengeloaan Keuangan Daerah			
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PER BIDANG URUSAN)																	97.3%	92.8%			29.7%	26.5%	Badan Pengeloaan Keuangan Daerah			
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PER BIDANG URUSAN)																	ST	ST			SR	SR	Badan Pengeloaan Keuangan Daerah			
IV.5		05		Urusan/Bidang : Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan			7,729,167,805	-		2,177,396,415		409,370,029		1,365,917,747		1,775,287,776							Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			
IV.5.1		05 01		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			7,729,167,805	-		2,177,396,415		409,370,029		1,365,917,747		1,775,287,776							Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) dan satuannya	Target RPJMD pada Tahun s/d 2022 (PRPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja Pada Semester				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD S/D Tahun 2018 (%)		Pemangkat Daerah/ Penanggung Jawab	Ket		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Semester I		Semester II		K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
													11-9-10	12-11/8	13-7/11	14-13/6/100%										
1			06 01 21 01	Pembangunan sarana dan prasarana Dayah	Jumlah Pembangunan sarana dan prasarana Dayah	unit	300	8,027,773,088	-	60	3,622,044,750	0	60	3,407,963,393	60	3,407,963,393	100.0%	94.1%	60	3,407,963,393	20%	42.5%	Islam dan Pendidikan Dayah	16		
														Rata-rata capaian kinerja (%)		100.0%	94.1%			20.0%	42.5%	Islam dan Pendidikan Dayah				
														Predikat Kinerja		ST	ST			SR	SR	Islam dan Pendidikan Dayah				
Meningkatnya Status Tipe Dayah	06	01	31	PROGRAM PENDIDIKAN, PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN DAYAH	Terlaksananya Pameran Pembangunan Kota Lhokmeuseu	Persen	100	70,000,000	-	100	70,000,000	-	100	69,223,900	100	69,223,900	100.0%	98.9%	100	69,223,900	100%	98.9%	Islam dan Pendidikan Dayah			
	06	01	31	10	Pengadaan Buku Agama, Kitab dan Al quran	jumlah penyediaan buku agama dan kitab	paket	3	70,000,000	-	2	70,000,000	0	2	69,223,900	2	69,223,900	100.0%	98.9%	2	69,223,900	67%	98.9%	Islam dan Pendidikan Dayah		
														Rata-rata capaian kinerja (%)		100.0%	98.9%			66.7%	98.9%	Islam dan Pendidikan Dayah				
														Predikat Kinerja		ST	ST			S	ST	Islam dan Pendidikan Dayah				
														TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM		98.4%	94.5%			36.3%	40.6%	Islam dan Pendidikan Dayah				
														PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM		ST	ST			SR	SR					
IV.6.2		06	02		Sekretariat MPU			9,478,360,364	-		1,777,195,200			516,423,340		1,243,328,829		1,759,751,869						Sekretariat MPU		
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	06	02	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100	8,428,453,601	-	100	1,459,070,200	50	50	469,365,940	50	981,879,729	100	1,450,945,669	0.0%	99.4%	100	1,450,945,669	100%	17.2%	Sekretariat MPU	
	06	02	01	01	Penyediaan jasa Surat menyurat	periode penyediaan jasa surat menyurat	Bln	60	13,000,000		12	1,000,000	6	150,000	6	849,000	12	999,000	100.0%	99.9%	12	999,000	20%	7.7%	Sekretariat MPU	
	06	02	01	02	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	periode penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bln	60	93,064,932		12	14,086,000	6	2,499,500	6	5,575,129	12	8,074,629	100.0%	57.3%	12	8,074,629	20%	8.7%	Sekretariat MPU	
	06	02	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola keuangan SKPD	OB	636	272,229,750		108	46,765,950	-	108	46,765,950	108	46,765,950	100.0%	100.0%	108	46,765,950	17%	17.2%	Sekretariat MPU		
	06	02	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Periode tersedianya alat tulis kantor	Bln	60	60,037,366		12	8,800,000	6	2,198,250	6	6,601,750	12	8,800,000	100.0%	100.0%	12	8,800,000	20%	14.7%	Sekretariat MPU	
	06	02	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	periode penyediaan bahan cetak dan foto copy	Bln	60	50,409,044		12	8,762,000	6	1,343,440	6	7,322,000	12	8,665,440	100.0%	98.9%	12	8,665,440	20%	17.2%	Sekretariat MPU	
	06	02	01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Periode Tersedianya alat Penerangan dan alat kebersihan	Bln	60	9,500,000		12	1,900,000	6	875,750	6	1,024,250	12	1,900,000	100.0%	100.0%	12	1,900,000	20%	20.0%	Sekretariat MPU	
	06	02	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Exp	1825	6,900,000		365	1,140,000	182	285,000	183	855,000	365	1,140,000	100.0%	100.0%	365	1,140,000	20%	16.5%	Sekretariat MPU	
	06	02	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Periode penyediaan makanan dan minuman	Bln	55	33,750,000		11	11,750,000	6	1,680,000	5	10,070,000	11	11,750,000	100.0%	100.0%	11	11,750,000	20%	34.8%	Sekretariat MPU	
	06	02	01	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Periode Tersedianya Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah	Bln	60	883,099,659		12	66,200,000	6	18,374,000	6	47,610,400	12	65,984,400	100.0%	99.7%	12	65,984,400	20%	7.5%	Sekretariat MPU	
	06	02	01	20	Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap	Jumlah Tenaga Kerja Tidak Tetap	OB	780	808,175,725		70	66,208,825	35	27,400,000	35	37,008,825	70	64,408,825	100.0%	97.3%	70	64,408,825	9%	8.0%	Sekretariat MPU	
	06	02	01	23	Penyediaan Jasa lembaga MPU dan DKU	Jumlah pimpinan dan anggota MPU dan DKU	OB	1800	6,198,287,125		360	1,232,457,425	180	414,560,000	180	817,897,425	360	1,232,457,425	100.0%	100.0%	360	1,232,457,425	20%	19.9%	Sekretariat MPU	
														Rata-rata capaian kinerja (%)		100.0%	95.7%			18.7%	15.6%	Sekretariat MPU				
														Predikat Kinerja		ST	ST			SR	SR	Sekretariat MPU				
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	06	02	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	Persen	100	430,409,850	-	100	84,500,000	50	50	27,262,400	50	48,418,800	100	75,681,200	100.0%	89.6%	100	75,681,200	100%	17.6%	Sekretariat MPU	
	06	02	02	11	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pengadaan perangkat finger print	Unit	9	102,909,550		1	5,000,000	-	1	5,000,000	1	5,000,000	100.0%	100.0%	1	5,000,000	11%	4.9%	Sekretariat MPU		
	06	02	02	23	Pemeliharaan Rutin/berkala Mobil Jabatan	Periode pemeliharaan mobil jabatan (1 unit x 12 bulan)	UB	60	78,500,000		12	20,500,000	6	5,990,600	6	11,183,300	12	17,173,900	100.0%	83.8%	12	17,173,900	20%	21.9%	Sekretariat MPU	
	06	02	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional	Periode pemeliharaan mobil operasional kantor (3 unit x 12 bulan)	UB	180	234,000,000		36	56,000,000	18	18,271,800	18	32,235,500	36	50,507,300	100.0%	90.2%	36	50,507,300	20%	21.6%	Sekretariat MPU	
	06	02	02	30	Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan & Perlengkapan Kantor (Mobiler, Komputer dll)	Periode pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	60	15,000,000		12	3,000,000	12	3,000,000	12	3,000,000	100.0%	100.0%	12	3,000,000	20%	20.0%	Sekretariat MPU			
														Rata-rata capaian kinerja (%)		100.0%	93.5%			17.8%	17.1%	Sekretariat MPU				
														Predikat Kinerja		ST	ST			SR	SR	Sekretariat MPU				
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	06	02	07	PROGRAM PENYUSUNAN PERENCANAAN SATUAN KERJA PERANGKAT KERJA	Cakupan Penyediaan Dokumen perencanaan SKPK	Persen	100	5,141,000	-	100	500,000	-	50	500,000	50	500,000	50.0%	100.0%	50	500,000	50%	9.7%	Sekretariat MPU			
	06	02	07	02	Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Buku Renja	Buku	50	5,141,000	-	10	500,000	-	10	500,000	10	500,000	100.0%	100.0%	10	500,000	20%	9.7%	Sekretariat MPU		
														Rata-rata capaian kinerja (%)		100.0%	100.0%			20.0%	9.7%	Sekretariat MPU				
														Predikat Kinerja		ST	ST			SR	SR	Sekretariat MPU				
Mengatnya Pengakuan Syarat dalam Bermasyarakat	06	02	31	PROGRAM PERINGKATAN SUMBER DAYA ULAHA DAN KUALITAS PENDIDIKAN AGAMA	Persentase penurunan pelanggaran syarat	Persen	100	152,627,500	-	100	25,000,000	-	50	25,000,000	50	25,000,000	50.0%	100.0%	50	25,000,000	50%	16.4%	Sekretariat MPU			

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output)/ Kegiatan (output) dan satuannya	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2022 (PRPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja Pada Semester				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		Pemangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	Semester I		Semester II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
											K	Rp	K	Rp												
1		06 04 07 02	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Satuan kerja perangkat Daerah	Jumlah Buku Renja	buku	44	2,300,000	-	-	4	400,000	-	-	399,000	-	399,000	0.0%	99.8%	-	399,000	0.0%	17.3%	Sekretariat Majelis Adat Aceh	16		
												Rata-rata capaian kinerja (%)		0.0%	99.8%		0.0%	17.3%	Sekretariat Majelis Adat Aceh							
												Predikat Kinerja		SR	ST		SR	SR	Sekretariat Majelis Adat Aceh							
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	06 04		PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA			-	-	-	-	-	50	48,790,000	50	48,790,000	0.0%	0.0%	50	48,790,000	0%	0.0%	Sekretariat Majelis Adat Aceh					
	06 04		Pergelaran Keaneekaragaman Adat dan Budaya Aceh			-	-	-	-	-	1	48,790,000	1	48,790,000	0.0%	0.0%	1	48,790,000	0%	0.0%	Sekretariat Majelis Adat Aceh					
												Rata-rata capaian kinerja (%)		0.0%	0.0%		0.0%	0.0%	Sekretariat Majelis Adat Aceh							
												Predikat Kinerja		SR	SR		SR	SR	Sekretariat Majelis Adat Aceh							
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	06 04		PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA			-	-	-	-	-	48,790,000	48,790,000	0.0%	0.0%	48,790,000	0.0%	0.0%	48,790,000	0%	0.0%	Sekretariat Majelis Adat Aceh					
	06 04		Musyawaharah Daerah (MUSDA)			-	-	-	-	-	48,790,000	48,790,000	0.0%	0.0%	48,790,000	0%	0.0%	48,790,000	0%	0.0%	Sekretariat Majelis Adat Aceh					
												Rata-rata capaian kinerja (%)		0.0%	0.0%		0.0%	0.0%	Sekretariat Majelis Adat Aceh							
												Predikat Kinerja		SR	SR		SR	SR	Sekretariat Majelis Adat Aceh							
Mengutusnya Pengesahan Syariat dalam Bermasyarakat	06 04 19		PROGRAM PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA KEBUDAYAAN			100	307,882,500	-	-	100	75,000,000	-	-	-	-	0.0%	0.0%	-	-	0%	0.0%	Sekretariat Majelis Adat Aceh				
	06 04 19 01		Penyiapan alat-alat Kesenian Tradisional	Alat-alat Kesenian Tradisional	Unit	70	307,882,500	-	-	30	75,000,000	-	-	-	-	0.0%	0.0%	-	-	0%	0.0%	Sekretariat Majelis Adat Aceh				
												Rata-rata capaian kinerja (%)		0.0%	0.0%		0.0%	0.0%	Sekretariat Majelis Adat Aceh							
												Predikat Kinerja		SR	SR		SR	SR	Sekretariat Majelis Adat Aceh							
												TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM				41.7%	68.8%		6.4%	11.2%	Sekretariat Majelis Adat Aceh					
												PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM				SR	S		SR	SR	Sekretariat Majelis Adat Aceh					
IV.6.5		06 05	Sekretariat MPD				2,987,797,688				582,372,245		265,012,300		366,873,900		631,886,200					Sekretariat MPD				
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	06 05 01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran		100	2,438,714,216	-	-	100	392,752,245	50	191,823,700	50	232,879,000	100	424,702,700	100.0%	108.1%	100	424,702,700	100.0%	17.4%	Sekretariat MPD		
	06 05 01 01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Periode penyediaan benda pos dan paket pengiriman	Bulan	60	10,774,000			12	999,000	12	999,000	-	12	999,000	100.0%	100.0%	12	999,000	20.0%	9.3%	Sekretariat MPD			
	06 05 01 02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Periode Tersedianya penerangan dan alat-alat komunikasi	Bulan	60	30,470,000			12	4,770,000	6	2,325,000	6	2,325,000	12	4,650,000	100.0%	97.5%	12	4,650,000	20.0%	15.3%	Sekretariat MPD		
	06 05 01 07		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola keuangan SKPD	OB	600	295,122,820			120	49,122,820	60	19,602,000	60	29,520,000	120	49,122,000	100.0%	100.0%	120	49,122,000	20.0%	16.6%	Sekretariat MPD		
	06 05 01 10		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Periode tersedianya Alat Tulis Kantor	Bulan	60	72,553,771			12	8,898,000	6	6,962,000	6	5,936,000	12	12,898,000	100.0%	145.0%	12	12,898,000	20.0%	17.8%	Sekretariat MPD		
	06 05 01 11		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Periode Tersedianya bahan cetak dan fotocopy	Bulan	60	32,500,500			12	4,500,500	6	2,994,000	6	6,006,500	12	9,000,500	100.0%	200.0%	12	9,000,500	20.0%	27.7%	Sekretariat MPD		
	06 05 01 13		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Periode Tersedianya Alat Penceraman dan Alat Kebersihan	Bulan	60	23,295,700			12	1,795,700	6	1,795,700	6	-	12	1,795,700	100.0%	100.0%	12	1,795,700	20.0%	7.7%	Sekretariat MPD		
	06 05 01 15		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Periode penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan	Bulan	60	6,312,000			12	1,140,000	6	570,000	6	570,000	12	1,140,000	100.0%	100.0%	12	1,140,000	20.0%	18.1%	Sekretariat MPD		
	06 05 01 17		Penyediaan Makanan dan Minuman	Periode Tersedianya konsumsi pendukung untuk kelancaran kegiatan	Bulan	55	49,100,000			11	6,000,000	5	4,260,000	5	2,740,000	10	7,000,000	90.9%	116.7%	10	7,000,000	18.2%	14.3%	Sekretariat MPD		
	06 05 01 18		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Periode Tersedianya Biaya Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	Bulan	60	270,000,000			12	30,000,000	6	20,000,000	6	24,971,500	12	44,971,500	100.0%	149.9%	12	44,971,500	20.0%	16.7%	Sekretariat MPD		
	06 05 01 20		Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap	Jumlah Jasa Tenaga Kerja Tidak Tetap	OB	600	202,557,225			120	24,557,225	60	19,707,000	60	12,450,000	120	32,157,000	100.0%	130.9%	120	32,157,000	20.0%	15.9%	Sekretariat MPD		
	06 05 01 23		Penyediaan Jasa Lembaga Keistimewaan Aceh	Jumlah jasa lembaga keistimewaan Aceh	OB	1080	1,446,028,200			216	260,969,000	108	112,609,000	108	148,360,000	216	260,969,000	100.0%	100.0%	216	260,969,000	20.0%	18.0%	Sekretariat MPD		
												Rata-rata capaian kinerja (%)		99.2%	121.8%		19.8%	16.1%	Sekretariat MPD							
												Predikat Kinerja		ST	ST		SR	SR	Sekretariat MPD							
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	06 05 02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA AFKATIS			100	419,542,472			100	68,720,000	50	32,388,600	50	53,903,400	100	86,292,000	100.0%	125.6%	100	86,292,000	100.0%	20.6%	Sekretariat MPD		
	06 05 02 11		Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Mobil, Komputer dll)	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor	Unit	14	87,142,472			1	5,000,000	0	-	1	5,000,000	1	5,000,000	100.0%	100.0%	1	5,000,000	7.1%	5.7%	Sekretariat MPD		
	06 05 02 23		Pemeliharaan Ritu/Berkala Mobil Jabatan	Periode Pemeliharaan Mobil Jabatan	UB	60	117,200,000			12	23,440,000	6	11,171,800	6	21,156,600	12	32,328,400	100.0%	137.9%	12	32,328,400	20.0%	27.6%	Sekretariat MPD		
	06 05 02 24		Pemeliharaan Ritu/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Periode pemeliharaan kendaraan operasional	UB	120	186,400,000			12	37,280,000	6	19,266,800	6	24,696,800	12	43,963,600	100.0%	117.9%	12	43,963,600	10.0%	23.6%	Sekretariat MPD		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) dan satuannya	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2022 (PRPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja Pada Semester				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD S/D Tahun 2018 (%)		Pangkat/Daca/ Penanggung Jawab	Ket		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	Semester I		Semester II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
											9	10	11-9-10	12-11/8												
1		06 05 02 30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Mobiler, Komputer dll)	Periode Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Unit	75	28,800,000			9	3,000,000	3	1,950,000	3	3,050,000	6	5,000,000	66.7%	166.7%	6	5,000,000	8.0%	17.4%	Sekretariat MPD	16	
Rata-rata capaian kinerja (%)																91.7%	130.6%			11.3%	18.6%	Sekretariat MPD				
Predikat Kinerja																ST	ST			SR	SR	Sekretariat MPD				
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	06 05 07	PROGRAM PENYUSUNAN PERENCANAAN SATUAN KERJA PERANGKAT KERJA				100	5,741,000	-	100	1,100,000	0	-	50	1,100,000	50	1,100,000	50.0%	100.0%	50	1,100,000	50.0%	19.2%	Sekretariat MPD			
	06 05 07 02	Penyusunan Renja SKPD	Jumlah Buku Renja	Buku	50	5,741,000			10	1,100,000	0	-	10	1,100,000	10	1,100,000	100.0%	100.0%	10	1,100,000	20.0%	19.2%	Sekretariat MPD			
Rata-rata capaian kinerja (%)																100.0%	100.0%			20.0%	19.2%	Sekretariat MPD				
Predikat Kinerja																ST	ST			SR	SR	Sekretariat MPD				
Meningkatnya Pendidikan Dasar Yang Berkualitas	06 05 22	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGAWASAN/ MONITORING DAN EVALUASI				100	123,800,000	-	100	119,800,000	50	40,800,000		78,991,500	50	119,791,500	50.0%	100.0%	50	119,791,500	50.0%	96.8%	Sekretariat MPD			
	06 05 22 01	Penerbitan Buletin Edukasi	Jumlah Buletin Edukasi	Exsop	20	73,800,000			2	69,800,000	1	40,800,000	1	28,999,800	2	69,799,800	100.0%	100.0%	2	69,799,800	10.0%	94.6%	Sekretariat MPD			
	06 05 22 04	Pendataan Anak Tidak Sekolah dan Putus Sekolah	Jumlah Anak Tidak Sekolah dan Putus Sekolah	Hart	20	30,000,000			5	30,000,000	0	-	3	29,991,800	3	29,991,800	60.0%	100.0%	3	29,991,800	15.0%	100.0%	Sekretariat MPD			
	06 05 22 11	Supervisi Pengawas Satuan Pendidik	Jumlah Supervisi Pengawas Satuan Pendidik	Hart	20	20,000,000			3	20,000,000	0	-	2	19,999,900	2	19,999,900	66.7%	100.0%	2	19,999,900	10.0%	100.0%	Sekretariat MPD			
Rata-rata capaian kinerja (%)																75.6%	100.0%			11.7%	98.2%	Sekretariat MPD				
Predikat Kinerja																T	ST			SR	ST	Sekretariat MPD				
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																91.6%	113.1%			15.7%	38.0%	Sekretariat MPD				
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																ST	ST			SR	SR	Sekretariat MPD				
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH URUSAN (PER BIDANG URUSAN)																86.3%	96.9%			33.6%	23.3%	Sekretariat MPD				
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH URUSAN (PER BIDANG URUSAN)																T	ST			SR	SR	Sekretariat MPD				
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH URUSAN (PER URUSAN)																88.2%	90.9%			951.8%	31.6%	Sekretariat MPD				
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH URUSAN (PER URUSAN)																T	ST			ST	SR	Sekretariat MPD				
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH URUSAN SKPK																71.8%	89.6%			487.3%	139.3%	Seluruh SKPK				
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH URUSAN SKPK																ST	ST			ST	ST	Seluruh SKPK				

2.2.3.2.3 Capaian Dan Predikat Capaian Kinerja

Rata-rata realisasi kinerja kegiatan RKPK sampai dengan semester 2 memiliki predikat kinerja masih sedang (S) sebesar 71,5% bila dilihat dari realisasi anggaran memiliki predikat kinerja tinggi (T) sebesar 89,6%, ini menunjukkan bahwa pencapaian kinerja cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian, namun realisasi keuangan sudah sangat baik, sehingga diperlukan upaya perbaikan ditahun selanjutnya pada seluruh SKPK agar tidak menimbulkan SILPA dalam jumlah yang besar. Berikut ini akan disajikan perkembangan kinerja masing-masing urusan pembangunan, sebagai berikut :

1. Urusan Pemerintahan Wajib Yang tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar, untuk urusan ini predikat berdasarkan kinerja 52,1% termasuk dalam kategori Rendah (R) sedangkan untuk rata-rata predikat keuangan 65,7% termasuk dalam kategori Sedang (S).
2. Urusan Pemerintahan Wajib Yang tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar, untuk urusan ini predikat berdasarkan rata-rata kinerja sebesar 79,2% termasuk pada kategori tinggi (T) sedangkan untuk rata-rata predikat keuangan sebesar 87,5% termasuk kategori tinggi (T).
3. Urusan Pemerintahan Pilihan, untuk urusan ini predikat berdasarkan rata-rata kinerja sebesar 66,7% termasuk kategori sedang (S) sedangkan untuk rata-rata predikat keuanan sebesar 114,2% termasuk kategori sangat tinggi (ST)
4. Urusan Pemerintahan Penunjang Urusan Pemerintah, untuk urusan ini predikat rata-rata kinerja sebesar 88,2% termasuk pada kategori tinggi, sedangkan untuk rata-rata predikat keuangan sebesar 90,9% termasuk kategori sangat tinggi (ST). Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2.159
Predikat Capaian Kinerja

KODE SKPD			Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	% Realisasi Kinerja s/d Semester 2			
				K (%)		Rp	
				Rata-rata Kinerja	Predikat Kinerja	Rata-rata Kinerja	Predikat Kinerja
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	52,1%	R	65,7%	S
1	01		<i>Pendidikan</i>	9,9%	SR	74,1%	S
1	01	01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				
1	02		<i>Kesehatan</i>	54,4%	R	48,6%	SR
1	02	01	Dinas Kesehatan				
1	03		<i>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</i>	70,4%	S	82,6%	T
1	03	01	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat				
1	04		<i>Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman</i>	11,1%	SR	12,1%	SR
1	04	01	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat				
1	05		<i>Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta</i>	99,9%	ST	100,4%	ST
1	05	01	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	100,0%	ST	100,8%	ST
1	05	02	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah	99,7%	ST	100,0%	ST
1	06		<i>Sosial</i>	66,8%	S	76,2%	T
1	06	01	Dinas Sosial				
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANGTIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	79,2%	T	87,5%	T
2	01		<i>Tenaga Kerja</i>	99,3%	ST	96,7%	ST
2	01	01	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu				
2	02		<i>Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</i>	100,0%	ST	111,9%	ST
2	02	01	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				
2	03		<i>Pangan</i>	45,0%	SR	88,2%	T
2	03	01	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan				
2	05		<i>Lingkungan Hidup</i>	97,4%	ST	94,7%	ST
2	05	01	Dinas Lingkungan Hidup				
2	06		<i>Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil</i>	98,3%	ST	93,0%	ST
2	06	01	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil				

KODE SKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	% Realisasi Kinerja s/d Semester 2			
		K (%)		Rp	
		Rata-rata Kinerja	Predikat Kinerja	Rata-rata Kinerja	Predikat Kinerja
2 07	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	100,0%	ST	97,4%	ST
2 07 01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong				
2 08	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	46,9%	SR	89,3%	T
2 08 01	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,				
2 09	Perhubungan	68,1%	S	73,3%	S
2 09 01	Dinas Perhubungan				
2 10	Komunikasi dan Informasi	94,9%	ST	98,1%	ST
2 10 01	Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian	89,8%	T	96,9%	ST
2 10 03	Sekretariat Daerah	100,0%	ST	99,2%	ST
2 11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	90,0%	T	68,6%	S
2 11 01	Dinas Perindustrian, perdagangan, Koperasi dan Usaha				
2 12	Penanaman Modal	100,0%	ST	98,7%	ST
2 12 01	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu				
2 13	Kepemudaan dan Olah Raga	54,5%	R	90,1%	T
2 13 01	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata				
2 14	Statistik	66,7%	S	66,7%	S
2 14 01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				
2 16	Kebudayaan	30,0%	SR	47,0%	SR
2 16 01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				
2 17	Perpustakaan	97,5%	ST	99,3%	ST
2 17 01	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan				
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	66,7%	S	114,2%	ST
3 01	Kelautan dan Perikanan	40,5%	SR	111,1%	ST
3 01 01	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan				
3 02	Pariwisata	100,0%	ST	342,5%	ST
3 02 01	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata				

KODE SKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	% Realisasi Kinerja s/d Semester 2			
		K (%)		Rp	
		Rata-rata Kinerja	Predikat Kinerja	Rata-rata Kinerja	Predikat Kinerja
3 03	Pertanian	59,5%	R	48,5%	SR
3 03 01	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan				
3 04	Kehutanan	0,0%	SR	0,0%	SR
3 04 01	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan				
3 06	Perdagangan	100,0%	ST	84,0%	T
3 06 01	Dinas Perindustrian, perdagangan, Koperasi dan Usaha				
3 07	Perindustrian	100,0%	ST	98,8%	ST
3 07 01	Dinas Perindustrian, perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah				
4	URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH	88,2%	T	90,9%	ST
4 01	Administrasi Pemerintahan	76,1%	T	82,7%	T
4 01 01	Dewan Perwakilan Rakyat Kota				
4 01 02	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				
4 01 03	Sekretariat Daerah	100,0%	ST	89,2%	T
4 01 04	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat	65,5%	S	75,7%	T
4 01 05	Kecamatan Banda Sakti	85,0%	T	100,5%	ST
4 01 06	Kecamatan Blang Mangat	58,0%	R	70,5%	S
4 01 07	Kecamatan Muara Satu	85,2%	T	85,0%	T
4 01 08	Kecamatan Muara Dua	80,0%	T	105,7%	ST
4 01 09	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	59,2%	R	52,2%	R
4 02	Pengawasan	90,4%	ST	106,7%	ST
4 02 01	Inspektorat				
4 03	Perencanaan	97,7%	ST	81,3%	T
4 03 01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				
4 04	Keuangan	97,3%	ST	92,8%	ST
4 04 01	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah				
4 05	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	81,5%	T	85,0%	T
4 05 01	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya				
4 06	Keistimewaan dan Kekhususan	86,3%	T	96,9%	ST
4 06 01	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah	98,4%	ST	94,5%	ST
4 06 02	Sekretariat MPU	100,0%	ST	98,4%	ST
4 06 03	Sekretariat Baitul Mal	100,0%	ST	109,8%	ST
4 06 04	Sekretariat Majelis Adat Aceh	41,7%	SR	68,8%	S
4 06 05	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah	91,6%	ST	113,1%	ST
	URUSAN SELURUH SKPK	71,5%	S	89,6%	T

Sumber: Hasil Evaluasi RKPK 2018

2.3. Permasalahan Pembangunan Kota Lhokseumawe

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang belum diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Berdasarkan capaian kinerja Kota Lhokseumawe selama 5 (lima) tahun terakhir, dapat diidentifikasi permasalahan pokok pembangunan Kota Lhokseumawe adalah : (1) masih tinggi persentase penduduk miskin; (2) masih terdapatnya lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh; (3) masih belum optimalnya jangkauan pelayanan air bersih rumah tangga; (4) masih tinggi tingkat pengangguran; (5) pertumbuhan ekonomi daerah yang mengalami perlambatan; dan (6) masih belum optimalnya ketersediaan sarana gedung kantor OPD.

Permasalahan daerah yang terkait dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah antara lain berhubungan dengan masalah penanggulangan atau pengurangan kemiskinan, mutu pendidikan, derajat kesehatan masyarakat, pembangunan infrastruktur yang belum merata dan belum terintegrasi dengan pengembangan kawasan strategis, reformasi birokrasi yang masih perlu ditingkatkan serta penguatan nilai-nilai Dinul Islam, sosial, adat dan budaya yang dirasakan belum optimal.

2.3.1. Dinul Islam, Keistimewaan dan Sosial Budaya

1. Masih terjadinya kasus pelanggaran Syariat Islam dalam hal khalwat;
2. Masih kurangnya eksplorasi cagar budaya;
3. Tingginya pertumbuhan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
4. Belum optimalnya pemberian bantuan terhadap operasional panti asuhan/jompo.

2.3.2. Ekonomi, Industri dan Pariwisata

1. Perkembangan industri cenderung menurun seiring dengan habisnya produktivitas Kilang Arun;
2. Menurunnya jumlah koperasi aktif;
3. Daya serap tenaga kerja belum menunjukkan perkembangan yang signifikan;
4. Menurunnya produksi perikanan budidaya;
5. Kecilnya kontribusi sektor pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi.

2.3.3. Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

1. Terbatasnya sarana dan prasarana olahraga;
2. Belum tersedianya Gedung Perpustakaan Umum Daerah;
3. Minimnya Pendidikan dan Pelatihan bagi ASN.

2.3.4. Pelayanan Kesehatan

1. Belum tersedianya Rumah Sakit Umum Daerah;
2. Masih tingginya kasus *pneumonia* pada bayi;
3. Pengetahuan masyarakat tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) masih rendah;
4. Belum optimalnya pemberian imunisasi campak pada balita;
5. Masih ditemukan beberapa kasus seperti penderita TBC BTA(+), DBD, dan Diare.

2.3.5. Penataan Birokrasi Pemerintah

1. Belum tersedianya Gedung Arsip Daerah;
2. Masih terdapat SKPK yang belum memiliki gedung kantor;
3. Minimnya pelaksanaan pendidikan dan pelatihan baik struktural maupun pelatihan formal bagi ASN;
4. Belum tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi.

2.3.6. Infrastruktur dan Lingkungan Hidup

1. Penanganan sanitasi masih belum optimal;
2. Penanganan timbulan sampah belum optimal;
3. Masih rendahnya akses air bersih kepada rumah tangga;
4. Jumlah rambu-rambu lalu lintas belum memadai;

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN KOTA

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Kota

Terdapat banyak variabel dalam mengukur aktivitas dan kinerja perekonomian suatu daerah. Beberapa variabel penting yang dapat digunakan Pemerintah Kota Lhokseumawe dalam mengukur aktivitas dan kinerja perekonomian daerah akan diuraikan sebagai berikut.

3.1.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

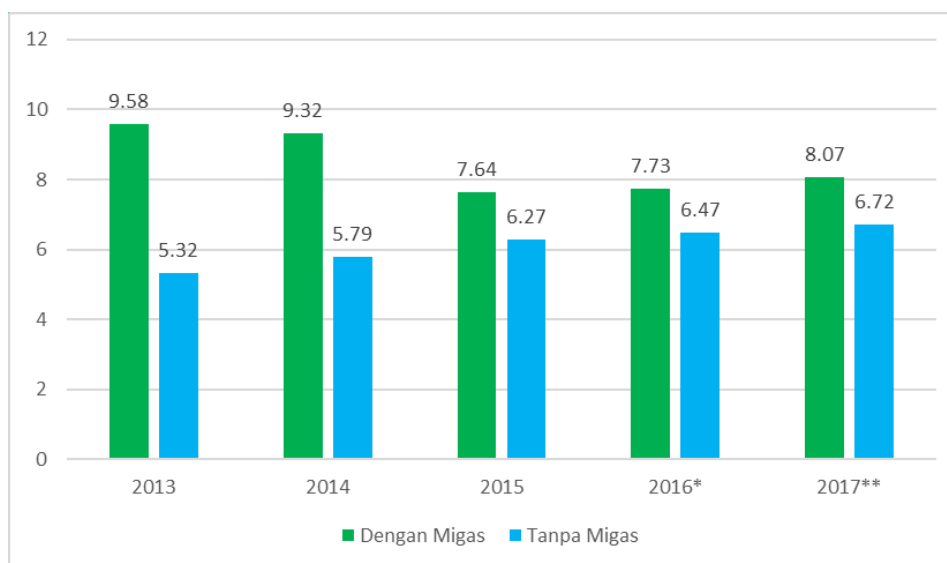
PDRB merupakan salah satu indikator ekonomi yang dapat menggambarkan aktivitas ekonomi secara menyeluruh pada suatu daerah. Dengan adanya pertambahan jumlah penduduk tiap tahun, aktivitas ekonomi juga semakin meningkat, sehingga mengakibatkan peningkatan pula pada nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) secara kontinu dari tahun ke tahun.

PDRB Kota Lhokseumawe atas dasar harga berlaku selama kurun waktu lima tahun terakhir mengalami penurunan. Dari tahun 2013, PDRB menurun sebesar 1,51 triliun rupiah menjadi 8,07 triliun rupiah pada tahun 2017.

Berbeda dengan PDRB memperhitungkan migas, PDRB ADHB tanpa memperhitungkan migas selalu mengalami peningkatan dengan rata-rata peningkatan 0,35 triliun rupiah pertahun. PDRB ADHB tahun 2017 mencapai 6,72 triliun rupiah. Nilai ini meningkat sebesar 0,25 triliun rupiah dari tahun 2016. Tahun sebelumnya, PDRB ADHB 2013-2016 mengalami peningkatan dari 5,32 menjadi 6,47 triliun rupiah.

Dalam perubahan nilai PDRB atas dasar harga berlaku masih terdapat pengaruh perubahan harga, sehingga untuk melihat perkembangan riil PDRB maka digunakan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) dengan tahun dasar 2010.

Gambar 3.1.
PDRB Lhokseumawe (ADHB) Tahun 2013-2017
(triliun rupiah)

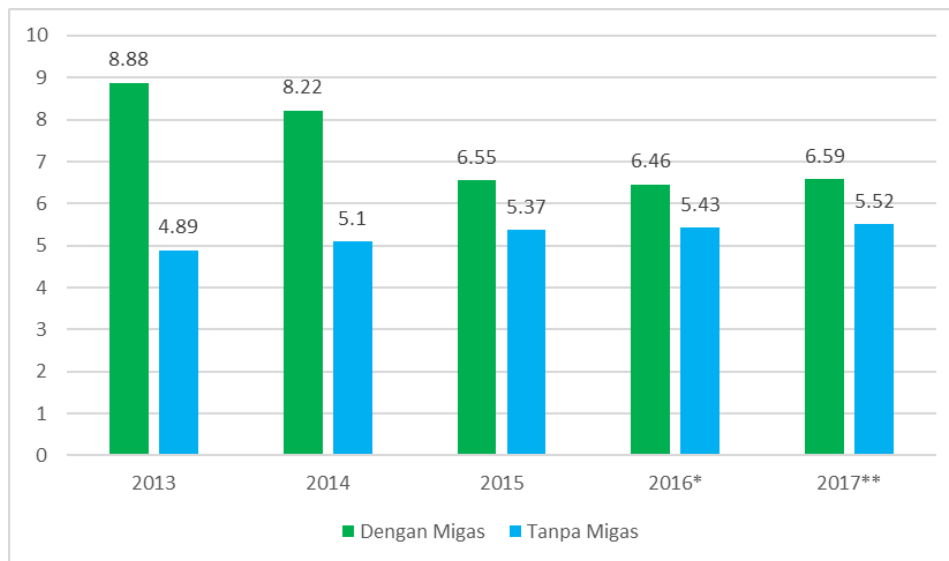


Sumber : PDRB Kota Lhokseumawe, BPS, 2018

Nilai PDRB ADHK Lhokseumawe pada tahun 2017 mencapai 6.59 triliun rupiah, menurun sebesar 2,28 triliun rupiah dari tahun 2013. PDRB ADHK tanpa migas pada tahun 2017 menunjukkan peningkatan sebesar 0,63 triliun rupiah dari sebesar 4,89 triliun rupiah pada tahun 2013 menjadi 5,52 triliun rupiah.

Selama lima tahun terakhir (2013-2017) terlihat bahwa perubahan PDRB ADHB cenderung lebih besar dari perubahan kenaikan PDRB ADHK. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan karena faktor harga lebih dominan daripada kenaikan karena faktor produktivitas.

Gambar 3.2.
PDRB Lhokseumawe (ADHK) Tahun 2013-2017
(triliun rupiah)



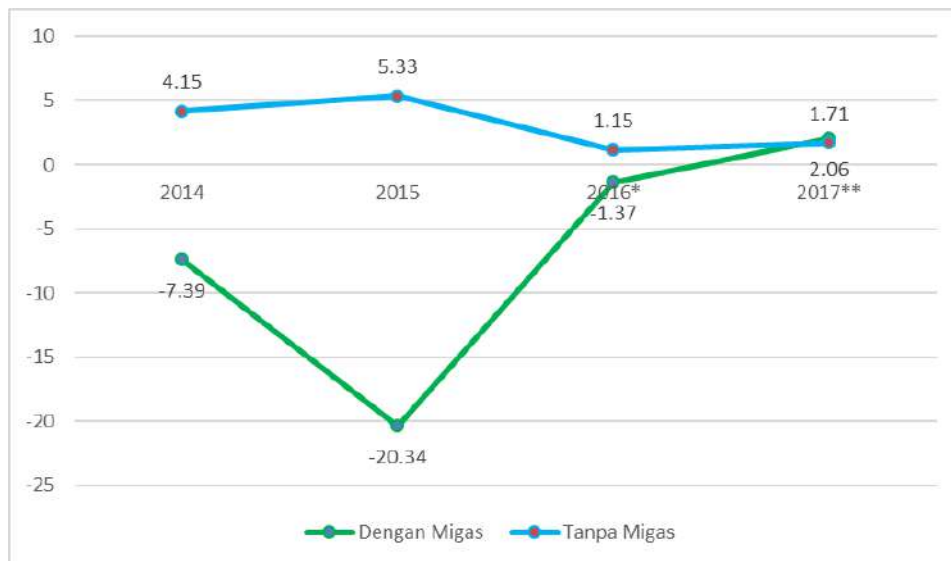
Sumber : PDRB Kota Lhokseumawe, BPS, 2018

3.1.2. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi juga merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

Selama kurun waktu lima tahun terakhir (2013-2017), pertumbuhan ekonomi dengan migas Lhokseumawe mengalami pertumbuhan negatif kecuali di tahun 2017. Hal ini karena kategori migas (yang dulunya merupakan sektor unggulan) banyak memberikan pengaruh pada pertumbuhan ekonomi terus menurun hingga tahun 2016. Pada tahun 2017 terjadi pertumbuhan ekonomi yang positif yaitu sebesar 2,06 persen (dengan migas) dan 1,71 persen (tanpa migas). Kondisi ini menunjukkan mulainya terjadi kecenderungan pergeseran sektor ekonomi unggulan migas ke non migas di Lhokseumawe.

Gambar 3.3.
Laju Pertumbuhan Ekonomi Lhokseumawe
Tahun 2014-2017 (Persen)

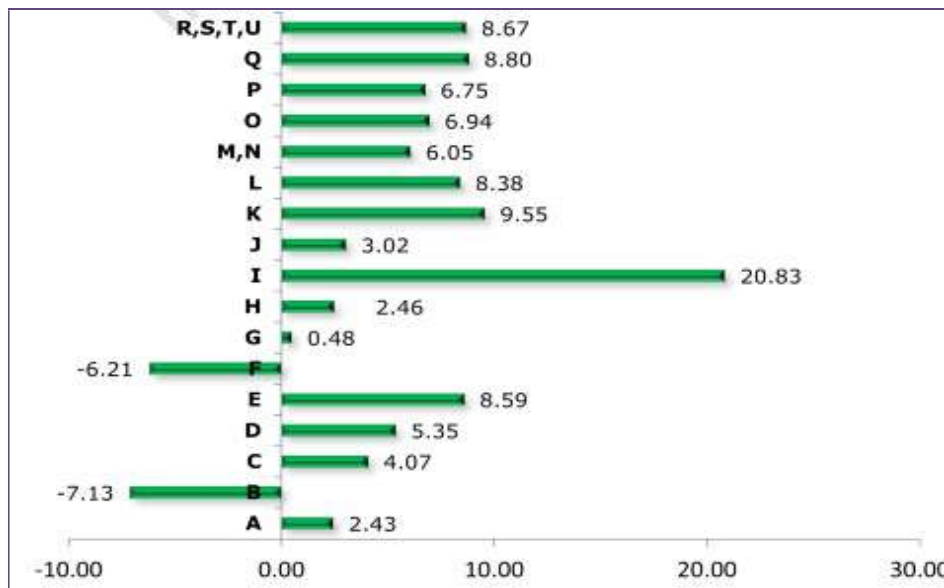


Sumber : PDRB Kota Lhokseumawe, BPS, 2018

Jika dilihat lebih rinci di Tahun 2016, terdapat dua kategori yang mengalami pertumbuhan negatif yaitu kategori Pertambangan dan Penggalian (7,13) serta kategori Konstruksi (6,21 persen). Selain kategori tersebut, kategori lain menunjukkan pertumbuhan yang positif. Enam kategori dengan pertumbuhan di atas 8 persen adalah kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 20,83 persen, Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 9,95 persen, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 8,80 persen, Jasa Lainnya sebesar 8,67 persen, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang sebesar 8,59 persen, serta real estate sebesar 8,38 persen.

Gambar 3.4.

**Laju Pertumbuhan Ekonomi Lhokseumawe
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014-2017 (Persen)**



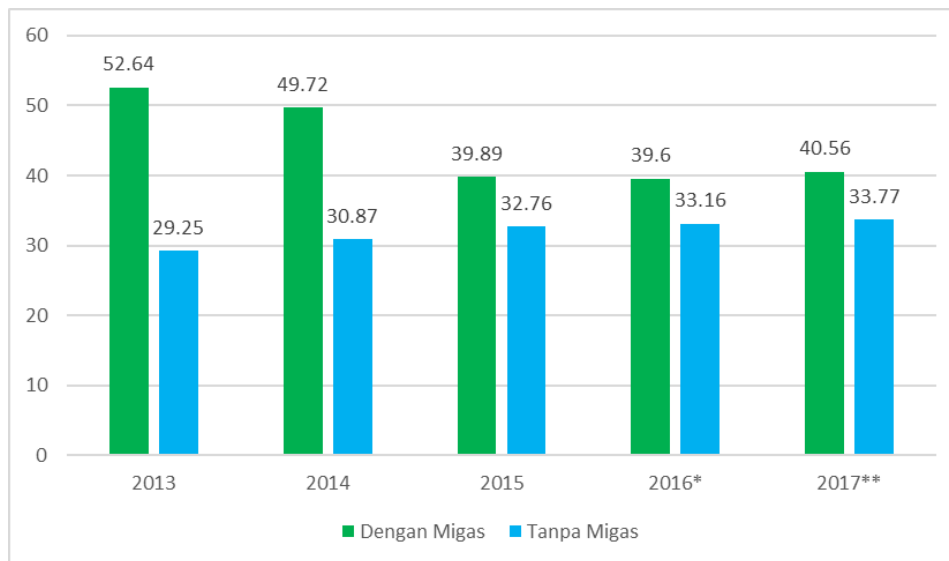
Sumber : PDRB Kota Lhokseumawe, BPS, 2018

3.1.3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kapita atau per satu orang penduduk.

Pada tahun 2017 PDRB per kapita Lhokseumawe adalah sebesar 40,56 juta rupiah setahun, meningkat sebesar 0,96 juta rupiah dari tahun 2016 yang sebesar 39,60 juta rupiah setahun. Dengan mengeluarkan migas, selama lima tahun terakhir terlihat bahwa PDRB per kapita Lhokseumawe terus mengalami peningkatan. PDRB per kapita Lhokseumawe tanpa migas pada tahun 2017 adalah sebesar 33,77 juta rupiah setahun atau naik dari tahun 2016 yang sebesar 33,16 juta rupiah setahun.

Gambar 3.5.
PDRB Per Kapita Lhokseumawe (ADHB) Tahun 2013-2017
(juta rupiah)



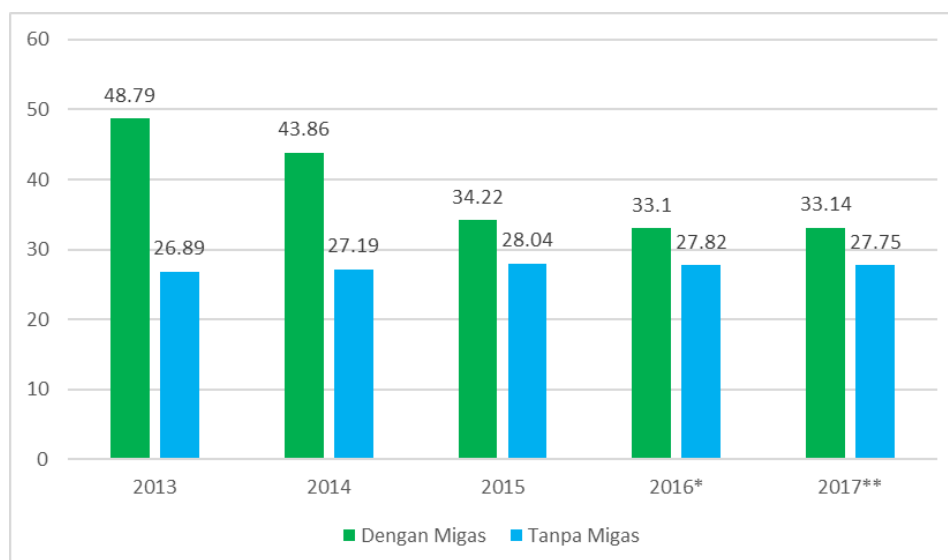
Sumber : PDRB Kota Lhokseumawe, BPS, 2018

Untuk nilai PDRB per kapita harga konstan dengan migas mengalami penurunan setiap tahunnya, kecuali tahun 2017. Sedangkan PDRB per kapita harga konstan tanpa migas nilainya tumbuh positif namun sangat kecil.

Tahun 2013 PDRB per kapita ADHK dengan migas sebesar 48,79 juta rupiah setahun dan terus menurun mencapai angka 33,10 juta rupiah di tahun 2016, lalu sedikit meningkat di tahun 2017 sebesar 33,14 juta rupiah setahun.

Kemudian jika PDRB per kapita ADHK ditinjau tanpa migas, nilai PDRB per kapita tahun 2013 sebesar 26,89 juta rupiah dan berturut-turut tahun 2014-2016 bernilai 27,19 juta rupiah setahun, 28,04 juta rupiah setahun, dan 27,82 juta rupiah setahun. Pada tahun 2017 PDRB per kapita ADHK mencapai sebesar 27,75 juta rupiah setahun.

Gambar 3.6.
PDRB Per Kapita Lhokseumawe (ADHK) Tahun 2013-2017
(juta rupiah)



Sumber : PDRB Kota Lhokseumawe, BPS, 2018

3.1.4. Laju Inflasi

Laju inflasi merupakan salah satu indikator penting yang dapat memberikan informasi tentang dinamika perkembangan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Secara umum angka inflasi yang menggambarkan kecenderungan umum tentang perkembangan harga dan perubahan nilai dapat dipakai sebagai informasi dasar untuk pengambilan keputusan.

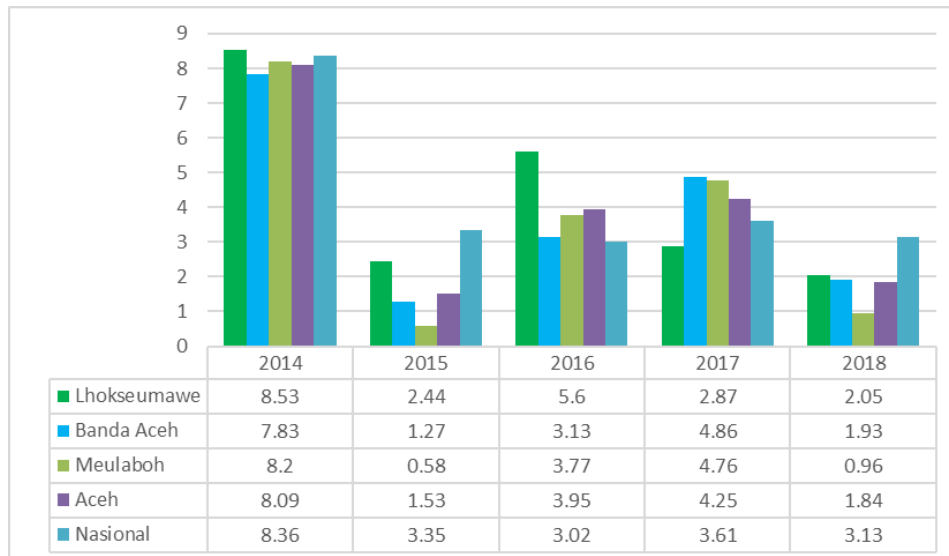
Peningkatan inflasi akan berdampak pada penurunan perkembangan ekonomi, dan secara umum akan menurunkan daya saing ekonomi. Dampak lain dari peningkatan inflasi ialah bertambahnya jumlah pengangguran, menurunnya pendapatan riil masyarakat, mengurangi nilai kekayaan yang berbentuk uang.

Dirilis dari Berita Resmi Statistik BPS Kota Lhokseumawe Nomor 01/01/1174/Th.XIII, 2 Januari 2019, bulan Desember 2018 Kota Lhokseumawe mengalami inflasi sebesar 1,05 persen.

Sebagai perbandingan laju inflasi tahun kalender serta Inflasi “*year on year*” (Desember 2018 terhadap Desember 2017) terhadap beberapa kota di Aceh, Provinsi dan Nasional, untuk Kota Lhokseumawe adalah 2,05 persen, Kota Banda Aceh 1,93 persen, Meulaboh 0,96 persen, Aceh sebesar 1,84 persen dan Nasional sebesar 3,13 persen.

Gambar 3.7.

Perbandingan Laju Inflasi Kota Lhokseumawe, Kota Banda Aceh, Meulaboh, Aceh, dan Nasional Tahun 2014-2018 (persen)



Sumber : BPS Lhokseumawe dan BPS Aceh, 2018 (diolah)

Beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk menjaga laju inflasi antara lain :

1. Mengoptimalkan pengalokasian anggaran dalam memperbaiki konektivitas perhubungan untuk mendukung kelancaran distribusi barang dan mendukung peningkatan ketersediaan pasokan;
2. Melakukan diseminasi dan komunikasi terkait inflasi untuk menjaga ekspektasi harga di masyarakat;
3. Meningkatkan kelancaran distribusi barang ke masyarakat melalui pasar atau mempercepat fungsionalitas pasar induk.

3.1.5. Perkiraan Perekonomian Lhokseumawe 2019 dan 2020

Pertumbuhan ekonomi Kota Lhokseumawe yang digambarkan oleh PDRB Atas Dasar Harga Konstan dari Tahun 2012 sampai Tahun 2017 rata-rata pertumbuhannya 0,11 persen per tahun. Pertumbuhan ekonomi Kota Lhokseumawe pada Tahun 2018 diprediksi mencapai kisaran 2,40-2,60 persen dan Tahun 2019 diperkirakan akan tumbuh sebesar 2,90 persen.

Tingkat kemiskinan Kota Lhokseumawe selama periode 2012-2017 bergerak secara dinamis. Rata-rata pertumbuhan tingkat kemiskinan pada periode tersebut adalah 0,008 persen. Mengacu

pada tingkat kemiskinan Tahun 2017, perkiraan tingkat kemiskinan di Kota Lhokseumawe pada Tahun 2019 sebesar 10,75 persen.

Rata-rata pertumbuhan laju inflasi Kota Lhokseumawe selama lima Tahun terakhir (2012-2017) adalah sebesar 0,95 persen, perkiraan laju inflasi Kota Lhokseumawe Tahun 2019 sebesar 3,50 persen.

Sesuai RPJM Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022, arah kebijakan pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2020 berfokus pada :

1. Pembangunan masyarakat yang berdaya saing untuk mewujudkan kemandirian ekonomi;
2. Pembinaan sentra industri kecil dan menengah untuk mengurangi tingkat pengangguran dan menurunkan angka kemiskinan dengan tetap mendukung pertumbuhan ekonomi hijau (*green economic growth*).
3. Peningkatan kualitas SDM melalui peningkatan kualitas pendidikan dan mutu kesehatan;
4. Penerapan *e-government* yang terintegrasi bagi perangkat daerah untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan;

Dalam rangka sinkronisasi Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020 antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah, maka perekonomian makro Kota Lhokseumawe akan diarahkan pada :

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah pada sektor ekonomi yang dominan;
2. Menciptakan iklim investasi yang kondusif;
3. Menyediakan sarana infrastruktur ekonomi yang berkualitas;
4. Meningkatkan partisipasi swasta melalui bentuk kemitraan;
5. Mendorong sektor-sektor ekonomi yang ada untuk meningkatkan produksi dengan berbagai kemudahan perizinan dan bimbingan/penyuluhan.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Kota

3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Kota Lhokseumawe

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, keuangan daerah memiliki peran yang sangat penting, hal ini tidak terlepas bahwa dalam rangka membiayai pelaksanaan pembangunan sangat tergantung dengan kemampuan keuangan daerah, sehingga kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang cermat dan akurat perlu dilakukan agar pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik. Keberhasilan suatu daerah dalam melaksanakan pembangunannya tidak bisa dilepaskan dari faktor pengelolaan keuangan daerah yang dikelola dengan manajemen yang baik.

Kebijakan keuangan Kota Lhokseumawe Tahun 2020 disusun dalam rangka mewujudkan arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam RPJM Kota Lhokseumawe, dan tidak terlepas dari kemampuan keuangan daerah sebagai salah satu faktor yang penting dalam pelaksanaan pembangunan Kota Lhokseumawe.

Berikut uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe berkaitan dengan pendapatan daerah Tahun 2020.

Tabel 3.1 (T-C.20)
Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kota Lhokseumawe Tahun 2020

Nomor Urut	Uraian	Jumlah				
		Realisasi Tahun 2017 (n-3) *)	Realisasi Tahun 2018 (n-2) *)	Jumlah Tahun 2019 (n-1) *)	Proyeksi / Target Tahun 2020 (n)	Proyeksi / Target Tahun 2021 (n+1) **)
(1)	(2)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)
1.	PENDAPATAN DAERAH	901,721,200,897	726,843,338,617	905,377,392,273	892,091,899,420	898,403,730,265
1.1	Pendapatan Asli Daerah	62,986,260,104	65,592,818,310	69,442,617,843	74,062,217,843	72,691,060,628
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	27,839,764,484	33,855,813,011	31,682,500,000	33,380,000,000	31,287,505,828
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	4,050,483,522	3,085,125,300	4,583,500,000	4,745,600,000	5,194,277,795
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5,093,717,479	5,100,912,333	5,200,000,000	5,200,000,000	13,921,341,980
1.1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	26,002,294,619	23,550,967,666	27,976,617,843	30,736,617,843	22,287,935,026
1.2	Dana Perimbangan	644,213,912,781	586,255,868,918	632,386,673,960	597,745,684,000	620,259,659,000
1.2.1	Transfer Umum	508,894,023,598	492,307,017,018	517,356,395,960	482,715,406,000	517,467,289,000
1.2.2	Transfer Khusus	135,319,889,183	93,948,851,900	115,030,278,000	115,030,278,000	102,792,370,000
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	194,521,028,012	74,994,651,389	203,548,100,470	220,283,997,577	205,453,010,637
1.3.1	Pendapatan Hibah	20,547,760,000	-	30,176,800,000	30,176,800,000	24,233,188,134
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Lainnya	23,121,731,293	20,880,788,924	25,177,808,119	25,177,808,119	24,711,272,780
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	150,851,536,719	54,113,862,465	148,193,492,351	164,929,389,458	156,508,549,723
	JUMLAH PENDAPATAN	901,721,200,897	726,843,338,617	905,377,392,273	892,091,899,420	898,403,730,265

Sumber :

*) BPKD Kota Lhokseumawe, diolah

***) Proyeksi

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi pendapatan Kota Lhokseumawe pada Tahun 2017 sebesar Rp.901.721.200.897,- atau mencapai 97,10 persen dari target sebesar Rp.928.679.687.144,-. Realisasi ini berasal dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.62.986.260.104,-; Dana Perimbangan Rp.644.213.912.781,-; dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp.194.521.028.012,-. Pada Tahun 2018 pendapatan Kota Lhokseumawe turun dari tahun sebelumnya, dimana pada Tahun 2018 pendapatan yang berasal dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) tidak lagi menjadi bagian dari pendapatan Kabupaten/Kota melainkan dikelola langsung oleh Pemerintah Aceh. Realisasi pendapatan Kota Lhokseumawe pada tahun 2018 sebesar Rp.726.843.338.617,- atau 89,96 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp.807.968.037.381,-. Realisasi tersebut berasal dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.65.592.818.310,-; Dana Perimbangan sebesar Rp.586.255.868.918,-; dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp.74.994.651.389,-.

Selanjutnya pendapatan Kota Lhokseumawe pada Tahun 2019 ditargetkan sebesar Rp.905.377.392.273,-, yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.69.442.617.843,-; Dana Perimbangan sebesar Rp.632.386.673.960,-; dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp.203.548.100.470,-. Pendapatan yang dianggarkan tersebut merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Berbeda dengan Tahun 2018, dalam struktur pendapatan Kota Lhokseumawe Tahun 2019 sudah dialokasikan pendapatan yang berasal dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) yang merupakan komponen dalam Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus.

Untuk Tahun 2020 pendapatan Kota Lhokseumawe ditargetkan sebesar Rp.892.091.899.420,-,- yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.74.062.217.843,-,-; Dana Perimbangan sebesar Rp.597.745.684.000,-; dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp.220.283.997.577,-.

Pada Tahun 2020 Target Pendapatan Kota Lhokseumawe lebih besar jika dibandingkan dengan proyeksi dalam RPJM Kota Lhokseumawe. Hal ini dikarenakan pada Tahun 2020 pendapatan

yang berasal dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) sebesar Rp.96.137.969.458,- sudah menjadi bagian Pendapatan Kota Lhokseumawe yang masuk dalam komponen Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus. Pengalokasian Pendapatan yang berasal dari DOKA ini sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus, dan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 050/336/2019 tentang Penetapan Pagu Indikatif Program dan Kegiatan yang Bersumber dari Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi Serta Dana Otonomi Khusus Aceh Tahun Anggaran 2020.

Pendapatan daerah yang telah ditargetkan harus dioptimalkan untuk menghasilkan kapasitas keuangan daerah yang makin tinggi guna mendukung pendanaan pembangunan daerah.

Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah sesuai ketentuan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, untuk meningkatkan penerimaan daerah, maka perlu adanya usaha meningkatkan penerimaan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah melalui pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan atau laba atas penyertaan modal pada BUMD serta lain-lain PAD yagn sah, serta penerimaan dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang merupakan penopang bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.

Arah kebijakan pendapatan daerah dalam rangka optimalisasi atas pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan dengan sebagai berikut:

1. Intensifikasi pajak dan retribusi daerah, ditujukan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah serta memperkuat basis pajak daerah dan retribusi daerah dengan cara sebagai berikut :
 - a. melakukan pendekatan kepada wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. penyempurnaan landasan hukum serta melakukan penegakan hukum atas pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah;

- c. melakukan koordinasi dengan instansi yang terkait dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah;
 - d. peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan pendapatan asli daerah;
 - e. Peningkatan koordinasi dan kerjasama antar unit satuan kerja terkait; dan
 - f. Peningkatan kualitas aparat pengelola pajak daerah dan retribusi daerah melakukan pendekatan
2. Ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah dalam rangka meningkatkan potensi penerimaan dari pajak daerah dan retribusi daerah dengan menambah jumlah wajib pajak daerah dan retribusi daerah serta memperkuat basis pajak daerah dan retribusi daerah. Secara umum proses ini dilaksanakan dengan cara-cara sebagai berikut :
- a. menyelenggarakan sosialisasi dan pemberian penyuluhan kepada masyarakat mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah;
 - b. melakukan pemutakhiran basis data pajak daerah serta optimalisasi pemanfaatan data perpajakan yang bersangkutan;
 - c. melakukan pendataan ke seluruh objek pajak dan subjek pajak yang dapat dikenakan pajak daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. pengkajian terhadap potensi penerimaan pajak daerah;
 - e. pemungutan terhadap jenis retribusi sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;
 - f. meningkatkan peran seluruh stakeholder yang terkait dengan penerimaan pajak daerah terutama PBB dan BPHTB.

Dana perimbangan diarahkan pada program-program pembangunan yang mendorong perkembangan ekonomi daerah dalam upaya meningkatkan PAD dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Beberapa strategi perlu ditempuh dalam hal dana perimbangan diantaranya :

- Mengalokasikan dana berdasarkan prioritas pembangunan;
- Meningkatkan kesadaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyusun rencana anggaran yang efisien dan efektif.

Selanjutnya, Lain-lain pendapatan daerah yang sah, terdiri dari:

1. Pendapatan hibah meliputi pendapatan hibah dari pemerintah dan pendapatan hibah dari badan / lembaga / organisasi swasta dalam negeri;
2. Bagi hasil pajak dari propinsi atau pemerintah daerah lainnya;
3. Bantuan keuangan dari propinsi atau pemerintah daerah lainnya; dan
4. Dana penyesuaian dan otonomi khusus.

Peningkatan pendapatan dari bagi hasil pajak provinsi dan pusat dapat diupayakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Pendapatan Bagi Hasil sangat terkait dengan aktivitas perekonomian. Dengan semakin meningkatnya aktivitas ekonomi akan berkorelasi dengan naiknya pendapatan yang berasal dari bagi hasil. Pemerintah Daerah harus mendorong meningkatnya aktivitas perekonomian daerah dan menjaga kestabilan politik dan keamanan daerah.

3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Kota Lhokseumawe

Arah kebijakan belanja Kota Lhokseumawe diarahkan pada pelaksanaan program/kegiatan yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran; dan peningkatan kualitas SDM melalui peningkatan kualitas pendidikan dan mutu kesehatan. Selanjutnya alokasi anggaran belanja harus tetap mengedepankan azas efisiensi dan efektivitas dengan mengacu pada penyusunan anggaran berbasar *money follow program*.

Kebijakan pengelolaan belanja Kota Lhokseumawe dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Penyusunan alokasi belanja menggunakan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil yang direncanakan;
2. Prioritas anggaran belanja adalah untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam melaksanakan kewajiban daerah yang menjadi kewenangan daerah;

3. Setiap peningkatan alokasi belanja harus diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
4. Besaran plafon anggaran harus realistis yaitu disesuaikan dengan kondisi kemampuan keuangan daerah dan prioritas kebutuhan daerah serta pertimbangan kinerja;
5. Penentuan kebijakan belanja daerah selain didasarkan pada prioritas kegiatan perangkat daerah dapat dilakukan berdasarkan hasil evaluasi penganggaran tahun sebelumnya dengan tetap berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra).

Dalam rangka mewujudkan sinergitas program dan kegiatan prioritas pembangunan Kota Lhokseumawe, maka kebijakan belanja terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung yang diarahkan untuk :

- a. pemenuhan pembiayaan belanja yang bersifat wajib dan mengikat untuk menjamin pelayanan dasar masyarakat;
- b. pemenuhan Dana Bagi Hasil Kepada Desa, serta pemenuhan Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa;
- c. mengusahakan alokasi belanja fungsi pendidikan sebesar 20% dan fungsi kesehatan 10%;
- d. mendukung program/kegiatan strategis yang terkait dengan agenda provinsi dan nasional, dengan tetap memprioritaskan pembangunan daerah.

Sesuai dengan arah kebijakan belanja daerah tersebut serta dengan mempertimbangkan realisasi kemampuan keuangan tahun-tahun sebelumnya, maka secara garis besar gambaran belanja daerah Kota Lhokseumawe dapat dilihat sebagai berikut.

**Tabel 3.2 (T-C.21.)
Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Kota Lhokseumawe Tahun 2020**

Nomor Urut	Uraian	Jumlah				
		Realisasi Tahun 2017 (n-3) *)	Realisasi Tahun 2018 (n-2) *)	Jumlah Tahun 2019 (n-1) *)	Proyeksi / Target Tahun 2020 (n)	Proyeksi / Target Tahun 2021 (n+1) **)
(1)	(2)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)
2.	BELANJA DAERAH	870,168,392,236	755,261,965,577	939,880,767,610	1,315,723,183,379	892,796,647,512
2.1	Belanja Tidak Langsung	414,975,811,120	399,822,497,336	465,044,398,597	487,173,977,346	435,838,231,251
2.1.1	Belanja Pegawai	289,169,161,900	281,625,111,598	326,605,829,001	336,505,731,250	317,100,786,390
2.1.2	Belanja Bunga	-	-	-	-	-
2.1.3	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-
2.1.4	Belanja Hibah	6,478,342,693	7,607,600,000	17,135,000,000	11,287,186,500	3,692,700,900
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	8,870,270,130	8,159,430,000	9,324,600,000	27,402,090,000	2,965,774,366
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi / Kabupaten / Kota Dan Pemerintahan Desa	928,342,379	973,164,381	-	-	-
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi / Kabupaten / Kota dan Pemerintahan Desa	109,323,295,018	101,336,724,357	110,978,969,596	110,978,969,596	110,978,969,596
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	206,399,000	120,467,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,100,000,000
2.2	Belanja Langsung	455,192,581,116	355,439,468,241	474,836,369,013	828,549,206,033	456,958,416,261
2.2.1	Belanja Pegawai	56,276,230,315	49,126,822,110	63,647,322,200	93,570,412,713	51,708,203,356
2.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	175,321,832,046	167,473,873,959	216,722,450,968	362,036,857,624	194,545,000,742
2.2.3	Belanja Modal	223,594,518,755	138,838,772,172	194,466,595,845	372,941,935,697	210,705,212,163
	JUMLAH BELANJA	870,168,392,236	755,261,965,577	939,880,767,610	1,315,723,183,379	892,796,647,512

Sumber :

*) BPKD Kota Lhokseumawe, diolah

***) Proyeksi

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa, realisasi belanja Kota Lhokseumawe pada Tahun 2017 sebesar Rp.870.168.392.236,- atau mencapai 91,36 persen dari target anggaran sebesar Rp.952.460.290.264,-. Realisasi ini terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.414.975.811.120,- dan Belanja Langsung sebesar Rp.455.192.581.116,-. Sedangkan untuk Tahun Anggaran 2018 realisasi belanja diperkirakan sebesar Rp.755.261.965.577,- atau mencapai 87,72 persen dari target anggaran sebesar Rp.861.001.449.165,-. Realisasi ini terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.399.822.497.336,- dan Belanja Langsung sebesar Rp.355.439.468.241,-.

Untuk Tahun Anggaran 2019 total belanja Kota Lhokseumawe dianggarkan sebesar Rp.939.880.767.610,- yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.465.044.398.597,- dan Belanja Langsung sebesar Rp.474.836.369.013,-.

Sedangkan untuk Tahun 2020, proyeksi/target belanja Kota Lhokseumawe diperkirakan mencapai Rp.1.315.723.183.379,- terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.487.173.977.346,- dan Belanja Langsung sebesar Rp.828.549.206.033,-.

3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Kota Lhokseumawe

Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit. Pengeluaran pembiayaan daerah diantaranya diperuntukan bagi pembentukan dana cadangan, investasi (penyertaan modal dan pembelian surat berharga/saham), pembayaran pokok utang, pemberian pinjaman daerah, dan sisa lebih perhitungan.

Pembiayaan Daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan di masa yang akan datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan

maupun pada tahun anggaran berikutnya, dan pada hakekatnya meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus.

Berdasarkan atas realisasi dan proyeksi pendapatan dan belanja daerah, besaran pembiayaan daerah Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.3 (T-C.22.)
Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Kota Lhokseumawe Tahun 2020**

Nomor Urut	Uraian	Jumlah				
		Realisasi Tahun 2017 (n-3) *)	Realisasi Tahun 2018 (n-2) *)	Jumlah Tahun 2019 (n-1) *)	Proyeksi / Target Tahun 2020 (n)	Proyeksi / Target Tahun 2021 (n+1) **)
(1)	(2)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)
3.	PEMBIAYAAN					
3.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	24,780,603,121	55,333,411,783	26,959,045,994	26,959,045,994	15,036,459,173
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	24,780,603,121	55,333,411,783	26,959,045,994	26,959,045,994	15,036,459,173
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-	-	-	-
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-	-	-	-
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-	-
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	24,780,603,121	55,333,411,783	26,959,045,994	26,959,045,994	15,036,459,173
3.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	1,000,000,000	2,300,000,000	1,000,000,000	14,500,000,000	1,400,000,000
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	1,000,000,000	2,300,000,000	1,000,000,000	14,500,000,000	1,400,000,000
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	-	-	-	-	-
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	1,000,000,000	2,300,000,000	1,000,000,000	14,500,000,000	1,400,000,000
	PEMBIAYAAN NETTO	23,780,603,121	53,033,411,783	25,959,045,994	12,459,045,994	13,636,459,173

Sumber :

*) BPKD Kota Lhokseumawe, diolah

***) Proyeksi

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa untuk Penerimaan pembiayaan pada Tahun 2020 ditargetkan sebesar Rp.26.959.045.994,- yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya, sedangkan Pengeluaran Pembiayaan ditargetkan sebesar Rp.14.500.000.000,- yang dialokasikan untuk Penyertaan Modal (investasi) pada BUMD. Sehingga Pembiayaan Netto Kota Lhokseumawe pada Tahun 2020 menjadi Rp.12.459.045.994,-. Pembiayaan Netto diharapkan dapat dipergunakan untuk menutupi defisit belanja daerah.

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA

Prioritas dan sasaran pembangunan daerah dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 disusun sebagai dokumen perencanaan atas penjabaran dari Tahun Ketiga RPJM Kota Lhokseumawe 2017-2022. Sebagai dokumen perencanaan tahunan, RKPK Lhokseumawe Tahun 2020 mengusung tema yaitu: **“Membangun Masyarakat Yang Berdaya Saing Untuk Mewujudkan Kemandirian Ekonomi”..**

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang fokus dan berkesinambungan, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Lhokseumawe merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022 :**“TERWUJUDNYA KOTA LHOKSEUMAWE BERSYARIAT, SEHAT, CERDAS DAN SEJAHTERA BERDASARKAN UU-PA DAN MOU HELSINKI”.** Pengertian pokok unsur-unsur yang terkandung dalam Visi daerah Kota Lhokseumawe tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Bersyariat, mengandung pengertian bahwa segenap aspek kehidupan masyarakat dan tata kelola pemerinthan dilandasi oleh nilai-nilai Agama Islam;
2. Sehat mengandung pengertian bahwa lingkungan hidup dan masyarakat Kota Lhokseumawe yang teratur bersih dan sehat;
3. Cerdas mengandung pengertian bahwa sumberdaya manusia di Kota Lhokseumawe yang berkarakter dan berwawasan global;
4. Sejahtera mengandung pengertian terpenuhinya kebutuhan masyarakat Kota Lhokseumawe baik materil maupun spiritual;

4.2 Misi

Dalam mewujudkan Visi Kota Lhokseumawe tersebut ditempuh melalui beberapa Misi sebagai berikut :

1. **Memperkuat pelaksanaan Syariat Islam serta nilai-nilai keislaman dalam kehidupan masyarakat**, yaitu membentuk manusia yang bertaqwa kepada Allah SWT, menjadikan nilai-nilai Syariat Islam sebagai dasar dalam mengembangkan nilai-nilai budaya lokal yang islami.
2. **Meningkatkan perekonomian yang bertitikberat pada bidang perindustrian, perdagangan, jasa, pariwisata, dan perikanan**, yaitu mengembangkan dan mendorong perekonomian yang berdayasaing dan mempunyai keunggulan kompetitif yang tinggi, membangun kerja sama perekonomian dengan berbagai pihak, pengembangan iklim usaha yang kondusif untuk merangsang investasi dari dalam dan luar negeri, regulasi yang mendukung perkembangan perekonomian terutama usaha kecil dan menengah dan mensinergikan sektor-sektor lain berbasis potensi daerah yang mendukung perindustrian, perdagangan, jasa, pariwisata dan perikanan.
3. **Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdayasaing**, yaitu meningkatkan kualitas pendidikan pada semua jenjang, melibatkan segenap stakeholders dalam penyelenggaraan pendidikan dengan standar kualitas yang tinggi, pendidikan yang memiliki daya saing dan kompetensi yang tinggi mengupayakan system pendidikan yang unggul, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas, mengupayakan biaya pendidikan yang terjangkau dan dapat diakses oleh masyarakat, pendidikan yang menjunjung nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya, sehingga dapat terbentuk manusia yang bertaqwa pada Tuhan Yang MahaEsa, dan mengamalkan nilai-nilai agama. Demikian pula, meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan.
4. **Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik (*Clean and Good Governance*)**, yaitu peningkatan kinerja serta peningkatan system penyelenggaraan pemerintahan daerah yang meliputi penetapan kebijakan

dan regulasi, pembinaan aparatur, pengembangan system perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan sebagai upaya mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Demikian pula, memantapkan kelembagaan demokrasi yang lebih kokoh, memperkuat peran masyarakat sipil, memperkuat kualitas desentralisasi dan otonomi daerah, menjamin pengembangan dan kebebasan media dalam mengkomunikasikan kepentingan masyarakat.

5. **Mewujudkan pemerataan pembangunan, serta sarana dan prasarana yang memadai**, yaitu mengurangi kesenjangan social secara menyeluruh, keberpihakan pada masyarakat yang lemah, menurunkan kemiskinan dan pengangguran, menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek, menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap pelayanan social serta sarana dan prasarana dasar perkotaan, membangun sarana dan prasarana yang mendukung mobilitas barang, jasa dan orang, meningkatkan peran serta masyarakat dan swasta dalam penyediaan sarana dan prasarana perkotaan.
6. **Mewujudkan lingkungan hidup yang sehat, asri dan lestari**, yaitu pembangunan yang memperhatikan daya dukung lingkungan, mengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan, menjaga keseimbangan pemanfaatan ruangan tara kawasan budidaya dan kawasan lindung, memperbaiki pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk mendukung kualitas kehidupan, dan meningkatkan pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai modal dasar pembangunan;**Mewujudkan ketentram, ketertiban, kedamaian dan persatuan**, yaitu menciptakan kondisi lingkungan yang kondusif dengan memantapkan kemitraan antara masyarakat, Pemerintah Daerah dan aparat penegak hukum sehingga mampu melindungi dan mengayomi masyarakat, mencegah tindak kejahatan, dan menuntaskan tindak kriminalitas.

Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1
Hubungan Visi/Misi dan Tujuan/Sasaran Pembangunan

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi
Misi 1,			
Memperkuat pelaksanaan Syariat Islam serta nilai-nilai keislaman dalam kehidupan masyarakat.			
	1	Memperkuat pelaksanaan Syariat Islam	1.1.1
			Menguatnya penegakan Syariat dalam bermasyarakat
			1.1.1.1
			Peningkatan sosialisasi dan edukasi pemahaman Syariat Islam bagi masyarakat
			1.1.1.2
			Peningkatan sosialisasi ZIS
Misi 2,			
Meningkatkan perekonomian yang berdaya saing yang bertitik berat pada bidang perindustrian, perdagangan, jasa, pariwisata, dan perikanan.			
	2	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	2.1.1
			Menurunkan angka kemiskinan
			2.1.1.1
			Peningkatan produktifitas dan daya saing tenaga kerja
			2.1.1.2
			Peningkatan pengarusutamaan gender dalam pembangunan dan perlindungan anak

Misi	Tujuan		Sasaran		Strategi	
			2.1.2	Meningkatnya pertumbuhan UMKM	2.1.2.1	Peningkatan peran UMKM dan penataan pedagang kaki lima
			2.1.3	Meningkatnya iklim investasi	2.1.3.1	Peningkatan promosi dan potensi daerah
					2.1.3.2	Percepatan pelayanan investasi melalui <i>e-permit</i>
			2.1.4	Meningkatnya Pertumbuhan Pariwisata	2.1.4.1	Peningkatan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata
Misi 3,						
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing.						
	3.1	Meningkatkan kualitas pendidikan pada semua jenjang.	3.1.1	Meningkatnya pendidikan dasar yang berkualitas.	3.1.1.1	Peningkatan kualitas guru dan media pembelajaran
			3.1.2	Meningkatnya generasi yang berdaya saing	3.1.2.1	Peningkatan peran pemuda dalam pembangunan

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi
			3.1.2.2 Penyediaan sarana dan prasarana olahraga
		3.1.3 Meningkatnya status Tipe Dayah	3.1.3.1 Peningkatan sarana dan prasarana Dayah
	3.2 Meningkatkan kualitas kesehatan.	3.2.1 Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan yang berkualitas	3.2.1.1 Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dasar
		3.2.2 Meningkatnya pengendalian penyakit menular dan tidak menular	3.2.2.1 Peningkatan dan penyediaan sistem pelayanan kesehatan yang terintegrasi
		3.2.3 Menurunnya angka kesakitan dan kematian karna penyakit PD3I	3.2.3.1 Peningkatan kemitraan kesehatan
Misi 4,			
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik (<i>Clean and Good Governance</i>)			
	4 Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik	4.1.1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	4.1.1.1 Peningkatan kualitas dan kapasitas perencanaan, pelaporan, dan evaluasi sesuai prosedur

Misi	Tujuan		Sasaran		Strategi	
			4.1.2	Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan TIK terhadap informasi publik	4.1.2.1	Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik
Misi 5,						
Mewujudkan pemerataan pembangunan, serta sarana dan prasarana yang memadai.						
	5.1	Meningkatkan prasarana dan sarana pelayanan dasar	5.1.1	Meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat	5.1.1.1	Penyediaan sambungan air bersih dan fungsionalisasi PDAM Ie Beusare Rata
					5.1.1.2	Penanganan kawasan kumuh dan sanitasi berbasis masyarakat
	5.2	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Publik yang handal	5.2.1	Meningkatnya pelayanan sistem jaringan jalan	5.2.1.1	Peningkatan ruas jalan dalam kondisi mantap

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi			
		5.2.2	Terwujudnya sistem transportasi yang aman dan handal	5.2.2.1	Penataan dan pengembangan sistem keselamatan transportasi secara merata	
Misi 6,						
Mewujudkan lingkungan hidup yang sehat, asri dan lestari.						
	6	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	6.1.1	Terselenggaranya penataan ruang daerah	6.1.1.1	Peningkatan kawasan terbuka hijau
Misi 7,						
Mewujudkan ketentram, ketertiban, kedamaian dan persatuan.						
	7	Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap Peraturan perundangan	7.1.1	Meningkatnya pemahaman terhadap Syariat islam	7.1.1.1	Peningkatan patroli dan penertiban qanun Syariat Islam
			7.1.2	Meningkatnya kesadaran dan pemahaman terhadap wawasan kebangsaan	7.1.2.1	Peningkatan wawasan kebangsaan dan partisipasi masyarakat dalam pemilu

Sumber : RPJM Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022.

Tabel 4.2
Sinkronisasi Isu Strategis, Tujuan dan Sasaran Pembangunan
Provinsi dan Kota Lhokseumawe

NO	RKPK LHOKSUMAWE 2020	RKP ACEH 2020
A	ISU STRATEGIS	
1	Peningkatan Nilai-Nilai Dinul Islam	Penguatan penerapan Dinul Islam dan Budaya Aceh
2	Pembangunan Ekonomi, Industri dan Pariwisata	Masih rendahnya minat investasi dan masih tingginya defisit perdagangan
		Minimnya akses penduduk miskin terhadap layanan sosial dasar
		Rendahnya kompetensi tenaga kerja serta masih terbatasnya lapangan kerja
3	Peningkatan Kualitas Pendidikan	Masih kurangnya mutu pendidikan dan dan derajat kesehatan masyarakat
4	Peningkatan Pelayanan Kesehatan	
5	Pembenahan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi birokrasi dan penguatan perdamaian
6	Peningkatan Infrastruktur dan Pemeliharaan Lingkungan	Rendahnya konektivitas antar wilayah akibat belum optimalnya jaringan layanan transportasi
7	Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum	Reformasi birokrasi dan penguatan perdamaian
B	TUJUAN	
1	Memperkuat pelaksanaan Syariat Islam	Memperkuat pelaksanaan Aqidah, Syariah, dan Akhlak dalam tatanan kehidupan masyarakat
2	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi
		Menurunnya Angka Kemiskinan
3	Meningkatkan kualitas pendidikan pada semua jenjang.	Meningkatkan kualitas SDM Aceh yang memiliki daya saing
		Meningkatkan prestasi olahraga dan kepemudaan ditingkat nasional dan regional
4	Meningkatkan kualitas kesehatan.	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

NO	RKPK LHOKSUMAWE 2020	RKP ACEH 2020
		Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat
5	Meningkatkan tata kelola Pemerintahan yang baik	Mewujudkan reformasi birokrasi yang berkualitas
		Memperkuat perencanaan pembangunan sesuai dengan prinsip Evidence Based Planning.
6	Meningkatkan prasarana dan sarana pelayanan dasar	
7	Meningkatkan kualitas infrastruktur publik yang handal	Mewujudkan ketahanan dan kemandirian energi di Aceh
		Membangun Sistem Informasi Aceh secara terpadu dan terintegrasi
8	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Mengurangi ketimpangan antar wilayah
		Meningkatkan tatakelola lingkungan Hidup lestari
9	Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap peraturan perundangan	Meningkatnya keberlanjutan perdamaian berdasarkan prinsip MoU Helsinki
C	SASARAN	
1	Meningkatkan pemahaman pelaksanaan Syariat Islam	Menguatnya kualitas masyarakat berbasis Al-Qur'an dan Al-Hadist, Ijma' dan Qiyas
		Meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan dayah
		Menguatnya tatanan Ekonomi Syari'ah
		Menguatnya penegakan Syariah dalam bermasyarakat
		Meningkatnya prasarana dan sarana keagamaan dan budaya berbasis islami
		Menguatnya tatanan budaya, adat istiadat dan seni ke-Acehan yang Islami
2	Menurunkan angka kemiskinan	Meningkatnya kesejahteraan PMKS
		Meningkatkan pembangunan sektor pertanian
		Meningkatkan Ketahanan Pangan
3	Meningkatnya pertumbuhan UMKM	Meningkatnya pembangunan industri
4	Meningkatnya iklim investasi	Meningkatnya jumlah dan nilai investasi

NO	RKPK LHOKSUMAWE 2020	RKP ACEH 2020
		Meningkatnya neraca perdagangan
5	Meningkatnya pertumbuhan pariwisata	Meningkatnya kontribusi pariwisata
6	Meningkatnya pendidikan dasar yang berkualitas.	Meningkatnya kualitas pendidikan
		Meningkatnya kualitas tenaga pendidik dan kependidikan
		Meningkatnya kualitas pendidikan vokasional
7	Meningkatnya generasi yang berdaya saing	Terwujudnya pemuda yang berkarakter, berkualitas, dan berdaya saing
8	Meningkatnya status tipe Dayah	Meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan dayah
9	Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan yang berkualitas	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat
		Menurunnya kesenjangan laki-laki dan perempuan dalam pembangunan
		Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan
10	Meningkatnya pengendalian penyakit menular dan tidak menular	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat
11	Menurunnya angka kesakitan dan kematian karna penyakit PD3I	
12	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Birokrasi yang bersih dan akuntabel
		Birokrasi yang efektif dan efisien
		Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas
		Meningkatnya konsistensi antar dokumen perencanaan lintas sektor dan wilayah
13	Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan TIK	Meningkatnya konsistensi antar dokumen perencanaan lintas sektor dan wilayah
		Terintegrasinya dan terpusatnya data secara elektronik.

NO	RKPK LHOKSUMAWE 2020	RKP ACEH 2020
14	Meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat	Terwujudnya kemandirian energi
15	Meningkatnya pelayanan sistem jaringan jalan	Meningkatnya konektivitas antar wilayah Meningkatnya pelayanan pertahanan
16	Terwujudnya sistem transportasi yang aman dan handal	
17	Terselenggaranya pemenuhan ruang terbuka hijau	
18	Terselenggaranya manajemen sampah kota	Meningkatnya pengendalian lingkungan hidup lestari
19	Menguatnya penegakan Syariat Islam dalam bermasyarakat	Menguatnya penegakan Syariah dalam bermasyarakat
20	Meningkatnya kesadaran dan pemahaman terhadap wawasan kebangsaan	

4.3 Sasaran dan Prioritas Pembangunan Tahun 2020

Sesuai dengan hasil rumusan tema pembangunan Kota Lhokseumawe “**Membangun Masyarakat Yang Berdaya Saing Untuk Mewujudkan Kemandirian Ekonomi**”. Maka sasaran yang akan dicapai Kota Lhokseumawe Pada Tahun 2020 diantaranya yaitu:

Tabel 4.3
Target Capaian Sasaran Pembangunan Kota
Lhokseumawe Tahun 2020

No	Visi & Misi	Tujuan Sasaran	Indikator	Satuan	Target Capaian Tahun 2020	Kondisi Akhir Target RPJM
1	2	3	4	5	6	7
Visi : “Terwujudnya Kota Lhokseumawe Bersyariat, Sehat, Cerdas dan Sejahtera Berdasarkan UU-PA dan Mou Helsinki”						
1	<i>Misi 1 : Memperkuat pelaksanaan Syariat Islam serta nilai-nilai keislaman dalam kehidupan masyarakat.</i>					
	1.1	Memperkuat pelaksanaan Syariat Islam	Indeks Pembangunan Syariat Islam	Indeks	61	70
	1.1.1	Meningkatkan pemahaman pelaksanaan Syariat Islam	Jumlah penerimaan Zakat, Infaq, Sadaqah	Rp (Milyar)	9,06	9,24
2	<i>Misi 2 : Meningkatkan perekonomian yang bertitik berat pada bidang perindustrian, perdagangan, jasa, pariwisata, dan perikanan.</i>					
	2.1	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi	Pertumbuhan PDRB	Persen	5,86	6,02
			Pengendalian laju inflasi	Persen	2,42	2,09
	2.1.1	Menurunkan angka kemiskinan	Penduduk dibawah garis kemiskinan	Persen	9,28	9,24
			Tingkat pengangguran terbuka	Persen	10,28	9,49
			Pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita	Rp (Juta)	1,12	1,20
			Persentase pemberdayaan kelompok perempuan	Persen	20	40
	2.1.2	Meningkatnya pertumbuhan UMKM	Pertumbuhan UMKM	Jumlah	2,333	2,351
			Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	Persen	18,93	19,70
	2.1.3	Meningkatnya iklim investasi	Jumlah Investor	PMDN/ PMA	353	389
			Jumlah Nilai Investasi	Rp (Milyar)	3,921	4,323
		Meningkatnya pertumbuhan pariwisata	Kontribusi pariwisata terhadap PDRB	Persen	1,19	1,26
3	<i>Misi 3 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing.</i>					
	3.1	Meningkatkan kualitas	Indeks Pembangunan	IPM	77,38	78,47

No	Visi & Misi	Tujuan Sasaran	Indikator	Satuan	Target Capaian Tahun 2020	Kondisi Akhir Target RPJM
1	2	3	4	5	6	7
		pendidikan pada semua jenjang.	Manusia			
	3.1.1	Meningkatnya pendidikan dasar yang berkualitas.	Rerata nilai ujian nasional:			
			Rerata nilai ujian nasional SD/MI	Nilai	95	95,00
			Rerata nilai ujian nasional SMP/MTs	Nilai	85	95,00
			Angka Partisipasi Kasar:			
			- APK SD/MI	Angka	105.63	105.63
			- APK SMP/MTs	Angka	101	101
			Angka Partisipasi Murni:			
			- APM SD/MI	Angka	99,4	99,36
			-APM SMP/MTs	Angka	86,4	91,64
			Angka Harapan lama Sekolah	Angka	15,53	15,78
	3.1.2	Meningkatnya generasi yang berdaya saing	Rasio ketergantungan	Rasio (Per 10.000)	50.61	50.11
			Jumlah prestasi olahraga	Jumlah	30	32
	3.1.3	Meningkatnya status tipe Dayah	Jumlah dayah dengan Tipe "A"	Dayah	17	19
	3.2	Meningkatkan kualitas kesehatan.	Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	71,39	71,62
	3.2.1	Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan yang berkualitas	Jumlah puskesmas yang terakreditasi	Jumlah	1	7
	3.2.2	Meningkatnya pengendalian penyakit menular dan tidak menular	Cakupan penemuan dan penanganan penderita TBC BTA	Persen	80	100
			Cakupan penemuan dan penanganan penderita Pneumonia	Persen	7.08	8.11
	3.2.3	Menurunnya angka kesakitan dan kematian karena penyakit PD3I	Cakupan anak usia 0-11 bulan mendapat imunisasi dasar lengkap (IDL)	Persen	92,50	100,00

No	Visi& Misi	TujuanSasaran	Indikator	Satuan	Target Capaian Tahun 2020	Kondisi Akhir Target RPJM
1	2	3	4	5	6	7
4	<i>Misi 4 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik (Clean and Good Governance). "</i>					
	4.1	Meningkatkan tata kelola Pemerintahan yang baik	Kategori Reformasi Birokrasi	Kategori	BB	B
	4.1.1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kategori hasil evaluasi SAKIP	Kategori	BB	B
			Kategori hasil evaluasi LPPD	Kategori	Tinggi	Sangat Tinggi
			Opini BPK	Opini	WTP	Ada
		Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan TIK	Penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik	Ada/Tidak	Ada	Ada
5	<i>Misi 5 : Mewujudkan pemerataan pembangunan, serta sarana dan prasarana yang memadai</i>					
	5.1	Meningkatkan prasarana dan sarana pelayanan dasar	Pencapaian target nasional 100-0-100	Persen	4.25-13.8-75.7	4.51-9.3-82.8
	5.1.1	Meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat	Persentase akses jaringan air minum layak/air bersih	Persen	90	100
			Penanganan kawasan kumuh	Luas (Ha)	13.8	9.3
			Penanganan sampah	Persen	78.0	82.8
			Persentase jalan yang memiliki drainase/ saluran pembuangan air (minimal 1,5)	Persen	9.29	11.24
	5.2	Meningkatkan kualitas infrastruktur publik yang handal	Kategori capaian kinerja infrastruktur publik	Absolut	Baik	Baik
	5.2.1	Meningkatnya pelayanan sistem jaringan jalan	Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap	Persen	71,2	81,5

No	Visi& Misi	TujuanSasaran	Indikator	Satuan	Target Capaian Tahun 2020	Kondisi Akhir Target RPJM
1	2	3	4	5	6	7
		Terwujudnya sistem transportasi yang aman dan handal	Ketersediaan fasilitas keselamatan lalulintas	Persen	47,7	56,6
6	<i>Misi 6 : Mewujudkan lingkungan hidup yang sehat, asri dan lestari</i>					
	6.1	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Rasio RTH per satuan luas wilayah ber HPL/HGB	Rasio	0.98	1.36
	6.1.1	Terselenggaranya pemenuhan ruang terbuka hijau	Luasan RTH Publik 20%	Ha	33.8	40.9
	6.1.2	Terselenggaranya manajemen sampah kota	Persentase sampah yang tertangani	Persen	82,65	91,13
7	<i>Misi 7 : Mewujudkan ketentram, ketertiban, kedamaian dan persatuan</i>					
	7.1	Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap peraturan perundangan	Angka Kriminalitas yang tertangani (per 10.000)	"Rasio (Per 10.000)"	42.84	34.70
	7.1.1	Menguatnya penegakan Syariat Islam dalam bermasyarakat	Kasus Pelanggaran Syariat Islam	Kasus	50	36
	7.1.2	Meningkatnya kesadaran dan pemahaman terhadap wawasan kebangsaan	Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu	Persen		75

Arah kebijakan pembangunan pada tahun ini berfokus pada pembangunan masyarakat yang berdaya saing untuk mewujudkan kemandirian ekonomi. Peningkatan kualitas SDM melalui peningkatan kualitas pendidikan dan mutu kesehatan menjadi sangat penting. Penerapan e-government yang terintegrasi bagi perangkat daerah sudah dilakukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan. Sentra Industri Kecil dan Menengah terus dibina untuk mengurangi tingkat

pengangguran dan menurunkan angka kemiskinan dengan tetap mendukung pertumbuhan ekonomi hijau (green economic growth). Tema pembangunan pada tahun ini yaitu **“Membangun Masyarakat Yang Berdaya Saing Untuk Mewujudkan Kemandirian Ekonomi”**.

Prioritas Kota Lhokseumawe Tahun 2020 terdiri dari Prioritas I, Prioritas II, dan Prioritas III. Pengalokasian dana pada Prioritas III akan dipenuhi, setelah pemenuhan dana pada Prioritas I dan Prioritas II terlebih dahulu. Adapun rencana pengeluaran terhadap masing-masing prioritas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Prioritas I, yaitu berkaitan dengan alokasi belanja-belanja tidak langsung, seperti belanja pegawai, tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan, dan Belanja Tidak Terduga.
- b. Prioritas II, yaitu berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi/misi daerah. Program pembangunan daerah yang menjadi unggulan Kepala Daerah, sebagaimana diamanatkan dalam RPJMK dan amanat/kebijakan nasional yang definitif, termasuk untuk prioritas pendidikan dua puluh persen dan kesehatan sepuluh persen. Prioritas II juga diperuntukkan bagi prioritas belanja yang wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan penjabaran belanja langsung yang terdiri dari belanja pegawai, belanja modal dan belanja barang/jasa.
- c. Prioritas III, yaitu berkaitan dengan program prioritas di tingkat Satuan Kerja Perangkat Kota (SKPK) yang merupakan penjabaran dari masing-masing urusan/bidang urusan yang berdampak luas pada masing-masing kelompok masyarakat yang dilayani. Hal ini disesuaikan dengan kondisi dan permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan layanan dasar

serta tugas pokok dan fungsi SKPK, termasuk peningkatan kapasitas kelembagaan dan administrasi perkantoran serta program pendukung lainnya untuk peningkatan pelayanan SKPK.

Untuk dapat lebih jelasnya masing-masing prioritas dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel 4.4
Program Prioritas Kota Lhokseumawe Tahun 2020

NO	PRIORITAS	SKPK YANG MELAKSANAKAN	NAMA PROGRAM		NILAI (Rp)	%
I	Prioritas I				334,948,437,929	25%
		Dinas Kesehatan	1.02.01	Kesehatan	55,217,996,576	
			00	Non Program	55,217,996,576	
		Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1.03.01	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	5,954,540,000	
			00	Non Program	5,954,540,000	
		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.05.01	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	2,368,320,000	
			00	Non Program	2,368,320,000	
		Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah	1.05.02	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	4,128,577,707	
			00	Non Program	4,128,577,707	
		Dinas Sosial	1.06.01	Sosial	2,320,273,200	
			00	Non Program	2,320,273,200	

NO	PRIORITAS	SKPK YANG MELAKSANAKAN	NAMA PROGRAM		NILAI (Rp)	%
		Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	2.01.01	Tenaga Kerja	4,494,811,200	
			00	Non Program	4,494,811,200	
		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.02.01	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2,901,254,000	
			00	Non Program	2,901,254,000	
		Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan	2.03.01	Pangan	5,314,178,000	
			00	Non Program	5,314,178,000	
		Dinas Pertanahan	2.04.01	Pertanahan	2,604,072,000	
			00	Non Program	2,604,072,000	
		Dinas Lingkungan Hidup	2.05.01	Lingkungan Hidup	2,807,382,800	
			00	Non Program	2,807,382,800	
		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.06.01	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3,363,230,000	
			00	Non Program	3,363,230,000	

NO	PRIORITAS	SKPK YANG MELAKSANAKAN	NAMA PROGRAM		NILAI (Rp)	%
		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	2.07.01	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2,203,604,000	
			00	Non Program	2,203,604,000	
		Dinas Perhubungan	2.09.01	Perhubungan	3,093,455,400	
			00	Non Program	3,093,455,400	
		Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	2.10.01	Komunikasi dan Informatika	1,539,704,000	
			00	Non Program	1,539,704,000	
		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	2.11.01	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	3,250,087,600	
			00	Non Program	3,250,087,600	
		Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	2.13.01	Kepemudaan dan Olahraga	2,103,764,000	
			00	Non Program	2,103,764,000	
		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.17.01	Perpustakaan	1,494,305,500	
			00	Non Program	1,494,305,500	

NO	PRIORITAS	SKPK YANG MELAKSANAKAN	NAMA PROGRAM		NILAI (Rp)	%
		Dewan Perwakilan Rakyat Kota	4.01.01	Administrasi Pemerintahan	9,609,064,000	
			00	Non Program	9,609,064,000	
		Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4.01.02	Administrasi Pemerintahan	644,063,600	
			00	Non Program	644,063,600	
		Sekretariat Daerah	4.01.03	Administrasi Pemerintahan	18,829,065,000	
			00	Non Program	18,829,065,000	
		Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat	4.01.04	Administrasi Pemerintahan	4,816,256,800	
			00	Non Program	4,816,256,800	
		Kecamatan Banda Sakti	4.01.05	Administrasi Pemerintahan	2,266,029,600	
			00	Non Program	2,266,029,600	
		Kecamatan Blang Mangat	4.01.06	Administrasi Pemerintahan	2,135,678,400	
			00	Non Program	2,135,678,400	
		Kecamatan Muara Satu	4.01.07	Administrasi Pemerintahan	2,059,934,800	
			00	Non Program	2,059,934,800	

NO	PRIORITAS	SKPK YANG MELAKSANAKAN	NAMA PROGRAM		NILAI (Rp)	%
		Kecamatan Muara Dua	4.01.08	Administrasi Pemerintahan	2,103,962,400	
			00	Non Program	2,103,962,400	
		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.01.09	Administrasi Pemerintahan	2,965,188,000	
			00	Non Program	2,965,188,000	
		Inspektorat	4.02.01	Pengawasan	5,792,778,532	
			00	Non Program	5,792,778,532	
		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4.03.01	Perencanaan	4,954,062,000	
			00	Non Program	4,954,062,000	
		Badan Pengelola Keuangan Daerah	4.04.01	Keuangan	158,487,537,274	
			00	Non Program	13,754,791,178	
			514	Belanja Hibah	7,074,686,500	
			515	Belanja Bantuan Sosial	25,679,090,000	
			517	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	110,978,969,596	
			518	Belanja Tidak Terduga	1,000,000,000	

NO	PRIORITAS	SKPK YANG MELAKSANAKAN	NAMA PROGRAM		NILAI (Rp)	%
		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	4.05.01	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	6,771,800,000	
			00	Non Program	6,771,800,000	
		Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah	4.06.01	Keistimewaan dan Kekhususan	3,074,180,600	
			00	Non Program	3,074,180,600	
		Sekretariat MPU	4.06.02	Keistimewaan dan Kekhususan	1,950,095,340	
			00	Non Program	1,950,095,340	
		Sekretariat Baitul Mal	4.06.03	Keistimewaan dan Kekhususan	1,134,651,200	
			00	Non Program	1,134,651,200	
		Sekretariat Majelis Adat Aceh	4.06.04	Keistimewaan dan Kekhususan	845,670,000	
			00	Non Program	845,670,000	
		Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah	4.06.05	Keistimewaan dan Kekhususan	1,348,864,400	
			00	Non Program	1,348,864,400	

NO	PRIORITAS	SKPK YANG MELAKSANAKAN	NAMA PROGRAM		NILAI (Rp)	%
II	Prioritas II				823,023,076,009	63%
1	Penguatan Dinul Islam, Sosial dan Budaya				47,347,416,187	4%
		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			3,158,877,500	
			2.16	Kebudayaan	3,158,877,500	
			16.	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	1,306,457,500	
			17.	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	372,010,000	
			18.	Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya	1,429,535,000	
			19.	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Kebudayaan	50,875,000	
		Dinas Sosial			5,015,882,745	
			1.06	Sosial	5,015,882,745	
			15.	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	2,075,935,654	
			16.	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	774,607,420	

NO	PRIORITAS	SKPK YANG MELAKSANAKAN	NAMA PROGRAM		NILAI (Rp)	%
			18.	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	1,167,849,575	
			20.	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	261,300,000	
			21.	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	736,190,096	
		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			1,728,497,000	
			2.02	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1,728,497,000	
			15.	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	72,650,000	
			16.	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	290,016,000	
			17.	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	109,000,000	
			18.	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	1,256,831,000	

NO	PRIORITAS	SKPK YANG MELAKSANAKAN	NAMA PROGRAM		NILAI (Rp)	%
		Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata			7,016,262,100	
			2.13	Kepemudaan dan Olahraga	7,016,262,100	
			15.	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	350,000,000	
			16.	Program peningkatan peran serta kepemudaan	590,535,000	
			17.	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	500,000,000	
			18.	Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba	200,000,000	
			19.	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga	200,000,000	
			20.	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	3,529,827,100	
			21.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	1,645,900,000	
		Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah			17,710,412,940	
			4.06	Keistimewaan dan Kekhususan	17,710,412,940	
			15.	Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama	9,547,344,500	

NO	PRIORITAS	SKPK YANG MELAKSANAKAN	NAMA PROGRAM		NILAI (Rp)	%
			16.	Program Peningkatan Pelaksanaan Syariat Islam dan Peran Ulama	7,535,093,550	
			31.	Program Peningkatan Sumber Daya Ulama dan Kualitas Pendidikan Agama	522,199,890	
			32.	Program Penelitian dan Pengembangan Agama	105,775,000	
		Sekretariat MPU			151,823,775	
			4.06	Keistimewaan dan Kekhususan	151,823,775	
			31.	Program Peningkatan Sumber Daya Ulama dan Kualitas Pendidikan Agama	70,203,975	
			32.	Program Penelitian dan Pengembangan Agama	41,840,000	
			46.	Program Pembinaan, Pengembangan, dan Peningkatan Kapasitas Ulama	39,779,800	
		Sekretariat Baitul Mal			12,081,660,127	
			4.06	Keistimewaan dan Kekhususan	12,081,660,127	
			47.	Program Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan dan Pembinaan Baitul Mal	12,081,660,127	
		Sekretariat MAA			484,000,000	
			2.16	Kebudayaan	334,000,000	
			15.	Program Pengembangan Nilai Budaya	198,000,000	

NO	PRIORITAS	SKPK YANG MELAKSANAKAN	NAMA PROGRAM		NILAI (Rp)	%
			17.	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	111,000,000	
			20.	Program Penguatan Lembaga Adat	25,000,000	
			4.06	Keistimewaan dan Kekhususan	150,000,000	
			17.	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	150,000,000	
2	Pembangunan Ekonomi, Industri dan Pariwisata				27,859,163,899	2%
					2,067,230,240	
			2.01	Tenaga Kerja	1,852,130,240	
			15.	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	1,001,459,740	
			16.	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	452,725,450	
			17.	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	397,945,050	
			2.12	Penanaman Modal	215,100,000	
			15.	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	50,000,000	
			16.	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	65,100,000	
			17.	Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana, dan prasarana daerah	100,000,000	

NO	PRIORITAS	SKPK YANG MELAKSANAKAN	NAMA PROGRAM		NILAI (Rp)	%
		Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan			11,976,189,548	
			2.03	Pangan	2,857,330,270	
			18.	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	1,190,142,782	
			19.	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	336,495,188	
			20.	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	1,330,692,300	
			3.01	Kelautan dan Perikanan	6,159,633,600	
			16.	Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan	50,000,000	
			17.	Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut	55,300,000	
			20.	Program pengembangan budidaya perikanan	4,800,193,600	
			21.	Program pengembangan perikanan tangkap	500,000,000	
			23.	Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	63,350,000	
			26.	Program Peningkatan Kesejahteraan Nelayan	690,790,000	

NO	PRIORITAS	SKPK YANG MELAKSANAKAN	NAMA PROGRAM		NILAI (Rp)	%
			3.03	Pertanian	2,959,225,678	
			15.	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	54,530,000	
			16.	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	208,470,000	
			19.	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	1,825,747,432	
			20.	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	94,080,000	
			21.	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	539,582,890	
			22.	Program peningkatan produksi hasil peternakan	236,815,356	
		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah			11,548,285,001	
			2.11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	876,715,000	
			15.	Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang kondusif	500,000,000	
			18.	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	151,100,000	
			19.	Program Pengembangan dan Pembinaan Koperasi Dan UKM	72,655,000	
			22.	Pengembangan Koperasi dalam Wilayah Kota Lhokseumawe	152,960,000	

NO	PRIORITAS	SKPK YANG MELAKSANAKAN	NAMA PROGRAM		NILAI (Rp)	%
			3.06	Perdagangan	8,193,770,000	
			15.	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	1,149,760,000	
			18.	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	6,264,410,000	
			20.	Program Pengembangan Dagang dan Industri dan Menengah	779,600,000	
			3.07	Perindustrian	2,477,800,001	
			16.	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	2,376,425,001	
			24.	Program Peningkatan Mutu Industri	30,425,000	
			25.	Pengembangan dan Pembinaan Dekranasda	70,950,000	
		Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata			2,267,459,110	
			3.02	Pariwisata	2,267,459,110	
			15.	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	1,317,632,740	
			16.	Program pengembangan destinasi pariwisata	105,266,370	
			17.	Program Pengembangan Kemitraan	844,560,000	

NO	PRIORITAS	SKPK YANG MELAKSANAKAN	NAMA PROGRAM		NILAI (Rp)	%
3	Peningkatan Kualitas Pendidikan				258,422,115,867	20%
		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			235,830,201,889	
			00	Non Program	146,290,039,417	
			1.01	Pendidikan	89,540,162,472	
			01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	17,688,909,430	
			02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	6,095,798,892	
			03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	35,000,000	
			05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	33,000,000	
			07.	Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja	1,200,000	
			08.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pembangunan	500,000,000	
			15.	Program Pendidikan Anak Usia Dini	6,655,060,000	
			16.	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	54,589,174,150	
			18.	Program Pendidikan Non Formal	514,000,000	
			20.	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	2,342,420,000	
			22.	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	1,085,600,000	

NO	PRIORITAS	SKPK YANG MELAKSANAKAN	NAMA PROGRAM		NILAI (Rp)	%
		PPKD			5,935,500,000	
				Belanja Hibah Dinas PK (BOP dan BOS)	4,212,500,000	
				Belanja Bantuan Sosial Dinas PK (Beasiswa)	50,000,000	
				Bantuan Sosial DSIP (Beasiswa)	98,000,000	
				Belanja Bantuan Sosial Sekretariat MPD (Beasiswa)	1,575,000,000	
		Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah			8,960,522,500	
			4.06	Keistimewaan dan Kekhususan	8,960,522,500	
			21.	Program Pendidikan, Pembinaan dan Pengembangan Dayah	8,960,522,500	
		Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah			5,915,516,000	
			1.01	Pendidikan	5,696,100,000	
			27.	Program Peningkatan Kapasitas Majelis Pendidikan Daerah	5,696,100,000	
			4.06	Keistimewaan dan Kekhususan	219,416,000	
			22.	Program Perencanaan dan Pengawasan/Monitoring dan Evaluasi	219,416,000	

NO	PRIORITAS	SKPK YANG MELAKSANAKAN	NAMA PROGRAM		NILAI (Rp)	%
		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			1,780,375,478	
			4.05	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	1,780,375,478	
			15.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1,780,375,478	
4	Peningkatan Pelayanan Kesehatan				42,350,047,862	3%
		Dinas Kesehatan			39,665,381,102	
			1.02	Kesehatan	39,665,381,102	
			15.	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	1,850,000,000	
			16.	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	16,197,719,200	
			17.	Program Pengawasan Obat dan Makanan	196,266,500	
			19.	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	1,021,500,000	
			20.	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	2,155,962,160	
			21.	Program pengembangan lingkungan sehat	1,565,990,000	
			22.	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	1,756,155,000	

NO	PRIORITAS	SKPK YANG MELAKSANAKAN	NAMA PROGRAM		NILAI (Rp)	%
			23.	Program standarisasi pelayanan kesehatan	103,340,000	
			25.	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas / puskesmas pembantu dan jaringannya	11,798,211,946	
			26	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	1,700,000,000	
			28.	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	109,650,000	
			30.	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	80,683,347	
			32.	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	467,150,000	
			34.	Program Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan	324,575,000	
			35.	Program Peningkatan Kapasitas Tenaga Medis dan Para Medis Serta Sistem Informasi Kesehatan Daerah	338,177,949	

NO	PRIORITAS	SKPK YANG MELAKSANAKAN	NAMA PROGRAM		NILAI (Rp)	%
		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			2,684,666,760	
			2.08	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2,684,666,760	
			15.	Program Keluarga Berencana	2,277,114,260	
			16.	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	140,440,000	
			17.	Program pelayanan kontrasepsi	79,800,000	
			23.	Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	187,312,500	
5	Penataan Reformasi Birokrasi				118,414,901,009	9%
		Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja			702,220,000	
			2.12	Penanaman Modal	702,220,000	
			18.	Program Peningkatan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu	702,220,000	
		Dinas Pertanahan			1,343,158,550	
			2.04	Pertanahan	1,343,158,550	
			15.	Program pembangunan sistem pendaftaran tanah	47,000,000	

NO	PRIORITAS	SKPK YANG MELAKSANAKAN	NAMA PROGRAM		NILAI (Rp)	%
			16.	Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	1,101,751,550	
			17.	Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan	98,407,000	
			18.	Program pengembangan sistem informasi pertanahan	96,000,000	
		Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil			1,958,625,100	
			2.06	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1,958,625,100	
			15.	Program Penataan Administrasi Kependudukan	1,958,625,100	
		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong			3,520,480,000	
			2.07	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3,520,480,000	
			15.	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	593,790,000	
			16.	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	1,072,375,000	
			17.	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	530,795,000	

NO	PRIORITAS	SKPK YANG MELAKSANAKAN	NAMA PROGRAM		NILAI (Rp)	%
			18.	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	918,800,000	
			19.	Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan	404,720,000	
		Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian			2,015,497,410	
			2.10	Komunikasi dan Informatika	2,015,497,410	
			15.	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	508,427,410	
			17.	Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	197,070,000	
			18.	Program kerjasama informasi dengan mas media	25,800,000	
			20.	Program Pengelolaan Data dan Informasi	1,284,200,000	
		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan			2,339,560,388	
			2.17	Perpustakaan	2,182,694,500	
			15.	Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	2,182,694,500	
			2.18	Kearsipan	156,865,888	
			15.	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	21,150,000	
			19.	Program Peningkatan SDM Kearsipan	135,715,888	

NO	PRIORITAS	SKPK YANG MELAKSANAKAN	NAMA PROGRAM		NILAI (Rp)	%
		Sekretariat Daerah			73,393,980,913	
			2.10	Komunikasi dan Informatika	3,899,993,165	
			15.	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	2,949,993,165	
			18.	Program kerjasama informasi dengan mas media	950,000,000	
			4.01	Administrasi Pemerintahan	69,493,987,748	
			16.	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	1,996,694,800	
			17.	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	1,474,965,540	
			25.	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	299,998,550	
			26.	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	2,707,889,000	
			27.	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	56,398,556,418	
			29.	Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama	1,155,900,000	
			30.	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekonomi Pembangunan	1,262,968,940	
			31.	Program Peningkatan Bidang Keistimewaan Aceh dan Kesra	1,774,039,000	

NO	PRIORITAS	SKPK YANG MELAKSANAKAN	NAMA PROGRAM		NILAI (Rp)	%
			33.	Program Peningkatan Fasilitas Sarana dan Prasarana Umum	65,360,000	
			34.	Program Peringatan Hari-Hari Besar	2,357,615,500	
		Sekretariat DPRK			7,780,793,850	
			4.01	Administrasi Pemerintahan	7,780,793,850	
			15.	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	7,780,793,850	
		Kecamatan Banda Sakti			283,610,000	
			4.01	Administrasi Pemerintahan	283,610,000	
			28.	Program Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan dan Pembinaan Masyarakat Pemerintahan Desa	283,610,000	
		Kecamatan Blang Mangat			672,168,050	
			4.01	Administrasi Pemerintahan	672,168,050	
			28.	Program Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan dan Pembinaan Masyarakat Pemerintahan Desa	672,168,050	
		Kecamatan Muara Satu			330,040,000	
			4.01	Administrasi Pemerintahan	330,040,000	

NO	PRIORITAS	SKPK YANG MELAKSANAKAN	NAMA PROGRAM		NILAI (Rp)	%
			28.	Program Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan dan Pembinaan Masyarakat Pemerintahan Desa	330,040,000	
		Kecamatan Muara Dua			579,402,000	
			4.01	Administrasi Pemerintahan	579,402,000	
			28.	Program Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan dan Pembinaan Masyarakat Pemerintahan Desa	579,402,000	
		Inspektorat			6,515,054,400	
			4.02	Pengawasan	6,515,054,400	
			20.	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	5,487,245,400	
			21.	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparaturnya pengawasan	825,000,000	
			22.	Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	202,809,000	
		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			5,822,154,877	
			4.03	Perencanaan	5,822,154,877	
			15.	Program pengembangan data/informasi	335,269,600	
			16.	Program Kerjasama Pembangunan	169,482,800	

NO	PRIORITAS	SKPK YANG MELAKSANAKAN	NAMA PROGRAM		NILAI (Rp)	%
			19.	Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar	455,921,332	
			21.	Program perencanaan pembangunan daerah	1,777,224,641	
			22.	Program perencanaan pembangunan ekonomi	1,114,742,725	
			23.	Program perencanaan sosial dan budaya	118,421,150	
			24.	Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	427,623,029	
			26.	Program Koordinasi Perencanaan Pembangunan	293,592,225	
			30.	Program Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah	1,129,877,375	
		Badan Pengelola Keuangan Daerah			9,728,074,961	
			4.04	Keuangan	9,728,074,961	
			15.	Program Peningkatan Efektifitas Pengeluaran Daerah	927,000,000	
			16.	Program Peningkatan Penerimaan dan Pengamanan Keuangan Daerah	1,916,488,250	
			17.	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	4,717,307,150	
			18.	Program Pembinaan Akuntansi Keuangan Daerah	179,657,300	

NO	PRIORITAS	SKPK YANG MELAKSANAKAN	NAMA PROGRAM		NILAI (Rp)	%
			19.	Program Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Kekayaan Daerah	1,775,266,261	
			20.	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota	212,356,000	
		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			1,430,080,510	
			4.05	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	1,430,080,510	
			16.	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	1,430,080,510	
6	Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup				326,011,485,185	25%
		Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat			303,362,339,019	
			1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	189,164,926,082	
			15.	Pembangunan Jalan dan Jembatan	118,641,468,767	
			16.	Program pembangunan saluran drainase / gorong-gorong	25,861,493,823	
			17.	Program pembangunan turap / talud / bronjong	17,515,130,000	
			18.	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	1,200,000,000	

NO	PRIORITAS	SKPK YANG MELAKSANAKAN	NAMA PROGRAM		NILAI (Rp)	%
			26.	Program Pengembangan; Pengelolaan; dan Konservasi Sungai; Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	1,056,001,000	
			27.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	15,019,782,492	
			29.	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	5,471,050,000	
			31.	Program Perencanaan Tata Ruang	4,200,000,000	
			33.	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	200,000,000	
			1.04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	114,197,412,937	
			15.	Program Pengembangan Perumahan	32,188,136,000	
			16.	Program Lingkungan Sehat Perumahan	20,697,836,100	
			17.	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	250,000,000	
			21.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Umum	61,061,440,837	
		Dinas Lingkungan Hidup			13,181,512,366	
			2.05	Lingkungan Hidup	13,181,512,366	
			15.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	2,272,231,461	
			16.	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	137,400,000	
			18.	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	597,825,000	

NO	PRIORITAS	SKPK YANG MELAKSANAKAN	NAMA PROGRAM		NILAI (Rp)	%
			19.	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	354,748,800	
			24.	Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	886,546,605	
			25.	Program Peningkatan Fasilitas Sarana dan Prasarana Umum	8,411,960,500	
			26.	Program Peningkatan Keindahan dan Kerasian Kota	255,450,000	
			27.	Program Normalisasi Jaringan Air Limbah	265,350,000	
		Dinas Perhubungan			6,212,983,800	
			2.09	Perhubungan	6,212,983,800	
			15.	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	24,000,000	
			16.	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	49,666,800	
			17.	Program peningkatan pelayanan angkutan	381,100,000	
			18.	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	2,382,000,000	
			19.	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	2,619,967,000	
			21.	Program Pengembangan Sarana Penunjang Transportasi	756,250,000	

NO	PRIORITAS	SKPK YANG MELAKSANAKAN	NAMA PROGRAM		NILAI (Rp)	%
		Badan Penanggulangan Bencana Daerah			3,254,650,000	
			4.01	Administrasi Pemerintahan	3,254,650,000	
			35.	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	3,254,650,000	
7	Ketentraman dan Ketertiban Umum				2,617,946,000	0.20%
		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			651,900,000	
			1.05	Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	651,900,000	
			15.	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	12,100,000	
			17.	Program pengembangan wawasan kebangsaan	119,750,000	
			18.	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	263,250,000	
			19.	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	115,250,000	
			20.	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	81,550,000	
			21.	Program pendidikan politik masyarakat	50,000,000	
			23.	Program Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu	10,000,000	

NO	PRIORITAS	SKPK YANG MELAKSANAKAN	NAMA PROGRAM		NILAI (Rp)	%
		Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah			1,966,046,000	
			1.05	Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	1,966,046,000	
			15.	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	1,324,896,000	
			16.	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	569,650,000	
			18.	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	40,100,000	
			19.	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	31,400,000	
III	Prioritas III				157,751,669,441	12%
		Dinas Kesehatan	1.02.01	Kesehatan	8,557,080,139	
			01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	6,481,170,849	
			02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1,903,719,290	
			03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	100,320,000	
			05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	40,000,000	
			06.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	17,330,000	

NO	PRIORITAS	SKPK YANG MELAKSANAKAN	NAMA PROGRAM		NILAI (Rp)	%
			07.	Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja	14,540,000	
		Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1.03.01	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	16,215,561,453	
			01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,236,163,702	
			02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	14,491,897,751	
			05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	200,000,000	
			06.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	22,000,000	
			07.	Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja	265,500,000	
		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.05.01	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	896,129,446	
			01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	661,864,446	
			02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	147,813,000	
			03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	85,000,000	

NO	PRIORITAS	SKPK YANG MELAKSANAKAN	NAMA PROGRAM		NILAI (Rp)	%
			07.	Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja	1,452,000	
		Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah	1.05.02	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	9,715,053,170	
			01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4,428,858,920	
			02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	4,830,547,500	
			03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	167,948,750	
			05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	281,772,000	
			06.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	5,200,000	
			07.	Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja	726,000	
		Dinas Sosial	1.06.01	Sosial	1,915,531,716	
			01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	704,259,216	
			02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	992,982,500	
			03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	182,390,000	

NO	PRIORITAS	SKPK YANG MELAKSANAKAN	NAMA PROGRAM		NILAI (Rp)	%
			05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	30,000,000	
			07.	Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja	5,900,000	
		Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	2.01.01	Tenaga Kerja	1,088,335,600	
			01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	755,135,600	
			02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	186,350,000	
			03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	90,800,000	
			05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	54,450,000	
			07.	Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja	1,600,000	
		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.02.01	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	912,160,000	
			01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	647,270,000	
			02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	151,050,000	

NO	PRIORITAS	SKPK YANG MELAKSANAKAN	NAMA PROGRAM		NILAI (Rp)	%
			03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	50,000,000	
			05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	50,000,000	
			06.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	12,400,000	
			07.	Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja	1,440,000	
		Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan	2.03.01	Pangan	2,351,257,775	
			01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,524,178,775	
			02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	825,879,000	
			07.	Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja	1,200,000	
		Dinas Pertanahan	2.04.01	Pertanahan	3,001,980,000	
			01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	568,350,000	
			02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2,081,200,000	
			03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	190,000,000	

NO	PRIORITAS	SKPK YANG MELAKSANAKAN	NAMA PROGRAM		NILAI (Rp)	%
			05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100,000,000	
			06.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	9,650,000	
			07.	Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja	42,390,000	
			10.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	10,390,000	
		Dinas Lingkungan Hidup	2.05.01	Lingkungan Hidup	26,826,616,346	
			01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	22,908,010,650	
			02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3,357,047,200	
			03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	555,788,496	
			06.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	3,350,000	
			07.	Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja	2,420,000	
		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.06.01	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2,528,365,300	
			01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	944,993,700	

NO	PRIORITAS	SKPK YANG MELAKSANAKAN	NAMA PROGRAM		NILAI (Rp)	%
			02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1,300,500,000	
			03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	198,470,000	
			05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	83,000,000	
			07.	Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja	1,401,600	
		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	2.07.01	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1,362,990,750	
			01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	951,140,000	
			02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	283,650,750	
			03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	106,200,000	
			05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	20,000,000	
			07.	Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja	2,000,000	
		Dinas Perhubungan	2.09.01	Perhubungan	2,466,349,925	
			01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,753,969,925	
			02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	680,928,000	

NO	PRIORITAS	SKPK YANG MELAKSANAKAN	NAMA PROGRAM		NILAI (Rp)	%
			05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	30,000,000	
			07.	Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja	1,452,000	
		Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	2.10.01	Komunikasi dan Informatika	1,285,525,840	
			01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	448,599,200	
			02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	654,001,640	
			03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	122,325,000	
			05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	48,400,000	
			06.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	9,500,000	
			07.	Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja	2,700,000	
		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	2.11.01	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2,267,632,666	
			01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	951,677,666	

NO	PRIORITAS	SKPK YANG MELAKSANAKAN	NAMA PROGRAM		NILAI (Rp)	%
			02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	761,235,000	
			03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	48,400,000	
			05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	10,000,000	
			07.	Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja	1,320,000	
			08.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pembangunan	495,000,000	
		Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	2.13.01	Kepemudaan dan Olahraga	1,641,650,490	
			01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	446,694,490	
			02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1,046,404,000	
			03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	137,100,000	
			05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	10,000,000	
			07.	Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja	1,452,000	
		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.17.01	Perpustakaan	1,286,240,800	
			01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	618,853,000	

NO	PRIORITAS	SKPK YANG MELAKSANAKAN	NAMA PROGRAM		NILAI (Rp)	%
			02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	616,387,800	
			05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	50,000,000	
			07.	Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja	1,000,000	
		Sekretariat Daerah	4.01.03	Administrasi Pemerintahan	24,817,917,150	
			01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	11,220,551,700	
			02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	11,224,400,000	
			03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	321,000,000	
			05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1,230,930,450	
			07.	Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja	141,985,000	
			10.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	679,050,000	
		Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat	4.01.04	Administrasi Pemerintahan	13,799,592,648	
			01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	8,893,686,640	

NO	PRIORITAS	SKPK YANG MELAKSANAKAN	NAMA PROGRAM		NILAI (Rp)	%
			02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	4,071,457,508	
			03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	394,778,500	
			05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	437,920,000	
			07.	Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja	1,750,000	
		Kecamatan Banda Sakti	4.01.05	Administrasi Pemerintahan	747,043,700	
			01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	471,856,700	
			02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	75,987,000	
			03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	60,000,000	
			07.	Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja	1,100,000	
			09.	Program pembinaan Aparatur dan Pemerintahan Desa/Kelurahan/Kecamatan	138,100,000	
		Kecamatan Blang Mangat	4.01.06	Administrasi Pemerintahan	1,098,561,858	
			01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	554,072,505	

NO	PRIORITAS	SKPK YANG MELAKSANAKAN	NAMA PROGRAM		NILAI (Rp)	%
			02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	275,109,600	
			03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	75,000,000	
			07.	Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja	1,100,000	
			09.	Program pembinaan Aparatur dan Pemerintahan Desa/Kelurahan/Kecamatan	193,279,753	
		Kecamatan Muara Satu	4.01.07	Administrasi Pemerintahan	840,613,644	
			01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	490,095,375	
			02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	108,845,294	
			03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	50,000,000	
			07.	Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja	1,100,000	
			09.	Program pembinaan Aparatur dan Pemerintahan Desa/Kelurahan/Kecamatan	190,572,975	
		Kecamatan Muara Dua	4.01.08	Administrasi Pemerintahan	1,132,786,604	
			01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	580,802,404	

NO	PRIORITAS	SKPK YANG MELAKSANAKAN	NAMA PROGRAM		NILAI (Rp)	%
			02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	332,237,400	
			03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	75,600,000	
			07.	Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja	1,225,000	
			09.	Program pembinaan Aparatur dan Pemerintahan Desa/Kelurahan/Kecamatan	142,921,800	
		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.01.09	Administrasi Pemerintahan	6,186,723,560	
			01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2,618,740,000	
			02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3,450,050,000	
			03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	78,783,560	
			05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	36,300,000	
			07.	Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja	2,850,000	
		Inspektorat	4.02.01	Pengawasan	4,291,724,340	
			01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	984,424,340	

NO	PRIORITAS	SKPK YANG MELAKSANAKAN	NAMA PROGRAM		NILAI (Rp)	%
			02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2,868,810,000	
			03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	198,330,000	
			05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	228,350,000	
			07.	Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja	11,810,000	
		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4.03.01	Perencanaan	3,852,114,864	
			01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,205,312,579	
			02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2,413,022,385	
			03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	101,500,000	
			05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	50,000,000	
			07.	Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja	82,279,900	
		Badan Pengelola Keuangan Daerah	4.04.01	Keuangan	5,237,425,262	
			01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2,617,382,462	

NO	PRIORITAS	SKPK YANG MELAKSANAKAN	NAMA PROGRAM		NILAI (Rp)	%
			02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2,233,375,000	
			03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	121,000,000	
			05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	200,000,000	
			06.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	64,215,800	
			07.	Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja	1,452,000	
		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	4.05.01	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	2,728,955,090	
			01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	818,862,340	
			02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1,600,105,250	
			03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	85,637,500	
			05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	220,000,000	
			07.	Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja	4,350,000	
		Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah	4.06.01	Keistimewaan dan Kekhususan	1,297,945,975	
			01.	Program Pelayanan Administrasi	750,440,975	

NO	PRIORITAS	SKPK YANG MELAKSANAKAN		NAMA PROGRAM	NILAI (Rp)	%
				Perkantoran		
			02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	345,105,000	
			03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	199,900,000	
			07.	Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja	2,500,000	
		Sekretariat MPU	4.06.02	Keistimewaan dan Kekhususan	3,023,633,240	
			01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,791,404,525	
			02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1,177,991,215	
			03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	52,837,500	
			07.	Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja	1,400,000	
		Sekretariat Baitul Mal	4.06.03	Keistimewaan dan Kekhususan	2,068,563,590	
			01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,703,999,970	
			02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	258,150,000	
			03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	83,628,000	
			07.	Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja	1,100,000	
			11.	Program Pembinaan Keagamaan dan Adat	21,685,620	

NO	PRIORITAS	SKPK YANG MELAKSANAKAN	NAMA PROGRAM		NILAI (Rp)	%
		Sekretariat Majelis Adat Aceh	4.06.04	Keistimewaan dan Kekhususan	828,797,900	
			01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	601,132,900	
			02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	139,900,000	
			03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	52,165,000	
			05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	34,000,000	
			07.	Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja	1,600,000	
		Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah	4.06.05	Keistimewaan dan Kekhususan	1,480,808,600	
			01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	551,078,600	
			02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	852,450,000	
			03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	26,180,000	
			05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	50,000,000	
			07.	Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja	1,100,000	

4.4 Standar Pelayanan Minimal Kota Lhokseumawe

Dalam peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) menjelaskan Pelayanan Dasar dalam Standar Pelayanan Minimal merupakan urusan pemerintahan yang diselenggarakan Pemerintah daerah baik pemerintah Provinsi maupun pemerintah daerah. Urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayan dasar selanjutnya terdiri atas :

1. Pendidikan
 - Pendidikan anak usia dini
 - Pendidikan dasar
 - Pendidikan kesetaraan
2. Kesehatan
 - Pelayanan Kesehatan Ibu dan Hamil
 - Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
 - Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
 - Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari
 - Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman
 - Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana
 - Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program
5. Ketentraman, ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat
 - Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum
 - Pelayanan informasi rawan bencana
 - Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
 - Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban
6. Sosial
 - rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti

- rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti
- rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti
- rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khusus gelandangan dan pengemis di luar panti
- perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban

Tabel 4.5

Program/Kegiatan yang mendukung Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2020

Bidang Urusan Pemerintahan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Target Kinerja Tahun 2020	Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif	Sumber Dana	SKPK Penanggungjawab	
1. Pendidikan								
15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase Paud dengan Akreditasi B			6,655,060,000			
	15.001.	Pembangunan gedung sekolah	Jumlah Pembangunan gedung sekolah	2 Sekolah	Kota Lhokseumawe	310,000,000	APBK	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	15.009.	Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir	Jumlah Sekolah Yang Dilakukan Pembangunan taman, lapangan dan fasilitas parkir	10 Sekolah	Kota Lhokseumawe	200,000,000	APBK	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	15.015.	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa	Jumlah Pengadaan Buku Siswa	25 Sekolah	Kota Lhokseumawe	210,000,000	APBK	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	15.018.	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Jumlah Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	9 Sekolah	Kota Lhokseumawe	496,000,000	APBK	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	15.019.	Pengadaan mebeluer sekolah	Jumlah Sekolah Yang Mendapatkan Mobiler Sekolah	5 Paket	Kota Lhokseumawe	150,000,000	APBK	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	15.042.	Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah	Jumlah Rehab Ruang Kelas Sekolah	7 Sekolah	Kota Lhokseumawe	150,000,000	APBK	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Bidang Urusan Pemerintahan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Target Kinerja Tahun 2020	Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif	Sumber Dana	SKPK Penanggungjawab	
	15.068.	Peringatan Hari Aksara Internasional	Jumlah Peserta Kejiata Peringatan Hari Aksara Internasional	1 Kegiatan	Kota Lhokseumawe	102,150,000	APBK	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	15.071.	Penambahan Ruang Kelas Sekolah (OTSUS)	Jumlah Sekolah yang terbangun Ruang Kelas Baru	3 Sekolah	Kota Lhokseumawe	2,525,000,000	Otsus	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	15.078.	Bantuan Operasional Pendidikan PAUD (DAK Non FISIK)	Periode Penyediaan BOP PAUD	12 Bulan	Kota Lhokseumawe	192,000,000	Dak Non Fisik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	15.082.	Manajemen Pengelolaan dan Pengawasan Penyaluran DAK BOP PAUD	Periode Manajemen Pengelolaan dan Pengawasan Penyaluran DAK BOP PAUD	12 Bulan	Kota Lhokseumawe	31,550,000	DAK	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	15.086.	Pembangunan RKB PAUD (DAK)	Jumlah Ruang TK Negeri	3 Ruang	Kota Lhokseumawe	300,000,000	DAK	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	15.087.	Rehabilitasi Ruang Kelas PAUD/TK (DAK)	Jumlah Ruang Kelas yang direhab	6 Ruang	Kota Lhokseumawe	350,000,000	DAK	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	15.109.	Pelaksanaan Kegiatan Bunda PAUD	Periode Pelaksanaan Kegiatan Bunda PAUD	12 Bulan	Kota Lhokseumawe	138,135,000	APBK	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	15.111.	Apresiasi GTK PAUD dan Dikmas Berprestasi dan HAI (OTSUS)	Periode GTK PAUD	3 Hari	Kota Lhokseumawe	500,225,000	Otsus	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Bidang Urusan Pemerintahan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan			Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Target Kinerja Tahun 2020	Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif	Sumber Dana	SKPK Penanggungjawab
	15.113.	Pelatihan Pengembangan Kelembagaan PAUD (OTSUS)	Periode Pelatihan Pengembangan Kelembagaan PAUD	4 Hari	Kota Lhokseumawe	500,000,000	Otsus	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun		Persentase Angka Partisipasi Murni SD/MI dan SMP/MTs			54,589,174,150		
	16.001.	Pembangunan gedung sekolah	Jumlah Pembangunan Gedung Kantor	1 Gedung	Kota Lhokseumawe	100,000,000	APBK	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	16.003.	Penambahan ruang kelas sekolah	Jumlah Ruang Sekolah yang Dibangun	3 Ruang	Kota Lhokseumawe	200,000,000	APBK	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	16.007.	Pembangunan sarana dan prasarana olahraga	Jumlah sarana dan prasarana olahraga disekolah	1 Sekolah	Kota Lhokseumawe	280,000,000	APBK	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	16.009.	Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir	Jumlah Sekolah yang Dibangunkan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir	7 Sekolah	Kota Lhokseumawe	1,709,980,000	APBK	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	16.011.	Pembangunan ruang ibadah	Jumlah Ruang Ibadah Yang Di Bangun	1 Sekolah	Kota Lhokseumawe	200,000,000	APBK	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	16.012.	Pembangunan perpustakaan sekolah	Jumlah Pembangunan Perpustakaan	1 Sekolah	Kota Lhokseumawe	200,000,000	APBK	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	16.014.	Pembanguna sarana air bersih dan sanitary	Jumlah Sarana Air Bersih dan Sanitary	10 Sekolah	Kota Lhokseumawe	1,185,000,000	APBK	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	16.015.	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Buku dan Alat Tulis Sekolah	43 Sekolah	Kota Lhokseumawe	1,795,000,000	APBK	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Bidang Urusan Pemerintahan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Target Kinerja Tahun 2020	Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif	Sumber Dana	SKPK Penanggungjawab	
	16.018.	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Jumlah Pengadaan Alat Peraga Siswa	26 Sekolah	Kota Lhokseumawe	3,335,000,000	APBK	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	16.019.	Pengadaan mebeluer sekolah	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Meubeler Sekolah	9 Sekolah	Kota Lhokseumawe	800,000,000	APBK	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	16.020.	Pengadaan perlengkapan sekolah	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Sekolah	2 Paket	Kota Lhokseumawe	450,000,000	APBK	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	16.023.	Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah	Jumlah Sekolah yang Terpelihara	3 Sekolah	Kota Lhokseumawe	280,000,000	APBK	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	16.030.	Pemeliharaan rutin/berkala taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Pakir	10 Sekolah	Kota Lhokseumawe	400,000,000	APBK	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	16.044.	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Jumlah Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	2 Sekolah	Kota Lhokseumawe	100,000,000	APBK	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	16.070.	Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa	Periode Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa	4 hari	Kota Lhokseumawe	215,440,000	APBK	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	16.075.	Penyediaan beasiswa transisi	Penyediaan beasiswa transisi	1 kali	Kota Lhokseumawe	35,000,000	APBK	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	16.079.	Rehabilitasi sedang/berat ruang guru sekolah (DAK)	Jumlah Ruang Guru Sekolah yang Direnovasi	2 Sekolah	Kota Lhokseumawe	260,000,000	DAK	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	16.083.	Penambahan Ruang Kelas Sekolah (OTSUS)	Jumlah Sekolah yang terbangun Ruang Kelas Baru	4 Ruang	Kota Lhokseumawe	1,000,000,000	OTSUS	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Bidang Urusan Pemerintahan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Target Kinerja Tahun 2020	Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif	Sumber Dana	SKPK Penanggungjawab	
	16.085.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Perpustakaan (DAK)	Jumlah Ruang Perpustakaan Sekolah yang Direnovasi	4 Ruang	Kota Lhokseumawe	599,000,000	DAK	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	16.087.	Pembangunan Pagar dan Sarana Pendukung (OTSUS)	Jumlah Pembangunan Pagar dan Sarana Pendukung	2 Sekolah	Kota Lhokseumawe	1,102,500,000	OTSUS	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	16.093.	Penyelenggaraan UN dan UAS	Jumlah Panitia Penyelenggaraan UN dan US	22 Orang	Kota Lhokseumawe	125,093,900	APBK	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	16.094.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah (DAK)	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Direnovasi	30 Ruang	Kota Lhokseumawe	1,331,000,000	DAK	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	16.095.	Pembangunan Ruang Ibadah (OTSUS)	Jumlah Pembangunan Ruang Ibadah	3 Sekolah	Kota Lhokseumawe	1,600,000,000	OTSUS	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	16.096.	Pengadaan Buku Perpustakaan Sekolah (DAK)	Jumlah pengadaan Buku Perpustakaan Disekolah	11 Sekolah	Kota Lhokseumawe	788,750,000	DAK	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	16.097.	Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)	Jumlah Hari Penerimaan Peserta Didik Baru	3 Hari	Kota Lhokseumawe	5,072,000	APBK	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	16.109.	Pembangunan Pagar dan Sarana Pendukung	Jumlah Pagar Sekolah yang Dibangun	5 Sekolah	Kota Lhokseumawe	1,376,499,000	APBK	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	16.118.	Pembangunan RKB (DAK)	Jumlah Ruang Sekolah yang Dibangun	31 Ruang	Kota Lhokseumawe	3,896,000,000	DAK	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	16.121.	Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional (O2SN)	Periode Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional (O2SN)	4 Hari	Kota Lhokseumawe	276,300,000	APBK	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Bidang Urusan Pemerintahan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Target Kinerja Tahun 2020	Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif	Sumber Dana	SKPK Penanggungjawab	
	16.127.	Pengadaan Sarana PJOK dan / atau Seni Budaya (DAK)	Jumlah Pengadaan Sarana PJOK dan / atau Seni Budaya (DAK)	72 Paket	Kota Lhokseumawe	2,592,000,000	DAK	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	16.129.	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS SD)	Periode Bantuan Operasional Sekolah (BOS SD)	58 Sekolah	Kota Lhokseumawe	13,366,842,000	Dana Bos	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	16.130.	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS SMP)	Periode Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS SMP)	18 Sekolah	Kota Lhokseumawe	6,817,000,000	Dana Bos	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	16.131.	Pengadaan Media Pendidikan TIK (DAK)	Jumlah Pengadaan Media Pendidikan TIK (DAK)	11 Sekolah	Kota Lhokseumawe	126,000,000	DAK	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	16.132.	Pengadaan Alat Laboratorium Komputer (DAK)	Jumlah Pengadaan Alat Laboratorium Komputer (DAK)	5 Sekolah	Kota Lhokseumawe	882,000,000	DAK	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	16.133.	Liga Sepak Bola (GALA) SMP	Periode Liga Sepak Bola (GALA) SMP	5 hari	Kota Lhokseumawe	107,130,000	APBK	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	16.134.	Pembangunan Toilet (Jamban) Beserta Sanitasinya (DAK)	Jumlah Sarana Toilet (Jamban) dan Sanitary yang Terbangun	11 Sekolah	Kota Lhokseumawe	945,000,000	DAK	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	16.135.	Penyelenggaraan Try Out dan Remedial Teaching	Periode Penyelenggaraan TRY Out dan Remedial Teaching Tingkat SMP dan SD	2 hari	Kota Lhokseumawe	126,742,250	APBK	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	16.136.	Olimpiade Siswa Nasional (OSN) SD dan SMP	Periode Olimpiade Siswa Nasional (OSN) SD dan SMP	3 Hari	Kota Lhokseumawe	105,625,000	APBK	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Bidang Urusan Pemerintahan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Target Kinerja Tahun 2020	Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif	Sumber Dana	SKPK Penanggungjawab	
	16.137.	Rehabilitasi Sedang/Berat Jamban Siswa/Guru (DAK)	Jumlah Jamban Siswa/Guru Sekolah yang direhab	5 Sekolah	Kota Lhokseumawe	243,000,000	DAK	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	16.138.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kantor (DAK)	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kantor	1 Ruang	Kota Lhokseumawe	260,000,000	DAK	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	16.140.	Pembangunan Ruang Perpustakaan (DAK)	Jumlah Pembangunan Ruang Perpustakaan	2 Sekolah	Kota Lhokseumawe	400,000,000	DAK	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	16.141.	Pengadaan Peralatan Laboratorium IPA (DAK)	Jumlah Peralatan Laboratorium IPA	21 Sekolah	Kota Lhokseumawe	172,200,000	DAK	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	16.143.	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium dan Ruang Praktikum Sekolah (DAK)	Jumlah Sekolah yang direhab ruang laboratorium	5 Sekolah	Kota Lhokseumawe	650,000,000	DAK	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	16.145.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pramuka (OTSUS)	Jumlah Sarana dan Prasarana Pramuka	1 Gedung	Kota Lhokseumawe	1,500,000,000	OTSUS	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	16.147.	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Serbaguna/Aula Sekolah (OTSUS)	Jumlah Gedung Serbaguna/Aula Sekolah	2 Sekolah	Kota Lhokseumawe	1,650,000,000	OTSUS	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	16.148.	Pelatihan dan Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) Tingkat SD dan SMP (OTSUS)	Periode Pelatihan dan Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) Tingkat SD dan SMP	4 Hari	Kota Lhokseumawe	500,000,000	OTSUS	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Bidang Urusan Pemerintahan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan			Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Target Kinerja Tahun 2020	Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif	Sumber Dana	SKPK Penanggungjawab
	16.149.	Pendalaman Materi Kurikulum Tingkat SD dan SMP (OTSUS)	Jumlah Peserta Kegiatan Pedalaman Kurikulum Bagi Pendidik	500 Guru	Kota Lhokseumawe	500,000,000	OTSUS	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan		Cakupan Penyelenggaraan Peningkatan Mutu Pendidikan			2,342,420,000		
	20.004.	Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG)	Jumlah Peserta Pembinaan KKG Guru SD	80 Orang	Kota Lhokseumawe	95,325,000	APBK	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	20.052.	Pelatihan Guru Mendongeng Tingkat TK dan PAUD	Jumlah Peserta Pelatihan Guru Mendongeng	80 Orang	Kota Lhokseumawe	97,095,000	APBK	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	20.053.	Pelatihan Guru Seni Tari Tingkat SD dan SMP	Periode Pelatihan Guru Seni Tari	1 Kali	Kota Lhokseumawe	50,000,000	APBK	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	20.056	Pendidikan Berkelanjutan bagi Pendidik untuk memenuhi Standar Kompetensi (OTSUS)	Jumlah Peserta Program PPG	110 Orang	Kota Lhokseumawe	2,100,000,000	APBK	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2. Kesehatan								
32	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak		meningkatnya kemampuan petugas			467,150,000		
	32.019.	Pelatihan Audit Maternal Perinatal (AMP) (DBH-PR)	Jumlah Peserta Pelatihan Audit Maternal Perinatal (AMP)	50 Orang	Kota Lhokseumawe	52,350,000	DBH-PR	Dinas Kesehatan

Bidang Urusan Pemerintahan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Target Kinerja Tahun 2020	Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif	Sumber Dana	SKPK Penanggungjawab	
	32.031.	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Berkebutuhan Khusus (DBH-PR)	Jumlah Petugas Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Berkebutuhan Khusus	45 Orang	Kota Lhokseumawe	53,000,000	DBH-PR	Dinas Kesehatan
	32.033.	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Sekolah Dasar (SD) dan Sederajat (DBH-PR)	Jumlah Peugas Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Sekolah Dasar (SD) dan Sederajat	75 Orang	Kota Lhokseumawe	42,000,000	DBH-PR	Dinas Kesehatan
	32.034.	Pelatihan Usaha Kesehatan Sekolah dan Perilaku Sehat Anak Usia Sekolah (DBH-PR)	Jumlah Peserta Pelatihan Usaha Kesehatan Sekolah dan Perilaku Sehat Anak Usia Sekolah	70 Orang	Kota Lhokseumawe	32,800,000	DBH-PR	Dinas Kesehatan
	32.037.	Peningkatan Kapasitas Pemeriksaan Payudara dan Kanker Servik Usia Reproduksi (DBH-PR)	Jumlah Peserta Peningkatan Kapasitas Pemeriksaan Payudara dan Kanker Servik Usia Reproduksi	40 Orang	Kota Lhokseumawe	52,000,000	DBH-PR	Dinas Kesehatan
	32.038.	Peningkatan Kapasitas Petugas dan Masyarakat Deteksi Gangguan Gizi Prahamil dan Masa Subur (DBH-PR)	Jumlah Peserta Peningkatan Kapasitas Petugas dan Masyarakat Deteksi Gangguan Gizi Prahamil dan Masa Subur	75 Orang	Kota Lhokseumawe	44,000,000	DBH-PR	Dinas Kesehatan

Bidang Urusan Pemerintahan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Target Kinerja Tahun 2020	Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif	Sumber Dana	SKPK Penanggungjawab
	32.039.	Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Pemeliharaan Kesehatan Bumil, Bulin, Bufas (DBH-PR)	Jumlah Pelatihan Peserta Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Pemeliharaan Kesehatan Bumil, Bulin, Bufas	76 Orang	Kota Lhokseumawe	21,000,000	DBH-PR Dinas Kesehatan
	32.041.	Pelatihan Asuhan Persalinan Normal (APN) (DBH-PR)	Jumlah Peserta Pelatihan Asuhan Persalinan Normal (APN)	80 Orang	Kota Lhokseumawe	32,000,000	DBH-PR Dinas Kesehatan
	32.042.	Pelatihan Pelayanan Islami Pada Bidan (DBH-PR)	Jumlah Peserta Pelatihan Pelayanan Islami Pada Bidan	80 Orang	Kota Lhokseumawe	52,000,000	DBH-PR Dinas Kesehatan
	32.043.	Pelatihan Kegawatdaruratan Bayi (DBH-PR)	Jumlah Peserta Pelatihan Kegawatdaruratan Bayi	30 Orang	Kota Lhokseumawe	32,000,000	DBH-PR Dinas Kesehatan
	32.044.	Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Baduta (DBH-PR)	Periode Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Baduta	12 Bulan	Kota Lhokseumawe	22,000,000	DBH-PR Dinas Kesehatan
	32.045.	Pertemuan Lintas Sektor dan Lintas Program TP-UKS (DBH-PR)	Periode Pertemuan Lintas Sektor dan Lintas Program TP-UKS	12 Bulan	Kota Lhokseumawe	32,000,000	DBH-PR Dinas Kesehatan
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
27	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Persentase akses Air Minum/ air bersih			15,019,782,492		

Bidang Urusan Pemerintahan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Target Kinerja Tahun 2020	Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif	Sumber Dana	SKPK Penanggungjawab	
	27.001.	Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah	Jumlah Prasarana dan Sarana Air Minum bagi Masyarakat	70 Paket	Kota Lhokseumawe	7,268,859,500	APBK	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	27.010.	Pengembangan sistem distribusi air minum (DAK)	Jumlah Pemasangan Jaringan Air Minum	1 Paket	Kota Lhokseumawe	1,561,044,992	DAK	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	27.011.	Peningkatan Prasarana Sanitasi (DAK)	Jumlah Prasarana Sanitasi yang terbangun	92 Unit	Kota Lhokseumawe	6,189,878,000	DAK	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman								
15	Program Pengembangan Perumahan		Rasio Permukiman Layak Huni			32,188,136,000		
	15.014.	Pembangunan Rumah Untuk Masyarakat Kurang Mampu	Jumlah Rumah Yang Dibangun Untuk Masyarakat Kurang Mampu	158 Unit	Kota Lhokseumawe	31,975,000,000	APBK	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	15.015.	Pembangunan Rumah Untuk Masyarakat Kurang Mampu (DAK)	Jumlah Rumah untuk Masyarakat Kurang Mampu	150 Unit	Kota Lhokseumawe	213,136,000	DAK	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
5. Ketentraman, ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat								
16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal		Persentase Penegakan Perda/Qanun			486,000,000		

Bidang Urusan Pemerintahan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan			Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Target Kinerja Tahun 2020	Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif	Sumber Dana	SKPK Penanggungjawab
	16.006.	Penertiban Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Pelaksanaan Penertiban Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	6 Kali	Kota Lhokseumawe	486,600,000	APBK	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah
35	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam		Cakupan Kegiatan Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam			3,254,650,000	APBK	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	35.001.	Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam	Periode Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam	12 Bulan	Kota Lhokseumawe	37,400,000	APBK	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	35.009.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Periode Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	12 Bulan	Kota Lhokseumawe	148,000,000	APBK	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	35.014.	Pengiriman Dan Pendistribusian Logistik Penanggulangan Bencana	Periode Pengiriman dan Pendistribusian Logistik	12 Bulan	Kota Lhokseumawe	43,000,000	APBK	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	35.022.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran (OTSUS)	Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran dan Mobil Water Supply	2 Unit	Kota Lhokseumawe	3,026,250,000	ORSUS	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KOTA

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa Perencanaan Pembangunan Daerah berorientasi pada proses dengan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis dan atas-bawah dan bawah atas. Pendekatan teknokratik dalam perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah. Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Selanjutnya pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih kedalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD, sedangkan Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari desa, kecamatan, daerah kabupaten/kota, daerah provinsi, hingga nasional.

Perencanaan Pembangunan Daerah dilakukan terhadap Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Perangkat Daerah. Rencana Pembangunan Daerah salah satunya adalah penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK) Lhokseumawe, sedangkan Rencana Perangkat Daerah terdiri atas Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah. Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK) Lhokseumawe merupakan penjabaran dari RPJM Kota Lhokseumawe yang memuat Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, Prioritas Pembangunan Daerah, serta Rencana Kerja dan Pendanaan untuk jangka waktu

1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Program Strategis Nasional (PSN) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Sedangkan Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJM Kota Lhokseumawe dan bersifat indikatif. Oleh karena itu antara dokumen RPJM Kota Lhokseumawe, Renstra Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe serta Dokumen RKPK Lhokseumawe memiliki keterkaitan antara satu sama lain sehingga Bappeda selaku perangkat daerah yang diberi tugas menyusun dan menghimpun setiap masukan dalam proses penyusunan RKPK, dianjurkan untuk melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan dalam proses penyusunannya. Demikian halnya dengan Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah diharapkan melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Bappeda dan para pemangku kepentingan.

Proses koordinasi, sinergi dan harmonisasi tersebut perlu dilakukan dalam menyusun RKPK Lhokseumawe Tahun 2020 agar terciptanya Rencana Kerja dan Pendanaan yang serasi didalam RKPK Lhokseumawe Tahun 2020. Selain itu RKPK Lhokseumawe disusun berdasarkan evaluasi pembangunan dan capaian kinerja yang telah direncanakan di dalam RPJM Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022 dan RKPK Lhokseumawe Tahun 2018 sehingga diharapkan menghasilkan Rencana kerja yang sinkron satu sama lain. Rencana kerja juga dirumuskan atas aspirasi dan kepentingan masyarakat yang dirangkum dari hasil musrenbang, hasil reses para anggota DPRK, masukan dari para pemangku kepentingan sebagai bentuk partisipatif serta kebijakan-kebijakan daerah yang mengikuti kebutuhan dan perkembangan zaman, yang diverifikasi dan diinput oleh setiap OPD dalam bentuk program dan kegiatan di dalam Aplikasi Sistem Perencanaan Terpadu (e-Planning) Kota Lhokseumawe sehingga

memberi manfaat dan memiliki nilai kegunaan tinggi bagi masyarakat.

Dalam Penyusunan Rancangan RKPK Lhokseumawe Tahun 2020, pokok-pokok pikiran DPRK merupakan salah satu acuan yang menjadi dasar penentuan arah kebijakan RKPK 2020. Berdasarkan hasil reses yang telah dilakukan oleh DPRK Kota Lhokseumawe, dapat disajikan hasil reses dan pokok-pokok pikiran DPRK berupa beberapa masukan hasil reses yang dilakukan di empat kecamatan dalam wilayah Kota Lhokseumawe. Pelaksanaan reses dilakukan dewan secara individu dimasing-masing dapil dalam wilayah Kecamatan Banda Sakti, kunjungan reses dilakukan secara formal maupun informal bersama dengan ulama, Tokoh Masyarakat, Pemuda, Mahasiswa maupun dengan seluruh Komponen Masyarakat. Dari hasil kunjungan tersebut diperoleh beberapa saran-saran yang menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam menentukan sasaran dan arah pembangunan Kota Lhokseumawe, beberapa saran-saran tersebut antara lain:

1. Program di Bidang Kesehatan terdapat beberapa saran misalkan Program pemberantasan sarang nyamuk malaria dengan mekanisme Fogging, Pemberantasan narkoba dan sosialisasi bahaya narkoba, Masyarakat berharap agar pemberian makanan, minuman untuk kesehatan bayi dan anak-anak dapat ditingkatkan jumlahnya, Pelaksanaan pos pelayanan Terpadu lebih ditingkatkan durasi pelaksanaannya, Pemberian Obat-obatan yang lebih bermutu (Paten) dan Program pemberian makanan tambahan (PMT).
2. Program di Bidang Pendidikan terdapat beberapa saran-saran antara lain Pemberdayaan Para Santri dan Pelajar di setiap pesantren seperti pengadaan baju, pemberian beasiswa dan pelatihan skill, Pembangunan dan Rehabilitasi Balai pengajian dan pembangunan sarana air seperti Sumur bor, Pelaksanaan Program Pembekalan dasar berupa pembentukan sikap, pengetahuan dan keterampilan kerja di setiap Gampong untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat, Pengadaan Alat

Praktek dan Peraga Siswa di sekolah, program pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE) bagi sekolah-sekolah yang berdomisili di gampong-gampong, Pengadaan buku-buku bacaan dan kitab kuning untuk pesantren dan Pengadaan perlengkapan sekolah tambahan bagi anak-anak kurang mampu.

3. Program di Bidang Ekonomi terdapat beberapa saran-saran antara lain Pemberian modal dan pelatihan untuk usaha kecil dan menengah, Pemberian modal dan pelatihan untuk para nelayan, Program Ekonomi kreatif bagi masyarakat, Pelatihan Menjahit Bagi Masyarakat, program bantuan alat-alat kebutuhan bagi para nelayan, Pengadaan Keramba jaring Apung, Pengadaan Pakan Udang dengan mekanisme pengelolaan usaha kelompok dan Pembagian Bibit Pinang Betara bagi para petani dimasyarakat
4. Program di Bidang Sarana dan Prasarana terdapat beberapa saran-saran antara lain Pembangunan dan Rehabilitasi Meunasah-Meunasah di Setiap Gampong yang mengalami kerusakan, Pengadaan Tong Sampah disetiap Lingkungan Gampong, Peningkatan Jalan Rabat Beton yang memadai, Peningkatan Jalan yang menghubungkan antar gampong, Pemasangan Paving Blok, Revitalisasi TPI bagi para Nelayan, Peningkatan gedung-gedung pelayanan publik seperti Puskesmas, Pembangunan Lampu Jalan Bagi Masyarakat, Pembangunan dan Rehabilitasi mesjid sebagai fasilitas ibadah masyarakat, Pembangunan Saluran dan Talud di Gampong, Pembangunan Tempat Wudhu di Meunasah Gampong, Pembangunan MCK Umum yang layak di setiap gampong
5. Program di Bidang Sosial terdapat beberapa saran-saran antara lain Pembangunan dan Rehabilitasi terhadap Rumah Tidak Layak Huni untuk masyarakat, Pengadaan Sound System Bagi Masyarakat, Pengadaan Kursi Roda bagi Masyarakat, Pengadaan Sarana Keagamaan seperti kain sarung, ambal, sajadah, baju seragam majelis taklim dan sound system untuk meunasah, balai pengajian mau pun masjid, Pengadaan Sarana sosial gampong seperti tenda gampong, kursi gampong,

Pengadaan AC dan CCTV untuk Meunasah dan Lembaga Pendidikan yang ada di Gampong, Pembangunan Sarana Olahraga untuk masyarakat gampong, Pembentukan Qanun perihal aktifitas abak diluar rumah, Sosialisasi secara continue kepada masyarakat menyangkut tentang pelaksanaan syariat Islam di Kota Lhokseumawe, sosialisasi terhadap qanun yang telah disahkan kepada masyarakat.

6. Program di Bidang Pelayanan Publik terdapat beberapa saran-saran antara lain Pembenahan pengelolaan dana desa yang transparan, Reformasi birokrasi seperti Pembenahan dalam hal perizinan yang selama ini dirasakan sulit, Peningkatan kualitas dan kuantitas patroli satpol PPWH dalam menciptakan suasana nyaman dimasyarakat

Oleh karena itu, mengingat proses perumusan Rencana Kerja Pemerintah yang begitu kompleks dan syarat dengan beragam macam kebutuhan masyarakat serta tidak terhindarnya dari dinamisnya perkembangan zaman baik itu perkembangan teknologi, perkembangan peraturan-peraturan terbaru, perkembangan infrastruktur politik dan sosial serta perkembangan lain yang menyebabkan setiap tahun Program dan Kegiatan di dalam RKPK Lhokseumawe selalu mengalami beberapa penambahan Program dan Kegiatan diluar Program dalam RPJM dan Kegiatan didalam Renstra Perangkat Daerah. Penambahan-penambahan rencana kerja ini terjadi karena adanya tuntutan peraturan yang lebih tinggi seperti Peraturan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh, terjadinya penambahan Perangkat Daerah Baru berdasarkan Qanun dan Peraturan Walikota, terjadinya kebutuhan yang mendesak, perubahan nomenklatur nama kegiatan serta terjadinya penambahan atas dasar kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan dimasyarakat.

Penambahan kegiatan tersebut dilakukan berdasarkan permohonan dari Perangkat Daerah itu sendiri dengan membuat Berita Acara (BAP) Penambahan Program dan Kegiatan yang ditandatangani bersama oleh Kepala OPD selaku Penanggung Jawab Renja dan Pengusul Kegiatan, Kepala Bappeda selaku

Pengelola Umum Aplikasi E-Planning dan Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPK Lhokseumawe. Setiap penambahan berita acara (BAP) tersebut sebagaimana terdapat dalam lampiran RKPK Lhokseumawe Tahun 2020 ini, akan dituangkan dalam Revisi RPJM Kota Lhokseumawe yang akan datang. Penjelasan berkenaan rincian penambahan Program dan Kegiatan tersebut di setiap OPD Kota Lhokseumawe adalah sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe, usulan penambahan kegiatan dituangkan dalam BAP yang ditandatangani bersama oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan selaku Penanggung Jawab Renja dan Pengusul Kegiatan, Kepala Bappeda selaku Pengelola Umum Aplikasi E-Planning dan Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPK Kota Lhokseumawe. Usulan Penambahan tersebut sebanyak 10 (sepuluh) kegiatan antara lain:
 - 1) Pendukung Pengelolaan Museum
 - 2) Pendukung Pengelolaan Gedung Kesenian
 - 3) Pembangunan Taman dan Halaman Kantor
 - 4) Pembangunan Gedung Sekolah
 - 5) Pembangunan Gedung Sekolah
 - 6) Pembangunan sarana dan prasarana olahraga
 - 7) Pembangunan perpustakaan sekolah
 - 8) Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah
 - 9) Penyediaan beasiswa transisi
 - 10) Monitoring, evaluasi dan pelaporan

2. Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe, usulan penambahan kegiatan dituangkan dalam BAP yang ditandatangani bersama oleh Kepala Dinas Kesehatan selaku Penanggung Jawab Renja dan Pengusul Kegiatan, Kepala Bappeda selaku Pengelola Umum Aplikasi E-Planning dan Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPK Lhokseumawe. Usulan Penambahan tersebut sebanyak 13 (tiga belas) kegiatan antara lain:
 - 1) Pelayanan Bantuan Kesehatan untuk Kelompok Khusus

- 2) Pembangunan, Peningkatan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya (DBH-PR)
 - 3) Pemeliharaan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya (DBH-PR)
 - 4) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (DBH-PR)
 - 5) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor (DBH-PR)
 - 6) Sosialisasi Bahaya Penyalahgunaan Narkoba
 - 7) Peningkatan Pengetahuan Siswa SD/SMP/SMA tentang Prilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)(DBH-PR)
 - 8) Peningkatan Pengetahuan Siswa SD/SMP/SMA tentang Germas (DBH-PR)
 - 9) Peningkatan Pengetahuan Siswa SD/SMP/SMA tentang Kesehatan Reproduksi (DBH-PR)
 - 10) Peningkatan Pengetahuan Siswa SD/SMP/SMA tentang Hygiene dan Sanitasi (DBH-PR)
 - 11) Peningkatan Pengetahuan Siswa SD/SMP/SMA tentang Penyakit Menular (DBH-PR)
 - 12) Peningkatan Pengetahuan Siswa SD/SMP/SMA tentang Penyakit DBD (DBH-PR)
 - 13) Peningkatan Pengetahuan Siswa SD/SMP/SMA tentang Penyakit Tuberculosis (DBH-PR)
3. Dinas PUPR Kota Lhokseumawe, usulan penambahan kegiatan dituangkan dalam BAP yang ditandatangani bersama oleh Kepala Dinas PUPR selaku Penanggung Jawab Renja dan Pengusul Kegiatan, Kepala Bappeda selaku Pengelola Umum Aplikasi E-Planning dan Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPK Kota Lhokseumawe. Usulan Penambahan tersebut sebanyak 9 (sembilan) kegiatan antara lain:
- 1) Pengadaan Kendaraan dinas/operasional
 - 2) Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
 - 3) Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan
 - 4) Penyusunan Standar Pelayanan Minimum (SPM)

- 5) Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya
 - 6) Pemeliharaan dan rehabilitasi embung; dan bangunan penampung air lainnya
 - 7) Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan
 - 8) Revisi rencana tata ruang
 - 9) Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman berbasis masyarakat
4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Lhokseumawe, usulan penambahan kegiatan dituangkan dalam BAP yang ditandatangani bersama oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selaku Penanggung Jawab Renja dan Pengusul Kegiatan, Kepala Bappeda selaku Pengelola Umum Aplikasi E-Planning dan Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPK Kota Lhokseumawe. Usulan Penambahan tersebut sebanyak 1 (satu) kegiatan yakni Peningkatan Kapasitas Tim Kewaspadaan Dini Kota Lhokseumawe
5. Dinas Sosial Kota Lhokseumawe, usulan penambahan kegiatan dituangkan dalam BAP yang ditandatangani bersama oleh Kepala Dinas Sosial selaku Penanggung Jawab Renja dan Pengusul Kegiatan, Kepala Bappeda selaku Pengelola Umum Aplikasi E-Planning dan Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPK Kota Lhokseumawe. Usulan Penambahan tersebut sebanyak 11 (sebelas) kegiatan antara lain:
- 1) Pengadaan Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan Masyarakat Tidak Mampu
 - 2) Sosialisasi Program Keluarga Harapan (PKH) / Rastra / BPNT
 - 3) Sunat Massal Bagi Anak Tidak Mampu / Yatim Piatu
 - 4) Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai
 - 5) Sosialisasi Regulasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dengan Perangkat Gampong

- 6) Verifikasi Basis Data Terpadu (BDT)
 - 7) Pendampingan Penyaluran Bantuan Sosial dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
 - 8) Respon Kasus Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
 - 9) Pengadaan Alat Bantu Dan Penyandang Cacat (OTSUS)
 - 10) Pendataan dan Pembinaan Penyandang Penyakit Sosial
 - 11) Pembangunan, Peningkatan, Pengadaan Sarana dan Prasarana Gudang Logistik (OTSUS)
6. Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan Kota Lhokseumawe, usulan penambahan kegiatan dituangkan dalam BAP yang ditandatangani bersama oleh Kepala Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan selaku Penanggung Jawab Renja dan Pengusul Kegiatan, Kepala Bappeda selaku Pengelola Umum Aplikasi E-Planning dan Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPK Lhokseumawe. Usulan Penambahan tersebut sebanyak 14 (empat belas) kegiatan antara lain:
- 1) Pelaksanaan Pekan Nasional (PENAS) KTNA
 - 2) Koordinasi Perumusan Kebijakan, Evaluasi dan Pengendalian Ketahanan Pangan
 - 3) Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan
 - 4) Kemandirian dan Penanganan Daerah Rawan Pangan
 - 5) Sosialisasi Undang-undang tentang Perlindungan Lahan Pertanian dan Pangan Berkelanjutan (PLP2B)
 - 6) Penyusunan Rencana Perlindungan lahan Pertanian dan Pangan Berkelanjutan
 - 7) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3)
 - 8) Jambore Penyuluh
 - 9) Temu Usaha Pelaku Perikanan Kota Lhokseumawe
 - 10) Pembuatan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan

- 11) Pengadaan Kendaraan dinas/operasional
 - 12) Pekan Daerah (PEDA)
 - 13) Penyuluhan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut
 - 14) Pembangunan Pangkalan pendaratan Ikan
7. Dinas Pertanahan Kota Lhokseumawe, usulan penambahan Program dan Kegiatan dituangkan dalam BAP yang ditandatangani bersama oleh Kepala Dinas Pertanahan selaku Penanggung Jawab Renja dan Pengusul Kegiatan, Kepala Bappeda selaku Pengelola Umum Aplikasi E-Planning dan Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPK Lhokseumawe. Usulan Penambahan ini terjadi akibat Dinas Pertanahan merupakan OPD baru di Kota Lhokseumawe berdasarkan Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 37 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanahan Kota Lhokseumawe. Penambahan program dan kegiatan ini terjadi pada program dan kegiatan rutin yang ada dalam setiap OPD dan kegiatan tambahan berdasarkan Tupoksi Dinas Pertanahan yang dituangkan dalam BAP Penambahan Kegiatan. Adapun penambahan kegiatan berdasarkan tupoksi tersebut sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) kegiatan antara lain:
- 1) Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah
 - 2) Penetapan Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee
 - 3) Penyusunan Kebijakan Daerah Bidang Pertanahan
 - 4) Pengendalian pelaksanaan kebijakan daerah bidang pertanahan
 - 5) Bimtek Tata Cara Pengadaan Tanah
 - 6) Identifikasi Pemegang Hak Tanah Atas Pengadaan Tanah Pemerintah
 - 7) Peningkatan Pengsertifikatan Tanah Milik Masyarakat

- 8) Monitoring dan Evaluasi Perolehan/Pemanfaatan Tanah Milik Pemerintah
- 9) Inventarisasi Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
- 10) Pemetaan Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
- 11) Monitoring dan Evaluasi Pertanahan
- 12) Inventarisasi dan Pemetaan Tanah Kosong/Tanah Terlantar
- 13) Penataan Tanah Ulayat
- 14) Pendayagunaan Tanah Kosong
- 15) Penatausahaan Batas Bidang Tanah
- 16) Pemetaan Nilai Bidang Tanah
- 17) Pemetaan Perizinan Atas Bidang Tanah
- 18) Penataan Kepemilikan dan Pemanfaatan Tanah Pemerintah
- 19) Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee
- 20) Inventarisasi Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah
- 21) Pembinaan Pendayagunaan Pemanfaatan Tanah Redistribusi
- 22) Pemberian Rekomendasi Teknis Atas Rencana Penggunaan Tanah
- 23) Pemberian Izin Lokasi Untuk Penanaman Modal/Investasi
- 24) Pemberian Rekomendasi Teknis Atas Pemberian Izin Membuka Tanah
- 25) Penyuluhan Hukum Pertanahan
- 26) Pengadaan/Pembebasan Tanah
- 27) Inventarisasi Data Permasalahan Tanah
- 28) Penanganan Sengketa / Permasalahan Tanah Garapan / Tanah Kosong / Tanah Ulayat
- 29) Penyelesaian Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee
- 30) Penyelesaian Permasalahan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah
- 31) Penyelesaian Permasalahan Izin Lokasi

- 32) Penyelesaian Permasalahan Konsolidasi Tanah
 - 33) Penanganan Konflik dan Sengketa Penguasaan, Kepemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
 - 34) Koordinasi Antar Lembaga Pertanahan
 - 35) Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah
 - 36) Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan
 - 37) Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Pertanahan
8. Dinas Lingkungan Hidup Kota Lhokseumawe, usulan penambahan kegiatan dituangkan dalam BAP yang ditandatangani bersama oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup selaku Penanggung Jawab Renja dan Pengusul Kegiatan, Kepala Bappeda selaku Pengelola Umum Aplikasi E-Planning dan Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPK Lhokseumawe. Usulan Penambahan tersebut sebanyak 2 (dua) kegiatan antara lain:
- 1) Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)
 - 2) Penyusunan Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD)
9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe, usulan penambahan kegiatan dituangkan dalam BAP yang ditandatangani bersama oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selaku Penanggung Jawab Renja dan Pengusul Kegiatan, Kepala Bappeda selaku Pengelola Umum Aplikasi E-Planning dan Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPK Lhokseumawe. Usulan Penambahan tersebut sebanyak 5 (lima) kegiatan antara lain:
- 1) Penerbitan Dokumen Kependudukan dan Identitas Resmi Anak (DAK Non Fisik - Dana DAK)
 - 2) Pembentukan Tim Lintas Sektor Terkait Pencapaian Target Nasional (DAK Non Fisik - Dana DAK)
 - 3) Pelayanan Keliling Pendaftaran Penduduk (DAK Non Fisik - Dana DAK)

- 4) Pelayanan Perekaman dan Penerbitan KTP Elektronik
- 5) Sosialisasi Inovasi dan Pemanfaatan Data Kependudukan

10. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Lhokseumawe, usulan penambahan kegiatan dituangkan dalam BAP yang ditandatangani bersama oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong selaku Penanggung Jawab Renja dan Pengusul Kegiatan, Kepala Bappeda selaku Pengelola Umum Aplikasi E-Planning dan Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPK Lhokseumawe. Usulan Penambahan tersebut sebanyak 9 (sembilan) kegiatan antara lain:

- 1) Pengendalian Profil Gampong
- 2) Gelar Inovasi Desa
- 3) Penyusunan Peraturan WaliKota Lhokseumawe Tentang Pengalokasian dan Besaran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk setiap gampong
- 4) Koordinasi Kelompok Kerja Nasional (POKJANAL) Posyandu Plus
- 5) Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa Manajemen Pemerintahan Gampong
- 6) Pembinaan Rakor Mukim Gampong
- 7) Hari Kesatuan Gerak PKK (PKK Kota Lhokseumawe)
- 8) Pencanaan Dan Penilaian Lembaga Pendidikan Pra Sekolah Gampong
- 9) Publik Speaking Penguatan Tim Penggerak PKK Gampong Se-Kota Lhokseumawe

11. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe, usulan penambahan kegiatan dituangkan dalam BAP yang ditandatangani bersama oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian selaku Penanggung Jawab Renja dan Pengusul Kegiatan, Kepala Bappeda selaku Pengelola Umum Aplikasi E-Planning dan Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPK Lhokseumawe. Usulan Penambahan tersebut sebanyak 2 (dua) kegiatan antara lain:

- 1) Penyusunan Road Map Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
- 2) Pengelolaan Sistem Online Layanan Administrasi (Si-OLA)

12. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Lhokseumawe, usulan penambahan Program dan kegiatan dituangkan dalam BAP yang ditandatangani bersama oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah selaku Penanggung Jawab Renja dan Pengusul Kegiatan, Kepala Bappeda selaku Pengelola Umum Aplikasi E-Planning dan Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPK Lhokseumawe. Usulan Penambahan tersebut sebanyak 3 (tiga) Program dan 10 (sepuluh) kegiatan antara lain:

- 1) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
- 2) Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
- 3) Program Peningkatan Mutu Industri
- 4) Penilaian Desa Kerajinan DEKRANASDA Kota Lhokseumawe
- 5) Program Pengembangan dan Pembinaan Dekranasda
- 6) Pembinaan Industri Kerajinan Dekranasda Kota Lhokseumawe
- 7) Program Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi
- 8) Pengadaan Modal Mobiler, Komputer dan Kelembagaan dan Legalitas Koperasi
- 9) Pameran Dagang, Pameran Industri, dan Pameran Produk Industri Kecil dan UKM
- 10) Penyusunan Detail Engineering Design (DED) Industri dan Perdagangan
- 11) Pengadaan Bahan dan Peralatan Untuk Pengembangan Usaha Kecil Menengah
- 12) Pembinaan Koperasi Penerima Bantuan
- 13) Pengembangan dan Pembinaan Koperasi dan UKM

13. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Lhokseumawe, usulan penambahan kegiatan dituangkan dalam BAP yang ditandatangani bersama oleh Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata selaku Penanggung Jawab Renja dan Pengusul Kegiatan, Kepala Bappeda selaku Pengelola Umum Aplikasi E-Planning dan Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPK Kota Lhokseumawe. Usulan Penambahan tersebut sebanyak 26(dua puluh enam) kegiatan antara lain:

- 1) Pelatihan Perwasitan C3 untuk Pemuda dalam Wilayah Kota Lhokseumawe
- 2) Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda
- 3) Pembinaan organisasi kepemudaan
- 4) Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan
- 5) Seminar Peningkatan Kompetensi Menulis Pemuda Dalam Menghadapi Revolusi Industri 4.0
- 6) Focus Group Discussion Komitmen Pemuda Anti Radikalisme dan Wawasan Kebangsaan
- 7) Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda
- 8) Pelatihan ketrampilan bagi pemuda
- 9) Open Turnamen Usia Dini Se-Kota Lhokseumawe
- 10) Pelaksanaan Turnamen Panahan MUSPIDA Cup Lhokseumawe
- 11) Pelaksanaan Turnamen Menembak MUSPIDA Cup Lhokseumawe
- 12) Wisata Relly dan Bersih-bersih Pantai
- 13) Fun Bike dan Fun Walk Kota Lhokseumawe
- 14) Teluk Samawi Islamic Tourism Festival
- 15) Piasan Samudera Pasai
- 16) Lomba Video Pariwisata Kota Lhokseumawe
- 17) Pembuatan Video Pariwisata Kota Lhokseumawe
- 18) Pengadaan Kalender Event Pariwisata Kota Lhokseumawe
- 19) Bimbingan Teknis Pelaku Usaha Kepariwisataaan
- 20) Seminar Pelaku Usaha Kuliner
- 21) Pelatihan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif
- 22) Pengadaan Kendaraan dinas/operasional
- 23) Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

- 24) Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga (OTSUS)
 - 25) Pelaksanaan Lomba Dayung dan Perahu Hias MUSPIDA Cup Kota Lhokseumawe
 - 26) Pameran Foto Tingkat Kota Lhokseumawe
14. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Lhokseumawe, usulan penambahan 1 (satu) kegiatan DOKA Tahun 2020 yakni Pembangunan Gedung Perpustakaan (DOKA) berdasarkan hasil kesepakatan di Musrenbang DOKA Provinsi Aceh serta penambahan kegiatan rutin yang dituangkan dalam BAP yang ditandatangani bersama oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan selaku Penanggung Jawab Renja dan Pengusul Kegiatan, Kepala Bappeda selaku Pengelola Umum Aplikasi E-Planning dan Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPK Lhokseumawe. Usulan Penambahan tersebut sebanyak 1 (satu) kegiatan yakni Pengadaan Kendaraan dinas/operasional
15. Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe, usulan penambahan Program dan Kegiatan dituangkan dalam BAP yang ditandatangani bersama oleh Sekretaris Daerah selaku Penanggung Jawab Renja dan Pengusul Kegiatan, Kepala Bappeda selaku Pengelola Umum Aplikasi E-Planning dan Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPK Lhokseumawe. Usulan Penambahan tersebut sebanyak 1 (satu) Program dan 28 (dua puluh delapan) kegiatan antara lain:
- 1) Sosialisasi Qanun Kota Lhokseumawe
 - 2) Sosialisasi dan Penyusunan Roadmap Reformasi Birokrasi Kota
 - 3) Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota Lhokseumawe Tentang Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe
 - 4) Pembahasan Rancangan Peraturan Walikota Lhokseumawe di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe
 - 5) Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa
 - 6) Pelaksanaan Riset dan Analisis Pasar Barang/Jasa

- 7) Penyusunan dan Pengelolaan Katalog Elektronik Lokal/Sektoral
 - 8) Pengembangan Sistem Informasi UKPBJ
 - 9) Bimtek/Pendampingan/Konsultasi Proses Pengadaan Barang/Jasa
 - 10) Bimtek/Pendampingan/Konsultasi Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa
 - 11) Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Melalui Mediasi
 - 12) Koordinasi Fasilitasi BUMD dan BUMDes dalam wilayah Kota Lhokseumawe
 - 13) Pemetaan Zona Ekonomi Eksklusif
 - 14) Fasilitasi Supra Struktur Ekonomi
 - 15) Fasilitasi Sarana Produksi
 - 16) Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah daerah
 - 17) Analisa BLUD di Pemko Lhokseumawe
 - 18) Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah
 - 19) Pembinaan dan Pengembangan Kegiatan Kreatifitas Mahasiswa
 - 20) Pembinaan dan Pelatihan Tenaga Dai
 - 21) Pembinaan IPHI Kota Lhokseumawe
 - 22) Pendukung Kinerja Kepala Daerah
 - 23) Verifikasi Hasil Pilkades dan Pemberian Kompensasi Keuchik yang Berakhir Masa Jabatan
 - 24) Percepatan Pengalihan Aset P3D dan P2D Kota Lhokseumawe
 - 25) Pelatihan Peningkatan Kinerja Pemerintahan Gampong dan Penyusunan Data Base Gampong
 - 26) Pemantapan Pemerintah Daerah dan Kecamatan
 - 27) Pertemuan Informal Unsur Muspida
 - 28) Pendukung Kinerja Kepala Daerah
 - 29) Koordinasi Pimpinan Daerah/Kecamatan dan Gampong
16. Kantor Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, usulan penambahan kegiatan dituangkan dalam BAP yang ditandatangani bersama oleh Kepala Kantor Kecamatan Banda Sakti selaku Penanggung Jawab Renja dan Pengusul Kegiatan,

Kepala Bappeda selaku Pengelola Umum Aplikasi E-Planning dan Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPK Lhokseumawe. Usulan Penambahan tersebut sebanyak 1 (satu) kegiatan yakni Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Mukim dan Gampong

17. Kantor Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe, usulan penambahan kegiatan dituangkan dalam BAP yang ditandatangani bersama oleh Kepala Kantor Kecamatan Blang Mangat selaku Penanggung Jawab Renja dan Pengusul Kegiatan, Kepala Bappeda selaku Pengelola Umum Aplikasi E-Planning dan Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPK Lhokseumawe. Usulan Penambahan tersebut sebanyak 1 (satu) kegiatan yakni Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Mukim dan Gampong

18. Kantor Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe, usulan penambahan kegiatan dituangkan dalam BAP yang ditandatangani bersama oleh Kepala Kantor Kecamatan Muara Satu selaku Penanggung Jawab Renja dan Pengusul Kegiatan, Kepala Bappeda selaku Pengelola Umum Aplikasi E-Planning dan Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPK Lhokseumawe. Usulan Penambahan tersebut sebanyak 1 (satu) kegiatan yakni Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Mukim dan Gampong.

19. Kantor Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe, usulan penambahan kegiatan dituangkan dalam BAP yang ditandatangani bersama oleh Kepala Kantor Kecamatan Muara Dua selaku Penanggung Jawab Renja dan Pengusul Kegiatan, Kepala Bappeda selaku Pengelola Umum Aplikasi E-Planning dan Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPK Lhokseumawe. Usulan Penambahan tersebut sebanyak 1 (satu) kegiatan yakni Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Mukim dan Gampong

20. Inspektorat Kota Lhokseumawe, usulan penambahan kegiatan dituangkan dalam BAP yang ditandatangani bersama oleh Inspektur Kota Lhokseumawe selaku Penanggung Jawab Renja dan Pengusul Kegiatan, Kepala Bappeda selaku Pengelola Umum Aplikasi E-Planning dan Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPK Lhokseumawe. Usulan Penambahan tersebut sebanyak 1 (satu) kegiatan yakni Survey Penilaian Integritas
21. Bappeda Kota Lhokseumawe, usulan penambahan kegiatan dituangkan dalam BAP yang ditandatangani bersama oleh Kepala Bappeda selaku Penanggung Jawab Renja dan Pengusul Kegiatan, Kepala Bappeda selaku Pengelola Umum Aplikasi E-Planning dan Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPK Lhokseumawe. Usulan Penambahan tersebut sebanyak 36 (tiga puluh enam) kegiatan antara lain:
- 1) Pengadaan Kendaraan dinas/operasional
 - 2) Pembangunan Taman dan Halaman Kantor
 - 3) Updating Sarana dan Prasarana Kota Lhokseumawe
 - 4) Pelatihan Aplikasi Penggunaan Quantum GIS
 - 5) Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan
 - 6) Penyusunan dan Pembahasan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP)
 - 7) Updating Sarana dan Prasarana Kota Lhokseumawe
 - 8) Pelatihan Aplikasi Penggunaan Quantum GIS
 - 9) Revisi RPJMD Kota Lhokseumawe
 - 10) Manajemen E-Planning Kota Lhokseumawe
 - 11) Perencanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)
 - 12) Penyusunan Strategi Kemandirian dan Ketahanan Pangan Kota Lhokseumawe
 - 13) Penyusunan RIPPDA (Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah)
 - 14) Seminar Nasional Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Kota Lhokseumawe (KEKAL)

- 15) Pendataan Industri Kecil dan Menengah One Villange One Product di Kota Lhokseumawe
- 16) Pemetaan Tenaga Kerja Produktif di Kota Lhokseumawe
- 17) Seminar Peningkatan Ekonomi Masyarakat Dalam Rangka Pengendalian Inflasi di Kota Lhokseumawe
- 18) Strategi Pengembangan Tanaman Kelor Untuk Pangan Alternatif dan Obat
- 19) Klasifikasi Pendataan Industri Kota Lhokseumawe
- 20) Profil Pertumbuhan Ekonomi Kota Lhokseumawe
- 21) Workshop Enterpreneur Muda Dalam Rangka Peningkatan SDM BUMG Seluruh Gampong di Kota Lhokseumawe
- 22) Workshop Peningkatan SDM Berkarakter bagi Milenial Muda Gampong se Kota Lhokseumawe
- 23) Penyusunan Indeks Desa Membangun
- 24) Penyusunan Indeks Kesulitan Geografis
- 25) Pengembangan Kegiatan Ekonomi Wilayah
- 26) Penguatan Kapasitas SKPK dalam Mitigasi Bencana
- 27) Sayembara Grand Design Pengembangan Kawasan Pesisir Kota Lhokseumawe
- 28) Inovasi Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang
- 29) Studi Kelayakan Penggunaan Panel Surya pada Gedung Pemerintah Kota Lhokseumawe
- 30) Penyusunan Roadmap Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kota Lhokseumawe
- 31) Rekonstruksi Potensi Wisata Berbasis Syariah, Penerapan Ekonomi Kreatif dan Implementasi Good Government
- 32) Penyusunan Strategi Pengembangan Kawasan Pesisir Berbasis Sustainable livelihood
- 33) Penyusunan Kebijakan Strategis Penelitian dan Pengembangan
- 34) Sayembara/Lomba Inovasi Teknologi Tepat Guna Kota Lhokseumawe
- 35) Satu Data Indonesia (SDI)
- 36) Penyusunan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)

22. Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe, usulan penambahan kegiatan dituangkan dalam BAP yang ditandatangani bersama oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku Penanggung Jawab Renja dan Pengusul Kegiatan, Kepala Bappeda selaku Pengelola Umum Aplikasi E-Planning dan Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPK Lhokseumawe. Usulan Penambahan tersebut sebanyak 17 (tujuh belas kegiatan) kegiatan antara lain:

- 1) Penyusunan Laporan Pengeluaran/Belanja Pemerintah Kota Lhokseumawe
- 2) Penyusunan Laporan Dana Transfer
- 3) Penyusunan Laporan Dana Otonomi Khusus
- 4) Sistem Aplikasi Penggajian Pemerintah Kota Lhokseumawe
- 5) Rekonsiliasi Penerimaan Kas
- 6) Verifikasi Penyusunan Laporan Realisasi Dana Desa
- 7) Penertiban Pajak Daerah
- 8) Pendataan Wajib Pajak PBB
- 9) Penagihan Rutin dan Penagihan Tunggakan Pajak Daerah
- 10) Rekonsiliasi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe
- 11) Manajemen dan Pengelolaan Aplikasi SISMIOP NG
- 12) Pelaksanaan Sidang Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara
- 13) Pengelolaan Website dan Email BPKD
- 14) Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah
- 15) Bimtek Penyusunan LKPD Pemko Lhokseumawe
- 16) Bimtek Pengelolaan Aset Daerah
- 17) Pendataan dan Pengamanan Aset Daerah

23. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Lhokseumawe, usulan penambahan kegiatan dituangkan dalam BAP yang ditandatangani bersama oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia selaku Penanggung Jawab Renja dan Pengusul

Kegiatan, Kepala Bappeda selaku Pengelola Umum Aplikasi E-Planning dan Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPK Lhokseumawe. Usulan Penambahan tersebut sebanyak 1 (satu) kegiatan yakni Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

24. Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe, usulan penambahan kegiatan dituangkan dalam BAP yang ditandatangani bersama oleh Kepala Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah selaku Penanggung Jawab Renja dan Pengusul Kegiatan, Kepala Bappeda selaku Pengelola Umum Aplikasi E-Planning dan Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPK Lhokseumawe. Usulan Penambahan tersebut sebanyak 7(tujuh) kegiatan antara lain:

- 1) Pengadaan Kendaraan dinas/operasional
- 2) Penyusunan Rancangan Peraturan Bidang Syariat Islam
- 3) Publikasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Syariat Islam
- 4) Sosialisasi Pelaksanaan Qanun dan Perwal Bidang Syariat Islam
- 5) Pelatihan Tajihiz Mayat dan Hukum Mawaris (OTSUS)
- 6) Pembangunan Sarana dan Prasarana Dayah (OTSUS)
- 7) Pengadaan Buku Agama, Kitab dan Al-Qur'an

25. Sekretariat Baitul Mal Kota Lhokseumawe, usulan penambahan kegiatan dituangkan dalam BAP yang ditandatangani bersama oleh Kepala Sekretariat Baitul Mal selaku Penanggung Jawab Renja dan Pengusul Kegiatan, Kepala Bappeda selaku Pengelola Umum Aplikasi E-Planning dan Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPK Lhokseumawe. Usulan Penambahan tersebut sebanyak 8 (delapan) kegiatan antara lain:

- 1) Pendataan, Verifikasi dan Evaluasi Mustahik Penerima Bantuan Baitul Mal
- 2) Sosialisasi Zakat, Infaq dan Sadaqah

- 3) Pemilihan dan Pelantikan Dewan Pengawas dan Ketua Baitul Mal
- 4) Pendataan, Verifikasi dan Evaluasi Mustahik Penerima Bantuan Baitul Mal
- 5) Sosialisasi Zakat, Infaq dan Sadaqah
- 6) Pemilihan dan Pelantikan Dewan Pengawas dan Ketua Baitul Mal
- 7) Penyaluran Zakat, Infaq dan Sadaqah (ZIS) kepada Senif Miskin (Dana Infaq)
- 8) Penyusunan dan Pengelolaan Data Base Jumlah Muzakki dan Mustahiq

26. Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe, usulan penambahan kegiatan dituangkan dalam BAP yang ditandatangani bersama oleh Kepala Sekretariat Majelis Adat Aceh selaku Penanggung Jawab Renja dan Pengusul Kegiatan, Kepala Bappeda selaku Pengelola Umum Aplikasi E-Planning dan Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPK Lhokseumawe. Usulan Penambahan tersebut sebanyak 7 (tujuh) kegiatan antara lain:

- 1) Pelatihan Peradilan Adat
- 2) Pelatihan Seumapa untuk Generasi Muda
- 3) Dialog/sosialisasi untuk generasi muda dan mahasiswa mengenai adat istiadat dan hukum adat
- 4) Penguatan Lembaga Peradilan Adat Gampong
- 5) Pengadaan Kendaraan dinas/operasional
- 6) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
- 7) Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

27. Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kota Lhokseumawe, usulan penambahan kegiatan dituangkan dalam BAP yang ditandatangani bersama oleh Kepala Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kota Lhokseumawe selaku Penanggung Jawab Renja dan Pengusul Kegiatan, Kepala Bappeda selaku Pengelola Umum Aplikasi E-Planning dan Sekretaris Daerah

selaku Ketua TAPK Lhokseumawe. Usulan Penambahan tersebut sebanyak 6 (enam) kegiatan antara lain:

- 1) Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Tingkat SD/MI dan SMP/MTs
- 2) Penatausahaan Pemberian Biaya Pendidikan untuk Siswa Berprestasi tingkat SMA/ sederajat dan Mahasiswa
- 3) Monitoring dan Evaluasi Balai Pengajian, Dayah dan Pendidikan Luar Sekolah (Non Formal)
- 4) Konsultasi dan Mediasi Tenaga Kependidikan dengan Pihak Terkait
- 5) Sosialisasi dan Advokasi berbagai Peraturan Pemerintah di Bidang Pendidikan
- 6) Pengelolaan Website Majelis Pendidikan Daerah Kota Lhokseumawe

Penambahan program dan kegiatan diatas dilakukan pada 27 (dua puluh tujuh) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan merupakan bagian dari Rencana Kerja dan Pendanaan pada RKPK Lhokseumawe Tahun 2020. Untuk rincian Rencana Kerja dan Pendanaan secara keseluruhan pada Tahun 2020 dapat dilihat dalam Tabel 5.1 berikut ini:

TABELV.1
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN DAN PRAKIRAAN MAJU Kota Lhokseumawe
TAHUN ANGGARAN 2020

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2020			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		OPD Penanggung jawab
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	TOTAL				828,549,206,033				740,577,234,944	
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				92,699,039,972	APBK	-		152,871,748,938	Dinas P dan K
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar				89,540,162,472	APBK	-		148,295,796,938	Dinas P dan K
1.01.	Pendidikan				89,540,162,472	APBK	-		148,295,796,938	Dinas P dan K
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kota Lhokseumawe	100 %	17,688,909,430	APBK	-	100 %	24,845,761,794	Dinas P dan K
01.001.	Penyediaan jasa surat menyurat	Periode Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	2,220,000	APBK	-	12 Bulan	2,220,000	Dinas P dan K
01.002.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Periode Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	390,088,296	APBK	-	12 Bulan	450,000,000	Dinas P dan K
01.007.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Periode Tenaga Jasa Adm Keuangan	Kota Lhokseumawe	2088 OB	363,243,874	APBK	-	2088 OB	448,843,874	Dinas P dan K
01.010.	Penyediaan alat tulis kantor	Periode Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	72,859,340	APBK	-	12 Bulan	80,000,000	Dinas P dan K
01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Periode Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	44,150,000	APBK	-	12 Bulan	44,150,000	Dinas P dan K
01.013.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Periode Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	14,000,000	APBK	-	12 Bulan	17,000,000	Dinas P dan K
01.018.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Periode Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	170,000,000	APBK	-	12 Bulan	180,000,000	Dinas P dan K
01.020.	Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap	Jumlah Jasa Pegawai Tidak Tetap (1896 Org x 12 Bulan)	Kota Lhokseumawe	22752 OB	16,632,347,920	APBK	-	22104 OB	23,623,547,920	Dinas P dan K
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kota Lhokseumawe	100 %	6,095,798,892	APBK	-	100 %	8,649,189,000	Dinas P dan K
02.011.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Lhokseumawe	4 Jenis	340,000,000	APBK	-	5 Jenis	700,000,000	Dinas P dan K
02.023.	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan (1 Unit x 12 Bulan)	Kota Lhokseumawe	12 UB	81,900,000	APBK	-	12 UB	103,200,000	Dinas P dan K
02.030.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Periode Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	24,050,000	APBK	-	12 Bulan	24,050,000	Dinas P dan K
02.034.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman, Tempat Parkir dan Halaman Kantor	Jumlah Pemeliharaan Taman, Tempat Parkir dan Halaman Kantor	Kota Lhokseumawe	2 Jenis	200,000,000	APBK	-	2 Jenis	521,959,000	Dinas P dan K
02.042.	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Kota Lhokseumawe	1 Gedung	100,000,000	APBK	-	1 Unit	300,000,000	Dinas P dan K
02.045.	Pembangunan Fasilitas Gedung Kantor	Jumlah Pembangunan Fasilitas Gedung Kantor	Kota Lhokseumawe	2 Paket	300,000,000	APBK	-	2 Paket	500,000,000	Dinas P dan K

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2020			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		OPD Penanggung jawab
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
02.046.	Pembangunan Taman dan Halaman Kantor	Jumlah Pembangunan Taman dan Halaman Kantor	Kota Lhokseumawe	1 Gedung	199,980,000	APBK	-	1 Paket	499,980,000	Dinas P dan K
02.049.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Aparatur (OTSUS)	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kota Lhokseumawe	1 Gedung	4,849,868,892	APBK	-	1 Gedung	6,000,000,000	Dinas P dan K
03.	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase tingkat disiplin aparatur	Kota Lhokseumawe	100 %	35,000,000	APBK	-	100 %	35,000,000	Dinas P dan K
03.006.	Penyediaan Sewa Gedung/Gudang Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang Disewa	Kota Lhokseumawe	1 Gedung	35,000,000	APBK	-	1 Gedung	35,000,000	Dinas P dan K
05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan kegiatan pendidikan dan pelatihan formal yang diikuti	Kota Lhokseumawe	5 Keg	33,000,000	APBK	-	5 Keg	36,300,000	Dinas P dan K
05.025.	Penetapan Angka Kredit	Periode angka kredit	Kota Lhokseumawe	2 Kali	33,000,000	APBK	-	2 Kali	36,300,000	Dinas P dan K
07.	Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja	Cakupan Penyediaan Dokumen perencanaan SKPK	Kota Lhokseumawe	1 Dokumen	1,200,000	APBK	-	1 Dokumen	1,200,000	Dinas P dan K
07.002.	Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Buku Renja	Kota Lhokseumawe	20 Buku	1,200,000	APBK	-	10 Buku	1,200,000	Dinas P dan K
08.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pembangunan	Cakupan Penyediaan Dokumen DED	Kota Lhokseumawe	1 Dokumen	500,000,000	APBK	-	1 Dokumen	896,839,000	Dinas P dan K
08.003.	Penyusunan Perencanaan Otsus/TDBH Migas Urusan Pendidikan	Jumlah Penyusunan Perencanaan OTSUS/TDBH Migas Urusan Pendidikan	Kota Lhokseumawe	1 Paket	500,000,000	APBK	-	1 Paket	896,839,000	Dinas P dan K
15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase Paud dengan Akreditasi B, Persentase Angka Partisipasi Kasar PAUD	Kota Lhokseumawe	50%,60%	6,655,060,000	APBK	-	70%,75%	18,370,360,000	Dinas P dan K
15.001.	Pembangunan gedung sekolah	Jumlah Gedung	Kota Lhokseumawe	2 Sekolah	310,000,000	APBK	-	2 Sekolah	400,000,000	Dinas P dan K
15.009.	Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir	Jumlah Sekolah Yang Dilakukan Pembangunan taman, lapangan dan fasilitas parkir	Kota Lhokseumawe	10 Sekolah	200,000,000	APBK	-	10 Sekolah	2,000,000,000	Dinas P dan K
15.015.	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa	Jumlah Pengadaan Buku Siswa	Kota Lhokseumawe	25 Sekolah	210,000,000	APBK	-	25 Sekolah	2,000,000,000	Dinas P dan K
15.018.	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Jumlah Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Kota Lhokseumawe	9 Sekolah	496,000,000	APBK	-	1 Paket	2,000,000,000	Dinas P dan K
15.019.	Pengadaan mebeluer sekolah	Jumlah Sekolah Yang Mendapatkan Mobiler Sekolah	Kota Lhokseumawe	5 Paket	150,000,000	APBK	-	1 Paket	500,000,000	Dinas P dan K
15.042.	Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah	Jumlah Rehab Ruang Kelas Sekolah	Kota Lhokseumawe	7 Sekolah	150,000,000	APBK	-	2 Ruang	1,500,000,000	Dinas P dan K
15.068.	Peringatan Hari Aksara Internasional	Jumlah Peserta Kegiatan Peringatan Hari Aksara Internasional	Kota Lhokseumawe	1 Kegiatan	102,150,000	APBK	-	1 Kegiatan	200,000,000	Dinas P dan K
15.071.	Penambahan Ruang Kelas Sekolah (OTSUS)	Jumlah Sekolah yang terbangun Ruang Kelas Baru	Kota Lhokseumawe	3 Sekolah	2,525,000,000	APBK	-		5,000,000,000	Dinas P dan K
15.078.	Bantuan Operasional Pendidikan PAUD (DAK Non FISIK)	Periode Penyediaan BOP PAUD	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	192,000,000	APBK	-	12 Bulan	192,000,000	Dinas P dan K

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2020			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		OPD Penanggung jawab
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.082.	Manajemen Pengelolaan dan Pengawasan Penyaluran DAK BOP PAUD	Periode Manajemen Pengelolaan dan Pengawasan Penyaluran DAK BOP PAUD	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	31,550,000	APBK	-	12 Bulan	40,000,000	Dinas P dan K
15.086.	Pembangunan RKB PAUD (DAK)	Jumlah Ruang TK Negeri	Kota Lhokseumawe	3 Ruang	300,000,000	APBK	-	3 Ruang	1,800,000,000	Dinas P dan K
15.087.	Rehabilitasi Ruang Kelas PAUD/TK (DAK)	Jumlah Ruang Kelas yang direhab	Kota Lhokseumawe	6 Ruang	350,000,000	APBK	-	6 Ruang	800,000,000	Dinas P dan K
15.109.	Pelaksanaan Kegiatan Bunda PAUD	Periode Kegiatan PAUD	Kota Lhokseumawe	12 bulan	138,135,000	APBK	-	1 Kegiatan	138,135,000	Dinas P dan K
15.111.	Apresiasi GTK PAUD dan Dikmas Berprestasi dan HAI (OTSUS)	Periode GTK PAUD	Kota Lhokseumawe	3 hari	500,225,000	APBK	-	3 hari	600,225,000	Dinas P dan K
15.112.	Pelatihan Kepemimpinan dan Pengelolaan PAUD (OTSUS)	Periode Pelatihan Kepemimpinan	Kota Lhokseumawe	4 hari	500,000,000	APBK	-	4 hari	600,000,000	Dinas P dan K
15.113.	Pelatihan Pengembangan Kelembagaan PAUD (OTSUS)	Periode pelatihan pengembangan kelembagaan PAUD	Kota Lhokseumawe	4 hari	500,000,000	APBK	-	4 hari	600,000,000	Dinas P dan K
16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Persentase Angka Partisipasi Murni SD/MI dan SMP/MTs, Persentase Angka partisipasi Murni SMP / MTs	Kota Lhokseumawe	99.36% 60%	54,589,174,150	APBK	-	99.36% 75%	92,551,547,144	Dinas P dan K
16.001.	Pembangunan gedung sekolah	Jumlah gedung	Kota Lhokseumawe	1 Sekolah	100,000,000	APBK	-		200,000,000	Dinas P dan K
16.003.	Penambahan ruang kelas sekolah	Jumlah Ruang Sekolah yang Dibangun	Kota Lhokseumawe	3 Ruang	200,000,000	APBK	-	3 Ruang	600,000,000	Dinas P dan K
16.007.	Pembangunan sarana dan prasarana olahraga	Terlaksananya sarana dan prasarana olahraga disekolah	Kota Lhokseumawe	1 Sekolah	280,000,000	APBK	-		500,000,000	Dinas P dan K
16.009.	Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir	Jumlah Sekolah yang Dibangun Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir	Kota Lhokseumawe	7 Sekolah	1,709,980,000	APBK	-	3 Sekolah	3,549,920,000	Dinas P dan K
16.011.	Pembangunan ruang ibadah	Jumlah Ruang Ibadah Yang Di Bangun	Kota Lhokseumawe	1 Sekolah	200,000,000	APBK	-	2 Sekolah	200,000,000	Dinas P dan K
16.012.	Pembangunan peustakaan sekolah	Jumlah Gedung Pustaka	Kota Lhokseumawe	1 Sekolah	200,000,000	APBK	-		500,000,000	Dinas P dan K
16.014.	Pembanguna sarana air bersih dan sanitary	Jumlah Sarana Air Bersih dan Sanitary	Kota Lhokseumawe	10 Sekolah	1,185,000,000	APBK	-	1 Sekolah	2,000,000,000	Dinas P dan K
16.015.	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Buku dan Alat Tulis Sekolah	Kota Lhokseumawe	43 Sekolah	1,795,000,000	APBK	-	20 Sekolah	5,000,000,000	Dinas P dan K
16.018.	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Jumlah Pengadaan Alat Peraga Siswa	Kota Lhokseumawe	26 Sekolah	3,335,000,000	APBK	-	3 Paket	4,365,000,000	Dinas P dan K
16.019.	Pengadaan mebeluer sekolah	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Meubeler Sekolah	Kota Lhokseumawe	9 Sekolah	800,000,000	APBK	-	4 Sekolah	2,800,000,000	Dinas P dan K
16.020.	Pengadaan perlengkapan sekolah	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Kota Lhokseumawe	2 Paket	450,000,000	APBK	-	2 Paket	534,000,000	Dinas P dan K
16.023.	Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah	Jumlah Sekolah yang Terpelihara sekolah	Kota Lhokseumawe	3 Sekolah	280,000,000	APBK	-	2 Sekolah	280,000,000	Dinas P dan K
16.030.	Pemeliharaan rutin/berkala taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir	Jumlah Sekolah yang Terpelihara	Kota Lhokseumawe	10 Sekolah	400,000,000	APBK	-	2 Paket	1,500,000,000	Dinas P dan K
16.044.	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Jumlah Ruang yang di Rehab	Kota Lhokseumawe	2 Sekolah	100,000,000	APBK	-	2 Sekolah	300,000,000	Dinas P dan K
16.070.	Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa	Periode minat, bakat dan kreatifitas siswa	Kota Lhokseumawe	4 hari	215,440,000	APBK	-	4 Kegiatan	215,440,000	Dinas P dan K

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2020			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 202		OPD Penanggung jawab
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.075.	Penyediaan beasiswa transisi	Periode Beasiswa	Kota Lhokseumawe	1 kali	35,000,000	APBK	-	1 kali	50,000,000	Dinas P dan K
16.079.	Rehabilitasi sedang/berat ruang guru sekolah (DAK)	Jumlah Ruang Guru Sekolah yang Direnovasi	Kota Lhokseumawe	2 Sekolah	260,000,000	APBK	-	2 Ruang	574,571,995	Dinas P dan K
16.083.	Penambahan Ruang Kelas Sekolah (OTSUS)	Jumlah Sekolah yang terbangun Ruang Kelas Baru	Kota Lhokseumawe	4 Ruang	1,000,000,000	APBK	-	4 Ruang	10,000,000,000	Dinas P dan K
16.085.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Perpustakaan (DAK)	Jumlah Ruang Perpustakaan Sekolah yang Direnovasi	Kota Lhokseumawe	4 Ruang	599,000,000	APBK	-	1 Ruang	713,414,399	Dinas P dan K
16.087.	Pembangunan Pagar dan Sarana Pendukung (OTSUS)	Jumlah sekolah yang terbangun pagar serta pendukung lainnya	Kota Lhokseumawe	2 Sekolah	1,102,500,000	APBK	-	2 Sekolah	1,653,750,000	Dinas P dan K
16.093.	Penyelenggaraan UN dan UAS	Jumlah Panitia Penyelenggaraan UN dan US	Kota Lhokseumawe	22 Orang	125,093,900	APBK	-	22 Orang	218,268,750	Dinas P dan K
16.094.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah (DAK)	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Direnovasi	Kota Lhokseumawe	30 Ruang	1,331,000,000	APBK	-	1 Ruang	4,000,000,000	Dinas P dan K
16.095.	Pembangunan Ruang Ibadah (OTSUS)	Jumlah bangunan ruang ibadah	Kota Lhokseumawe	3 Sekolah	1,600,000,000	APBK	-	3 Sekolah	2,000,000,000	Dinas P dan K
16.096.	Pengadaan Buku Perpustakaan Sekolah (DAK)	Jumlah pengadaan buku perpustakaan sekolah	Kota Lhokseumawe	11 Sekolah	788,750,000	APBK	-	11 Sekolah	650,000,000	Dinas P dan K
16.097.	Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)	Jumlah Hari Penerimaan Peserta Didik Baru	Kota Lhokseumawe	3 Hari	5,072,000	APBK	-	3 Hari	5,072,000	Dinas P dan K
16.109.	Pembangunan Pagar dan Sarana Pendukung	Jumlah Pagar Sekolah yang Dibangun	Kota Lhokseumawe	5 Sekolah	1,376,499,000	APBK	-	5 Sekolah	3,320,000,000	Dinas P dan K
16.118.	Pembangunan RKB (DAK)	Jumlah Ruang Sekolah yang Dibangun	Kota Lhokseumawe	31 Ruang	3,896,000,000	APBK	-	1 Ruang	7,000,000,000	Dinas P dan K
16.121.	Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional (O2SN)	Periode pelaksanaan Olimpiade	Kota Lhokseumawe	4 hari	276,300,000	APBK	-	1 Kegiatan	276,300,000	Dinas P dan K
16.127.	Pengadaan Sarana PJOK dan / atau Seni Budaya (DAK)	Jumlah Pengadaan Sarana PJOK dan / atau Seni Budaya (DAK)	Kota Lhokseumawe	72 Paket	2,592,000,000	APBK	-	80 paket	2,592,000,000	Dinas P dan K
16.129.	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS SD)	Periode Bantuan Operasional Sekolah (BOS SD)	Kota Lhokseumawe	58 Sekolah	13,366,842,000	APBK	-	50 Sekolah	14,000,000,000	Dinas P dan K
16.130.	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS SMP)	Periode Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS SMP)	Kota Lhokseumawe	18 Sekolah	6,817,000,000	APBK	-	18 Sekolah	7,399,000,000	Dinas P dan K
16.131.	Pengadaan Media Pendidikan TIK (DAK)	Jumlah Pengadaan Media Pendidikan TIK (DAK)	Kota Lhokseumawe	11 Sekolah	126,000,000	APBK	-	5 Sekolah	1,300,000,000	Dinas P dan K
16.132.	Pengadaan Alat Laboratorium Komputer (DAK)	Jumlah Pengadaan Alat Laboratorium Komputer (DAK)	Kota Lhokseumawe	5 Sekolah	882,000,000	APBK	-	7 Sekolah	2,470,000,000	Dinas P dan K
16.133.	Liga Sepak Bola (GALA) SMP	Periode Liga Sepak Bola	Kota Lhokseumawe	5 hari	107,130,000	APBK	-	1 Kegiatan	107,130,000	Dinas P dan K
16.134.	Pembangunan Toilet (Jamban) Beserta Sanitasinya (DAK)	Jumlah Sarana Toilet (Jamban) dan Sanitary yang Terbangun	Kota Lhokseumawe	11 Sekolah	945,000,000	APBK	-	22 Sekolah	2,350,000,000	Dinas P dan K
16.135.	Penyelenggaraan Try Out dan Remedial Teaching	Periode Penyelenggaraan Try Out	Kota Lhokseumawe	2 hari	126,742,250	APBK	-	1 Kegiatan	279,425,000	Dinas P dan K
16.136.	Olimpiade Siswa Nasional (OSN) SD dan SMP	Periode Olimpiade Siswa Nasional (OSN) SD dan SMP	Kota Lhokseumawe	3 hari	105,625,000	APBK	-	1 Kegiatan	105,625,000	Dinas P dan K
16.137.	Rehabilitasi Sedang/Berat Jamban Siswa/Guru (DAK)	Jumlah Jamban Siswa/Guru Sekolah yang direhab	Kota Lhokseumawe	5 Sekolah	243,000,000	APBK	-	1 Sekolah	600,000,000	Dinas P dan K
16.138.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kantor (DAK)	Jumlah Ruang	Kota Lhokseumawe	1 Ruang	260,000,000	APBK	-	1 Ruang	350,000,000	Dinas P dan K
16.140.	Pembangunan Ruang Perpustakaan (DAK)	Jumlah Pembangunan Ruang Perpustakaan	Kota Lhokseumawe	2 Sekolah	400,000,000	APBK	-	2 Sekolah	936,460,000	Dinas P dan K
16.141.	Pengadaan Peralatan Laboratorium IPA (DAK)	Jumlah Peralatan Laboratorium IPA	Kota Lhokseumawe	21 Sekolah	172,200,000	APBK	-	26 Paket	556,170,000	Dinas P dan K

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2020			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		OPD Penanggung jawab
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.143.	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium dan Ruang Praktikum Sekolah (DAK)	Jumlah Sekolah yang direhab ruang laboratorium	Kota Lhokseumawe	5 Sekolah	650,000,000	APBK	-	1 Kegiatan	1,300,000,000	Dinas P dan K
16.145.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pramuka (OTSUS)	Jumlah sarana dan prasarana	Kota Lhokseumawe	1 gedung	1,500,000,000	APBK	-	1 gedung	2,000,000,000	Dinas P dan K
16.147.	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Serbaguna/Aula Sekolah (OTSUS)	Jumlah Terpeliharanya Gedung Serbaguna/Aula Sekolah	Kota Lhokseumawe	2 Sekolah	1,650,000,000	APBK	-	2 Sekolah	2,000,000,000	Dinas P dan K
16.148.	Pelatihan dan Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) Tingkat SD dan SMP (OTSUS)	Periode Pelatihan	Kota Lhokseumawe	4 Hari	500,000,000	APBK	-	4 Hari	500,000,000	Dinas P dan K
16.149.	Pendalaman Materi Kurikulum Tingkat SD dan SMP (OTSUS)	Jumlah Peserta	Kota Lhokseumawe	500 Guru	500,000,000	APBK	-	500 Guru	700,000,000	Dinas P dan K
18	Program Pendidikan Non Formal	Cakupan Lembaga Pendidikan Non Formal yang Berakreditasi "B"	Kota Lhokseumawe	35%	514,000,000	APBK	-	65%	914,000,000	Dinas P dan K
18.044.	Pembangunan Ruang Kelas Baru SKB (DAK)	Jumlah Ruang kelas Sekolah yang terbangun	Kota Lhokseumawe	3 Ruang	400,000,000	APBK	-	3 Ruang	700,000,000	Dinas P dan K
18.046.	Pembangunan Toilet (Jamban) SKB Beserta Sanitasinya (DAK)	Jumlah Sekolah yang terbangun Toilet/jamban	Kota Lhokseumawe	1 Sekolah	114,000,000	APBK	-	1 Sekolah	214,000,000	Dinas P dan K
20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Kompetensi Tenaga Pendidik dan Kependidikan	Kota Lhokseumawe	45%	2,342,420,000	APBK	-	65%	420,000,000	Dinas P dan K
20.004.	Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG)	Jumlah peserta	Kota Lhokseumawe	80 orang	95,325,000	APBK	-	1 Kegiatan	140,000,000	Dinas P dan K
20.052.	Pelatihan Guru Mendongeng Tingkat TK dan PAUD	Jumlah Peserta Pelatihan Guru Mendongeng	Kota Lhokseumawe	80 orang	97,095,000	APBK	-	1 Kegiatan	140,000,000	Dinas P dan K
20.053.	Pelatihan Guru Seni Tari Tingkat SD dan SMP	Periode pelatihan	Kota Lhokseumawe	1 kali	50,000,000	APBK	-	1 Kegiatan	140,000,000	Dinas P dan K
20.056.	Pendidikan Berkelanjutan Bagi Pendidik untuk memenuhi Standar Kompetensi (OTSUS)	Jumlah peserta	Kota Lhokseumawe	110 orang	2,100,000,000	APBK	-	1 Kegiatan	0	Dinas P dan K
22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Persentase Guru yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Pendidik	Kota Lhokseumawe	50%	1,085,600,000	APBK	-	60%	1,575,600,000	Dinas P dan K
22.009.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Periode Monitoring, evaluasi dan Pelaporan	Kota Lhokseumawe	2 hari	50,000,000	APBK	-	2 hari	140,000,000	Dinas P dan K
22.025.	Penyusunan Profil Pendidikan (OTSUS)	Jumlah Buku Profil Pendidikan		10 Buku	500,000,000	APBK	-	10 Buku	700,000,000	Dinas P dan K
22.032.	Tim Pengelola BOS Kota Lhokseumawe (DIKDAS)	Jumlah Tim Pengelola Bos Kota Lhokseumawe	Kota Lhokseumawe	1 Kegiatan	29,500,000	APBK	-	1 Kegiatan	29,500,000	Dinas P dan K
22.033.	Tim manajemen Pengelola DAK Kota Lhokseumawe (DIKDAS)	Jumlah Tim Pengelola DAK Kota Lhokseumawe	Kota Lhokseumawe	1 Kegiatan	6,100,000	APBK	-	1 Kegiatan	6,100,000	Dinas P dan K
22.042.	Pelatihan Penyusunan Aset Sekolah Tingkat SD dan SMP (OTSUS)	Jumlah peserta pelatihan	Kota Lhokseumawe	3 hari	500,000,000	APBK	-	3 hari	700,000,000	Dinas P dan K
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar				3,158,877,500	APBK	-		4,575,952,000	Dinas P dan K
2.16.	Kebudayaan				3,158,877,500	APBK	-		4,575,952,000	Dinas P dan K

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2020			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		OPD Penanggung jawab
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Cakupan Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	Kota Lhokseumawe	35%	1,306,457,500	APBK	-	40%	2,300,000,000	Dinas P dan K
16.005.	Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air	Periode Pengelolaan dan pengembangan, Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	180,000,000	APBK	-	12 Bulan	400,000,000	Dinas P dan K
16.011.	Pendukung pengelolaan museum dan taman budaya di daerah	Periode Pendukung pengelolaan museum dan taman budaya di daerah	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	421,200,000	APBK	-	12 Bulan	1,000,000,000	Dinas P dan K
16.030.	Festival dan lomba karya seni	Jumlah hari penyelenggaraan Festival Seni Piala Bergilir Walikota Lhokseumawe Ke 3	Kota Lhokseumawe	4 hari	124,557,500	APBK	-	4 hari	200,000,000	Dinas P dan K
16.043.	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum (DAK Non Fisik)	Periode Pemberian bantuan operasional penyelenggaraan Museum	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	450,000,000	APBK	-	12 Bulan	500,000,000	Dinas P dan K
16.044.	Seminar Sejarah Seni Rapai Uroeh	Jumlah Peserta Seminar Sejarah Seni Rapai Uroeh	Kota Lhokseumawe	200 Orang	130,700,000	APBK	-	200 Orang	200,000,000	Dinas P dan K
17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	Kota Lhokseumawe	3 Event	372,010,000	APBK	-	3 Event	675,952,000	Dinas P dan K
17.013.	Audisi Paduan suara Gita Bahana Nusantara	Periode Audisi Paduan suara Gita Bahana Nusantara	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	172,010,000	APBK	-	12 Bulan	175,952,000	Dinas P dan K
17.025.	Pekan Kebudayaan Aceh	Periode Pekan Kebudayaan Aceh	Kota Lhokseumawe	7 hari	200,000,000	APBK	-	7 hari	500,000,000	Dinas P dan K
18	Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya	Pembinaan Kelompok Seni dan Budaya yang Aktif	Kota Lhokseumawe	2 Kelp	1,429,535,000	APBK	-	2 Kelp	1,500,000,000	Dinas P dan K
18.006.	Pembinaan Sanggar Seni Kota Lhokseumawe	Periode Operasional Sanggar Pocut Meurah Inseun Kota Lhokseumawe	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	777,805,000	APBK	-	12 Bulan	800,000,000	Dinas P dan K
18.007.	Dewan Kesenian Aceh	Jumlah Panitia Kesenian Aceh	Kota Lhokseumawe	20 Orang	651,730,000	APBK	-	20 Orang	700,000,000	Dinas P dan K
19	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Kebudayaan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kesenian dan Budaya yang dikelola	Kota Lhokseumawe	1 Sarana	50,875,000	APBK	-	1 Sarana	100,000,000	Dinas P dan K
19.001.	Penyediaan alat-alat kesenian Tradisional	Jumlah Alat-alat Kesenian Tradisional	Kota Lhokseumawe	3 paket	50,875,000	APBK	-	3 Paket	100,000,000	Dinas P dan K
	Dinas Kesehatan				48,222,461,241	APBK	-		54,028,611,523	Dinkes
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar				48,222,461,241	APBK	-		54,028,611,523	Dinkes
1.02.	Kesehatan				48,222,461,241	APBK	-		54,028,611,523	Dinkes
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kota Lhokseumawe	100 %	6,481,170,849	APBK	-	100%	6,707,619,214	Dinkes
01.001.	Penyediaan jasa surat menyurat	Periode Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	1,494,000	APBK	-	12 Bulan	1,494,000	Dinkes
01.002.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Periode Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	456,941,710	APBK	-	12 bulan	456,941,710	Dinkes

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2020			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		OPD Penanggung jawab
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01.007.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Pejabat pengelola Keuangan SKPD	Kota Lhokseumawe	636 OB	360,167,639	APBK	-	100%	360,167,639	Dinkes
01.008.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Periode penyediaan jasa kebersihan kantor	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	11,760,000	APBK	-	98%	11,760,000	Dinkes
01.010.	Penyediaan alat tulis kantor	periode penyediaan alat tulis kantor	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	164,626,200	APBK	-	12 bulan	196,474,565	Dinkes
01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Periode penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	204,140,300	APBK	-	12 bulan	204,140,300	Dinkes
01.013.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Periode Penyediaan peralatan dan Perlengkapan kantor	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	70,000,000	APBK	-	12 bulan	200,000,000	Dinkes
01.015.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kota Lhokseumawe		33,954,000	APBK	-	12 bulan	33,954,000	Dinkes
01.017.	Penyediaan makanan dan minuman	Periode Penyediaan makanan dan minuman	Kota Lhokseumawe	11 Bulan	171,000,000	APBK	-	12 bulan	195,600,000	Dinkes
01.018.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Periode Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	138,000,000	APBK	-	12 bulan	138,000,000	Dinkes
01.020.	Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap	Jumlah Jasa Pegawai tidak tetap	Kota Lhokseumawe	8784 OB	4,393,087,000	APBK	-	12 bulan	4,393,087,000	Dinkes
01.028.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor (DBH-PR)	periode peyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Lhokseumawe	12 bulan	140,000,000	APBK	-	12 bulan	180,000,000	Dinkes
01.029.	Dukungan Manajemen BOK Kab/Kota dan Jampersal (DAK Non Fisik)	Periode Dukungn Manajemen BOK Kab/Kota dan Jampersal	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	336,000,000	APBK	-	12 bulan	336,000,000	Dinkes
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	Kota Lhokseumawe	100%	1,903,719,290	APBK	-	100%	1,928,719,290	Dinkes
02.005.	Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kota Lhokseumawe	1 paket	450,000,000	APBK	-	1 paket	450,000,000	Dinkes
02.011.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	400,000,000	APBK	-	1 paket	400,000,000	Dinkes
02.022.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Periode Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kota Lhokseumawe	2 Unit	170,000,000	APBK	-	12 bulan	170,000,000	Dinkes
02.023.	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Kota Lhokseumawe	1 Unit	36,890,000	APBK	-	12 bulan	36,890,000	Dinkes
02.024.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kota Lhokseumawe	35 Unit	623,619,290	APBK	-	12 bulan	623,619,290	Dinkes
02.030.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Periode Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	153,210,000	APBK	-	12 bulan	198,210,000	Dinkes
02.042.	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi sedang/berat	Kota Lhokseumawe	1 gedung	50,000,000	APBK	-	1 paket	50,000,000	Dinkes
02.048.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (DBH-CHT)	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Lhokseumawe	4 jenis	20,000,000	APBK	-	1 paket	0	Dinkes
03.	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase tingkat disiplin aparatur	Kota Lhokseumawe	100%	100,320,000	APBK	-	100%	815,120,000	Dinkes
03.002.	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas dan Perlengkapannya	Kota Lhokseumawe	688 Pasang	100,320,000	APBK	-	1 paket	815,120,000	Dinkes
05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan kegiatan pendidikan dan pelatihan formal yang diikuti	Kota Lhokseumawe	1 Keg	40,000,000	APBK	-	1 Keg	0	Dinkes
05.060.	Penetapan Angka Kredit (DBH-PR)	Periode kenaikan pangkat berjenjang pegawai	Kota Lhokseumawe	2 Kali	40,000,000	APBK	-	2 Kali	0	Dinkes

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2020			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		OPD Penanggung jawab
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
06.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Cakupan Penyediaan Dokumen Standard Pelayanan Minimum (SPM) SKPD	Kota Lhokseumawe	1 Dokumen	17,330,000	APBK	-	1 Dokumen	17,330,000	Dinkes
06.011.	Penyusunan Standart Pelayanan Minimum (SPM)	Jumlah Buku SPM	Kota Lhokseumawe	20 buah	17,330,000	APBK	-	1 paket	17,330,000	Dinkes
07.	Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja	Cakupan Penyediaan Dokumen perencanaan SKPK	Kota Lhokseumawe	1 Dokumen	14,540,000	APBK	-	1 Dokumen	14,540,000	Dinkes
07.002.	Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Rencana kerja SKPD	Kota Lhokseumawe	2 kali	14,540,000	APBK	-	12 bulan	14,540,000	Dinkes
15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Cakupan pelayanan obat dan perbekalan kesehatan, Persentase kesediaan obat, vaksin dan alat kesehatan di puskesmas	Kota Lhokseumawe	12 Bulan 100%	1,850,000,000	APBK	-	12 Bulan 100%	5,407,880,000	Dinkes
15.007.	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK)	Periode Ketersediaan Obat-obatan dan Perbekalan Kesehatan	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	1,650,000,000	APBK	-	100%	4,500,000,000	Dinkes
15.014.	Penanggulangan Obat Rusak dan Expired Date (DBH-PR)	Periode penanggulangan obat rusak dan Expired Date	Kota Lhokseumawe	2 periode	50,000,000	APBK	-	2 periode	50,000,000	Dinkes
15.017.	Pemeliharaan, Kalibrasi dan Uji Fungsi Kelayakan Operasional Alkes (DBH-PR)	Periode Pemeliharaan, Kalibrasi dan Uji Fungsi Kelayakan Operasional Alkes	Kota Lhokseumawe	2 periode	50,000,000	APBK	-	2 periode	50,000,000	Dinkes
15.019.	Pengadaan Pendukung Instalasi Farmasi Kesehatan (DAK)	Jumlah pengadaan pendukung instalasi farmasi kesehatan" (DAK)	Kota Lhokseumawe	1 Paket	100,000,000	APBK	-	1 paket	807,880,000	Dinkes
16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Puskesmas yang terakreditasi, Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	Kota Lhokseumawe	1 Puskesmas 100%	16,197,719,200	APBK	-	0 Puskesmas 100%	17,719,107,200	Dinkes
16.001.	Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas jaringannya	Periode Pelayanan Kesehatan di fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	10,595,615,000	APBK	-	12 Bulan	10,905,000,000	Dinkes
16.004.	Penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah	Periode penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penularan penyakit	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	40,000,000	APBK	-	12 Bulan	160,000,000	Dinkes
16.028.	Pelatihan Penanggulangan Krisis Kesehatan Akibat Bencana (DBH-PR)	Jumlah peserta pelatihan Penanggulangan Krisis Kesehatan Akibat Bencana	Kota Lhokseumawe	30 Orang	41,030,000	APBK	-	1 Kali	41,030,000	Dinkes
16.031.	Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Pemeliharaan Kesehatan Ibu Hamil, Bersalin dan Nifas (DBH-PR)	Jumlah peserta Peningkatan Kapsitas Masyarakat dalam Pemeliharaan Kesehatan Ibu Hamil, Bersalin dan Nifas	Kota Lhokseumawe	40 Orang	70,000,000	APBK	-	12 Bulan	70,000,000	Dinkes
16.032.	Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan (Jampersal) (DAK Non Fisik)	Jumlah peserta Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan Jaminan Persalinan (Jampersal)	Kota Lhokseumawe	600 Orang	100,000,000	APBK	-	1 paket	100,000,000	Dinkes
16.033.	Akreditasi Puskesmas (DAK Non FISIK)	jumlah puskesmas yang terakreditasi	Kota Lhokseumawe	5 Puskesmas	811,850,000	APBK	-	1 paket	811,850,000	Dinkes

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2020			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		OPD Penanggung jawab
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.035.	Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Tentang Penyakit Tidak Menular Kepada Masyarakat (DBH-PR)	Jumlah peserta Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Tentang Penyakit Tidak Menular Kepada Masyarakat	Kota Lhokseumawe	20 Orang	35,600,000	APBK	-	1 paket	35,600,000	Dinkes
16.036.	Peningkatan Pelayanan Dan Penanggulangan Masalah Kesehatan (DBH-PR)	Jumlah peserta Peningkatan Pelayanan Dan Penanggulangan Masalah Kesehatan	Kota Lhokseumawe	60 Orang	68,600,000	APBK	-	1 paket	68,600,000	Dinkes
16.038.	Perlombaan Tenaga Kesehatan Teladan (DBH-PR)	Jumlah peserta Tenaga Kesehatan Teladan	Kota Lhokseumawe	40 orang	30,000,000	APBK	-	1 paket	20,000,000	Dinkes
16.039.	Peningkatan Kapasitas Petugas Tentang Penyakit Tidak Menular (DBH-PR)	Jumlah peserta Peningkatan Kapasitas Petugas Tentang Penyakit Tidak Menular	Kota Lhokseumawe	120 Orang	30,790,000	APBK	-	1 paket	74,810,000	Dinkes
16.040.	Pelatihan Basic Trauma Cardiac Live Support (BTCLS) (DBH-PR)	Jumlah Peserta Pelatihan Basic Trauma Cardiac Live Support (BTCLS)	Kota Lhokseumawe	40 orang	20,000,000	APBK	-	1 paket	70,000,000	Dinkes
16.041.	Pelatihan Manajemen Puskesmas (DBH-PR)	Jumlah Peserta Pelatihan Manajemen Puskesmas	Kota Lhokseumawe	40 orang	39,000,000	APBK	-	1 paket	39,000,000	Dinkes
16.052.	Pembentukan Posbindu PTM (DBH-PR)	Jumlah Pembentukan Posbindu PTM	Kota Lhokseumawe	10 Posbindu	49,500,000	APBK	-	1 paket	49,500,000	Dinkes
16.111.	Pertemuan Lintas Program Perkembangan Kota Sehat (DBH-PR)	jumlah peserta Pertemuan Lintas Program Perkembangan Kota Sehat	Kota Lhokseumawe	40 orang	30,000,000	APBK	-	1 paket	80,000,000	Dinkes
16.126.	Peningkatan Kapasitas Kader Dalam Program Upaya Peningkatan Gizi Masyarakat (DBH-PR)	Jumlah Peserta Peningkatan Kapasitas Kader Dalam Program Upaya Peningkatan Gizi Masyarakat	Kota Lhokseumawe	40 orang	20,000,000	APBK	-	1 paket	80,000,000	Dinkes
16.130.	Pelatihan Advance Trauma Life Support (ATLS) DBH-PR	Jumlah Peserta Pelatihan Advance Trauma Life Support (ATLS)	Kota Lhokseumawe	40 orang	40,017,000	APBK	-	1 paket	170,000,000	Dinkes
16.132.	Pelatihan Penanggulangan Kegawatdaruratan Pada UGD (DBH-PR)	Jumlah Peserta Pelatihan Penanggulangan Kegawatdaruratan Pada UGD	Kota Lhokseumawe	40 orang	30,000,000	APBK	-	1 paket	50,000,000	Dinkes
16.133.	Pelatihan Jabatan Fungsional (DBH-PR)	Jumlah Peserta Pelatihan Jabatan Fungsional	Kota Lhokseumawe	30 Org	58,730,000	APBK	-	1 paket	58,730,000	Dinkes
16.134.	Pelayanan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (DBH-PR)	Periode Pelayanan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	Kota Lhokseumawe	1 Paket	80,000,000	APBK	-	1 paket	80,000,000	Dinkes
16.135.	Distribusi Obat dan E-Logistik (DAK Non Fisik)	Periode Distribusi Obat dan E-Logistik	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	40,667,700	APBK	-	1 paket	40,667,700	Dinkes
16.136.	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Kab/Kota (DAK Non Fisik)	Periode Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Kab/Kota	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	438,062,300	APBK	-	1 paket	438,062,300	Dinkes
16.137.	Penyehatan Pangan (DBH-PR)	Jumlah Petugas Penyehatan Pangan	Kota Lhokseumawe	5 Kegiatan	88,157,200	APBK	-	1 paket	88,157,200	Dinkes
16.138.	Pelatihan Perawat CMHN (DBH-PR)	Jumlah Peserta Pelatihan Perawat CMHN	Kota Lhokseumawe	40 orang	37,500,000	APBK	-	1 paket	67,500,000	Dinkes
16.139.	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas (DAK Non Fisik)	Periode Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Kab/Kota	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	3,000,000,000	APBK	-	12 bulan	3,500,000,000	Dinkes
16.140.	Peningkatan Pengetahuan Siswa SD/SMP/SMA tentang Prilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)(DBH-PR)	Jumlah Peserta Peningkatan Pengetahuan Siswa SD/SMP/SMA tentang Prilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kota Lhokseumawe	40 orang	102,600,000	APBK	-		120,600,000	Dinkes

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2020			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		OPD Penanggung jawab
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.141.	Pelayanan Bantuan Kesehatan untuk Kelompok Khusus	Periode Pelayanan Bantuan Kesehatan untuk Kelompok Khusus	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	300,000,000	APBK	-		500,000,000	Dinkes
17	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase Kecamatan/ desa sehat, Persentase pasar sehat	Kota Lhokseumawe	5%	196,266,500	APBK	-	5%	196,266,500	Dinkes
17.013.	Sosialisasi Keamanan Pangan (DBH-PR)	Jumlah Peserta Sosialisasi Keamanan Pangan	Kota Lhokseumawe	35 Orang	50,000,000	APBK	-	1 paket	50,000,000	Dinkes
17.014.	Pelatihan Peningkatan Mutu Pangan untuk Industri Rumah Tangga (DBH-PR)	Jumlah Peserta Pelatihan Peningkatan Mutu Pangan Untuk Industri Rumah Tangga	Kota Lhokseumawe	40 Orang	56,266,500	APBK	-	1 paket	56,266,500	Dinkes
17.018.	Pengawasan dan Pembinaan Makanan/Minuman (DBH-PR)	Periode Pengawasan dan Pembinaan Makanan/Minuman	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	50,000,000	APBK	-	1 paket	50,000,000	Dinkes
17.022.	Gerakan Masyarakat Cerdas Menggunakan Obat/GEMA CERMAT (DBH-PR)	Periode Gerakan Masyarakat Cerdas Menggunakan Obat/GEMA CERMAT (DBH-PR)	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	40,000,000	APBK	-	1 paket	40,000,000	Dinkes
19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Kecamatan yang melaksanakan minimal 5 tema kampanye Gerakan Masyarakat (GERMAS) Hidup Sehat	Kota Lhokseumawe	1 Kecamatan	1,021,500,000	APBK	-	1 Kecamatan	1,109,165,100	Dinkes
19.040.	Sosialisasi Bahaya Penyalahgunaan Narkoba di Institusi Pendidikan Tingkat Pertama (DBH-PR)	Jumlah Peserta Sosialisasi Bahaya Penyalahgunaan Narkoba di Institusi Pendidikan Tingkat Pertama	Kota Lhokseumawe	40 Orang	48,500,000	APBK	-	1 paket	83,497,000	Dinkes
19.044.	Pelatihan Konselor Sebaya Dalam Peningkatan Kesehatan Reproduksi (DBH-PR)	Jumlah Peserta Pelatihan Konselor Sebaya Dalam Peningkatan Kesehatan Reproduksi	Kota Lhokseumawe	50 Orang	75,000,000	APBK	-	1 paket	75,000,000	Dinkes
19.045.	Sosialisasi Bahaya Penyalahgunaan Narkoba di Institusi Pendidikan Tingkat Menengah Atas (DBH-PR)	Jumlah Peserta Sosialisasi Bahaya Penyalahgunaan Narkoba di Institusi Pendidikan Tingkat Menengah Atas	Kota Lhokseumawe	45 Orang	63,000,000	APBK	-	1 paket	100,000,000	Dinkes
19.046.	Sosialisasi Bahaya Penyalahgunaan Narkoba di Institusi Pendidikan Tinggi (DBH-PR)	Jumlah Peserta Sosialisasi Bahaya Penyalahgunaan Narkoba di Institusi Pendidikan Tinggi	Kota Lhokseumawe	45 Orang	50,000,000	APBK	-	1 paket	73,900,000	Dinkes
19.048.	Sosialisasi Bahaya Penyalahgunaan Narkoba di Institusi Pendidikan Tingkat Dasar (DBH-PR)	siswa terhindar dari narkoba	Kota Lhokseumawe	45 Orang	54,400,000	APBK	-	1 paket	64,497,000	Dinkes
19.053.	Pengadaan Media Promosi Kesehatan (DBH-PR)	Jumlah Pengadaan Media Promosi Kesehatan	Kota Lhokseumawe	1 paket	61,000,000	APBK	-	1 paket	61,000,000	Dinkes
19.054.	Hari Kesehatan Nasional (HKN) (DBH-PR)	Jumlah Peserta Hari Kesehatan Nasional (HKN)	Kota Lhokseumawe	200 Peserta	65,100,000	APBK	-	1 paket	65,100,000	Dinkes
19.060.	Advokasi Lintas Sektor untuk Mendukung Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GEMAS) (DBH-PR)	Jumlah Peserta Advokasi Lintas Sektor untuk Mendukung Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GEMAS)	Kota Lhokseumawe	40 Peserta	45,000,000	APBK	-	1 paket	75,000,000	Dinkes
19.068.	Advokasi dan Sosialisasi Kota Sehat (DBH-PR)	Jumlah Peserta Advokasi dan Sosialisasi Kota Sehat	Kota Lhokseumawe	40 Peserta	49,900,000	APBK	-	1 paket	68,900,000	Dinkes
19.069.	Peningkatan Pengetahuan Tentang GERMAS di Institusi Menengah Atas (DBH-PR)	Jumlah Peserta Peningkatan Pengetahuan Tentang GERMAS di Institusi Menengah Atas	Kota Lhokseumawe	40 Peserta	61,600,000	APBK	-	1 paket	61,600,000	Dinkes
19.070.	Sosialisasi Pesantren Sehat (DBH-PR)	Jumlah Peserta Sosialisasi Pesantren Sehat	Kota Lhokseumawe	40 Peserta	55,000,000	APBK	-	40 Peserta	112,671,100	Dinkes

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2020			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		OPD Penanggung jawab
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.071.	Advokasi Lintas Sektor Tentang PIS-PK (DBH-PR)	Jumlah Peserta Advokasi Lintas Sektor Tentang PIS-PK	Kota Lhokseumawe	40 Peserta	43,000,000	APBK	-	40 Peserta	43,000,000	Dinkes
19.074.	Sosialisasi Bahaya Penyalahgunaan Narkoba	Jumlah Peserta Sosialisasi Bahaya Penyalahgunaan Narkoba	Kota Lhokseumawe	40 Peserta	180,000,000	APBK	-	40 Peserta	50,000,000	Dinkes
19.075.	Peningkatan Pengetahuan Siswa SD/SMP/SMA tentang Germas (DBH-PR)	Jumlah Peserta Peningkatan Pengetahuan Siswa SD/SMP/SMA tentang Germas	Kota Lhokseumawe	40 Peserta	80,000,000	APBK	-	40 Peserta	80,000,000	Dinkes
19.076.	Peningkatan Pengetahuan Siswa SD/SMP/SMA tentang Kesehatan Reproduksi (DBH-PR)	Jumlah Peserta Peningkatan Pengetahuan Siswa SD/SMP/SMA tentang Kesehatan Reproduksi	Kota Lhokseumawe	40 Peserta	90,000,000	APBK	-	40 Peserta	95,000,000	Dinkes
20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan, Cakupan balita gizi buruk dan gizi kurang mendapatkan PMT	Kota Lhokseumawe	100% 85%	2,155,962,160	APBK	-	100% 90%	3,028,009,520	Dinkes
20.002.	Pemberian tambahan makanan dan vitamin	Jumlah Pemberian tambahan makanan dan vitamin	Kota Lhokseumawe	6 Puskesmas	200,000,000	APBK	-	1 paket	300,000,000	Dinkes
20.008.	Penanggulangan Ibu Hamil Kekurangan Energi Kalori (KEK) dan Anemia	Jumlah Penanggulangan Ibu Hamil Kekurangan Energi Kalori (KEK) dan Anemia	Kota Lhokseumawe	40 Orang	20,000,000	APBK	-	1 paket	200,000,000	Dinkes
20.015.	Pemberian Tambahan Makanan (BMT) Posyandu (DBH-PR)	Jumlah Pemberian Tambahan Makanan (BMT) Posyandu	Kota Lhokseumawe	101 Posyandu	120,000,000	APBK	-	1 paket	120,000,000	Dinkes
20.016.	Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin (DBH-PR)	Jumlah Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin	Kota Lhokseumawe	6 Puskesmas	1,222,399,000	APBK	-	12 bulan	1,531,199,000	Dinkes
20.017.	Penanggulangan KEP, AGB, GAKY, Kurang Vit A dan Kurang Zak Gizi Mikro dan Lainnya (DBH-PR)	Jumlah Penanggulangan KEP, AGB, GAKY, Kurang Vit A dan Kurang Zak Gizi Mikro dan Lainnya	Kota Lhokseumawe	20 Kasus	49,998,520	APBK	-	1 paket	49,998,520	Dinkes
20.018.	Penurunan Stunting (DAK)	Periode Penurunan Stunting (DAK)	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	543,564,640	APBK	-	1 paket	826,812,000	Dinkes
21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase desa STBM, Persentase Desa ODF, Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melakukan pengolahan limbah medis	Kota Lhokseumawe	20%, 20%, 50%	1,565,990,000	APBK	-	20%, 20%, 50%	1,578,790,000	Dinkes
21.015.	Pengawasan Limbah Medis di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Periode Pengawasan Limbah Medis di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kota Lhokseumawe	4 Kali	80,000,000	APBK	-	1 paket	80,000,000	Dinkes
21.016.	Laboratorium Kesehatan Lingkungan	Jumlah Laboratorium Kesehatan Lingkungan	Kota Lhokseumawe	1 gedung	41,540,000	APBK	-	1 paket	41,540,000	Dinkes
21.018.	Pengukuran Kebugaran Jasmani (DBH-PR)	jumlah Peserta Pengukuran Kebugaran Jasmani	Kota Lhokseumawe	100 Peserta	91,700,000	APBK	-	1 paket	94,500,000	Dinkes
21.019.	Pelatihan Fasilitator STBM (DBH-PR)	Jumlah Peserta Pelatihan Fasilitator STBM	Kota Lhokseumawe	40 Peserta	44,450,000	APBK	-	1 paket	44,450,000	Dinkes
21.020.	Pendataan Sanitasi Kesehatan Lingkungan (DBH-PR)	Jumlah Peserta Pendataan Sanitasi Kesehatan Lingkungan	Kota Lhokseumawe	70 Peserta	158,300,000	APBK	-	1 paket	158,300,000	Dinkes
21.043.	Sosialisasi Keamanan Pangan (DBH-PR)	Jumlah Peserta Sosialisasi Keamanan Pangan	Kota Lhokseumawe	50 Peserta	80,000,000	APBK	-	1 paket	80,000,000	Dinkes
21.046.	Advokasi dan Sosialisasi Kota Sehat (DBH-PR)	Jumlah Peserta Advokasi dan Sosialisasi Kota Sehat	Kota Lhokseumawe	40 Peserta	85,000,000	APBK	-	1 paket	85,000,000	Dinkes

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2020			Catatan Penteng	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		OPD Penanggung jawab
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21.047.	Pertemuan Lintas Program Pengembangan Kota Sehat (DBH-PR)	Jumlah peserta pertemuan	Kota Lhokseumawe	40 Orang	65,000,000	APBK	-	1 paket	75,000,000	Dinkes
21.048.	Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Lhokseumawe (OTSUS)	Jumlah Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Lhokseumawe (OTSUS)	Kota Lhokseumawe	1 gedung	800,000,000	APBK	-	1 paket	800,000,000	Dinkes
21.049.	Peningkatan Pengetahuan Siswa SD/SMP/SMA tentang Hygiene dan Sanitasi (DBH-PR)	Jumlah Peserta Peningkatan Pengetahuan Siswa SD/SMP/SMA tentang Hygiene dan Sanitasi	Kota Lhokseumawe	50 Peserta	120,000,000	APBK	-		120,000,000	Dinkes
22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA, Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	Kota Lhokseumawe	80%, 100%	1,756,155,000	APBK	-	90% 100%	1,981,956,750	Dinkes
22.002.	Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging	Jumlah Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging	Kota Lhokseumawe	1 Unit	20,000,000	APBK	-	1 paket	90,000,000	Dinkes
22.008.	Peningkatan imunisasi	preode cakupan pelayanan imunisasi	Kota Lhokseumawe	12 bulan	800,000	APBK	-	1 paket	80,000,000	Dinkes
22.037.	Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Tentang Imunisasi (DBH-PR)	Jumlah Peserta Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Tentang Imunisasi	Kota Lhokseumawe	36 Orang	11,940,000	APBK	-	1 paket	11,940,000	Dinkes
22.050.	Peningkatan Pengetahuan Masyarakat tentang Penyakit Menular di Institusi Pendidikan Tingkat Menengah Atas (DBH PR)	Jumlah Peserta Peningkatan Pengetahuan Masyarakat tentang Penyakit Menular di Institusi Pendidikan Tingkat Menengah Atas	Kota Lhokseumawe	40 Orang	40,708,000	APBK	-	1 paket	40,708,000	Dinkes
22.051.	Peningkatan Pengetahuan Masyarakat tentang Penyakit Menular di Institusi Pendidikan Tingkat Menengah Pertama (DBH PR)	Jumlah Peserta Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Tentang Penyakit Menular di Institusi Pendidikan Tingkat Menengah Pertama	Kota Lhokseumawe	40 Orang	48,508,000	APBK	-	1 paket	48,508,000	Dinkes
22.052.	Peningkatan Pengetahuan Masyarakat tentang Penyakit Menular di Institusi Pendidikan Tingkat Menengah Dasar (DBH PR)	Jumlah Peserta Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang penyakit menular di institusi pendidikan Tingkat sekolah dasar	Kota Lhokseumawe	40 Orang	82,203,000	APBK	-	1 paket	82,203,000	Dinkes
22.053.	Peningkatan Pengetahuan Masyarakat tentang Percepatan Penanggulangan Penyakit TB (DBH PR)	Jumlah Peserta Peningkatan Pengetahuan Masyarakat tentang Percepatan Penanggulangan Penyakit TB	Kota Lhokseumawe	400 Orang	97,900,000	APBK	-	1 paket	120,492,000	Dinkes
22.054.	Pelatihan Kapasitas Petugas Imunisasi tentang Pengelolaan dan Pemeliharaan Vaksin Imunisasi (DBH PR)	Jumlah Peserta Pelatihan Kapasitas Petugas Imunisasi tentang Pengelolaan dan Pemeliharaan Vaksin Imunisasi	Kota Lhokseumawe	35 Orang	42,760,000	APBK	-	1 paket	42,760,000	Dinkes
22.059.	Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Tentang Penyakit Menular (DBH-PR)	Jumlah Peserta Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Tentang Penyakit Menular	Kota Lhokseumawe	40 Orang	65,000,000	APBK	-	1 paket	120,000,000	Dinkes
22.061.	Penguatan Kapasitas Bides Tentang Imunisasi (DBH-PR)	Jumlah Peserta Penguatan Kapasitas Bides Tentang Imunisasi	Kota Lhokseumawe	80 Orang	90,000,000	APBK	-	1 paket	90,000,000	Dinkes
22.062.	Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk (DBH-PR)	Periode Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk	Kota Lhokseumawe	68 Desa	305,189,000	APBK	-	1 paket	305,189,000	Dinkes
22.084.	Peningkatan Kapasitas Guru UKS dan Murid Program BIAS (DBH-PR)	Jumlah Peserta Peningkatan Kapasitas Guru UKS dan Murid Program BIAS	Kota Lhokseumawe	81 Org	35,544,000	APBK	-	1 paket	35,544,000	Dinkes

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2020			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		OPD Penanggung jawab
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22.095.	Pembentukan Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat (DBH-PR)	Jumlah Peserta Pembentukan Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat	Kota Lhokseumawe	30 Orang	37,086,000	APBK	-	1 paket	37,086,000	Dinkes
22.096.	Pembentukan Desa Siaga Sehat Jiwa (DBH-PR)	Jumlah Pembentukan Desa Siaga Sehat Jiwa	Kota Lhokseumawe	5 Desa	64,600,000	APBK	-	1 paket	68,009,750	Dinkes
22.097.	Pemantauan Pasien ODGJ berat (DBH-PR)	Periode Pemantauan Pasien ODGJ berat	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	45,000,000	APBK	-	1 paket	75,000,000	Dinkes
22.105.	Pemilihan Duta Anti Narkoba (DBH-PR)	Jumlah Peserta Pemilihan Duta Anti Narkoba	Kota Lhokseumawe	20 Orang	28,000,000	APBK	-	1 paket	48,000,000	Dinkes
22.106.	Pelaksanaan Car Free Day (DBH-PR)	Periode Pelaksanaan Car Free Day	Kota Lhokseumawe	5 Kali	15,000,000	APBK	-	1 paket	45,000,000	Dinkes
22.107.	Sosialisasi Gerakan Satu Rumah Satu Jumantik (DBH-PR)	Jumlah Peserta Sosialisasi Gerakan Satu Rumah Satu Jumantik	Kota Lhokseumawe	Masyarakat	50,050,000	APBK	-	1 paket	50,050,000	Dinkes
22.110.	Peringatan Hari AIDS Sedunia (HAS) (DBH-PR)	Terlaksananya peringatan Hari AIDS Sedunia	Kota Lhokseumawe	40 Orang	61,850,000	APBK	-	1 paket	73,450,000	Dinkes
22.113.	Peningkatan Kapasitas Petugas Surveilans Tentang Penyelidikan Epidemiologi KLB Keracunan Pangan (DBH-PR)	Jumlah Peserta Peningkatan Kapasitas Petugas Surveilans Tentang Penyelidikan Epidemiologi KLB Keracunan Pangan	Kota Lhokseumawe	40 Orang	35,380,000	APBK	-	1 paket	35,380,000	Dinkes
22.116.	Peningkatan Pengetahuan Bagi Tenaga Kesehatan Tentang Imunisasi (DBH-PR)	Jumlah Peserta Peningkatan Pengetahuan Bagi Tenaga Kesehatan Tentang Imunisasi	Kota Lhokseumawe	40 Orang	51,000,000	APBK	-	1 paket	51,000,000	Dinkes
22.124.	Advokasi Eliminasi Filariasi Kota Lhokseumawe (DBH-PR)	Jumlah Peserta Advokasi Eliminasi Filariasi Kota Lhokseumawe	Kota Lhokseumawe	40 Orang	41,280,000	APBK	-	1 paket	41,280,000	Dinkes
22.125.	Peningkatan Kapasitas Petugas di Puskesmas dan Jejaring Dalam Penanggulangan Penyakit Tuberculosis (DBH-PR)	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Petugas di Puskesmas, RS dan Jejaring dalam Penanggulangan Penyakit Tuberculosis	Kota Lhokseumawe	40 Orang	25,340,000	APBK	-	1 paket	25,340,000	Dinkes
22.126.	Pengendalian Penyakit (DAK)	Preode pengendalian penyakit sesuai standar kesehatan	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	85,017,000	APBK	-	1 paket	85,017,000	Dinkes
22.127.	Peningkatan Pengetahuan Siswa SD/SMP/SMA tentang Penyakit Menular (DBH-PR)	Jumlah Peserta Peningkatan Pengetahuan Siswa SD/SMP/SMA tentang Penyakit Menular	Kota Lhokseumawe	70 Orang	90,000,000	APBK	-	70 Orang	90,000,000	Dinkes
22.128.	Peningkatan Pengetahuan Siswa SD/SMP/SMA tentang Penyakit DBD (DBH-PR)	Jumlah Peserta Peningkatan Pengetahuan Siswa SD/SMP/SMA tentang Penyakit DBD	Kota Lhokseumawe	70 Orang	95,000,000	APBK	-	70 Orang	95,000,000	Dinkes
22.129.	Peningkatan Pengetahuan Siswa SD/SMP/SMA tentang Penyakit Tuberculosis (DBH-PR)	Jumlah Peserta Peningkatan Pengetahuan Siswa SD/SMP/SMA tentang Penyakit Tuberculosis	Kota Lhokseumawe	70 Orang	94,000,000	APBK	-	70 Orang	95,000,000	Dinkes
22.130.	Peningkatan Pengetahuan Siswa SD/SMP/SMA tentang Penyakit Tidak Menular (DBH-PR)	Jumlah Peserta Peningkatan Pengetahuan Siswa SD/SMP/SMA tentang Penyakit Tidak Menular	Kota Lhokseumawe	70 Orang	97,000,000	APBK	-	70 Orang	0	Dinkes
23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Jumlah SDM kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya	Kota Lhokseumawe	100%	103,340,000	APBK	-	100%	103,340,000	Dinkes
23.013.	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Kesehatan (DBH-PR)	Jumlah Peserta Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Kesehatan	Kota Lhokseumawe	25 Orang	51,880,000	APBK	-	1 paket	51,880,000	Dinkes
23.014.	Pembinaan dan Pengawasan Mutu SDM (DBH-PR)	Jumlah Peserta Pembinaan dan Pengawasan Mutu SDM	Kota Lhokseumawe	40 Orang	51,460,000	APBK	-	1 paket	51,460,000	Dinkes

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2020			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		OPD Penanggung jawab
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya	Optimalisasi sarana dan prasarana kesehatan	Kota Lhokseumawe	80%	11,798,211,946	APBK	-	80%	9,816,015,000	Dinkes
25.027.	Pengadaan, Peningkatan, Perbaikan Sarana Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Periode Pengadaan, Peningkatan, Perbaikan Sarana Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	1,056,900,000	APBK	-	1 paket	698,500,000	Dinkes
25.032.	Pembangunan dan Pengadaan Sarana & Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya (Dana DAK)	gedung yang representatif	Kota Lhokseumawe	1 paket	2,204,437,000	APBK	-	1 paket	2,204,437,000	Dinkes
25.041.	Pengadaan Ambulance Puskesmas	Jumlah Pengadaan Ambulance Puskesmas	Kota Lhokseumawe	2 Unit	500,000,000	APBK	-	1 paket	3,000,000,000	Dinkes
25.042.	Pengadaan Peningkatan, Perbaikan Sarana Prasarana Puskesmas dan Jaringannya (DBH-CHT)	Jumlah Pengadaan Peningkatan, Perbaikan Sarana Prasarana Puskesmas dan Jaringannya	Kota Lhokseumawe	1 paket	133,078,000	APBK	-	1 paket	187,078,000	Dinkes
25.043.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kesehatan (DBH-CHT)	Periode Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kesehatan	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	100,000,000	APBK	-	1 paket	400,000,000	Dinkes
25.047.	Pembangunan dan Pengadaan Sarana & Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya (OTSUS)	Jumlah Pembangunan dan Pengadaan Sarana & Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya (OTSUS)	Kota Lhokseumawe	3 paket	7,113,796,946	APBK	-	1 paket	2,856,000,000	Dinkes
25.048.	Pembangunan, Peningkatan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya (DBH-PR)	Pembangunan, Peningkatan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Kota Lhokseumawe	1 paket	200,000,000	APBK	-	1 paket	200,000,000	Dinkes
25.049.	Pemeliharaan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya (DBH-PR)	Jumlah Pemeliharaan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Kota Lhokseumawe	1 Unit	400,000,000	APBK	-	1 Unit	200,000,000	Dinkes
25.050.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (DBH-PR)	Periode Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	90,000,000	APBK	-	12 Bulan	70,000,000	Dinkes
26	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Optimalisasi sarana dan prasarana kesehatan	Kota Lhokseumawe	100%	1,700,000,000	APBK	-	100%	1,800,000,000	Dinkes
26.031.	Pembangunan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana PSC (OTSUS)	Jumlah Pembangunan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana PSC	Kota Lhokseumawe	1 paket	1,700,000,000	APBK	-	1 paket	1,800,000,000	Dinkes
28	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Cakupan playanan kesehatan anak berkebutuhan khusus	Kota Lhokseumawe	80%	109,650,000	APBK	-	80%	437,650,000	Dinkes
28.002.	Kemitraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular	Periode Pemberantasan penyakit menular	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	3,000,000	APBK	-	1 paket	300,000,000	Dinkes
28.014.	Forum Peduli Anak Autis dan Anak Berkebutuhan Khusus (DBH-PR)	Jumlah Peserta Forum Peduli Anak Autis dan Anak Berkebutuhan Khusus	Kota Lhokseumawe	40 Orang	45,000,000	APBK	-	1 paket	45,000,000	Dinkes
28.015.	Pelayanan Anak Autis dan Anak Berkebutuhan Khusus (DBH-PR)	Jumlah Anak Autis dan Anak Berkebutuhan Khusus yang mendapatkan Pelayanan	Kota Lhokseumawe	40 Orang	42,650,000	APBK	-	1 paket	42,650,000	Dinkes

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2020			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		OPD Penanggung jawab
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28.016.	Pengadaan Sarana dan Prasarana UTD Kota Lhokseumawe (OTSUS)	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana UTD Kota Lhokseumawe	Kota Lhokseumawe	1 paket	19,000,000	APBK	-	1 paket	50,000,000	Dinkes
30	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	Cakupan Desa dengan posyandu lansia, Cakupan Desa dengan kegiatan aktifitas fisik lansia	Kota Lhokseumawe	90%, 95 %	80,683,347	APBK	-	90%, 95 %	85,000,000	Dinkes
30.012.	Pelatihan Kader Usia Lanjut Desa (DBH-PR)	Jumlah Peserta Pelatihan Kader Usia Lanjut Desa	Kota Lhokseumawe	40 Orang	43,000,000	APBK	-	1 paket	43,000,000	Dinkes
30.015.	Peningkatan Kapasitas Petugas Pada Skrening Kesehatan Lanjut Usia (DBH-PR)	Jumlah Peserta Peningkatan Kapasitas Petugas Pada Skrening Kesehatan Lanjut Usia	Kota Lhokseumawe	70 Orang	37,683,347	APBK	-	1 paket	42,000,000	Dinkes
32	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup, Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	Kota Lhokseumawe	0%	467,150,000	APBK	-	0%	480,150,000	Dinkes
32.019.	Pelatihan Audit Maternal Perinatal (AMP) (DBH-PR)	Jumlah Peserta Pelatihan Audit Maternal Perinatal (AMP)	Kota Lhokseumawe	50 Orang	52,350,000	APBK	-	1 paket	52,350,000	Dinkes
32.031.	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Berkebutuhan Khusus (DBH-PR)	Jumlah Petugas Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Berkebutuhan Khusus	Kota Lhokseumawe	45 Orang	53,000,000	APBK	-	1 paket	63,000,000	Dinkes
32.033.	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Sekolah Dasar (SD) dan Sederajat (DBH-PR)	Jumlah Peugas Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Sekolah Dasar (SD) dan Sederajat	Kota Lhokseumawe	75 Orang	42,000,000	APBK	-	1 paket	42,000,000	Dinkes
32.034.	Pelatihan Usaha Kesehatan Sekolah dan Perilaku Sehat Anak Usia Sekolah (DBH-PR)	Jumlah Peserta Pelatihan Usaha Kesehatan Sekolah dan Perilaku Sehat Anak Usia Sekolah	Kota Lhokseumawe	70 Orang	32,800,000	APBK	-	1 paket	32,800,000	Dinkes
32.037.	Peningkatan Kapasitas Pemeriksaan Payudara dan Kanker Servik Usia Reproduksi (DBH-PR)	Jumlah Peserta Peningkatan Kapasitas Pemeriksaan Payudara dan Kanker Servik Usia Reproduksi	Kota Lhokseumawe	40 Orang	52,000,000	APBK	-	1 paket	52,000,000	Dinkes
32.038.	Peningkatan Kapasitas Petugas dan Masyarakat Deteksi Gangguan Gizi Prahamil dan Masa Subur (DBH-PR)	Jumlah Peserta Peningkatan Kapasitas Petugas dan Masyarakat Deteksi Gangguan Gizi Prahamil dan Masa Subur	Kota Lhokseumawe	75 Orang	44,000,000	APBK	-	1 paket	44,000,000	Dinkes
32.039.	Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Pemeliharaan Kesehatan Bumil, Bulin, Bufas (DBH-PR)	Pelatihan Peserta Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Pemeliharaan Kesehatan Bumil, Bulin, Bufas	Kota Lhokseumawe	76 Orang	21,000,000	APBK	-	1 paket	21,000,000	Dinkes
32.041.	Pelatihan Asuhan Persalinan Normal (APN) (DBH-PR)	Jumlah Peserta Pelatihan Asuhan Persalinan Normal (APN)	Kota Lhokseumawe	80 Orang	32,000,000	APBK	-	1 paket	32,000,000	Dinkes
32.042.	Pelatihan Pelayanan Islami Pada Bldan (DBH-PR)	Jumlah Peserta Pelatihan Pelayanan Islami Pada Bldan	Kota Lhokseumawe	80 Orang	52,000,000	APBK	-	1 paket	52,000,000	Dinkes
32.043.	Pelatihan Kegawatdaruratan Bayi (DBH-PR)	Jumlah Peserta Pelatihan Kegawatdaruratan Bayi	Kota Lhokseumawe	30 Orang	32,000,000	APBK	-	1 paket	32,000,000	Dinkes
32.044.	Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Baduta (DBH-PR)	Periode Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Baduta	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	22,000,000	APBK	-	1 paket	22,000,000	Dinkes
32.045.	Pertemuan Lintas Sektor dan Lintas Program TP-UKS (DBH-PR)	Periode Pertemuan Lintas Sektor dan Lintas Program TP-UKS	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	32,000,000	APBK	-	1 paket	35,000,000	Dinkes
34	Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan	Cakupan pelayanan Informasi kesehatan	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	324,575,000	APBK	-	12 Bulan	463,775,000	Dinkes

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2020			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		OPD Penanggung jawab
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34.017.	Penilaian Mandiri Kualitas Data Rutin (PMKDR) Kota Lhokseumawe (DBH-PR)	Jumlah Peserta Penilaian Mandiri Kualitas Data Rutin (PMKDR) Kota Lhokseumawe	Kota Lhokseumawe	28 Orang	32,500,000	APBK	-	1 paket	32,500,000	Dinkes
34.021.	Peningkatan Sistem Informasi Publik Kesehatan Terpadu Terintegrasi Kota Lhokseumawe (DBH-PR)	Peningkatan Jumlah Sistem Informasi Publik Kesehatan Terpadu Terintegrasi Kota Lhokseumawe	Kota Lhokseumawe	1 Paket	42,000,000	APBK	-	1 paket	42,000,000	Dinkes
34.024.	Pelatihan Sistem Penganggaran Berbasis Kinerja Pada Puskesmas di Kota Lhokseumawe	Jumlah Peserta Pelatihan Sistem Penganggaran Berbasis Kinerja Pada Puskesmas di Kota Lhokseumawe	Kota Lhokseumawe	21 Orang	800,000	APBK	-	1 paket	80,000,000	Dinkes
34.034.	Pengembangan Sistem Pengelolaan Informasi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas (DBH-PR)	Jumlah Peserta Pengembangan Sistem Pengelolaan Informasi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	Kota Lhokseumawe	30 Orang	47,510,000	APBK	-	1 paket	47,510,000	Dinkes
34.038.	Pembinaan dan Pengawasan Fasilitas Kesehatan (DBH-PR)	Periode Pembinaan dan Pengawasan Fasilitas Kesehatan	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	79,000,000	APBK	-	1 paket	79,000,000	Dinkes
34.039.	Pengelolaan Sistem Informasi Publik Kesehatan Terpadu Terintegrasi Kota Lhokseumawe (DBH-PR)	Periode Pengelolaan Sistem Informasi Publik Kesehatan Terpadu Terintegrasi Kota Lhokseumawe	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	26,050,000	APBK	-	1 paket	26,050,000	Dinkes
34.040.	Pelatihan SIKDA Generik dan Informasi Kesehatan (DBH-PR)	Jumlah Peserta Pelatihan SIKDA Generik dan Informasi Kesehatan	Kota Lhokseumawe	30 Orang	29,000,000	APBK	-	30 Orang	89,000,000	Dinkes
34.041.	Penyusunan LKJIP Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe (DBH-PR)	Jumlah Buku laporan kinerja instansi pemerintah	Kota Lhokseumawe	10 Buku	15,000,000	APBK	-	1 paket	15,000,000	Dinkes
34.042.	Penyusunan Profil Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe (DBH-PR)	Jumlah Buku Profil Kesehatan Kota Lhokseumawe	Kota Lhokseumawe	10 Buku	15,935,000	APBK	-	1 paket	15,935,000	Dinkes
34.043.	Monitoring dan Evaluasi SIKDA GENERIK (DBH-PR)	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi SIKDA GENERIK (DBH-PR)	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	36,780,000	APBK	-	1 paket	36,780,000	Dinkes
35	Program Peningkatan Kapasitas Tenaga Medis dan Para Medis Serta Sistem Informasi Kesehatan Daerah	Cakupan SDM tenaga kesehatan yang mempunyai kompetensi dan sudah terintegrasi (STR)	Kota Lhokseumawe	30 Orang	338,177,949	APBK	-	30 Orang	338,177,949	Dinkes
35.002.	Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan (DBH-PR)	Jumlah Peserta Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan	Kota Lhokseumawe	45 Orang	54,289,074	APBK	-	1 paket	54,289,074	Dinkes
35.004.	Penilaian Tenaga Kesehatan Berprestasi/Teladan (DBH-PR)	Jumlah Peserta Penilaian Tenaga Kesehatan Berprestasi/Teladan	Kota Lhokseumawe	30 Orang	55,888,875	APBK	-	1 paket	55,888,875	Dinkes
35.005.	Peningkatan Sumber Daya Tenaga Kesehatan (DBH-PR)	Jumlah Paserta Peningkatan Sumber Daya Tenaga Kesehatan	Kota Lhokseumawe	80 Orang	228,000,000	APBK	-	1 paket	228,000,000	Dinkes
	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat				319,577,900,472	APBK	-		229,129,706,354	Dinas PUPR
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar				319,577,900,472	APBK	-		229,129,706,354	Dinas PUPR
1.03.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				205,380,487,535	APBK	-		194,547,311,148	Dinas PUPR
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kota Lhokseumawe	100%	1,236,163,702	APBK	-	100%	1,221,010,053	Dinas PUPR
01.001.	Penyediaan jasa surat menyurat	Periode Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	2,686,200	APBK	-	12 Bulan	2,954,820	Dinas PUPR

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2020			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		OPD Penanggung jawab
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01.002.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Periode Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	335,960,000	APBK	-	12 Bulan	296,493,560	Dinas PUPR
01.007.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Pejabat Pengelola Keuangan SKPD (34 org x 12 bln)	Kota Lhokseumawe	432 OB	260,100,000	APBK	-	432 OB	275,357,280	Dinas PUPR
01.010.	Penyediaan alat tulis kantor	Periode Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	65,786,702	APBK	-	12 Bulan	72,365,372	Dinas PUPR
01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Periode Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	20,000,000	APBK	-	12 Bulan	52,446,391	Dinas PUPR
01.013.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Periode Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	9,922,000	APBK	-	12 Bulan	10,914,200	Dinas PUPR
01.015.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Peundang-undangan (1 eks x 365 hari)	Kota Lhokseumawe	365 eks	32,758,800	APBK	-	365 eks	3,034,680	Dinas PUPR
01.017.	Penyediaan makanan dan minuman	Periode Penyediaan Makanan dan Minuman	Kota Lhokseumawe	11 Bulan	25,000,000	APBK	-	11 Bulan	4,791,600	Dinas PUPR
01.018.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Periode Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	72,600,000	APBK	-	12 Bulan	79,860,000	Dinas PUPR
01.020.	Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap	Jumlah Pegawai Tidak Tetap (72 Org x 12 Bln)	Kota Lhokseumawe	864 OB	411,350,000	APBK	-	864 OB	422,792,150	Dinas PUPR
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kota Lhokseumawe	100%	14,491,897,751	APBK	-	100%	1,237,040,172	Dinas PUPR
02.003.	Pembangunan gedung kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung yang Terbangun	Kota Lhokseumawe	5 Paket	11,815,447,001	APBK	-	3 Gedung	817,252,985	Dinas PUPR
02.005.	Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas	Kota Lhokseumawe	12 Unit	1,949,514,750	APBK	-	3 Unit	0	Dinas PUPR
02.011.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Lhokseumawe	10 Jenis	528,100,000	APBK	-	10 Jenis	167,419,036	Dinas PUPR
02.022.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Periode Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	6,050,000	APBK	-	12 Bulan	6,655,000	Dinas PUPR
02.023.	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan (1 unit x 12 bln)	Kota Lhokseumawe	12 UB	32,186,000	APBK	-	12 UB	35,404,600	Dinas PUPR
02.024.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (8 unit x 12 bln)	Kota Lhokseumawe	96 UB	147,600,000	APBK	-	96 UB	201,596,551	Dinas PUPR
02.028.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Periode Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	13,000,000	APBK	-	12 Bulan	8,712,000	Dinas PUPR
05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal yang Diikuti	Kota Lhokseumawe	100%	200,000,000	APBK	-	100%	100,000,000	Dinas PUPR
05.001.	Pendidikan dan pelatihan formal	Periode Pendidikan dan Pelatihan Formal Aparatur	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	200,000,000	APBK	-	12 Bulan	100,000,000	Dinas PUPR
06.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Cakupan Penyediaan Dokumen Standard Pelayanan Minimum (SPM) SKPD	Kota Lhokseumawe	1 Dokumen	22,000,000	APBK	-	1 Dokumen	7,623,000	Dinas PUPR
06.011.	Penyusunan Standart Pelayanan Minimum (SPM)	Jumlah Buku SPM SKPD	Kota Lhokseumawe	5 Buku	22,000,000	APBK	-	5 Buku	7,623,000	Dinas PUPR

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2020			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		OPD Penanggung jawab
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
07.	Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja	Cakupan Penyediaan Dokumen perencanaan SKPK	Kota Lhokseumawe	1 Dokumen	265,500,000	APBK	-	1 Dokumen	81,597,200	Dinas PUPR
07.001.	Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Buku Renstra SKPD	Kota Lhokseumawe	5 Buku	12,000,000	APBK	-	5 Buku		Dinas PUPR
07.002.	Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Buku Renja SKPD	Kota Lhokseumawe	5 Buku	183,500,000	APBK	-	5 Buku	1,597,200	Dinas PUPR
07.003.	Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)	Jumlah buku	Kota Lhokseumawe	2 Buku	20,000,000	APBK	-	2 Buku	20,000,000	Dinas PUPR
07.004.	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan	Jumlah buku	Kota Lhokseumawe	1 Buku	50,000,000	APBK	-	1 Buku	60,000,000	Dinas PUPR
15	Program pembangunan jalan dan jembatan	Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Mantap,	Kota Lhokseumawe	71,2%	118,641,468,767	APBK	-	76,2%	83,522,250,000	Dinas PUPR
15.003.	Pembangunan jalan	Jumlah Jalan Yang Di Bangun di Wilayah Kota Lhokseumawe	Kota Lhokseumawe	49 Paket	56,956,555,022	APBK	-	49 Paket	27,144,325,860	Dinas PUPR
15.005.	Pembangunan jembatan	Jumlah Jembatan yang Terbangun	Kota Lhokseumawe	2 Unit	1,254,417,125	APBK	-	2 Unit	377,924,140	Dinas PUPR
15.007.	Pembangunan jalan (DAK)	Jumlah Jalan Yang Di Bangun DAK	Kota Lhokseumawe	15 Paket	28,755,268,000	APBK	-	15 Paket	18,000,000,000	Dinas PUPR
15.008.	Pembangunan jalan (OTSUS)	Jumlah Jalan Yang Di Bangun OTSUS	Kota Lhokseumawe	16 Paket	29,063,153,620	APBK	-	15 Paket	35,000,000,000	Dinas PUPR
15.009.	Pembangunan Jembatan (OTSUS)	Jumlah Jembatan yang Terbangun	Kota Lhokseumawe	2 Unit	2,612,075,000	APBK	-	2 Unit	3,000,000,000	Dinas PUPR
16	Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Persentase Drainase dalam Kondisi Baik/ Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat	Kota Lhokseumawe	70,74%	25,861,493,823	APBK	-	77,81%	4,697,500,000	Dinas PUPR
16.003.	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Panjang Drainase yang Terbangun	Kota Lhokseumawe	3 Km	25,861,493,823	APBK	-	3 Km	4,697,500,000	Dinas PUPR
17	Program pembangunan turap/talud/bronjong	Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor	Kota Lhokseumawe	71,27%	17,515,130,000	APBK	-	81,27%	85,739,000,000	Dinas PUPR
17.003.	Pembangunan turap/talud/bronjong	Jumlah Turap/Talud/Bronjong Terbangun	Kota Lhokseumawe	20 Unit	12,515,130,000	APBK	-	20 Unit	5,739,000,000	Dinas PUPR
17.005.	Pembangunan Turap/Talud/Bronjong (OTSUS)	Panjang Talud pengaman Pantai	Kota Lhokseumawe		5,000,000,000	APBK	-		80,000,000,000	Dinas PUPR
18	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	Persentase jalan Kota dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	Kota Lhokseumawe	77,38%	1,200,000,000	APBK	-	85,12%	849,676,795	Dinas PUPR
18.003.	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan	Jumlah Jalan yang di Rehabilitasi/Pemeliharaan	Kota Lhokseumawe	1 Paket	1,000,000,000	APBK	-	1 Paket	387,676,795	Dinas PUPR
18.006.	Rehabilitasi/pemeliharaan saluran air	Jumlah Unit Saluran yang Terpelihara	Kota Lhokseumawe	1 Unit	200,000,000	APBK	-	1 Unit	462,000,000	Dinas PUPR
26	Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya		Kota Lhokseumawe	100%	1,056,001,000	APBK	-	100%	0	Dinas PUPR

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2020			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		OPD Penanggung jawab
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26.001.	Pembangunan embung, dan bangunan penampung air lainnya	Jumlah Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang terbangun	Kota Lhokseumawe	1 Unit	406,001,000	APBK	-	1 Unit		Dinas PUPR
26.002.	Pemeliharaan dan rehabilitasi embung, dan bangunan penampung air lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Terpelihara	Kota Lhokseumawe	1 Unit	650,000,000	APBK	-	1 Unit		Dinas PUPR
27	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Persentase akses Air Minum/ air bersih, Persentase rumah tinggal bersanitasi	Kota Lhokseumawe	90% 80,85%	15,019,782,492	APBK	-	100% 86,57%	14,000,000,000	Dinas PUPR
27.001.	Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah	Jumlah Prasarana dan Sarana Air Minum bagi Masyarakat	Kota Lhokseumawe	70 Paket	7,268,859,500	APBK	-	70 Paket	4,000,000,000	Dinas PUPR
27.010.	Pengembangan sistem distribusi air minum (DAK)	Jumlah Pemasangan Jaringan Air Minum	Kota Lhokseumawe	1 Paket	1,561,044,992	APBK	-	1 Paket	3,000,000,000	Dinas PUPR
27.011.	Peningkatan Prasarana Sanitasi (DAK)	Jumlah Prasarana Sanitasi yang terbangun	Kota Lhokseumawe	92 Unit	6,189,878,000	APBK	-	92 Unit	7,000,000,000	Dinas PUPR
29	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Cakupan Penanganan Kawasan Kumuh	Kota Lhokseumawe	13,8 Ha	5,471,050,000	APBK	-	11,3 Ha	2,191,613,928	Dinas PUPR
29.001.	Perencanaan pengembangan infrastruktur	Jumlah Dokumen Perencanaan	Kota Lhokseumawe	1 Dokumen	3,471,050,000	APBK	-	1 Dokumen	627,000,000	Dinas PUPR
29.004.	Revitalisasi Kawasan	Jumlah Kawasan Revitalisasi	Kota Lhokseumawe	2 Paket	2,000,000,000	APBK	-	2 Paket	1,564,613,928	Dinas PUPR
31	Program Perencanaan Tata Ruang	Cakupan Dokumen Perencanaan Tata Ruang	Kota Lhokseumawe	3 Dokumen	4,200,000,000	APBK	-	3 Dokumen	700,000,000	Dinas PUPR
31.005.	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan	Jumlah Dokumen Rencana Detail Tata Ruang Kawasan	Kota Lhokseumawe	2 Dokumen	2,500,000,000	APBK	-	2 Dokumen	500,000,000	Dinas PUPR
31.011.	Revisi rencana tata ruang	Jumlah Dokumen Revisi Rencana Tata Ruang	Kota Lhokseumawe	1 Dokumen	1,500,000,000	APBK	-		0	Dinas PUPR
31.013.	Survey dan pemetaan	Jumlah Dokumen Survey dan Pemetaan	Kota Lhokseumawe	1 Dokumen	200,000,000	APBK	-	1 Dokumen	200,000,000	Dinas PUPR
33	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Ruang publik yang berubah peruntukannya, Ketaatan terhadap RTRW	Kota Lhokseumawe	0,083% 3,3%	200,000,000	APBK	-	0,083% 3,4%	200,000,000	Dinas PUPR
33.005.	Pengawasan pemanfaatan ruang	Periode Pengawasan pemanfaatan ruang	Kota Lhokseumawe	7 hari	200,000,000	APBK	-	7 hari	200,000,000	Dinas PUPR
1.04.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman				114,197,412,937	APBK	-		34,582,395,206	Dinas PUPR
15	Program Pengembangan Perumahan	Rasio Permukiman Layak Huni, Rasio permukiman layak huni	Kota Lhokseumawe	0,29 0,93	32,188,136,000	APBK	-	0,93 0,96	8,631,250,000	Dinas PUPR
15.014.	Pembangunan Rumah Untuk Masyarakat Kurang Mampu	Jumlah Rumah Yang Dibangun Untuk Masyarakat Kurang Mampu	Kota Lhokseumawe	158 Unit	31,975,000,000	APBK	-	158 Unit	8,500,000,000	Dinas PUPR
15.015.	Pembangunan Rumah Untuk Masyarakat Kurang Mampu (DAK)	Tersedianya Rumah untuk Masyarakat Kurang Mampu	Kota Lhokseumawe	150 Unit	213,136,000	APBK	-	150 Unit	131,250,000	Dinas PUPR

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2020			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		OPD Penanggung jawab
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Persentase Kawasan Permukiman Yang Belum Dapat Di Lalui Kendaraan Roda Empat,Persentase lingkungan pemukiman kumuh	Kota Lhokseumawe	0,97 0,97	20,697,836,100	APBK	-	0,77 0,68	10,000,000,000	Dinas PUPR
16.007.	Pembangunan Jalan Lingkungan	Jumlah Jalan Lingkungan Yang akan Dibangun	Kota Lhokseumawe	12	20,697,836,100	APBK	-	12	10,000,000,000	Dinas PUPR
17	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	Persentase Pembangunan Infrastruktur Pemukiman Kota Lhokseumawe	Kota Lhokseumawe	100%	250,000,000	APBK	-	100%	0	Dinas PUPR
17.002.	Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman berbasis masyarakat	Periode Operasional Pembangunan Infrastruktur Pemukiman (PIP)	Kota Lhokseumawe	1 Tahun	250,000,000	APBK	-	1 Tahun	0	Dinas PUPR
21	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Umum	Rasio Tempat Ibadah per satuan Penduduk	Kota Lhokseumawe	0,12	61,061,440,837	APBK	-	0,13	15,951,145,206	Dinas PUPR
21.001.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Yang Terbangun	Kota Lhokseumawe	75 Unit	56,041,340,837	APBK	-	75 Unit	10,751,145,206	Dinas PUPR
21.002.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Gedung (OTSUS)	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Yang Terbangun	Kota Lhokseumawe	1 Paket	5,020,100,000	APBK	-	1 Paket	5,200,000,000	Dinas PUPR
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik				1,548,029,446	APBK	-		1,772,100,100	Badan Kesbangpol
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar				1,548,029,446	APBK	-		1,772,100,100	Badan Kesbangpol
1.05.	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat				1,548,029,446	APBK	-		1,772,100,100	Badan Kesbangpol
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kota Lhokseumawe	100 %	661,864,446	APBK	-	100 %	641,708,800	Badan Kesbangpol
01.001.	Penyediaan jasa surat menyurat	Periode Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	1,200,000	APBK	-	12 Bulan	1,500,000	Badan Kesbangpol
01.002.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Periode Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Lhokseumawe	12 bulan	88,200,000	APBK	-	12 bulan	85,000,000	Badan Kesbangpol
01.007.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Periode Pejabat Pengelola Keuangan SKPD	Kota Lhokseumawe	216 OB	123,400,000	APBK	-	216 OB	100,466,422	Badan Kesbangpol
01.010.	Penyediaan alat tulis kantor	Periode Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kota Lhokseumawe	12 bulan	31,604,446	APBK	-	12 bulan	49,014,337	Badan Kesbangpol
01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Periode Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Lhokseumawe	12 bulan	12,100,000	APBK	-	12 bulan	15,000,000	Badan Kesbangpol
01.013.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Periode Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Lhokseumawe	12 bulan	10,000,000	APBK	-	12 bulan	12,000,000	Badan Kesbangpol
01.015.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan, Peraturan Perundang-undangan dan Iklan Media Massa	Kota Lhokseumawe	730 eks	32,280,000	APBK	-	730 eks	32,280,000	Badan Kesbangpol
01.017.	Penyediaan makanan dan minuman	Periode Penyediaan Makanan dan Minuman	Kota Lhokseumawe	12 bulan	23,000,000	APBK	-	12 bulan	25,000,000	Badan Kesbangpol

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2020			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		OPD Penanggung jawab
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01.018.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Periode Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Kota Lhokseumawe	12 bulan	100,000,000	APBK	-	12 bulan	130,000,000	Badan Kesbangpol
01.020.	Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap	Jumlah Jasa pegawai Tidak Tetap	Kota Lhokseumawe	612 OB	240,080,000	APBK	-	612 OB	191,448,041	Badan Kesbangpol
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kota Lhokseumawe	100%	147,813,000	APBK	-	100%	131,236,600	Badan Kesbangpol
02.011.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Lhokseumawe	8 jenis	67,360,000	APBK	-	8 jenis	74,096,000	Badan Kesbangpol
02.022.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Periode Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kota Lhokseumawe	12 bulan	7,703,000	APBK	-	12 bulan	8,473,000	Badan Kesbangpol
02.023.	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Kota Lhokseumawe	12 UB	31,500,000	APBK	-	12 UB	24,211,000	Badan Kesbangpol
02.024.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Pemeliharaan/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kota Lhokseumawe	12 UB	27,500,000	APBK	-	12 UB	18,158,000	Badan Kesbangpol
02.030.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Periode Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	13,750,000	APBK	-	12 Bulan	6,298,600	Badan Kesbangpol
03.	Program peningkatan disiplin aparatur	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kota Lhokseumawe	100%	85,000,000	APBK	-	100%	80,000,000	Badan Kesbangpol
03.006.	Penyediaan Sewa Gedung/Gudang Kantor	Periode Sewa Gedung Kantor	Kota Lhokseumawe	1 Tahun	85,000,000	APBK	-	1 Tahun	80,000,000	Badan Kesbangpol
07.	Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kota Lhokseumawe	1 Dokumen	1,452,000	APBK	-	1 Dokumen	1,597,200	Badan Kesbangpol
07.002.	Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Buku RENJA SKPD	Kota Lhokseumawe	30 Buku	1,452,000	APBK	-	30 Buku	1,597,200	Badan Kesbangpol
15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Cakupan Pengendalian keamanan dan kenyamanan	Kota Lhokseumawe	100%	12,100,000	APBK	-	100%	13,310,000	Badan Kesbangpol
15.011.	Peringatan Hari Bela Negara	Periode pelaksanaan Peringatan Hari Bela Negara	Kota Lhokseumawe	1 Hari	12,100,000	APBK	-	1 Hari	13,310,000	Badan Kesbangpol
17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Cakupan ormas/masyarakat yang mendapat pembinaan wawasan dan kebangsaan	Kota Lhokseumawe	25%	119,750,000	APBK	-	25%	158,000,000	Badan Kesbangpol
17.005.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan ORMAS, ORSOS dan LSM	Periode pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan ORMAS, ORSOS dan LSM	Kota Lhokseumawe	4 Triwulan	15,000,000	APBK	-	4 Triwulan	20,000,000	Badan Kesbangpol
17.008.	Sosialisasi ORMAS, LSM, Yayasan dan Lembaga Lainnya	Periode Pelaksanaan sosialisasi ORMAS, LSM, Yayasan dan Lembaga Lainnya	Kota Lhokseumawe	1 Hari	31,250,000	APBK	-	1 Hari	50,000,000	Badan Kesbangpol
17.010.	Verifikasi ORMAS, ORSOS, LSM	Periode Pelaksanaan Verifikasi ORMAS, ORSOS dan LSM	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	15,000,000	APBK	-	12 Bulan	16,000,000	Badan Kesbangpol
17.012.	Penguatan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kota Lhokseumawe	Periode Penguatan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kota Lhokseumawe	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	58,500,000	APBK	-	12 Bulan	72,000,000	Badan Kesbangpol

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2020			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		OPD Penanggung jawab
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Cakupan Pelaksanaan Koordinasi wawasan kebangsaan	Kota Lhokseumawe	100%	263,250,000	APBK	-	100%	440,000,500	Badan Kesbangpol
18.009.	Sosialisasi Penguatan Kelembagaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	Periode Pelaksanaan Sosialisasi Penguatan Kelembagaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	Kota Lhokseumawe	1 Hari	54,900,000	APBK	-	1 Hari	111,664,325	Badan Kesbangpol
18.010.	Penguatan Kelembagaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	Periode Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kota Lhokseumawe	Kota Lhokseumawe	1 Hari	49,750,000	APBK	-	1 Hari	123,381,325	Badan Kesbangpol
18.013.	Peningkatan Kapasitas Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	Periode Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	Kota Lhokseumawe	1 Hari	77,400,000	APBK	-	1 Hari	84,822,525	Badan Kesbangpol
18.015.	Peningkatan Kapasitas Tim Kewaspadaan Dini Kota Lhokseumawe	Periode Pelaksanaan Tim Kewaspadaan Dini Daerah Kota Lhokseumawe	Kota Lhokseumawe	4 Triwulan	81,200,000	APBK	-	4 Triwulan	120,132,325	Badan Kesbangpol
19	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Persentase pemberdayaan masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan	Kota Lhokseumawe	100%	115,250,000	APBK	-	100%	64,996,000	Badan Kesbangpol
19.005.	Pelaksanaan Koordinasi Pemantauan Orang Asing dan Tenaga Kerja Asing	Periode pelaksanaan koordinasi pemantauan orang asing dan tenaga kerja asing	Kota Lhokseumawe	1 Hari	41,750,000	APBK	-	1 Hari	0	Badan Kesbangpol
19.007.	Pembekalan dan Pemantapan Fungsi Jaring Deteksi Dini dan Pengawasan Orang Asing	Periode Pembekalan dan pemantapan Fungsi Jaring Deteksi dan Pengawasan Orang Asing	Kota Lhokseumawe	1 Hari	73,500,000	APBK	-	1 Hari	64,996,000	Badan Kesbangpol
20	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	Jumlah Sosialisasi tentang Penyakit Masyarakat yang dilaksanakan	Kota Lhokseumawe	2 Keg	81,550,000	APBK	-	2 Keg	152,251,000	Badan Kesbangpol
20.002.	Penyuluhan pencegahan berkembangnya praktek prostitusi	Periode Pelaksanaan penyuluhan pencegahan berkembangnya praktek prostitusi	Kota Lhokseumawe	1 Hari	81,550,000	APBK	-	1 Hari	152,251,000	Badan Kesbangpol
21	Program pendidikan politik masyarakat	Jumlah Penyuluhan Pendidikan Politik Masyarakat	Kota Lhokseumawe	3 Keg	50,000,000	APBK	-	4 Keg	55,000,000	Badan Kesbangpol
21.007.	Verifikasi Bantuan Parpol	Periode Verifikasi Bantuan PARPOL	Kota Lhokseumawe	12 bulan	50,000,000	APBK	-	12 bulan	55,000,000	Badan Kesbangpol
23	Program Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu	Cakupan dukungan kelancaran Pemilu	Kota Lhokseumawe	12 bulan	10,000,000	APBK	-	12 bulan	34,000,000	Badan Kesbangpol
23.009.	Dukungan Terhadap Operasional KIP Kota Lhokseumawe	Periode Operasional KIP Kota Lhokseumawe	Kota Lhokseumawe	12 bulan	10,000,000	APBK	-	12 bulan	34,000,000	Badan Kesbangpol
		Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah			11,681,099,170	APBK	-		5,172,702,056	Satpol PP dan WH
1		Urusan Wajib Pelayanan Dasar			11,681,099,170	APBK	-		5,172,702,056	Satpol PP dan WH
1.05.		Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat			11,681,099,170	APBK	-		5,172,702,056	Satpol PP dan WH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2020			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		OPD Penanggung jawab
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kota Lhokseumawe	100%	4,428,858,920	APBK	-	100%	3,262,370,145	Satpol PP dan WH
01.001.	Penyediaan jasa surat menyurat	Periode Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	3,800,000	APBK	-	12 Bulan	3,800,000	Satpol PP dan WH
01.002.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Periode Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	125,000,000	APBK	-	12 Bulan	125,962,305	Satpol PP dan WH
01.007.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Pejabat Pengelola Keuangan SKPK (17 Org x 12 Bulan)	Kota Lhokseumawe	204 OB	123,700,000	APBK	-	216 OB	120,100,000	Satpol PP dan WH
01.010.	Penyediaan alat tulis kantor	Periode Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	35,000,000	APBK	-	12 Bulan	36,000,000	Satpol PP dan WH
01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Periode Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	20,000,000	APBK	-	12 Bulan	22,000,000	Satpol PP dan WH
01.013.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Periode Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	9,445,000	APBK	-	12 Bulan	3,500,000	Satpol PP dan WH
01.015.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan (2 Eks x 365 Hari)	Kota Lhokseumawe	730 Eks	32,400,000	APBK	-	730 Eks	2,400,000	Satpol PP dan WH
01.017.	Penyediaan makanan dan minuman	Periode Penyediaan Makanan dan Minuman	Kota Lhokseumawe	11 Bulan	15,000,000	APBK	-	11 Bulan	20,000,000	Satpol PP dan WH
01.018.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Periode Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	125,000,000	APBK	-	12 Bulan	120,000,000	Satpol PP dan WH
01.020.	Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap	Jumlah Jasa Pegawai Tidak Tetap (251 Org x 12 Bulan)	Kota Lhokseumawe	3012 OB	3,634,820,000	APBK	-	2652 OB	2,500,000,000	Satpol PP dan WH
01.021.	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Non PNS	Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar pada Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Non PNS	Kota Lhokseumawe	2856 OB	304,693,920	APBK	-	2628 OB	308,607,840	Satpol PP dan WH
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kota Lhokseumawe	100%	4,830,547,500	APBK	-	100%	402,547,640	Satpol PP dan WH
02.003.	Pembangunan gedung kantor	Jumlah Pembangunan gedung Kantor	Kota Lhokseumawe	1 Unit	3,319,181,250	APBK	-	1 Unit	0	Satpol PP dan WH
02.005.	Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kota Lhokseumawe	1 Unit	697,046,250	APBK	-	1 Unit	35,000,000	Satpol PP dan WH
02.011.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Lhokseumawe	20 Jenis	336,720,000	APBK	-	2 Jenis	65,000,000	Satpol PP dan WH
02.022.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Periode Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	82,000,000	APBK	-	12 Bulan	2,947,640	Satpol PP dan WH
02.023.	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan (1 Unit x 12 Bulan)	Kota Lhokseumawe	12 UB	33,300,000	APBK	-	12 UB	33,300,000	Satpol PP dan WH
02.024.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Pemeliharaan/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (5 Unit x 12 bulan)	Kota Lhokseumawe	60 UB	124,300,000	APBK	-	60 UB	122,800,000	Satpol PP dan WH
02.030.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Periode Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	8,000,000	APBK	-	12 Bulan	8,500,000	Satpol PP dan WH
02.042.	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor (1 Unit)	Kota Lhokseumawe	1 Unit	80,000,000	APBK	-	1 Unit	70,000,000	Satpol PP dan WH
02.044.	Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional	Jumlah Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional	Kota Lhokseumawe	1 Unit	15,000,000	APBK	-	1 Unit	60,000,000	Satpol PP dan WH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2020			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		OPD Penanggung jawab
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
02.045.	Pembangunan Fasilitas Gedung Kantor	Jumlah Pembangunan Fasilitas Gedung Kantor (4 Jenis)	Kota Lhokseumawe	2 Jenis	115,000,000	APBK	-	1 Jenis	0	Satpol PP dan WH
02.046.	Pembangunan Taman dan Halaman Kantor	Jumlah Pembangunan Taman dan Halaman Kantor	Kota Lhokseumawe	1 Paket	20,000,000	APBK	-	1 Paket	5,000,000	Satpol PP dan WH
03.	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Tingkat Disiplin Aparatur	Kota Lhokseumawe	100%	167,948,750	APBK	-	100%	156,357,894	Satpol PP dan WH
03.002.	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Khusus Hari-hari Tertentu	Kota Lhokseumawe	333 Pasang	167,948,750	APBK	-	353 Pasang	156,357,894	Satpol PP dan WH
05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal yang diikuti	Kota Lhokseumawe	5 Keg	281,772,000	APBK	-	5 Keg	140,642,777	Satpol PP dan WH
05.001.	Pendidikan dan pelatihan formal	Periode Pendidikan dan Pelatihan Formal Aparatur	Kota Lhokseumawe	45 Hari	105,000,000	APBK	-	12 Bulan	30,000,000	Satpol PP dan WH
05.002.	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Peserta yang mengikuti sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Kota Lhokseumawe	50 Org	32,159,000	APBK	-	20 Org	25,000,000	Satpol PP dan WH
05.005.	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	Jumlah Aparatur yang mengikuti Pelatihan	Kota Lhokseumawe	50 Org	50,013,000	APBK	-	30 Org	50,000,000	Satpol PP dan WH
05.025.	Penetapan Angka Kredit	Periode Penetapan Angka Kredit Satpol PP	Kota Lhokseumawe	2 Periode	32,800,000	APBK	-	2 Periode	35,000,000	Satpol PP dan WH
05.041.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Periode Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	Kota Lhokseumawe	10 Hari	61,800,000	APBK	-	1 Hari	642,777	Satpol PP dan WH
06.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Cakupan Penyediaan Dokumen Standard Pelayanan Minimum (SPM) SKPD	Kota Lhokseumawe	1 Dokumen	5,200,000	APBK	-	1 Dokumen	5,200,000	Satpol PP dan WH
06.011.	Penyusunan Standart Pelayanan Minimum (SPM)	Jumlah Buku Standar Pelayanan Minimum (SPM)	Kota Lhokseumawe	10 Buku	5,200,000	APBK	-	10 Buku	5,200,000	Satpol PP dan WH
07.	Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja	Cakupan Penyediaan Dokumen Perencanaan SKPK	Kota Lhokseumawe	1 Dokumen	726,000	APBK	-	1 Dokumen	798,600	Satpol PP dan WH
07.002.	Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Buku RENJA SKPD	Kota Lhoksemawe	10 Buku	726,000	APBK	-	10 Buku	798,600	Satpol PP dan WH
15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Kantrantibmas	Kota Lhokseumawe	80%	1,324,896,000	APBK	-	90%	823,042,000	Satpol PP dan WH
15.007.	Peningkatan Penertiban Syariat Islam Kota Lhokseumawe	Jumlah Pelaksanaan Penertiban Syariat Islam Kota Lhokseumawe	Kota Lhokseumawe	6 Kali	503,200,000	APBK	-	6 Kali	350,317,000	Satpol PP dan WH
15.008.	Pelaksanaan Hukuman Pelanggar Syariat Islam	Jumlah Pelaksanaan Hukuman Pelanggaran Syariat Islam	Kota Lhokseumawe	7 Kali	215,600,000	APBK	-	4 Kali	132,400,000	Satpol PP dan WH
15.013.	Peningkatan Kapasitas Satpol PP dan WH	Periode Peningkatan Kapasitas Satpol PP dan WH	Kota Lhokseumawe	7 Hari	89,250,000	APBK	-	2 Hari	50,000,000	Satpol PP dan WH
15.015.	Pelaksanaan Pengawasan Sebelum Shalat Jumat	Periode Pelaksanaan Pengawasan Sebelum Shalat Jumat	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	37,000,000	APBK	-	12 Bulan	50,000,000	Satpol PP dan WH
15.016.	Pembinaan dan Penanganan Pelanggaran Qanun	Jumlah Kasus Pembinaan dan Penanganan Pelanggaran Qanun	Kota Lhokseumawe	55 Kasus	83,196,000	APBK	-	80 Kasus	78,800,000	Satpol PP dan WH
15.018.	Pengamanan Pejabat/Tamu-Tamu Negara (VIP)	Jumlah Pelaksanaan Pengamanan terhadap Pejabat/Tamu Daerah	Kota Lhokseumawe	4 Kali	23,850,000	APBK	-	4 Kali	20,000,000	Satpol PP dan WH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2020			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		OPD Penanggung jawab
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.019.	Pengawasan/Pengendalian Isu-isu di Lapangan	Jumlah Pelaksanaan Pengawasan/Pengendalian Isu-Isu di Lapangan	Kota Lhokseumawe	4 Kali	149,000,000	APBK	-	1 Kali	41,525,000	Satpol PP dan WH
15.020.	Pengamanan Kantor Walikota/ Rumah Dinas/Aset Daerah	Periode Pengamanan Kantor Walikota/Rumah Dinas/Aset Daerah	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	108,300,000	APBK	-	12 Bulan	50,000,000	Satpol PP dan WH
15.021.	Pengawasan Syariat Islam Pos Pengamanan Objek Wisata Kota Lhokseumawe	Periode Pengawasan Syariat Islam Pos Pengamanan Objek Wisata Kota Lhokseumawe	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	115,500,000	APBK	-	12 Bulan	50,000,000	Satpol PP dan WH
16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Persentase Penegakan Perda/Qanun	Kota Lhokseumawe	80%	569,650,000	APBK	-	90%	336,743,000	Satpol PP dan WH
16.006.	Penertiban Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Pelaksanaan Penertiban Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kota Lhokseumawe	6 Kali	486,600,000	APBK	-	6 Kali	258,743,000	Satpol PP dan WH
16.010.	Pengawasan dan Pengendalian Ketertiban Pelaksanaan Ibadah Bulan Ramadhan dan Hari Besar Islam	Periode Pengawasan dan Pengendalian Ketertiban pada bulan Ramadhan	Kota Lhokseumawe	1 Bulan	25,200,000	APBK	-	1 Bulan	25,000,000	Satpol PP dan WH
16.013.	Pelaksanaan Hari-Hari Besar Nasional	Jumlah Pelaksanaan Pengamanan Hari Besar Nasional	Kota Lhokseumawe	3 Kali	20,900,000	APBK	-	3 Kali	20,000,000	Satpol PP dan WH
16.015.	Pengamanan Ketupat Rencong H-7 dan H+4	Periode Pengamanan Ketupat Rencong	Kota Lhokseumawe	11 Hari	18,650,000	APBK	-	10 Hari	16,500,000	Satpol PP dan WH
16.016.	Pengamanan Operasi Lilin Hari Natal dan Tahun Baru	Periode Pengamanan Operasi Lilin Hari Natal dan Tahun Baru	Kota Lhokseumawe	10 Hari	18,300,000	APBK	-	10 Hari	16,500,000	Satpol PP dan WH
18	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Cakupan Penyelenggaraan Acara/Upacara	Kota Lhokseumawe	100%	40,100,000	APBK	-	100%	25,000,000	Satpol PP dan WH
18.012.	Pendukung Kegiatan Acara/Upacara HUT Satpol PP dan WH Kota Lhokseumawe	Periode Pendukung Kegiatan Acara/Upacara HUT Satpol PP dan WH Kota Lhokseumawe	Kota Lhokseumawe	1 Hari	40,100,000	APBK	-	1 Hari	25,000,000	Satpol PP dan WH
19	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Cakupan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga Ketertiban dan Keamanan	Kota Lhokseumawe	100%	31,400,000	APBK	-	100%	20,000,000	Satpol PP dan WH
19.008.	Peningkatan Kerjasama Ulama / Tokoh Masyarakat/Instansi terkait dalam pelaksanaan Syariat Islam	Jumlah Peserta Peningkatan Kerjasama Ulama/Tokoh Masyarakat/Instansi terkait dalam Pelaksanaan Syariat Islam	Kota Lhokseumawe	50 Org	31,400,000	APBK	-	30 Org	20,000,000	Satpol PP dan WH
	Dinas Sosial				6,931,414,461	APBK	-		4,388,793,836	Dinas Sosial
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar				6,931,414,461	APBK	-		4,388,793,836	Dinas Sosial
1.06.	Sosial				6,931,414,461	APBK	-		4,388,793,836	Dinas Sosial
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Kota Lhokseumawe	100%	704,259,216	APBK	-	100%	551,504,106	Dinas Sosial
01.001.	Penyediaan jasa surat menyurat	Periode Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Lhokseumawe	12 bulan	2,500,000	APBK	-	12 bulan	1,650,000	Dinas Sosial

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2020			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		OPD Penanggung jawab
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01.002.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Periode Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Lhokseumawe	12 bulan	123,700,000	APBK	-	12 bulan	97,000,000	Dinas Sosial
01.007.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Pejabat Pengelolaan Keuangan SKPD (18 Org x 12 Bulan)	Kota Lhokseumawe	216 OB	121,300,000	APBK	-	216 OB	90,000,000	Dinas Sosial
01.010.	Penyediaan alat tulis kantor	Periode Alat Tulis Kantor	Kota Lhokseumawe	12 bulan	50,732,000	APBK	-	12 bulan	38,116,106	Dinas Sosial
01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Periode Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Lhokseumawe	12 bulan	25,000,000	APBK	-	12 bulan	22,000,000	Dinas Sosial
01.013.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Periode Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Lhokseumawe	12 bulan	5,597,216	APBK	-	12 bulan	4,598,000	Dinas Sosial
01.015.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Lhokseumawe	365 Eks	31,140,000	APBK	-	365 Eks	1,140,000	Dinas Sosial
01.017.	Penyediaan makanan dan minuman	Periode Makanan dan Minuman	Kota Lhokseumawe	11 bulan	35,000,000	APBK	-	11 bulan	27,000,000	Dinas Sosial
01.018.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Periode Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Kota Lhokseumawe	12 bulan	150,000,000	APBK	-	12 bulan	90,000,000	Dinas Sosial
01.020.	Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap	Jumlah Jasa Pegawai Tidak Tetap	Kota Lhokseumawe	324 OB	159,290,000	APBK	-	324 OB	180,000,000	Dinas Sosial
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	Kota Lhokseumawe	100%	992,982,500	APBK	-	100%	184,345,500	Dinas Sosial
02.011.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Lhokseumawe	9 Jenis	903,482,500	APBK	-	9 Jenis	89,000,000	Dinas Sosial
02.022.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Periode Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kota Lhokseumawe	12 bulan	23,500,000	APBK	-	12 bulan	7,625,000	Dinas Sosial
02.023.	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Kota Lhokseumawe	12 UB	35,000,000	APBK	-	12 UB	27,000,000	Dinas Sosial
02.024.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas / Operasional	Kota Lhokseumawe	36 UB	17,500,000	APBK	-	36 UB	53,400,000	Dinas Sosial
02.030.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Periode Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor	Kota Lhokseumawe	12 bulan	13,500,000	APBK	-	12 bulan	7,320,500	Dinas Sosial
03.	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Tingkat Disiplin Aparatur	Kota Lhokseumawe	100%	182,390,000	APBK	-	100%	159,720,000	Dinas Sosial
03.002.	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas dan Khusus Hari-Hari Tertentu	Kota Lhokseumawe	79 Psg	52,390,000	APBK	-	79 Psg	45,000,000	Dinas Sosial
03.006.	Penyediaan Sewa Gedung/Gudang Kantor	Periode Sewa Gedung Kantor	Kota Lhokseumawe	1 Tahun	130,000,000	APBK	-	1 Tahun	114,720,000	Dinas Sosial
05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan kegiatan pendidikan dan pelatihan formal yang diikuti	Kota Lhokseumawe	5 Keg	30,000,000	APBK	-	5 Keg	26,620,000	Dinas Sosial
05.001.	Pendidikan dan pelatihan formal	Periode pelaksanaan pendidikan dan pelatihan formal bagi aparatur	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	30,000,000	APBK	-	12 Bulan	26,620,000	Dinas Sosial
07.	Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja	Cakupan Penyediaan Dokumen Perencanaan SKPK	Kota Lhokseumawe	1 Dokumen	5,900,000	APBK	-	1 Dokumen	598,600	Dinas Sosial
07.002.	Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Buku Renja SKPK	SKPK	10 Buku	5,900,000	APBK	-	10 Buku	598,600	Dinas Sosial

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2020			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		OPD Penanggung jawab
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Persentase PMKS yang Menerima Bantuan Sosial	Kota Lhokseumawe	32,76%	2,075,935,654	APBK	-	33,42%	1,773,623,630	Dinas Sosial
15.015.	Pembangunan dan Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Kaum Dhuafa	Jumlah Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Kaum Dhuafa	SKPK	70 Unit	1,232,308,674	APBK	-	70 Unit	715,734,404	Dinas Sosial
15.016.	Pendampingan Program Keluarga Harapan (PKH)	Periode Pelaksanaan Operasional Program Keluarga Harapan	Kota Lhokseumawe	12 bulan	104,141,550	APBK	-	12 bulan	120,000,000	Dinas Sosial
15.021.	Tim Observasi / Verifikasi Bantuan Sosial dan Hibah	Periode Pelaksanaan Observasi/Verifikasi Bantuan Sosial dan Hibah	Kota Lhokseumawe	12 bulan	75,000,000	APBK	-	12 bulan	27,000,000	Dinas Sosial
15.022.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Bagi Keluarga Kurang Mampu	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Bagi Keluarga Kurang Mampu	SKPK	5 Jenis	100,437,300	APBK	-	5 Jenis	350,000,000	Dinas Sosial
15.033.	Verifikasi Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan	Periode verifikasi penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)	Kota Lhokseumawe	12 bulan	83,440,550	APBK	-	12 bulan	75,565,596	Dinas Sosial
15.039.	Sosialisasi Program Keluarga Harapan (PKH) / Rastra / BPNT	Jumlah Peserta Sosialisasi Keluarga Harapan (PKH)	Kota Lhokseumawe	150 Orang	47,800,000	APBK	-	150 Orang	120,000,000	Dinas Sosial
15.040.	Sunat Massal Bagi Anak Tidak Mampu / Yatim Piatu	Jumlah Anak Tidak Mampu / Yatim Piatu yang mendapatkan pelayanan sunat massal	Kota Lhokseumawe	120 Anak	106,700,000	APBK	-	120 Anak	135,000,000	Dinas Sosial
15.042.	Sosialisasi Regulasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	Terlaksananya Pemberian Bantuan Pangan Non Tunai	Kota Lhokseumawe	1 Kegiatan	60,600,000	APBK	-	1 Kegiatan	67,460,050	Dinas Sosial
15.043.	Verifikasi Basis Data Terpadu (BDT)	Dapat Terdatanya Data Fakir Miskin Secara Tepat Sasaran	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	59,999,624	APBK	-	12 Bulan	74,457,956	Dinas Sosial
15.044.	Pendampingan Penyaluran Bantuan Sosial dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	Dapat Terdatanya Data Fakir Miskin Secara Tepat Sasaran	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	205,507,956	APBK	-	12 Bulan	88,405,624	Dinas Sosial
16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial	Kota Lhokseumawe	100%	774,607,420	APBK	-	100%	137,417,000	Dinas Sosial
16.017.	Pelatihan dan pembinaan anak jalanan, anak terlantar, anak cacat korban bencana	Periode pembinaan anak jalanan, anak terlantar, anak cacat dan korban bencana	Kota Lhokseumawe	12 bulan	313,724,700	APBK	-	12 bulan	12,700,000	Dinas Sosial
16.027.	Pemberdayaan Korban Bencana Sosial Daerah Konflik (Reintegrasi)	Periode pemberdayaan korban bencana sosial daerah konflik (Reintegrasi)	Kota Lhokseumawe	12 bulan	5,000,000	APBK	-	12 bulan	5,000,000	Dinas Sosial
16.030.	Verifikasi Data Lansia	Periode Verifikasi Data Lansia	Kota Lhokseumawe	12 bulan	30,000,000	APBK	-	12 bulan	27,000,000	Dinas Sosial
16.034.	Verifikasi Data Orang Dengan Kecacatan Berat (ODKB)	Periode Verifikasi Data Orang Dengan Kecacatan Berat (ODKB)	Kota Lhokseumawe	12 bulan	26,000,000	APBK	-	12 bulan	22,717,000	Dinas Sosial
16.036.	Observasi Bantuan Pembangunan/Rehab dan Bedah Rumah Duafa	Periode Observasi Bantuan Pembangunan / Rehab dan Bedah Rumah Dhuafa	Kota Lhokseumawe	12 bulan	51,980,000	APBK	-	12 bulan	5,000,000	Dinas Sosial
16.040.	Unit Pelayanan Program Kesejahteraan Sosial Anak (UP-PKSA)	Periode pelaksanaan Unit Pelayanan Program Kesejahteraan Sosial Anak	Kota Lhokseumawe	12 bulan	35,000,000	APBK	-	12 bulan	25,000,000	Dinas Sosial
16.041.	Respon Kasus Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Periode Pelayanan Respon Kasus Terhadap PMKS	Kota Lhokseumawe	12 bulan	312,902,720	APBK	-	12 bulan	40,000,000	Dinas Sosial

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2020			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		OPD Penanggung jawab
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang menerima jaminan sosial	Kota Lhokseumawe	100%	1,167,849,575	APBK	-	100%	750,000,000	Dinas Sosial
18.007.	Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma	Periode pembinaan para penyandang cacat dan eks trauma	Kota Lhokseumawe	12 bulan	25,587,075	APBK	-	12 bulan	25,000,000	Dinas Sosial
18.011.	Pengadaan Alat Bantu dan Penyandang Cacat	Jumlah Penyediaan Alat Bantu dan Penyandang Cacat	Kota Lhokseumawe	80 Unit	592,262,500	APBK	-	80 Unit	125,000,000	Dinas Sosial
18.012.	Pengadaan Alat Bantu Dan Penyandang Cacat (OTSUS)	Jumlah Alat Bantu untuk Penyandang Cacat (OTSUS)	Kota Lhokseumawe	20 Unit	550,000,000	APBK	-	20 Unit	600,000,000	Dinas Sosial
20	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Persentase penyandang penyakit sosial yang menerima jaminan sosial	Kota Lhokseumawe	100%	261,300,000	APBK	-	100%	19,965,000	Dinas Sosial
20.011.	Pendataan dan Pembinaan Penyandang Penyakit Sosial	Periode pembinaan penyandang penyakit sosial	Kota Lhokseumawe	12 bulan	261,300,000	APBK	-	12 bulan	19,965,000	Dinas Sosial
21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	Kota Lhokseumawe	100%	736,190,096	APBK	-	100%	785,000,000	Dinas Sosial
21.010.	Tim Terpadu Penanggulangan Bencana	Periode pelaksanaan operasional Tim Terpadu Penanggulangan Bencana	Kota Lhokseumawe	12 bulan	122,900,000	APBK	-	12 bulan	55,000,000	Dinas Sosial
21.011.	Operasional Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga	Periode pemberdayaan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga	Kota Lhokseumawe	12 bulan	41,090,096	APBK	-	12 bulan	90,000,000	Dinas Sosial
21.012.	Pendampingan Supervisi Pekerja Sosial Masyarakat	Periode Fasilitasi Kerjasama usaha antara Pemko dengan Orsos/Lsm	Kota Lhokseumawe	12 bulan	72,200,000	APBK	-	12 bulan	40,000,000	Dinas Sosial
21.014.	Pembangunan, Peningkatan, Pengadaan Sarana dan Prasarana Gudang Logistik (OTSUS)	Jumlah Pembangunan, Peningkatan, Pengadaan Sarana dan Prasarana Gudang Logistik (OTSUS)	Kota Lhokseumawe	4 Unit	500,000,000	APBK	-	4 Unit	600,000,000	Dinas Sosial
	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja				3,857,785,840	APBK	-		2,632,462,422	DPMPTSP Naker
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar				3,857,785,840	APBK	-		2,632,462,422	DPMPTSP Naker
2.01.	Tenaga Kerja				2,940,465,840	APBK	-		2,118,714,417	DPMPTSP Naker
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kota Lhokseumawe	100 %	755,135,600	APBK	-	100 %	656,130,772	DPMPTSP Naker
01.001.	Penyediaan jasa surat menyurat	Periode Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	2,250,000	APBK	-	12 Bulan	2,500,000	DPMPTSP Naker
01.002.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Periode Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	120,000,000	APBK	-	12 Bulan	118,000,000	DPMPTSP Naker
01.007.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Pejabat Pengelola Keuangan SKPD (20 Org x 12 Bulan)	Kota Lhokseumawe	240 OB	157,700,600	APBK	-	240 OB	160,000,000	DPMPTSP Naker

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2020			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		OPD Penanggung jawab
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01.010.	Penyediaan alat tulis kantor	Periode Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	39,000,000	APBK	-	12 Bulan	40,000,000	DPMPTSP Naker
01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Periode Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	20,650,000	APBK	-	12 Bulan	25,000,000	DPMPTSP Naker
01.013.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Periode Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	5,900,000	APBK	-	12 Bulan	4,490,772	DPMPTSP Naker
01.015.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Lhokseumawe	365 Eks	1,140,000	APBK	-	365 Eks	1,140,000	DPMPTSP Naker
01.017.	Penyediaan makanan dan minuman	Periode Penyediaan Makanan dan Minuman	Kota Lhokseumawe	11 Bulan	31,545,000	APBK	-	11 Bulan	30,000,000	DPMPTSP Naker
01.018.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Periode Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Luar Daerah Kota Lhokseumawe	12 Bulan	150,000,000	APBK	-	12 Bulan	100,000,000	DPMPTSP Naker
01.020.	Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap	Jumlah Jasa Pegawai Tidak Tetap (30 Org x 12 Bln)	Kota Lhokseumawe	360 OB	226,950,000	APBK	-	360 OB	175,000,000	DPMPTSP Naker
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kota Lhokseumawe	100 %	186,350,000	APBK	-	100 %	189,028,620	DPMPTSP Naker
02.011.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Lhokseumawe	15 Unit	70,000,000	APBK	-	15 Unit	77,028,620	DPMPTSP Naker
02.022.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kota Lhokseumawe	1 Gedung	30,000,000	APBK	-	1 Gedung	30,000,000	DPMPTSP Naker
02.023.	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Kota Lhokseumawe	12 UB	32,350,000	APBK	-	12 UB	32,000,000	DPMPTSP Naker
02.024.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kota Lhokseumawe	12 UB	34,000,000	APBK	-	12 UB	30,000,000	DPMPTSP Naker
02.030.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Periode Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	20,000,000	APBK	-	12 Bulan	20,000,000	DPMPTSP Naker
03.	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Tingkat Disiplin Aparatur	Kota Lhokseumawe	100 %	90,800,000	APBK	-	100 %	50,000,000	DPMPTSP Naker
03.002.	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Khusus Hari-Hari Tertentu	Kota Lhokseumawe	240 Pasang	90,800,000	APBK	-	240 Pasang	50,000,000	DPMPTSP Naker
05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal yang diikuti	Kota Lhokseumawe	100 %	54,450,000	APBK	-	100 %	59,895,000	DPMPTSP Naker
05.001.	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	Luar Daerah Kota Lhokseumawe	15 Orang	54,450,000	APBK	-	15 Orang	59,895,000	DPMPTSP Naker
07.	Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja	Cakupan Penyediaan Dokumen Perencanaan SKPK	Kota Lhokseumawe	1 Dokumen	1,600,000	APBK	-	1 Dokumen	798,600	DPMPTSP Naker
07.002.	Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Buku RENJA SKPD	Kota Lhokseumawe	10 Buku	1,600,000	APBK	-	10 Buku	798,600	DPMPTSP Naker
15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Kota Lhokseumawe	50%	1,001,459,740	APBK	-	60%	439,230,000	DPMPTSP Naker
15.001.	Penyusunan data base tenaga kerja daerah	Jumlah Lokasi Survey Tenaga Kerja	Kota Lhokseumawe	4 Kecamatan	42,150,000	APBK	-	4 Kecamatan	44,000,000	DPMPTSP Naker

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2020			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		OPD Penanggung jawab
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.006.	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mengikuti Pelatihan Keterampilan Berbasis Kompetensi	Kota Lhokseumawe	20 Orang	327,783,400	APBK	-	20 Orang	75,000,000	DPMPTSP Naker
15.010.	Pelatihan Organisasi Pekerja dan Pengusaha	Jumlah Peserta Pelatihan Untuk Organisasi Pekerja dan Pengusaha	Kota Lhokseumawe	20 Orang	68,200,000	APBK	-	20 Orang	70,230,000	DPMPTSP Naker
15.011.	Pembinaan dan Pelatihan Wirausaha Bagi Pencari Kerja	Jumlah Pelatihan Wira Usaha Berbasis Kompetensi Bagi Pencari Kerja	Kota Lhokseumawe	50 Orang	188,883,840	APBK	-	50 Orang	120,000,000	DPMPTSP Naker
15.016.	Bursa Kerja Online	Jumlah Pendaftaran Bursa Tenaga Kerja Online	Kota Lhokseumawe	1000 Org	35,000,000	APBK	-	1000 Org	30,000,000	DPMPTSP Naker
15.017.	Pengembangan dan Pelatihan Wirausaha Baru	Jumlah Peserta Pelatihan Keterampilan Berbasis Kompetensi untuk Wirausaha Baru	Kota Lhokseumawe	50 Orang	339,442,500	APBK	-	50 Orang	100,000,000	DPMPTSP Naker
16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	Kota Lhokseumawe	50%	452,725,450	APBK	-	60%	319,406,725	DPMPTSP Naker
16.001.	Penyusunan informasi bursa tenaga kerja	Jumlah Orang Yang Mendapatkan Informasi Bursa Tenaga Kerja	Kota Lhokseumawe	2000 Orang	43,945,450	APBK	-	2000 Orang	59,406,725	DPMPTSP Naker
16.004.	Penyiapan tenaga kerja siap pakai	Jumlah Tenaga Kerja Siap Pakai	Kota Lhokseumawe	50 Orang	149,500,000	APBK	-	50 Orang	100,000,000	DPMPTSP Naker
16.005.	Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan	Jumlah Kelompok Usaha Produktif di tingkat Gampong	Kota Lhokseumawe	2 Gampong	59,280,000	APBK	-	2 Gampong	60,000,000	DPMPTSP Naker
16.009.	Padat Karya Produktif	Jumlah Penyelesaian Padat Karya Pruduktif di Gampong	Kota Lhokseumawe	2 Gampong	200,000,000	APBK	-	2 Gampong	100,000,000	DPMPTSP Naker
17	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Angka Sengketa Pengusaha Pekerja Pertama	Kota Lhokseumawe	Rasio 0	397,945,050	APBK	-	Rasio 0	404,224,700	DPMPTSP Naker
17.004.	Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan	Jumlah Peserta Sosialisasi Berbagai Peraturan Pelaksanaan Tentang Ketenagakerjaan	Kota Lhokseumawe	20 Perusahaan	50,107,000	APBK	-	20 Perusahaan	56,224,700	DPMPTSP Naker
17.018.	Sosialisasi tatacara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industri	Jumlah Peserta Sosialisasi Tatacara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industri	Kota Lhokseumawe	30 Orang	55,370,000	APBK	-	30 Orang	58,000,000	DPMPTSP Naker
17.029.	Penyelesaian Prosedur Perselisihan Hubungan Industrial	Jumlah Penyelesaian Kasus Peselisihan Hubungan Industrial	Kota Lhokseumawe	40 Kasus	120,000,000	APBK	-	40 Kasus	120,000,000	DPMPTSP Naker
17.030.	Bimbingan Teknis Tatacara Penyusunan Peraturan dan Perjanjian Kerjasama	Jumlah Peserta Bimtek Tatacara Penyusunan Peraturan dan Perjanjian Kerjasama	Kota Lhokseumawe	20 Orang	77,475,000	APBK	-	20 Orang	100,000,000	DPMPTSP Naker
17.031.	Verifikasi dan Pendataan Jaminan Kesejahteraan Pekerja	Jumlah Pendataan Jaminan Kesejahteraan Perkerja	Kota Lhokseumawe	32 Perusahaan	59,993,050	APBK	-	32 Perusahaan	32,000,000	DPMPTSP Naker
17.032.	Tertib Administrasi Ketenagakerjaan di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang dikunjungi	Kota Lhokseumawe	24 Perusahaan	35,000,000	APBK	-	24 Perusahaan	38,000,000	DPMPTSP Naker
2.12.	Penanaman Modal				917,320,000	APBK	-		513,748,005	DPMPTSP Naker
15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Cakupan Promosi dan Kerjasama Investasi	Kota Lhokseumawe	3 Media	50,000,000	APBK	-	5 Media	0	DPMPTSP Naker

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2020			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		OPD Penanggung jawab
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.009.	Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan Investasi	Jumlah SDM yang Berkualitas Guna Peningkatan Pelayanan Investasi	Luar Daerah Kota Lhokseumawe	5 Orang	50,000,000	APBK	-	0	0	DPMPTSP Naker
16	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Jumlah Investor PMDN/PMA	Kota Lhokseumawe	353 Investor	65,100,000	APBK	-	371 Investor	0	DPMPTSP Naker
16.016.	Penyusunan dan Pengadaan Prosedur Perizinan Penanaman Modal (Brosur, Leaflet, Buku Petunjuk)	Jumlah Brosur, Leaflet dan Buku Petunjuk	Kota Lhokseumawe	100 Eks	65,100,000	APBK	-	0	0	DPMPTSP Naker
17	Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana, dan prasarana daerah	Cakupan Promosi Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah	Kota Lhokseumawe	100 %	100,000,000	APBK	-	100 %	100,000,000	DPMPTSP Naker
17.007.	Pelaksanaan warta promosi daerah	Periode Promosi Produk UMKM	Kota Lhokseumawe	1 Kali	50,000,000	APBK	-	1 Kali	100,000,000	DPMPTSP Naker
17.010.	Sosialisasi Produk Unggulan Daerah	Jumlah Sosialisasi Produk Unggulan Daerah	Kota Lhokseumawe	10 UMKM	50,000,000	APBK	-	10 UMKM	0	DPMPTSP Naker
18	Program Peningkatan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Lamanya Proses Perizinan	Kota Lhokseumawe	6 Hari	702,220,000	APBK	-	6 Hari	413,748,005	DPMPTSP Naker
18.001.	Pengawasan dan Penyelidikan Perizinan	Jumlah Pengawasan dan Penyelidikan Perizinan	Kota Lhokseumawe	96 Kali	90,000,000	APBK	-	96 Kali	95,000,000	DPMPTSP Naker
18.004.	Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Kuisioner IKM	Kota Lhokseumawe	150 Responde n	41,650,000	APBK	-	150 Responde n	28,000,000	DPMPTSP Naker
18.005.	Sosialisasi Pelayanan Perizinan Terpadu	Jumlah Sosialisasi Pelayanan Perizinan Terpadu	Kota Lhokseumawe	10 Kali	55,000,000	APBK	-	10 Kali	20,000,000	DPMPTSP Naker
18.006.	Peninjauan Lapangan Tempat Izin	Jumlah Peninjauan Lapangan Tempat Izin	Kota Lhokseumawe	96 Kali	135,930,000	APBK	-	96 Kali	75,000,000	DPMPTSP Naker
18.009.	Pengelolaan Media Pendaftaran Perizinan Online	Jumlah Pemohon Perizinan	Kota Lhokseumawe	24 Pemohon	25,400,000	APBK	-	24 Pemohon	19,000,000	DPMPTSP Naker
18.012.	Penyusunan Data Base Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Data Base Perizinan	Kota Lhokseumawe	15 Jenis Izin	21,600,000	APBK	-	15 Jenis Izin	20,000,000	DPMPTSP Naker
18.015.	Pelaksanaan Pelayanan Informasi Perizinan dan Pengaduan	Jumlah Tim Pelayanan Informasi dan Pengaduan	Kota Lhokseumawe	1000 Layanan	31,600,000	APBK	-	1000 Layanan	22,000,000	DPMPTSP Naker
18.016.	Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Layanan Perizinan	Jumlah Verifikasi Layanan Perizinan	Kota Lhokseumawe	500 Berkas	94,950,000	APBK	-	1 Tahun	18,748,005	DPMPTSP Naker
18.019.	Evaluasi dan Pelaporan Pengawasan	Periode Evaluasi dan Pelaporan Pengawasan Perizinan	Kota Lhokseumawe	4 Triwulan	31,800,000	APBK	-	4 Triwulan	19,000,000	DPMPTSP Naker
18.021.	Pendataan dan Penetapan Perizinan	Jumlah Pendataan dan Penetapan Perizinan	Kota Lhokseumawe	2000 Perizinan	24,490,000	APBK	-	2000 Perizinan	25,000,000	DPMPTSP Naker
18.022.	Pelaksanaan Pelayanan Informasi Perizinan dan Pengaduan	Jumlah Layanan Informasi Perizinan dan Pengaduan	Kota Lhokseumawe	2000 Pemohon Izin	27,200,000	APBK	-	2000 Pemohon Izin	23,000,000	DPMPTSP Naker
18.024.	Sosialisasi Pelayanan Perizinan, Informasi dan Pengaduan	Jumlah Peserta Sosialisasi Pelayanan, informasi dan Pengaduan	Kota Lhokseumawe	100 Orang	54,900,000	APBK	-	100 Orang	24,000,000	DPMPTSP Naker
18.027.	Penelitian dan Verifikasi Perizinan	Periode Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Layanan Perizinan	Kota Lhokseumawe	1 Tahun	67,700,000	APBK	-	500 Berkas	25,000,000	DPMPTSP Naker

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2020			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		OPD Penanggung jawab
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				5,325,323,760	APBK	-		7,226,392,260	Dinas P3AP2KB
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar				5,325,323,760	APBK	-		7,226,392,260	Dinas P3AP2KB
2.02.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				2,640,657,000	APBK	-		3,309,750,000	Dinas P3AP2KB
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kota Lhokseumawe	100%	647,270,000	APBK	-	100%	768,750,000	Dinas P3AP2KB
01.001.	Penyediaan jasa surat menyurat	Periode penyediaan jasa surat menyurat	Kota Lhokseumawe	12 bulan	2,700,000	APBK	-	12 bulan	3,000,000	Dinas P3AP2KB
01.002.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Periode Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Lhokseumawe	12 bulan	63,560,000	APBK	-	12 bulan	73,000,000	Dinas P3AP2KB
01.007.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah pejabat pengelola keuangan SKPD (20 org x 12 bulan)	Kota Lhokseumawe	240 OB	116,720,000	APBK	-	240 OB	149,500,000	Dinas P3AP2KB
01.010.	Penyediaan alat tulis kantor	Periode Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kota Lhokseumawe	12 bulan	35,200,000	APBK	-	12 bulan	40,250,000	Dinas P3AP2KB
01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Periode Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Lhokseumawe	12 bulan	22,000,000	APBK	-	12 bulan	30,000,000	Dinas P3AP2KB
01.013.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Lhokseumawe	12 bulan	10,500,000	APBK	-	12 bulan	15,000,000	Dinas P3AP2KB
01.015.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan (1 Eks x 365 hari) dan Iklan	Kota Lhokseumawe	365 Eks	35,000,000	APBK	-	365 Eks	40,000,000	Dinas P3AP2KB
01.017.	Penyediaan makanan dan minuman	Periode Penyediaan Makanan dan Minuman	Kota Lhokseumawe	11 Bulan	15,000,000	APBK	-	11 Bulan	18,000,000	Dinas P3AP2KB
01.018.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Periode Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Kota Lhokseumawe	12 bulan	150,000,000	APBK	-	12 bulan	200,000,000	Dinas P3AP2KB
01.020.	Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap	Jumlah jasa pegawai tidak tetap (31 Org x 12 Bulan)	Kota Lhokseumawe	372 OB	196,590,000	APBK	-	372 OB	200,000,000	Dinas P3AP2KB
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kota Lhokseumawe	100%	151,050,000	APBK	-	100%	208,000,000	Dinas P3AP2KB
02.011.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Lhokseumawe	3 Jenis	45,000,000	APBK	-	3 Jensi	70,000,000	Dinas P3AP2KB
02.022.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Periode Pemeliharaan Rutin / berkala gedung kantor dan gudang Alokon	Kota Lhokseumawe	12 bulan	5,000,000	APBK	-	12 bulan	20,000,000	Dinas P3AP2KB
02.023.	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan (1 unit x 12 bln)	Kota Lhokseumawe	12 UB	28,200,000	APBK	-	12 UB	35,000,000	Dinas P3AP2KB
02.024.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Pemeliharaan Rutin / Berkala kendaraan dinas / operasional (6 Unit x 12 Bulan)	Kota Lhokseumawe	72 UB	60,100,000	APBK	-	72 UB	68,000,000	Dinas P3AP2KB
02.030.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Periode Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	12,750,000	APBK	-	12 Bulan	15,000,000	Dinas P3AP2KB

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2020			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		OPD Penanggung jawab
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
03.	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Tingkat Disiplin Aparatur	Kota Lhokseumawe	100%	50,000,000	APBK	-	100%	100,000,000	Dinas P3AP2KB
03.006.	Penyediaan Sewa Gedung/Gudang Kantor	Periode Sewa Gedung/Gudang Kantor	Kota Lhokseumawe	1 Tahun	50,000,000	APBK	-	1 Tahun	100,000,000	Dinas P3AP2KB
05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan kegiatan pendidikan dan pelatihan formal yang diikuti	Kota Lhokseumawe	1 Kegiatan	50,000,000	APBK	-	1 Kegiatan	60,000,000	Dinas P3AP2KB
05.001.	Pendidikan dan pelatihan formal	Periode Pendidikan Dan Pelatihan Formal Aparatur	Kota Lhokseumawe	12 bulan	50,000,000	APBK	-	12 bulan	60,000,000	Dinas P3AP2KB
06.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Cakupan penyediaan Dokumen Standard Pelayanan Minimum (SPM) SKPD	Kota Lhokseumawe	1 Dokumen	12,400,000	APBK	-	1 Dokumen	15,000,000	Dinas P3AP2KB
06.011.	Penyusunan Standart Pelayanan Minimum (SPM)	Jumlah buku SPM	Kota Lhokseumawe	10 buku	12,400,000	APBK	-	10 buku	15,000,000	Dinas P3AP2KB
07.	Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja	Cakupan Penyediaan Dokumen Perencanaan SKPK	Kota Lhokseumawe	1 Dokumen	1,440,000	APBK	-	1 Dokumen	3,000,000	Dinas P3AP2KB
07.002.	Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah	Jumlah buku RENJA SKPD	Kota Lhokseumawe	10 Buku	1,440,000	APBK	-	15 Buku	3,000,000	Dinas P3AP2KB
15	Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Persentase efektivitas kelembagaan Pengarustamaan Gender (PUG) menuju Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)	Kota Lhokseumawe	73%	72,650,000	APBK	-	95%	80,000,000	Dinas P3AP2KB
15.005.	Hari Anak Nasional	Jumlah peserta yang mengikuti hari anak	Kota Lhokseumawe	80 Org	72,650,000	APBK	-	80 Org	80,000,000	Dinas P3AP2KB
16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	Kota Lhokseumawe	100 %	290,016,000	APBK	-	100 %	480,000,000	Dinas P3AP2KB
16.002.	Pelayanan Korban Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)	Jumlah kasus yang ditangani	Kota Lhokseumawe	40 Kasus	60,000,000	APBK	-	40 Kasus	150,000,000	Dinas P3AP2KB
16.008.	Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak	Periode penyediaan data gender dan anak	Kota Lhokseumawe	12 bulan	35,885,000	APBK	-	12 bulan	80,000,000	Dinas P3AP2KB
16.010.	Sosialisasi dan Pembekalan PUG	Jumlah rencana program SKPD dan aparatur gampong yang mengikuti pelatihan	Kota Lhokseumawe	110 org	59,720,000	APBK	-	50 org	90,000,000	Dinas P3AP2KB
16.023.	Peningkatan Kapasitas Forum Anak Daerah	Jumlah peserta yang mengikuti forum anak daerah	Kota Lhokseumawe	120 org	60,891,000	APBK	-	120 org	60,000,000	Dinas P3AP2KB
16.038.	Pendataan Terkait Gender, Perempuan, Anak dan Permasalahannya	Periode penyediaan data	Kota Lhokseumawe	12 bulan	73,520,000	APBK	-	12 bulan	100,000,000	Dinas P3AP2KB
17	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Persentase Pemberdayaan Kelompok Perempuan	Kota Lhokseumawe	20%	109,000,000	APBK	-	40%	110,000,000	Dinas P3AP2KB

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2020			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		OPD Penanggung jawab
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.019.	Kegiatan Dalam Rangka Peringatan Hari Ibu	Jumlah perlombaan	Kota Lhokseumawe	1 Perlombaan	109,000,000	APBK	-	1 Perlombaan	110,000,000	Dinas P3AP2KB
18	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	Kota Lhokseumawe	75,30%	1,256,831,000	APBK	-	75,30%	1,485,000,000	Dinas P3AP2KB
18.016.	Seleksi Anak Daerah	Jumlah anak yang mengikuti Seleksi Anak Daerah	Kota Lhokseumawe	40 Orang	56,240,000	APBK	-	40 Orang	60,000,000	Dinas P3AP2KB
18.017.	Dharma Wanita Persatuan Kota Lhokseumawe	Periode pelaksanaan operasional DWP	Kota Lhokseumawe	12 bulan	99,925,000	APBK	-	12 bulan	110,000,000	Dinas P3AP2KB
18.019.	Persatuan Wanita Republik Indonesia (PERWARI)	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan PERWARI	Kota Lhokseumawe	30 org	43,310,000	APBK	-	30 org	50,000,000	Dinas P3AP2KB
18.029.	Seminar Parenting (Psikolog Pendidikan Orang Tua Dalam Mendidik Anak) DWP Kota Lhokseumawe	Jumlah peserta Seminar Parenting	Kota Lhokseumawe	50 org	29,695,000	APBK	-	50 org	35,000,000	Dinas P3AP2KB
18.035.	Pelatihan Peningkatan Kualitas Industri Rumahan Bagi Perempuan (OTSUS)	Terlatihnya perempuan yang punya usaha	Kota Lhokseumawe	80 orang	1,000,000,000	APBK	-	80 org	1,200,000,000	Dinas P3AP2KB
18.036.	Peningkatan Kapasitas Pengurus DWP Kota Lhokseumawe	Jumlah pengurus DWP yang mengikuti pelatihan	Kota Lhokseumawe	40 org	27,661,000	APBK	-	40 org	30,000,000	Dinas P3AP2KB
2.08.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				2,684,666,760	APBK	-		3,916,642,260	Dinas P3AP2KB
15	Program Keluarga Berencana	Rata-rata jumlah anak per keluarga	Kota Lhokseumawe	2 Anak	2,277,114,260	APBK	-	2 Anak	3,446,642,260	Dinas P3AP2KB
15.009.	Hari Keluarga Nasional (HARGANAS) Tingkat Kota Lhokseumawe	Jumlah pemenang yang mengikuti Hari Keluarga Nasional (HARGANAS)	Kota Lhokseumawe	2 kelompok/pasang	82,822,000	APBK	-	2 kelompok/pasang	160,000,000	Dinas P3AP2KB
15.011.	Peningkatan Sarana dan Prasarana dalam Rangka Meningkatkan Program Keluarga Berencana (DAK)	Jumlah Sarana dan Prasarana dalam Rangka Meningkatkan Program Keluarga Berencana (DAK)	Kota Lhokseumawe	24 jenis	1,011,650,000	APBK	-	8 jenis	1,900,000,000	Dinas P3AP2KB
15.017.	Bantuan Operasional Keluarga Berencana (DAK Non FISIK)	Periode Pelayanan KB	Kota Lhokseumawe	12 bulan	1,140,642,260	APBK	-	12 bulan	1,340,642,260	Dinas P3AP2KB
15.018.	Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi (DAK Non FISIK)	Jumlah Faskes yang disalurkan Alokon	Kota Lhokseumawe	29 Faskes	42,000,000	APBK	-	27 Faskes	46,000,000	Dinas P3AP2KB
16	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Cakupan pelayanan reproduksi remaja	Kota Lhokseumawe	70 %	140,440,000	APBK	-	70 %	170,000,000	Dinas P3AP2KB
16.003.	Sunat Rasul Anak Keluarga Pra Sejahtera	Jumlah sunat rasul anak pra sejahtera	Kota Lhokseumawe	200 org	140,440,000	APBK	-	200 org	170,000,000	Dinas P3AP2KB
17	Program pelayanan kontrasepsi	Jumlah Akseptor KB	Kota Lhokseumawe	81.78%	79,800,000	APBK	-	81.78 %	100,000,000	Dinas P3AP2KB
17.006.	Bhakti Sosial KB-TNI (Manunggal KB-Kes)	kegiatan pelayanan KB	Kota Lhokseumawe	4 Kecamatan	79,800,000	APBK	-	4 Kecamatan	100,000,000	Dinas P3AP2KB
23	Program penyiapan tenaga pedamping kelompok bina keluarga	Cakupan peserta KB aktif	Kota Lhokseumawe	81.78%	187,312,500	APBK	-	81.78 %	200,000,000	Dinas P3AP2KB

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2020			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		OPD Penanggung jawab
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23.005.	Kegiatan Penilaian dan Pembinaan KB Lestari	Jumlah pasangan keluarga lestari	Kota Lhokseumawe	4 pasangan	55,500,000	APBK	-	4 pasangan	60,000,000	Dinas P3AP2KB
23.009.	Pelatihan Kader BKB Holistik Integratif (BKB HI)	Jumlah peserta Pelatihan Kader BKB Holistik Integratif (BKB HI)	Kota Lhokseumawe	75 org	55,367,500	APBK	-	75 org	60,000,000	Dinas P3AP2KB
23.012.	Penilaian dan Pembinaan Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR)	Jumlah Kelompok BKR dan PIK-R	Kota Lhokseumawe	10 kelompok	76,445,000	APBK	-	4 Kelompok	80,000,000	Dinas P3AP2KB
	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan				14,327,447,323	APBK	-		12,895,134,254	DKP3
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar				5,208,588,045	APBK	-		3,777,705,611	DKP3
2.03.	Pangan				5,208,588,045	APBK	-		3,777,705,611	DKP3
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Kota Lhokseumawe	100%	1,524,178,775	APBK	-	100%	1,289,107,103	DKP3
01.001.	Penyediaan jasa surat menyurat	Periode Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	2,250,000	APBK	-	12 Bulan	2,910,761	DKP3
01.002.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Periode Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	285,922,059	APBK	-	12 Bulan	342,508,320	DKP3
01.007.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Pejabat Pengelola Keuangan SKPK (23 x 12 Bln)	Kota Lhokseumawe	276 OB	131,040,000	APBK	-	276 OB	188,232,000	DKP3
01.010.	Penyediaan alat tulis kantor	Periode Tersedianya Alat Tulis Kantor	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	34,028,886	APBK	-	12 Bulan	28,386,798	DKP3
01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Periode Penyediaan Bahan Cetak dan Fotocopy	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	28,789,730	APBK	-	12 Bulan	25,920,000	DKP3
01.013.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Periode Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	2,970,000	APBK	-	12 Bulan	7,890,624	DKP3
01.015.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Periode Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	1,140,000	APBK	-	12 Bulan	1,368,000	DKP3
01.018.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Periode Rapat-rapat koordinasi & konsultasi dalam & luar daerah	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	500,000,000	APBK	-	12 Bulan	78,529,000	DKP3
01.020.	Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap	Jumlah Jasa Pegawai Tidak Tetap	Kota Lhokseumawe	1874 OB	538,038,100	APBK	-	1874 OB	613,361,600	DKP3
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	Kota Lhokseumawe	100%	825,879,000	APBK	-	100%	285,396,185	DKP3
02.005.	Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Kota Lhokseumawe	1 unit	392,625,000	APBK	-	0	0	DKP3
02.011.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Lhokseumawe	10 Unit	99,954,000	APBK	-	10 Unit	62,073,000	DKP3
02.022.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Periode Pemeliharaan Rutin/ berkala Gedung Kantor	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	150,000,000	APBK	-	12 Bulan	24,143,185	DKP3
02.023.	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan (1 Unit x 12 Bulan)	Kota Lhokseumawe	12 UB	28,260,000	APBK	-	12 UB	38,040,000	DKP3
02.024.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas / Operasional (5 unit x 12 Bulan)	Kota Lhokseumawe	60 UB	143,040,000	APBK	-	60 UB	133,840,000	DKP3

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2020			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		OPD Penanggung jawab
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
02.030.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Periode Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	12,000,000	APBK	-	12 Bulan	27,300,000	DKP3
07.	Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja	Cakupan Penyediaan Dokumen perencanaan SKPK	Kota Lhokseumawe	1 Dokumen	1,200,000	APBK	-	1 Dokumen	1,597,200	DKP3
07.002.	Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Buku Renja SKPD	Kota Lhokseumawe	20 Buku	1,200,000	APBK	-	20 Buku	1,597,200	DKP3
18	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Cakupan Peningkatan Kesejahteraan Petani	Kota Lhokseumawe	100%	1,190,142,782	APBK	-	100%	535,000,000	DKP3
18.010.	Pelaksanaan Pekan Nasional (PENAS) KTNA	Periode pelaksanaan pekan Nasional KTNA	Kota Lhokseumawe	14 Hari	637,600,000	APBK	-		0	DKP3
18.013.	Pembangunan Balai Pertanian (Saung Tani)	Jumlah Pembangunan Balai Pertanian (Saung Tani)	Kota Lhokseumawe	7 Unit	552,542,782	APBK	-	7 Unit	535,000,000	DKP3
19	Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan	Cakupan penyediaan sarana dan prasarana pertanian/perkebunan	Kota Lhokseumawe	50%	336,495,188	APBK	-	60%	1,104,232,959	DKP3
19.001.	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Panjang Jalan Usaha tani	Kota Lhokseumawe	1 Km	336,495,188	APBK	-	2 Km	1,104,232,959	DKP3
20	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Persentase Ketersediaan Pangan Utama	Kota Lhokseumawe	100%	1,330,692,300	APBK	-	100%	562,372,164	DKP3
20.040.	Lomba Cipta Menu Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) Berpotensi Sumber Daya Lokal	Periode Pelaksanaan Lomba Cipta Menu Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) Berpotensi Sumber Daya Lokal	Kota Lhokseumawe	2 Hari	90,465,500	APBK	-	2 Hari	87,372,164	DKP3
20.044.	Pekan Daerah (PEDA)	Periode Pelaksanaan PEDA	Kota Lhokseumawe	14 Hari	174,500,000	APBK	-		0	DKP3
20.051.	Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat/ Toko Tani Indonesia (PUPM-TTI)	Jumlah Pengembangan Toko Tani Indonesia (TTI)	Kota Lhokseumawe	2 Toko Tani	42,500,000	APBK	-	2 Toko Tani	95,000,000	DKP3
20.052.	Koordinasi Perumusan Kebijakan, Evaluasi dan Pengendalian Ketahanan Pangan	Periode Sosialisasi Dewan Ketahanan Pangan	Kota Lhokseumawe	1 kali	874,586,800	APBK	-	1 kali	220,000,000	DKP3
20.054.	Kemandirian dan Penanganan Daerah Rawan Pangan	Jumlah laporan	Kota Lhokseumawe	3 laporan	148,640,000	APBK	-	3 laporan	160,000,000	DKP3
3	Urusan Pilihan				9,118,859,278	APBK	-		9,117,428,643	DKP3
3.01.	Kelautan dan Perikanan				6,159,633,600	APBK	-		6,192,531,121	DKP3
16	Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan	Cakupan pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	50,000,000	APBK	-	12 Bulan	96,800,000	DKP3
16.002.	Pengawasan dan Penertiban Illegal Fising	Periode Patroli Bersama	Kota Lhokseumawe	5 Kali	50,000,000	APBK	-	5 Kali	96,800,000	DKP3

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2020			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		OPD Penanggung jawab
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut	Cakupan Pembinaan dan Penegakkan Hukum Kelautan	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	55,300,000	APBK	-	12 Bulan	60,500,000	DKP3
17.001.	Penyuluhan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut	Periode Sosialisasi Penyuluhan Hukum	Kota Lhokseumawe	1 Kali	55,300,000	APBK	-	1 Kali	60,500,000	DKP3
20	Program pengembangan budidaya perikanan	Jumlah Produksi Perikanan (Budidaya)	Kota Lhokseumawe	1.738 Ton	4,800,193,600	APBK	-	1.756 Ton	4,086,223,121	DKP3
20.001.	Pengembangan bibit ikan unggul	Jumlah Produksi Perikanan (Budidaya)	Kota Lhokseumawe	760000 Ekor	835,350,900	APBK	-	1016100 Ekor	540,643,081	DKP3
20.004.	Pengembangan Sarana dan Prasarana Budidaya Perikanan	Jumlah Produksi Perikanan (Budidaya)	Kota Lhokseumawe	46 Unit	2,655,552,700	APBK	-	46 Unit	1,035,820,040	DKP3
20.011.	Pengembangan Sarana dan Prasarana Budidaya Perikanan (OTSUS)	Periode normalisasi	Kota Lhokseumawe	1 kali	1,166,000,000	APBK	-	100%	2,200,000,000	DKP3
20.014.	Pengukuran Kualitas Air Tambak	Periode Produksi Perikanan (Budidaya)	Kota Lhokseumawe	11 bulan	72,540,000	APBK	-	11 bulan	66,550,000	DKP3
20.017.	Penyusunan Updating Data Pembudidayaan Ikan	Jumlah Dokumen Produksi Perikanan (Budidaya)	Kota Lhokseumawe	1 Dokumen	63,750,000	APBK	-	1 Dokumen	212,960,000	DKP3
20.021.	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Perikanan Budidaya	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Perikanan Budidaya	Kota Lhokseumawe	1 Dokumen	7,000,000	APBK	-	1 Dokumen	30,250,000	DKP3
21	Program pengembangan perikanan tangkap	Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB	Kota Lhokseumawe	6,68%	500,000,000	APBK	-	6,74%	731,808,000	DKP3
21.010.	Pembangunan Pangkalan Pendaratan Ikan	Jumlah Pembangunan Dermaga Mini	Kota Lhokseumawe	1 Dermaga	500,000,000	APBK	-	0	731,808,000	DKP3
23	Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	Cakupan Pemasran Produksi Perikanan	Kota Lhokseumawe	100%	63,350,000	APBK	-	100%	750,000,000	DKP3
23.005.	Temu Usaha Pelaku Perikanan Kota Lhokseumawe	Periode Temu Usahan Pelaku Perikanan Kota Lhokseumawe	Kota Lhokseumawe	5 kali	63,350,000	APBK	-	100%	750,000,000	DKP3
26	Program Peningkatan Kesejahteraan Nelayan	Cakupan Bina Kelompok Nelayan	Kota Lhokseumawe	30 Kipl	690,790,000	APBK	-	30 Kipl	467,200,000	DKP3
26.002.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Untuk Masyarakat Nelayan	Jumlah Alat Tangkap untuk Masyarakat Nelayan	Kota Lhokseumawe	2 Unit	627,590,000	APBK	-	2 Unit	387,200,000	DKP3
26.003.	Pembuatan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan	Jumlah buku pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan	Kota Lhokseumawe	100 buku	63,200,000	APBK	-	100%	80,000,000	DKP3
3.03.	Pertanian				2,959,225,678	APBK	-		2,924,897,522	DKP3
15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Cakupan Pembinaan Kelompok Tani	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	54,530,000	APBK	-	12 Bulan	793,717,522	DKP3
15.008.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Lahan Pertanian/Perkebunan	Cakupan Pembinaan Kelompok Tani	Kota Lhokseumawe	50 Unit	54,530,000	APBK	-	50 Unit	793,717,522	DKP3
16	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	Cakupan pembinaan desa yang memperoleh kawasan pangan lestari	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	208,470,000	APBK	-	12 Bulan	204,480,000	DKP3
16.009.	Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan	Periode pengembangan pangan	Kota Lhokseumawe	5 kali	208,470,000	APBK	-	1 kegiatan	204,480,000	DKP3

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2020			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		OPD Penanggung jawab
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Produktivitas Komoditas Pangan	Kota Lhokseumawe	15937 Ton	1,825,747,432	APBK	-	15937 Ton	1,202,740,000	DKP3
19.003.	Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan	Produktivitas Komoditas Pangan	Kota Lhokseumawe	12354 Batang	675,747,432	APBK	-	52000 Batang	1,202,740,000	DKP3
19.025.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pertanian/Perkebunan (OTSUS)	Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Pertanian/Perkebunan (OTSUS)	Kota Lhokseumawe	1 Unit	1,150,000,000	APBK	-	1 Unit	0	
20	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	Kontribusi Kelompok Tani terhadap PDRB	Kota Lhokseumawe	0,002%	94,080,000	APBK	-	0,002%	110,000,000	DKP3
20.006.	Jambore Penyuluh	Periode Sosialisasi Dewan Ketahanan Pangan	Kota Lhokseumawe	1 kali	94,080,000	APBK	-	100%	110,000,000	DKP3
21	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Persentase sarana pendukung penyakit ternak	Kota Lhokseumawe (Blang Mangat dan Muara Satu)	50%	539,582,890	APBK	-	80%	480,400,000	DKP3
21.002.	Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak	Jumlah ternak yang di vaksin	Kota Lhokseumawe	1300 Ekor	24,582,890	APBK	-	1300 Ekor	478,600,000	DKP3
21.012.	Pengadaan Obat-obatan, Vaksin dan Hormon (OTSUS)	Jumlah Obat-obatan, vaksin dan hormon	Kota Lhokseumawe	8 Jenis	515,000,000	APBK	-	100%	1,800,000	DKP3
22	Program peningkatan produksi hasil peternakan	Kontribusi Sub Sektor Peternakan Terhadap PDRB	Kota Lhokseumawe	0,742%	236,815,356	APBK	-	0,748%	133,560,000	DKP3
22.016.	Pembibitan Ternak Melalui Inseminasi Buatan (IB)	Jumlah Inseminasi Buatan (IB) Ternak	Kota Lhokseumawe	300 ekor	140,765,356	APBK	-	25 Ekor	27,760,000	DKP3
22.017.	Expo/Kontes Ternak	Jumlah Ternak Sapi yang ikut Perlombaan	Kota Lhokseumawe	6 Ekor	96,050,000	APBK	-	4 Ekor	105,800,000	DKP3
	Dinas Pertanahan				4,345,138,550	APBK	-		3,876,900,000	Dinas Pertanahan
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar				4,345,138,550	APBK	-		3,876,900,000	Dinas Pertanahan
2.04.	Pertanahan				4,345,138,550	APBK	-		3,876,900,000	Dinas Pertanahan
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kota Lhokseumawe	100%	568,350,000	APBK	-	100%	571,000,000	Dinas Pertanahan
01.001.	Penyediaan jasa surat menyurat	Periode Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	2,700,000	APBK	-	12 Bulan	3,000,000	Dinas Pertanahan
01.002.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Periode Penyediaan Penerangan, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	101,800,000	APBK	-	12 Bulan	85,000,000	Dinas Pertanahan
01.007.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Pejabat Pengelola Keuangan SKPD	Kota Lhokseumawe	17 OB	113,900,000	APBK	-	17 OB	120,000,000	Dinas Pertanahan
01.010.	Penyediaan alat tulis kantor	Periode Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	40,000,000	APBK	-	12 Bulan	50,000,000	Dinas Pertanahan
01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Periode Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	18,000,000	APBK	-	12 Bulan	20,000,000	Dinas Pertanahan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2020			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		OPD Penanggung jawab
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01.013.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Periode Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	20,400,000	APBK	-	12 Bulan	25,000,000	Dinas Pertanahan
01.015.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Periode Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	32,400,000	APBK	-	12 Bulan	3,000,000	Dinas Pertanahan
01.017.	Penyediaan makanan dan minuman	Periode Penyediaan Makanan dan Minuman	Kota Lhokseumawe	11 Bulan	21,200,000	APBK	-	11 Bulan	25,000,000	Dinas Pertanahan
01.018.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Periode Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	120,000,000	APBK	-	12 Bulan	140,000,000	Dinas Pertanahan
01.020.	Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap	Jumlah Jasa Pegawai Tidak Tetap	Kota Lhokseumawe	13 Orang	97,950,000	APBK	-	23 OB	100,000,000	Dinas Pertanahan
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kota Lhokseumawe	100%	2,081,200,000	APBK	-	100%	865,000,000	Dinas Pertanahan
02.004.	Pengadaan mobil jabatan	Jumlah Pengadaan Mobil Jabatan	Kota Lhokseumawe	3 Unit	700,000,000	APBK	-	2 Unit	250,000,000	Dinas Pertanahan
02.005.	Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Kota Lhokseumawe	16 Unit	750,000,000	APBK	-	16 Unit	300,000,000	Dinas Pertanahan
02.011.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Lhokseumawe	117 Unit	495,800,000	APBK	-	126 Unit	200,000,000	Dinas Pertanahan
02.022.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Periode Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	50,000,000	APBK	-	12 Bulan	15,000,000	Dinas Pertanahan
02.023.	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Periode Jasa Service mobil serta BBM Kendaraan / Mobil Jabatan	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	31,700,000	APBK	-	12 Bulan	35,000,000	Dinas Pertanahan
02.024.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Periode Jasa Service mobil serta BBM Kendaraan Dinas Operasional	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	31,700,000	APBK	-	12 Bulan	35,000,000	Dinas Pertanahan
02.030.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Periode Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	7,000,000	APBK	-	12 Bulan	10,000,000	Dinas Pertanahan
02.042.	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Periode Rehab Sedang Berat Gedung Kantor	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	15,000,000	APBK	-	12 Bulan	20,000,000	Dinas Pertanahan
03.	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase tingkat disiplin aparatur	Kota Lhokseumawe	100%	190,000,000	APBK	-	100%	200,000,000	Dinas Pertanahan
03.002.	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Yang Tersedia	Kota Lhokseumawe	60 Pasang	30,000,000	APBK	-	60 Pasang	40,000,000	Dinas Pertanahan
03.006.	Penyediaan Sewa Gedung/Gudang Kantor	Periode Penyediaan Sewa Gedung Kantor	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	160,000,000	APBK	-	1 Tahun	160,000,000	Dinas Pertanahan
05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan kegiatan pendidikan dan pelatihan formal yang diikuti	Kota Lhokseumawe	5 Keg	100,000,000	APBK	-	5 Keg	120,000,000	Dinas Pertanahan
05.001.	Pendidikan dan pelatihan formal	Periode Pendidikan dan Pelatihan Formal Bagi Aparatur	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	40,000,000	APBK	-	12 Bulan	50,000,000	Dinas Pertanahan
05.041.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Periode Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	60,000,000	APBK	-	3 Kali	70,000,000	Dinas Pertanahan
06.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Cakupan Penyediaan Dokumen Standard Pelayanan Minimum (SPM) SKPD	Kota Lhokseumawe	1 Dokumen	9,650,000	APBK	-	1 Dokumen	10,000,000	Dinas Pertanahan
06.004.	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah Laporan Keuangan	Kota Lhokseumawe	5 Eks	9,650,000	APBK	-	10 Eks	10,000,000	Dinas Pertanahan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2020			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		OPD Penanggung jawab
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
07.	Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja	Cakupan Penyediaan Dokumen perencanaan SKPK	Kota Lhokseumawe	1 Dokumen	42,390,000	APBK	-	1 Dokumen	32,100,000	Dinas Pertanahan
07.001.	Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Buku RENSTRA	Kota Lhokseumawe	12 Buku	10,550,000	APBK	-	12 Buku	0	Dinas Pertanahan
07.002.	Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Buku RENJA	Kota Lhokseumawe	12 Buku	10,600,000	APBK	-	12 Buku	10,600,000	Dinas Pertanahan
07.003.	Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	Jumlah Buku LAKIP	Kota Lhokseumawe	12 Buku	10,390,000	APBK	-	12 Buku	10,500,000	Dinas Pertanahan
07.004.	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan	Jumlah Buku SOP	Kota Lhokseumawe	12 Buku	10,850,000	APBK	-	10 Buku	11,000,000	Dinas Pertanahan
10	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan Penyediaan Dokumen Standard Pelayanan Minimum (SPM) SKPD	Kota Lhokseumawe	1 Dokumen	10,390,000	APBK	-	1 Dokumen	11,800,000	Dinas Pertanahan
10.001.	Penyusunan dan Pembahasan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP)	Jumlah Buku LAKIP	Kota Lhokseumawe	12 Buku	10,390,000	APBK	-	12 Buku	11,800,000	Dinas Pertanahan
15	Program pembangunan sistem pendaftaran tanah	Cakupan Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah	Kota Lhokseumawe	100%	47,000,000	APBK	-	100%	50,000,000	Dinas Pertanahan
15.002.	Sosialisasi sistem pendaftaran tanah	Jumlah Sosialisasi Sistem Pendaftaran Tanah	Kota Lhokseumawe	1 Kali	47,000,000	APBK	-	1 Kali	50,000,000	Dinas Pertanahan
16	Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Cakupan Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Kota Lhokseumawe	100%	1,101,751,550	APBK	-	100%	1,787,000,000	Dinas Pertanahan
16.001.	Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Periode Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	64,050,000	APBK	-	12 Bulan	65,000,000	Dinas Pertanahan
16.002.	Penyuluhan hukum pertanahan	Jumlah Kepala Desa Yang Memahami Tentang Hukum Pertanahan	Kota Lhokseumawe	68 Orang	285,040,000	APBK	-	68 Gampong	320,000,000	Dinas Pertanahan
16.003.	Bimtek Tata Cara Pengadaan Tanah	Jumlah Aparatur Desa Yang Memahami Tata Cara Pengadaan Tanah	Kota Lhokseumawe	100 Org	70,450,000	APBK	-	100 Org	80,000,000	Dinas Pertanahan
16.004.	Identifikasi Pemegang Hak Tanah Atas Pengadaan Tanah Pemerintah	Jumlah Identifikasi Pemegang Hak Tanah Atas Pengadaan Tanah Pemerintah	Kota Lhokseumawe	4 Kali	186,012,500	APBK	-	4 Kali	190,000,000	Dinas Pertanahan
16.005.	Peningkatan Pengsertifikatan Tanah Milik Masyarakat	Jumlah Peningkatan Pengsertifikatan Tanah Milik Masyarakat	Kota Lhokseumawe	200 Sertifikat	262,012,500	APBK	-	200 Sertifikat	290,000,000	Dinas Pertanahan
16.006.	Monitoring dan Evaluasi Perolehan/Pemanfaatan Tanah Milik Pemerintah	Periode Monitoring dan Evaluasi Perolehan/Pemanfaatan Tanah Milik Pemerintah	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	60,333,710	APBK	-	4 Kali	650,000,000	Dinas Pertanahan
16.009.	Monitoring dan Evaluasi Pertanahan	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Pertanahan	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	31,950,000	APBK	-	100%	32,000,000	Dinas Pertanahan
16.010.	Inventarisasi dan Pemetaan Tanah Kosong/Tanah Terlantar	Periode Inventarisasi dan Pemetaan Tanah Kosong/Tanah Terlantar	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	70,979,695	APBK	-	5 Kali	80,000,000	Dinas Pertanahan
16.016.	Penataan Kepemilikan dan Pemanfaatan Tanah Pemerintah	Periode Penataan Kepemilikan dan Pemanfaatan Tanah Pemerintah	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	70,923,145	APBK	-	5 Kali	80,000,000	Dinas Pertanahan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2020			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		OPD Penanggung jawab
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Cakupan Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	Kota Lhokseumawe	100%	98,407,000	APBK	-	100%	110,000,000	Dinas Pertanahan
17.001.	Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Periode Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	98,407,000	APBK	-	6 Konflik	110,000,000	Dinas Pertanahan
18	Program pengembangan sistem informasi pertanahan	Cakupan pengembangan sistem informasi pertanahan	Kota Lhokseumawe	100%	96,000,000	APBK	-	100%	120,000,000	Dinas Pertanahan
18.002.	Koordinasi Antar Lembaga Pertanahan	Periode Koordinasi Antar Lembaga Pertanahan	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	44,500,000	APBK	-	12 Bulan	70,000,000	Dinas Pertanahan
18.005.	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Pertanahan	Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Pertanahan	Kota Lhokseumawe	18 Org	51,500,000	APBK	-	18 Org	50,000,000	Dinas Pertanahan
	Dinas Lingkungan Hidup				40,008,128,712	APBK	-		40,964,292,381	DLH
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar				40,008,128,712	APBK	-		40,964,292,381	DLH
2.05.	Lingkungan Hidup				40,008,128,712	APBK	-		40,964,292,381	DLH
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kota Lhokseumawe	100%	22,908,010,650	APBK	-	100%	20,597,498,136	DLH
01.001.	Penyediaan jasa surat menyurat	Periode Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Lhokseumawe	12 bln	2,850,000	APBK	-	12 bln	2,600,000	DLH
01.002.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Periode Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Kota Lhokseumawe	12 bln	12,375,600,000	APBK	-	12 bln	9,943,443,511	DLH
01.007.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Pejabat Pengelola Keuangan SKPD (19 org x 12 Bulan)	Kota Lhokseumawe	228 OB	129,661,950	APBK	-	228 OB	110,000,000	DLH
01.010.	Penyediaan alat tulis kantor	Periode Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kota Lhokseumawe	12 bln	11,969,300	APBK	-	12 bln	25,000,000	DLH
01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Periode Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Lhokseumawe	12 bln	18,000,000	APBK	-	12 bln	20,000,000	DLH
01.013.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Periode Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Lhokseumawe	12 bln	3,760,000	APBK	-	12 bln	5,000,000	DLH
01.015.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan (1 eks x 365 Hari)	Kota Lhokseumawe	365 Eks	43,680,000	APBK	-	365 Eks	1,254,000	DLH
01.017.	Penyediaan makanan dan minuman	Periode Penyediaan Makanan dan Minuman	Kota Lhokseumawe	12 bln	1,355,560,000	APBK	-	12 bln	1,422,600,000	DLH
01.018.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Periode Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Kota Lhokseumawe	12 bln	137,000,000	APBK	-	12 bln	75,000,000	DLH
01.020.	Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap	Jumlah Jasa Pegawai Tidak Tetap (380 org x 12 Bln)	Kota Lhokseumawe	4560 OB	8,819,930,000	APBK	-	4560 OB	8,982,600,625	DLH
01.022.	Penyediaan Jasa Pengelolaan Laboratorium	Jumlah Penyediaan Jasa Pengelolaan Laboratorium (4 Orang x 12 Bulan)	Kota Lhokseumawe	48 OB	9,999,400	APBK	-	48 OB	10,000,000	DLH
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kota Lhokseumawe	100%	3,357,047,200	APBK	-	100%	3,205,803,432	DLH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2020			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		OPD Penanggung jawab
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
02.011.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Lhokseumawe	22 Unit	37,500,000	APBK	-	22 Unit	8,000,000	DLH
02.012.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Laboratorium	Jumlah Pengadaan Peralatan Laboratorium	Kota Lhokseumawe	12 bln	45,500,000	APBK	-	12 bln	65,000,000	DLH
02.022.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Periode Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Kota Lhokseumawe	12 bln	10,000,000	APBK	-	12 bln	6,000,000	DLH
02.023.	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan (1 Unit x 12 Bln)	Kota Lhokseumawe	12 UB	39,000,000	APBK	-	12 UB	40,000,000	DLH
02.024.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Pemeliharaan / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional (53 Unit x 12 Bulan)	Kota Lhokseumawe	636 UB	2,854,597,200	APBK	-	636 UB	2,860,803,432	DLH
02.030.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Periode Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Kota Lhokseumawe	Unit	129,950,000	APBK	-	Unit	45,000,000	DLH
02.031.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Listrik	Jumlah Pemeliharaan Rutin / Berkala Jaringan Listrik	Kota Lhokseumawe	Unit	5,500,000	APBK	-	Unit	6,000,000	DLH
02.032.	Pemeliharaan Lampu Jalan	Jumlah Pemeliharaan Lampu Jalan Yang Terpasang	Kota Lhokseumawe	12 bln	235,000,000	APBK	-	12 bln	175,000,000	DLH
03.	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Tingkat Disiplin Aparatur	Kota Lhokseumawe	100%	555,788,496	APBK	-	100%	700,810,621	DLH
03.002.	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Khusus Hari-hari tertentu	Kota Lhokseumawe	100%	555,788,496	APBK	-	100%	700,810,621	DLH
06.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Cakupan Penyediaan Dokumen Standard Pelayanan Minimum (SPM) SKPD	SKPK	1 Dokumen	3,350,000	APBK	-	1 Dokumen	3,993,000	DLH
06.011.	Penyusunan Standart Pelayanan Minimum (SPM)	Jumlah Buku Penyusunan SPM Lingkungan	Kota Lhokseumawe	15 Buku	3,350,000	APBK	-	15 Buku	3,993,000	DLH
07.	Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja	Cakupan Penyediaan Dokumen Perencanaan SKPK	Kota Lhokseumawe	1 Dokumen	2,420,000	APBK	-	1 Dokumen	1,597,200	DLH
07.002.	Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Buku RENJA	Kota Lhokseumawe	30 Buku	2,420,000	APBK	-	30 Buku	1,597,200	DLH
15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Cakupan penyediaan sarana dan prasarana persampahan	Kota Lhokseumawe	100%	2,272,231,461	APBK	-	100%	10,140,675,000	DLH
15.013.	Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan (OTSUS)	Periode Pengangkutan sampah	Kota Lhokseumawe	12 bln	1,011,067,500	APBK	-	12 bln	10,110,675,000	DLH
15.015.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Tempat Pembuangan Akhir Sampah	Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Tempat Pembuangan Akhir Sampah	Kota Lhokseumawe	2 Unit	1,260,202,500	APBK	-	2 Unit	30,000,000	DLH
15.017.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan (DAK)	Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Persampahan	Kota Lhokseumawe	100%	961,461	APBK	-	100%	0	DLH
16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Cakupan Limbah B3 Yang dikelola	Kota Lhokseumawe	100%	137,400,000	APBK	-	100%	122,474,942	DLH
16.001.	Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura	Jumlah Buku Koordinasi Penilaian Kota Sehat / Adipura	Kota Lhokseumawe	8 Buku	7,525,000	APBK	-	8 Buku	9,474,942	DLH
16.003.	Pemantauan Kualitas Lingkungan	Jumlah Pemantauan Kualitas Lingkungan	Kota Lhokseumawe	2 Kali	30,000,000	APBK	-	2 Kali	20,000,000	DLH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2020			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		OPD Penanggung jawab
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.022.	Penanganan kasus lingkungan hidup	Jumlah Penanganan Kasus Lingkungan Hidup	Kota Lhokseumawe	1 Kali	7,000,000	APBK	-	1 Kali	6,000,000	DLH
16.024.	Pengelolaan pengaduan lingkungan hidup	Jumlah Pengelolaan Pengaduan Lingkungan Hidup	Kota Lhokseumawe	1 Kali	3,000,000	APBK	-	1 Kali	3,000,000	DLH
16.030.	Penilaian Sekolah Adiwiyata	Jumlah Sekolah Adiwiyata Yang Dinilai	Kota Lhokseumawe	4 Unit	9,375,000	APBK	-	4 Unit	9,000,000	DLH
16.031.	Peringatan Hari - Hari Lingkungan Hidup	Jumlah Pelaksanaan Memperingati Hari Lingkungan Hidup	Kota Lhokseumawe	1 Kali	80,500,000	APBK	-	1 Kali	75,000,000	DLH
18	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	Jumlah Ketaatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH	Kota Lhokseumawe	2	597,825,000	APBK	-	1	86,315,350	DLH
18.003.	Rehabilitasi hutan dan lahan	Jumlah Rehabilitasi Hutan Dan Lahan	Kota Lhokseumawe	5 lokasi	597,825,000	APBK	-	20%	86,315,350	DLH
19	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Persentase ketersediaan databaselingkungan hidup	Kota Lhokseumawe	50%	354,748,800	APBK	-	75%	124,500,000	DLH
19.001.	Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan	Jumlah Pelaksanaan edukasi dan Komunikasi	Kota Lhokseumawe	1 Kali	24,330,000	APBK	-	1 Kali	24,500,000	DLH
19.012.	Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	Tersedianya Draft RPPLH	Kota Lhokseumawe	5 Buah	172,909,400	APBK	-	1 kegiatan	60,000,000	DLH
19.013.	Penyusunan Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD)	Tersedianya Dokumen IKPLHD	Kota Lhokseumawe	20 Buah	157,509,400	APBK	-	1 kegiatan	40,000,000	DLH
24	Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Luasan RTH Publik sebesar 20% dari Luas Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan	Kota Lhokseumawe	33,8 Ha	886,546,605	APBK	-	37,2 Ha	461,172,600	DLH
24.006.	Pemeliharaan RTH	periode pemeliharaan RTH	Wilayah Kota Lhokseumawe	2 kali	155,000,000	APBK	-	20%	146,172,600	DLH
24.011.	Pemeliharaan dan Penataan Taman Kota	Jumlah Lokasi Pemeliharaan dan Penataan Taman Kota	Kota Lhokseumawe	5 lokasi	341,387,500	APBK	-	20%	165,000,000	DLH
24.017.	Pembangunan Taman dan Penghijauan	Jumlah Pembangunan Taman Dan Penghijauan Taman Yang Terbangun	Wilayah Kota Lhokseumawe	3 Taman	390,159,105	APBK	-	3 Taman	150,000,000	DLH
25	Program Peningkatan Fasilitas Sarana dan Prasarana Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Yang Memenuhi Standar Minimum	Kota Lhokseumawe	1	8,411,960,500	APBK	-	1	5,131,800,000	DLH
25.001.	Peningkatan Penerangan Fasilitas Umum	Jumlah Penerangan Fasilitas Umum	Kota Lhokseumawe	20%	370,125,000	APBK	-	20%	150,000,000	DLH
25.002.	Peningkatan Penerangan Jalan Umum	Jumlah Lampu Penerangan Jalan Umum	Kota Lhokseumawe	20%	6,041,835,500	APBK	-	20%	1,981,800,000	DLH
25.003.	Peningkatan Penerangan Jalan Umum (OTSUS)	Jumlah Lampu Penerangan Jalan Umu	Kota Lhokseumawe	30%	2,000,000,000	APBK	-	30%	3,000,000,000	DLH
26	Program Peningkatan Keindahan dan Keresarian Kota	Cakupan Pelaksanaan Keindahan dan Keresarian Kota	Kota Lhokseumawe	2 Kec	255,450,000	APBK	-	3 Kec	187,652,100	DLH
26.001.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Keindahan Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Keindahan Kota	Kota Lhokseumawe	20%	255,450,000	APBK	-	20%	187,652,100	DLH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2020			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		OPD Penanggung jawab
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	Program Normalisasi Jaringan Air Limbah	Cakupan Penanganan Limbah/Tinja	Kota Lhokseumawe	1	265,350,000	APBK	-	85%	200,000,000	DLH
27.001.	Pengerukan / Pembersihan Jaringan Air Limbah / Kotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengerukan Air Limbah / Kotor	Kota Lhokseumawe	2 Lokasi	265,350,000	APBK	-	2 Lokasi	200,000,000	DLH
		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			4,486,990,400	APBK	-		2,138,929,545	Dinas Dukcapil
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar				4,486,990,400	APBK	-		2,138,929,545	Dinas Dukcapil
2.06.	Administrasi Kependudukan dan Capil				4,486,990,400	APBK	-		2,138,929,545	Dinas Dukcapil
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kota Lhokseumawe	100%	944,993,700	APBK	-	100%	769,078,420	Dinas Dukcapil
01.001.	Penyediaan jasa surat menyurat	Periode Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	7,500,000	APBK	-	12 Bulan	5,000,000	Dinas Dukcapil
01.002.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Periode Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	165,900,000	APBK	-	12 Bulan	141,600,000	Dinas Dukcapil
01.007.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Pejabat Pengelola Keuangan SKPD (21 Org x 12 Bln)	Kota Lhokseumawe	252 OB	147,300,000	APBK	-	252 OB	141,500,000	Dinas Dukcapil
01.010.	Penyediaan alat tulis kantor	Periode Penyediaan Alat Tulis Kantor	Disdukcapil Kota Lhokseumawe	12 Bulan	57,082,200	APBK	-	12 Bulan	60,000,000	Dinas Dukcapil
01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Periode Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	30,331,500	APBK	-	12 Bulan	25,000,000	Dinas Dukcapil
01.013.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Periode Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	36,000,000	APBK	-	12 Bulan	66,000,000	Dinas Dukcapil
01.015.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undang (1 Eks x 365 Hari)	Kota Lhokseumawe	365 Eks	2,280,000	APBK	-	365 Eks	1,140,000	Dinas Dukcapil
01.017.	Penyediaan makanan dan minuman	Periode Penyediaan Makan dan Minuman	Kota Lhokseumawe	11 Bulan	9,000,000	APBK	-	11 Bulan	8,000,000	Dinas Dukcapil
01.018.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Periode Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	150,000,000	APBK	-	12 Bulan	100,000,000	Dinas Dukcapil
01.020.	Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap	Jumlah Jasa Pegawai Tidak Tetap (68 Org x 12 bln)	Kota Lhokseumawe	816 OB	339,600,000	APBK	-	816 OB	220,838,420	Dinas Dukcapil
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kota Lhokseumawe	100%	1,300,500,000	APBK	-	100%	135,391,539	Dinas Dukcapil
02.005.	Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah Pengadaan Kendaraan Roda Dua	Kota Lhokseumawe	1 Unit	30,000,000	APBK	-	1 Unit	0	Dinas Dukcapil
02.011.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pengadaan dan Perlengkapan Kantor	Kota Lhokseumawe	1 Jenis	992,600,000	APBK	-	1 Jenis	35,000,000	Dinas Dukcapil
02.022.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Periode Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	129,000,000	APBK	-	12 Bulan	20,391,539	Dinas Dukcapil
02.023.	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan (1 unit x 12 Bln)	Kota Lhokseumawe	12 UB	33,300,000	APBK	-	12 UB	25,000,000	Dinas Dukcapil
02.024.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Pemeliharaan/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (2 unit x 12 bln)	Kota Lhokseumawe	24 UB	62,600,000	APBK	-	24 UB	30,000,000	Dinas Dukcapil

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2020			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		OPD Penanggung jawab
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
02.030.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Periode Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	43,000,000	APBK	-	12 Bulan	15,000,000	Dinas Dukcapil
02.044.	Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional	Jumlah Rehabilitasi sedang/berat Kendaraan dinas/Operasional	Kota Lhokseumawe	2 Unit	10,000,000	APBK	-	2 Unit	10,000,000	Dinas Dukcapil
03.	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Tingkat Disiplin Aparatur	Kota Lhokseumawe	100%	198,470,000	APBK	-	100%	66,550,000	Dinas Dukcapil
03.002.	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Khusus Hari-hari Tertentu	Kota Lhokseumawe	98 Pasang	148,470,000	APBK	-	98 Pasang	16,550,000	Dinas Dukcapil
03.006.	Penyediaan Sewa Gedung/Gudang Kantor	Periode Sewa Gedung Kantor	Kota Lhokseumawe	1 Tahun	50,000,000	APBK	-	1 Tahun	50,000,000	Dinas Dukcapil
05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal yang diikuti	Kota Lhokseumawe	5 Keg	83,000,000	APBK	-	5 Keg	75,000,000	Dinas Dukcapil
05.001.	Pendidikan dan pelatihan formal	Periode Pendidikan dan Pelatihan Formal Aparatur	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	75,000,000	APBK	-	12 Bulan	67,000,000	Dinas Dukcapil
05.032.	Bimtek Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) SKPD	Periode Pelaksanaan Bimtek Penyusunan IKM	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	8,000,000	APBK	-	12 Bulan	8,000,000	Dinas Dukcapil
07.	Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja	Cakupan Penyediaan Dokumen Perencanaan SKPK	Kota Lhokseumawe	1 Dokumen	1,401,600	APBK	-	1 Dokumen	1,597,200	Dinas Dukcapil
07.002.	Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Buku Renja SKPD	Kota Lhokseumawe	10 Buku	1,401,600	APBK	-	10 Buku	1,597,200	Dinas Dukcapil
15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Cakupan Penerbitan KTP	Kota Lhokseumawe	88%	1,958,625,100	APBK	-	88%	1,091,312,386	Dinas Dukcapil
15.002.	Pelatihan tenaga pengelola SIAK	Jumlah Peserta Pelatihan Tenaga Pengelola SIAK	Kota Lhokseumawe	20 Orang	42,500,000	APBK	-	20 Orang	40,000,000	Dinas Dukcapil
15.003.	Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan)	Periode Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	35,000,000	APBK	-	12 Bulan	40,000,000	Dinas Dukcapil
15.011.	Sosialisasi kebijakan kependudukan	Jumlah Sosialisasi kebijakan kependudukan	Kota Lhokseumawe	82 Orang	75,000,000	APBK	-	82 Orang	40,000,000	Dinas Dukcapil
15.013.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Periode Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	34,000,000	APBK	-	12 Bulan	60,000,000	Dinas Dukcapil
15.020.	Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Buku Survey IKM	Kota Lhokseumawe	10 Buku	2,000,000	APBK	-	10 Buku	1,074,386	Dinas Dukcapil
15.021.	Sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan dan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (DAK Non Fisik-Dana DAK)	Jumlah Peserta Sosialisasi Kebijakan Kependudukan	Kota Lhokseumawe	91 Orang	80,000,000	APBK	-	91 Orang	40,000,000	Dinas Dukcapil
15.023.	Penyusunan Profil Kependudukan (DAK Non Fisik-Dana DAK)	Jumlah Buku Profil Kependudukan	Kota Lhokseumawe	20 Buku	35,000,000	APBK	-	20 Buku	38,800,000	Dinas Dukcapil
15.024.	Pelayanan Keliling Pencatatan Sipil (DAK Non Fisik-Dana DAK)	Periode Pelayanan Keliling Pencatatan Sipil	Kota Lhokseumawe	4 Triwulan	51,000,000	APBK	-	4 Triwulan	61,438,000	Dinas Dukcapil
15.027.	Penyusunan Buku Data Penduduk Persemerter (DAK Non Fisik-Dana DAK)	Jumlah Buku Data Penduduk Persemerter	Kota Lhokseumawe	20 Buku	43,000,000	APBK	-	20 Buku	40,000,000	Dinas Dukcapil

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2020			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		OPD Penanggung jawab
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.042.	Koordinasi dan Konsultasi Terkait Pelaksanaan Kebijakan dan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (DAK Non Fisik)	Periode Perjalanan Dinas	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	190,000,000	APBK	-	12 Bulan	60,000,000	Dinas Dukcapil
15.044.	Pelayanan Mutasi Penduduk dan Administrasi Kependudukan WNI dan Orang Asing	Periode Pelayanan Pindah WNI dan Orang Asing	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	55,000,000	APBK	-	12 Bulan	40,000,000	Dinas Dukcapil
15.045.	Penataan Arsip Faktual dan Digitalisasi Akta-akta Pencatatan Sipil	Periode Pelaksanaan Penataan Arsip Faktual pendaftaran Pendudukan Pencatatan Sipil	Kota Lhokseumawe	2 Triwulan	77,600,000	APBK	-	2 Triwulan	20,000,000	Dinas Dukcapil
15.046.	Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	Jumlah Penerbitan KIA	Kota Lhokseumawe	4 Kali	292,800,000	APBK	-	4 Kali	40,000,000	Dinas Dukcapil
15.047.	Penataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Penduduk Rentan Admuduk	Periode Penataan dan Penerbitan Dokumen	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	86,900,000	APBK	-	12 Bulan	40,000,000	Dinas Dukcapil
15.049.	Sosialisasi Tentang Inovasi dan Pemanfaatan Data Pencatatan Sipil	Jumlah Peserta Sosialisasi	Kota Lhokseumawe	60 Orang	40,000,000	APBK	-	60 Orang	20,000,000	Dinas Dukcapil
15.050.	Sosialisasi Kebijakan Pencatatan Sipil	Jumlah Peserta Sosialisasi Penerbitan Akta Kematian Kebutuhan Pencatatan Sipil	Kota Lhokseumawe	88 Orang	45,195,500	APBK	-	88 Orang	45,000,000	Dinas Dukcapil
15.051.	Penyusunan dan Pengumpulan data Kematian dalam Wilayah Kota Lhokseumawe	Periode Penyusunan Data Kematian	Kota Lhokseumawe	4 Triwulan	40,072,600	APBK	-	4 Triwulan	20,000,000	Dinas Dukcapil
15.052.	Pengelolaan Data Kependudukan (DAK Non Fisik - Dana DAK)	Periode Pemanfaatan dan Pengelolaan Data Kependudukan	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	22,300,000	APBK	-	12 Bulan	45,000,000	Dinas Dukcapil
15.053.	Pelayanan Keliling Pendaftaran Penduduk	Periode Pelayanan Keliling Pendaftaran Penduduk (Sekolah	Kota Lhokseumawe	2 Semester	68,660,000	APBK	-	2 Semester	45,000,000	Dinas Dukcapil
15.054.	Penerbitan Dokumen Kependudukan dan Identitas Resmi Anak (DAK Non Fisik - Dana DAK)	Jumlah Jenis Dokumen Kependudukan	Kota Lhokseumawe	8 Jenis	330,967,000	APBK	-	8 Jenis	100,000,000	Dinas Dukcapil
15.055.	Pembentukan Tim Lintas Sektor Terkait Pencapaian Target Nasional (DAK Non Fisik - Dana DAK)	Periode Lintas Sektor	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	53,000,000	APBK	-	12 Bulan	85,000,000	Dinas Dukcapil
15.056.	Pelayanan Keliling Pendaftaran Penduduk (DAK Non Fisik - Dana DAK)	Periode Pelayanan Keliling Pendaftaran Penduduk	Kota Lhokseumawe	2 Semester	106,000,000	APBK	-	2 Semester	45,000,000	Dinas Dukcapil
15.057.	Pelayanan Perekaman dan Penerbitan KTP Elektronik	Periode Pelayanan, Perekaman dan Penerbitan KTP Elektronik	Kota Lhokseumawe	4 Triwulan	106,000,000	APBK	-	4 Triwulan	80,000,000	Dinas Dukcapil
15.058.	Sosialisasi Inovasi dan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Peserta Sosialisasi	Kota Lhokseumawe	60 Orang	46,630,000	APBK	-	60 Orang	45,000,000	Dinas Dukcapil
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong				4,883,470,750	APBK	-		4,601,700,000	DPMG
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar				4,883,470,750	APBK	-		4,601,700,000	DPMG
2.07.	Pemberdayaan Masyarakat Desa				4,883,470,750	APBK	-		4,601,700,000	DPMG
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kota Lhokseumawe	100%	951,140,000	APBK	-	100%	1,027,200,000	DPMG
01.001.	Penyediaan jasa surat menyurat	Periode Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	3,000,000	APBK	-	12 bulan	4,000,000	DPMG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2020			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		OPD Penanggung jawab
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01.002.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Periode Penyediaan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	267,400,000	APBK	-	12 bulan	300,000,000	DPMG
01.007.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Pejabat Pengelola Keuangan SKPD (21 Orang X 12 Bln)	Kota Lhokseumawe	252 OB	185,800,000	APBK	-	252 OB	200,000,000	DPMG
01.010.	Penyediaan alat tulis kantor	Periode Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	35,000,000	APBK	-	12 bulan	38,000,000	DPMG
01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Periode Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	22,000,000	APBK	-	12 bulan	24,000,000	DPMG
01.013.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Periode Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	5,000,000	APBK	-	12 bulan	4,000,000	DPMG
01.015.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan	Kota Lhokseumawe	365 Exs	33,000,000	APBK	-	365 Exs	3,200,000	DPMG
01.017.	Penyediaan makanan dan minuman	Periode penyediaan makanan dan minuman	Kota Lhokseumawe	11 Bulan	25,000,000	APBK	-	11 bulan	28,000,000	DPMG
01.018.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Periode rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan ke dalam daerah 12 Bulan	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	150,000,000	APBK	-	12 bulan	200,000,000	DPMG
01.020.	Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap	Jumlah jasa pegawai tidak tetap (42 Orang X 12 Bln)	Kota Lhokseumawe	504 OB	224,940,000	APBK	-	504 OB	226,000,000	DPMG
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kota Lhokseumawe	100%	283,650,750	APBK	-	100%	321,000,000	DPMG
02.011.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Lhokseumawe	17 unit	103,150,750	APBK	-	9 Jenis	110,000,000	DPMG
02.023.	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan (1 Unit x 12 Bulan)	Kota Lhokseumawe	12 UB	38,100,000	APBK	-	12 UB	38,500,000	DPMG
02.024.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Kota Lhokseumawe	12 UB	24,000,000	APBK	-	12 UB	24,000,000	DPMG
02.030.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Periode Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	17,600,000	APBK	-	12 bulan	18,500,000	DPMG
02.042.	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah sarana kantor yang direhabilitasi	Kota Lhokseumawe	3 Ruang	100,800,000	APBK	-	6 ruang	130,000,000	DPMG
03.	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Tingkat Disiplin Aparatur	Kota Lhokseumawe	100%	106,200,000	APBK	-	100%	120,000,000	DPMG
03.002.	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas / Khusus Hari-hari tertentu	Kota Lhokseumawe	140 Pasang	106,200,000	APBK	-	150 Pasang	120,000,000	DPMG
05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan formal yang diikuti	Kota Lhokseumawe	5 Keg	20,000,000	APBK	-	5 Keg	25,000,000	DPMG
05.001.	Pendidikan dan pelatihan formal	Periode Pendidikan dan Pelatihan Formal Aparatur	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	20,000,000	APBK	-	12 bulan	25,000,000	DPMG
07.	Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja	Cakupan Penyediaan Dokumen Perencanaan SKPK	Kota Lhokseumawe	1 Dokumen	2,000,000	APBK	-	1 Dokumen	2,500,000	DPMG
07.002.	Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Buku Renja SKPD	Kota Lhokseumawe	5 Buku	2,000,000	APBK	-	5 Buku	2,500,000	DPMG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2020			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		OPD Penanggung jawab
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Cakupan Pengembangan Masyarakat Perdesaan	Kota Lhokseumawe	68 Gampong	593,790,000	APBK	-	68 Gampong	676,000,000	DPMG
15.025.	Pembinaan dan Pengendalian Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG)	Jumlah Gampong yang dibina	Kota Lhokseumawe	68 Gampong	116,540,000	APBK	-	68 Gampong	150,000,000	DPMG
15.026.	Bimbingan Teknis APBG	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis (2 Kali Pelatihan)	Kota Lhokseumawe	272 Peserta	203,400,000	APBK	-	272 Peserta	220,000,000	DPMG
15.038.	Pengendalian Profil Gampong	Jumlah Buku Laporan Rekapitulasi Profil Gampong	Kota Lhokseumawe	68 Gampong	80,450,000	APBK	-		100,000,000	DPMG
15.049.	Bimbingan Teknis BUMG	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis BUMG	Kota Lhokseumawe	170 Orang	94,900,000	APBK	-	170 Orang	96,000,000	DPMG
15.051.	Penyusunan Peraturan Kota Lhokseumawe Tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Gampong dan Besar Kota Lhokseumawe	Jumlah Penyusunan Peraturan Kota Lhokseumawe	Kota Lhokseumawe	25 Buku	36,800,000	APBK	-	25 Buku	40,000,000	DPMG
15.064.	Penyusunan Penetapan Hasil Evaluasi Rancangan APBG	Jumlah Rancangan APBG	Kota Lhokseumawe	68 Gampong	28,000,000	APBK	-		30,000,000	DPMG
15.066.	Penyusunan Peraturan Wali Kota Lhokseumawe Tentang Pengalokasian dan Besaran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk setiap gampong	Jumlah Petunjuk Teknis Tentang BPHRD	Kota Lhokseumawe	25 Buku	33,700,000	APBK	-	25 Buku	40,000,000	DPMG
16	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Cakupan Pembinaan Pengembangan Ekonomi Perdesaan	Kota Lhokseumawe	100%	1,072,375,000	APBK	-	100%	600,000,000	DPMG
16.009.	Pembinaan Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG)	Jumlah Peserta yang Mengikuti Gelar TTG	Kota Lhokseumawe	10 Orang	311,325,000	APBK	-	10 Orang	350,000,000	DPMG
16.017.	Perlombaan Desa dan Kelurahan	Jumlah Gampong yang mengikuti lomba gampong tingkat Kota Lhokseumawe	Kota Lhokseumawe	68 Gampong	157,550,000	APBK	-	68 Gampong	180,000,000	DPMG
16.030.	Gelar Inovasi Desa	Jumlah Gampong Yang Di Bina	Kota Lhokseumawe	68 Gampong	603,500,000	APBK	-	68 Gampong	70,000,000	DPMG
17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	Kota Lhokseumawe	100%	530,795,000	APBK	-	100%	420,000,000	DPMG
17.010.	Koordinasi Kelompok Kerja Nasional (POKJANAL) Posyandu Plus	Jumlah Pembinaan Pokjanal Plus	Kota Lhokseumawe	-	11,850,000	APBK	-	-	20,000,000	DPMG
17.011.	Pembinaan Pengembangan PKK	Periode Pertemuan Koordinasi PKK (5 Hari x 5 Bulan) dan Jumlah BOP	Kota Lhokseumawe	25 Pertemuan	518,945,000	APBK	-	25 Kali Pertemuan	400,000,000	DPMG
18	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Cakupan pembinaan pengelolaan keuangan gampong	Kota Lhokseumawe	100%	918,800,000	APBK	-	100%	960,000,000	DPMG
18.008.	Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa Manajemen Pemerintahan Gampong	Jumlah Peserta Pelatihan Aparatur Gampong	Kota Lhokseumawe	272 Orang	131,110,000	APBK	-	272 Orang	150,000,000	DPMG
18.010.	Satuan Kerja Pembinaan Administrasi Keuangan Gampong	Jumlah Gampong yang dibina	Kota Lhokseumawe	68 Gampong	617,280,000	APBK	-	68 Gampong & 12 Bln	620,000,000	DPMG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2020			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		OPD Penanggung jawab
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.011.	Penyusunan Peraturan WaliKota Lhokseumawe Tentang Pengelolaan Keuangan Gampong.	Jumlah Buku Perwal Tentang Pengelolaan Keuangan Gampong	Kota Lhokseumawe	25 Buku	63,300,000	APBK	-	25 Buku	70,000,000	DPMG
18.012.	Pembinaan Rakor Mukim Gampong	Jumlah Pembinaan dan Rakor Mukim Gampong	Kota Lhokseumawe	9 Mukim	107,110,000	APBK	-	9 Mukim	120,000,000	DPMG
19	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	Kota Lhokseumawe	12,4%	404,720,000	APBK	-	12,45%	450,000,000	DPMG
19.012.	Rapat Koordinasi PKK	Periode Rapat Koordinasi PKK	Kota Lhokseumawe	2 Hari	51,100,000	APBK	-	2 Hari	55,000,000	DPMG
19.014.	Hari Kesatuan Gerak PKK (PKK Kota Lhokseumawe)	Jumlah Dusun Yang Mengikuti Lomba Penilaian Dusun Terbaik	Kota Lhokseumawe	1 Kegiatan	112,260,000	APBK	-	68 Dusun	130,000,000	DPMG
19.031.	Pencanangan Dan Penilaian Lembaga Pendidikan Pra Sekolah Gampong	Periode pencanangan dan penilaian PAUD Gampong (1 Kali Penilaian)	Kota Lhokseumawe	1 Kegiatan	158,760,000	APBK	-	68 Gampong	165,000,000	DPMG
19.032.	Publik Speaking Penguatan Tim Penggerak PKK Gampong Se-Kota Lhokseumawe	Jumlah Peserta Pelatihan (Ketua & Sekr PKK Gampong)	Kota Lhokseumawe	150 Orang	82,600,000	APBK	-	150 Orang	100,000,000	DPMG
	Dinas Perhubungan				8,679,333,725	APBK	-		2,682,560,022	Dishub
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar				8,679,333,725	APBK	-		2,682,560,022	Dishub
2.09.	Perhubungan				8,679,333,725	APBK	-		2,682,560,022	Dishub
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kota Lhokseumawe	100%	1,753,969,925	APBK	-	100%	1,384,963,918	Dishub
01.001.	Penyediaan jasa surat menyurat	Periode Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	4,263,000	APBK	-	12 Bulan	5,963,000	Dishub
01.002.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Periode Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	295,770,600	APBK	-	12 Bulan	304,400,900	Dishub
01.007.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Pejabat Pengelolaan Keuangan SKPD (20 Org x 12 Bulan)	Kota Lhokseumawe	240 OB	110,880,000	APBK	-	240 OB	120,680,000	Dishub
01.010.	Penyediaan alat tulis kantor	Periode Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	30,000,000	APBK	-	12 Bulan	45,000,000	Dishub
01.011.	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Periode Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	57,906,325	APBK	-	12 Bulan	74,499,618	Dishub
01.013.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Periode Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	30,000,000	APBK	-	12 Bulan	60,000,400	Dishub
01.015.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (1 Eks x 365 Hari)	Kota Lhokseumawe	365 Eks	31,400,000	APBK	-	365 Eks	2,000,000	Dishub
01.017.	Penyediaan makanan dan minuman	Periode Penyediaan Makanan dan Minuman	Kota Lhokseumawe	11 Bulan	7,000,000	APBK	-	11 Bulan	9,000,000	Dishub
01.018.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Periode Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	120,000,000	APBK	-	12 Bulan	150,000,000	Dishub
01.020.	Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap	Jumlah Jasa Pegawai Tidak Tetap (114 Org x 12 Bulan)	Kota Lhokseumawe	684 OB	1,066,750,000	APBK	-	684 OB	613,420,000	Dishub

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2020			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		OPD Penanggung jawab
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kota Lhokseumawe	100%	680,928,000	APBK	-	100%	558,327,880	Dishub
02.005.	Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas	Kota Lhokseumawe	3 Unit	70,000,000	APBK	-	1 Unit	0	Dishub
02.011.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Lhokseumawe	3 Unit	25,000,000	APBK	-	5 Jenis	45,000,000	Dishub
02.022.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Periode Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	12,948,000	APBK	-	12 Bulan	19,948,000	Dishub
02.023.	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan (1 Unit x 12 Bulan)	Kota Lhokseumawe	12 UB	26,640,000	APBK	-	12 UB	32,397,080	Dishub
02.024.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Pemeliharaan/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (16 Unit x 12 Bulan)	Kota Lhokseumawe	192 UB	537,840,000	APBK	-	192 UB	445,982,800	Dishub
02.030.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Periode Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	8,500,000	APBK	-	12 Bulan	15,000,000	Dishub
05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan kegiatan pendidikan dan pelatihan formal yang diikuti	Kota Lhokseumawe	5 Keg	30,000,000	APBK	-	5 Keg	55,000,000	Dishub
05.001.	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan	Kota Lhokseumawe	3 Orang	30,000,000	APBK	-	3 Orang	55,000,000	Dishub
07.	Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja	Cakupan Penyediaan Dokumen Perencanaan SKPK	Kota Lhokseumawe	1 Dokumen	1,452,000	APBK	-	1 Dokumen	1,597,200	Dishub
07.002.	Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Buku RENJA SKPD	Kota Lhokseumawe	15 Buku	1,452,000	APBK	-	15 Buku	1,597,200	Dishub
15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Cakupan prasarana dan fasilitas perhubungan pada terminal darat	Kota Lhokseumawe	1	24,000,000	APBK	-	60%	14,000,000	Dishub
15.007.	Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat	Periode Pengelolaan Terminal Angkutan Darat	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	24,000,000	APBK	-	12 Bulan	14,000,000	Dishub
16	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Cakupan pemeliharaan fasilitas LLAJ	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	49,666,800	APBK	-	12 Bulan	50,300,280	Dishub
16.005.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Halte, Traffic dan Rambu-Rambu LLAJ	Periode Pemeliharaan Fasilitas Lalu lintas Jalan	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	49,666,800	APBK	-	12 Bulan	50,300,280	Dishub
17	Pogram peningkatan pelayanan angkutan	Rasio Izin Trayek, Jumlah Uji Kir angkutan umum	Kota Lhokseumawe	Rasio 7 0.97	381,100,000	APBK	-	Rasio 10 0.99%	374,488,164	Dishub
17.001.	Kegiatan penyuluhan bagi para sopir/juru mudi untuk peningkatan keselamatan penumpang	Jumlah Penyuluhan Bagi Supir Angkutan	Kota Lhokseumawe	100 Orang	25,000,000	APBK	-	100 Orang	21,488,164	Dishub
17.005.	Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya	Periode Pengawasan Lalu Lintas	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	279,600,000	APBK	-	12 Bulan	255,000,000	Dishub
17.009.	Kegiatan penciptaan disiplin dan pemeliharaan kebersihan dilingkungan terminal	Periode Penciptaan Disiplin dan Pemeliharaan Terminal	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	41,500,000	APBK	-	12 Bulan	38,000,000	Dishub

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2020			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		OPD Penanggung jawab
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.011.	Pengumpulan dan analisis data base pelayanan angkutan	Jumlah Dokumen database Angkutan	Kota Lhokseumawe	3 Dokumen	10,000,000	APBK	-	3 Dokumen	15,000,000	Dishub
17.015.	Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan	Jumlah Juru Mudi Kendaraan Angkutan Umum Teladan	Kota Lhokseumawe	40 Orang	25,000,000	APBK	-	40 Orang	45,000,000	Dishub
18	Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	Cakupan Sarana dan Prasarana Perhubungan Publik	Kota Lhokseumawe	1 Sarana	2,382,000,000	APBK	-	1 Sarana	203,882,580	Dishub
18.001.	Pembangunan gedung terminal	Jumlah Fasilitas Terminal	Kota Lhokseumawe	1 Unit	160,000,000	APBK	-	1 Unit	113,882,580	Dishub
18.012.	Penyusunan DED	Jumlah DED	Kota Lhokseumawe	1 Doumen	167,000,000	APBK	-	1 Doumen	40,000,000	Dishub
18.013.	Pembangunan Gedung Terminal (OTSUS)	Periode Pembangunan Gedung Terminal	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	700,000,000	APBK	-	12 Bulan	50,000,000	Dishub
18.015.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan (OTSUS)		Kota Lhokseumawe	2 Kegiatan	1,355,000,000	APBK	-	2 Kegiatan	0	Dishub
19	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	Cakupan Pemasangan Rambu - rambu	Kota Lhokseumawe	51,59%	2,619,967,000	APBK	-	47,66%	40,000,000	Dishub
19.001.	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	JUmlah Rambu - rambu dan Prasarana Lalu Lintas	Kota Lhokseumawe	15 Unit	115,800,000	APBK	-	54 Unit	15,000,000	Dishub
19.002.	Pengadaan marka jalan	Jumlah Marka Jalan Fasilitas Keselamatan Jalan	Kota Lhokseumawe	714 Meter	174,998,000	APBK	-	1806 meter	25,000,000	Dishub
19.005.	Pengadaan Traffic Light (OTSUS)	Jumlah Traffic Light	Kota Lhokseumawe	1 paket	1,120,000,000	APBK	-	0	0	Dishub
19.013.	Pengadaan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan (DAK)	Jumlah Fasilitas Keselamatan Pengguna Jalan	Kota Lhokseumawe	3 Unit	386,629,800	APBK	-	3 Unit	0	Dishub
19.014.	Pengadaan marka jalan (OTSUS)	Jumlah Marka Jalan Fasilitas Keselamatan Jalan	Kota Lhokseumawe	13500 Meter	500,000,000	APBK	-	13500 Meter	0	Dishub
19.015.	Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor (DAK)	Jumlah Sarana Penunjang Trasnportasi	Kota Lhokseumawe	3 Unit	322,539,200	APBK	-		0	Dishub
21	Program Pengembangan Sarana Penunjang Transportasi	Cakupan penyedia Sarana Penunjang Trasnportasi	Kota Lhokseumawe	60%	756,250,000	APBK	-	60%	0	Dishub
21.007.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Penunjang Transportasi (OTSUS)	Jumlah Pengadaan Kendaraan Penunjang Trasnportasi	Kota Lhokseumawe	1 unit	756,250,000	APBK	-	1 unit	0	Dishub
	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian				3,301,023,250	APBK	-		2,687,527,305	Diskominfo
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar				3,301,023,250	APBK	-		2,687,527,305	Diskominfo
2.10.	Komunikasi dan Informatika				3,301,023,250	APBK	-		2,687,527,305	Diskominfo
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kota Lhokseumawe	100%	448,599,200	APBK	-	100%	381,323,925	Diskominfo
01.001.	Penyediaan jasa surat menyurat	Periode Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	2,499,000	APBK	-	12 Bulan	3,000,000	Diskominfo
01.002.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Periode Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	85,600,000	APBK	-	12 Bulan	66,200,000	Diskominfo

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2020			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		OPD Penanggung jawab
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01.007.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Pejabat Pengelola Keuangan SKPD (14 org x 12 Bulan)	Kota Lhokseumawe	168 OB	85,600,000	APBK	-	168 OB	105,283,925	Diskominfo
01.010.	Penyediaan alat tulis kantor	Periode Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	22,500,000	APBK	-	12 Bulan	25,000,000	Diskominfo
01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Periode Penyediaan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	15,300,000	APBK	-	12 Bulan	15,300,000	Diskominfo
01.013.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Periode Penyediaan dan Perlengkapan Kantor	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	6,000,000	APBK	-	12 Bulan	6,000,000	Diskominfo
01.015.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Bulan Penyediaan Bahan Bacaan dan Publikasi Media Massa	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	31,140,000	APBK	-	365 Eks	1,140,000	Diskominfo
01.017.	Penyediaan makanan dan minuman	Periode Penyediaan Makanan dan Minuman	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	11,000,000	APBK	-	12 Bulan	10,000,000	Diskominfo
01.018.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Periode Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan KeLuar Daerah	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	100,000,000	APBK	-	12 Bulan	100,000,000	Diskominfo
01.020.	Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap	Jumlah Jasa Pegawai Tidak Tetap	Kota Lhokseumawe	26 OB	88,960,200	APBK	-	276 OB	49,400,000	Diskominfo
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kota Lhokseumawe	100%	654,001,640	APBK	-	100 %	338,058,480	Diskominfo
02.005.	Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas	Kota Lhokseumawe	12 Unit	350,000,000	APBK	-	5 Unit	35,000,000	Diskominfo
02.011.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Lhokseumawe	14 Jenis	155,000,000	APBK	-	15 Jenis	135,000,000	Diskominfo
02.022.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Periode Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	75,000,000	APBK	-	12 Bulan	90,000,000	Diskominfo
02.023.	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan (1 Unit x 12 Bulan)	Kota Lhokseumawe	12 UB	32,457,840	APBK	-	12 UB	32,457,840	Diskominfo
02.024.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Pemeliharaan / Berkala Kendaraan Operasional (1 Unit x 12 Bulan)	Kota Lhokseumawe	12 UB	23,500,000	APBK	-	12 UB	32,556,840	Diskominfo
02.030.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Periode Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	18,043,800	APBK	-	12 Bulan	13,043,800	Diskominfo
03.	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Tingkat Disiplin Aparatur	Kota Lhokseumawe	100%	122,325,000	APBK	-	100%	122,325,000	Diskominfo
03.002.	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Kota Lhokseumawe	36 Pasang	25,525,000	APBK	-	36 Pasang	25,525,000	Diskominfo
03.005.	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian Khusus hari-hari Tertentu	Kota Lhokseumawe	36 Pasang	16,800,000	APBK	-	36 Pasang	16,800,000	Diskominfo
03.006.	Penyediaan Sewa Gedung/Gudang Kantor	Periode Sewa Gedung Kantor	Kota Lhokseumawe	1 Tahun	80,000,000	APBK	-	1 Tahun	80,000,000	Diskominfo
05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal yang diikuti	Kota Lhokseumawe	100%	48,400,000	APBK	-	100%	48,400,000	Diskominfo
05.001.	Pendidikan dan pelatihan formal	Periode Pendidikan dan Pelatihan Formal Aparatur	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	48,400,000	APBK	-	12 Bulan	48,400,000	Diskominfo

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2020			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		OPD Penanggung jawab
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
06.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Cakupan Penyediaan Dokumen Standar Pelayanan Minimum (SPM) SKPD	Kota Lhokseumawe	1 Dokumen	9,500,000	APBK	-	1 Dokumen	9,500,000	Diskominfo
06.011.	Penyusunan Standart Pelayanan Minimum (SPM)	Jumlah Dokumen SPM	Kota Lhokseumawe	1 Dokumen	9,500,000	APBK	-	1 Dokumen	9,500,000	Diskominfo
07.	Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja	Cakupan Penyediaan Dokumen Perencanaan SKPK	Kota Lhokseumawe	1 Dokumen	2,700,000	APBK	-	1 Dokumen	3,600,000	Diskominfo
07.002.	Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Buku Renja	Kota Lhokseumawe	5 Buku	1,200,000	APBK	-	10 Buku	1,800,000	Diskominfo
07.003.	Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	Jumlah Buku LAKIP	Kota Lhokseumawe	10 Buku	1,500,000	APBK	-	10 Buku	1,800,000	Diskominfo
15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Cakupan pelayanan pemerintahan berbasis elektronik	Kota Lhokseumawe	80%	508,427,410	APBK	-	80%	544,500,000	Diskominfo
15.028.	Pengumpulan Informasi Daerah	Periode penyediaan Data Mengenai Informasi Daerah	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	45,100,000	APBK	-	12 Bulan	50,000,000	Diskominfo
15.029.	Pengelolaan Layanan Pejabat Pengelolaan Informasi Daerah (PPID)	Periode Pengelolaan Layanan PPID Kota Lhokseumawe	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	121,600,000	APBK	-	12 Bulan	196,700,000	Diskominfo
15.030.	Pengawasan dan Monitoring Pelayanan Informasi dan Telekomunikasi	Periode Pengawasan dan Monitoring	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	79,600,000	APBK	-	12 Bulan	65,000,000	Diskominfo
15.031.	Pengelolaan Media Center	Periode penyediaan Alat Studio Media Center	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	99,900,000	APBK	-	12 Bulan	187,800,000	Diskominfo
15.032.	Sosialisasi dan Promosi Potensi Daerah	Jumlah Peserta	Kota Lhokseumawe	80 orang	21,627,410	APBK	-	12 Bulan	15,000,000	Diskominfo
15.033.	Pengelolaan Layanan Keterbukaan Informasi dan Pengaduan Masyarakat	Periode Pengelolaan layanan informasi dan pengaduan masyarakat	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	140,600,000	APBK	-	12 Bulan	30,000,000	Diskominfo
17	Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	Persentase Ketersediaan Kapasitas SDM yang Mampu dalam Bidang Komunikasi dan Informasi	Kota Lhokseumawe	25%	197,070,000	APBK	-	25%	210,000,000	Diskominfo
17.002.	Pelatihan Sumber Daya Manusia Bidang Komunikasi	Jumlah Peserta terlatih bidang Komunikasi	Kota Lhokseumawe	68 Orang	24,300,000	APBK	-	12 Bulan	40,000,000	Diskominfo
17.003.	Pelatihan Sumber Daya Manusia Bidang Informatika	Jumlah Peserta terlatih bidang Informatika	Kota Lhokseumawe	68 Orang	172,770,000	APBK	-	12 Bulan	170,000,000	Diskominfo
18	Program kerjasama informasi dengan mas media	Cakupan Ketersediaan Informasi dan komunikasi Publik secara Optimal melalui Mass Media	Kota Lhokseumawe	20%	25,800,000	APBK	-	30%	95,000,000	Diskominfo
18.004.	Pengelolaan dan Koordinasi dengan Media Publik	Periode Pengelolaan dan Koordinasi Media Publik	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	25,800,000	APBK	-	12 Bulan	95,000,000	Diskominfo
20	Program Pengelolaan Data dan Informasi	Cakupan Pelaksanaan E-Government	Kota Lhokseumawe	100 %	1,284,200,000	APBK	-	100 %	934,819,900	Diskominfo
20.001.	Pengelolaan Data dan Informasi Publik	Jumlah Website Kota Lhokseumawe yang dikelola	Kota Lhokseumawe	18 Websites	107,250,000	APBK	-	18 Websites	10,019,900	Diskominfo

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2020			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		OPD Penanggung jawab
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.002.	Pengelolaan Email Pemerintah Kota Lhokseumawe	Jumlah Email SKPD dan Pegawai	Kota Lhokseumawe	280 Email	79,600,000	APBK	-	280 Email	90,000,000	Diskominfo
20.003.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Pusat Data Terintegrasi Kota Lhokseumawe (OTSUS)	Jumlah peralatan dan perlengkapan pusat data	Kota Lhokseumawe	1 Paket	500,000,000	APBK	-	1 Paket	540,000,000	Diskominfo
20.004.	Sosialisasi dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah	Kota Lhokseumawe	25 SKPD	48,050,000	APBK	-	25 SKPD	70,000,000	Diskominfo
20.005.	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Kota Lhokseumawe	Jumlah Server	Kota Lhokseumawe	10 Unit	166,200,000	APBK	-	10 Unit	21,000,000	Diskominfo
20.006.	Aplikasi Generik Kota Lhokseumawe	Jumlah Aplikasi Generik yang Digunakan Pemerintah Daerah	Kota Lhokseumawe	3 Unit	174,600,000	APBK	-	3 Unit	70,000,000	Diskominfo
20.007.	Pengelolaan Keamanan Data dan Informasi	Periode Pengelolaan Keamanan Data dan Informasi	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	10,800,000	APBK	-	12 Bulan	17,000,000	Diskominfo
20.010.	Penyusunan Road Map Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	Jumlah Dokumen Road Map	Kota Lhokseumawe	1 Dokumen	80,900,000	APBK	-		0	Diskominfo
20.011.	Pengelolaan Sistem Online Layanan Administrasi (Si-OLA)	Periode Pengelolaan Sistem Online Layanan Administrasi (Si-OLA)	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	116,800,000	APBK	-		116,800,000	Diskominfo
	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah				13,815,917,667	APBK	-		21,910,316,554	Disperindagkop
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar				3,144,347,666	APBK	-		2,135,163,198	Disperindagkop
2.11.	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				3,144,347,666	APBK	-		2,135,163,198	Disperindagkop
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan administrasi perkantoran	Kota Lhokseumawe	100%	951,677,666	APBK	-	100%	935,901,598	Disperindagkop
01.001.	Penyediaan jasa surat menyurat	Periode Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Lhokseumawe	12 bulan	2,500,000	APBK	-	12 bulan	3,000,000	Disperindagkop
01.002.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Periode Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Lhokseumawe	12 bulan	230,000,000	APBK	-	12 bulan	240,000,000	Disperindagkop
01.003.	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Periode Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	71,990,000	APBK	-		82,788,500	Disperindagkop
01.006.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kendaraan Dinas yang Laik Jalan		1 Kegiatan	15,000,000	APBK	-		18,000,000	Disperindagkop
01.007.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Pejabat Pengelola Administrasi Keuangan SKPD (18 Org X 12 Bulan)	Kota Lhokseumawe	216 OB	131,875,000	APBK	-	216 OB	131,875,000	Disperindagkop
01.010.	Penyediaan alat tulis kantor	Periode Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kota Lhokseumawe	12 bulan	31,596,350	APBK	-	12 bulan	35,113,500	Disperindagkop
01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Periode Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Lhokseumawe	12 bulan	9,500,000	APBK	-	12 bulan	9,700,000	Disperindagkop
01.013.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Periode Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Lhokseumawe	12 bulan	64,600,000	APBK	-	12 bulan	65,600,000	Disperindagkop
01.015.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang Undangan (1 Eks x 365 hari)	Kota Lhokseumawe	365 Eks	1,450,000	APBK	-	365 Eks	1,550,000	Disperindagkop

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2020			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		OPD Penanggung jawab
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01.017.	Penyediaan makanan dan minuman	Periode Penyediaan Makanan dan Minuman	Kota Lhokseumawe	11 Bulan	6,000,000	APBK	-	11 Bulan	6,000,000	Disperindagkop
01.018.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Periode Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Kota Lhokseumawe	12 bulan	90,029,316	APBK	-	12 bulan	115,000,000	Disperindagkop
01.020.	Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap	Jumlah Jasa Pegawai Tidak Tetap (58 Org X 12 Bln)	Kota Lhokseumawe	696 OB	297,137,000	APBK	-	696 OB	227,274,598	Disperindagkop
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	Kota Lhokseumawe	100%	761,235,000	APBK	-	100%	177,709,600	Disperindagkop
02.011.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Lhokseumawe	1 unit	7,499,000	APBK	-	1 unit	8,150,000	Disperindagkop
02.022.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Periode Pemeliharaan Rutin / berkala gedung kantor	Kota Lhokseumawe	1 Gedung	10,000,000	APBK	-	1 Gedung	10,000,000	Disperindagkop
02.023.	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	jumlah pemeliharaan rutin/ berkala/ kendaraan dinas/ operasional (1 unit x 12 bulan)	Kota Lhokseumawe	1 unit	26,900,000	APBK	-	1 unit	26,900,000	Disperindagkop
02.024.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Pemeliharaan /berkala kendaraan dinas/operasional (3unit x 12 bulan)	Kota Lhokseumawe	3 Unit	59,037,500	APBK	-	3 Unit	59,037,500	Disperindagkop
02.030.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Periode Pemeliharaan Rutin / berkala peralatan gedung kantor	Kota Lhokseumawe	12 bulan	4,900,000	APBK	-	12 bulan	4,900,000	Disperindagkop
02.042.	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	jumlah gedung	Kota Lhokseumawe	1 gedung	600,000,000	APBK	-		68,722,100	Disperindagkop
02.046.	Pembangunan Taman dan Halaman Kantor	Jumlah pembangunan Taman dan halaman Kantor	Kota Lhokseumawe	1 halaman	52,898,500	APBK	-		0	Disperindagkop
03.	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase tingkat disiplin aparatur	Kota Lhokseumawe	100%	48,400,000	APBK	-	100%	50,000,000	Disperindagkop
03.006.	Penyediaan Sewa Gedung/Gudang Kantor	Periode Sewa Gedung Kantor	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	48,400,000	APBK	-	1 Tahun	50,000,000	Disperindagkop
05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan kegiatan pendidikan dan pelatihan formal yang diikuti	Kota Lhokseumawe	5 Keg	10,000,000	APBK	-	5 kegiatan	10,000,000	Disperindagkop
05.001.	Pendidikan dan pelatihan formal	Periode pendidikan dan Pelatihan Formal Aparatur	Kota Lhokseumawe	12 bulan	10,000,000	APBK	-	12 bulan	10,000,000	Disperindagkop
07.	Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja	Cakupan Penyediaan Dokumen Perencanaan SKPK	Kota Lhokseumawe	1 Dokumen	1,320,000	APBK	-	1 Dokumen	1,452,000	Disperindagkop
07.002.	Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah	Jumlah buku Renja	Kota Lhokseumawe	10 buku	1,320,000	APBK	-	10 buku	1,452,000	Disperindagkop
08.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pembangunan	Cakupan Penyediaan Dokumen DED	Kota Lhokseumawe	100%	495,000,000	APBK	-	100%	544,500,000	Disperindagkop
08.002.	Penyusunan Detail Engineering Design (DED) Industri dan Perdagangan	Jumlah Dokumen DED industri dan perdagangan	Kota Lhokseumawe	10 Dokumen	495,000,000	APBK	-	5 Dokumen	544,500,000	Disperindagkop
15	Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif	Cakupan pembinaan terhadap UKM	Kota Lhokseumawe	5%	500,000,000	APBK	-	5%	0	Disperindagkop

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2020			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		OPD Penanggung jawab
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.012.	Pengadaan Bahan dan Peralatan Untuk Pengembangan Usaha Kecil Menengah	Jumlah pengadaan bahan dan peralatan untuk pengembangan UKM (Kolaborasi KOTAKU Skala Kawasan)	dinas perindagkop dan ukm	1 Paket	500,000,000	APBK	-	-	0	Disperindagkop
18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase pendataan koperasi dalam wilayah Kota Lhokseumawe	Kota Lhokseumawe	100%	151,100,000	APBK	-	100%	160,000,000	Disperindagkop
18.012.	Pengadaan Modal Mobiler, Komputer dan Kelembagaan dan Legalitas Koperasi	Jumlah Pengadaan Modal Mobiler, Komputer dan Kelembagaan dan Legalitas Koperasi	Kota Lhokseumawe	5 Jenis	151,100,000	APBK	-	5 Jenis	160,000,000	Disperindagkop
19	Program Pengembangan dan Pembinaan Koperasi Dan UKM	Persentase koperasi aktif	Kota Lhokseumawe	39,81%	72,655,000	APBK	-	40,09%	80,000,000	Disperindagkop
19.003.	Pembinaan Koperasi Penerima Bantuan	Jumlah pembinaan koperasi penerima bantuan	Kota Lhokseumawe	1 Koperasi	72,655,000	APBK	-		80,000,000	Disperindagkop
22	Program Pengembangan Koperasi Dalam Wilayah Kota Lhokseumawe	Pendataan dan Monitoring Koperasi yang Aktif dan Tidak Aktif			152,960,000	APBK	-		175,600,000	Disperindagkop
22.001.	Pendataan dan Monitoring Koperasi Yang Aktif dan Tidak Aktif	Periode Pendataan dan Monitoring Koperasi Yang Aktif dan Tidak Aktif	Kota Lhokseumawe	1 Kali	62,900,000	APBK	-	1 Kali	75,600,000	Disperindagkop
22.022.	Pengembangan dan Pembinaan Koperasi dan UKM	Periode Pengembangan dan Pembinaan Koperasi dan UKM	Kota Lhokseumawe	1 Kali	90,060,000	APBK	-	1 Kali	100,000,000	Disperindagkop
3	Urusan Pilihan				10,671,570,001	APBK	-		19,775,153,356	Disperindagkop
3.06.	Perdagangan				8,193,770,000	APBK	-		16,962,658,641	Disperindagkop
15	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Cakupan perlindungan dan pengamanan konsumen dan Tera Ulang	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	1,149,760,000	APBK	-	12 Bulan	10,422,656,000	Disperindagkop
15.005.	Tera dan Tera Ulang UTTP Metrologi	Jumlah Tera dan Tera Ulang UTTP Metrologi	Kota Lhokseumawe	5 lokasi pasar	253,975,000	APBK	-	1 Kegiatan	150,000,000	Disperindagkop
15.006.	Peningkatan Sarana Metrologi Legal (DAK)	Jumlah gedung	Kota Lhokseumawe	1 Gedung	730,825,000	APBK	-	1 Kegiatan	10,000,000,000	Disperindagkop
15.009.	Pembinaan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa	Pembentukan Pasar Tertib Ukur dan Pengawasan Pupuk Subsidi	Kota Lhokseumawe	1 Kegiatan	164,960,000	APBK	-	1 Kegiatan	272,656,000	Disperindagkop
18	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Cakupan pengembangan pasar rakyat	Kota Lhokseumawe	4 Kec	6,264,410,000	APBK	-	4 Kec	6,020,002,641	Disperindagkop
18.003.	Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk	Jumlah Pasar Yang di Bangun dan di Rehab serta terlaksananya pelayanan pasar dalam Wilayah Kota Lhokseumawe	Kota Lhokseumawe	4 Pasar	1,957,490,000	APBK	-	1 kegiatan	1,500,000,000	Disperindagkop
18.008.	Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk (DAK)	Jumlah Pasar dalam Wilayah Kota Lhokseumawe	Kota Lhokseumawe	1 Pasar	1,342,825,000	APBK	-	3 Pasar	1,000,000,000	Disperindagkop
18.009.	Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk (OTSUS)	Jumlah Pasar dan Kios yang dibangun dalam wilayah Kota Lhokseumawe			2,490,000,000	APBK	-		3,000,000,000	Disperindagkop

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2020			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		OPD Penanggung jawab
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.010.	Pelaksanaan Pasar Murah dan Monitoring Harga Pasar	Jumlah pelaksanaan pasar murah dan monitoring harga pasar	Kota Lhokseumawe	3 kecamatan	374,070,000	APBK	-	3 kecamatan	400,000,000	Disperindagkop
18.011.	Penertiban Pasar Dalam Wilayah Kota Lhokseumawe	jumlah lokasi penertiban pasar	Kota Lhokseumawe	5 pasar	100,025,000	APBK	-	5 pasar	120,002,641	Disperindagkop
20	Program Pengembangan Dagang dan Industri dan Menengah	Cakupan pengembangan UMKM	Kota Lhokseumawe	35%	779,600,000	APBK	-	40%	520,000,000	Disperindagkop
20.001.	Pameran Dagang, Pameran Industri, dan Pameran Produk Industri Kecil dan UKM	Periode pameran dagang	Kota Lhokseumawe	7 Hari	779,600,000	APBK	-	7 Hari	520,000,000	Disperindagkop
3.07.	Perindustrian				2,477,800,001	APBK	-		2,812,494,715	Disperindagkop
16	Program pengembangan industri kecil dan menengah	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	Kota Lhokseumawe	18.93%	2,376,425,001	APBK	-	19.31%	2,677,494,715	Disperindagkop
16.011.	Pengembangan IKM	Periode Pelatihan Peningkatan Mutu IKM	Kota Lhokseumawe	1 Kali	772,750,000	APBK	-	1 Kali	1,022,560,715	Disperindagkop
16.015.	Pendataan Industri Kecil Menengah (IKM) Kota Lhokseumawe	Periode Pendataan Industri Kecil Menengah (IKM) Kota Lhokseumawe	Kota Lhokseumawe	1 Kali	14,950,000	APBK	-	1 Kali	14,950,000	Disperindagkop
16.020.	Pengawasan Produk IKM Makanan / Minuman (Pengawasan Produksi IK/RT Serta Promosi dan Informasi)	Periode Pengawasan Produk IKM Makanan/Minuman (Pengawasan Produksi IK/RT Serta Promosi dan Informasi)	Kota Lhokseumawe	2 Kali	47,100,000	APBK	-	2 Kali	47,110,000	Disperindagkop
16.021.	Pengadaan Mesin Peralatan Produksi IKM	Jumlah pengadaan mesin/peralatan produksi IKM	Kota Lhokseumawe	5 Jenis	1,541,625,000	APBK	-	5 Jenis	1,592,874,000	Disperindagkop
16.030.	Pengadaan Mesin / Peralatan Produksi IKM (DAK)	Jumlah Pengadaan Mesin / Peralatan Produksi IKM	Kota Lhokseumawe	1 Paket	1	APBK	-	1 Paket	0	Disperindagkop
24	Program Peningkatan Mutu Industri	Cakupan Peningkatan Mutu Industri		100%	30,425,000	APBK	-	100%	30,000,000	Disperindagkop
24.002.	Penilaian Desa Kerajinan DEKRANASDA Kota Lhokseumawe	Periode Penilaian Desa Kerajinan DEKRANASDA Kota Lhokseumawe	Kota Lhokseumawe	1 Kali	30,425,000	APBK	-	1 Kali	30,000,000	Disperindagkop
25	Program Pengembangan dan Pembinaan Dekranasda	Cakupan Pengembangan dan Pembinaan Dekranasda		100%	70,950,000	APBK	-	100%	105,000,000	Disperindagkop
25.002.	Pembinaan Industri Kerajinan Dekranasda Kota Lhokseumawe	Periode Pembinaan Industri Kerajinan Dekranasda Kota Lhokseumawe	Kota Lhokseumawe	4 Kali	70,950,000	APBK	-	4 Kali	105,000,000	Disperindagkop
	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata				10,925,371,700	APBK	-		8,864,854,060	Disporapar
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar				8,657,912,590	APBK	-		6,667,116,039	Disporapar
2.13.	Kepemudaan dan Olah Raga				8,657,912,590	APBK	-		6,667,116,039	Disporapar
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kota Lhokseumawe	100%	446,694,490	APBK	-	100%	491,363,939	Disporapar

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2020			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		OPD Penanggung jawab
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01.001.	Penyediaan jasa surat menyurat	Periode Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	2,500,000	APBK	-	12 Bulan	2,500,000	Disporapar
01.002.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Periode penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	65,608,590	APBK	-	12 Bulan	65,608,590	Disporapar
01.007.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah pejabat pengelola keuangan SKPD	Kota Lhokseumawe	180 OB	95,600,000	APBK	-	180 OB	95,600,000	Disporapar
01.010.	Penyediaan alat tulis kantor	Periode Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	35,000,000	APBK	-	12 Bulan	49,669,449	Disporapar
01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Periode Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	15,000,000	APBK	-	12 Bulan	15,000,000	Disporapar
01.013.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Periode Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	4,285,900	APBK	-	12 Bulan	4,285,900	Disporapar
01.015.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Lhokseumawe	365 eks	1,500,000	APBK	-	365 eks	1,500,000	Disporapar
01.017.	Penyediaan makanan dan minuman	Periode Penyediaan Makan dan Minum	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	7,200,000	APBK	-	12 Bulan	7,200,000	Disporapar
01.018.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Periode Rapat Koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	120,000,000	APBK	-	12 Bulan	150,000,000	Disporapar
01.020.	Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap	Jumlah Jasa Pegawai Tidak Tetap	Kota Lhokseumawe	252 OB	100,000,000	APBK	-	252 OB	100,000,000	Disporapar
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	Kota Lhokseumawe	100%	1,046,404,000	APBK	-	100%	1,071,044,840	Disporapar
02.005.	Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasioanal	Kota Lhokseumawe	2 Unit	800,000,000	APBK	-	2 Unit	800,000,000	Disporapar
02.011.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Lhokseumawe	25 unit	165,724,000	APBK	-	25 unit	186,044,840	Disporapar
02.023.	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Kota Lhokseumawe	12 UB	70,000,000	APBK	-	12 UB	70,000,000	Disporapar
02.030.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Periode Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	10,680,000	APBK	-	12 Bulan	15,000,000	Disporapar
03.	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase tingkat disiplin aparatur	Kota Lhokseumawe	100%	137,100,000	APBK	-	100%	150,810,000	Disporapar
03.002.	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas	Kota Lhokseumawe	42 Pasang	40,300,000	APBK	-	42 Pasang	44,330,000	Disporapar
03.006.	Penyediaan Sewa Gedung/Gudang Kantor	Periode Sewa Gedung Kantor	Kota Lhokseumawe	1 Tahun	96,800,000	APBK	-	1 Tahun	106,480,000	Disporapar
05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan kegiatan pendidikan dan pelatihan formal yang diikuti	Kota Lhokseumawe	1 Kegiatan	10,000,000	APBK	-	1 Kegiatan	10,000,000	Disporapar
05.001.	Pendidikan dan pelatihan formal	Periode Pendidikan dan Pelatihan Formal Aparatur	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	10,000,000	APBK	-	12 Bulan	10,000,000	Disporapar
07.	Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja	Cakupan Penyediaan Dokumen perencanaan SKPK	Kota Lhokseumawe	1 Dokumen	1,452,000	APBK	-	1 Dokumen	1,597,200	Disporapar
07.002.	Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Buku Renja SKPD	Kota Lhokseumawe	10 Buku	1,452,000	APBK	-	10 Buku	1,597,200	Disporapar

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2020			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		OPD Penanggung jawab
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif	Kota Lhokseumawe	1	350,000,000	APBK	-	91%	300,000,000	Disporapar
15.011.	Pelatihan Jurnalis Pemuda Dalam Wilayah Kota Lhokseumawe	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Pelatihan	Kota Lhokseumawe	136 orang	150,000,000	APBK	-	136 orang	0	Disporapar
15.012.	Pelatihan Perwasitan C3 untuk Pemuda dalam Wilayah Kota Lhokseumawe	Jumlah hari pelatihan perwasitan yang Berkualitas	Kota Lhokseumawe	1 hari	100,000,000	APBK	-	1 Kegiatan	150,000,000	Disporapar
15.013.	Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Pelatihan	Kota Lhokseumawe	80 Peserta	100,000,000	APBK	-	80 Peserta	150,000,000	Disporapar
16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif	Kota Lhokseumawe	91%	590,535,000	APBK	-	91%	624,588,500	Disporapar
16.001.	Pembinaan organisasi kepemudaan	Jumlah Hari Pelaksanaan	Kota Lhokseumawe	2 hari	150,000,000	APBK	-	1 Kegiatan	150,000,000	Disporapar
16.002.	Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan	Jumlah hari Angkatan Pelatihan	Kota Lhokseumawe	2 hari	200,000,000	APBK	-	1 Kegiatan	200,000,000	Disporapar
16.016.	Pembinaan dan Seleksi Paskibra Kota Lhokseumawe	Jumlah peserta yang diseleksi dan dibina	Kota Lhokseumawe	60 orang	40,535,000	APBK	-	60 orang	44,588,500	Disporapar
16.017.	Seminar Peningkatan Kompetensi Menulis Pemuda Dalam Menghadapi Revolusi Industri 4.0	Jumlah hari Seminar Peningkatan Kompetensi Menulis	Kota Lhokseumawe	1 hari	100,000,000	APBK	-	1 Kegiatan	130,000,000	Disporapar
16.018.	Focus Group Discussion Komitmen Pemuda Anti Radikalisme dan Wawasan Kebangsaan	Jumlah hari Focus Group Discussion Anti Radikalisme dan Wawasan Kebangsaan	Kota Lhokseumawe	1 hari	100,000,000	APBK	-	1 Kegiatan	100,000,000	Disporapar
17	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	Jumlah Wirausaha muda yang dibina	Kota Lhokseumawe	90%	500,000,000	APBK	-	90%	300,000,000	Disporapar
17.001.	Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda	Jumlah hari pelatihan Kewirausahaan Pemuda Kota Lhokseumawe	Kota Lhokseumawe	2 hari	200,000,000	APBK	-	1 Kegiatan	200,000,000	Disporapar
17.002.	Pelatihan ketrampilan bagi pemuda	Jumlah Pemuda yang mengikuti Pelatihan	Kota Lhokseumawe	100 orang	200,000,000	APBK	-	100 orang	100,000,000	Disporapar
17.004.	Pelatihan Tenaga Terampil Pembekalan Pemuda Kota Lhokseumawe	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Pelatihan	Kota Lhokseumawe	100 Orang	100,000,000	APBK	-	100 Orang	0	Disporapar
18	Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba	Persentase organisasi pemuda yang aktif	Kota Lhokseumawe	80%	200,000,000	APBK	-	90%	50,000,000	Disporapar
18.001.	Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda	Jumlah hari Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda	Kota Lhokseumawe	2 hari	200,000,000	APBK	-	1 Kegiatan	50,000,000	Disporapar
19	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga	Cakupan Pembinaan Olahraga	Kota Lhokseumawe	31%	200,000,000	APBK	-	31%	125,000,000	Disporapar
19.001.	Peningkatan mutu organisasi dan tenaga keolahragaan	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Pelatihan	Kota Lhokseumawe	50 Peserta	125,000,000	APBK	-	50 Peserta	125,000,000	Disporapar
19.005.	Pembinaan manajemen organisasi olahraga	Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan manajemen organisasi olahraga	Kota Lhokseumawe	50 Peserta	75,000,000	APBK	-	50 Peserta	0	Disporapar

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2020			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		OPD Penanggung jawab
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Program Pembinaan dan Pemasarakan Olah Raga	Cakupan Pembinaan Olahraga	Kota Lhokseumawe	13%	3,529,827,100	APBK	-	15%	2,872,921,560	Disporapar
20.004.	Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah	Jumlah Cabang Olahraga yang Dibina	Kota Lhokseumawe	11 Cabang Olahraga	239,319,000	APBK	-	11 Cabang Olahraga	271,499,800	Disporapar
20.008.	Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi	Jumlah Insan Olahraga yang Berprestasi	Kota Lhokseumawe	25 Orang	75,000,000	APBK	-	25 Orang	75,000,000	Disporapar
20.031.	Pengadaan Sarana Dan Prasarana Olahraga	Jumlah cabang olahraga yang difasilitasi sarana prasarana olahraganya	Kota Lhokseumawe	2 cabang	578,774,500	APBK	-	2 Kegiatan	250,000,000	Disporapar
20.034.	Pelaksanaan Turnamen Walikota Cup Kota Lhokseumawe	Jumlah hari pelaksanaan	Kota Lhokseumawe	3 hari	542,250,000	APBK	-	2 Kegiatan	126,421,760	Disporapar
20.047.	Pelaksanaan Turnamen Menembak MUSPIDA Cup Kota Lhokseumawe	Jumlah Turnamen Olah Raga yang Diselenggarakan	Kota Lhokseumawe	1 Turnamen	150,000,000	APBK	-	1 Turnamen	150,000,000	Disporapar
20.048.	Pelaksanaan Turnamen Panahan MUSPIDA Cup Kota Lhokseumawe	Jumlah hari pelaksanaan	Kota Lhokseumawe	1 hari	103,000,000	APBK	-	1 Kegiatan	150,000,000	Disporapar
20.049.	Pelaksanaan Lomba Dayung dan Perahu Hias MUSPIDA Cup Kota Lhokseumawe	Jumlah hari pelaksanaan	Kota Lhokseumawe	2 hari	150,000,000	APBK	-	1 Kegiatan	150,000,000	Disporapar
20.050.	Wisata Relly dan Bersih-bersih Pantai	Jumlah hari pelaksanaan	Kota Lhokseumawe	3 hari	200,000,000	APBK	-	1 Kegiatan	200,000,000	Disporapar
20.054.	Gebyar Cabang Olahraga Usia Dini	Jumlah Cabang Olahraga yang dipertandingkan	Kota Lhokseumawe	6 Cabang Olahraga	103,483,600	APBK	-	6 Cabang Olahraga	150,000,000	Disporapar
20.055.	Persiapan dan Keikutsertaan POPDA (OTSUS)	Jumlah Atlet yang dibina dalam Keikutsertaan POPDA	Kota Lhokseumawe	150 Orang	1,000,000,000	APBK	-	150 Orang	1,000,000,000	Disporapar
20.056.	Fun Bike dan Fun Walk Kota Lhokseumawe	Jumlah Hari Pelaksanaan	Kota Lhokseumawe	1 Kegiatan	238,000,000	APBK	-	1 Kegiatan	200,000,000	Disporapar
20.057.	Open Turnamen Usia Dini Se-Kota Lhokseumawe	Jumlah Turnamen Olahraga yang diselenggarakan	Kota Lhokseumawe	1 Kegiatan	150,000,000	APBK	-	1 Kegiatan	150,000,000	Disporapar
21	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	Jumlah cabang olahraga berprestasi tingkat PORA	Kota Lhokseumawe	30 Cabor	1,645,900,000	APBK	-	32 Cabor	669,790,000	Disporapar
21.013.	Pembangunan Lapangan Olah Raga	Jumlah Lapangan Yang dibangun	Kota Lhokseumawe	1 Lapangan	1,145,900,000	APBK	-	1 Lapangan	119,790,000	Disporapar
21.014.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga (OTSUS)	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga	Kota Lhokseumawe	1 Paket	500,000,000	APBK	-	1 Paket	550,000,000	Disporapar
3	Urusan Pilihan				2,267,459,110	APBK	-		2,197,738,021	Disporapar
3.02.	Pariwisata				2,267,459,110	APBK	-		2,197,738,021	Disporapar
15	Program pengembangan pemasaran pariwisata	Kontribusi Pariwisata Terhadap PDRB	Kota Lhokseumawe	1,19%	1,317,632,740	APBK	-	1,23%	1,366,945,014	Disporapar
15.006.	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan pemasaran pariwisata	Jumlah Kunjungan Monev Yang Dilakukan	Kota Lhokseumawe	12 Kali/Tahun	10,000,000	APBK	-	12 Kali/Tahun	10,000,000	Disporapar
15.013.	Sepeda Santai Visit Aceh Years	Jumlah Hari Pelaksanaan	Kota Lhokseumawe	1 hari	20,000,000	APBK	-	1 hari	20,000,000	Disporapar
15.014.	Pemilihan Duta Wisata Kota Lhokseumawe	Jumlah Peserta Pemilihan	Kota Lhokseumawe	50 orang	123,222,740	APBK	-	50 orang	142,945,014	Disporapar
15.021.	Penyusunan Perubahan Buku Profil Pariwisata Kota Lhokseumawe	Jumlah Buku Profil Pariwisata	Kota Lhokseumawe	1 Buku	24,000,000	APBK	-	1 Buku	24,000,000	Disporapar

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2020			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		OPD Penanggung jawab
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.028.	Pameran Foto Tingkat Kota Lhokseumawe	Jumlah Foto yang di Pamerkan	Kota Lhokseumawe	50 Foto	200,000,000	APBK	-	50 Foto	200,000,000	Disporapar
15.031.	Keikutsertaan dalam Pameran Diluar Kota Lhokseumawe (Sabang Fair, dll)	Jumlah Partisipasi Dalam Pameran	Dalam dan Luar Kota Lhokseumawe	1 Kali	20,000,000	APBK	-	1 Kali	20,000,000	Disporapar
15.032.	Teluk Samawi Islamic Tourism Festival	Jumlah Hari Pelaksanaan	Blang Pulo Kecamatan Muara Satu	3 Hari	240,000,000	APBK	-	3 Hari	250,000,000	Disporapar
15.033.	Piasan Samudera Pasai	Jumlah Piasan Samudera Pasai	Kota Lhokseumawe	1000 Orang	240,410,000	APBK	-	1000 Orang	250,000,000	Disporapar
15.034.	Lomba Video Pariwisata Kota Lhokseumawe	Jumlah hari pelaksanaan	Kota Lhokseumawe	1 hari	200,000,000	APBK	-	1 Kegiatan	200,000,000	Disporapar
15.035.	Pembuatan Video Pariwisata Kota Lhokseumawe	Jumlah hari pelaksanaan	Kota Lhokseumawe	1 hari	190,000,000	APBK	-	1 Kegiatan	200,000,000	Disporapar
15.036.	Pengadaan Kalender Event Pariwisata Kota Lhokseumawe	Jumlah dokumen yang dihasilkan	Kota Lhokseumawe	1 dokumen	50,000,000	APBK	-	1 Kegiatan	50,000,000	Disporapar
16	Program pengembangan destinasi pariwisata	Pengembangan objek wisata Kota Lhokseumawe	Kota Lhokseumawe	40%	105,266,370	APBK	-	50%	115,793,007	Disporapar
16.002.	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	Jumlah sarana /prasara yang disediakan	Kota Lhokseumawe	1 unit	37,699,700	APBK	-	1 unit	48,226,337	Disporapar
16.007.	Pengembangan, sosialisasi, dan penerapan serta pengawasan standarisasi	Jumlah hari pelaksanaan	Kota Lhokseumawe	1 hari	30,644,670	APBK	-	3 Kegiatan	30,644,670	Disporapar
16.010.	Promosi potensi dan obyek pariwisata	Jumlah hari pelaksanaan	Kota Lhokseumawe	1 hari	26,922,000	APBK	-	1 Dokumen	26,922,000	Disporapar
16.012.	Penyusunan Rancangan Qanun Pariwisata Kota Lhokseumawe	Jumlah rancangan qanun yang dihasilkan	Kota Lhokseumawe	1 Draft Raqan	10,000,000	APBK	-	1 Draft Raqan	10,000,000	Disporapar
17	Program pengembangan Kemitraan	Kunjungan Wisata	Kota Lhokseumawe	60%	844,560,000	APBK	-	70%	715,000,000	Disporapar
17.007.	Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata	Jumlah Kunjungan Kerja Yang Dilakukan	Kota Lhokseumawe	2 Kali	70,000,000	APBK	-	2 Kali	60,000,000	Disporapar
17.011.	Lomba Layang Tunang Kota Lhokseumawe	Jumlah Peserta Kegiatan	Kota Lhokseumawe	70 orang	50,000,000	APBK	-	70 orang	0	Disporapar
17.012.	Lomba Perahu Tradisional Kota Lhokseumawe	Jumlah Peserta Kegiatan	Kota Lhokseumawe	50 orang	50,000,000	APBK	-	50 orang	35,000,000	Disporapar
17.013.	Studi Banding Pariwisata ke Destinasi Wisata Nasional	Jumlah Objek Wisata yang Dikunjungi	Kota Lhokseumawe	3 objek	100,000,000	APBK	-	3 objek	70,000,000	Disporapar
17.014.	Pengembangan dan Penguatan Informasi Data Base Kepariwisataaan	Jumlah Dokumen yang dihasilkan	Kota Lhokseumawe	1 Dokumen	50,000,000	APBK	-	1 Dokumen	35,000,000	Disporapar
17.015.	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan Pariwisata	Jumlah Kunjungan Monitoring dan Evaluasi yang dilaksanakan	Kota Lhokseumawe	6 Kali	100,000,000	APBK	-	6 Kali	60,000,000	Disporapar
17.016.	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Hari Pelaksanaan	Kota Lhokseumawe	1 hari	30,000,000	APBK	-	1 hari	0	Disporapar
17.018.	Bimbingan Teknis Sertifikasi Halal	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Pelatihan	Kota Lhokseumawe	40 orang	50,000,000	APBK	-	40 orang	40,000,000	Disporapar
17.019.	Bimbingan Teknis Pelaku Usaha Kepariwisataaan	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Pelatihan	Kota Lhokseumawe	60 Orang	150,000,000	APBK	-	60 Orang	150,000,000	Disporapar
17.020.	Seminar Pelaku Usaha Kuliner	Jumlah Peserta Yang mengikuti Seminar	Kota Lhokseumawe	30 Orang	70,000,000	APBK	-	30 Orang	80,000,000	Disporapar

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2020			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		OPD Penanggung jawab
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.021.	Pelatihan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Pelatihan	Kota Lhokseumawe	60 Orang	124,560,000	APBK	-	60 Orang	185,000,000	Disporapar
	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan				3,625,801,188	APBK	-		6,829,240,154	Dinas Arpus
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar				3,468,935,300	APBK	-		6,829,240,154	Dinas Arpus
2.17.	Perpustakaan				3,468,935,300	APBK	-		6,759,240,154	Dinas Arpus
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kota Lhokseumawe	100%	618,853,000	APBK	-	100%	608,873,956	Dinas Arpus
01.001.	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya Benda Pos dan Paket Pengiriman	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	2,640,000	APBK	-	12 Bulan	3,000,000	Dinas Arpus
01.002.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya Rekening Telepon dan Listrik	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	96,437,000	APBK	-	12 Bulan	106,050,700	Dinas Arpus
01.007.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Pejabat Pengelola Keuangan SKPD (15 Orang x 12 Bulan)	Kota Lhokseumawe	180 OB	106,311,025	APBK	-	120 OB	106,311,025	Dinas Arpus
01.010.	Penyediaan alat tulis kantor	Periode Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	35,634,900	APBK	-	12 Bulan	35,634,900	Dinas Arpus
01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Periode Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	15,000,000	APBK	-	12 Bulan	19,707,256	Dinas Arpus
01.013.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Periode Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	6,800,000	APBK	-	12 Bulan	8,000,000	Dinas Arpus
01.015.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan (1 Eks x 365 Hari)	Kota Lhokseumawe	365 Eks	31,140,000	APBK	-	365 Eks	2,280,000	Dinas Arpus
01.017.	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Biaya Makan dan Minum Rapat	Kota Lhokseumawe	11 Bulan	12,000,000	APBK	-	11 Bulan	15,000,000	Dinas Arpus
01.018.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Periode Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	150,000,000	APBK	-	12 Bulan	150,000,000	Dinas Arpus
01.020.	Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap	Jumlah Jasa Pegawai Tidak Tetap (32 Orang x 12 Bulan)	Kota Lhokseumawe	384 OB	162,890,075	APBK	-	432 OB	162,890,075	Dinas Arpus
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kota Lhokseumawe	100%	616,387,800	APBK	-	100%	200,158,440	Dinas Arpus
02.005.	Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Kota Lhokseumawe	1 unit	274,750,000	APBK	-	1 unit	0	Dinas Arpus
02.011.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Lhokseumawe	85 Unit	114,837,800	APBK	-	85 Jenis	120,000,000	Dinas Arpus
02.022.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Periode Pemeliharaan Rutin / berkala gedung kantor	Kota Lhokseumawe	2 Paket	163,000,000	APBK	-	12 Bulan	10,000,000	Dinas Arpus
02.023.	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala Mobil Jabatan (1 Unit x 12 Bulan)	Kota Lhokseumawe	12 UB	26,600,000	APBK	-	12 UB	29,640,000	Dinas Arpus
02.024.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Pemeliharaan Rutin / Berkala kendaraan dinas / operasional (2 Unit x 12 Bulan)	Kota Lhokseumawe	24 UB	29,600,000	APBK	-	24 UB	32,600,000	Dinas Arpus
02.030.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Periode Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	7,600,000	APBK	-	12 Bulan	7,918,440	Dinas Arpus

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2020			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		OPD Penanggung jawab
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal yang Diikuti	Kota Lhokseumawe	5 Keg	50,000,000	APBK	-	5 Keg	50,000,000	Dinas Arpus
05.001.	Pendidikan dan pelatihan formal	Periode Pendidikan Dan Pelatihan Formal Aparatur	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	50,000,000	APBK	-	12 Bulan	50,000,000	Dinas Arpus
07.	Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja	Cakupan Penyediaan Dokumen Perencanaan SKPK	Kota Lhokseumawe	1 Dokumen	1,000,000	APBK	-	1 Dokumen	1,000,000	Dinas Arpus
07.002.	Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Buku RENJA SKPD	Kota Lhokseumawe	20 Buku	1,000,000	APBK	-	10 Buku	1,000,000	Dinas Arpus
15	Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Daerah	Kota Lhokseumawe	3210 Orang	2,182,694,500	APBK	-	3235 Orang	5,899,207,758	Dinas Arpus
15.001.	Penyediaan Bahan Pustaka di Perpustakaan Umum daerah	Jumlah Bahan Bacaan Perpustakaan Umum	Kota Lhokseumawe	120 Eksemplar	11,091,600	APBK	-	120 Eksemplar	10,457,858	Dinas Arpus
15.002.	Lomba Pustaka Tk. SMU Se-Kota Lhokseumawe	Jumlah Peserta Lomba Perpustakaan Sekolah	Kota Lhokseumawe	20 Orang	24,487,500	APBK	-	30 Orang	24,487,500	Dinas Arpus
15.004.	Lomba Bercerita Hikayat Daerah	Jumlah Peserta Lomba Bercerita Hikayat Daerah	Kota Lhokseumawe	30 Orang	32,390,000	APBK	-	50 Orang	32,390,000	Dinas Arpus
15.008.	Pelayanan Perpustakaan Keliling Kota Lhokseumawe	Periode Pelayanan Perpustakaan Keliling Kota Lhokseumawe	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	40,200,000	APBK	-	12 Bulan	40,200,000	Dinas Arpus
15.009.	Stock Opname Dan Penyiangan (Weeding) Perpustakaan	Periode Pelaksanaan Stock Opname dan Penyiangan (Weeding) Perpustakaan	Kota Lhokseumawe	4 Kali	13,025,400	APBK	-	1 Kali	13,025,400	Dinas Arpus
15.010.	Peningkatan Pelayanan Perpustakaan	Periode Pelaksanaan Peningkatan Pelayanan Perpustakaan (2 Hari x 4 Kali x 12 Bulan)	Kota Lhokseumawe	50 Hari	21,500,000	APBK	-	96 Hari	21,500,000	Dinas Arpus
15.011.	Penyediaan Bahan Pustaka Di Perpustakaan Umum Daerah (DAK)	Jumlah Bahan Bacaan Perpustakaan Umum	Lhoksumawe	2080 Eksemplar	10,000,000	APBK	-	2080 Eksemplar	3,400,000,000	Dinas Arpus
15.012.	Pengadaan Meubeleur Perpustakaan Daerah (DAK)	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Lhokseumawe	103 Unit	10,000,000	APBK	-	103 Unit	719,940,000	Dinas Arpus
15.013.	Pengadaan Perangkat TIK Perpustakaan Daerah (DAK)	Jumlah Pengadaan TIK Perpustakaan Daerah	Kota Lhokseumawe	27 Unit	10,000,000	APBK	-	27 Unit	295,707,000	Dinas Arpus
15.014.	Pembangunan Gedung Perpustakaan (OTSUS)	Terbangunnya Gedung Layanan Perpustakaan	Kota Lhokseumawe	1 Gedung	2,000,000,000	APBK	-	1 gedung	0	Dinas Arpus
15.015.	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Layanan Perpustakaan Umum (DAK)	Jumlah gedung layanan perpustakaan yang direhab sedang/berat	Kota Lhokseumawe	1 Gedung	10,000,000	APBK	-	1 Paket	1,341,500,000	Dinas Arpus
2.18.	Kearsipan				156,865,888	APBK	-		70,000,000	Dinas Arpus
15	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	Jumlah SKPD Yang Mengelola Arsip Secara Baku	Kota Lhokseumawe	20%	21,150,000	APBK	-	20%	25,000,000	Dinas Arpus
15.002.	Pengumpulan data	Jumlah Audio Visual	Kota Lhokseumawe	5 Buah	21,150,000	APBK	-	51 Dokumen	25,000,000	Dinas Arpus
19	Program Peningkatan SDM Kearsipan	Cakupan Pembinaan SDM Pengelola Kearsipan	Kota Lhokseumawe	1 Keg	135,715,888	APBK	-	1 Keg	45,000,000	Dinas Arpus

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2020			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		OPD Penanggung jawab
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.003.	Bimbingan Teknis Tenaga Arsiparis	Jumlah Peserta SDM Kearsipan	Kota Lhokseumawe	140 Orang	135,715,888	APBK	-	45 Orang	45,000,000	Dinas Arpus
	Sekretariat Daerah				98,211,898,063	APBK	-		85,053,323,219	Setdako
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar				3,899,993,165	APBK	-		3,597,000,000	Setdako
2.10.	Komunikasi dan Informatika				3,899,993,165	APBK	-		3,597,000,000	Setdako
15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Cakupan pelayanan pemerintahan berbasis elektronik	Kota Lhokseumawe	80%	2,949,993,165	APBK	-	80%	2,552,000,000	Setdako
15.002.	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	Periode Pemeliharaan Jaringan Komunikasi dan Informasi	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	399,993,165	APBK	-	12 Bulan	440,000,000	Setdako
15.003.	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	Periode Pembinaan dan Pengembangan SDM Aparatur	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	300,000,000	APBK	-	12 Bulan	33,000,000	Setdako
15.004.	Pengadaan alat studio dan komunikasi	Jumlah Alat Studio dan Komunikasi yang dibeli	Kota Lhokseumawe	4 Jenis	400,000,000	APBK	-	4 Jenis	44,000,000	Setdako
15.019.	Pameran Pemko Kota Lhokseumawe	Jumlah Pelaksanaan Pameran Pembangunan Kota Lhokseumawe	Kota Lhokseumawe	1 Kali	950,000,000	APBK	-	1 Kali	1,045,000,000	Setdako
15.020.	Pelaksanaan Kegiatan Protokol Pemko Kota Lhokseumawe	Periode Pelaksanaan Protokol Pemko Kota Lhokseumawe	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	500,000,000	APBK	-	12 Bulan	550,000,000	Setdako
15.021.	Pelaksanaan Peliputan Untuk Publikasi dan Dokumentasi	Periode Pelaksanaan Peliputan	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	400,000,000	APBK	-	12 Bulan	440,000,000	Setdako
18	Program kerjasama informasi dengan mas media	Cakupan kerjasama informasi dengan mass media	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	950,000,000	APBK	-	12 Bulan	1,045,000,000	Setdako
18.002.	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Periode Publikasi Penyelenggaraan Pemerintah	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	950,000,000	APBK	-	12 Bulan	1,045,000,000	Setdako
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang				94,311,904,898	APBK	-		81,456,323,219	Setdako
4.01.	Administrasi Pemerintahan				94,311,904,898	APBK	-		81,456,323,219	Setdako
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kota Lhokseumawe	100%	11,220,551,700	APBK	-	100%	12,101,146,200	Setdako
01.001.	Penyediaan jasa surat menyurat	Periode Penyediaan Benda Pos dan Paket Pengiriman	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	30,000,000	APBK	-	12 Bulan	33,000,000	Setdako
01.002.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Periode Penyediaan Penerangan, air dan telepon dan terbayarnya kewajiban	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	1,199,000,000	APBK	-	12 Bulan	1,452,000,000	Setdako
01.003.	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Periode Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	160,000,000	APBK	-	12 Bulan	176,000,000	Setdako
01.007.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Periode Pejabat Pengelola Keuangan SKPD	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	405,700,000	APBK	-	12 Bulan	441,166,000	Setdako
01.008.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Periode Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	548,900,000	APBK	-	12 Bulan	603,790,000	Setdako
01.010.	Penyediaan alat tulis kantor	Periode Tersedianya Alat Tulis Kantor	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	196,421,700	APBK	-	12 Bulan	193,600,000	Setdako

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2020			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		OPD Penanggung jawab
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Periode Penyediaan Bahan Cetak dan Fotokopi	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	215,920,000	APBK	-	12 Bulan	193,600,000	Setdako
01.013.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Periode Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	150,000,000	APBK	-	12 Bulan	84,700,000	Setdako
01.014.	Penyediaan peralatan rumah tangga	Periode penyediaan peralatan rumah tangga KDH dan WKDH	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	210,000,000	APBK	-	12 Bulan	223,850,000	Setdako
01.017.	Penyediaan makanan dan minuman	Periode Penyediaan Makan dan Minum	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	1,870,000,000	APBK	-	12 Bulan	2,057,000,000	Setdako
01.018.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Periode rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	3,300,000,000	APBK	-	12 Bulan	3,630,000,000	Setdako
01.020.	Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap	jumlah tenaga kerja tidak tetap	Kota Lhokseumawe	3504 OB	2,934,610,000	APBK	-	3504 OB	3,012,440,200	Setdako
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	Kota Lhokseumawe	100%	11,224,400,000	APBK	-	100%	7,677,216,558	Setdako
02.005.	Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas yang dibeli	Kota Lhokseumawe	2 Unit	2,625,000,000	APBK	-	2 unit	1,996,500,000	Setdako
02.011.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Lhokseumawe	9 Jenis	3,090,600,000	APBK	-	9 Jenis	3,196,916,558	Setdako
02.023.	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dipelihara	Kota Lhokseumawe	216 Unit	750,800,000	APBK	-	216 UB	838,200,000	Setdako
02.024.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Kota Lhokseumawe	228 Unit	619,000,000	APBK	-	228 UB	423,500,000	Setdako
02.025.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas	periode pemeliharaan peralatan dan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	280,000,000	APBK	-	12 Bulan	235,950,000	Setdako
02.030.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	periode pemeliharaan perlengkapan dan peralatan kantor yang terpelihara	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	470,000,000	APBK	-	12 Bulan	338,800,000	Setdako
02.031.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Listrik	periode pemeliharaan jaringan listrik	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	38,000,000	APBK	-	12 Bulan	42,350,000	Setdako
02.033.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Telepon	periode pemeliharaan jaringan telepon	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	88,000,000	APBK	-	12 Bulan	96,800,000	Setdako
02.034.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman, Tempat Parkir dan Halaman Kantor	periode pemeliharaan taman, tempat parkir dan halaman kantor setda Kota Lhokseumawe	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	165,000,000	APBK	-	12 Bulan	181,500,000	Setdako
02.035.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Air Minum	periode pemeliharaan jaringan air minum	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	18,000,000	APBK	-	12 Bulan	24,200,000	Setdako
02.042.	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	periode sedang/berat gedung kantor	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	3,080,000,000	APBK	-	12 Bulan	302,500,000	Setdako
03.	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase tingakt disiplin aparatur	Kota Lhokseumawe	100%	321,000,000	APBK	-	100%	752,620,000	Setdako
03.002.	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Periode pengadaan pakaian dinas/beserta perlengkapannya	Kota Lhokseumawe	1 Paket	0	APBK	-	1 Paket	363,000,000	Setdako
03.007.	Penyediaan Bantuan Perumahan Jabatan	Jumlah perumahan yg tersedia	Kota Lhokseumawe	3 Unit	321,000,000	APBK	-	3 Unit	389,620,000	Setdako
05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan kegiatan pendidikan dan pelatihan formal yang diikuti	Kota Lhokseumawe	5 Keg	1,230,930,450	APBK	-	5 Keg	1,109,418,827	Setdako
05.001.	Pendidikan dan pelatihan formal	Periode pemberian kontribusi untuk pelatihan/bimtek	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	100,000,000	APBK	-	12 Bulan	65,884,500	Setdako

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2020			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		OPD Penanggung jawab
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
05.004.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Jumlah unit layanan publik yang baik	Kota Lhokseumawe	3 Unit	82,500,000	APBK	-	3 Unit	90,750,000	Setdako
05.045.	Seleksi dan Pembinaan BAPOR KORPRI Kota Lhokseumawe	Jumlah Atlit KORPRI Kota Lhokseumawe		20 orang	116,175,000	APBK	-		33,275,000	Setdako
05.046.	Penyusunan Dokumen Analisis Jabatan (ANJAB) Pemko Kota Lhokseumawe	Jumlah dokumen anjab Pemko Kota Lhokseumawe	Kota Lhokseumawe	1 Dokumen	177,182,000	APBK	-	1 Dokumen	239,580,000	Setdako
05.047.	Pedoman Evaluasi Jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN)	Jumlah buku hasil evaluasi jabatan Pemko Kota Lhokseumawe	Kota Lhokseumawe	50 Buku	152,632,000	APBK	-	50 buku	181,139,420	Setdako
05.050.	Keikutsertaan Event BAPOR KORPRI	Jumlah peserta/pendamping event bapor korpri	Kota Lhokseumawe	20 Orang	85,910,000	APBK	-	20 orang	94,501,000	Setdako
05.055.	Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Buku IKM Kota Lhokseumawe	Kota Lhokseumawe	15 Buku	64,010,000	APBK	-	15 Buku	48,400,000	Setdako
05.057.	Penyusunan Analisis Beban Kerja	Jumlah Dokumen hasil ABK Kota Lhokseumawe	Kota Lhokseumawe	1 Dokumen	89,176,000	APBK	-	1 Dokumen	78,198,912	Setdako
05.058.	Penyusunan Peraturan Tata Naskah Dinas	Jumlah Buku Tata Naska Dinas Kota Lhokseumawe	Kota Lhokseumawe	50 Buku	60,345,450	APBK	-	50 Buku	66,379,995	Setdako
05.061.	Keikutsertaan Event MTQ KORPRI	Periode event MTQ KORPRI	Kota Lhokseumawe	7 hari	178,000,000	APBK	-	1 Kegiatan	73,810,000	Setdako
05.064.	Pembinaan dan Pengembangan Anggota KORPRI Kota Lhokseumawe	periode pengembangan SDM anggota KORPRI	Kota Lhokseumawe	2 kali	125,000,000	APBK	-	12 Bulan	137,500,000	Setdako
07.	Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja		Kota Lhokseumawe	1 Dokumen	141,985,000	APBK	-	1 Dokumen	123,620,255	Setdako
07.001.	Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah	Jumlah buku renstra	Kota Lhokseumawe	25 Buku	14,225,000	APBK	-	25 Buku	9,982,500	Setdako
07.002.	Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah	Jumlah buku renja	Kota Lhokseumawe	25 Buku	2,450,000	APBK	-	25 Buku	10,787,755	Setdako
07.004.	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan	Jumlah Buku Pedoman SOP	Kota Lhokseumawe	25 Buku	47,310,000	APBK	-	25 Buku	30,250,000	Setdako
07.005.	Penyusunan RKT dan TAPKIN	Jumlah buku RKT dan TAPKIN Pemko dan Setdako Kota Lhokseumawe	Kota Lhokseumawe	50 Buku	78,000,000	APBK	-	50 Buku	72,600,000	Setdako
10	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Kota Lhokseumawe	4 Dokumen	679,050,000	APBK	-	4 Dokumen	439,182,568	Setdako
10.001.	Penyusunan dan Pembahasan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP)	Jumlah buku LAKIP Pemerintah Kota dan Sekretariat Kota Lhokseumawe	Kota Lhokseumawe	25 Buku	225,000,000	APBK	-	25 Buku	69,438,028	Setdako
10.002.	Penyusunan dan Pembahasan Laporan Kinerja dan Pertanggungjawaban (LKPJ)	Jumlah buku LKPJ	Kota Lhokseumawe	30 Buku	94,400,000	APBK	-	30 Buku	103,079,295	Setdako
10.003.	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja Kunci	Jumlah buku LPPD dan IKK	Kota Lhokseumawe	20 Buku	163,950,000	APBK	-	20 Buku	116,129,750	Setdako
10.004.	Penyusunan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Otonomi Daerah (EKPOD)	jumlah buku EKPOD Kota Lhokseumawe	Kota Lhokseumawe	40 Buku	90,950,000	APBK	-	40 Buku	85,849,500	Setdako
10.011.	Penyusunan Standart Pelayanan Minimum (SPM)	Jumlah dokumen pelaporan penyelenggaraan SPM Kota Lhokseumawe	Kota Lhokseumawe	2 Dokumen	104,750,000	APBK	-	2 Dokumen	64,685,995	Setdako

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2020			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		OPD Penanggung jawab
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	Cakupan pelaksanaan koordinasi pimpinan daerah	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	1,996,694,800	APBK	-	12 Bulan	2,336,805,790	Setdako
16.006.	Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Dalam Rangka Kunjungan Kerja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Periode Kunjungan Kerja	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	142,854,000	APBK	-	12 Bulan	154,915,090	Setdako
16.007.	Kunjungan Kerja Dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Periode kunjungan kerja	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	150,000,000	APBK	-	12 Bulan	165,000,000	Setdako
16.009.	Forum Komunikasi Pimpinan Daerah	Jumlah hari pelaksanaan Forkopimda	Kota Lhokseumawe	4 hari	320,190,800	APBK	-	1 Kegiatan	396,371,800	Setdako
16.012.	Penyelenggaraan Pendukung Kegiatan Pejabat Daerah/Provinsi/Pusat	Periode pelaksanaan rapat-rapat koordinasi pmda/Muspida	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	625,000,000	APBK	-	12 Bulan	1,010,229,000	Setdako
16.014.	Koordinasi Pimpinan Daerah/Kecamatan dan Gampong	Periode rapat-rapat koordinasi Pmda/Muspida	Kota Lhokseumawe	3 kali	146,450,000	APBK	-	12 Bulan	0	Setdako
16.015.	Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI)	periode Keikutsertaan kegiatan APEKSI	Kota Lhokseumawe	2 kali	363,000,000	APBK	-	3 Kegiatan	363,000,000	Setdako
16.016.	Pemantapan Pemerintah Daerah dan Kecamatan	terkoordinasinya penyelenggaraan pemerintah daerah dan kecamatan	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	134,200,000	APBK	-	12 Bulan	120,789,900	Setdako
16.017.	Pendukung Kinerja Kepala Daerah	Periode pendukung kinerja kepala daerah	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	115,000,000	APBK	-	12 Bulan	126,500,000	Setdako
17	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Cakupan Informasi publik secara elektronik	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	1,474,965,540	APBK	-	12 Bulan	4,237,829,684	Setdako
17.004.	Pelayanan LPSE	Periode pelayanan LPSE	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	233,374,140	APBK	-	12 Bulan	2,774,645,434	Setdako
17.005.	Pelayanan LPSE Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)	Periode pelayanan LPSE SKPD	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	78,991,400	APBK	-	12 Bulan	77,000,000	Setdako
17.007.	Workshop Manajemen Resiko Dalam Proses Pemilihan Penyediaan Barang/Jasa	Jumlah pelaksanaan workshop	Kota Lhokseumawe	1 kali	52,500,000	APBK	-	3 Kali	165,074,250	Setdako
17.008.	Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	Periode Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	475,000,000	APBK	-	100 Paket	522,500,000	Setdako
17.009.	Pelaksanaan Riset dan Analisis Pasar Barang/Jasa	Terlaksananya riset dan analisis pasar barang/jasa	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	40,000,000	APBK	-	12 Bulan	44,000,000	Setdako
17.010.	Penyusunan dan Pengelolaan Katalog Elektronik Lokal/Sektoral	Periode penyusunan dan pengelolaan elektronik lokal/sektoral	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	119,000,000	APBK	-	12 Bulan	130,900,000	Setdako
17.011.	Pengembangan Sistem Informasi UKPBJ	periode pengembangan sistem informasi UKPBJ	Kota Lhokseumawe	12 bulan	60,000,000	APBK	-	1 Kegiatan	66,000,000	Setdako
17.012.	Bimtek/Pendampingan/Konsultasi Proses Pengadaan Barang/Jasa	jumlah peserta	Kota Lhokseumawe	50 orang	323,000,000	APBK	-	3 Kegiatan	355,300,000	Setdako
17.013.	Bimtek/Pendampingan/Konsultasi Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa	jumlah peserta	Kota Lhokseumawe	50 orang	52,400,000	APBK	-	2 Kegiatan	57,640,000	Setdako
17.014.	Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Melalui Mediasi	Periode Penyelesaian Sengketa Kontrak Melalui Mediasi	Kota Lhokseumawe	3 kali	40,700,000	APBK	-	1 Kegiatan	44,770,000	Setdako
25	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah				299,998,550	APBK	-		0	Setdako

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2020			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		OPD Penanggung jawab
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25.008.	Analisa BLUD di Pemko Kota Lhokseumawe	Jumlah Laporan Analisa Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Pemerintah Kota Lhokseumawe	Kota Lhokseumawe	20 Laporan	299,998,550	APBK	-		0	Setdako
26	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Cakupan produk hukum daerah yang difasilitasi	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	2,707,889,000	APBK	-	12 Bulan	2,891,923,000	Setdako
26.002.	Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan	Jumlah rancangan Qanun yang disusun	Kota Lhokseumawe	15 Raqan	28,500,000	APBK	-	14 Raqan	28,800,000	Setdako
26.005.	Publikasi peraturan perundang-undangan	Terselenggaranya Program Kegiatan Sosialisasi Peraturan	Kota Lhokseumawe	5 Jenis	189,550,000	APBK	-	5 Jenis	208,560,000	Setdako
26.006.	Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan peundang-undangan daerah	Lahirnya Naskah Akademis, Pra Rancangan	Kota Lhokseumawe	8 Raqan	584,040,000	APBK	-	20 Raqan	642,444,000	Setdako
26.011.	Bina Kadarkum	Jumlah Pelaksanaan Bina Kadarkum	Kota Lhokseumawe	3 kali	149,981,000	APBK	-	2 Kali	165,000,000	Setdako
26.018.	Penataan Administrasi Persuratan	Periode penataan arsip/dokumenpersuratan setda Kota Lhokseumawe	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	59,165,000	APBK	-	12 Bulan	36,300,000	Setdako
26.022.	Peningkatan Kapasitas Staf Ahli	Jumlah staf ahli Kota Lhokseumawe	Kota Lhokseumawe	3 Orang	89,540,000	APBK	-	3 orang	98,494,000	Setdako
26.025.	Penyusunan dan Penyempurnaan Draft Rancangan Qanun Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota	Penyusunan dan Penyempurnaan Draf Rancangan Qanun Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota	Kota Lhokseumawe	20 Perda	124,867,000	APBK	-	20 Perda / Perkada	90,750,000	Setdako
26.028.	Sosialisasi Qanun Kota Lhokseumawe	Periode sosialisasikan Qanun serta Undang-undang Kota Lhokseumawe Kepada Masyarakat	Kota Lhokseumawe	2 Kali	100,000,000	APBK	-		100,000,000	Setdako
26.029.	Sosialisasi dan Penyusunan Roadmap Reformasi Birokrasi Kota	Jumlah Dokumen Roamap reformasi Birokrasi Kota Lhokseumawe	Kota Lhokseumawe	1 Dokumen	89,250,000	APBK	-	1 Dokumen	98,175,000	Setdako
26.030.	Penanganan Perkara Ligitasi dan Non Ligitasi Pemerintah Kota Lhokseumawe	Jumlah Fasilitas Advokasi Hukum	Kota Lhokseumawe	7 Perkara	792,800,000	APBK	-	6 Perkara	872,080,000	Setdako
26.031.	Pengelola jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	Kota Lhokseumawe	1 Kegiatan	32,990,000	APBK	-	12 Bulan	36,960,000	Setdako
26.035.	Sosialisasi Hak Azasi Manusia (HAM)	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi HAM	Kota Lhokseumawe	3 Kali	149,981,000	APBK	-	2 Kali	165,000,000	Setdako
26.036.	Legal Drafting	Terpahaminya Peraturan Perundang-undangan	Kota Lhokseumawe	1 Kali	50,000,000	APBK	-	1 Kali	55,000,000	Setdako
26.037.	Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Qanun Kota Lhokseumawe	Jumlah rapat RPDU	Kota Lhokseumawe	4 Kali	100,000,000	APBK	-	4 Kali	110,000,000	Setdako
26.038.	Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota Lhokseumawe Tentang Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe	Lahirnya Peraturan Walikota tentang Produk Hukum dsi Lingkungan Kota Lhokseumawe	Kota Lhokseumawe	1 Kali	40,000,000	APBK	-	1 Kali	44,000,000	Setdako
26.039.	Pembahasan Rancangan Peraturan Walikota Lhokseumawe di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe	Lahirnya Peraturan Walikota Lhokseumawe	Kota Lhokseumawe	2 kali	127,225,000	APBK	-	2 kali	140,360,000	Setdako
27	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Cakupan penyelesaian tapal batas daerah	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	56,398,556,418	APBK	-	12 Bulan	43,070,313,396	Setdako

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2020			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		OPD Penanggung jawab
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27.003.	Upaya Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar Daerah	jumlah tapal batas wilayah antar daerah	Kota Lhokseumawe	300 Unit	300,400,000	APBK	-	300 Unit	220,000,000	Setdako
27.005.	Pengadaan / Pembebasan Tanah		Kota Lhokseumawe		53,233,100,000	APBK	-	7 Bidang/pe rsil	38,703,500,000	Setdako
27.010.	Verifikasi Hasil Pilkades dan Pemberian Kompensasi Keuchik yang Berakhir Masa Jabatan	Periode Pemilihan Keuchik	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	105,800,000	APBK	-	12 Bulan	1,197,900,000	Setdako
27.013.	Pelatihan Peningkatan Kinerja Pemerintahan Gampong dan Penyusunan Data Base Gampong	Jumlah peserta Peningkatan Kinerja Pemerintahan Gampong dan Penyusunan Data Base Gampong	Kota Lhokseumawe	150 peserta	79,400,000	APBK	-	-	0	Setdako
27.015.	Pemberdayaan Pemerintahan	Jumlah laporan pemberdaya	Kota Lhokseumawe	5 laporan	300,000,000	APBK	-	5 laporan	399,300,000	Setdako
27.016.	Pendataan dan Penamaan Rupabumi Wilayah Administrasi Kota Lhokseumawe	jumlah dokumen rupabumi wilayah administrasi Kota Lhokseumawe	Kota Lhokseumawe	1 Dokumen	151,250,000	APBK	-	1 Dokumen	166,375,000	Setdako
27.018.	Pemberian Pelayanan Kesehatan Untuk Mukim	periode pelayanan asuransi mukim	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	33,275,000	APBK	-	12 Bulan	36,602,500	Setdako
27.020.	Penyelenggaraan HUT OTDA dan Pendukung Resepsi Kenegaraan	Jumlah Kegiatan HUT OTDA	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	134,550,000	APBK	-	12 Bulan	87,348,206	Setdako
27.021.	Penataan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan, Kemukiman dan Gampong	periode penataan penyelenggaraan pemerintahan	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	120,879,000	APBK	-	12 Bulan	132,966,900	Setdako
27.025.	Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar Kecamatan dan Gampong	Jumlah data base pertanahan	Kota Lhokseumawe	6 Dokumen	266,200,000	APBK	-	6 Bidang/pe rsil	292,820,000	Setdako
27.026.	Rapat Koordinasi Pimpinan Tingkat Kemukiman dan Gampong	periode pelaksanaan rapat	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	72,600,000	APBK	-	12 Bulan	79,860,000	Setdako
27.027.	Penyelesaian Konflik Pertanahan Dalam Wilayah Kota Lhokseumawe	Jumlah konflik yang ditangani	Kota Lhokseumawe	7 Kasus	161,547,780	APBK	-	7 Kasus	202,950,000	Setdako
27.030.	Pemekaran Kecamatan dan Gampong Pemerintah Kota Lhokseumawe	Periode penataan daerah kecamatan dan gampong	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	186,993,400	APBK	-	12 Bulan	205,692,740	Setdako
27.031.	Penyelenggaraan Pendukung Kegiatan Saweu Gampong	Periode Kagiatan Pendukung	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	572,995,500	APBK	-	12 Bulan	630,295,050	Setdako
27.032.	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Mukim dan Gampong	periode pelaksanaan monitoring	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	60,500,000	APBK	-	12 Bulan	66,550,000	Setdako
27.036.		Periode penyerahan SK remisi oleh walikota pada lembaga	Kota Lhokseumawe	1 kali	323,065,738	APBK	-	1 kali	483,153,000	Setdako
27.037.	Pembinaan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN) di wilayah Kecamatan	Periode Pembinaan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN) di wilayah Kecamatan	Kota Lhokseumawe	4 kecamatan	139,400,000	APBK	-	4 kecamatan	0	Setdako
27.039.	Percepatan Pengalihan Aset P3D dan P2D Kota Lhokseumawe	Periode penyerahan P3D dan P2D urusan pemerintahan Kota Lhokseumawe	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	156,600,000	APBK	-	12 Bulan	165,000,000	Setdako
29	Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama	Cakupan pelaksanaan kegiatan keagamaan	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	1,155,900,000	APBK	-	12 Bulan	1,056,605,000	Setdako

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2020			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		OPD Penanggung jawab
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29.004.	Pelaksanaan Pengajian Gampong di Wilayah Pemerintah Kota Lhokseumawe	periode peningkatan kualitas ibadah masyarakat	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	1,155,900,000	APBK	-	12 Bulan	1,056,605,000	Setdako
30	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekonomi Pembangunan	Cakupan kebijakan ekonomi yang terintegrasi	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	1,262,968,940	APBK	-	12 Bulan	2,436,139,241	Setdako
30.001.	Penyusunan Laporan pengendalian pembangunan program dan kegiatan fisik/proyek	Jumlah laporan yang dihasilkan	Kota Lhokseumawe	4 Dokumen	31,480,000	APBK	-	4 Dokumen	34,650,000	Setdako
30.003.	Penyusunan Mekanisme Perencanaan, Pelaksanaan, Pembiayaan, Pengawasan, Pelaporan dan Pembinaan Kegiatan Yang Dibiayai dengan APBK	Jumlah buku mekanisme perencanaan, pelaksanaan, pembiayaan, pengawasan, pelaporan dan pembinaan kegiatan yang dibiayai dengan APBK	Kota Lhokseumawe	100 Buku	52,578,840	APBK	-	100 Buku	57,924,515	Setdako
30.004.	Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	periode pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	146,319,900	APBK	-	12 Bulan	1,611,755,948	Setdako
30.015.	Fasilitasi Perekonomian dan Pengendalian Inflasi Daerah	Terlaksananya Kegiatan Terkait dengan Inflasi Daerah dan Dokumen Roadmap TPID (2019-2021)	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	324,000,000	APBK	-	12 Bulan	324,000,000	Setdako
30.016.	Pengendalian, Pengawasan, Monitoring dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Daerah	periode pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	82,306,800	APBK	-	12 Bulan	90,558,778	Setdako
30.017.	Koordinasi Fasilitasi BUMD dan BUMDes dalam wilayah Kota Lhokseumawe	Periode Fasilitasi BUMD dan BUMDes	Kota Lhokseumawe	4 Kali	317,250,000	APBK	-	4 Kali	317,250,000	Setdako
30.018.	Pemetaan Zona Ekonomi Eksklusif	Jumlah Dokumen	Kota Lhokseumawe	1 Dokumen	191,016,700	APBK	-		0	Setdako
30.020.	Fasilitasi Sarana Produksi	Periode Fasilitasi Sarana Produksi	Kota Lhokseumawe	4 Kali	118,016,700	APBK	-		0	Setdako
31	Program Peningkatan Bidang Keistimewaan Aceh dan Kesra	Cakupan pelaksanaan kegiatan keistimewaan Aceh	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	1,774,039,000	APBK	-	12 Bulan	678,370,000	Setdako
31.006.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Musholla Setdako Kota Lhokseumawe	periode peningkatan sarana dan prasarana mushalla setdako Kota Lhokseumawe	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	30,000,000	APBK	-	12 Bulan	33,000,000	Setdako
31.010.	Pembinaan Marching Band Kota Lhokseumawe	periode pembinaan marching band Kota Lhokseumawe	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	1,331,515,000	APBK	-	12 Bulan	165,000,000	Setdako
31.014.	Kegiatan Ceramah Rutin Jum'at	periode pelaksanaan ceramah rutin jumat	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	58,850,000	APBK	-	12 Bulan	56,870,000	Setdako
31.016.	Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah	Jumlah Pelatihan mengenai UKS di Kota Lhokseumawe	Kota Lhokseumawe	2 Kali	185,001,000	APBK	-	2 Kali	203,500,000	Setdako
31.017.	Pembinaan dan Pengembangan Kegiatan Kreatifitas Mahasiswa	Periode pemberian Bantuan Pengembangan Kegiatan Kreatifitas Mahasiswa	Kota Lhokseumawe	1 kali	50,000,000	APBK	-	1 Kegiatan	55,000,000	Setdako
31.018.	Pembinaan dan Pelatihan Tenaga Dai	Jumlah peserta Pelatihan Tenaga Dai	Kota Lhokseumawe	100 Orang	43,873,000	APBK	-	1 Kegiatan	82,500,000	Setdako
31.019.	Pembinaan IPHI Kota Lhokseumawe	Periode Pembinaan IPHI Kota Lhokseumawe	Kota Lhokseumawe	12 bulan	74,800,000	APBK	-	1 Kegiatan	82,500,000	Setdako
33	Program Peningkatan Fasilitas Sarana dan Prasarana Umum	Cakupan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	65,360,000	APBK	-	12 Bulan	71,500,000	Setdako

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2020			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		OPD Penanggung jawab
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33.006.	Pelestarian TMP Blang Panyang	periode operasional TMP Blang Panyang	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	65,360,000	APBK	-	12 Bulan	71,500,000	Setdako
34	Program Peringatan Hari-Hari Besar	Cakupan pelaksanaan Hari Besar Nasional dan Daerah	Kota Lhokseumawe	8 Hari Besar	2,357,615,500	APBK	-	8 Hari Besar	2,473,632,700	Setdako
34.002.	Peringatan Hari-Hari Besar Nasional	Jumlah peringatan hari besar nasional	Kota Lhokseumawe	8 Hari	246,600,000	APBK	-	8 Hari	260,216,000	Setdako
34.004.	Pelaksanaan Rekrutmen Paskibra	periode pelaksanaan rekrutmen paskibraka	Kota Lhokseumawe	1 Kali	68,125,000	APBK	-	1 Kali	60,500,000	Setdako
34.005.	Perlengkapan dan Pembinaan Paskibra	Jumlah anggota paskibraka	Kota Lhokseumawe	35 orang	572,350,000	APBK	-	35 Orang	560,780,000	Setdako
34.007.	Peringatan HUT KORPRI di Kota Lhokseumawe	Upacara Peringatan HUT KORPRI	Kota Lhokseumawe	1 Kali	62,880,000	APBK	-	1 Kali	47,516,700	Setdako
34.009.	Pelaksanaan Apel Gabungan Pemerintah Kota Lhokseumawe	Periode Terlaksananya Apel gabungan	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	76,265,000	APBK	-	12 Bulan	26,620,000	Setdako
34.010.	Peningkatan Pelayanan Kunjungan Tamu Ke Kota Lhokseumawe	Periode Kunjungan tamu ke Kota Lhokseumawe	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	380,000,000	APBK	-	12 Bulan	418,000,000	Setdako
34.012.	Pelaksanaan peringatan hari - hari besar Nasional	pelaksanaan peringatan hari kemerdekaan RI	Kota Lhokseumawe	1 Kali	418,850,000	APBK	-	1 Kali	660,000,000	Setdako
34.013.	Anjongsana Ramadhan	terlaksananya anjongsana ramadhan 2018-2022	Kota Lhokseumawe	1 Kali	532,545,500	APBK	-	1 Kali	440,000,000	Setdako
	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat				21,580,386,498	APBK	-		22,843,469,878	Setwan
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang				21,580,386,498	APBK	-		22,843,469,878	Setwan
4.01.	Administrasi Pemerintahan				21,580,386,498	APBK	-		22,843,469,878	Setwan
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kota Lhokseumawe	100 %	8,893,686,640	APBK	-	100 %	9,008,471,640	Setwan
01.001.	Penyediaan jasa surat menyurat	Periode Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	11,700,000	APBK	-	12 Bulan	11,700,000	Setwan
01.002.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Periode Penyediaan Penerangan dan Alat Komunikasi	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	416,000,000	APBK	-	12 Bulan	416,000,000	Setwan
01.003.	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Periode Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	42,000,000	APBK	-	12 Bulan	42,000,000	Setwan
01.007.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Pejabat Pengelolaan Keuangan	Kota Lhokseumawe	420 OB	181,189,600	APBK	-	420 OB	181,189,600	Setwan
01.010.	Penyediaan alat tulis kantor	Periode Tersedianya Alat Tulis Kantor	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	247,189,700	APBK	-	12 Bulan	232,989,700	Setwan
01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Periode penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	358,880,000	APBK	-	12 Bulan	358,880,000	Setwan
01.013.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Periode Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	183,037,750	APBK	-	12 Bulan	182,137,750	Setwan
01.014.	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Lhokseumawe	2 Jenis	47,500,000	APBK	-	2 Jenis	30,000,000	Setwan
01.015.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Lhokseumawe	1020 Eks	111,900,000	APBK	-	1020 Eks	111,900,000	Setwan
01.017.	Penyediaan makanan dan minuman	Periode Makanan dan Minuman	Kota Lhokseumawe	11 Bulan	1,472,990,000	APBK	-	11 Bulan	1,458,375,000	Setwan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2020			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		OPD Penanggung jawab
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01.018.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Periode Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Aceh/ Luar Aceh	12 Bulan	2,500,000,000	APBK	-	12 Bulan	2,500,000,000	Setwan
01.020.	Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap	Jumlah Jasa Pegawai Tidak Tetap	Kota Lhokseumawe	3252 OB	3,321,299,590	APBK	-	3252 OB	3,483,299,590	Setwan
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan Prasarana Aparatur	Kota Lhokseumawe	100 %	4,071,457,508	APBK	-	100 %	3,976,110,566	Setwan
02.005.	Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kota Lhokseumawe	13 Unit	480,500,000	APBK	-	1 Unit	125,000,000	Setwan
02.011.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Lhokseumawe	13 Jenis	1,828,272,750	APBK	-	13 Jenis	1,439,310,566	Setwan
02.022.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Periode Pemeliharaan Rutin/ berkala Gedung Kantor	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	687,589,758	APBK	-	12 Bulan	400,000,000	Setwan
02.023.	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah Mobil Jabatan yang terpelihara	Kota Lhokseumawe	48 UB	70,000,000	APBK	-	48 UB	70,000,000	Setwan
02.024.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara	Kota Lhokseumawe	96 UB	396,000,000	APBK	-	96 UB	450,800,000	Setwan
02.030.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Periode Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	120,000,000	APBK	-	12 Bulan	120,000,000	Setwan
02.031.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Listrik	Periode Pemeliharaan Rutin/ berkala Jaringan Listrik	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	33,595,000	APBK	-	12 Bulan	37,500,000	Setwan
02.033.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Telepon	Periode Pemeliharaan Rutin/ berkala Jaringan Telepon	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	17,500,000	APBK	-	12 Bulan	17,500,000	Setwan
02.034.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman, Tempat Parkir dan Halaman Kantor	Periode Pemeliharaan Rutin/ berkala Taman, Tempat Parkir dan Halaman Kantor	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	148,000,000	APBK	-	12 Bulan	28,000,000	Setwan
02.035.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Air Minum	Periode Pemeliharaan Rutin/berkala Jaringan Air minum	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	26,000,000	APBK	-	12 Bulan	28,000,000	Setwan
02.042.	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah Gedung Kantor Yang Terpelihara	Kota Lhokseumawe	1 Gedung	99,000,000	APBK	-	1 Gedung	510,000,000	Setwan
02.045.	Pembangunan Fasilitas Gedung Kantor	Jumlah Fasilitas gedung kantor yang dibangun	Kota Lhokseumawe	1 Jenis	165,000,000	APBK	-	1 Jenis	750,000,000	Setwan
03.	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase tingkat disiplin aparatur	Kota Lhokseumawe	100 %	394,778,500	APBK	-	100 %	891,147,446	Setwan
03.002.	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas DPRK dan Setwan	Kota Lhokseumawe	461 Pasang	344,458,500	APBK	-	461 Pasang	612,245,076	Setwan
03.005.	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian Khusus Hari - Hari tertentu DPRK dan Setwan	Kota Lhokseumawe	382 Pasang	50,320,000	APBK	-	382 Pasang	278,902,370	Setwan
05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan kegiatan pendidikan dan pelatihan formal yang diikuti	Kota Lhokseumawe	5 Keg	437,920,000	APBK	-	5 Keg	468,512,000	Setwan
05.001.	Pendidikan dan pelatihan formal	Periode pendidikan dan pelatihan formal	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	437,920,000	APBK	-	12 Bulan	468,512,000	Setwan
07.	Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja	Cakupan penyediaan dokumen perencanaan SKPK	Kota Lhokseumawe	1 Dokumen	1,750,000	APBK	-	1 Dokumen	1,750,000	Setwan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2020			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		OPD Penanggung jawab
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
07.002.	Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Buku RENJA	Kota Lhokseumawe	20 Buku	1,750,000	APBK	-	20 Buku	1,750,000	Setwan
15	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Persentase Qanun yang ditetapkan, Persentase anggota DPRK yang menialankan Tugas	Kota Lhokseumawe	100% 100%	7,780,793,850	APBK	-	100% 100%	8,497,478,226	Setwan
15.001.	Pembahasan rancangan peraturan daerah	Periode Pembahasan rancangan Qanun Inisiatif DPRK	Kota Lhokseumawe	15 Raqan	1,120,993,500	APBK	-	15 Raqan	1,505,742,000	Setwan
15.003.	Rapat-rapat alat kelengkapan dewan	Periode pelaksanaan Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	2,120,511,210	APBK	-	12 Bulan	3,010,511,210	Setwan
15.004.	Rapat-rapat paripurna	Periode Rapat-Rapat Paripurna DPRK	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	82,920,000	APBK	-	12 Bulan	69,200,000	Setwan
15.005.	Kegiatan Reses	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban	Kota Lhokseumawe	3 Laporan	1,060,264,000	APBK	-	3 Laporan	1,171,875,000	Setwan
15.007.	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRK Yang Mengikuti Diklat, BinteK dan Legal Drafting	Kota Lhokseumawe	25 Dewan	1,653,548,500	APBK	-	25 Dewan	800,000,000	Setwan
15.009.	Kerjasama Informasi DPRK dengan Mass Media	Jumlah Media Publikasi	Kota Lhokseumawe	2 Media	537,400,000	APBK	-	2 Media	587,400,000	Setwan
15.010.	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi & Informasi DPRK Kota Lhokseumawe	Periode Informasi dan Upgrade Berita pada Website DPRK	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	76,929,000	APBK	-	12 Bulan	111,129,000	Setwan
15.011.	Penyediaan Tenaga Ahli dan Advokasi	Jumlah Tenaga Ahli dan Advokasi	Kota Lhokseumawe	96 OB	605,000,000	APBK	-	72 OB	610,000,000	Setwan
15.012.	Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRK Kota Lhokseumawe	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan PAW	Kota Lhokseumawe	3 Kali	125,400,000	APBK	-	3 Kali	76,400,000	Setwan
15.013.	Rapat Paripurna Istimewa HUT Kota Lhokseumawe	Periode Kegiatan Rapat Paripurna Istimewa HUT Kota Lhokseumawe	Kota Lhokseumawe	1 Kali	40,810,000	APBK	-	1 Kali	45,000,000	Setwan
15.021.	Buletin Parlemenaria	Jumlah terbitan Informasi dan Berita Parlemenaria	Kota Lhokseumawe	10 Edisi	202,306,750	APBK	-	10 Edisi	338,797,750	Setwan
15.027.	Rapat-Rapat Fraksi	Jumlah Laporan Rapat Fraksi	Kota Lhokseumawe	108 Laporan	29,710,890	APBK	-	108 Laporan	46,423,266	Setwan
15.030.	Pemeriksaan Kesehatan (Medical Check Up) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRK	Terlaksananya Pemeriksaan Kesehatan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRK	Kota Lhokseumawe	25 Orang	125,000,000	APBK	-	25 Orang	125,000,000	Setwan
	Kecamatan Banda Sakti				1,030,653,700	APBK	-		902,592,136	Kec. Banda Sakti
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang				1,030,653,700	APBK	-		902,592,136	Kec. Banda Sakti
4.01.	Administrasi Pemerintahan				1,030,653,700	APBK	-		902,592,136	Kec. Banda Sakti
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Kota Lhokseumawe	100%	471,856,700	APBK	-	100%	519,012,802	Kec. Banda Sakti
01.001.	Penyediaan jasa surat menyurat	Periode Penyediaan Jasa Surat menyurat	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	2,001,000	APBK	-	12 Bulan	3,000,000	Kec. Banda Sakti
01.002.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Periode Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	57,000,000	APBK	-	12 Bulan	59,400,000	Kec. Banda Sakti

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2020			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		OPD Penanggung jawab
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01.007.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Pejabat Pengelola Keuangan SKPD (10 Org x 12 Bulan)	Kota Lhokseumawe	120 OB	53,120,000	APBK	-	120 OB	55,520,000	Kec. Banda Sakti
01.010.	Penyediaan alat tulis kantor	Periode Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	20,824,000	APBK	-	12 Bulan	24,000,000	Kec. Banda Sakti
01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Periode Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	9,960,700	APBK	-	12 Bulan	15,437,752	Kec. Banda Sakti
01.013.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Periode Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	5,000,000	APBK	-	12 Bulan	9,500,000	Kec. Banda Sakti
01.015.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Periode Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan (1 eks x 365 Hari)	Kota Lhokseumawe	365 Eks	1,200,000	APBK	-	730 Eks	2,400,000	Kec. Banda Sakti
01.017.	Penyediaan makanan dan minuman	Periode Penyediaan Makanan dan Minuman	Kota Lhokseumawe	11 Bulan	5,000,000	APBK	-	11 Bulan	10,000,000	Kec. Banda Sakti
01.018.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Periode Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	40,000,000	APBK	-	12 Bulan	60,000,000	Kec. Banda Sakti
01.020.	Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap	Jumlah Jasa Pegawai Tidak Tetap (45 Orang x 12 Bulan)	Kota Lhokseumawe	540 OB	277,751,000	APBK	-	576 OB	279,755,050	Kec. Banda Sakti
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	Kota Lhokseumawe	100%	75,987,000	APBK	-	100%	46,185,700	Kec. Banda Sakti
02.011.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Lhokseumawe	5 Unit	41,000,000	APBK	-	7 Jenis	10,000,000	Kec. Banda Sakti
02.022.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Gedung Kantor yang terpelihara	Kota Lhokseumawe	1 Unit	8,000,000	APBK	-	1 Unit	8,000,000	Kec. Banda Sakti
02.023.	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Periode Pemeliharaan Mobil Jabatan	Kota Lhokseumawe	12 UB	23,700,000	APBK	-	12 UB	23,700,000	Kec. Banda Sakti
02.030.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Periode Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	3,287,000	APBK	-	12 Bulan	4,485,700	Kec. Banda Sakti
03.	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase tingkat disiplin aparatur	Kota Lhokseumawe	100%	60,000,000	APBK	-	100%	50,000,000	Kec. Banda Sakti
03.002.	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Khusus Hari-Hari Tertentu	Kota Lhokseumawe	150 Pasang	60,000,000	APBK	-	75 Pasang	50,000,000	Kec. Banda Sakti
07.	Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja	Cakupan Penyediaan Dokumen Perencanaan SKPK	Kota Lhokseumawe	1 Dokumen	1,100,000	APBK	-	1 Dokumen	1,210,000	Kec. Banda Sakti
07.002.	Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Buku Renja SKPD	Kota Lhokseumawe	10 Buku	1,100,000	APBK	-	10 Buku	1,210,000	Kec. Banda Sakti
09.	Program Pembinaan Aparatur dan Pemerintahan Desa/Kelurahan/Kecamatan	Cakupan koordinasi pemerintahan Kecamatan, Mukim, Gampong	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	138,100,000	APBK	-	12 Bulan	121,139,634	Kec. Banda Sakti
09.001.	Penyediaan Jasa Aparatur Pemerintahan Mukim/Desa/Kelurahan	Jumlah jasa aparatur pemerintahan mukim/desa/kelurahan (12 Orang x 12 Bulan)	Kota Lhokseumawe	144 OB	138,100,000	APBK	-	144 OB	121,139,634	Kec. Banda Sakti
28	Program Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan dan Pembinaan Masyarakat Pemerintahan Desa	Cakupan pelaksanaan kegiatan Syiar Islam, Cakupan pelaksanaan Saweu Gampong	Kota Lhokseumawe	2 Keg 18 Gp	283,610,000	APBK	-	2 Keg 18 Gp	165,044,000	Kec. Banda Sakti

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2020			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		OPD Penanggung jawab
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28.001.	Penyelenggaraan Kegiatan Masyarakat Desa/Kelurahan Bidang Agama, Sosial dan Budaya (MTQ, HUT RI, DII)	Jumlah hari pelaksanaan MTQ	Kota Lhokseumawe	5 Malam	117,610,000	APBK	-	5 Malam	89,044,000	Kec. Banda Sakti
28.002.	Kegiatan Saweu Gampong	Periode pelaksanaan Saweu Gampong	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	10,000,000	APBK	-	12 Bulan	18,000,000	Kec. Banda Sakti
28.003.	Penyelenggaraan Kegiatan Masyarakat Desa/Kel. Bidang Pemuda dan Olah Raga	Periode kegiatan masyarakat desa/kel bidang pemuda dan olahraga	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	8,000,000	APBK	-	12 Bulan	8,000,000	Kec. Banda Sakti
28.004.	Peningkatan Pelatihan/Ketrampilan dan Pembinaan PKK Gampong	Periode pelatihan/ketrampilan dan pembinaan pkk gampong	Kota Lhokseumawe	20 OB	10,000,000	APBK	-	12 Bulan	10,000,000	Kec. Banda Sakti
28.005.	Peningkatan Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat di Lingkungan Desa/Gampong	Periode kegiatan ketertiban ketentraman masyarakat	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	8,000,000	APBK	-	12 Bulan	10,000,000	Kec. Banda Sakti
28.015.	Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan	Periode Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan	Kota Lhokseumawe	1 Hari	20,000,000	APBK	-	1 Hari	20,000,000	Kec. Banda Sakti
28.016.	Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APB Desa	Jumlah evaluasi rancangan peraturan desa tentang apb desa	Kota Lhokseumawe	18 Gampong	10,000,000	APBK	-	18 Gampong	10,000,000	Kec. Banda Sakti
28.017.	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Mukim dan Gampong	Periode Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Mukim dan Gampong	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	100,000,000	APBK	-	12 Bulan	0	Kec. Banda Sakti
	Kecamatan Blang Mangat				1,770,729,908	APBK	-		935,098,626	Kec. Blang Mangat
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang				1,770,729,908	APBK	-		935,098,626	Kec. Blang Mangat
4.01.	Administrasi Pemerintahan				1,770,729,908	APBK	-		935,098,626	Kec. Blang Mangat
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kota Lhokseumawe	100%	554,072,505	APBK	-	100%	448,774,337	Kec. Blang Mangat
01.001.	Penyediaan jasa surat menyurat	Periode Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Lhokseumawe	12 Bln	1,320,000	APBK	-	12 Bln	1,530,000	Kec. Blang Mangat
01.002.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Periode Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Lhokseumawe	12 Bln	78,684,000	APBK	-	12 Bln	50,448,165	Kec. Blang Mangat
01.007.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Pejabat Pengelola Keuangan SKPD (9 Org x 12 Bulan)	Kota Lhokseumawe	120 OB	56,909,680	APBK	-	120 OB	47,309,680	Kec. Blang Mangat
01.010.	Penyediaan alat tulis kantor	Periode Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kota Lhokseumawe	12 Bln	25,000,000	APBK	-	12 Bln	8,000,000	Kec. Blang Mangat
01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Periode Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Lhokseumawe	12 Bln	11,000,000	APBK	-	12 Bln	10,000,000	Kec. Blang Mangat
01.013.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Periode Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Lhokseumawe	12 Bln	2,000,000	APBK	-	12 Bln	3,267,667	Kec. Blang Mangat
01.015.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (1 Eks x 365 Hari)	Kota Lhokseumawe	365 Eks	1,140,000	APBK	-	365 Eks	1,140,000	Kec. Blang Mangat
01.017.	Penyediaan makanan dan minuman	Periode Penyediaan Makanan dan Minuman	Kota Lhokseumawe	11 Bln	8,440,000	APBK	-	11 Bln	7,500,000	Kec. Blang Mangat

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2020			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		OPD Penanggung jawab
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01.018.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Periode Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Kota Lhokseumawe	12 Bln	100,000,000	APBK	-	12 Bln	50,000,000	Kec. Blang Mangat
01.020.	Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap	Jumlah Jasa Pegawai Tidak tetap	Kota Lhokseumawe	636 Ob	269,578,825	APBK	-	636 Ob	269,578,825	Kec. Blang Mangat
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kota Lhokseumawe	100%	275,109,600	APBK	-	100%	46,265,560	Kec. Blang Mangat
02.011.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Lhokseumawe	17 Unit	178,000,000	APBK	-	25 Unit	16,505,560	Kec. Blang Mangat
02.023.	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan (1 Unit x 12 Bln)	Kota Lhokseumawe	12 UB	23,760,000	APBK	-	12 UB	23,760,000	Kec. Blang Mangat
02.030.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Periode Pemeliharaan Rutin / Bekala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Lhokseumawe	12 Bln	12,050,000	APBK	-	12 Bln	6,000,000	Kec. Blang Mangat
02.042.	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor	Kota Lhokseumawe	4 Unit	61,299,600	APBK	-	2 Unit	0	Kec. Blang Mangat
03.	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Tingkat Disiplin Aparatur	Kota Lhokseumawe	100%	75,000,000	APBK	-	100%	50,000,000	Kec. Blang Mangat
03.002.	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Hari-hari Tertentu	Kota Lhokseumawe	150 Pasang	75,000,000	APBK	-	80 Pasang	50,000,000	Kec. Blang Mangat
07.	Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja	Cakupan Penyediaan Dokumen Perencanaan SKPK	Kota Lhokseumawe	1 Dokumen	1,100,000	APBK	-	1 Dokumen	1,210,000	Kec. Blang Mangat
07.002.	Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Buku Renja SKPD	Kota Lhokseumawe	10 Buku	1,100,000	APBK	-	10 Buku	1,210,000	Kec. Blang Mangat
09.	Program Pembinaan Aparatur dan Pemerintahan Desa/Kelurahan/Kecamatan	Cakupan Koordinasi Pemerintahan Kecamatan, Mukim, Gampong	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	193,279,753	APBK	-	12 Bulan	141,107,729	Kec. Blang Mangat
09.001.	Penyediaan Jasa Aparatur Pemerintahan Mukim/Desa/Kelurahan	Jumlah Penyediaan Jasa Aparatur Pemerintah Mukim/Desa/Kelurahan (14 Orang x 12 Bln)	Kota Lhokseumawe	204 Ob	193,279,753	APBK	-	204 Ob	141,107,729	Kec. Blang Mangat
28	Program Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan dan Pembinaan Masyarakat Pemerintahan Desa	Cakupan Pelaksanaan Syiar Islam, Cakupan pelaksanaan Saweu Gampong	Kota Lhokseumawe	100% 22 Gp	672,168,050	APBK	-	100% 22 Gp	247,741,000	Kec. Blang Mangat
28.001.	Penyelenggaraan Kegiatan Masyarakat Desa/Kelurahan Bidang Agama, Sosial dan Budaya (MTQ, HUT RI, DII)	Jumlah Kegiatan MTQ	Kota Lhokseumawe	3 Kegiatan	358,325,400	APBK	-	1 Kegiatan	70,000,000	Kec. Blang Mangat
28.002.	Kegiatan Saweu Gampong	Periode Kegiatan Saweu Gampong	Kota Lhokseumawe	12 Bln	91,850,000	APBK	-	12 Bln	17,741,000	Kec. Blang Mangat
28.003.	Penyelenggaraan Kegiatan Masyarakat Desa/Kel. Bidang Pemuda dan Olah Raga	Periode Penyelenggaraan Kegiatan Masyarakat Desa/Kel.Bdg Pemuda dan Olah Raga	Kota Lhokseumawe	12 Bln	10,000,000	APBK	-	12 Bln	10,000,000	Kec. Blang Mangat
28.004.	Peningkatan Pelatihan/Ketrampilan dan Pembinaan PKK Gampong	Periode Pembinaan Kegiatan PKK	Kota Lhokseumawe	12 Bln	20,760,000	APBK	-	12 Bln	10,000,000	Kec. Blang Mangat

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2020			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		OPD Penanggung jawab
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28.005.	Peningkatan Keterlibatan dan Ketentraman Masyarakat di Lingkungan Desa/Gampong	Periode Keterlibatan dalam Wilayah Kecamatan Blang Mangat	Kota Lhokseumawe	12 Bln	23,160,000	APBK	-	12 Bln	10,000,000	Kec. Blang Mangat
28.015.	Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan	Periode Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan	Kota Lhokseumawe	1 Hari	25,152,650	APBK	-	1 Hari	20,000,000	Kec. Blang Mangat
28.016.	Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APB Desa	Jumlah Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APB Desa	Kota Lhokseumawe	22 Gampong	42,920,000	APBK	-	22 Gampong	10,000,000	Kec. Blang Mangat
28.017.	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Mukim dan Gampong	Periode Monitoring dan Evaluasi Kecamatan	Kota Lhokseumawe	12 Bln	100,000,000	APBK	-	12 Bln	100,000,000	Kec. Blang Mangat
	Kecamatan Muara Satu				1,170,653,644	APBK	-		1,010,090,619	Kec. Muara Satu
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang				1,170,653,644	APBK	-		1,010,090,619	Kec. Muara Satu
4.01.	Administrasi Pemerintahan				1,170,653,644	APBK	-		1,010,090,619	Kec. Muara Satu
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kota Lhokseumawe	100%	490,095,375	APBK	-	100%	466,108,913	Kec. Muara Satu
01.001.	Penyediaan jasa surat menyurat	Periode Penyediaan benda pos dan paket pengiriman	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	2,100,000	APBK	-	12 Bulan	2,200,000	Kec. Muara Satu
01.002.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Periode Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air, dan Listrik	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	89,000,000	APBK	-	12 Bulan	90,000,000	Kec. Muara Satu
01.007.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Pejabat Pengelola Keuangan SKPD	Kota Lhokseumawe	72 OB	54,160,000	APBK	-	72 OB	45,000,000	Kec. Muara Satu
01.010.	Penyediaan alat tulis kantor	Periode Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	13,715,375	APBK	-	12 Bulan	17,988,913	Kec. Muara Satu
01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Periode Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	10,300,000	APBK	-	12 Bulan	24,000,000	Kec. Muara Satu
01.013.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Periode Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	7,200,000	APBK	-	12 Bulan	9,000,000	Kec. Muara Satu
01.015.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan (1 eks x 365 Hari)	Kota Lhokseumawe	365 Eks	1,140,000	APBK	-	365 Eks	1,140,000	Kec. Muara Satu
01.017.	Penyediaan makanan dan minuman	Periode Penyediaan Makanan dan Minuman	Kota Lhokseumawe	11 Bulan	5,500,000	APBK	-	11 Bulan	9,000,000	Kec. Muara Satu
01.018.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Periode Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah (Luar Kota Lhokseumawe)	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	55,000,000	APBK	-	12 Bulan	70,000,000	Kec. Muara Satu
01.020.	Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap	Jumlah Jasa Pegawai Tidak Tetap	Kota Lhokseumawe	588 OB	251,980,000	APBK	-	588 OB	197,780,000	Kec. Muara Satu
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kota Lhokseumawe	100%	108,845,294	APBK	-	100%	86,729,823	Kec. Muara Satu
02.011.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Lhokseumawe	10 Unit	55,000,000	APBK	-	10 Unit	29,800,000	Kec. Muara Satu
02.022.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Periode Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	8,000,000	APBK	-	12 Bulan	8,000,000	Kec. Muara Satu

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2020			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		OPD Penanggung jawab
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
02.023.	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan (1 Unit x 12 Bulan)	Kota Lhokseumawe	12 UB	25,845,294	APBK	-	12 UB	25,929,823	Kec. Muara Satu
02.030.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Periode Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	5,000,000	APBK	-	12 Bulan	8,000,000	Kec. Muara Satu
02.034.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman, Tempat Parkir dan Halaman Kantor	Periode Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman, Tempat Parkir dan Halaman Kantor	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	15,000,000	APBK	-	12 Bulan	15,000,000	Kec. Muara Satu
03.	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Tingkat Disiplin Aparatur	Kota Lhokseumawe	100%	50,000,000	APBK	-	100%	50,000,000	Kec. Muara Satu
03.002.	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Pegawai PNS dan Non PNS	Kota Lhokseumawe	62 Pasang	31,000,000	APBK	-	62 Pasang	31,000,000	Kec. Muara Satu
03.004.	Pengadaan pakaian KORPRI	Jumlah Pakaian KORPRI	Kota Lhokseumawe	62 Pasang	19,000,000	APBK	-	62 Pasang	19,000,000	Kec. Muara Satu
07.	Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja	Cakupan Penyediaan Dokumen Perencanaan SKPK	Kota Lhokseumawe	1 Dokumen	1,100,000	APBK	-	1 Dokumen	1,210,000	Kec. Muara Satu
07.002.	Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Buku RENJA SKPD	Kota Lhokseumawe	10 Buku	1,100,000	APBK	-	10 Buku	1,210,000	Kec. Muara Satu
09.	Program Pembinaan Aparatur dan Pemerintahan Desa/Kelurahan/Kecamatan	Cakupan Koordinasi Pemerintahan Kecamatan, Mukim, dan Gampong	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	190,572,975	APBK	-	12 Bulan	120,997,883	Kec. Muara Satu
09.001.	Penyediaan Jasa Aparatur Pemerintahan Mukim/Desa/Kelurahan	Periode penyediaan Jasa Aparatur Pemerintahan Mukim/Desa/Kelurahan	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	70,998,075	APBK	-	12 Bulan	72,997,883	Kec. Muara Satu
09.005.	Pelaksanaan Koordinasi Muspika	Periode Pelaksanaan Koordinasi Musyawaran Pimpinan Kecamatan	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	119,574,900	APBK	-	12 Bulan	48,000,000	Kec. Muara Satu
28	Program Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan dan Pembinaan Masyarakat Pemerintahan Desa	Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Syiar Islam; Cakupan Pelaksanaan Saweu Gampong; dan Cakupan Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan.	Kota Lhokseumawe	2 Keg; 11 Gpg; 1 Keg	330,040,000	APBK	-	2 Keg; 11 Gpg; 1 Keg	285,044,000	Kec. Muara Satu
28.001.	Penyelenggaraan Kegiatan Masyarakat Desa/Kelurahan Bidang Agama, Sosial dan Budaya (MTQ, HUT RI, DII)	Jumlah Peserta MTQ Tk. Kecamatan	Kota Lhokseumawe	100 Orang	191,817,900	APBK	-	100 Orang	120,000,000	Kec. Muara Satu
28.002.	Kegiatan Saweu Gampong	Periode Koordinasi Langsung Antara Camat dan Masyarakat	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	11,982,100	APBK	-	12 Bulan	15,544,000	Kec. Muara Satu
28.004.	Peningkatan Pelatihan/Ketrampilan dan Pembinaan PKK Gampong	Periode Pembinaan Kegiatan PKK Gampong	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	11,140,000	APBK	-	12 Bulan	14,000,000	Kec. Muara Satu
28.015.	Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan	Periode Musrenbang Tingkat Kecamatan	Kota Lhokseumawe	1 Hari	7,500,000	APBK	-	1 Hari	7,700,000	Kec. Muara Satu
28.016.	Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APB Desa	Jumlah Dokumen Rancangan APBDesa yang di Evaluasi	Kota Lhokseumawe	11 Dok RAPBDesa	7,600,000	APBK	-	11 Dok RAPBDesa	7,800,000	Kec. Muara Satu
28.017.	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Mukim dan Gampong	Periode Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Mukim dan Gampong	Kecamatan Muara Satu	12 Bulan	100,000,000	APBK	-	12 Bulan	120,000,000	Kec. Muara Satu

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2020			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		OPD Penanggung jawab
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Kecamatan Muara Dua				1,712,188,604	APBK	-		874,152,274	Kec. Muara Dua
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang				1,712,188,604	APBK	-		874,152,274	Kec. Muara Dua
4.01.	Administrasi Pemerintahan				1,712,188,604	APBK	-		874,152,274	Kec. Muara Dua
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kota Lhokseumawe	100 %	580,802,404	APBK	-	100 %	441,792,899	Kec. Muara Dua
01.001.	Penyediaan jasa surat menyurat	Periode Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	1,200,000	APBK	-	12 Bulan	1,500,000	Kec. Muara Dua
01.002.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Periode Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	77,165,829	APBK	-	12 Bulan	65,344,851	Kec. Muara Dua
01.007.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Pejabat Pengelola Keuangan (9 Org x 12 Bulan)	Kota Lhokseumawe	108 OB	60,872,600	APBK	-	108 OB	56,879,040	Kec. Muara Dua
01.010.	Penyediaan alat tulis kantor	Periode Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	40,047,550	APBK	-	12 Bulan	14,000,000	Kec. Muara Dua
01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Periode Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	12,180,500	APBK	-	12 Bulan	10,979,000	Kec. Muara Dua
01.013.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Periode Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	5,029,525	APBK	-	12 Bulan	3,352,958	Kec. Muara Dua
01.015.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan-undangan (1 eks x 360 Hari)	Kota Lhokseumawe	365 Eks	1,800,000	APBK	-	365 Eks	1,254,000	Kec. Muara Dua
01.017.	Penyediaan makanan dan minuman	Periode Penyediaan Makanan dan Minuman	Kota Lhokseumawe	11 Bulan	70,000,000	APBK	-	11 Bulan	10,000,000	Kec. Muara Dua
01.018.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Periode Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	70,000,000	APBK	-	12 Bulan	50,000,000	Kec. Muara Dua
01.020.	Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap	Jumlah Jasa Tidak Tetap (43 x 12 Bulan)	Kota Lhokseumawe	516 OB	242,506,400	APBK	-	516 OB	228,483,050	Kec. Muara Dua
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kota Lhokseumawe	100 %	332,237,400	APBK	-	100 %	100,220,529	Kec. Muara Dua
02.011.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Kota Lhokseumawe	5 Jenis	186,537,400	APBK	-	6 Jenis	40,000,000	Kec. Muara Dua
02.022.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Pemeliharaan/Berkala Gedung Kantor	Kota Lhokseumawe	1 Unit	50,000,000	APBK	-	1 Unit	25,805,231	Kec. Muara Dua
02.023.	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan (1 Unit x 12 Bulan)	Kota Lhokseumawe	12 UB	28,200,000	APBK	-	12 UB	20,624,560	Kec. Muara Dua
02.030.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Periode Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	7,500,000	APBK	-	12 Bulan	5,123,192	Kec. Muara Dua
02.042.	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Periode Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor	Kota Lhokseumawe	1 Unit	60,000,000	APBK	-	1 Unit	8,667,546	Kec. Muara Dua
03.	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Tingkat Disiplin Aparatur	Kota Lhokseumawe	100 %	75,600,000	APBK	-	100 %	50,000,000	Kec. Muara Dua
03.002.	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Hari-Hari Tertentu	Kota Lhokseumawe	69 Pasang	75,600,000	APBK	-	69 Pasang	50,000,000	Kec. Muara Dua

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2020			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		OPD Penanggung jawab
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
07.	Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja	Cakupan Penyediaan Dokumen Perencanaan SKPK	Kota Lhokseumawe	1 Dokumen	1,225,000	APBK	-	1 Dokumen	1,210,000	Kec. Muara Dua
07.002.	Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Buku Renja SKPD	Kota Lhokseumawe	10 Buku	1,225,000	APBK	-	10 Buku	1,210,000	Kec. Muara Dua
09.	Program Pembinaan Aparatur dan Pemerintahan Desa/Kelurahan/Kecamatan	Cakupan Koordinasi Pemerintahan Kecamatan, Mukim Gampong	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	142,921,800	APBK	-	12 Bulan	115,884,846	Kec. Muara Dua
09.001.	Penyediaan Jasa Aparatur Pemerintahan Mukim/Desa/Kelurahan	Periode Pelaksanaan Koordinasi Musyawarah Pimpinan Kecamatan	Kota Lhokseumawe	120 OB	142,921,800	APBK	-	120 OB	115,884,846	Kec. Muara Dua
28	Program Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan dan Pembinaan Masyarakat Pemerintahan Desa	Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Syiar Islam	Kota Lhokseumawe	2 Keg 17 Gp	579,402,000	APBK	-	2 Keg 17 Gp	165,044,000	Kec. Muara Dua
28.001.	Penyelenggaraan Kegiatan Masyarakat Desa/Kelurahan Bidang Agama, Sosial dan Budaya (MTQ, HUT RI, DII)	Jumlah Hari Pelaksanaan MTQ	Kota Lhokseumawe	5 Hari	208,470,550	APBK	-	5 Hari	110,000,000	Kec. Muara Dua
28.002.	Kegiatan Saweu Gampong	Jumlah Pelaksanaan Saweu Gampong	Kota Lhokseumawe	17 Gampong	66,837,500	APBK	-	17 Gampong	10,504,000	Kec. Muara Dua
28.003.	Penyelenggaraan Kegiatan Masyarakat Desa/Kel. Bidang Pemuda dan Olah Raga	Periode Penyelenggaraan Kegiatan Masyarakat Desa/Kel/Bdg. Pemuda Dan Olahraga	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	60,000,000	APBK	-	12 Bulan	10,000,000	Kec. Muara Dua
28.004.	Peningkatan Pelatihan/Ketrampilan dan Pembinaan PKK Gampong	Periode Peningkatan Pelatihan/Keterampilan dan Pembinaan PKK Gampong	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	13,200,000	APBK	-	12 Bulan	8,000,000	Kec. Muara Dua
28.005.	Peningkatan Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat di Lingkungan Desa/Gampong	Periode Peningkatan Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat Di Lingkungan Desa/Kel	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	59,111,950	APBK	-	12 Bulan	10,000,000	Kec. Muara Dua
28.015.	Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan	Kota Lhokseumawe	1 Hari	32,961,250	APBK	-	1 Hari	8,540,000	Kec. Muara Dua
28.016.	Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APB Desa	Jumlah Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APB Desa	Kota Lhokseumawe	17 Gampong	38,820,750	APBK	-	17 Gampong	8,000,000	Kec. Muara Dua
28.017.	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Mukim dan Gampong	Periode Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Mukim dan Gampong	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	100,000,000	APBK	-	12 Bulan	0	Kec. Muara Dua
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah				9,441,373,560	APBK	-		5,880,962,645	BPBD
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang				9,441,373,560	APBK	-		5,880,962,645	BPBD
4.01.	Administrasi Pemerintahan				9,441,373,560	APBK	-		5,880,962,645	BPBD
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kota Lhokseumawe	100%	2,618,740,000	APBK	-	100%	2,117,468,390	BPBD
01.001.	Penyediaan jasa surat menyurat	Periode Jasa Surat Menyurat	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	2,550,000	APBK	-	12 Bulan	2,550,000	BPBD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2020			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		OPD Penanggung jawab
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01.002.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Periode Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	238,000,000	APBK	-	12 Bulan	194,592,000	BPBD
01.007.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Pejabat Pengelola Keuangan SKPD	Kota Lhokseumawe	240 OB	129,200,000	APBK	-	240 OB	132,976,650	BPBD
01.010.	Penyediaan alat tulis kantor	Periode Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	20,320,000	APBK	-	12 Bulan	21,000,000	BPBD
01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Periode Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	15,000,000	APBK	-	12 Bulan	12,000,000	BPBD
01.013.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Periode Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	10,000,000	APBK	-	12 Bulan	7,000,000	BPBD
01.015.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kota Lhokseumawe	365 Eks	1,320,000	APBK	-	365 Eks	1,350,000	BPBD
01.017.	Penyediaan makanan dan minuman	Periode Penyediaan Makanan dan Minuman	Kota Lhokseumawe	11 Bulan	7,000,000	APBK	-	11 Bulan	8,000,000	BPBD
01.018.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Periode Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan KeLuar Daerah	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	120,000,000	APBK	-	12 Bulan	100,000,000	BPBD
01.020.	Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap	Jumlah Jasa Pegawai Tidak Tetap	Kota Lhokseumawe	1356 OB	2,075,350,000	APBK	-	1356 OB	1,637,999,740	BPBD
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kota Lhokseumawe	100%	3,450,050,000	APBK	-	100%	465,144,369	BPBD
02.011.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Lhokseumawe	6 Jenis	206,300,000	APBK	-	8 Jenis	40,500,000	BPBD
02.022.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Periode Pemeliharaan Rutin / berkala gedung kantor	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	35,000,000	APBK	-	12 Bulan	24,000,000	BPBD
02.023.	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Kota Lhokseumawe	12 UB	37,200,000	APBK	-	12 UB	38,120,000	BPBD
02.024.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Pemeliharaan Rutin / Berkala kendaraan dinas / operasional	Kota Lhokseumawe	144 UB	259,000,000	APBK	-	144 UB	256,000,000	BPBD
02.030.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Periode Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	52,550,000	APBK	-	12 Bulan	20,000,000	BPBD
02.045.	Pembangunan Fasilitas Gedung Kantor	Jumlah Pembangunan Fasilitas Gedung Kantor	Kota Lhokseumawe	1 Unit	2,860,000,000	APBK	-	1 Unit	86,524,369	BPBD
03.	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Tingkat Disiplin Aparatur	Kota Lhokseumawe	100%	78,783,560	APBK	-	100%	71,921,916	BPBD
03.002.	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Khusus Hari-Hari Tertentu	Kota Lhokseumawe	67 Pasang	78,783,560	APBK	-	32 Pasang	71,921,916	BPBD
05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal yang diikuti	Kota Lhokseumawe	5 Keg	36,300,000	APBK	-	5 Keg	39,930,000	BPBD
05.001.	Pendidikan dan pelatihan formal	Periode Pendidikan Dan Pelatihan Formal Aparatur	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	36,300,000	APBK	-	12 Bulan	39,930,000	BPBD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2020			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		OPD Penanggung jawab
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
07.	Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja	Cakupan Penyediaan Dokumen Perencanaan SKPK	Kota Lhokseumawe	1 Dokumen	2,850,000	APBK	-	1 Dokumen	1,597,200	BPBD
07.002.	Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Buku RENJA SKPD	Kota Lhokseumawe	10 Buku	2,850,000	APBK	-	10 Buku	1,597,200	BPBD
35	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Cakupan pelayanan bencana kebakaran	Kota Lhokseumawe	18,39%	3,254,650,000	APBK	-	18,39%	3,184,900,770	BPBD
35.001.	Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam	Periode Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	37,400,000	APBK	-	12 Bulan	26,555,770	BPBD
35.009.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Periode Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	148,000,000	APBK	-	12 Bulan	110,345,000	BPBD
35.014.	Pengiriman Dan Pendistribusian Logistik Penanggulangan Bencana	Periode Pengiriman dan Pendistribusian Logistik	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	43,000,000	APBK	-	12 Bulan	48,000,000	BPBD
35.022.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran (OTSUS)	Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran dan Mobil Water Supply	Kota Lhokseumawe	2 Unit	3,026,250,000	APBK	-	2 Unit	3,000,000,000	BPBD
	Inspektorat				10,806,778,740	APBK	-		9,838,595,974	Inspektorat
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang				10,806,778,740	APBK	-		9,838,595,974	Inspektorat
4.02.	Pengawasan				10,806,778,740	APBK	-		9,838,595,974	Inspektorat
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Kota Lhokseumawe	100%	984,424,340	APBK	-	100%	777,529,974	Inspektorat
01.001.	Penyediaan jasa surat menyurat	periode jasa surat menyurat	Kota Lhokseumawe	12 bulan	3,300,000	APBK	-	12 bulan	3,500,000	Inspektorat
01.002.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	periode penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	Kota Lhokseumawe	12 bulan	90,000,000	APBK	-	12 bulan	100,000,000	Inspektorat
01.007.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Kota Lhokseumawe	240 OB	132,373,240	APBK	-	240 OB	123,434,564	Inspektorat
01.010.	Penyediaan alat tulis kantor	Periode penyediaan alat tulis kantor	Kota Lhokseumawe	12 bulan	67,820,700	APBK	-	12 bulan	58,102,770	Inspektorat
01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Periode penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kota Lhokseumawe	12 bulan	21,729,000	APBK	-	12 bulan	23,901,900	Inspektorat
01.013.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Periode penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Lhokseumawe	12 bulan	5,738,400	APBK	-	12 bulan	6,312,240	Inspektorat
01.015.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan peraturan perundang-undangan	Kota Lhokseumawe	12 bulan	3,435,000	APBK	-	365 eks	3,778,500	Inspektorat
01.017.	Penyediaan makanan dan minuman	Periode penyediaan makanan dan minuman kegiatan	Kota Lhokseumawe	11 bulan	25,000,000	APBK	-	11 bulan	27,500,000	Inspektorat
01.018.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Periode rapat-rapat kordinasidan konsultasi keluar daerah	Kota Lhokseumawe	12 bulan	450,000,000	APBK	-	12 bulan	231,000,000	Inspektorat
01.020.	Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap	Jumlah jasa tenaga kerja tidak tetap	Kota Lhokseumawe	288 OB	185,028,000	APBK	-	288 OB	200,000,000	Inspektorat
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	Kota Lhokseumawe	100%	2,868,810,000	APBK	-	100%	1,835,000,000	Inspektorat

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2020			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		OPD Penanggung jawab
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
02.011.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Lhokseumawe	unit	2,489,460,000	APBK	-	unit	1,500,000,000	Inspektorat
02.023.	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	jumlah pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Kota Lhokseumawe	12 UB	94,800,000	APBK	-	12 UB	100,000,000	Inspektorat
02.024.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kenderaan Dinas/oparsional	Kota Lhokseumawe	48 UB	234,400,000	APBK	-	48 UB	190,000,000	Inspektorat
02.030.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	periode Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan gedung kantor	Kota Lhokseumawe	12 bulan	50,150,000	APBK	-	12 bulan	45,000,000	Inspektorat
03.	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase tingkat disiplin aparatur	Kota Lhokseumawe	100%	198,330,000	APBK	-	100%	200,000,000	Inspektorat
03.002.	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	Kota Lhokseumawe	81 pasang	88,330,000	APBK	-	81 pasang	90,000,000	Inspektorat
03.006.	Penyediaan Sewa Gedung/Gudang Kantor	periode sewa gedung kantor	Kota Lhokseumawe	1 tahun	110,000,000	APBK	-	1 tahun	110,000,000	Inspektorat
05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan pendidikan dan pelatihan formal yang diikuti	Kota Lhokseumawe	5 Keg	228,350,000	APBK	-	5 Keg	281,256,000	Inspektorat
05.001.	Pendidikan dan pelatihan formal	periode pendidikan dan pelatihan formal aparatur	Kota Lhokseumawe	12 bulan	200,000,000	APBK	-	12 bulan	250,000,000	Inspektorat
05.025.	Penetapan Angka Kredit	Jumlah PAK yang diterbitkan	Kota Lhokseumawe	80 dokumen	19,050,000	APBK	-	80 dokumen	20,000,000	Inspektorat
05.059.	Peningkatan Kapabilitas APIP	Jumlah peningkatan level kapabilitas aparatur pengawasan internal pemerintah	Kota Lhokseumawe	1 level	9,300,000	APBK	-	1 level	11,256,000	Inspektorat
07.	Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja	cakupan penyediaan dokumen perencanaan SKPK	Kota Lhokseumawe	1 Dokumen	11,810,000	APBK	-	1 Dokumen	8,600,000	Inspektorat
07.002.	Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Buku Renja	Kota Lhokseumawe	5 buku	5,470,000	APBK	-	5 buku	1,100,000	Inspektorat
07.004.	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen yang di Hasilkan	Kota Lhokseumawe	5 buku	6,340,000	APBK	-	5 buku	7,500,000	Inspektorat
20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	cakupan tindak lanjut dan monitoring temuan APIP	Kota Lhokseumawe	140 LHP	5,487,245,400	APBK	-	140 LHP	5,495,010,000	Inspektorat
20.001.	Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala	Jumlah objek pemeriksaan yang akan dilakukan pengawasan	Kota Lhokseumawe	250 LHP	2,984,375,000	APBK	-	65 LHP	3,450,000,000	Inspektorat
20.006.	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	Jumlah Temuan yang Telah di Tindak Lanjuti	Kota Lhokseumawe	50 laporan	148,660,000	APBK	-	50 laporan	125,000,000	Inspektorat
20.011.	Pelaksanaan Tim Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TPGR)	periode Sidang Majelis MPTGR	Kota Lhokseumawe	3 kali	194,259,000	APBK	-	3 kali	45,000,000	Inspektorat
20.014.	Pengembangan dan Pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe	persentase OPD yang telah menerapkan SIP pada level berkembang	Kota Lhokseumawe	60 %	54,899,000	APBK	-	60 %	30,000,000	Inspektorat
20.015.	Rapat Koordinasi Pengawasan dengan Kepala SKPD	periode Rapat Yang di Hasilkan	Kota Lhokseumawe	12 bulan	22,009,000	APBK	-	12 bulan	30,000,000	Inspektorat

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2020			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		OPD Penanggung jawab
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.016.	Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe	Jumlah Laporan reviu Yang di Terbitkan	Kota Lhokseumawe	1 laporan	139,690,000	APBK	-	1 laporan	200,000,000	Inspektorat
20.017.	Tim Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (BPK, Inspektoret Aceh, BPKP, Irjen dan Inspektorat)	periode Tindak Lanjut Yang di terbitkan	Kota Lhokseumawe	12 Laporan	191,300,000	APBK	-	12 bulan	190,000,000	Inspektorat
20.020.	Penyelesaian Pemantauan Kerugian Negara dan Daerah Temua BPK-RI	periode Pelaksanaan Penyelesaian Pemantauan Kerugian Negara	Kota Lhokseumawe	2 semester	16,643,400	APBK	-	2 semester	20,000,000	Inspektorat
20.029.	Bimtek Pemetaan Manajemen Resiko SKPD	Jumlah peserta Pemetaan Manajemen Resiko SKPD	Kota Lhokseumawe	100 orang	150,000,000	APBK	-		170,000,000	Inspektorat
20.036.	Reviu Rencana Kerja Anggaran SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe	Jumlah Dokumen Reviu Renja OPD	Kota Lhokseumawe	33 RKA SKPK	138,710,000	APBK	-	33 RKA SKPK	80,000,000	Inspektorat
20.037.	Pelaksanaan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kota Lhokseumawe	Periode Pelaksanaan Kegiatan Sapu Bersih Pemerintah Kota Lhokseumawe	Kota Lhokseumawe	12 bulan	313,080,000	APBK	-	12 bulan	320,000,000	Inspektorat
20.043.	Reviu RKPd Kota Lhokseumawe	Jumlah Laporan Reviu RKPd Kota Lhokseumawe	Kota Lhokseumawe	1 dokumen	85,480,000	APBK	-	1 dokumen	30,000,000	Inspektorat
20.049.	Reviu LKjIP Pemerintah Kota Lhokseumawe	Jumlah Laporan Reviu LKjIP	Kota Lhokseumawe	1 laporan	57,130,000	APBK	-	1 laporan	28,000,000	Inspektorat
20.050.	Evaluasi LKjIP SKPD Kota Lhokseumawe	Jumlah Laporan Evaluasi LKjIP SKPK Kota Lhokseumawe	Kota Lhokseumawe	33 SKPK	30,040,000	APBK	-	33 SKPK	30,000,000	Inspektorat
20.053.	Penanganan Pengaduan Masyarakat	Periode Pemeriksaan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Kota Lhokseumawe	12 bulan	333,675,000	APBK	-	12 bulan	57,010,000	Inspektorat
20.054.	Pelaksanaan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe	Jumlah Pelaporan dua kali dalam setahun	Kota Lhokseumawe	2 laporan	82,580,000	APBK	-	7800 laporan	100,000,000	Inspektorat
20.055.	Inventarisasi Hasil Pemeriksaan Menggunakan Aplikasi SIM HP	Periode Pelaksanaan Inventarisasi Temuan Menggunakan Aplikasi SIM HP	Kota Lhokseumawe	12 bulan	43,400,000	APBK	-	12 bulan	45,000,000	Inspektorat
20.056.	Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Dana APBG Bersama Tim Pengawasan dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D)	Periode Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Dana Desa	Kota Lhokseumawe	12 bulan	91,560,000	APBK	-	12 bulan	100,000,000	Inspektorat
20.057.	Sosialisasi MoU APIP dan APH	Periode Pelaksanaan Sosialisasi Mou APH dan APIP	Kota Lhokseumawe	2 hari	18,200,000	APBK	-	3 hari	25,000,000	Inspektorat
20.058.	Bimtek Siskeudes	Periode Pelaksanaan Bimtek Siskeudes	Kota Lhokseumawe	1 Kegiatan	49,100,000	APBK	-		50,000,000	Inspektorat
20.059.	Monitoring Centre Preventive (MCP)	Periode Pelaksanaan Monitoring Centre Prepeventive (MCP)	Kota Lhokseumawe	4 triwulan	77,440,000	APBK	-	4 triwulan	60,000,000	Inspektorat
20.060.	Reviu Renja SKPK	Jumlah Laporan Reviu Renja SKPK	Kota Lhokseumawe	33 SKPK	115,015,000	APBK	-	33 SKPK	110,000,000	Inspektorat
20.062.	Survey Penilaian Integritas	Jumlah Laporan	Kota Lhokseumawe	1 Laporan	150,000,000	APBK	-	1 Laporan	200,000,000	Inspektorat
21	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan, pelatihan dan penjurangan tenaga pemeriksa (auditor)	Kota Lhokseumawe	50 ASN	825,000,000	APBK	-	50 ASN	1,077,200,000	Inspektorat
21.004.	Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur	Meningkatnya jumlah tenaga Pemeriksa dan Meningkatnya Kapabilitas Aparatur	Kota Lhokseumawe	10 orang	600,000,000	APBK	-	10 orang	817,200,000	Inspektorat

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2020			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		OPD Penanggung jawab
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21.006.	Pengembangan Kapabilitas APIP Kota Lhokseumawe	Meningkatnya Kapabilitas APIP Kota Lhokseumawe	Kota Lhokseumawe	level 3	148,800,000	APBK	-	level 4	180,000,000	Inspektorat
21.007.	Pelaksanaan Badan Kehormatan Kode Etik Profesi Jabatan Fungsional	Periode Pelaksanaan Evaluasi Disiplin Kerja Auditor	Kota Lhokseumawe	12 bulan	76,200,000	APBK	-	12 bulan	80,000,000	Inspektorat
22	Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Jumlah laporan pengawasan ASN	Kota Lhokseumawe	4000 laporan	202,809,000	APBK	-	4000 laporan	164,000,000	Inspektorat
22.006.	Pemantauan dan Pelaporan LHKPN dan LHKASN	Periode pelaporan hasil kekayaan pejabat negara dan ASN dilingkungan Pempo Kota Lhokseumawe	Kota Lhokseumawe	1 periode pelaporan	67,200,000	APBK	-	1 periode pelaporan	24,000,000	Inspektorat
22.007.	Penyusunan PKPT Berbasis Resiko	Jumlah dokumen program kegiatan pengawasan tahunan Inspektorat Kota Lhokseumawe	Kota Lhokseumawe	1 dokumen	55,609,000	APBK	-	1 dokumen	40,000,000	Inspektorat
22.008.	Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Terkait Pengawasan	Jumlah Pedoman Pelaksanaan Terkait Pengawasan	Kota Lhokseumawe	3 dokumen	80,000,000	APBK	-	3 dokumen	100,000,000	Inspektorat
					9,674,269,741	APBK	-		4,013,921,082	Bappeda
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang				9,674,269,741	APBK	-		4,013,921,082	Bappeda
4.03.	Perencanaan				9,674,269,741	APBK	-		4,013,921,082	Bappeda
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kota Lhokseumawe	100 %	1,205,312,579	APBK	-	100 %	1,149,147,573	Bappeda
01.001.	Penyediaan jasa surat menyurat	Periode Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	3,790,000	APBK	-	12 Bulan	5,483,720	Bappeda
01.002.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Periode Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	280,268,649	APBK	-	12 Bulan	397,995,620	Bappeda
01.007.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Pejabat Pengelola Keuangan SKPD (26 X 12 Bulan)	Kota Lhokseumawe	312 OB	167,000,000	APBK	-	312 OB	170,000,000	Bappeda
01.010.	Penyediaan alat tulis kantor	Periode Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	48,323,930	APBK	-	12 Bulan	70,805,713	Bappeda
01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Periode Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	106,330,000	APBK	-	12 Bulan	44,455,400	Bappeda
01.013.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Periode Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	26,620,000	APBK	-	12 Bulan	33,834,020	Bappeda
01.015.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (2 eks x 365 hari)	Kota Lhokseumawe	730 Eks	480,000	APBK	-	730 Eks	3,200,000	Bappeda
01.017.	Penyediaan makanan dan minuman	Periode Penyediaan Makanan dan Minuman	Kota Lhokseumawe	11 Bulan	39,900,000	APBK	-	11 Bulan	53,373,100	Bappeda
01.018.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Periode Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	290,000,000	APBK	-	12 Bulan	170,000,000	Bappeda
01.020.	Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap	Jumlah Jasa Pegawai Tidak Tetap (30 org x 12 Bulan)	Kota Lhokseumawe	360 OB	242,600,000	APBK	-	360 OB	200,000,000	Bappeda
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kota Lhokseumawe	100 %	2,413,022,385	APBK	-	100 %	310,401,911	Bappeda

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2020			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		OPD Penanggung jawab
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
02.005.	Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional	Kota Lhokseumawe	14 Jenis	460,000,000	APBK	-	14 Jenis	0	Bappeda
02.011.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Lhokseumawe	20 Jenis	403,350,000	APBK	-	20 Jenis	69,733,811	Bappeda
02.022.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Periode Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	150,000,000	APBK	-	12 Bulan	35,000,000	Bappeda
02.023.	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Kota Lhokseumawe	12 UB	39,600,000	APBK	-	12 UB	45,387,100	Bappeda
02.024.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (2 Unit x 12 Bulan)	Kota Lhokseumawe	24 UB	60,181,050	APBK	-	24 UB	65,181,000	Bappeda
02.030.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Periode Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	100,000,000	APBK	-	12 Bulan	60,100,000	Bappeda
02.042.	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah Rehap Sedang/Berat Gedung Kantor Bappeda	Kota Lhokseumawe	3 jenis	905,288,500	APBK	-	3 jenis	10,000,000	Bappeda
02.045.	Pembangunan Fasilitas Gedung Kantor	Jumlah Fasilitas Gedung Kantor Yang Terpelihara	Kota Lhokseumawe	1 Unit	264,602,835	APBK	-	1 Unit	25,000,000	Bappeda
02.046.	Pembangunan Taman dan Halaman Kantor	Jumlah luas Taman yang dibangun	Kota Lhokseumawe	100 meter	30,000,000	APBK	-	100 meter	0	
03.	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Tingkat Disiplin Aparatur	Kota Lhokseumawe	100 %	101,500,000	APBK	-	100 %	60,500,000	Bappeda
03.002.	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Khusus Hari-Hari Tertentu	Kota Lhokseumawe	200 Pasang	101,500,000	APBK	-	200 Pasang	60,500,000	Bappeda
05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal yang Diikuti	Kota Lhokseumawe	5 Keg	50,000,000	APBK	-	5 Keg	66,550,000	Bappeda
05.001.	Pendidikan dan pelatihan formal	Periode Pendidikan dan Pelatihan Formal Aparatur	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	50,000,000	APBK	-	12 Bulan	66,550,000	Bappeda
07.	Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja	Cakupan Penyediaan Dokumen Perencanaan SKPK	Kota Lhokseumawe	1 Dokumen	82,279,900	APBK	-	1 Dokumen	1,597,200	Bappeda
07.002.	Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Buku RENJA SKPD	Kota Lhokseumawe	10 Buku	1,999,900	APBK	-	10 Buku	1,597,200	Bappeda
07.003.	Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)	Jumlah Dokumen	Kota Lhokseumawe	10 Buku	65,550,000	APBK	-	10 Buku	0	Bappeda
07.004.	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen SOP yang disusun	Kota Lhokseumawe	10 Buku	14,730,000	APBK	-	10 Buku	0	Bappeda
15	Program pengembangan data/informasi	Keterbukaan Informasi Publik Melalui Website	Kota Lhokseumawe	Ada	335,269,600	APBK	-	Ada	202,096,977	Bappeda
15.007.	Pembinaan dan Pengembangan Website Bappeda	Periode Penyediaan Website Bappeda Kota Lhokseumawe	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	48,200,000	APBK	-	12 Bulan	67,096,977	Bappeda
15.023.	Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe	Periode Penyediaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang Berbasis	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	77,929,400	APBK	-	12 Bulan	70,000,000	Bappeda
15.024.	Pelaksanaan Laporan Sistem Informasi Monitoring TEPR (SISMONTEP)	Jumlah Laporan SISMONTEP	Kota Lhokseumawe	5 Laporan	93,625,200	APBK	-	5 Laporan	65,000,000	Bappeda

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2020			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		OPD Penanggung jawab
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.032.	Pelatihan Aplikasi Penggunaan Quantum GIS	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pelatihan Sistem Informasi	Kota Lhokseumawe	1 Laporan	115,515,000	APBK	-	1 Laporan	0	Bappeda
16	Program Kerjasama Pembangunan	Cakupan Koordinasi Kerjasama Perencanaan Pembangunan	Kota Lhokseumawe	5 Dokumen	169,482,800	APBK	-	5 Dokumen	275,756,950	Bappeda
16.015.	Surfey Potensi Kesesuaian Lahan Bagi Pengembangan Pertanian	Jumlah Buku Survey Potensi Kesesuaian Lahan Bagi Pengembangan Pertanian	Kota Lhokseumawe	10 Buku	99,553,650	APBK	-	10 Buku	125,756,950	Bappeda
16.018.	Kemitraan Pendanaan Pembangunan dengan Lembaga Dalam/Luar Negeri	Jumlah Lembaga Kemitraan	Kota Lhokseumawe	1 Mitra	69,929,150	APBK	-	1 Mitra	150,000,000	Bappeda
19	Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar	Cakupan Penyediaan Dokumen Perencanaan Pengembangan Kota Menengah dan Besar	Kota Lhokseumawe	1 Dokumen	455,921,332	APBK	-	1 Dokumen	532,431,792	Bappeda
19.020.	Penguatan Peran Pelaku Pemerintah Daerah Terhadap Program Nasional	Jumlah Dokumen Penguatan Peran Pelaku Pemerintah Daerah terhadap Program nasional	Kota Lhokseumawe	5 Dokumen	145,635,666	APBK	-	5 Dokumen	350,000,000	Bappeda
19.021.	Monitoring Pemanfaatan Instalasi Pengelolaan Air Limbah Tinja (IPLT)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pendampingan Pemanfaatan Instalasi Pengelolaan Air Limbah Tinja (IPLT)	Kota Lhokseumawe	10 Dokumen	68,135,666	APBK	-	10 Dokumen	55,000,000	Bappeda
19.024.	Penyusunan Rencana Pembangunan Penyehatan Lingkungan Environmental Health Risk Assesment (EHRA)	Jumlah Dokumen Inventarisasi Pembangunan Penyehatan Lingkungan	Kota Lhokseumawe	5 Dokumen	242,150,000	APBK	-	5 Dokumen	127,431,792	Bappeda
21	Program perencanaan pembangunan daerah	Cakupan Penyediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Kota Lhokseumawe	9 Dokumen	1,777,224,641	APBK	-	9 Dokumen	849,983,790	Bappeda
21.018.	Penyelenggaraan MUSRENBANG RKPD	Periode Pelaksanaan Musrenbang dan Konsultasi Publik	Kota Lhokseumawe	4 Hari	244,020,175	APBK	-	4 Hari	220,523,252	Bappeda
21.031.	Penyusunan, Monitoring, Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Daerah	Jumlah Buku Laporan Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan	Kota Lhokseumawe	20 Buku	84,111,168	APBK	-	20 Buku	66,632,594	Bappeda
21.034.	Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	Jumlah Buku RKPD	Kota Lhokseumawe	50 Buku	163,400,800	APBK	-	50 Buku	66,338,968	Bappeda
21.038.	Evaluasi Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPJM)	Jumlah Buku Evaluasi RPJM	Kota Lhokseumawe	40 Buku	74,290,000	APBK	-	40 Buku	0	Bappeda
21.046.	Updating Buku Putih Kota Lhokseumawe	Jumlah Buku Putih Kota Lhokseumawe	Kota Lhokseumawe	10 Buku	139,985,666	APBK	-	10 Buku	0	Bappeda
21.049.	Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD)	Jumlah Buku RKPDP Kota Lhokseumawe	Kota Lhokseumawe	35 Buku	142,350,000	APBK	-	35 Buku	70,801,284	Bappeda
21.056.	Revisi RPJMD Kota Lhokseumawe	Periode Pelaksanaan Evaluasi RPJMD	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	71,150,000	APBK	-	12 Bulan	0	Bappeda
21.059.	Monitoring Permukiman dan Perumahan Kumuh (Operasional Pokjanis RKP-KP)	Periode Pelaksanaan Monitoring Permukiman dan Perumahan Kumuh	Kota Lhokseumawe	4 Triwulan	101,169,300	APBK	-	4 Triwulan	50,000,000	Bappeda
21.066.	Perencanaan dan Monitoring Kegiatan DAK	Jumlah Laporan Perencanaan dan Monitoring Kegiatan DAK	Kota Lhokseumawe	40 Buku	240,390,000	APBK	-	40 Buku	167,210,409	Bappeda
21.071.	Verifikasi Renja SKPK Kota Lhokseumawe	Jumlah Laporan Verifikasi Renja SKPK	Kota Lhokseumawe	5 Laporan	54,491,300	APBK	-	5 Laporan	63,753,500	Bappeda

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2020			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		OPD Penanggung jawab
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21.072.	Verifikasi Perubahan Renja SKPK Kota Lhokseumawe	Jumlah Laporan Verifikasi Perubahan Renja SKPK	Kota Lhokseumawe	5 Laporan	54,502,200	APBK	-	5 Laporan	63,771,735	Bappeda
21.077.	Penyusunan Evaluasi rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Lhokseumawe	Jumlah Buku Hasil Evaluasi RKPD	Kota Lhokseumawe	10 Buku	82,514,600	APBK	-	10 Buku	80,952,048	Bappeda
21.091.	Manajemen E-Planning Kota Lhokseumawe	Periode Pengelolaan E-Planning	Kota Lhokseumawe	4 Triwulan	243,699,200	APBK	-	4 Triwulan	0	Bappeda
21.092.	Perencanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Kelompok Kerja Sanitasi Kota Lhokseumawe	Kota Lhokseumawe	3 Dokumen	81,150,232	APBK	-	3 Dokumen	0	Bappeda
22	Program perencanaan pembangunan ekonomi	Cakupan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	1,114,742,725	APBK	-	12 Bulan	30,000,000	Bappeda
22.032.	Penguatan Kelembagaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Lhokseumawe	Jumlah Dokumen LP2KD Tahun 2019	Kota Lhokseumawe	15 Buku	155,492,350	APBK	-	15 Buku	15,000,000	Bappeda
22.042.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah Bidang Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah Bidang Ekonomi	Kota Lhokseumawe	10 Buku	38,889,100	APBK	-	10 Buku	15,000,000	Bappeda
22.044.	Penyusunan Strategi Kemandirian dan Ketahanan Pangan Kota Lhokseumawe	Jumlah Dokumen Strategi Kemandirian dan Ketahanan Pangan Kota Lhokseumawe	Kota Lhokseumawe	10 Dokumen	71,111,350	APBK	-	10 Dokumen	0	Bappeda
22.045.	Penyusunan RIPPDA (Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah)	Jumlah Dokumen RIPPDA	Kota Lhokseumawe	10 Dokumen	121,900,000	APBK	-	10 Dokumen	0	Bappeda
22.046.	Seminar Nasional Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Kota Lhokseumawe (KEKAL)	Jumlah Dokumen	Kota Lhokseumawe	20 Dokumen	176,986,625	APBK	-	20 Dokumen	0	Bappeda
22.047.	Pendataan Industri Kecil dan Menengah One Villange One Product di Kota Lhokseumawe	Jumlah Dokumen Pendataan Industri Kecil dan Menengah One Villange One Product di Kota Lhokseumawe	Kota Lhokseumawe	15 Dokumen	68,200,700	APBK	-	15 Dokumen	0	Bappeda
22.048.	Pemetaan dan Survey Tenaga Kerja Produktif Kota Lhokseumawe	Jumlah Buku Pemetaan Tenaga Kerja Produktif di Kota Lhokseumawe	Kota Lhokseumawe	50 Buku	50,024,275	APBK	-	50 Buku	0	Bappeda
22.049.	Seminar Peningkatan Ekonomi Masyarakat Dalam Rangka Pengendalian Inflasi di Kota Lhokseumawe	Jumlah Laporan hasil Seminar	Kota Lhokseumawe	1 Laporan	92,488,650	APBK	-	1 Laporan	0	Bappeda
22.051.	Klasifikasi Pendataan Industri Kota Lhokseumawe	Jumlah Dokumen Pendataan Industri Kota Lhokseumawe	Kota Lhokseumawe	15 Dokumen	50,378,350	APBK	-	15 Dokumen	0	Bappeda
22.052.	Profil Pertumbuhan Ekonomi Kota Lhokseumawe	Jumlah Dokumen Profil Pertumbuhan Ekonomi Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2019	Kota Lhokseumawe	20 Dokumen	68,186,625	APBK	-	20 Dokumen	0	Bappeda
22.053.	Workshop Enterpreneur Muda Dalam Rangka Peningkatan SDM BUMG Seluruh Gampong di Kota Lhokseumawe	Jumlah Dokumen	Kota Lhokseumawe	20 Dokumen	110,542,350	APBK	-	20 Dokumen	0	Bappeda
22.054.	Workshop Peningkatan SDM Berkarakter bagi Milenial Muda Gampong se Kota Lhokseumawe	Jumlah Dokumen	Kota Lhokseumawe	20 Dokumen	110,542,350	APBK	-	20 Dokumen	0	Bappeda

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2020			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		OPD Penanggung jawab
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Program perencanaan sosial dan budaya	Cakupan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	118,421,150	APBK	-	12 Bulan	55,540,860	Bappeda
23.014.	Pengkajian Kebijakan Pendidikan	Jumlah Buku Pengkajian Kebijakan Pendidikan	Kota Lhokseumawe	25 Buku	36,707,250	APBK	-	25 Buku	30,540,860	Bappeda
23.038.	Validasi Data Pendukung Perencanaan Bidang Pendidikan	Jumlah Buku Hasil Validasi Data Pendukung Perencanaan Bidang Pendidikan Kota Lhokseumawe	Kota Lhokseumawe	20 Buku	39,681,950	APBK	-	20 Buku	25,000,000	Bappeda
23.040.	Penyusunan Indeks Kesulitan Geografis	Jumlah Buku Indeks Kesulitan Geografis Kota Lhokseumawe	Kota Lhokseumawe	20 Buku	42,031,950	APBK	-	20 Buku	0	Bappeda
24	Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	Cakupan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	427,623,029	APBK	-	12 Bulan	106,651,167	Bappeda
24.026.	Land Banking Perumahan	Jumlah Dokumen Land Banking Perumahan	Kota Lhokseumawe	1 Dokumen	37,505,788	APBK	-	1 Dokumen	0	Bappeda
24.027.	Penanganan Lingkungan Perumahan Kumuh Pemukiman Kumuh Berbasis Kawasan (PLP2K-BK)	Jumlah Laporan Penanganan Lingkungan Perumahan Kumuh Pemukiman Kumuh Berbasis Kawasan (PLP2K - BK)	Kota Lhokseumawe	1 Laporan	114,715,700	APBK	-	1 Laporan	106,651,167	Bappeda
24.029.	Pengembangan Kegiatan Ekonomi Wilayah	Jumlah Dokumen Pengembangan Kegiatan Ekonomi Wilayah	Kota Lhokseumawe	1 Dokumen	74,730,616	APBK	-	1 Dokumen	0	Bappeda
24.030.	Penguatan Kapasitas SKPK dalam Mitigasi Bencana	Jumlah Dokumen Penguatan Kapasitas SKPK dalam Mitigasi Bencana	Kota Lhokseumawe	1 Dokumen	76,922,850	APBK	-	1 Dokumen	0	Bappeda
24.031.	Sayembara/Lomba Grand Design Pengembangan Kawasan Kota Lhokseumawe	Jumlah Dokumen	Kota Lhokseumawe	1 Dokumen	123,748,075	APBK	-	1 Dokumen	0	Bappeda
26	Program Koordinasi Perencanaan Pembangunan	Cakupan Penyediaan Laporan Koordinasi Pendanaan Pembangunan Daerah	Kota Lhokseumawe	4 laporan	293,592,225	APBK	-	4 laporan	263,262,862	Bappeda
26.003.	Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian, TDBH Migas dan Otsus Kota Lhokseumawe	Jumlah Buku Laporan Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian	Kota Lhokseumawe	50 Buku	192,976,275	APBK	-	50 Buku	188,014,569	Bappeda
26.012.	Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian APBA dan APBN Kota Lhokseumawe	Jumlah Laporan Usulan Perencanaan dan Pengendalian APBA dan APBN Kota Lhokseumawe	Kota Lhokseumawe	20 Buku	100,615,950	APBK	-	20 Buku	75,248,293	Bappeda
30	Program Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah	Cakupan Penerapan SIDA	Kota Lhokseumawe	55%	1,129,877,375	APBK	-	60%	110,000,000	Bappeda
30.001.	Peningkatan Kapasitas Penelitian dan Pengembangan	Periode Peningkatan Kapasitas Kelitbangan	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	48,750,000	APBK	-	12 Bulan	40,000,000	Bappeda
30.005.	Penyusunan Kajian Belanja Publik Kota Lhokseumawe	Jumlah Buku Kajian Belanja Publik Kota Lhokseumawe	Kota Lhokseumawe	20 Buku	39,699,900	APBK	-	20 Buku	35,000,000	Bappeda
30.006.	Penelitian dan Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Pariwisata Kota Lhokseumawe	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Pariwisata Kota Lhokseumawe	Kota Lhokseumawe	35 Buku	58,640,000	APBK	-	35 Buku	35,000,000	Bappeda

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2020			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		OPD Penanggung jawab
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30.011.	Inovasi Pengelolaan Sampah, Limbah dan APBKr Ulang	Jumlah Laporan Inovasi Pengelolaan Sampah, Limbah dan APBKr Ulang	Kota Lhokseumawe	20 Laporan	120,760,000	APBK	-	20 Laporan	0	Bappeda
30.012.	Studi Kelayakan Penggunaan Panel Surya pada Gedung Pemerintah Kota Lhokseumawe	Jumlah Dokumen Study Kelayakan Penggunaan Panel Surya pada Gedung Pemerintah	Kota Lhokseumawe	20 Buku	115,160,000	APBK	-	20 Buku	0	Bappeda
30.013.	Penyusunan Roadmap Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kota Lhokseumawe	Jumlah Dokumen Roadmap Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kota Lhokseumawe	Kota Lhokseumawe	25 Buku	150,000,000	APBK	-	25 Buku	0	Bappeda
30.014.	Rekonstruksi Potensi Wisata Berbasis Syariah, Penerapan Ekonomi Kreatif dan Implementasi Good Government	Jumlah Buku Penelitian Rekonstruksi Potensi Wisata Berbasis Syariah Kota Lhokseumawe	Kota Lhokseumawe	50 Buku	200,560,000	APBK	-	50 Buku	0	Bappeda
30.017.	Sayembara/Lomba Inovasi Teknologi Tepat Guna Kota Lhokseumawe	Jumlah Dokumen	Kota Lhokseumawe	1 Dokumen	148,348,075	APBK	-	1 Dokumen	0	Bappeda
30.018.	Forum Satu Data Indonesia (SDI)	Jumlah buku Data Indonesia (SDI)	Kota Lhokseumawe	40 Buku	121,800,000	APBK	-	40 Buku	0	Bappeda
30.019.	Penyusunan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	Jumlah Dokumen Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	Kota Lhokseumawe	20 Buku	126,159,400	APBK	-	20 Buku	0	Bappeda
	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah				14,965,500,223	APBK	-		10,841,993,063	BPKD
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang				14,965,500,223	APBK	-		10,841,993,063	BPKD
4.04.	Keuangan				14,965,500,223	APBK	-		10,841,993,063	BPKD
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kota Lhokseumawe	100 %	2,617,382,462	APBK	-	100 %	2,160,893,512	BPKD
01.001.	Penyediaan jasa surat menyurat	Periode Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	11,310,000	APBK	-	12 Bulan	11,400,251	BPKD
01.002.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Periode Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	525,400,000	APBK	-	12 Bulan	463,663,850	BPKD
01.007.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Pejabat Pengelolaan Keuangan BPKD (55 Org x 12 Bulan)	Kota Lhokseumawe	660 OB	533,700,000	APBK	-	588 OB	399,072,727	BPKD
01.010.	Penyediaan alat tulis kantor	Periode Penyediaan Alat tulis Kantor	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	119,800,000	APBK	-	12 Bulan	98,594,932	BPKD
01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Periode Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	42,000,000	APBK	-	12 Bulan	44,100,000	BPKD
01.013.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Periode Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	21,000,000	APBK	-	12 Bulan	25,000,000	BPKD
01.015.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan Perundang-Undangan (1 eks x 365 Hari)	Kota Lhokseumawe	365 Eks	32,310,000	APBK	-	365 Eks	2,425,500	BPKD
01.017.	Penyediaan makanan dan minuman	Periode Penyediaan Makanan dan Minuman	Kota Lhokseumawe	11 Bulan	80,850,000	APBK	-	11 Bulan	84,892,500	BPKD
01.018.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Periode rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	300,000,000	APBK	-	12 Bulan	220,500,000	BPKD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2020			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		OPD Penanggung jawab
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01.020.	Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap	Jumlah Jasa Pegawai Tidak Tetap (150 Org x 12 Bulan)	Kota Lhokseumawe	1.800 OB	951,012,462	APBK	-	1.800 OB	811,243,752	BPKD
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kota Lhokseumawe	100 %	2,233,375,000	APBK	-	100 %	1,063,276,005	BPKD
02.005.	Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kota Lhokseumawe	8 Unit	680,000,000	APBK	-	7 Unit	485,239,685	BPKD
02.011.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Lhokseumawe	5 Jenis	514,575,000	APBK	-	5 Jenis	189,470,669	BPKD
02.022.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Periode Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	610,000,000	APBK	-	12 Bulan	110,250,000	BPKD
02.024.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan berkala kendaraan dinas/operasional (7 Unit x 12 Bulan)	Kota Lhokseumawe	84 UB	248,300,000	APBK	-	84 UB	123,965,651	BPKD
02.030.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Periode pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	155,500,000	APBK	-	12 Bulan	137,812,500	BPKD
02.034.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman, Tempat Parkir dan Halaman Kantor	Periode pemeliharaan rutin/berkala taman, tempat parkir dan halaman kantor	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	25,000,000	APBK	-	12 Bulan	16,537,500	BPKD
03.	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase tingkat disiplin aparatur	Kota Lhokseumawe	100%	121,000,000	APBK	-	100%	133,100,000	BPKD
03.002.	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	Kota Lhokseumawe	180 Pasang	60,500,000	APBK	-	180 Pasang	66,550,000	BPKD
03.005.	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian Khusus hari - hari tertentu	Kota Lhokseumawe	180 Pasang	60,500,000	APBK	-	180 Pasang	66,550,000	BPKD
05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal Yang Diikuti	Kota Lhokseumawe	5 Keg	200,000,000	APBK	-	5 Keg	48,000,000	BPKD
05.001.	Pendidikan dan pelatihan formal	Periode pendidikan dan pelatihan formal aparatur	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	200,000,000	APBK	-	12 Bulan	48,000,000	BPKD
06.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Cakupan penyediaan Dokumen pelaporan keuangan	Kota Lhokseumawe	4 Dokumen	64,215,800	APBK	-	4 Dokumen	50,000,000	BPKD
06.002.	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Jumlah buku laporan keuangan semesteran	Kota Lhokseumawe	3 Jenis Buku	64,215,800	APBK	-	3 Jenis Buku	50,000,000	BPKD
07.	Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja	Cakupan penyediaan dokumen perencanaan SKPK	Kota Lhokseumawe	1 Dokumen	1,452,000	APBK	-	1 Dokumen	1,597,200	BPKD
07.002.	Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Buku RENJA SKPD	Kota Lhokseumawe	10 Buku	1,452,000	APBK	-	10 Buku	1,597,200	BPKD
15	Program Peningkatan Efektifitas Pengeluaran Daerah	Cakupan pelaksanaan pengeluaran belanja daerah	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	927,000,000	APBK	-	12 Bulan	232,925,000	BPKD
15.002.	Pengelolaan penggajian Pemerintah Kota Lhokseumawe	periode pengelolaan penggajian Pemkot Kota Lhokseumawe	Kota Lhokseumawe	4 Triwulan	104,500,000	APBK	-	4 Triwulan	127,906,250	BPKD
15.016.	Penataan Fungsi Pengelolaan Kas	Periode Penataan Fungsi Pengelolaan Kas	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	111,700,000	APBK	-	12 Bulan	105,018,750	BPKD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2020			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		OPD Penanggung jawab
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.017.	Penyusunan Laporan Pengeluaran/Belanja Pemerintah Kota Lhokseumawe	Jumlah Buku Laporan Register SP2D	Kota Lhokseumawe	1 Dokumen	194,600,000	APBK	-	-	0	BPKD
15.018.	Penyusunan Laporan Dana Transfer	Jumlah Laporan DAK Fisik dan DAK Non Fisik	Kota Lhokseumawe	1 Dokumen	163,300,000	APBK	-	-	0	BPKD
15.019.	Penyusunan Laporan Dana Otonomi Khusus	Jumlah Laporan Dana Otsus	Kota Lhokseumawe	1 Dokumen	120,400,000	APBK	-	-	0	BPKD
15.020.	Sistem Aplikasi Penggajian Pemerintah Kota Lhokseumawe	Periode Sistem Aplikasi Penggajian Pemerintah Kota Lhokseumawe	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	67,000,000	APBK	-	-	0	BPKD
15.021.	Rekonsiliasi Penerimaan Kas	Periode Rekonsiliasi Penerimaan Kas	Kota Lhokseumawe	4 Triwulan	89,700,000	APBK	-	-	0	BPKD
15.022.	Verifikasi Penyusunan Laporan Realisasi Dana Desa	Periode Verifikasi penyusunan laporan realisasi dana desa	Kota Lhokseumawe	4 Triwulan	75,800,000	APBK	-	-	0	BPKD
16	Prgram Peningkatan Penerimaan dan Pengamanan Keuangan Daerah	Besaran penerimaan PAD	Kota Lhokseumawe	70,5 M	1,916,488,250	APBK	-	72,6 M	796,869,700	BPKD
16.014.	Penertiban Pajak Daerah	Periode penertiban pajak daerah	Kota Lhokseumawe	4 Triwulan	60,000,000	APBK	-	-	0	BPKD
16.020.	Pendataan Wajib Pajak PBB	Periode Pendataan Wajib Pajak PBB	Kota Lhokseumawe	4 Triwulan	280,000,000	APBK	-	-	0	BPKD
16.021.	Penagihan Rutin dan Penagihan Tunggakan Pajak Daerah	Periode Penagihan Rutin dan Penagihan Runggakan Pajak	Kota Lhokseumawe	4 Triwulan	285,000,000	APBK	-	-	0	BPKD
16.050.	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak	Periode intensifikasi dan ekstensifikasi pajak	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	200,000,000	APBK	-	12 Bulan	235,982,463	BPKD
16.052.	Penagihan Rutin Tunggakan Retribusi Daerah	Periode Penagihan Rutin Tunggakan Retribusi Daerah	Kota Lhokseumawe	4 Triwulan	257,086,830	APBK	-	4 Triwulan	269,941,171	BPKD
16.053.	Pendataan, Penetapan Retribusi Daerah dan Pemakaian Kekayaan Daerah	Periode Pendataan Wajib Retribusi	Kota Lhokseumawe	4 Triwulan	197,516,420	APBK	-	4 Triwulan	208,492,241	BPKD
16.054.	Pelaporan dan Verifikasi Piutang Retribusi Daerah	Periode pelaporan piutang retribusi daerah	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	123,275,000	APBK	-	12 Bulan	82,453,825	BPKD
16.055.	Rekonsiliasi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe	Periode Rekonsiliasi PAD, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan	Kota Lhokseumawe	4 Triwulan	100,000,000	APBK	-	-	0	BPKD
16.056.	Manajemen dan Pengelolaan Aplikasi SISMIOP NG	Periode Penertiban Pelanggaran Pajak Daerah	Kota Lhokseumawe	4 Triwulan	180,010,000	APBK	-	-	0	BPKD
16.057.	Pelaksanaan Sidang Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara	Jumlah Pelaksanaan Sidang Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah	Kota Lhokseumawe	6 Kali	233,600,000	APBK	-	-	0	BPKD
17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Cakupan penyediaan pedoman dan dokumen APBK	Kota Lhokseumawe	7 Dokumen	4,717,307,150	APBK	-	7 Dokumen	4,648,546,050	BPKD
17.001.	Penyusunan analisa standar belanja	Jumla Buku Analisa Standar (ASB)	Kota Lhokseumawe	50 Buku	40,000,000	APBK	-	50 Buku	43,000,000	BPKD
17.002.	Penyusunan standar satuan harga	Jumlah Buku Standar Satuan Harga (SSH)	Kota Lhokseumawe	100 Buku	73,750,800	APBK	-	100 Buku	53,500,000	BPKD
17.003.	Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah	Jumlah Dokumen Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah	Kota Lhokseumawe	1 Dok	40,907,600	APBK	-	1 Dok	35,000,000	BPKD
17.006.	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBK	Jumlah Dokumen Rancangan, Rencana dan Qanun APBK	Kota Lhokseumawe	3 Jenis Dokumen	1,429,273,500	APBK	-	3 Jenis Dokumen	1,349,873,500	BPKD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2020			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		OPD Penanggung jawab
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.007.	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBK	Jumlah Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBK dan DPPA SKPD	Kota Lhokseumawe	3 Jenis Dokumen	242,000,000	APBK	-	3 Jenis Dokumen	243,050,000	BPKD
17.008.	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD	Jumlah Dokumen Rancangan, Rencana dan Qanun P-APBK	Kota Lhokseumawe	3 Jenis Dokumen	200,000,000	APBK	-	3 Jenis Dokumen	218,500,000	BPKD
17.009.	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD dan DPPA SKPD	Jumlah Dokumen Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kota Lhokseumawe	3 Jenis Dokumen	185,000,000	APBK	-	3 Jenis Dokumen	175,000,000	BPKD
17.010.	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Jumlah rancangan qanun tentang pertanggung jawaban APBK Tahun 2018	Kota Lhokseumawe	2 Jenis Buku	209,069,700	APBK	-	2 Jenis Buku	232,500,000	BPKD
17.011.	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Jumlah rancangan qanun dan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggung jawaban APBK	Kota Lhokseumawe	5 Jenis Buku	92,095,400	APBK	-	5 Jenis Buku	90,000,000	BPKD
17.014.	Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	Jumlah Sosialisasi baru tentang pengelolaan keuangan daerah	Kota Lhokseumawe	2 Kali	130,800,000	APBK	-	-	0	BPKD
17.021.	Penyusunan Buku Pedoman Penyusunan RKA dan DPA SKPD	Jumlah Buku Penyusunan dan Pedoman RKA-DPA SKPD	Kota Lhokseumawe	50 Buku	61,760,000	APBK	-	50 Buku	61,500,000	BPKD
17.022.	Pembinaan / Pergeseran Anggaran	Jumlah SKPD yang melaksanakan pembinaan/pergeseran anggaran	Kota Lhokseumawe	35 SKPD	60,680,000	APBK	-	35 SKPD	64,500,000	BPKD
17.023.	Penyusunan Rancangan Qanun tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Rancangan Qanun Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah	Kota Lhokseumawe	1 Rancangan	64,110,800	APBK	-	1 Rancangan	63,200,000	BPKD
17.026.	Peningkatan manajemen keuangan daerah	Jumlah Dokumen Laporan DAK Fisik, DAK Non Fisik dan Buku Register	Kota Lhokseumawe	3 Dok	107,200,000	APBK	-	3 Dok	243,000,000	BPKD
17.027.	Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe	Jumlah rancangan laporan keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe	Kota Lhokseumawe	3 Jenis Buku	157,308,100	APBK	-	3 Jenis Buku	165,000,000	BPKD
17.028.	Manajemen Pengelolaan SIMDA Keuangan	Periode Pengelolaan Aplikasi SIMDA	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	230,568,200	APBK	-	12 Bulan	179,500,000	BPKD
17.029.	Bimtek Pengelolaan Aplikasi SIMDA Keuangan	Jumlah Peserta Bimtek SKPD Pengelola Aplikasi SIMDA Keuangan	Kota Lhokseumawe	200 Org	63,400,000	APBK	-	200 Org	52,700,000	BPKD
17.035.	Penyusunan Sistem dan Prosedur (SISDUR) Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Sisdur Pengelolaan Keuangan Daerah	Kota Lhokseumawe	1 Dok	59,165,300	APBK	-	1 Dok	56,317,903	BPKD
17.039.	Pelayanan Validasi dan Verifikasi SSPD BPHTB	Periode Pelayanan Validasi dan Verifikasi SSPD BPHTB	Kota Lhokseumawe	4 Triwulan	150,000,000	APBK	-	4 Triwulan	186,587,468	BPKD
17.040.	Penerbitan dan Pendistribusian Dokumen Ketetapan Pajak	Jumlah Blangko SPPT PBB, SSPD PBB dan DHKP	Kota Lhokseumawe	3 Jenis Blangko	247,446,000	APBK	-	3 Jenis Blangko	249,912,732	BPKD
17.041.	Verifikasi Lapangan dan Penilaian Individu Data Objek Pajak dan Zona Nilai Tanah PBB	Jumlah Peta Blok 4 Kecamatan	Kota Lhokseumawe	300 Lbr	110,000,000	APBK	-	300 Lbr	106,528,355	BPKD
17.046.	Pengelolaan Pelaporan Keuangan	Periode Pengelolaan Pelaporan Keuangan	Kota Lhokseumawe	4 Triwulan	69,302,800	APBK	-	4 Triwulan	24,585,750	BPKD
17.047.	Pemetaan Akun Pendapatan dan Belanja	Jumlah Dokumen Akun Pendapatan dan Belanja	Kota Lhokseumawe	1 Dokumen	27,120,800	APBK	-	1 Dokumen	15,883,750	BPKD
17.048.	Penyusunan Saldo Awal Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Saldo Awal Laporan Keuangan	Kota Lhokseumawe	1 Dokumen	38,456,600	APBK	-	1 Dokumen	40,148,759	BPKD
17.051.	Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan Wajib Pajak	Periode Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan Wajib Pajak	Kota Lhokseumawe	4 Triwulan	350,000,000	APBK	-	4 Triwulan	377,051,783	BPKD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2020			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		OPD Penanggung jawab
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.052.	Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)	Jumlah buku rancangan KUA dan Nota Kesepakatan KUA	Kota Lhokseumawe	100 Buku	68,128,100	APBK	-	100 Buku	82,688,100	BPKD
17.053.	Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)	Jumlah Buku Rancangan PPAS dan Nota Kesepakatan PPAS	Kota Lhokseumawe	110 Buku	81,674,350	APBK	-	110 Buku	93,924,350	BPKD
17.054.	Penyusunan Perubahan KUA	Jumlah Buku KUA Perubahan dan Nota Kesepakatan KUA	Kota Lhokseumawe	95 Buku	43,178,300	APBK	-	95 Buku	48,178,300	BPKD
17.055.	Penyusunan Perubahan PPAS	Jumlah Buku PPAS Perubahan dan Nota Kesepakatan PPAS	Kota Lhokseumawe	105 Buku	84,910,800	APBK	-	105 Buku	96,915,300	BPKD
18	Program Pembinaan Akuntansi Keuangan Daerah	Opini BPK Laporan Keuangan Daerah	Kota Lhokseumawe	WTP	179,657,300	APBK	-	WTP	192,995,000	BPKD
18.002.	Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran	Jumlah Buku Laporan Realisasi Anggaran	Kota Lhokseumawe	2 Jenis Buku	90,052,400	APBK	-	2 Jenis Buku	96,773,125	BPKD
18.005.	Rekonsiliasi Laporan Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD	Kota Lhokseumawe	1 Dok	89,604,900	APBK	-	1 Dok	96,221,875	BPKD
19	Program Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Kekayaan Daerah	Cakupan laporan pengelolaan aset daerah	Kota Lhokseumawe	8 Dokumen	1,775,266,261	APBK	-	8 Dokumen	1,384,683,596	BPKD
19.004.	Penyusunan Buku Inventaris Aset Daerah	Jumlah Buku Inventarisasi Aset Daerah	Kota Lhokseumawe	3 Jenis Buku	31,728,661	APBK	-	3 Jenis Buku	33,315,094	BPKD
19.008.	Inventarisasi dan Sertifikasi Barang/Aset Daerah	Periode Inventarisasi, Sertifikasi Barang/Aset Daerah	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	105,510,200	APBK	-	12 Bulan	49,612,500	BPKD
19.009.	Verifikasi Penyusunan Laporan Realisasi PPKD	Periode Verifikasi Penyusunan Laporan Realisasi PPKD	Kota Lhokseumawe	4 Triwulan	55,200,000	APBK	-	4 Triwulan	99,225,000	BPKD
19.011.	Pemeliharaan Aset Daerah Bergerak dan Tidak Bergerak	Periode Pemeliharaan Aset Daerah Bergerak dan Tidak Bergerak	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	500,000,000	APBK	-	12 Bulan	521,501,527	BPKD
19.012.	Penghapusan Aset Daerah Bergerak dan Tidak Bergerak	Periode penghapusan aset daerah bergerak dan tidak bergerak	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	36,750,000	APBK	-	12 Bulan	38,587,500	BPKD
19.026.	Rekonsiliasi Laporan Barang Milik Daerah dengan SKPD di Jajaran Pemerintah Kota Lhokseumawe	Jumlah SKPD yang melakukan rekonsiliasi Laporan BMD	Kota Lhokseumawe	35 SKPD	92,300,000	APBK	-	35 SKPD	55,125,000	BPKD
19.028.	Rekonsiliasi Aset Lancar dengan SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe	Jumlah SKPD yang melakukan Rekonsiliasi Aset Lancar	Kota Lhokseumawe	35 SKPD	118,350,000	APBK	-	35 SKPD	55,125,000	BPKD
19.030.	Pengelolaan Aplikasi Persediaan	Periode Pengelolaan Aplikasi Persediaan	Kota Lhokseumawe	4 Triwulan	59,536,900	APBK	-	4 Triwulan	165,375,000	BPKD
19.031.	Pengelolaan Aplikasi SIMDA BMD	Periode Pengelolaan Aplikasi SIMDA BMD	Kota Lhokseumawe	4 Triwulan	82,750,000	APBK	-	4 Triwulan	165,375,000	BPKD
19.033.	Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Buku RKBMD	Kota Lhokseumawe	50 Buku	95,738,800	APBK	-	50 Buku	54,654,475	BPKD
19.034.	Verifikasi dan Penelitian Belanja Bantuan	Periode Verifikasi dan Penelitian Belanja Bantuan	Kota Lhokseumawe	4 Triwulan	60,600,400	APBK	-	4 Triwulan	55,125,000	BPKD
19.036.	Patok / Batas Aset Daerah	Jumlah patok batas kepemilikan tanah milik Pemkot Kota Lhokseumawe	Kota Lhokseumawe	1 Paket	75,311,300	APBK	-	1 Paket	20,000,000	BPKD
19.040.	Buku Status Barang Milik Daerah	Jumlah Buku Status Barang Milik Daerah	Kota Lhokseumawe	50 Buku	71,490,000	APBK	-	50 Buku	71,662,500	BPKD
19.052.	Pendataan dan Pengamanan Aset Daerah	Periode Pendataan dan Pengamanan Aset Daerah	Kota Lhokseumawe	1 kali	390,000,000	APBK	-		0	BPKD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2020			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		OPD Penanggung jawab
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota	Cakupan pengelolaan sistem informasi keuangan daerah	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	212,356,000	APBK	-	12 Bulan	129,107,000	BPKD
20.008.	Pemeliharaan Jaringan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Periode Pemeliharaan Jaringan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	118,682,800	APBK	-	12 Bulan	129,107,000	BPKD
20.010.	Pengelolaan Website dan Email BPKD	Periode Pengelolaan Website dan E-Mail BPKD Kota Lhokseumawe	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	93,673,200	APBK	-	-	0	BPKD
	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia				5,939,411,078	APBK	-		1,941,752,469	BKPSDM
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang				5,939,411,078	APBK	-		1,941,752,469	BKPSDM
4.05.	Kepegawaian				5,939,411,078	APBK	-		1,941,752,469	BKPSDM
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kota Lhokseumawe	100%	818,862,340	APBK	-	100%	682,365,474	BKPSDM
01.001.	Penyediaan jasa surat menyurat	Periode penyediaan jasa surat menyurat	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	2,300,000	APBK	-	12 Bulan	2,000,000	BKPSDM
01.002.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Periode penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	140,400,000	APBK	-	12 Bulan	128,400,000	BKPSDM
01.007.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah pejabat pengelola keuangan SKPD (18 Org x 12 Bln)	Kota Lhokseumawe	216 OB	123,900,000	APBK	-	216 OB	120,207,100	BKPSDM
01.010.	Penyediaan alat tulis kantor	Periode penyediaan alat tulis kantor	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	52,600,000	APBK	-	12 Bulan	43,000,000	BKPSDM
01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Periode penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	24,956,840	APBK	-	12 Bulan	17,000,000	BKPSDM
01.013.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Periode penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	11,620,500	APBK	-	12 Bulan	3,000,000	BKPSDM
01.015.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Periode penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kota Lhokseumawe	730 Eks	2,280,000	APBK	-	730 Eks	1,140,000	BKPSDM
01.017.	Penyediaan makanan dan minuman	Periode penyediaan makanan dan minuman	Kota Lhokseumawe	11 Bulan	23,775,000	APBK	-	11 Bulan	5,000,000	BKPSDM
01.018.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Periode rapat-rapat dan konsultasi ke luar daerah	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	250,000,000	APBK	-	12 Bulan	160,000,000	BKPSDM
01.020.	Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap	Jumlah jasa pegawai tidak tetap (33 org x 12 bln)	Kota Lhokseumawe	396 OB	187,030,000	APBK	-	396 OB	202,618,374	BKPSDM
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	Kota Lhokseumawe	100%	1,600,105,250	APBK	-	100%	75,718,840	BKPSDM
02.003.	Pembangunan gedung kantor	Jumlah pembangunan gedung kantor	Kota Lhokseumawe	1 Unit	1,007,500,000	APBK	-	1 Unit	1,000,000	BKPSDM
02.005.	Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas	Kota Lhokseumawe	2 Unit	60,450,000	APBK	-	1 Unit	1,000,000	BKPSDM
02.011.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Lhokseumawe	18 Jenis	398,905,250	APBK	-	1 Jenis	11,518,840	BKPSDM
02.022.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Periode pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	30,000,000	APBK	-	12 Bulan	3,000,000	BKPSDM
02.023.	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Kota Lhokseumawe	12 UB	33,300,000	APBK	-	12 UB	29,700,000	BKPSDM

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2020			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		OPD Penanggung jawab
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
02.024.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kota Lhokseumawe	12 UB	33,300,000	APBK	-	12 UB	19,500,000	BKPSDM
02.030.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Periode pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan kantor	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	36,650,000	APBK	-	12 Bulan	10,000,000	BKPSDM
03.	Program peningkatan disiplin aparatur	Presentase tingkat disiplin aparatur	Kota Lhokseumawe	100%	85,637,500	APBK	-	100%	50,000,000	BKPSDM
03.002.	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas khusus hari-hari tertentu	Kota Lhokseumawe	170 Pasang	85,637,500	APBK	-	256 Pasang	50,000,000	BKPSDM
05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan kegiatan pendidikan dan pelatihan formal yang diikuti	Kota Lhokseumawe	5 Kegiatan	220,000,000	APBK	-	5 Kegiatan	16,550,000	BKPSDM
05.005.	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	Jumlah Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur yang Diikuti	Kota Lhokseumawe	13 Kali	220,000,000	APBK	-	9 Kali	16,550,000	BKPSDM
07.	Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja	Cakupan penyediaan dokumen perencanaan SKPK	Kota Lhokseumawe	1 Dokumen	4,350,000	APBK	-	1 Dokumen	1,397,200	BKPSDM
07.002.	Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah	Jumlah buku renja SKPD	Kota Lhokseumawe	10 buku	4,350,000	APBK	-	10 buku	1,397,200	BKPSDM
15	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.	Cakupan kegiatan pendidikan dan pelatihan formal yang diikuti, Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Struktural	Kota Lhokseumawe	5 % 3,46%	1,780,375,478	APBK	-	5 % 3,81%	775,255,000	BKPSDM
15.001.	Pengembangan Sistem E-Performance	Periode Pelaksanaan pengembangan sistem e-kinerja	Kota Lhokseumawe	1 kali	298,637,250	APBK	-	1 kali	283,755,000	BKPSDM
15.002.	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS Daerah	Jumlah peserta diklat prajabatan	Kota Lhokseumawe	11 orang	186,850,000	APBK	-	50 orang	34,000,000	BKPSDM
15.003.	Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah	Jumlah pengiriman peserta pendidikan dan pelatihan kepemimpinan Pengawas (Diklat PIM Tk. IV)	Kota Lhokseumawe	20 orang	524,503,376	APBK	-	30 orang	240,000,000	BKPSDM
15.008.	Penataan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian	Jumlah dokumen peremajaan data ASN	Kota Lhokseumawe	35 buku	61,193,500	APBK	-	35 buku	30,000,000	BKPSDM
15.010.	Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat	Jumlah peserta ujian dinas dan ujian kenaikan pangkat	Kota Lhokseumawe	120 orang	37,214,000	APBK	-	120 orang	30,000,000	BKPSDM
15.011.	Pembuatan Dokumen Analisis Kebutuhan Diklat (AKD)	Jumlah Dokumen Analisis Pengembangan Kompetensi	Kota Lhokseumawe	5 dokumen	37,024,000	APBK	-	5 dokumen	24,000,000	BKPSDM
15.013.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Pegawai ASN Dengan Sistem E-Formasi	Jumlah Pelaksanaan penyusunan peta kebutuhan ASN yang akurat dan sistematis	Kota Lhokseumawe	1 kali	58,357,000	APBK	-	1 kali	25,000,000	BKPSDM
15.015.	Evaluasi dan Verifikasi Peserta Tugas Belajar, Izin Belajar dan Surat Keterangan Selesai Pendidikan	Jumlah Pelaksanaan evaluasi dan verifikasi peserta tugas belajar, izin belajar dan surat keterangan selesai pendidikan	Kota Lhokseumawe	1 kali	21,663,650	APBK	-	1 kali	18,500,000	BKPSDM
15.016.	Sosialisasi Diklat Kepemimpinan Dengan Pola Baru	Jumlah peserta sosialisasi diklat kepemimpinan dengan pola baru	Kota Lhokseumawe	50 orang	70,948,076	APBK	-	50 orang	10,000,000	BKPSDM

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2020			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		OPD Penanggung jawab
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.018.	Pengiriman Peserta Diklat Kepemimpinan (PIM Tk. II dan PIM Tk. III)	Jumlah pengiriman peserta pendidikan dan pelatihan kepemimpinan	Kota Lhokseumawe	14 orang	430,143,376	APBK	-	14 orang	60,000,000	BKPSDM
15.019.	Pengelolaan dan Peremajaan Data Sistem e - Lapkin	Jumlah pelaksanaan pengelolaan dan peremajaan data penilaian SKP ASN yang dilaporkan dalam sistem e-lapkin	Kota Lhokseumawe	1 Kali	53,841,250	APBK	-	1 Kali	20,000,000	BKPSDM
16	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur.	Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	1,430,080,510	APBK	-	12 Bulan	340,465,955	BKPSDM
16.001.	Penyusunan Rencana Pembinaan Karier PNS	Jumlah pelaksanaan pembinaan karir ASN	Kota Lhokseumawe	8 kali	65,993,900	APBK	-	8 kali	38,000,000	BKPSDM
16.002.	Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS	Periode kenaikan pangkat otomatis ASN	Kota Lhokseumawe	2 Periode	93,958,350	APBK	-	2 Periode	30,000,000	BKPSDM
16.004.	Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil	Jumlah pelaksanaan seleksi penerimaan ASN di lingkungan Pemko Kota Lhokseumawe	Kota Lhokseumawe	1 kali	276,892,300	APBK	-	1 kali	5,000,000	BKPSDM
16.024.	Pelaksanaan Penyerahan Satya Lencana Karya Satya	Jumlah aparaturnya penerima satya lencana karya satya	Kota Lhokseumawe	110 orang	273,979,300	APBK	-	110 orang	45,000,000	BKPSDM
16.025.	Pelaksanaan Pemantauan di Siplin PNS	Jumlah pelaksanaan pemantauan disiplin ASN	Kota Lhokseumawe	4 kali	31,040,000	APBK	-	4 kali	28,000,000	BKPSDM
16.026.	Pelaksanaan Sumpah/Janji PNS	Jumlah ASN yang mengikuti kegiatan sumpah ASN di Pemko Kota Lhokseumawe	Kota Lhokseumawe	200 Orang	33,560,000	APBK	-	200 Orang	18,000,000	BKPSDM
16.027.	Pelaksanaan Pemberian Penghargaan Kepada PNS Masa Purna Bakti	Jumlah pelaksanaan pemberian penghargaan kepada ASN masa purna bhakti	Kota Lhokseumawe	1 kali	44,692,300	APBK	-	1 kali	27,465,955	BKPSDM
16.043.	Evaluasi dan Verifikasi Tenaga Honorar dan Tenaga Bakti	Jumlah pelaksanaan evaluasi dan verifikasi tenaga honorar dan tenaga bakti	Kota Lhokseumawe	1 kali	22,500,000	APBK	-	1 kali	20,000,000	BKPSDM
16.048.	Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK)	Jumlah pelaksanaan seleksi penerimaan PPPK di lingkungan Pemko Kota Lhokseumawe	Kota Lhokseumawe	1 kali	184,123,960	APBK	-	1 kali	10,000,000	BKPSDM
16.050.	Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara di Pemko Kota Lhokseumawe	Jumlah pelaksanaan seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama	Kota Lhokseumawe	1 kali	97,146,400	APBK	-	350 Orang	85,000,000	BKPSDM
16.051.	Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	Jumlah aparaturnya Pemko Kota Lhokseumawe yang wajib lapor harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN)	Kota Lhokseumawe	350 Orang	306,194,000	APBK	-	1 kali	34,000,000	BKPSDM
	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah				27,968,881,415	APBK	-		10,508,865,617	DSIPD
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang				27,968,881,415	APBK	-		10,508,865,617	DSIPD
4.06.	Keistimewaan dan Kekhususan				27,968,881,415	APBK	-		10,508,865,617	DSIPD
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Kota Lhokseumawe	100 %	750,440,975	APBK	-	100 %	526,430,997	DSIPD
01.001.	Penyediaan jasa surat menyurat	Periode penyediaan jasa Surat menyurat	Kota Lhokseumawe	12 bulan	4,950,000	APBK	-	12 bulan	6,723,997	DSIPD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2020			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		OPD Penanggung jawab
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01.002.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Lhokseumawe	12 bulan	84,000,000	APBK	-	12 bulan	65,680,000	DSIPD
01.007.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah pejabat pengelola keuangan SKPD (18 Org x 12 Bln)	Kota Lhokseumawe	18 Orang	145,550,000	APBK	-	18 Orang	111,450,900	DSIPD
01.010.	Penyediaan alat tulis kantor	Periode penyediaan alat tulis kantor	Kota Lhokseumawe	12 bulan	30,500,000	APBK	-	12 bulan	34,570,010	DSIPD
01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Lhokseumawe	12 bulan	40,000,000	APBK	-	12 bulan	36,010,000	DSIPD
01.013.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Periode penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Lhokseumawe	12 bulan	3,769,975	APBK	-	12 bulan	7,776,090	DSIPD
01.015.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan (1 EKS x 365 Hari)	Kota Lhokseumawe	24 EKS	1,980,000	APBK	-	24 EKS	5,820,000	DSIPD
01.017.	Penyediaan makanan dan minuman	Periode penyediaan makan minum	Kota Lhokseumawe	12 bulan	30,000,000	APBK	-	12 bulan	34,000,000	DSIPD
01.018.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Periode rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kota Lhokseumawe	12 bulan	200,000,000	APBK	-	12 bulan	84,000,000	DSIPD
01.020.	Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap	Jumlah jasa pegawai tidak tetap (36 Org x 12 Bln)	Kota Lhokseumawe	12 bulan	209,691,000	APBK	-	12 bulan	140,400,000	DSIPD
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Pelayanan sarana dan prasarana aparatur	Kota Lhokseumawe	100 %	345,105,000	APBK	-	100 %	164,460,000	DSIPD
02.005.	Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	jumlah mobil oprasional	Kota Lhokseumawe		125,000,000	APBK	-		8,000,000	DSIPD
02.011.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Lhokseumawe	20 unit	148,105,000	APBK	-	20 unit	83,900,000	DSIPD
02.022.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Periode Pemeliharaan Rutin / berkala gedung kantor	Kota Lhokseumawe	12 bulan	8,000,000	APBK	-	12 bulan	9,000,000	DSIPD
02.023.	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah Pemeliharaan rutin / Berkala Mobil Jabatan (4 unit x 12 bulan)	Kota Lhokseumawe	12 UB	35,000,000	APBK	-	12 UB	30,990,000	DSIPD
02.024.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Pemeliharaan Rutin / Berkala kendaraan dinas / operasional (13 unit x 12 Bulan)	Kota Lhokseumawe	12 UB	20,000,000	APBK	-	12 UB	24,990,000	DSIPD
02.030.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Periode Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor	Kota Lhokseumawe	21 unit	9,000,000	APBK	-	21 unit	7,580,000	DSIPD
03.	Program peningkatan disiplin aparatur	persentase tingkat disiplin aparatur	Kota Lhokseumawe	100 %	199,900,000	APBK	-	100 %	119,790,000	DSIPD
03.002.	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Khusus Hari-hari Tertentu	Kota Lhokseumawe	100 Stel	99,900,000	APBK	-	100 Stel	19,790,000	DSIPD
03.006.	Penyediaan Sewa Gedung/Gudang Kantor	Periode sewa Gedung Kantor	Kota Lhokseumawe	2 gedung	100,000,000	APBK	-	2 gedung	100,000,000	DSIPD
07.	Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja	Cakupan penyediaan dokumen presentasi SKPK	Kota Lhokseumawe	1 Dokumen	2,500,000	APBK	-	1 Dokumen	1,597,200	DSIPD
07.002.	Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah	jumlah Buku RENJA SKPD	Kota Lhokseumawe	15 buku	2,500,000	APBK	-	15 buku	1,597,200	DSIPD
15	Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama	Cakupan pelayanan kehidupan beragama	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	9,547,344,500	APBK	-	12 Bulan	6,296,016,668	DSIPD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2020			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		OPD Penanggung jawab
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.001.	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Agama	jumlah sarana prasarana yang dibantu	Kota Lhokseumawe	15 unit	2,768,937,000	APBK	-	15 unit	2,210,663,334	DSIPD
15.010.	Pemberian Jasa Keagamaan	Periode Pemberian Jasa Keagamaan	Kota Lhokseumawe	12 bulan	1,862,290,000	APBK	-	12 bulan	1,735,263,334	DSIPD
15.011.	Pembinaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Mesjid	jumlah penyediaan pembangunan sarana dan prasarana agama	Kota Lhokseumawe	7 unit	3,358,757,500	APBK	-	7 unit	1,700,500,000	DSIPD
15.013.	Pelaksanaan Rangkaian Ibadah Haji dan Umrah	Jumlah Orang yang Mengikuti Manasik dan berangkat Haji	Kota Lhokseumawe	270 calon Jamaah haji	522,360,000	APBK	-	270 calon Jamaah haji	550,840,000	DSIPD
15.014.	Pemberangkatan Umrah Pimpinan Dayah dan Balai Pengajian yang Berprestasi	jumlah pimpinan dayah dan BP yang berangkat umrah	Kota Lhokseumawe	50 Orang	1,035,000,000	APBK	-	50 Orang	98,750,000	DSIPD
16	Program Peningkatan Pelaksanaan Syariat Islam dan Peran Ulama	Persentase penurunan pelanggaran syariat	Kota Lhokseumawe	50 Kasus	7,535,093,550	APBK	-	42 Kasus	953,941,202	DSIPD
16.004.	Peningkatan Penertiban Syariat Islam	Periode Pelaksananya penertiban bagi pelanggar syariat islam	Kota Lhokseumawe	12 bulan	287,062,000	APBK	-	12 bulan	55,000,000	DSIPD
16.005.	Memperingati Hari-hari Besar Agama Islam	Periode pelaksanaan peringatan hari-hari besar islam	Kota Lhokseumawe	9 hari	1,154,366,050	APBK	-	9 hari	108,000,000	DSIPD
16.008.	Pembinaan Qari-qariah Kota Lhokseumawe	Periode penyediaan anggaran untuk pembinaan qari-qariah	Kota Lhokseumawe	12 bulan	422,400,000	APBK	-	12 bulan	70,000,003	DSIPD
16.009.	Pembinaan Hafizh Hafizhah Kota Lhokseumawe	Periode penyediaan anggaran untuk pembinaan hafidz-hafidzah	Kota Lhokseumawe	12 bulan	1,060,460,000	APBK	-	12 bulan	99,785,000	DSIPD
16.010.	Kegiatan Badan Kontak Majelis Taklim	periode pembinaan kegiatan BKMT	Kota Lhokseumawe	12 bulan	847,787,500	APBK	-	12 bulan	359,156,199	DSIPD
16.012.	Pengembangan Tilawatil Qur'an	periode terbinaanya tilawatil qur'an	Kota Lhokseumawe	12 bulan	406,300,000	APBK	-	12 bulan	40,500,000	DSIPD
16.014.	Pelaksanaan MTQ Tingkat Kota Lhokseumawe	Periode pelaksanaan MTQ tingkat kota	Kota Lhokseumawe	7 hari	1,500,000,000	APBK	-	7 hari	0	DSIPD
16.018.	Penyusunan Rancangan Peraturan Bidang Syariat Islam	Jumlah Buku Rancangan Peraturan Bidang Syariat Islam	Kota Lhokseumawe	2 Buku	128,320,000	APBK	-	2 Buku	26,500,000	DSIPD
16.019.	Publikasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Syariat Islam	Periode publikasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Syariat Islam	Kota Lhokseumawe	4 kali	91,500,000	APBK	-		55,000,000	DSIPD
16.020.	Sosialisasi Pelaksanaan Qanun dan Perwal Bidang Syariat Islam	Jumlah Peserta Sosialisasi Pelaksanaan Qanun dan Perwal Bidang Syariat Islam	Kota Lhokseumawe	80 Org	1,024,397,500	APBK	-		55,000,000	DSIPD
16.021.	Pelatihan Tajhiz Mayat dan Hukum Mawaris (OTSUS)	Jumlah Peserta Pelatihan Pengajaran Tatacara Penanganan Mayat dan Hukum Mawaris	Kota Lhokseumawe	80 Org	500,000,000	APBK	-	80 Orang	0	DSIPD
16.023.	Pelatihan Manajemen Masjid	Jumlah Peserta Pelatihan	Kota Lhokseumawe	100 Orang	112,500,500	APBK	-	100 Orang	85,000,000	DSIPD
21	Program Pendidikan, Pembinaan dan Pengembangan Dayah	Jumlah Dayah dengan tipe "A"	Kota Lhokseumawe	17 Dayah	8,960,522,500	APBK	-	18 Dayah	2,283,929,550	DSIPD
21.001.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Dayah	jumlah dayah yang mendapat bantuan	Kota Lhokseumawe	60 unit	4,365,562,500	APBK	-	60 unit	1,435,000,000	DSIPD
21.002.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Dayah (OTSUS)	Jumlah dayah yang mendapat bantuan	Kota Lhokseumawe	60 unit	4,000,000,000	APBK	-	4 Kecamatan	589,729,550	DSIPD
21.003.	Perlombaan Baca Kitab Kuning	Jumlah peserta lomba baca kitab kuning	Kota Lhokseumawe	55 Santri	94,960,000	APBK	-	55 Santri	259,200,000	DSIPD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2020			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		OPD Penanggung jawab
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21.007.	Pelatihan Life Skill Santri (OTSUS)	Jumlah Pelatihan Life Skill Santri (OTSUS)	Kota Lhokseumawe	120 Orang	500,000,000	APBK	-		0	DSIPD
31	Program Peningkatan Sumber Daya Ulama dan Kualitas Pendidikan Agama	Jumlah Hafiz/Hafizah	Kota Lhokseumawe	25 Orang	522,199,890	APBK	-	25 Orang	12,700,000	DSIPD
31.010.	Pengadaan Buku Agama, Kitab dan Al-Qur'an	Jumlah Buku Agama, Kitab dan Al-Qur'an	Kota Lhokseumawe	2 Paket	200,000,000	APBK	-	1 paket	0	DSIPD
31.021.	Pemberdayaan Badan Kemakmuran Masjid	jumlah masjid yang dapat oprasional	Kota Lhokseumawe	4 Kec	322,199,890	APBK	-	4 Kec	12,700,000	DSIPD
32	Program Penelitian dan Pengembangan Agama	Persentase sumberdaya tenaga keagamaan dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan agam	Kota Lhokseumawe	75%	105,775,000	APBK	-	75%	150,000,000	DSIPD
32.004.	Pendataan Balai Pengajian dan Dayah Se Wilayah Kota Lhokseumawe	Periode pendataan balai pengajian dan dayah yang masih aktif di Kota Lhokseumawe	Kota Lhokseumawe	3 Kali	40,775,000	APBK	-	1 keg	75,000,000	DSIPD
32.008.	Pendataan Sarana dan Prasarana Ibadah Masyarakat	Periode Pendataan Sarana dan Prasarana Ibadah Masyarakat	Kota Lhokseumawe	3 Kali	65,000,000	APBK	-	1 keg	75,000,000	DSIPD
	Sekretariat MPU				3,175,457,015	APBK	-		2,382,409,700	Sekretariat MPU
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang				3,175,457,015	APBK	-		2,382,409,700	Sekretariat MPU
4.06.	Keistimewaan dan Kekhususan				3,175,457,015	APBK	-		2,382,409,700	Sekretariat MPU
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Kota Lhokseumawe	100%	1,791,404,525	APBK	-	100%	1,962,582,381	Sekretariat MPU
01.001.	Penyediaan jasa surat menyurat	Periode Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	2,700,000	APBK	-	12 Bulan	2,970,000	Sekretariat MPU
01.002.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Periode Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	15,494,600	APBK	-	12 Bulan	17,044,060	Sekretariat MPU
01.007.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah pejabat pengelolaan keuangan SKPD (13 Org x 12 Bulan)	Kota Lhokseumawe	156 OB	71,365,950	APBK	-	156 OB	71,365,950	Sekretariat MPU
01.010.	Penyediaan alat tulis kantor	Periode Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	19,434,825	APBK	-	12 Bulan	21,378,307	Sekretariat MPU
01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Periode Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	9,911,600	APBK	-	12 Bulan	10,902,760	Sekretariat MPU
01.013.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Periode Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	2,133,650	APBK	-	12 Bulan	2,347,015	Sekretariat MPU
01.015.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Lhokseumawe	365 Eks	31,140,000	APBK	-	365 Eks	31,140,000	Sekretariat MPU
01.017.	Penyediaan makanan dan minuman	Periode Penyediaan Makanan dan Minuman	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	35,000,000	APBK	-	12 Bulan	38,500,000	Sekretariat MPU
01.018.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Periode rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	95,700,000	APBK	-	12 Bulan	105,270,000	Sekretariat MPU

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2020			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		OPD Penanggung jawab
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01.020.	Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap	Jumlah jasa pegawai tidak tetap (13 Org x 12 Bulan)	Kota Lhokseumawe	173 OB	101,606,475	APBK	-	173 OB	118,631,122	Sekretariat MPU
01.023.	Penyediaan Jasa Lembaga Keistimewaan Aceh	Jumlah Jasa Lembaga Keistimewaan Aceh (30 Org x 12 Bulan)	Kota Lhokseumawe	504 OB	1,406,917,425	APBK	-	504 OB	1,543,033,167	Sekretariat MPU
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Pelayanan sarana dan prasarana aparatur	Kota Lhokseumawe	100%	1,177,991,215	APBK	-	100%	199,933,897	Sekretariat MPU
02.011.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Lhokseumawe	48 Unit	1,082,691,215	APBK	-	43 Unit	104,633,897	Sekretariat MPU
02.023.	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Periode Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Kota Lhokseumawe	12 UB	23,500,000	APBK	-	12 UB	23,500,000	Sekretariat MPU
02.024.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Periode Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kota Lhokseumawe	36 UB	67,800,000	APBK	-	36 UB	67,800,000	Sekretariat MPU
02.030.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Periode Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	4,000,000	APBK	-	12 Bulan	4,000,000	Sekretariat MPU
03.	Program peningkatan disiplin aparatur	persentase tingkat disiplin aparatur	Kota Lhokseumawe	100%	52,837,500	APBK	-	100%	58,121,250	Sekretariat MPU
03.002.	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas khusus hari-hari tertentu	Kota Lhokseumawe	90 Pasang	52,837,500	APBK	-	60 Pasang	58,121,250	Sekretariat MPU
07.	Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja	Cakupan penyediaan dokumen presentasi SKPK	Kota Lhokseumawe	1 Dokumen	1,400,000	APBK	-	1 Dokumen	1,400,000	Sekretariat MPU
07.002.	Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Buku Renja SKPD	Kota Lhokseumawe	13 Buku	1,400,000	APBK	-	13 Buku	1,400,000	Sekretariat MPU
31	Program Peningkatan Sumber Daya Ulama dan Kualitas Pendidikan Agama	Persentase penurunan pelanggaran syariat	Kota Lhokseumawe	50 Kasus	70,203,975	APBK	-	42 Kasus	74,568,372	Sekretariat MPU
31.005.	Pendidikan dan Pelatihan Bagi Para Ulama	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan bagi para ulama	Kota Lhokseumawe	20 orang	43,643,975	APBK	-	1 Kegiatan	48,008,372	Sekretariat MPU
31.014.	Pendidikan dan Pelatihan Bagi Para Ulama (Simposium Hukum Islam)	jumlah Peserta yang mengikuti Simposium Hukum Islam	Kota Lhokseumawe	80 orang	26,560,000	APBK	-	1 Kegiatan	26,560,000	Sekretariat MPU
32	Program Penelitian dan Pengembangan Agama	Cakupan sosialisasi hukum Islam	Kota Lhokseumawe	100 %	41,840,000	APBK	-	100%	46,024,000	Sekretariat MPU
32.006.	Sosialisasi Hukum dan Fatwa Melalui Media Elektronik	Jumlah narasumber yang melakukan sosialisasi hukum dan fatwa melalui media elektronik	Kota Lhokseumawe	25 Org	41,840,000	APBK	-	25 Org	46,024,000	Sekretariat MPU
46	Program Pembinaan, Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Ulama	Cakupan Pembinaan, Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Ulama	Kota Lhokseumawe	100 %	39,779,800	APBK	-	100 %	39,779,800	Sekretariat MPU
46.003.	Penyebarluasan dan Sosialisasi Informasi Keagamaan (Buletin MPU)	Jumlah Buletin MPU	Kota Lhokseumawe	52000 eks	39,779,800	APBK	-	52000 eks	39,779,800	Sekretariat MPU
	Sekretariat Baitul Mal				14,150,223,717	APBK	-		15,441,681,722	Sekretariat Baitul Mal

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2020			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		OPD Penanggung jawab
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang				14,150,223,717	APBK	-		15,441,681,722	Sekretariat Baitul Mal
4.06.	Keistimewaan dan Kekhususan				14,150,223,717	APBK	-		15,441,681,722	Sekretariat Baitul Mal
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Kota Lhokseumawe	100%	1,703,999,970	APBK	-	100%	1,865,026,600	Sekretariat Baitul Mal
01.001.	Penyediaan jasa surat menyurat	Periode Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	1,200,000	APBK	-	12 Bulan	1,300,000	Sekretariat Baitul Mal
01.002.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Periode Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	16,631,570	APBK	-	12 Bulan	17,631,570	Sekretariat Baitul Mal
01.007.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Pejabat Pengelola Keuangan	Kota Lhokseumawe	158 OB	85,702,100	APBK	-	158 OB	85,742,100	Sekretariat Baitul Mal
01.010.	Penyediaan alat tulis kantor	Periode Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	20,000,000	APBK	-	12 Bulan	22,000,000	Sekretariat Baitul Mal
01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Periode Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	9,600,000	APBK	-	12 Bulan	10,400,000	Sekretariat Baitul Mal
01.013.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Periode Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	1,639,700	APBK	-	12 Bulan	1,803,670	Sekretariat Baitul Mal
01.015.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Lhokseumawe	365 Eks	50,000,000	APBK	-	365 Eks	55,000,000	Sekretariat Baitul Mal
01.017.	Penyediaan makanan dan minuman	Periode Makanan dan minuman	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	7,800,000	APBK	-	12 Bulan	8,580,000	Sekretariat Baitul Mal
01.018.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Periode Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	80,000,000	APBK	-	12 Bulan	88,000,000	Sekretariat Baitul Mal
01.020.	Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap	Jumlah Jasa Pegawai Tidak Tetap	Kota Lhokseumawe	312 OB	124,150,000	APBK	-	363 OB	136,565,000	Sekretariat Baitul Mal
01.023.	Penyediaan Jasa Lembaga Keistimewaan Aceh	Jumlah Jasa Lembaga Keistimewaan Aceh	Kota Lhokseumawe	240 OB	1,307,276,600	APBK	-	300 OB	1,438,004,260	Sekretariat Baitul Mal
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	Kota Lhokseumawe	100%	258,150,000	APBK	-	100%	283,965,000	Sekretariat Baitul Mal
02.011.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Lhokseumawe	7 Paket	135,050,000	APBK	-	10 Unit	148,555,000	Sekretariat Baitul Mal
02.023.	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Kota Lhokseumawe	12 UB	45,000,000	APBK	-	12 UB	49,500,000	Sekretariat Baitul Mal
02.024.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Pemeliharaan Rutin / Berkala kendaraan dinas / operasional	Kota Lhokseumawe	12 UB	52,600,000	APBK	-	12 UB	57,860,000	Sekretariat Baitul Mal
02.030.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Lhokseumawe	13 Unit	5,500,000	APBK	-	13 Unit	6,050,000	Sekretariat Baitul Mal
02.042.	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang direhab	Kota Lhokseumawe	1 gedung	20,000,000	APBK	-	1 Kegiatan	22,000,000	Sekretariat Baitul Mal
03.	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase tingkat disiplin aparatur	Kota Lhokseumawe	100%	83,628,000	APBK	-	100%	91,990,800	Sekretariat Baitul Mal
03.002.	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Hari-hari tertentu	Kota Lhokseumawe	76 pasang	83,628,000	APBK	-	76 pasang	91,990,800	Sekretariat Baitul Mal

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2020			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		OPD Penanggung jawab
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
07.	Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja	Cakupan Penyediaan Dokumen perencanaan SKPK	Kota Lhokseumawe	1 Dokumen	1,100,000	APBK	-	1 Dokumen	1,210,000	Sekretariat Baitul Mal
07.002.	Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Buku RENJA SKPD	Kota Lhokseumawe	10 Buku	1,100,000	APBK	-	10 Buku	1,210,000	Sekretariat Baitul Mal
11	Program Pembinaan Keagamaan dan Adat	Cakupan pelaksanaan pemilihan dan pelantikan anggota Baitul Mal	Kota Lhokseumawe	1 Keg	21,685,620	APBK	-	1 Keg	23,854,182	Sekretariat Baitul Mal
11.004.	Pelantikan Kepala dan Wakil Kepala / Badan Pengawas Baitul Mal Kota Lhokseumawe	Periode Pelantikan Kepala dan Wakil Kepala / Badan Pengawas Baitul Mal Kota Lhokseumawe	Kota Lhokseumawe	1 kali	21,685,620	APBK	-	1 kali	23,854,182	Sekretariat Baitul Mal
47	Program Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan dan Pembinaan Baitul Mal	Jumlah penerimaan ZISWAF	Kota Lhokseumawe	9,06 M	12,081,660,127	APBK	-	9,15 M	13,175,635,140	Sekretariat Baitul Mal
47.002.	Pembangunan Rumah Kaum Dhuafa/ Fakir dan Miskin (DANA ZAKAT)	Jumlah Rumah Dhuafa Yang dibangun dan jumlah rumah sederhana yang dibangun	Kota Lhokseumawe	68 Unit dan 20 unit	7,601,800,000	APBK	-	68 Unit	8,361,980,000	Sekretariat Baitul Mal
47.003.	Pendataan, Verifikasi dan Evaluasi Mustahik Penerima Bantuan Baitul Mal	Periode Pendataan Verifikasi dan Evaluasi Mustahiq Penerima Bantuan Baitul Mal	Kota Lhokseumawe	5 Hari	36,550,000	APBK	-	5 Hari	40,205,000	Sekretariat Baitul Mal
47.004.	Sosialisasi Zakat, Infaq dan Sadaqah	Jumlah Peserta Sosialisasi Zakat, Infaq dan Sedekah	Kota Lhokseumawe	296 Peserta	133,940,000	APBK	-	236 Peserta	147,334,000	Sekretariat Baitul Mal
47.005.	Pemilihan dan Pelantikan Dewan Pengawas dan Ketua Baitul Mal	Periode Pelantikan Kepala dan Wakil Kepala / Badan Pengawas Baitul Mal Kota Lhokseumawe	Kota Lhokseumawe	1 kali	103,810,000	APBK	-	1 Periode	0	Sekretariat Baitul Mal
47.006.	Penyaluran Zakat, Infaq dan Sadaqah (ZIS) kepada Senif Miskin (Dana Infaq)	Bantuan santunan dana bergulir kepada masyarakat miskin	Kota Lhokseumawe	200 Orang	4,104,160,127	APBK	-	200 Orang	4,514,576,140	Sekretariat Baitul Mal
47.007.	Penyusunan dan Pengelolaan Data Base Jumlah Muzakki dan Mustahiq	Terupdatenya data base di Pemko Kota Lhokseumawe khususnya Sekretariat Baitul Mal Kota Lhokseumawe	Kota Lhokseumawe	1 Data base	101,400,000	APBK	-	1 data base	111,540,000	Sekretariat Baitul Mal
	Sekretariat Majelis Adat Aceh				1,312,797,900	APBK	-		1,016,602,905	Sekretariat Majelis Adat Aceh
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar				334,000,000	APBK	-		210,000,000	Sekretariat Majelis Adat Aceh
2.16.	Kebudayaan				334,000,000	APBK	-		210,000,000	Sekretariat Majelis Adat Aceh
15	Program Pengembangan Nilai Budaya	Cakupan Pembinaan Adat Gampong	Kota Lhokseumawe	68 Gampong	198,000,000	APBK	-	68 Gampong	50,000,000	Sekretariat Majelis Adat Aceh
15.001.	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Jumlah Pelaksanaan Acara Adat Budaya Daerah (5 kali)	Kota Lhokseumawe	5 Kali	60,000,000	APBK	-	5 Kali	16,000,000	Sekretariat Majelis Adat Aceh

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2020			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		OPD Penanggung jawab
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.006.	Pelatihan Peradilan Adat	Jumlah Peserta pelatihan Peradilan Adat	Kota Lhokseumawe	50 Orang	34,000,000	APBK	-	50 Orang	0	Sekretariat Majelis Adat Aceh
15.017.	Pelaksanaan Peradilan Adat Gampong	Jumlah Kasus Peradilan Adat Gampong	Kota Lhokseumawe	68 Gampong	34,000,000	APBK	-	68 Gampong	34,000,000	Sekretariat Majelis Adat Aceh
15.021.	Pelatihan Seumapa untuk Generasi Muda	Jumlah Peserta Pelatihan Seumapa untuk Generasi Muda	Kota Lhokseumawe	20 Orang	20,000,000	APBK	-	20 Orang	0	Sekretariat Majelis Adat Aceh
15.028.	Workshop Bersama dengan Tokoh-tokoh Adat	Jumlah Peserta Workshop Adat	Kota Lhokseumawe	20 Tokoh	20,000,000	APBK	-	20 Tokoh	0	Sekretariat Majelis Adat Aceh
15.030.	Pilot Project Gampong Percontohan Adat	Jumlah Gampong Percontohan Adat	Kota Lhokseumawe	1 Gampong	30,000,000	APBK	-	1 Gampong	0	Sekretariat Majelis Adat Aceh
17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Cakupan Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Kota Lhokseumawe	35%	111,000,000	APBK	-	40%	110,000,000	Sekretariat Majelis Adat Aceh
17.008.	Dialog/sosialisasi untuk generasi muda dan mahasiswa mengenai adat istiadat dan hukum adat	Jumlah Dialog/Sosialisasi untuk generasi muda dan mahasiswa mengenai adat istiadat dan hukum adat	Kota Lhokseumawe	50 Orang	25,000,000	APBK	-	50 Orang	25,000,000	Sekretariat Majelis Adat Aceh
17.023.	Sosialisasi tentang Peran Lembaga Adat Gampong sebagai Pengendali Sosial Masyarakat dalam Pelaksanaan	Jumlah Peserta Sosialisasi tentang peran Lembaga Adat Gampong sebagai Pengendali Sosial Masyarakat dalam pelaksanaan	Kota Lhokseumawe	50 Orang	25,000,000	APBK	-	50 Orang	25,000,000	Sekretariat Majelis Adat Aceh
17.027.	Pendidikan Adat Bagi Para Pelajar di Kota Lhokseumawe	Jumlah Peserta Pendidikan Adat Bagi Para Pelajar di Kota Lhokseumawe	Kota Lhokseumawe	400 Orang	31,000,000	APBK	-	400 Orang	0	Sekretariat Majelis Adat Aceh
17.028.	Pembinaan Gampong Percontohan Adat Aceh Wilayah Pemerintah Kota Lhokseumawe	Jumlah Peserta pembinaan Gampong Percontohan Adat Aceh Wilayah Pemerintah Kota Lhokseumawe	Kota Lhokseumawe	1 Gampong	30,000,000	APBK	-	1 Gampong	60,000,000	Sekretariat Majelis Adat Aceh
20	Program Penguatan Lembaga Adat	Cakupan pembinaan dan Penguatan Lembaga Adat Aceh	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	25,000,000	APBK	-	12 Bulan	50,000,000	Sekretariat Majelis Adat Aceh
20.007.	Penguatan Forum Tuha Peut Tuha Adat Perempuan	Jumlah Forum Pertemuan	Kota Lhokseumawe	30 Peserta	0	APBK	-	30 Peserta	50,000,000	Sekretariat Majelis Adat Aceh
20.010.	Penguatan Lembaga Peradilan Adat Gampong	Jumlah Peserta Penguatan Lembaga Peradilan Adat gampong	Kota Lhokseumawe	50 Orang	25,000,000	APBK	-	50 Orang	0	Sekretariat Majelis Adat Aceh
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang				978,797,900	APBK	-		806,602,905	Sekretariat Majelis Adat Aceh
4.06.	Keistimewaan dan Kekhususan				978,797,900	APBK	-		806,602,905	Sekretariat Majelis Adat Aceh

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2020			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		OPD Penanggung jawab
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Adminitrasi Perkantoran	Kota Lhokseumawe	100%	601,132,900	APBK	-	100%	581,693,585	Sekretariat Majelis Adat Aceh
01.001.	Penyediaan jasa surat menyurat	Periode penyediaan benda pos dan surat menyurat	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	2,000,000	APBK	-	12 Bulan	1,400,000	Sekretariat Majelis Adat Aceh
01.002.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Periode nyediaan Penerangan dan Alat-alat Komunikasi	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	12,000,000	APBK	-	12 Bulan	12,000,000	Sekretariat Majelis Adat Aceh
01.007.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Periode Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kota Lhokseumawe	144 OB	72,840,000	APBK	-	144 OB	58,440,000	Sekretariat Majelis Adat Aceh
01.010.	Penyediaan alat tulis kantor	Periode penyediaan Alat Tulis Kantor	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	17,712,900	APBK	-	12 Bulan	14,000,000	Sekretariat Majelis Adat Aceh
01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Periode Penyediaan Bahan Cetak dan Foto Copy	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	8,535,000	APBK	-	12 Bulan	8,500,000	Sekretariat Majelis Adat Aceh
01.013.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Periode Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	4,835,000	APBK	-	12 Bulan	8,000,000	Sekretariat Majelis Adat Aceh
01.014.	Penyediaan peralatan rumah tangga	Periode Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Lhokseumawe	3 jenis	3,000,000	APBK	-	3 jenis	3,500,000	Sekretariat Majelis Adat Aceh
01.015.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Periode Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Lhokseumawe	730 Eks	1,710,000	APBK	-	730 Eks	3,420,000	Sekretariat Majelis Adat Aceh
01.017.	Penyediaan makanan dan minuman	Periode Penyediaan Makanan dan Minuman Bagi Aparatur Sekretariat MAA	Kota Lhokseumawe	11 Bulan	11,880,000	APBK	-	11 Bulan	28,835,000	Sekretariat Majelis Adat Aceh
01.018.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Periode Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Ke Luar Daerah	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	100,000,000	APBK	-	12 Bulan	85,633,585	Sekretariat Majelis Adat Aceh
01.020.	Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap	Periode Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Harian Lepas	Kota Lhokseumawe	156 OB	62,615,000	APBK	-	156 OB	77,915,000	Sekretariat Majelis Adat Aceh
01.023.	Penyediaan Jasa Lembaga Keistimewaan Aceh	Jumlah Pengurus MAA (22 orang x 12 Bulan)	Kota Lhokseumawe	264 OB	304,005,000	APBK	-	264 OB	280,050,000	Sekretariat Majelis Adat Aceh
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kota Lhokseumawe	100%	139,900,000	APBK	-	100%	82,149,320	Sekretariat Majelis Adat Aceh
02.005.	Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Kota Lhokseumawe	1 Jenis	20,000,000	APBK	-	1 Jenis	0	Sekretariat Majelis Adat Aceh
02.011.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Kota Lhokseumawe	12 Unit	50,000,000	APBK	-	12 Unit	28,429,320	Sekretariat Majelis Adat Aceh

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2020			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		OPD Penanggung jawab
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
02.022.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Periode Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Kota Lhokseumawe	1 unit	10,000,000	APBK	-	1 unit	10,000,000	Sekretariat Majelis Adat Aceh
02.023.	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah Mobil Jabatan yang terpelihara selama 12 Bulan	Kota Lhokseumawe	1 unit	29,300,000	APBK	-	1 unit	23,760,000	Sekretariat Majelis Adat Aceh
02.024.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Mobil Operasional yang terpelihara selama 12 Bulan	Kota Lhokseumawe	12 UB	23,500,000	APBK	-	12 UB	16,960,000	Sekretariat Majelis Adat Aceh
02.030.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Periode Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	7,100,000	APBK	-	12 Bulan	3,000,000	Sekretariat Majelis Adat Aceh
03.	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Tingkat Disiplin Aparatur	Kota Lhokseumawe	100%	52,165,000	APBK	-	100%	50,000,000	Sekretariat Majelis Adat Aceh
03.002.	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Kota Lhokseumawe	44 Pasang	22,165,000	APBK	-	24 Stel	50,000,000	Sekretariat Majelis Adat Aceh
03.005.	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian Khusus Hari - hari Tertentu	Kota Lhokseumawe	44 Stel	30,000,000	APBK	-	28 Stel	0	
05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Kegiatan Pendidikan-pendidikan dan pelatihan Formal yg diikuti	Kota Lhokseumawe	5 Keg	34,000,000	APBK	-	5 Keg	25,000,000	Sekretariat Majelis Adat Aceh
05.001.	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Formal Aparatur	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	30,000,000	APBK	-	12 Bulan	22,000,000	Sekretariat Majelis Adat Aceh
05.021.	Peningkatan kegiatan keagamaan	Periode Peningkatan Kegiatan Keagamaan	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	4,000,000	APBK	-	12 Bulan	3,000,000	Sekretariat Majelis Adat Aceh
07.	Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja	Cakupan Penyediaan Dokumen Perencanaan SKPK	Kota Lhokseumawe	1 Dokumen	1,600,000	APBK	-	1 Dokumen	1,210,000	Sekretariat Majelis Adat Aceh
07.002.	Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Buku RENJA	Kota Lhokseumawe	10 Buku	800,000	APBK	-	10 Buku	500,000	Sekretariat Majelis Adat Aceh
07.003.	Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)	Jumlah Buku LKIP	Kota Lhokseumawe	10 Buku	800,000	APBK	-	10 Buku	710,000	Sekretariat Majelis Adat Aceh
17	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Cakupan Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Kota Lhokseumawe	35%	150,000,000	APBK	-	40%	66,550,000	Sekretariat Majelis Adat Aceh
17.001.	Penyediaan Barang/Benda Koleksi Pusaka Adat	Jumlah Penyediaan Barang/Benda Koleksi Pusaka Adat	Kota Lhokseumawe	7 Unit	75,000,000	APBK	-	7 Unit	26,550,000	Sekretariat Majelis Adat Aceh
17.008.	Lomba Meurukon	Jumlah Kelompok Peserta Lomba Meurukon	Kota Lhokseumawe	10 kelompok	25,000,000	APBK	-	10 kelompok	20,000,000	Sekretariat Majelis Adat Aceh

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2020			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		OPD Penanggung jawab
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.010.	Lomba Dalail Khairat	Jumlah Kelompok Peserta Lomba Dalail Khairat	Kota Lhokseumawe	10 kelompok	25,000,000	APBK	-	10 kelompok	20,000,000	Sekretariat Majelis Adat Aceh
17.012.	Penyusunan Deskripsi Barang Pusaka Adat dan Samudera Pasai	Jumlah Buku Barang Pusaka dat dan Samudera Pasai	Kota Lhokseumawe	100 Buku	25,000,000	APBK	-	100 Buku	0	Sekretariat Majelis Adat Aceh
		Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah			7,396,324,600	APBK	-		2,417,751,251	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah
1		Urusan Wajib Pelayanan Dasar			5,696,100,000	APBK	-		1,500,000,000	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah
1.01.		Pendidikan			5,696,100,000	APBK	-		1,500,000,000	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah
27		Program Peningkatan Kapasitas Majelis Pendidikan Daerah	Kota Lhokseumawe	100%	5,696,100,000	APBK	-	100%	1,500,000,000	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah
27.001.	Musyawahar Daerah (MUSDA)	Jumlah Peserta Musyawarah Daerah (MUSDA)	Kota Lhokseumawe	170 Org	61,125,000	APBK	-	170 Org	0	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah
27.004.	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pengurus MPD	Jumlah Peserta Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pengurus MPD	Kota Lhokseumawe	18 Org	65,000,000	APBK	-	18 Org	0	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah
27.005.	Penyempurnaan Draf Qanun MPD	Jumlah Draf Qanun MPD	Kota Lhokseumawe	3 Eks	25,750,000	APBK	-	3 Eks	0	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah
27.006.	Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Tingkat SD/MI dan SMP/MTs	Jumlah Peserta Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal	Kota Lhokseumawe	2 Hari	60,000,000	APBK	-	2 Hari	0	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah
27.007.	Penatausahaan Pemberian Biaya Pendidikan untuk Siswa Berprestasi tingkat SMA/ sederajat dan Mahasiswa	Jumlah Pemberian Biaya Pendidikan untuk Siswa Berprestasi tingkat SMA/ sederajat dan Mahasiswa	Kota Lhokseumawe	3 Jenis	5,484,225,000	APBK	-	1 Kali	1,500,000,000	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah
4		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang			1,700,224,600	APBK	-		917,751,251	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2020			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		OPD Penanggung jawab
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.06.	Keistimewaan dan Kekhususan				1,700,224,600	APBK	-		917,751,251	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanana Administrasi Perkantoran	Kota Lhokseumawe	100%	551,078,600	APBK	-	100%	531,674,931	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah
01.001.	Penyediaan jasa surat menyurat	Periode penyediaan jasa surat menyurat	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	1,047,000	APBK	-	12 Bulan	2,750,000	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah
01.002.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Periode Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	5,008,500	APBK	-	12 Bulan	7,000,000	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah
01.007.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah pejabat pengelola keuangan SKPD (10 Org x 12 Bln)	Kota Lhokseumawe	120 OB	65,750,000	APBK	-	120 OB	61,500,000	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah
01.010.	Penyediaan alat tulis kantor	Periode penyediaan alat tulis kantor	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	18,751,000	APBK	-	12 Bulan	15,832,931	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah
01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Periode penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	9,259,400	APBK	-	12 Bulan	7,000,000	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah
01.013.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Periode penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	1,883,700	APBK	-	12 Bulan	5,000,000	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah
01.015.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah penyediaan bacaan dan peraturan Perundang-undangan (1 Eks x 365 H)	Kota Lhokseumawe	365 Eks	31,140,000	APBK	-	365 Eks	1,320,000	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah
01.017.	Penyediaan makanan dan minuman	Periode penyediaan Makanan dan Minuman	Kota Lhokseumawe	11 Bulan	12,495,000	APBK	-	11 Bulan	11,000,000	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah
01.018.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Periode Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	100,275,000	APBK	-	12 Bulan	60,000,000	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah
01.020.	Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap	Jumlah Jasa Pegawai Tidak Tetap (10 Org x 12 Bln)	Kota Lhokseumawe	120 OB	44,500,000	APBK	-	120 OB	44,500,000	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2020			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		OPD Penanggung jawab
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01.023.	Penyediaan Jasa Lembaga Keistimewaan Aceh	Jumlah Jasa Lembaga Keistimewaan Aceh (18 Org x 12 Bln)	Kota Lhokseumawe	216 OB	260,969,000	APBK	-	216 OB	315,772,000	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasaranan aparatur	Kota Lhokseumawe	100%	852,450,000	APBK	-	100%	91,466,320	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah
02.005.	Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Kota Lhokseumawe	4 Unit	726,250,000	APBK	-	1 Unit	1,000,000	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah
02.011.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Lhokseumawe	12 Unit	26,800,000	APBK	-	15 Unit	21,746,320	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah
02.023.	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan (1 Unit x 12 Bln)	Kota Lhokseumawe	12 UB	29,000,000	APBK	-	12 UB	23,440,000	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah
02.024.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Pemeliharaan Rutin / Berkala kendaraan dinas / operasional (2 Unit x 12 Bln)	Kota Lhokseumawe	24 UB	65,200,000	APBK	-	24 UB	37,280,000	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah
02.030.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Lhokseumawe	24 Unit	5,200,000	APBK	-	24 Unit	8,000,000	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah
03.	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Tingkat Disiplin Aparatur	Kota Lhokseumawe	100%	26,180,000	APBK	-	100%	50,000,000	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah
03.002.	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Khusus Hari - hari Tertentu	Kota Lhokseumawe	48 Set	26,180,000	APBK	-	48 Set	50,000,000	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah
05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal yang diikuti	Kota Lhokseumawe	5 Keg	50,000,000	APBK	-	5 Keg	50,000,000	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah
05.001.	Pendidikan dan pelatihan formal	Periode Pendidikan Dan Pelatihan Formal Aparatur	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	50,000,000	APBK	-	12 Bulan	50,000,000	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2020			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		OPD Penanggung jawab
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
07.	Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja	Cakupan Penyediaan Dokumen Perencanaan SKPK	Kota Lhokseumawe	1 Dokumen	1,100,000	APBK	-	1 Dokumen	1,210,000	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah
07.002.	Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Buku Renja SKPD	Kota Lhokseumawe	10 Buku	1,100,000	APBK	-	10 Buku	1,210,000	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah
22	Program Perencanaan dan Pengawasan/Monitoring dan Evaluasi	Periode Perencanaan dan Pengawasan/Monitoring dan Evaluasi	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	219,416,000	APBK	-	12 Bulan	193,400,000	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah
22.002.	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penilaian UAN	Periode Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penilaian UAN	Kota Lhokseumawe	8 Hari	27,065,000	APBK	-	8 Hari	28,750,000	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah
22.003.	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penilaian UAS	Periode Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penilaian UAS	Kota Lhokseumawe	4 Hari	10,900,000	APBK	-	4 Hari	12,650,000	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah
22.008.	Penyuluhan Pencegahan Kenakalan Remaja di Lingkungan Sekolah	Periode Pemberian Ceramah Rohani Untuk Pencegahan Kenakalan Remaja di Lingkungan Sekolah	Kota Lhokseumawe	5 Hari	24,775,000	APBK	-	5 Hari	22,000,000	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah
22.010.	Pengawasan dan Bimbingan Majelis Pendidikan Daerah kepada Komite Sekolah	Periode Pengawasan dan Bimbingan Majelis Pendidikan Daerah kepada Komite Sekolah	Kota Lhokseumawe	2 Hari	41,800,000	APBK	-	2 Hari	0	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah
22.011.	Supervisi Pengawas Satuan Pendidik	Jumlah Hari Pelaksanaan Supervisi Pengawas Satuan Pendidik	Kota Lhokseumawe	4 Hari	23,576,000	APBK	-	4 Hari	22,000,000	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah
22.016.	Sinkronisasi Pendidikan Keluarga, Sekolah dan Masyarakat (Sinergisitas antara elemen tripusat Pendidikan)	Periode Kegiatan Public Hearing (Meudrah) Pendidikan	Kota Lhokseumawe	2 Hari	40,800,000	APBK	-	2 Hari	46,000,000	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah
22.017.	Monitoring dan Evaluasi Balai Pengajian, Dayah dan Pendidikan Luar Sekolah (Non Formal)	Periode Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Balai Pengajian, Dayah dan Pendidikan Luar Sekolah (Non Formal)	Kota Lhokseumawe	4 Hari	30,500,000	APBK	-	16 Hari	40,000,000	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah
22.018.	Pengelolaan Website Majelis Pendidikan Daerah Kota Lhokseumawe	Periode Pengelolaan Website Majelis Pendidikan Daerah Kota Lhokseumawe	Kota Lhokseumawe	12 Bulan	20,000,000	APBK	-	12 Bulan	22,000,000	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah

BAB VI
KINERJA PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN KOTA

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

Kinerja penyelenggaraan berdasarkan indikator dalam RPJM Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022 dan capaian makro ditampilkan dalam Tabel 6.1 berikut ini:

Tabel 6.1
Indikator Kinerja Makro Pemerintahan
Kota Lhokseumawe Tahun 2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Indeks Pembangunan Syariat Islam	Indeks	61
2	Kasus Pelanggaran Syariat Islam	Kasus	50
3	Jumlah Penerimaan Zakat, Infaq, Sadaqah	Rp (milyar)	9.06
4	Pertumbuhan PDRB	Persen	5.86
5	Pengendalian Laju Inflasi	Persen	2.42
6	Penduduk dibawah garis kemiskinan	Persen	9.28
7	Tingkat Pengangguran terbuka	Persen	10.28
8	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita	Rp (Juta)	1.12
9	Persentase pemberdayaan kelompok perempuan	Persen	20
10	Pertumbuhan UMKM	Jumlah	2333
11	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB	Persen	18.93
12	Jumlah Investor	PMDN/ PMA	353
13	Jumlah nilai investasi	Rp (Milyar)	3921
14	Kontribusi Pariwisata terhadap PDRB	Persen	1.19
15	Indeks Pembangunan Manusia	IPM	77.38
16	Rerata Nilai Ujian Nasional:		
	-Rerata Nilai Ujian Sekolah SD/MI	Nilai	95
	-Rerata Nilai Ujian Nasional SMP/MTs	Nilai	85
17	Angka Partisipasi Kasar:		
	- SD/MI	Angka	105.63
	- SMP/MTs	Angka	101
18	Angka partisipasi Murni:		
	- SD/MI	Angka	99.4
	- SMP/MTs	Angka	86.4
19	Angka Harapan lama Sekolah	Angka	15.53
20	Rasio Ketergantungan	Rasio (Per 10.000)	50.61
21	Jumlah Prestasi olahraga	Jumlah	30
22	Jumlah dayah dengan Tipe "A"	Dayah	17

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
23	Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	71.39
24	Jumlah Puskesmas yang terakreditasi	Jumlah	1
25	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita TBC BTA	Persen	80
26	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Pneumonia	Persen	7.08
27	Cakupan anak usia 0-11 bln mendapat imunisasi dasar lengkap (IDL)	Persen	92.50
28	Kategori Reformasi Birokrasi	Kategori	BB
29	Kategori Hasil Evaluasi SAKIP	Kategori	BB
30	Kategori Hasil Evaluasi LPPD	Kategori	Tinggi
31	Opini BPK	Opini	WTP
32	Keterbukaan Informasi Publik melalui Website	Ada/Tidak	Ada
33	Pencapaian target Nasional 100-0-100	Persen	4.25- 13.8- 75.7
34	Persentase Akses Jaringan Air Minum Layak/ Air Bersih	Persen	4.25
35	Penanganan Kawasan Kumuh	Luas Wilayah (Ha)	13.8
36	Penanganan Sampah	Persen	78.0
37	Persentase jalan yang memiliki drainase/ saluran pembuangan air (minimal 1,5)	Persen	9.29
38	Kategori Capaian kinerja Infrastruktur Publik	Absolut	Baik
39	Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Mantap	Persen	71.2
40	Ketersediaan fasilitas keselamatan lalu lintas	Persen	47.7
41	Persentase sampah yang tertangani	Persen	82.65
42	Luasan RTH Publik 20%	Ha	33.8
43	Angka Kriminalitas yang tertangani (per 10.000)	Rasio (Per 10.000)	42.84
44	Kasus Pelanggaran Syariat Islam	Kasus	50
45	Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu	Persen	

Sumber: RPJM Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022.

Tabel 6.2
Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
Kota Lhokseumawe Tahun 2020

NO (1)	INDIKATOR (2)	SATUAN (3)	TARGET (4)
	ASPEK PELAYANAN UMUM		
	Layanan Urusan Wajib Dasar		
1.	Pendidikan		
1.	1. Persentase PAUD dengan Akreditasi B	Persen	50
1.	2. Persentase Angka Partisipasi Kasar PAUD	Persen	60
1.	3. Persentase Angka partisipasi Murni SD/ MI	Persen	99.36
1.	4. Persentase Angka partisipasi Murni SMP / MTs	Persen	86.38
1.	5. Persentase Guru yang mengikuti Peningkatan Kompetensi Pendidik	Persen	50
1.	6. Persentase Pengawas Sekolah yang telah memiliki Sertifikat Pengawas Sekolah	Persen	85
1.	7. Persentase guru yang telah memiliki sertifikasi Guru	Persen	20
1.	8. Persentase Kompetensi Tenaga Kependidikan	Persen	60
2.	Kesehatan		
2.	1. Cakupan pelayanan obat dan perbekalan kesehatan	Bulan	12
2.	2. Persentase kesediaan obat, vaksin dan alat kesehatan di puskesmas	Persen	100
2.	3. Jumlah Puskesmas yang terakreditasi	Jumlah	1
2.	4. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	Persen	100
2.	5. Persentase Kecamatan/ desa sehat	Persen	5
2.	6. Persentase pasar sehat	Persen	2
2.	7. Jumlah Kecamatan yang melaksanakan minimal 5 tema kampanye Gerakan Masyarakat (GERMAS) Hidup Sehat	Jumlah	1
2.	8. Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	Persen	100
2.	9. Cakupan balita gizi buruk dan gizi kurang mendapatkan PMT	Persen	85
2.	10. Persentase desa STBM	Persen	20
2.	11. Persentase Desa ODF	Persen	20
2.	12. Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melakukan pengolahan limbah medis	Persen	50
2.	13. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	Persen	80
2.	14. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	Persen	100
2.	15. Cakupan Penderita diare yang ditangani	Persen	60

NO		INDIKATOR	SATUAN	TARGET
(1)		(2)	(3)	(4)
2.	16.	Jumlah SDM kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya	Persen	100
2.	17.	optimalisasi sarana dan prasarana kesehatan	Persen	80
2.	18.	Cakupan playanan kesehatan anak berkebutuhan khusus	Persen	80
2.	19.	Cakupan pelayanan anak balita	Persen	100
2.	20.	Cakupan Desa dengan posyandu lansia	Persen	90
2.	21.	Cakupan Desa dengan kegiatan aktifitas fisik lansia	Persen	90
2.	22.	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	Persen	0
2.	23.	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	Persen	0
2.	24.	Cakupan pelayanan Informasi kesehatan	Bulan	12
3.		Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
3.	1.	Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Mantap	Persen	71.2
3.	2.	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	Persen	3.65
3.	3.	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	Persen	15.37
3.	4.	Persentase Drainase dalam Kondisi Baik/ Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat	Persen	70.74
3.	5.	Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor	Persen	71.27
3.	6.	Persentase jalan Kota dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	Persen	77.38
3.	7.	Persentase akses Air Minum/ air bersih	Persen	5.27
3.	8.	Persentase rumah tinggal bersanitasi	Persen	80.85
3.	9.	Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun	Persen	32.54
3.	10.	Cakupan Penaganan Kawasan Kumuh	Ha	13.8
3.	11.	Cakupan dokumen perencanaan tata ruang	Dokumen	3
3.	12.	Luasan RTH Publik sebesar 20% dari Luas Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan	Ha	33.8
3.	13.	Ruang publik yang berubah peruntukannya	Persen	0.083
3.	14.	Ketaatan terhadap RTRW	Persen	3.3
4.		Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman		
4.	1.	Rasio rumah layak huni	Rasio	0.29
4.	2.	Rasio permukiman layak huni	Rasio	0.93

NO		INDIKATOR	SATUAN	TARGET
(1)		(2)	(3)	(4)
4.	3.	Persentase kawasan pemukiman yang belum dapat dilalui kendaraan roda empat	Persen	0.97
4.	4.	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	Persen	0.97
4.	5.	Rasio Tempat Ibadah per satuan Penduduk	Persen	0.12
5.		Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat		
5.	1.	Cakupan Pengendalian keamanan dan kenyamanan	Persen	100
5.	2.	Cakupan Pelaksanaan Koordinasi wawasan kebangsaan	Persen	100
5.	3.	Tingkat pasrtisipasi masyarakat dalam pemilu	Persen	-
5.	4.	Cakupan dukungan kelancaran Pemilu	Bulan	12
5.	5.	Tingkat penyelesaian pelanggaran KamTranTibMas	Persen	80
5.	6.	Persentase penegakan Perda/Qanun	Persen	80
5.	7.	Cakupan petugas perlindungan Masyarakat	Persen	27.88
6.		Sosial		
6.	1.	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	Persen	32.76
6.	2.	Persentase Panti Sosial yang menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan Sosial	Persen	100
6.	3.	Persentase Panti Asuhan/ Jompo yang menerima bantuan	Persen	80
6.	4.	Persentase Penyandang Cacat Fisik Dan Mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	Persen	100
6.	5.	Persentase Korban Bencana yang menerima Bantuan Sosial selama masa Tanggap Darurat	Persen	100
		Layanan Urusan Wajib Non Dasar		
1.		Tenaga Kerja		
1.	1.	Persentase peningkatan kualitas tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Persen	50
1.	2.	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	Persen	50
1.	3.	Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Pertahun	Rasio	0
1.	4.	Persentase perusahaan yang menerapkan keselamatan dan perlindungan pekerja	Persen	85

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
2.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
2.	1. Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih di Dalam Unit Pelayanan Terpadu	Persen	100
2.	2. Persentase pemberdayaan kelompok perempuan	Persen	20
2.	3. Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	Persen	75.30
2.	4. Proporsi Kursi yang diduduki Perempuan di DPR	Persen	8
2.	5. Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta	Persen	25.20
3.	Pangan		
3.	1. Cakupan penyediaan sarana dan prasarana pertanian/perkebunan	Persen	50
3.	2. Persentase Ketersediaan Pangan Utama	Persen	100
5.	Lingkungan Hidup		
5.	1. Cakupan penyediaan sarana dan prasarana persampahan	Persen	100
5.	2. Cakupan limbah B3 yang dikelola	Persen	
5.	3. Jumlah ketaatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH	Jumlah	2
5.	4. Luasan RTH Publik sebesar 20% dari Luas Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan	Ha	33.8
5.	5. Jumlah sarana dan prasarana yang memenuhi standar minimum	Jumlah	1
5.	6. Cakupan pelaksanaan keindahan dan kerasian kota	Kecamatan	2
6.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
6.	1. Rasio Penduduk ber KTP	Persen	883
6.	2. Cakupan Penerbitan KTP	Persen	88
6.	3. Cakupan Penerbitan KTP	Persen	90
7.	1. Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong		
7.	2. Cakupan pembinaan pengelolaan keuangan gampong	Gampong	68
7.	3. Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	Persen	100
7.	4. Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	Persen	12.4
8.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
8.	1. Rata-Rata Jumlah anak Per Keluarga	Rata-rata	2
8.	2. Laju pertumbuhan penduduk	Persen	2

NO		INDIKATOR	SATUAN	TARGET
(1)		(2)	(3)	(4)
8.	3.	Cakupan pelayanan reproduksi remaja	Persen	70
8.	4.	Rasio Akseptor KB	Persen	81.78
8.	5.	Cakupan Peserta KB aktif	Persen	81.78
9.		Perhubungan		
9.	1.	Cakupan prasarana dan fasilitas perhubungan pada terminal darat	Persen	60
9.	2.	Cakupan pemeliharaan fasilitas LLAJ	Bulan	12
9.	3.	Rasio Izin Trayek	Rasio	7
9.	4.	Jumlah Uji Kir angkutan umum	Rasio	0.97
9.	5.	Cakupan sarana dan prasarana perhubungan publik	Sarana	1
9.	6.	Cakupan pemasangan rambu-rambu	Persen	47.66
9.	7.	Cakupan penyediaan sarana penunjang transportasi	Persen	60
10.		Komunikasi dan Informatika		
10.	1.	Cakupan pengelolaan Website pemerintah	Persen	100
10.	2.	Cakupan pelayanan pemerintahan berbasis elektronik	Persen	80
10.	3.	Cakupan kerjasama informasi dengan mass media	Bulan	12
11.		Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		
11.	1.	Cakupan Penyediaan Dokumen DED		100%
11.	2.	Cakupan pembinaan terhadap UKM	Persen	5
11.	3.	Persentase Koperasi Aktif	Persen	39.81
12.		Penanaman Modal		
12.	1.	Cakupan Promosi dan Kerjasama Investasi	Jenis Media	3
12.	2.	Jumlah Investor PMDN/PMA	Jumlah	353
12.	3.	Lamanya proses perizinan	Hari	6
13.		Kepemudaan dan Olahraga		
13.	1.	Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif	Persen	91
13.	2.	Cakupan Pembinaan Olahraga	Persen	13
13.	3.	Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi	Persen	24
13.	4.	Jumlah cabang olahraga berprestasi tingkat PORA	Jumlah Cabor	30
14.		Statistik		
14.	1.	Ketersediaan Buku Daerah Dalam Angka dan PDRB	Ada / Tidak	Ada
16.		Kebudayaan		
16.	1.	Cakupan Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Persen	35
16.	2.	Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	Event	3
16.	3.	Pembinaan kelompok seni dan budaya yang aktif	Jumlah	2

NO		INDIKATOR	SATUAN	TARGET
(1)		(2)	(3)	(4)
16.	4.	Jumlah Sarana dan Prasarana Kesenian dan Budaya yang dikelola	Jumlah	1
16.	5.	Cakupan pembinaan adat Gampong	Jumlah gampong	68
16.	6.	Cakupan pembinaan dan penguatan lembaga adat Aceh	Bulan	12
17.		Perpustakaan		
17.	1.	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Daerah	Jumlah	3,210
17.	2.	Cakupan pelayanan perpustakaan keliling	Bulan	12
18.		Kearsipan		
18.	1.	Jumlah SKPD Yang Mengelola Arsip Secara Baku	Persen	20
18.	2.	Cakupan Pembinaan SDM Pengelola Kearsipan	Kegiatan	1
		Layanan Urusan Pilihan		
1.		Pariwisata		
1.	1.	Kontribusi Pariwisata Terhadap PDRB	Persen	1.19
1.	2.	Pengembangan objek wisata Kota Lhokseumawe	Persen	30
2.		Pertanian		
2.	1.	Cakupan pembinaan Kelompok Tani	Bulan	12
2.	2.	Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB	Persen	8.3
2.	3.	Produktivitas Komoditas Pangan	Ton	15,937
2.	4.	Kontribusi Kelompok Tani terhadap PDRB	Persen	0.002
2.	5.	Kontribusi Sub Sektor Peternakan Terhadap PDRB	Persen	0.742
2.	6.	Kontribusi Sub Sektor Peternakan Terhadap PDRB	Persen	0.742
5.		Perdagangan		
5.	1.	Cakupan perlindungan dan pengamanan konsumen dan Tera Ulang	Bulan	12
5.	2.	Cakupan pengembangan pasar rakyat	Kecamatan	4
6.		Perindustrian		
6.	1.	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	Persen	18.93
6.	2.	Pertumbuhan UMKM	Jumlah	2,333
6.	3.	Cakupan promosi perdagangan dan keikutsertaan dalam event pameran dagang	Jumlah	1

NO		INDIKATOR	SATUAN	TARGET
(1)		(2)	(3)	(4)
8.		Kelautan dan Perikanan		
8.	1.	Cakupan pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan	Bulan	12
8.	2.	Cakupan pembinaan dan penegakan hukum kelautan	Bulan	12
8.	3.	Cakupan pembinaan pelaku usaha perikanan	Bulan	12
8.	4.	Jumlah Produksi Perikanan (Budidaya)	Ton	1,738
8.	5.	Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB	Persen	6.68
8.	6.	Cakupan sarana dan prasarana perikanan yang dikembangkan	Unit	7
8.	7.	Cakupan Bina Kelompok Nelayan	Jumlah	30
		Layanan Penunjang Urusan		
1.		Perencanaan Pembangunan		
1.	1.	Keterbukaan informasi publik melalui website	Ada/Tidak	Ada
1.	2.	Cakupan koordinasi Kerjasama perencanaan pembangunan	Dokumen	5
1.	3.	Cakupan penyediaan dokumen perencanaan pengembangan wilayah strategis cepat tumbuh	Dokumen	1
1.	4.	Cakupan penyediaan dokumen perencanaan pengembangan kota menengah dan besar	Dokumen	1
1.	5.	Cakupan fasilitasi dan peningkatan kapasitas perencana	Kegiatan	3
1.	6.	Cakupan penyediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah	Dokumen	9
1.	7.	Cakupan koordinasi perencanaan pembangunan ekonomi	Bulan	12
1.	8.	Cakupan koordinasi perencanaan pembangunan sosial budaya	Bulan	12
1.	9.	Cakupan koordinasi perencanaan pembangunan prasarana wilayah dan sumber daya alam	Bulan	12
1.	10.	Cakupan penyediaan laporan koordinaasi pendanaan pembangunan daerah	Laporan	4
2.		Keuangan		
2.	1.	Cakupan pelaksanaan pengeluaran belanja daerah	Bulan	12
2.	2.	Besaran penerimaan PAD	Milyar	70.5
2.	3.	Cakupan penyediaan pedoman dan Dokumen APBK	Dokumen	7
2.	4.	Opini BPK laporan keuangan daerah	Opini	WTP
2.	5.	Cakupan laporan pengelolaan Aset daerah	Dokumen	8
2.	6.	Cakupan pengelolaan sistem informasi keuangan daerah	Bulan	12

NO		INDIKATOR	SATUAN	TARGET
(1)		(2)	(3)	(4)
3.		Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan		
3.	1.	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Struktural	Persen	3.46
3.	2.	Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian	Bulan	12
4.		Pengawasan		
4.	1.	Cakupan tindak lanjut dan monitoring temuan APIP	LHP	140
4.	2.	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan, pelatihan dan penjurangan tenaga pemeriksa (auditor)	ASN	50
4.	3.	Jumlah laporan pengawasan ASN	Jumlah	4000
6.		Sekretariat Dewan		
6.	1.	Persentase Qanun yang ditetapkan	Persen	100
6.	2.	Persentase Anggota DPRK yang menjalankan fungsi	Persen	100
7.		Sekretariat Daerah		
7.	1.	Cakupan Penyediaan Dokumen Lakip, LKPJ, LLPD, IKK, dan EKPOD	Dokumen	4
7.	2.	Cakupan pelaksanaan koordinasi pimpinan daerah	Bulan	12
7.	3.	Cakupan Informasi publik secara elektronik	Bulan	12
7.	4.	Cakupan produk hukum daerah yang difasilitasi	Bulan	12
7.	5.	Cakupan penyelesaian tapal batas daerah	Bulan	12
7.	6.	Cakupan pelaksanaan kegiatan keagamaan	Bulan	12
7.	7.	Cakupan kebijakan ekonomi yang terintegrasi	Bulan	12
7.	8.	Cakupan pelaksanaan kegiatan keistimewaan Aceh	Bulan	12
7.	9.	Cakupan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	Bulan	12
7.	10.	Cakupan pelaksanaan Hari Besar Nasional dan Daerah	Hari Besar	8
8.		Kecamatan		
8.	1.	Cakupan koordinasi pemerintahan Kecamatan, Mukim, Gampong	Bulan	12
8.	2.	Cakupan pelaksanaan kegiatan Syiar Islam	Kegiatan	2
8.	3.	Cakupan pelaksanaan <i>Sawe</i> <i>Gampong</i>	Gampong	68
8.	4.	Cakupan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	Kegiatan	1

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
9.	Penanggulangan Bencana		
9.	1. Cakupan pelayanan bencana kebakaran	Persen	18.39
9.	2. Tingkat waktu tanggap (<i>response time rate</i>) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK)	Persen	100
10.	Keistimewaan dan Kekhususan		
10.	1. Cakupan pelayanan kehidupan beragama	Bulan	12
10.	2. Persentase penurunan pelanggaran syariat	Kasus	50
10.	3. Jumlah Dayah dengan tipe "A"	Dayah	17
10.	4. Jumlah Hafiz/Hafizah	Jumlah	25
10.	5. Persentase penurunan pelanggaran syariat	Kasus	50
10.	6. Cakupan sosialisasi hukum Islam	Bulan	12
10.	7. Cakupan Pembinaan, Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Ulama	Bulan	12
10.	8. Cakupan pelaksanaan pemilihan dan pelantikan anggota Baitul Mal	Kegiatan	-
10.	9. Jumlah penerimaan ZISWAF	Milyar	9.06
10.	10. Cakupan pelaksanaan Pengawasan/Monitoring dan Evaluasi Pendidikan	Bulan	12

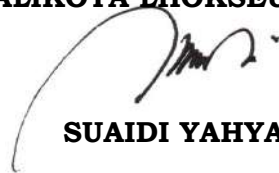
Sumber: RPJM Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022.

BAB VII PENUTUP

Sesuai dengan Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe merupakan pedoman untuk penyusunan rancangan APBK Lhokseumawe Tahun 2020. Dokumen ini berfungsi sebagai acuan dan pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Lhokseumawe dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta sebagai acuan di masyarakat untuk mewujudkan partisipasinya sekaligus mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan.

Peran publik dalam proses perencanaan pembangunan daerah melalui perencanaan yang partisipatif dengan melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan terutama sinkronisasi rencana kegiatan, penyelarasan program dan kegiatan. Keberhasilan pembangunan di Kota Lhokseumawe selain ditentukan oleh kinerja jajaran pemerintah, juga perlu didukung oleh masyarakat dan swasta untuk mengurangi permasalahan dan menjawab tantangan yang ada, sehingga visi dan misi yang tertuang dalam RPJM Kota Lhokseumawe dapat terwujud secara optimal.

WALIKOTA LHOKSEUMAWE



SUAIDI YAHYA

